



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024  
DI SUNGAI PENUH**



**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA V  
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI  
DI JAMBI**

Nomor : 21.A/T/LHP/DJPKN-V.JMB/PPD.01/6/2025  
Tanggal : 13 JUNI 2025



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024  
DI SUNGAI PENUH**

**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA V  
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI  
DI JAMBI**

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN 2024**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 terdiri dari dua laporan, yaitu:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.

Laporan ini memuat:

- a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
- b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaar, dan batasan pemeriksaan; dan
- c. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2024.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Laporan ini memuat:

- a. Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

*Handwritten signature*

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN.....	3
<b>LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024</b>	
1. Laporan Realisasi Anggaran	
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	
3. Neraca	
4. Laporan Operasional	
5. Laporan Arus Kas	
6. Laporan Perubahan Ekuitas	
7. Catatan atas Laporan Keuangan	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

**Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan**

Pemerintah Kota Sungai Penuh bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Sungai Penuh. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

## Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

## Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 21.B/T/LHP/DJPKN-V.JMB/PPD.01/6/2025 tanggal 13 Juni 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jambi, 13 Juni 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Jambi  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Nur Miftahul Lail, S.E., Ak., CA, ERMAP**  
**Register Negara Akuntan No. RNA-11938**

## GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

### 1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

### 2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

### 3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

### 4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kota Sungai Penuh yang memiliki 40 Satuan Kerja Perangkat Daerah.

### 5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2024;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca per 31 Desember 2024;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LRA, LPSAL dan LAK untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LO dan LPE untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada CaLK;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

## 6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

#### **7. Jangka Waktu Pemeriksaan**

Pemeriksaan dilaksanakan selama 28 hari, mulai tanggal 20 April s.d. 17 Mei 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 59/ST/XVIII.JMB/04/2025 tanggal 16 April 2025.

#### **8. Batasan Pemeriksaan**

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan yang tidak teridentifikasi.



# **PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**

## **LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024 (*Audited*)**

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

**SUNGAI PENUH, JUNI 2025**

**PERNYATAAN  
TANGGUNG JAWAB**

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN 2024 (*Audited*)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023



## WALI KOTA SUNGAI PENUH

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sungai Penuh, 13 Juni 2025



## KATA PENGANTAR

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN 2024 (*Audited*)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023



## WALIKOTA SUNGAI PENUH

### KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Pemerintah Kota Sungai Penuh dapat menyusun Laporan Keuangan Tahun 2024 sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024.

Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024 ini disusun sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan dan Penyampaian laporan ini merupakan upaya nyata dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini.

Sungai Penuh, 13 Juni 2025

WALIKOTA SUNGAI PENUH, *ell*  
  
ALFIN

*P*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GRAFIK.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....</b>	<b>1</b>
<b>LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....</b>	<b>3</b>
<b>NERACA .....</b>	<b>4</b>
<b>LAPORAN OPERASIONAL.....</b>	<b>6</b>
<b>LAPORAN ARUS KAS.....</b>	<b>8</b>
<b>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Domisili Entitas dan Informasi Umum.....</b>	<b>I.1</b>
<b>1.2 Organisasi dan Lembaga Legislatif .....</b>	<b>I.2</b>
<b>1.3 Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokok.....</b>	<b>I.3</b>
<b>1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan .....</b>	<b>I.4</b>
<b>1.5 Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan         Kegiatan Operasional .....</b>	<b>I.8</b>
<b>1.6 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan .....</b>	<b>I.9</b>
<b>1.7 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan .....</b>	<b>I.10</b>
<b>1.8 Entitas Pelaporan .....</b>	<b>I.11</b>
<b>1.9 Kebijakan Konversi .....</b>	<b>I.12</b>
<b>BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD .....</b>	<b>II.1</b>
<b>2.1 Ekonomi Makro .....</b>	<b>II.1</b>
<b>2.2 Ikhtisar Kinerja Keuangan .....</b>	<b>II.10</b>
<b>2.3 Kebijakan Keuangan .....</b>	<b>II.11</b>
<b>2.4 Pencapaian Target Kinerja APBD.....</b>	<b>II.13</b>
<b>BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....</b>	<b>III.1</b>
<b>3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja .....</b>	<b>III.1</b>
<b>3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....</b>	<b>III.3</b>
<b>3.3 Realisasi Pendapatan Daerah.....</b>	<b>III.4</b>
<b>3.4 Realisasi Belanja Daerah .....</b>	<b>III.5</b>
<b>3.5 Pembiayaan .....</b>	<b>III.5</b>
<b>BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....</b>	<b>IV.1</b>

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah .....	IV.1
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	IV.1
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan .....	IV.2
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan .....	IV.4
<b>BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....</b>	<b>V.1</b>
<b>BAB V.I LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....</b>	<b>V.I.2</b>
5.1 Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) .....	V.I.2
5.1.1 Pendapatan Daerah .....	V.I.2
5.1.2 Belanja .....	V.I.19
5.1.3 Surplus/(Defisit) .....	V.I.32
5.1.4 Pembiayaan Daerah .....	V.I.33
5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan.....	V.I.34
<b>BAB V.II LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....</b>	<b>V.II.1</b>
5.2 Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).....	V.II.1
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal .....	V.II.1
5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan .....	V.II.1
5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).....	V.II.1
5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya..	V.II.2
5.2.5 Lain-lain .....	V.II.2
5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir.....	V.II.2
<b>BAB V.III NERACA.....</b>	<b>V.III.1</b>
5.3 Penjelasan atas Neraca .....	V.III.1
5.3.1 Aset .....	V.III.1
5.3.2 Kewajiban .....	V.III.31
5.3.3 Ekuitas.....	V.III.34
5.3.4 Kewajiban dan Ekuitas .....	V.III.34
<b>BAB V.IV LAPORAN OPERASIONAL.....</b>	<b>V.IV.1</b>
5.4 Penjelasan atas Laporan Operasional (LO).....	V.IV.1
5.4.1 Pendapatan – LO .....	V.IV.1
5.4.2 Beban – LO .....	V.IV.14
5.4.3 Surplus/Defisit Dari Operasi.....	V.IV.24
5.4.4 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional .....	V.IV.24

5.4.5	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa .....	V.IV.25
5.4.6	Pos Luar Biasa.....	V.IV.25
5.4.7	Surplus/ Defisit – LO.....	V.IV.26
<b>BAB V.V LAPORAN ARUS KAS .....</b>		<b>V.V.1</b>
5.5	<b>Penjelasan atas Laporan Arus Kas (LAK).....</b>	<b>V.V.1</b>
5.5.1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi .....	V.V.1
5.5.2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi .....	V.V.3
5.5.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan .....	V.V.3
5.5.4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris .....	V.V.4
5.5.5	Saldo Akhir Kas .....	V.V.8
<b>BAB V.VI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....</b>		<b>V.VI.1</b>
5.6	<b>Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).....</b>	<b>V.VI.1</b>
5.6.1	Ekuitas Awal .....	V.VI.1
5.6.2	Surplus/Defisit LO .....	V.VI.1
5.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar.....	V.VI.1
5.6.4	Ekuitas Akhir.....	V.VI.2
<b>BAB V.VII KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA.....</b>		<b>V.VII.1</b>
<b>BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON- KEUANGAN.....</b>		<b>V.VI.1</b>
6.1	Domisili dan Bentuk Hukum Entitas.....	V.VI.1
6.2	Keadaan Pegawai Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 ..	V.VI.2
6.3	Manajemen Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2024.....	V.VI.2
<b>BAB VII P E N U T U P.....</b>		<b>V.VII.1</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Daftar Kecamatan dan Kelurahan/Desa Kota Sungai Penuh....	I.1
Tabel 1.2	Luas Daerah Menurut Kecamatan.....	I.2
Tabel 1.3	Jumlah Kursi DPRD Kota Sungai Penuh Periode 2024 s.d 2029 .....	I.3
Tabel 2.1	Lapangan Usaha Komponen PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku).....	II.2
Tabel 2.2	PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023-2024 .....	II.4
Tabel 2.3	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Sungai Penuh, .....	II.6
Tabel 2.4	Rekapitulasi Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan ....	II.6
Tabel 2.5	Rekapitulasi Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan .....	II.7
Tabel 2.6	Rekapitulasi Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik .....	II.8
Tabel 2.7	Rekapitulasi Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Daerah .....	II.8
Tabel 2.8	Ikhtisar Capaian Kinerja Keuangan TA 2024 .....	II.10
Tabel 3.1	Perbandingan antara APBD TA 2024 dengan perubahan terakhir .....	III.1
Tabel 3.2	Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Kinerja.....	III.4
Tabel 3.3	Rekapitulasi Kewajiban Jangka Pendek.....	III.6
Tabel 4.1	Nilai Minimal Aset Tetap Yang Dapat Dikapitalisasi .....	IV.28
Tabel 4.2	Masa Manfaat Aset Tetap .....	IV.32
Tabel 5.1.1	Realisasi Pendapatan Daerah Berdasarkan Kelompok Pendapatan .....	V.I.2
Tabel 5.1.2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Jenis Pendapatan .....	V.I.2
Tabel 5.1.3	Realisasi Pajak Daerah.....	V.I.3
Tabel 5.1.4	Realisasi Retribusi Daerah .....	V.I.4
Tabel 5.1.5	Rincian Realisasi Retribusi Daerah .....	V.I.4
Tabel 5.1.6	Rekapitulasi Lain-Lain PAD yang Sah.....	V.I.7
Tabel 5.1.7	Realisasi Pendapatan Transfer .....	V.I.8
Tabel 5.1.8	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.....	V.I.8
Tabel 5.1.9	Realisasi Dana Perimbangan .....	V.I.9

Tabel 5.1.10 Realisasi DBH Pajak.....	V.I.9
Tabel 5.1.11 Realisasi DBH Bukan Pajak/SDA .....	V.I.10
Tabel 5.1.12 Rincian Penerimaan DAU Tahun 2024.....	V.I.11
Tabel 5.1.13 Realisasi DAK Fisik Tahun 2024 .....	V.I.12
Tabel 5.1.14 Realisasi DAK Non FISIK Tahun 2024.....	V.I.12
Tabel 5.1.15 Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah .....	V.I.14
Tabel 5.1.16 Realisasi Pendapatan dari Piutang Bagi Hasil Transfer Antar Daerah .....	V.I.15
Tabel 5.1.17 Piutang Transfer Antar Daerah Per 31 Desember 2024 .....	V.I.15
Tabel 5.1.18 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak .....	V.I.16
Tabel 5.1.19 Realisasi Pendapatan dari Piutang Bagi Hasil Transfer Antar Daerah .....	V.I.16
Tabel 5.1.20 Rincian Dana Bantuan Keuangan .....	V.I.17
Tabel 5.1.21 Rekapitulasi Pendapatan atas Dana Kapitasi JKN pada FKTP/Puskesmas TA 2024.....	V.I.19
Tabel 5.1.22 Rincian Realisasi Belanja .....	V.I.19
Tabel 5.1.23 Realisasi Belanja Operasi .....	V.I.20
Tabel 5.1.24 Realisasi Belanja Pegawai .....	V.I.20
Tabel 5.1.25 Rekapitulasi Belanja Barang dan Jasa.....	V.I.21
Tabel 5.1.26 Belanja Hibah Tahun 2024 .....	V.I.24
Tabel 5.1.27 Rincian Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024.....	V.I.24
Tabel 5.1.28 Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 .....	V.I.25
Tabel 5.1.29 Realisasi Belanja Modal .....	V.I.25
Tabel 5.1.30 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin .....	V.I.26
Tabel 5.1.31 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan .....	V.I.27
Tabel 5.1.32 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan .....	V.I.27
Tabel 5.1.33 Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya.....	V.I.28
Tabel 5.1.34 Rincian Belanja Transfer .....	V.I.29
Tabel 5.1.35 Rincian Transfer Bantuan Keuangan .....	V.I.30
Tabel 5.1.36 Rincian realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2024 .....	V.I.31
Tabel 5.1.37 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2024 .....	V.I.32
Tabel 5.1.38 Surplus/Defisit .....	V.I.32
Tabel 5.1.39 Rincian Pembiayaan Daerah .....	V.I.33

Tabel 5.1.40	Realisasi SiLPA.....	V.I.34
Tabel 5.1.41	Rincian SiLPA TA 2024.....	V.I.34
Tabel 5.2.1	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.....	V.II.1
Tabel 5.2.2	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)....	V.II.2
Tabel 5.2.3	Rincian Saldo Anggaran Lebih dana mengikat Tahun 2024 dan SAL Akhir Tahun 2024 .....	V.II.3
Tabel 5.3.1	Rincian Saldo Aset .....	V.III.1
Tabel 5.3.2	Rincian Saldo Aset Lancar.....	V.III.1
Tabel 5.3.3	Perbandingan Kas Dana BOSP dengan Kas di Rekening Giro .....	V.III.5
Tabel 5.3.4	Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 .....	V.III.5
Tabel 5.3.5	Perbandingan Kas Dana Kapitasi pada FKTP dengan Kas di Rekening Giro .....	V.III.6
Tabel 5.3.6	Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP .....	V.III.6
Tabel 5.3.7	Rekapitulasi Kas Lainnya .....	V.III.7
Tabel 5.3.8	Rekapitulasi Piutang Pajak .....	V.III.8
Tabel 5.3.9	Piutang Pajak Daerah Berdasarkan Umur Piutang Per 31 Desember 2024.....	V.III.48
Tabel 5.3.10	Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2024 .....	V.III.9
Tabel 5.3.11	Piutang Retribusi Daerah Berdasarkan Umur Piutang Per 31 Desember 2024.....	V.III.9
Tabel 5.3.12	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Per 31 Desember 2024 .....	V.III.10
Tabel 5.3.13	Piutang Transfer Pemerintah Pusat Per 31 Desember 2024 ....	V.III.12
Tabel 5.3.14	Piutang Transfer Antar Daerah Per 31 Desember 2024 .....	V.III.12
Tabel 5.3.15	Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	V.III.13
Tabel 5.3.16	Rekapitulasi Persediaan .....	V.III.14
Tabel 5.3.17	Investasi Jangka Panjang .....	V.III.15
Tabel 5.3.18	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 .....	V.III.15
Tabel 5.3.19	Rincian Penyertaan Modal pada Bank Jambi.....	V.III.16
Tabel 5.3.20	Rekapitulasi Saldo Aset Tetap .....	V.III.16
Tabel 5.3.21	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Tanah .....	V.III.17
Tabel 5.3.22	Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin .....	V.III.18

Tabel 5.3.23 Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak Memenuhi Nilai Kapitalisasi .....	V.III.20
Tabel 5.3.24 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan .....	V.III.21
Tabel 5.3.25 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan .....	V.III.23
Tabel 5.3.26 Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya .....	V.III.24
Tabel 5.3.27 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Lainnya .....	V.III.24
Tabel 5.3.28 Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan .....	V.III.25
Tabel 5.3.29 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan .....	V.III.26
Tabel 5.3.30 Rekapitulasi Aset Lainnya .....	V.III.27
Tabel 5.3.31 Rekapitulasi Aset lain-lain .....	V.III.28
Tabel 5.3.32 Rekapitulasi Mutasi Aset Lain-lain .....	V.III.29
Tabel 5.3.33 Rekapitulasi Properti Investasi .....	V.III.30
Tabel 5.3.34 Rekapitulasi Kewajiban .....	V.III.31
Tabel 5.3.35 Rekapitulasi Kewajiban Jangka Pendek .....	V.III.32
Tabel 5.3.36 Rekapitulasi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) .....	V.III.32
Tabel 5.3.37 Rekapitulasi Utang Jangka Pendek Lainnya .....	V.III.33
Tabel 5.3.38 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya .....	V.III.34
Tabel 5.3.39 Kewajiban dan Ekuitas .....	V.III.34
Tabel 5.4.1 Rekapitulasi Pendapatan – LO .....	V.IV.1
Tabel 5.4.2 Pendapatan - LO Tahun 2024 .....	V.IV.1
Tabel 5.4.3 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO .....	V.IV.2
Tabel 5.4.4 Rekapitulasi Pajak Daerah – LO .....	V.IV.2
Tabel 5.4.5 Pajak Daerah – LO .....	V.IV.3
Tabel 5.4.6 Rekapitulasi Retribusi Daerah – LO .....	V.IV.3
Tabel 5.4.7 Retribusi Daerah – LO Tahun 2024 .....	V.IV.4
Tabel 5.4.8 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO Tahun 2024 .....	V.IV.5
Tabel 5.4.9 Rekapitulasi Lain-Lain PAD Yang Sah – LO .....	V.IV.5
Tabel 5.4.10 Lain-lain PAD yang Sah – LO .....	V.IV.6
Tabel 5.4.11 Rekapitulasi Pendapatan Transfer - LO .....	V.IV.6
Tabel 5.4.12 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO .....	V.IV.7
Tabel 5.4.13 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO .....	V.IV.7
Tabel 5.4.14 Rekapitulasi Dana Perimbangan - LO .....	V.IV.7
Tabel 5.4.15 Dana Perimbangan – LO .....	V.IV.8

Tabel 5.4.16 Realisasi DBH Pajak – LO .....	V.IV.8
Tabel 5.4.17 DBH Pajak – LO.....	V.IV.8
Tabel 5.4.18 Realisasi DBH Bukan Pajak/SDA - LO.....	V.IV.9
Tabel 5.4.19 DBH Bukan Pajak/SDA – LO .....	V.IV.9
Tabel 5.4.20 Pendapatan Transfer antar Daerah – LO .....	V.IV.11
Tabel 5.4.21 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil - LO .....	V.IV.11
Tabel 5.4.22 Pendapatan Bagi Hasil - LO .....	V.IV.12
Tabel 5.4.23 Bantuan Keuangan - LO .....	V.IV.12
Tabel 5.4.24 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO.....	V.IV.13
Tabel 5.4.25 Rekapitulasi Pendapatan Hibah - LO.....	V.IV.13
Tabel 5.4.26 Pendapatan Hibah - LO.....	V.IV.13
Tabel 5.4.27 Pendapatan Hibah Persediaan .....	V.IV.14
Tabel 5.4.28 Rekapitulasi Beban – LO Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	V.IV.14
Tabel 5.4.29 Rekapitulasi Beban Operasi – LO.....	V.IV.15
Tabel 5.4.30 Rekapitulasi Beban Barang.....	V.IV.16
Tabel 5.4.31 Beban Barang Tahun 2024.....	V.IV.16
Tabel 5.4.32 Rekapitulasi Beban Jasa.....	V.IV.17
Tabel 5.4.33 Beban Jasa Tahun 2024 .....	V.IV.17
Tabel 5.4.34 Beban Pemeliharaan .....	V.IV.18
Tabel 5.4.35 Beban Perjalanan Dinas .....	V.IV.18
Tabel 5.4.36 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/PihakLain/.....	V.IV.19
Tabel 5.4.37 Beban Barang dan Jasa BOS - LO .....	V.IV.19
Tabel 5.4.38 Beban Barang dan Jasa BLUD.....	V.IV.20
Tabel 5.4.39 Beban Hibah Tahun 2024 .....	V.IV.21
Tabel 5.4.40 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan Tahun 2023.....	V.IV.21
Tabel 5.4.41 Rekapitulasi Beban Penyisihan Piutang .....	V.IV.22
Tabel 5.4.42 Rekapitulasi Beban Transfer.....	V.IV.23
Tabel 5.4.43 Rekapitulasi Beban Transfer.....	V.IV.23
Tabel 5.4.44 Beban Bantuan Keuangan – LO.....	V.IV.24
Tabel 5.4.45 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 ..	V.IV.25
Tabel 5.4.46 Surplus/Defisit – LO.....	V.IV.26
Tabel 5.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi .....	V.V.1
Tabel 5.5.2 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi.....	V.V.2

Tabel 5.5.3	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi.....	V.V.2
Tabel 5.5.4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi .....	V.V.3
Tabel 5.5.5	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi .....	V.V.3
Tabel 5.5.6	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris .....	V.V.4
Tabel 5.5.7	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris.....	V.V.4
Tabel 5.5.8	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga.....	V.V.5
Tabel 5.5.9	Kiriman Uang Masuk .....	V.V.6
Tabel 5.5.10	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris.....	V.V.6
Tabel 5.5.11	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga.....	V.V.7
Tabel 5.5.12	Kiriman Uang Keluar .....	V.V.7
Tabel 5.5.13	Saldo Akhir Kas.....	V.V.8
Tabel 5.5.14	Selisih Saldo Akhir Kas dengan LPSAL.....	V.V.9
Tabel 5.6.1	Laporan Perubahan Ekuitas .....	V.VI.1
Tabel 5.6.2	Ekuitas Akhir Tahun 2024 dan Tahun 2023 .....	V.VI.2
Tabel 6.1	Rincian Jumlah PNS pada Pemkot Sungai Penuh Tahun 2024.....	VI.2

## DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 2.1 PDRB Tahun 2020 – 2024 .....	II.2
Grafik 2.2 Komposisi Lapangan Usaha Pada PDRB Tahun 2024 .....	II.3
Grafik 2.3 Perkembangan Pendapatan dan Belanja TA 2024 dan 2023 (dalam miliar rupiah) .....	II.11
Grafik 3.2 Grafik perbandingan Anggaran realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.....	III.6

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Entitas dalam Lingkup Pemkot Sungai Penuh
Lampiran 2	Ringkasan Anggaran Perubahan APBD Kota Sungai Penuh TA 2024
Lampiran 3	Rincian Pendapatan Daerah per sub rincian objek TA 2024
Lampiran 4	Rincian Realisasi Pajak Daerah TA 2024
Lampiran 5	Rincian Realisasi Retribusi Daerah TA 2024
Lampiran 6	Rincian Realisasi Pendapatan dari pengembalian per sub rincian objek TA 2024
Lampiran 7	Rincian Anggaran dan Realisasi DAK Fisik TA 2024
Lampiran 8	Realisasi Pendapatan Dana BOS TA 2024
Lampiran 9	Rekapitulasi Belanja TA 2024
Lampiran 10.a.b	Rincian Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 Per SKPD dan Belanja Pegawai per sub rincian objek TA 2024
Lampiran 11.a.b	Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 Per SKPD dan Belanja Barang dan Jasa per sub rincian objek TA 2024
Lampiran 12.a.b	Rincian Belanja Modal TA 2024 Per SKPD dan Realisasi Belanja Modal TA 2024 per rekening
Lampiran 13	Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan Peruntukannya
Lampiran 14.a.b	Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 per SKPD dan Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per sub rincian objek TA 2024
Lampiran 15 a.b	Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 Per SKPD dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 per sub rincian objek
Lampiran 16.a.b	Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 Per SKPD dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 per sub rincian objek
Lampiran 17.a.b	Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 Per SKPD dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per sub rincian objek TA 2024
Lampiran 18	Rincian Transfer Bagi Hasil Kota Sungai Penuh TA 2024
Lampiran 19.a.b.c	Rincian Realisasi Dana Desa, Rincian Realisasi Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi kepada Desa TA 2024
Lampiran 20	Rincian Selisih Kas di BLUD per 31 Desember 2024
Lampiran 21.a.b	Daftar Rekening Giro Dana BOS pada Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh dan Daftar Rincian Kas Dana BOS

Lampiran	22.a.b	Daftar Rekening BOP PAUD Kesetaraan dan Rincian Kas Dana BOSP
Lampiran	23	Daftar rincian Kas Dana BOK Puskesmas
Lampiran	24	Daftar rekening Giro FKTP pada Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh TA 2024
Lampiran	25	Rincian Piutang Pajak
Lampiran	26.a.b.c	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan, Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
Lampiran	27	Rincian Piutang Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2024
Lampiran	28	Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024
Lampiran	29 a.b.c.d. e.f.g.h	Rincian Jenis, Umur, Kualitas Piutang dan Besaran Penyisihan Piutang per 31 Desember 2024
Lampiran	30.a.b	Rincian Beban Dibayar Dimuka
Lampiran	31.a.b	Rincian Persediaan SKPD per 31 Desember 2024 dan Obat <i>expired</i>
Lampiran	32	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Tanah per SKPD
Lampiran	33.a.b.c	Rincian Tanah bersertifikat, yang belum bersertifikat, dan sedang dalam proses
Lampiran	34	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Lampiran	35	Rincian Pinjam pakai Kendaraan bermotor roda empat yang dimanfaatkan oleh pihak lain
Lampiran	36	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Lampiran	37	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
Lampiran	38	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya
Lampiran	39.a.b	Rincian Aset Tetap KDP 2024 dan Rincian Aset Tetap KDP berdasarkan jenis Belanja Modal dan Kemajuan Fisik
Lampiran	40	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per SKPD
Lampiran	41	Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD
Lampiran	42	Rincian Amortisasi Per SKPD TA 2024
Lampiran	43 a.b.c.d	Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Lain-lain, Rincian Aset Tetap Pinjam Pakai Per SKPD, Rincian Aset Tetap Rusak Berat per SKPD, dan Rincian Aset yang diserahkan secara Operasional ke PDAM Tirta Khayangan TA 2024

Lampiran 44	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2024
Lampiran 45	Rincian Properti Investasi
Lampiran 46	Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga
Lampiran 47	Rincian Utang belanja kepada pihak ke tiga pada RSUD Mayjen H.A Thalib
Lampiran 48	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024
Lampiran 49	Rincian Beban Persediaan TA 2024
Lampiran 50	Rincian Golongan Pegawai Per Satuan Kerja pada lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh per 31 Desember 2024



## DAFTAR SINGKATAN

### A

ADD	:	Alokasi Dana Desa
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ATK	:	Alat Tulis Kantor

### B

BBNKB	:	Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor
BKU	:	Buku Kas Umum
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BNI	:	Bank Negara Indonesia
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BOT	:	<i>Build Operate Transfer</i>
BPD	:	Bank Pembangunan Daerah
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
BPK RI	:	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BRI	:	Bank Rakyat Indonesia
BUD	:	Bendahara Umum Daerah
Bulog	:	Badan Urusan Logistik
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara

### C

CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
------	---	-------------------------------

### D

DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DBH	:	Dana Bagi Hasil
DOB	:	Daerah Otonomi Baru
DP2D2	:	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi
DPPID	:	Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah
DPR RI	:	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

### F

FKTP	:	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
FIFO	:	<i>First In First Out</i>

### G

GU	:	Ganti Uang
----	---	------------

**I**

IMB : Izin Mendirikan Bangunan

**J**

JKN : Jaminan Kesehatan Nasional

**K**

KAK : Kerangka Acuan Kerja  
Kasda : Kas Daerah  
KMK : Keputusan Menteri Keuangan  
KPP : Kantor Pelayanan Pajak  
KKN : Korupsi, Kolusi dan Nepotisme  
KDH : Kepala Daerah  
KDP : Konstruksi Dalam Pengerjaan

**L**

LAK : Laporan Arus Kas  
LAKIP : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  
LKPD : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  
LO : Laporan Operasional  
LPE : Laporan Perubahan Ekuitas  
LPj : Laporan Pertanggungjawaban  
LPSAL : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih  
LRA : Laporan Realisasi Anggaran  
LS : Langsung

**M**

Migas : Minyak dan Gas

**N**

NOP : Nomor Objek Pajak

**O**

Ormas : Organisasi Masyarakat  
Otsus : Otonomi Khusus

**P**

PAD : Pendapatan Asli Daerah  
Panwaslu : Panitia Pengawas Pemilu  
Parpol : Partai Politik  
PAUD : Pendidikan Anak Usia Dini  
PBB : Pajak Bumi dan Bangunan  
PBB-P2 : Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan  
PBn1 : Pajak Pembangunan 1  
PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum



PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemkot	:	Pemerintah Kota
Perda	:	Peraturan Daerah
Permendagri	:	Peraturan Menteri Dalam Negeri
Perwako	:	Peraturan Walikota
PFK	:	Perhitungan Pihak Ketiga
PHO	:	Provisional Hand Over
PJKMU	:	Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Umum
PKB	:	Pajak Kendaraan Bermotor
PMI	:	Palang Merah Indonesia
PNPM	:	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
Polres	:	Polisi Resort
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPK	:	Pejabat Penatausahaan Keuangan
PPKD	:	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PTAPD	:	Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa
Puskesmas	:	Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu	:	Puskesmas Pembantu

## R

R/K	:	Rekening Koran
R/K PPKD	:	Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Raskin	:	Rakyat Miskin
RKPD	:	Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RKUD	:	Rekening Kas Umum Daerah
RKUN	:	Rekening Kas Umum Negara
RTS-PM	:	Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham
RKAS	:	Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah

## S

SAKP	:	Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintah
Samisake	:	Satu Milyar Satu Kecamatan
SD	:	Sekolah Dasar
SDA	:	Sumber Daya Alam
SiLPA	:	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SILPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Sismiop	:	Sistem Manajemen Informasi Objek PBB-P2
SKP	:	Surat Ketetapan Pajak
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPKD	:	Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
SKP-D	:	Surat Ketetapan Pajak Daerah
SKPT	:	Surat Ketetapan Pajak Tahunan
SKR	:	Surat Ketetapan Retribusi
SKR-D	:	Surat Ketetapan Retribusi Daerah

SKTJM	:	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
SLB	:	Sekolah Luar Biasa
SMA	:	Sekolah Menengah Atas
SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	:	Sekolah Menengah Pertama
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SPj	:	Surat Pertanggungjawaban
SPPT	:	Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
STRD	:	Surat Tagihan Retribusi Daerah
STS	:	Surat Tanda Setoran

### T

TA	:	Tahun Anggaran
TBP	:	Tanda Bukti Pembayaran
TDF	:	<i>Treasury Deposit Facility</i>
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
TNKS	:	Taman Nasional Kerinci Seblat
TP-TGR	:	Tuntutan Perbendaharaan - Tuntutan Ganti Rugi
TU	:	Tambahan Uang

### U

UP	:	Uang Persediaan
UPTD	:	Unit Pelayanan Teknis Daerah
UU	:	Undang – Undang
UYHD	:	Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan

### W

WP	:	Wajib Pajak
WPODN	:	Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

# LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN 2024 (*Audited*)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) KOMPARATIF



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Cat.	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
			Rp.	Rp.		Rp.
1	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>5.1.1</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>5.1.1.1</b>				
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	13.577.304.750,00	9.073.056.124,00	66,83	9.125.516.323,00
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	7.793.112.000,00	2.626.488.748,00	33,70	2.221.045.347,50
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	12.056.605.045,00	12.056.605.045,86	100,00	11.966.693.301,67
6	Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.4	69.754.781.000,00	42.615.840.558,42	61,09	46.321.373.135,60
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>103.181.802.795,00</b>	<b>66.371.990.476,28</b>	<b>64,33</b>	<b>69.634.628.107,77</b>
8	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>5.1.1.2</b>				
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>5.1.1.2.1</b>	<b>681.881.534.954,00</b>	<b>671.876.447.122,00</b>	<b>98,53</b>	<b>629.717.483.674,00</b>
10	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>5.1.1.2.1.1</b>	<b>626.404.715.954,00</b>	<b>614.376.404.122,00</b>	<b>98,08</b>	<b>569.922.166.886,00</b>
11	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	5.1.1.2.1.1.1	11.790.964.000,00	11.742.757.000,00	99,59	11.799.236.112,00
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam (SDA)	5.1.1.2.1.1.2	58.465.832.000,00	58.465.832.000,00	100,00	34.579.411.746,00
13	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.1.3	468.286.587.000,00	456.377.639.574,00	97,46	422.504.521.234,00
14	Dana Alokasi Khusus (DAK) FISIK	5.1.1.2.1.1.4	30.011.433.000,00	29.632.981.639,00	98,74	41.081.776.282,00
15	Dana Alokasi Khusus (DAK) NON FISIK	5.1.1.2.1.1.5	57.849.899.954,00	58.157.193.909,00	100,53	59.957.221.512,00
16	<b>DANA INSENTIF DAERAH (DID)</b>	<b>5.1.1.2.1.2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.400.931.000,00</b>
17	Insentif Fiskal	5.1.1.2.1.2.1	-	-	-	10.400.931.000,00
18	<b>DANA DESA</b>	<b>5.1.1.2.1.3</b>	<b>48.391.558.000,00</b>	<b>50.414.782.000,00</b>	<b>104,18</b>	<b>49.394.385.788,00</b>
19	DANA DESA	5.1.1.2.1.3.1	48.391.558.000,00	50.414.782.000,00	104,18	49.394.385.788,00
20	<b>INSENTIF FISKAL</b>	<b>5.1.1.2.1.4</b>	<b>7.085.261.000,00</b>	<b>7.085.261.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
21	Insentif Fiskal	5.1.1.2.1.4.1	7.085.261.000,00	7.085.261.000,00	100,00	-
22	<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>	<b>5.1.1.2.2</b>	<b>60.903.481.904,00</b>	<b>50.749.310.988,00</b>	<b>83,33</b>	<b>57.192.938.931,00</b>
23	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.2.1	53.603.481.904,00	48.279.310.988,00	90,07	49.892.938.931,00
24	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.2.2	7.300.000.000,00	2.470.000.000,00	33,84	7.300.000.000,00
25	<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>5.1.1.2.2</b>	<b>742.785.016.858,00</b>	<b>722.625.758.110,00</b>	<b>97,29</b>	<b>686.910.422.605,00</b>
26	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>5.1.1.3</b>				
27	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	-	-	-	-
28	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	4.796.864.474,00	4.725.558.097,00	98,51	4.651.197.036,58
29	<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>		<b>4.796.864.474,00</b>	<b>4.725.558.097,00</b>	<b>98,51</b>	<b>4.651.197.036,58</b>
30	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>5.1.1</b>	<b>850.763.684.127,00</b>	<b>793.723.306.683,28</b>	<b>93,30</b>	<b>761.196.247.749,35</b>
31	<b>BELANJA</b>	<b>5.1.2</b>				
32	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.1.2.1</b>				
33	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	373.842.812.743,00	348.426.234.322,10	93,20	309.353.484.368,40
34	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	229.983.205.254,00	208.745.596.558,42	90,77	231.292.642.188,30
35	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	74.000.000,00
36	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	18.268.375.060,00	17.959.918.113,00	98,31	15.903.623.278,00
37	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00
38	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>5.1.2.1</b>	<b>622.394.393.057,00</b>	<b>575.431.748.993,52</b>	<b>92,45</b>	<b>556.823.749.834,70</b>
39	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.1.2.2</b>				
40	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	461.229.500,00	364.792.231,20	79,09	1.525.209.060,89
41	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	38.280.235.111,00	29.164.581.067,00	76,19	24.907.300.059,16
42	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	35.891.327.249,00	34.969.287.253,47	97,43	31.258.253.582,06
43	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	55.067.426.209,00	54.674.175.128,72	99,29	57.175.318.024,58
44	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	10.175.211.865,00	10.355.974.556,07	101,78	14.752.142.149,14
45	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	800.000.000,00	-	-	-
46	<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>5.1.2.2</b>	<b>140.675.429.934,00</b>	<b>129.528.810.236,46</b>	<b>92,08</b>	<b>129.618.222.875,83</b>
47	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.1.2.3</b>				
48	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	2.333.881.689,00	1.187.186.916,00	50,87	-
49	<b>Jumlah Belanja Tidak Terduga</b>	<b>5.1.2.3</b>	<b>2.333.881.689,00</b>	<b>1.187.186.916,00</b>	<b>50,87</b>	<b>-</b>
50	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>5.1.2.4</b>				
51	Belanja Transfer	5.1.2.4.1	107.618.953.516,00	104.129.646.031,00	96,76	102.258.624.204,00
52	<b>Jumlah Belanja Transfer</b>	<b>5.1.2.4</b>	<b>107.618.953.516,00</b>	<b>104.129.646.031,00</b>	<b>96,76</b>	<b>102.258.624.204,00</b>
53	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>5.1.2</b>	<b>873.022.658.196,00</b>	<b>810.277.392.176,98</b>	<b>92,81</b>	<b>788.700.596.914,53</b>
54	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>5.1.3</b>	<b>(22.258.974.069,00)</b>	<b>(16.554.085.493,70)</b>	<b>74,37</b>	<b>(27.504.349.165,18)</b>

R

NO	URAIAN	Cat.	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)	REALISASI 2023
			Rp.	Rp.		Rp.
55	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	5.1.4				
56	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	5.1.4.1				
57	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.4.1.1	22.258.974.069,00	22.258.974.069,79	100,00	49.763.323.234,97
58	Koreksi Silpa	5.1.4.1.2	-	-	-	-
59	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	5.1.4.1	22.258.974.069,00	22.258.974.069,79	100,00	49.763.323.234,97
61	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	5.1.4.2				
62	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.1.4.2.1	-	-	-	-
63	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	5.1.4.2	-	-	-	-
64	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	5.1.4	22.258.974.069,00	22.258.974.069,79	100,00	49.763.323.234,97
65	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	5.1.5	-	5.704.888.576,09	-	22.258.974.069,79

Laporan Realisasi Anggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



**LAPORAN PERUBAHAN  
SALDO ANGGARAN LEBIH**

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN 2024 (*Audited*)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

## 2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL) KOMPARATIF



### LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Cat.	2024	2023
			Rp.	Rp.
1	SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	5.2.1	22.258.114.615,83	49.763.323.234,97
2	PENGUNAAN SAL SEBAGAI PENERIMAAN PEMBIAYAAN TAHUN BERJALAN	5.2.2	22.258.974.069,79	49.763.323.234,97
3	<b>SUB TOTAL</b>		<b>(859.453,96)</b>	-
4	SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)	5.2.3	5.704.888.576,09	22.258.974.069,79
5	<b>SUB TOTAL</b>		<b>5.704.029.122,13</b>	<b>22.258.974.069,79</b>
6	KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	5.2.4	-	(859.453,96)
7	LAIN-LAIN	5.2.5	859.453,96	-
8	<b>SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR</b>	5.2.6	<b>5.704.888.576,09</b>	<b>22.258.114.615,83</b>

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



# NERACA

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN 2024 (*Audited*)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

### 3. NERACA KOMPARATIF



## NERACA

### PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

Per 31 Desember 2024 dan 2023

NO.	URAIAN	Cat.	2024	2023
			Rp.	Rp.
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>5.3.1</b>		
<b>2</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>5.3.1.1</b>		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	4.172.759.599,16	18.771.975.415,64
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	-	-
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	-	-
6	Kas di BLUD	5.3.1.1.4	201.507.384,89	2.151.088.971,32
7	Kas Dana BOS	5.3.1.1.5	4.797,67	1.699.116,27
8	Kas Dana BOSP	5.3.1.1.6	168.104,60	56.956,34
9	Kas Dana BOK Puskesmas	5.3.1.1.7	1.274.349.557,00	1.279.954.933,00
10	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.8	54.570.166,95	626.032,25
11	Kas Lainnya	5.3.1.1.9	60.123.943,07	230.283.036,92
12	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.10	4.109.029.719,00	3.677.256.027,00
13	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.11	7.205.244.153,00	1.860.165.000,00
14	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.3.1.1.12	12.095.926.131,36	12.056.605.045,86
15	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.13	116.338.000,00	1.429.958.960,00
16	Bagian Lancar Tututan Ganti Rugi	5.3.1.1.14	-	7.576.000,00
17	Piutang Pendapatan Lainnya	5.3.1.1.15	224.044.000,00	224.044.000,00
18	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	5.3.1.1.16	23.714.875.000,00	-
19	Piutang Transfer antar Daerah	5.3.1.1.17	28.098.566.515,00	19.042.710.768,00
20	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.18	(2.847.206.109,66)	(3.127.289.850,49)
21	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.19	162.073.571,58	342.491.468,31
22	Persediaan	5.3.1.1.20	11.390.125.439,00	10.367.794.938,87
<b>23</b>	<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>5.3.1.1</b>	<b>90.032.499.972,62</b>	<b>68.316.996.819,29</b>
<b>24</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>5.3.1.2</b>		
<b>25</b>	<b>Investasi Nonpermanen</b>	<b>5.3.1.2.1</b>		
26	Investasi Nonpermanen Lainnya	5.3.1.2.1	-	-
<b>27</b>	<b>Jumlah Investasi Nonpermanen</b>	<b>5.3.1.2.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28</b>	<b>Investasi Permanen</b>	<b>5.3.1.2.2</b>		
29	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.3.1.2.2.1	89.778.781.855,84	90.687.592.942,26
<b>30</b>	<b>Jumlah Investasi Permanen</b>	<b>5.3.1.2.2</b>	<b>89.778.781.855,84</b>	<b>90.687.592.942,26</b>
<b>31</b>	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang</b>	<b>5.3.1.2</b>	<b>89.778.781.855,84</b>	<b>90.687.592.942,26</b>
<b>32</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>5.3.1.3</b>		
33	Tanah	5.3.1.3.1	206.513.299.134,93	208.078.148.153,93
34	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	547.510.905.994,13	515.560.906.027,13
35	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	630.688.251.014,00	605.283.831.060,69
36	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.308.030.174.536,07	1.267.805.480.492,20
37	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	47.802.667.588,85	39.629.836.168,36
38	Kontruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	28.529.990.139,50	26.918.829.950,65
39	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.324.307.838.266,78)	(1.212.475.221.844,59)
<b>40</b>	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>5.3.1.3</b>	<b>1.444.767.450.140,70</b>	<b>1.450.801.810.008,37</b>
<b>41</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>5.3.1.4</b>		
42	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.4.1	202.331.023,00	202.331.023,00
43	Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.2	23.848.609.984,66	23.848.609.984,66
44	Amortisasi	5.3.1.4.4	(22.970.675.180,26)	(22.353.864.768,77)
45	Aset Lain-lain	5.3.1.4.3	88.899.427.155,71	83.585.154.432,33
46	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.4.5	3.891.870.000,00	26.893.649.000,00
<b>47</b>	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>5.3.1.4</b>	<b>93.871.562.983,11</b>	<b>112.175.879.671,22</b>

P

NO.	URAIAN	Cat.	2024	2023
			Rp.	Rp.
48	<b>PROPERTI INVESTASI</b>	<b>5.3.1.5</b>		
49	Properti Investasi Tanah	5.3.1.5.1	1.699.769.000,00	-
	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.5.2	3.628.770.000,00	-
50	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.5.3	(1.731.225.688,00)	-
51	<b>Jumlah Properti Investasi</b>	<b>5.3.1.5</b>	<b>3.597.313.312,00</b>	-
52	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>5.3.1</b>	<b>1.722.047.608.264,27</b>	<b>1.721.982.279.441,14</b>
53	<b>KEWAJIBAN</b>	<b>5.3.2</b>		
54	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>5.3.2.1</b>		
55	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	59.454.431,21	105.012.501,89
56	Utang Belanja	5.3.2.1.2	16.160.466.078,71	9.848.830.017,26
57	Pendapatan diterima dimuka	5.3.2.1.3	27.981.440,00	20.983.000,00
58	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	4.213.916.055,25	4.251.964.039,38
59	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>5.3.2.1</b>	<b>20.461.818.005,17</b>	<b>14.226.789.558,53</b>
60	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	-		
61	Utang Kepada Pemerintah Pusat	-	-	-
62	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-
63	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>	-	-	-
64	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>5.3.2</b>	<b>20.461.818.005,17</b>	<b>14.226.789.558,53</b>
65	<b>EKUITAS</b>	<b>5.3.3</b>	<b>1.701.585.790.259,10</b>	<b>1.707.755.489.882,61</b>
66	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>5.3.4</b>	<b>1.722.047.608.264,27</b>	<b>1.721.982.279.441,14</b>

Neraca merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan





# LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN 2024 (*Audited*)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

4. LAPORAN OPERASIONAL (LO) KOMPARATIF



LAPORAN OPERASIONAL  
 PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
 Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Cat.	2024	2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
			Rp.	Rp.		
1	<b>PENDAPATAN DAERAH - LO</b>	<b>5.4.1</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO</b>	<b>5.4.1.1</b>				
3	Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	9.499.361.376,00	9.539.244.811,00	(39.883.435,00)	(0,42)
4	Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	44.909.827.780,00	2.988.606.847,50	41.921.220.932,50	1.402,70
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	12.095.926.131,36	24.023.298.347,53	(11.927.372.216,17)	(49,65)
6	Lain-lain PAD yang sah - LO	5.4.1.1.4	5.915.798.987,42	46.086.310.739,66	(40.170.511.752,24)	(87,16)
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO</b>	<b>5.4.1.1</b>	<b>72.420.914.274,78</b>	<b>82.637.460.745,69</b>	<b>(10.216.546.470,91)</b>	<b>(12,36)</b>
8	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	<b>5.4.1.2</b>				
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LO</b>	<b>5.4.1.2.1</b>	<b>622.174.761.122,00</b>	<b>650.177.465.516,00</b>	<b>(28.002.704.394,00)</b>	<b>(4,31)</b>
10	<b>DANA PERimbangan - LO</b>	<b>5.4.1.2.1.1</b>	<b>615.089.500.122,00</b>	<b>590.382.148.728,00</b>	<b>24.707.351.394,00</b>	<b>4,18</b>
11	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak - LO	5.4.1.2.1.1.1	12.771.326.000,00	12.409.254.700,00	362.071.300,00	2,92
12	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam (SDA) - LO	5.4.1.2.1.1.2	58.150.359.000,00	54.429.375.000,00	3.720.984.000,00	6,84
13	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	5.4.1.2.1.1.3	456.377.639.574,00	422.504.521.234,00	33.873.118.340,00	8,02
14	Dana Alokasi Khusus (DAK) FISIK - LO	5.4.1.2.1.1.4	29.632.981.639,00	41.081.776.282,00	(11.448.794.643,00)	(27,87)
15	Dana Alokasi Khusus (DAK) NON FISIK - LO	5.4.1.2.1.1.5	58.157.193.909,00	59.957.221.512,00	(1.800.027.603,00)	(3,00)
16	<b>DANA INSENTIF DAERAH (DID) - LO</b>	<b>5.4.1.2.1.2</b>	<b>-</b>	<b>10.400.931.000,00</b>	<b>(10.400.931.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
17	DID - LO	5.4.1.2.1.2	-	10.400.931.000,00	(10.400.931.000,00)	(100,00)
18	<b>DANA DESA - LO</b>	<b>5.4.1.2.1.3</b>	<b>-</b>	<b>49.394.385.788,00</b>	<b>(49.394.385.788,00)</b>	<b>(100,00)</b>
19	DANA DESA - LO	5.4.1.2.1.3	-	49.394.385.788,00	(49.394.385.788,00)	(100,00)
20	<b>INSENTIF FISKAL - LO</b>	<b>5.4.1.2.1.4</b>	<b>7.085.261.000,00</b>	<b>-</b>	<b>7.085.261.000,00</b>	<b>(100,00)</b>
21	Insentif Fiskal - LO	5.4.1.2.1.4	7.085.261.000,00	-	7.085.261.000,00	(100,00)
22	<b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH-LO</b>	<b>5.4.1.2.2</b>	<b>59.805.166.735,00</b>	<b>62.307.351.445,00</b>	<b>(2.502.184.710,00)</b>	<b>(4,02)</b>
23	Pendapatan Bagi Hasil - LO	5.4.1.2.2.1	52.505.166.735,00	55.007.351.445,00	(2.502.184.710,00)	(4,55)
24	Bantuan Keuangan	5.4.1.2.2.2	7.300.000.000,00	7.300.000.000,00	-	-
25	<b>Jumlah Pendapatan Transfer - LO</b>	<b>5.4.1.2</b>	<b>681.979.927.857,00</b>	<b>712.484.816.961,00</b>	<b>(30.504.889.104,00)</b>	<b>(4,28)</b>
26	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	<b>5.4.1.3</b>				
27	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3.1	7.837.294.038,52	30.566.139.969,00	(22.728.845.930,48)	(74,36)
28	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.3.2	4.725.558.097,00	4.651.197.036,58	74.361.060,42	1,60
29	<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LO</b>	<b>5.4.1.3</b>	<b>12.562.852.135,52</b>	<b>35.217.337.005,58</b>	<b>(22.654.484.870,06)</b>	<b>(64,33)</b>
30	<b>JUMLAH PENDAPATAN - LO</b>	<b>5.4.1</b>	<b>766.963.694.267,30</b>	<b>830.339.614.712,27</b>	<b>(63.375.920.444,97)</b>	<b>(7,63)</b>
31	<b>BEBAN</b>	<b>5.4.2</b>				
32	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>5.4.2.1</b>				
33	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	348.426.234.322,10	309.353.484.368,40	39.072.749.953,70	12,63
34	Beban Barang	5.4.2.1.2	45.123.303.709,21	38.423.512.249,05	6.699.791.460,16	17,44
35	Beban Jasa	5.4.2.1.3	69.764.607.904,92	68.574.591.174,59	1.190.016.730,33	1,74
36	Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.4	13.881.328.531,54	11.912.959.197,29	1.968.369.334,25	16,52
37	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.5	55.927.816.678,34	62.314.564.110,00	(6.386.747.431,66)	(10,25)
38	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masvarakat	5.4.2.1.6	2.946.190.320,03	2.535.933.816,00	410.256.504,03	16,18
39	Beban barang dan Jasa BOS	5.4.2.1.7	10.215.407.332,21	8.368.794.361,39	1.846.612.970,82	22,07
40	Beban barang dan Jasa BOSP	5.4.2.1.8	184.572.000,00	-	184.572.000,00	-
41	Beban barang dan Jasa BLUD	5.4.2.1.9	40.367.407.673,54	38.103.637.933,70	2.263.769.739,84	5,94
42	Beban Hibah	5.4.2.1.10	18.047.400.907,00	15.920.251.558,82	2.127.149.348,18	13,36
43	Beban Subsidi	5.4.2.1.11	100.000.000,00	74.000.000,00	26.000.000,00	35,14
44	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.12	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-
45	<b>Jumlah Beban Operasi</b>	<b>5.4.2.1</b>	<b>605.184.269.378,89</b>	<b>555.781.728.769,24</b>	<b>49.402.540.609,65</b>	<b>8,89</b>
46	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>	<b>5.4.2.2</b>				
47	Beban Penyusutan	5.4.2.2.1	114.196.370.597,59	110.455.709.879,92	3.740.660.717,67	3,39
48	Beban Amortisasi	5.4.2.2.2	616.810.411,49	895.641.723,24	(278.831.311,75)	(31,13)
49	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.2.3	889.758.560,79	1.531.424.829,15	(641.666.268,36)	(41,90)
50	Beban Lain-lain	5.4.2.2.4	-	408.431.143,20	(408.431.143,20)	(100,00)
51	<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>5.4.2.2</b>	<b>115.702.939.569,87</b>	<b>113.291.207.575,51</b>	<b>2.411.731.994,36</b>	<b>2,13</b>
52	<b>BEBAN TRANSFER</b>	<b>5.4.2.3</b>				
53	Beban Bagi Hasil	5.4.2.3.1	1.089.710.826,00	105.735.210.827,25	(104.645.500.001,25)	(98,97)
54	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.3.2	52.148.834.457,00	549.770.321,00	51.599.064.136,00	9.385,57
55	<b>Jumlah Beban Transfer</b>	<b>5.4.2.3</b>	<b>53.238.545.283,00</b>	<b>106.284.981.148,25</b>	<b>(53.046.435.865,25)</b>	<b>(49,91)</b>
56	<b>BEBAN TAK TERDUGA</b>	<b>5.4.2.4</b>				
57	Beban Tak Terduga	5.4.2.4.1	-	-	-	-
58	<b>Jumlah Beban Tak Terduga</b>	<b>5.4.2.4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
59	<b>JUMLAH BEBAN - LO</b>	<b>5.4.2</b>	<b>774.125.754.231,76</b>	<b>775.357.917.493,00</b>	<b>(1.232.163.261,24)</b>	<b>(0,16)</b>
60	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>5.4.3</b>	<b>(7.162.059.964,46)</b>	<b>54.981.697.219,27</b>	<b>(62.143.757.183,73)</b>	<b>(113,03)</b>

R

NO	URAIAN	Cat.	2024	2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
			Rp.	Rp.	Rp.	
61	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	5.4.4				
62	<b>SURPLUS NON OPERASIONAL</b>	5.4.4.1				
63	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	5.4.4.1		218.381.000,00	(218.381.000,00)	(100,00)
64	<b>Jumlah Surplus Non Operasional</b>	5.4.4.1	-	218.381.000,00	(218.381.000,00)	(100,00)
65	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	5.4.4.2				
66	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.4.2	1.872.609.469,67	4.810.536.908,82	(2.937.927.439,15)	(61,07)
67	<b>Jumlah Defisit Non Operasional</b>	5.4.4.2	1.872.609.469,67	4.810.536.908,82	(2.937.927.439,15)	(61,07)
68	<b>JUMLAH DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	5.4.5	(1.872.609.469,67)	(4.592.155.908,82)	2.719.546.439,15	(59,22)
69	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	5.4.5	(9.034.669.434,13)	50.389.541.310,45	(59.424.210.744,58)	(117,93)
70	<b>POS LUAR BIASA</b>	5.4.6				
71	Beban Luar Biasa	5.4.6	899.736.916,00	-	899.736.916,00	-
72	<b>Jumlah Pos Luar Biasa</b>	-	(899.736.916,00)	-	(899.736.916,00)	-
73	<b>SURPLUS /DEFISIT - LO</b>	5.4.7	(9.934.406.350,13)	50.389.541.310,45	(60.323.947.660,58)	(119,72)

Laporan Operasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



f.

## LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN 2024 (*Audited*)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

## 5. LAPORAN ARUS KAS KOMPARATIF



### LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Cat.	2024	2023
			Rp.	Rp.
<b>1</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.5.1</b>		
<b>2</b>	<b>Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.5.1.1</b>		
3	Pajak Daerah	-	9.073.056.124,00	9.125.516.323,00
4	Retribusi Daerah	-	2.626.488.748,00	2.221.045.347,50
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	12.056.605.045,86	11.966.693.301,67
6	Lain-lain PAD yang Sah	-	42.611.955.558,42	46.102.994.635,60
7	Dana Bagi Hasil Pajak	-	11.742.757.000,00	11.799.236.112,00
8	Bagi Hasil Bukan Pajak	-	58.465.832.000,00	34.579.411.746,00
9	Dana Alokasi Umum	-	456.377.639.574,00	422.504.521.234,00
10	Dana Alokasi Khusus Fisik	-	29.632.981.639,00	41.081.776.282,00
11	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	-	58.157.193.909,00	59.957.221.512,00
12	Dana Insentif Daerah	-	-	10.400.931.000,00
13	Dana Desa	-	50.414.782.000,00	49.394.385.788,00
14	Insentif Fiskal	-	7.085.261.000,00	-
15	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	50.749.310.988,00	57.192.938.931,00
16	Pendapatan Hibah	-	-	-
17	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	4.725.558.097,00	4.651.197.036,58
<b>18</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.1.1</b>	<b>793.719.421.683,28</b>	<b>760.977.869.249,35</b>
<b>19</b>	<b>Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.5.1.2</b>		
20	Belanja Pegawai	-	348.426.234.322,10	309.353.484.368,40
21	Belanja Barang dan Jasa	-	208.745.596.558,42	231.292.642.188,30
22	Belanja Subsidi	-	100.000.000,00	74.000.000,00
23	Belanja Hibah	-	17.959.918.113,00	15.903.623.278,00
24	Bantuan Sosial	-	200.000.000,00	200.000.000,00
25	Bantuan Keuangan	-	-	-
26	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-
27	Belanja Tidak Terduga	-	1.187.186.916,00	-
28	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	-	104.129.646.031,00	102.258.624.204,00
<b>29</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.1.2</b>	<b>680.748.581.940,52</b>	<b>659.082.374.038,70</b>
<b>30</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.5.1</b>	<b>112.970.839.742,76</b>	<b>101.895.495.210,65</b>
<b>31</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>5.5.2</b>		
<b>32</b>	<b>Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>5.5.2.1</b>		
33	Lain-lain PAD yang Sah-Penjualan Peralatan/Mesin	-	-	218.378.500,00
34	Lain-lain PAD yang Sah-Penjualan Bahan-bahan Bekas	-	3.885.000,00	-
35	Lain-lain PAD yang Sah-Penjualan Hasil Peternakan	-	-	-
<b>36</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.2.1</b>	<b>3.885.000,00</b>	<b>218.378.500,00</b>
<b>37</b>	<b>Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>5.5.2.2</b>		
38	Belanja Modal Tanah	-	364.792.231,20	1.525.209.060,89
39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	29.164.581.067,00	24.907.300.059,16
40	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	34.969.287.253,47	31.258.253.582,06
41	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	54.674.175.128,72	57.175.318.024,58
42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	10.355.974.556,07	14.752.142.149,14
43	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-
<b>44</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>5.5.2.2</b>	<b>129.528.810.236,46</b>	<b>129.618.222.875,83</b>
<b>45</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>5.5.2</b>	<b>(129.524.925.236,46)</b>	<b>(129.399.844.375,83)</b>
<b>46</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>5.5.3</b>		
<b>47</b>	<b>Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>5.5.3.1</b>		
48	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	-	-	-
<b>49</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>5.5.3.1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>50</b>	<b>Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>5.5.3.2</b>		
51	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-

P.

NO	URAIAN	Cat.	2024	2023
			Rp.	Rp.
52	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	5.5.3.2	-	-
53	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	5.5.3	-	-
54	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	5.5.4		
55	<b>Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	5.5.4.1		
56	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1	55.358.896.741,54	47.809.554.430,25
57	Kiriman Uang Masuk	5.5.4.1.2	54.100.692,00	
58	Penerimaan Sisa UP Tahun Sebelumnya	5.5.4.1.3	-	47.964.887,64
59	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	5.5.4.1	<b>55.412.997.433,54</b>	<b>47.857.519.317,89</b>
60	<b>Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	5.5.4.2		
61	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	55.404.454.812,22	47.757.797.028,00
62	Kiriman Uang Keluar	5.5.4.2.2	109.104.194,93	-
63	Penerimaan Sisa UP	5.5.4.2.3	-	-
64	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	5.5.4.2	<b>55.513.559.007,15</b>	<b>47.757.797.028,00</b>
65	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	5.5.4	<b>(100.561.573,61)</b>	<b>99.722.289,89</b>
66	<b>Kenaikan / (Penurunan) Kas</b>	-	<b>(16.654.647.067,31)</b>	<b>(27.404.626.875,29)</b>
67	<b>Saldo Awal Kas</b>	-	<b>22.435.684.461,74</b>	<b>49.792.683.631,84</b>
68	<b>Saldo Akhir Kas</b>	5.5.5	<b>5.781.037.394,43</b>	<b>22.435.684.461,74</b>
69	Saldo Akhir Kas di BUD	-	4.172.759.599,16	18.771.975.415,64
70	Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	-	54.570.166,95	626.032,25
71	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-
72	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
73	Saldo Akhir Kas dibendahara BLUD	-	201.507.384,89	2.151.088.971,32
74	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	-	4.797,67	1.699.116,27
75	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOSP	-	168.104,60	56.956,34
76	Saldo Akhir Kas di bendahara BOK Puskesmas	-	1.274.349.557,00	1.279.954.933,00
77	Saldo Kas Lainnya	-	60.123.943,07	230.283.036,92
78	Setara Kas	-	-	-

Laporan Arus Kas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



P.

# LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN 2024 (*Audited*)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

**6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) KOMPARATIF**



**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

NO	URAIAN	Cat.	2024	2023
			Rp.	Rp.
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	1.707.755.489.882,61	1.865.231.639.310,39
2	SURPLUS/ DEFISIT - LO	5.6.2	(9.934.406.350,13)	50.389.541.310,45
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3	3.764.706.726,62	(207.865.690.738,23)
4	Koreksi Nilai Persediaan		-	-
5	Koreksi Ekuitas Lainnya		3.764.706.726,62	(207.865.690.738,23)
6	<b>EKUITAS AKHIR</b>	5.6.4	<b>1.701.585.790.259,10</b>	<b>1.707.755.489.882,61</b>

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

WALI KOTA SUNGAI PENUH, *Alfin*

*Alfin*

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN 2024 (*Audited*)

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Domisili Entitas dan Informasi Umum

Kota Sungai Penuh adalah sebuah kota di Provinsi Jambi dengan julukan Kota Sakti dan Motto “Sahalun suhak, salatuh bdei” yang berarti Kompak dan belandasan mufakat. Kota Sungai Penuh dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2008, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kerinci dan pengesahannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, pada tanggal 8 Oktober 2009.

Kota Sungai Penuh memiliki luas keseluruhan 39.150 ha, 59,2 % atau 23.177,6 ha merupakan kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, sedangkan sekitar 40,8% atau 15.972,4 ha baru merupakan daerah efektif perkotaan. Curah hujan harian rata-rata kota ini dalam satu tahun sekitar 49,4–169,2 mm/tahun, sementara suhu harian rata-rata dalam satu tahun antara 17,2 °C – 29,3 °C dengan kelembaban udara berada pada 39 % rata-rata dalam per tahun dan kecepatan angin rata-rata dalam satu tahun sekitar 13 m/detik.

Wilayah kota Sungai Penuh memiliki topografi berbukit-bukit, berada pada kawasan Bukit Barisan dan hutan tropis dengan ketinggian 650 – 1200 m di atas permukaan laut, dengan luas kemiringan lahan antara 0 – 20% sekitar 6.300 ha, luas daratan bergelombang dengan kemiringan antara 5 – 150% sekitar 1.295 ha, luas daratan curam bergelombang dengan kemiringan antara 16 – 400% sekitar 4.345 ha, dan luas daratan sangat curam yang bergelombang dengan kemiringan antara lebih 400% sekitar 1.295 ha.

Kota Sungai Penuh memiliki 8 kecamatan, 4 kelurahan dan 65 desa. Pada tahun 2024, jumlah penduduknya sebesar 102,224 jiwa dengan luas wilayahnya 364,92 km<sup>2</sup> dan sebaran penduduk 280,13 jiwa/km<sup>2</sup>.

Daftar kecamatan dan kelurahan/desa di Kota Sungaipenuh diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Daftar Kecamatan dan Kelurahan/Desa Kota Sungai Penuh**

Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
15.72.01	Sungaipenuh		3	Desa	Amar Sakti, Gedang, Pasar Baru
		2		Kelurahan	Pasar Sungai Penuh dan Sungai Penuh
15.72.02	Pesisir Bukit		9	Desa	Koto Bento, Koto Dua, Koto Keras, Koto Lolo, Koto Renah, Koto Tengah, Seberang, Sumur Gedang dan Sungai liuk
15.72.03	Hampan Rawang		13	Desa	Cempaka, Dusun Diilir, Kampung Dalam, Koto Beringin, Koto Dian, Koto Teluk, Larik Kemahan, Maliki Air, Paling Serumpun, Simpang Tiga Rawang, Tanjung, Tanjung Muda
15.72.04	Tanah Kampung		13	Desa	Baru Debai, Koto Baru Tanah Kampung, Koto Dumo, Koto Padang, Koto Panap, Koto Pudung, Koto Tengah, Koto Tuo, Mekar Jaya, Pendung Hiang, Sembilan, Tanjung Bunga, Tanjung Karang
15.72.05	Kumun Debai		9	Desa	Air Teluh, Debai, Kumun Hilir, Kumun Mudik, Muara Jaya, Pinggir Air, Renah Kayu Embun, Sandaran Galeh, Ulu Air
15.72.06	Pondok Tinggi		7	Desa	Aur Duri, Karya Bakti, Koto Lebu, Lawang Agung, Permanti, Pondok Agung, Sungai Jernih
		1		Kelurahan	Pondok Tinggi

Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
15.72.07	Koto Baru		6	Desa	Dujung Sakti, Kampung Tengah, Koto Baru, Koto Limau Manis, Permai Indah, Srimenanti
15.72.08	Sungai Bungkal		5	Desa	Koto Tinggi, Pelayang Raya, Sumur Anyir, Sungai Ning, Talang Lindung
		1		Kelurahan	Dusun Baru
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>65</b>		

Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kota Sungai Penuh diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Luas Daerah Menurut Kecamatan**

No.	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase
1	Sungai Penuh	3,14	0,86
2	Pesisir Bukit	18,08	4,96
3	Hamparan Rawang	13,05	3,57
4	Tanah Kampung	11,14	3,05
5	Kumun Debai	148,62	40,73
6	Pondok Tinggi	73,87	20,24
7	Koto Baru	1,92	0,53
8	Sungai Bungkal	95,10	26,06
<b>Total</b>		<b>364,92</b>	<b>100</b>

## 1.2

### Organisasi dan Lembaga Legislatif

Organisasi dan susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 11 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh. Jumlah perangkat daerah Tahun 2024 sebanyak 40, terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 23 Dinas Daerah, 6 Badan Daerah, dan 8 kecamatan.

SOTK Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh berdasarkan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Tahun 2024 Pemerintah Kota Sungai Penuh dipimpin oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode Tahun 2021 s.d. 2024, yang merupakan hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Saat ini Pejabat di lingkungan Kota Sungai Penuh di Pimpin, antara lain sebagai berikut:

- a. Wali Kota : Alfin, S.H.
- b. Wakil Wali Kota : Azhar Hamzah
- c. Sekretaris Daerah : Alpian, S.E., M.M.
- d. Bendahara Umum Daerah : Nasran, S.E, M.Si
- e. Inspektur : Wira Utama, S.Sos., M.AP.

DPRD Kota Sungai Penuh merupakan *stakeholders* yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2024. Anggota DPRD Kota Sungai Penuh masa jabatan periode Tahun 2024 s.d 2029 berjumlah 25 orang, berasal dari 10 partai politik yang diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Kursi DPRD Kota Sungai Penuh Periode 2024 s.d 2029**

No	Nama Partai Politik	Jumlah Kursi di DPRD Kota Sungai Penuh
1	Partai Demokrat	2
2	Partai Gerindra	2
3	Partai Amanat Nasional	3
4	Partai PDI-Perjuangan	3
5	Partai Hanura	1
6	Partai Golkar	5
7	Partai Keadilan Sejahtera	3
8	Partai Persatuan Pembangunan	3
9	Partai Kebangkitan Bangsa	1
10	Partai Nasdem	2
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>

Pimpinan DPRD Kota Sungai Penuh Periode Tahun 2024 s.d. 2029:

- a. Ketua DPRD Kota Sungai Penuh: Hutri Randa, S.Sos, MM
- b. Wakil Ketua I DPRD: Hardizal, S.Sos, MH
- c. Wakil Ketua II DPRD: Emrizal, S.Pt

### 1.3 Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokok

Visi pembangunan Kota Sungai Penuh, sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD tahun 2021-2026 adalah terwujudnya Kota Sungai Penuh menjadi “Kota pendidikan, berbasis ekonomi kerakyatan yang mandiri, masyarakat yang religius, berbudaya dan sejahtera” dengan slogan “**Maju dan Berkeadilan**”. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi pembangunan, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter tinggi berbasis nilai agama dan budaya
- b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, mandiri dan bebas KKN
- c. Pemantapan struktur perekonomian masyarakat dalam pengembangan potensi daerah
- d. Pemerataan dalam meningkatkan sarana dan prasarana wilayah serta prasarana dasar permukiman
- e. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- f. Menciptakan pelestarian lingkungan hidup
- g. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban

Program-program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya visi dan misi jangka menengah yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 2021 s.d 2026, diklasifikasikan berdasarkan prioritas dalam pembangunan daerah yaitu:

- a. Peningkatan Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dan Clean Government dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam aspek Sosial Budaya, pendidikan, dan kesehatan.
- c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan Ekonomi Kreatif yang mempunyai daya saing dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi serta Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
- d. Peningkatan kualitas pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang sesuai dengan utilitas dan Standar Pelayanan Minimum.
- e. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas untuk pembangunan yang berbasis bencana dan berkelanjutan

Program pembangunan daerah merupakan upaya pemecahan permasalahan terhadap isu strategis daerah yang diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Mendukung program strategis nasional, provinsi.
- b. Mendukung pencapaian target standar pelayanan minimal.
- c. Permasalahan pembangunan daerah

Dengan demikian, program pembangunan daerah memiliki posisi strategis dalam pencapaian target sasaran pembangunan, dalam mewujudkan visi dan misi. Penentuan program pembangunan daerah Kota Sungai Penuh juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan Wali Kota dan Wakil Kota Kota Sungai Penuh.

#### 1.4 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Desentralisasi dan Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) telah memberikan makna tersendiri berbagai segi Pembangunan Daerah mulai dari tingkat kebijakan sampai pada tingkat implementasi.

Tuntutan terselenggaranya *good governance* Pemda pada era otonomi semakin tinggi. Dasar Penyelenggaraan *good governance* sendiri sebenarnya sudah ada sebelum adanya keputusan pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2002 seperti Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor XI/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Pasca diberlakukannya Otonomi Daerah, Penyelenggaraan *good governance* dipertegas dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Dalam upaya percepatan penyelenggaraan *good governance*, perlu dilakukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah baik dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan agar dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Disamping itu, dalam penyelenggaraan pemerintah perlu dipenuhi tata pemerintahan yang baik, antara lain perlu adanya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, profesionalisme serta akuntabilitas. Disadari bersama bahwa keberhasilan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri akan dapat berhasil guna dan berdaya guna apabila aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan di bidang

pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah saling memberikan umpan balik guna perbaikan ke depan.

Dalam rangka mewujudkan terlaksananya kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, maka segala kegiatan harus diprogramkan berdasarkan skala prioritas dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Salah satu wujud dari pertanggungjawaban Pemda dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas. Pemerintah Kota (Pemkot) Sungai Penuh diwajibkan membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban setelah berakhirnya Tahun Anggaran (TA) untuk diaudit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). LKPD dianggap baik jika hasil audit yang dilakukan BPK RI terhadap laporan keuangan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian.

LKPD yang selanjutnya disebut Laporan Keuangan merupakan bagian dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Di samping itu, ketentuan mengenai penyampaian Laporan Keuangan juga diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Laporan Keuangan TA 2024 merupakan perwujudan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024, yang disusun dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Pemkot Sungai Penuh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Sungai Penuh TA 2024 dengan berpedoman pada ketentuan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan dibuat untuk memberikan gambaran yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemda disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
2. Menyajikan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi, alokasi anggaran yang ditetapkan, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur.
3. Menyajikan informasi mengenai sumber daya informasi ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemda serta hasil-hasil yang telah dicapai.
4. Menyajikan informasi mengenai upaya Pemda dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas.
5. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemda berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

6. Menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemda, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemda atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemda.

Unsur Laporan Keuangan ini menggunakan basis Akrual sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai berikut:

### **1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

LRA menyajikan informasi pertanggungjawaban Pemda atas Pelaksanaan APBD pada akhir tahun anggaran, yang menggambarkan perbandingan antara Anggaran Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit dan Pembiayaan dengan realisasinya dalam periode satu tahun.

Unsur yang terdapat dalam LRA terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Kas Daerah (Kasda) yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan menjadi hak Pemda, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemda.
- 2) Belanja adalah semua pengeluaran Kasda yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Pemda.
- 3) Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan Dana Bagi Hasil (DBH).
- 4) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemda terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

### **2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)**

LPSAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### **3. Neraca**

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai Aset (kekayaan), Kewajiban (utang) dan Ekuitas dari suatu Entitas per 31 Desember 2024.

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- 2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Sungai Penuh.
- 3) Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kota Sungai Penuh yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Sungai Penuh.

#### **4. Laporan Operasional (LO)**

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemkot Sungai Penuh untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup dalam LO terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Kegiatan Non Operasional, dan Pos-pos Luar Biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan LO (basis akrual) adalah hak Pemkot Sungai Penuh yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Beban adalah kewajiban Pemkot Sungai Penuh yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 3) Kegiatan Non Operasional termasuk transfer penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain termasuk dana perimbangan dan bagi hasil.
- 4) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

#### **5. Laporan Arus Kas (LAK)**

Merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.

Unsur yang terdapat dalam LAK terdiri dari Penerimaan dan Pengeluaran Kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Kasda.
- 2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Kasda.

#### **6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

LRA, LO, LPE dan Neraca adalah laporan yang wajib disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sedangkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) hanya menyusun LPSAL dan LAK serta Konsolidasi LRA SKPD, LO SKPD, LPE SKPD, dan Neraca SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemda.



## 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan yang memuat penjelasan naratif maupun rincian dari angka yang tercantum dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK dan LPE. Disamping itu, CaLK juga mencakup informasi mengenai ekonomi makro, kebijakan keuangan dan hal-hal lainnya. CaLK dibuat untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- 2) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan.
- 3) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- 4) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Pemkot Sungai Penuh berkewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur antara lain memenuhi kepentingan:

### 1. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemda dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

### 2. Manajemen

Membantu para pengguna Laporan Keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu Pemerintahan Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kebijakan dan Ekuitas Dana Pemda untuk kepentingan masyarakat.

### 3. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka kepada masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan sumber daya oleh Pemda dan tingkat ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan.

### 4. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergeneration Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan Pemda pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

## 1.5

### Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Ketentuan perundangan-undangan yang menjadi landasan bagi Pemerintah Kota Sungai Penuh untuk melaksanakan kegiatan operasional antara lain:

1. UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. PP Nomor 37 Tahun 2023 tentang Dana Perimbangan;
5. PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
7. Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintahan Daerah;
8. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024.

## 1.6 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Daerah, adapun dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemda diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur Keuangan Negara;
2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. UU Nomor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
6. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
7. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
9. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No. 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
11. Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh;
12. Peraturan Wali Kota Nomor 50 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh.

## 1.7

### Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

CaLK dimaksud agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas pada pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan, sehingga tidak terjadi salah penafsiran dalam memahami isi laporan keuangan yang dibuat.

Sistematika penulisan CaLK adalah sebagai berikut:

- BAB I      PENDAHULUAN
  - 1.1. Domisili Entitas dan Informasi Umum
  - 1.2. Organisasi dan Lembaga Legislatif
  - 1.3. Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokok
  - 1.4. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
  - 1.5. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
  - 1.6. Sistematika penulisan CaLK
  - 1.7. Entitas pelaporan
  - 1.8. Kebijakan Konversi
  
- BAB II     EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD
  - 2.1. Ekonomi Makro
  - 2.2. Ikhtisar Kinerja Keuangan
  - 2.3. Kebijakan Keuangan
  - 2.4. Pencapaian Target Kinerja APBD
  
- BAB III    IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
  - 3.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja
  - 3.2. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
  - 3.3. Realisasi Pendapatan Daerah
  - 3.4. Realisasi Belanja Daerah
  - 3.5. Pembiayaan
  
- BAB IV    KEBIJAKAN AKUNTANSI
  - 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
  - 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
  - 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
  - 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
  
- BAB V     PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
  
- BAB V.I    LAPORAN REALISASI ANGGARAN
  - 5.1.1    Pendapatan
  - 5.1.2    Belanja
  - 5.1.3    Surplus/Defisit
  - 5.1.4    Pembiayaan
  - 5.1.5    SiLPA
  
- BAB V.II   LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
  - 5.2.1    Saldo Anggaran Lebih Awal

- 5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan
- 5.2.3 Sisa Lebih atau Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
- 5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

#### BAB V.III NERACA

- 5.3.1 Aset
- 5.3.2 Kewajiban
- 5.3.3 Ekuitas
- 5.3.4 Kewajiban dan Ekuitas

#### BAB V.IV LAPORAN OPERASIONAL

- 5.4.1 Pendapatan-LO
- 5.4.2 Beban-LO
- 5.4.3 Defisit dari Operasional
- 5.4.4 Surplus/ Defisit Pos Non Operasional
- 5.4.5 Surplus/ Defisit sebelum Pos Luar Biasa
- 5.4.6 Beban Luar Biasa
- 5.4.7 Surplus/ Defisit - LO

#### BAB V.V LAPORAN ARUS KAS

- 5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
- 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
- 5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
- 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
- 5.5.5 Saldo Akhir Kas

#### BAB V.VI LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

- 5.6.1 Ekuitas Awal
- 5.6.2 Surplus/ Defisit – LO
- 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar
- 5.6.4 Ekuitas Akhir

#### BAB V.VII KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

#### BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

- 6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas
- 6.2. Keadaan Pegawai Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2024
- 6.3. Manajemen Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2024

#### BAB VII PENUTUP

### 1.8

#### Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit Pemda yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemda atau satuan organisasi di lingkungan Pemda atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyampaikan laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemkot Sungai Penuh TA 2024 mencakup transaksi Keuangan yang berasal dari APBD TA 2024

serta pelaksanaannya pada seluruh SKPD dan SKPKD. Untuk TA 2024, Entitas dalam lingkup Pemkot Sungai Penuh yang terdapat dalam Laporan Keuangan Daerah sebanyak 40 (empat puluh) entitas yang disajikan pada **Lampiran 1**.

## 1.9

### **Kebijakan Konversi**

Mengingat penyusunan dan penyajian APBD Pemkot Sungai Penuh TA 2024 dan Penatausahaan Pelaksanaan Keuangan Daerah mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk memenuhi amanat UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa LKPD sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, maka penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Daerah Pemkot Sungai Penuh TA 2024 dilakukan dengan melakukan konversi kepada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Konversi yang dilakukan mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengungkapan pos-pos Laporan Keuangan, Struktur APBD (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan), Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas serta CaLK Konversi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini dilakukan dengan cara menafsir kembali (*trace back*) pos-pos Laporan Keuangan menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pos-pos Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, berpedoman pada Buletin Teknis Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi, dengan melakukan reklasifikasi untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa maupun Belanja Modal. Untuk realisasi bantuan hibah dan bantuan sosial berupa barang yang diserahkan kepada masyarakat dikonversi sesuai dengan SAP yang berpedoman pada Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

#### 2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi Makro adalah studi tentang ekonomi yang menjelaskan perubahan ekonomi yang dapat mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 memberikan gambaran ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan Tahun 2024 yang diperlukan. Gambaran ekonomi tersebut dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Tahun 2024.

Indikator Makro Ekonomi yang digunakan untuk melihat hasil-hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Pemkot Sungai Penuh antara lain Pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengangguran, dan kemiskinan.

Indikator Makro bidang ekonomi dan sosial yang dipertimbangkan oleh Pemkot Sungai Penuh dalam pelaksanaan APBD TA 2024 diantaranya bersumber dari data Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan informasi BPS Kota Sungai Penuh, data-data indikator makro Tahun 2024, maka yang dapat disajikan adalah data-data indikator makro Tahun 2024, meliputi:

##### 1. Kondisi Perekonomian

Kondisi ekonomi daerah selain dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan, dapat juga digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan penentuan kebijakan publik, serta perkiraan kondisi ekonomi di masa yang akan datang. Kondisi ekonomi secara umum tercermin dari beberapa variabel ekonomi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan indikator kinerja makro ekonomi yang paling sering digunakan dan mempresentasikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah/negara. PDRB merupakan totalitas nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan setelah dikurangi biaya produksinya dari berbagai unit usaha di suatu wilayah dalam jangka waktu satu tahun.

##### 1) PDRB

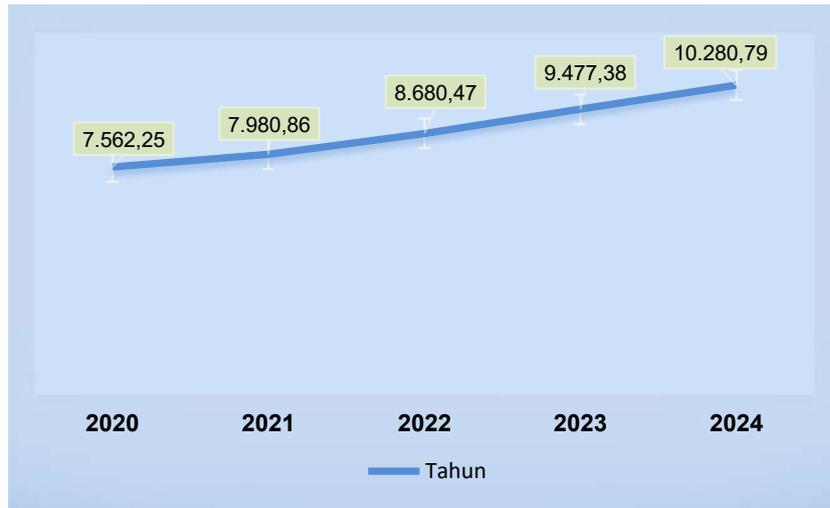
Hasil perhitungan PDRB merupakan gambaran dari nilai barang dan jasa yang telah diproduksi oleh unit-unit produksi/perusahaan selama satu tahun, sehingga dapat diketahui tingkat produktivitas yang dicapai baik sektoral maupun total. PDRB dapat pula memberikan gambaran tentang kemampuan suatu daerah/wilayah dalam memberikan sumber penghidupan dan penghasilan bagi masyarakat.

PDRB sebagai salah satu alat untuk mengukur perkembangan dan struktur ekonomi suatu wilayah, diyakini masih merupakan indikator penting dalam melakukan evaluasi dan menentukan arah pembangunan. Tingkat pertumbuhan riil PDRB mencerminkan keberhasilan yang telah dilaksanakan, sedangkan pendapatan

per kapita per tahun merupakan indikator kasar tentang tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah.

PDRB atas Dasar Harga berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Sungai Penuh sejak Tahun 2020-2024, atas dasar harga berlaku terus mengalami tren yang meningkat, mulai 7.562,25 miliar rupiah pada Tahun 2020, 7.980,86 miliar rupiah pada Tahun 2021, 8.680,47 miliar rupiah pada Tahun 2022, 9.477,38 miliar rupiah pada Tahun 2023 dan 10.280,79 miliar rupiah pada Tahun 2024. Tren kenaikan PDRB Kota Sungai Penuh Tahun 2020-2024 disajikan pada grafik berikut.

**Grafik 2.1**  
**PDRB Tahun 2020 – 2024**



Sumber: BPS Kota Sungai Penuh Dalam Angka 2025

**Tabel 2.1**  
**Lapangan Usaha Komponen PDRB**  
**(Atas Dasar Harga Berlaku)**

(dalam miliar rupiah)

LAPANGAN USAHA	2024	2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR LAPANGAN USAHA PER TOTAL PDRB
1	2	3	4 = 2-3	5 = (4 : 2) * 100
Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	482,11	428,28	53,83	11,17
Pertambangan dan Penggalian	81,72	71,05	10,67	13,06
Industri Pengolahan	63,77	56,23	7,54	11,82
Listrik dan Gas	2,77	2,55	0,22	7,94
Air Minum, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	23,30	24,10	(0,80)	(3,43)
Konstruksi	1.046,25	1.018,43	27,82	2,66
Perdagangan Besar dan Eceran	3.245,37	2.948,29	297,08	9,15
Transportasi dan Pergudangan	425,44	354,85	70,59	16,59
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	117,66	104,92	12,74	10,83
Informasi dan Komunikasi	1.385,39	1.302,53	82,86	5,98
Jasa Keuangan dan Asuransi	486,19	483,62	2,57	0,53
Real Estate	263,52	252,59	10,93	4,15
Jasa Perusahaan	634,24	586,33	47,91	7,55
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	581,95	520,88	61,07	10,49

*R*

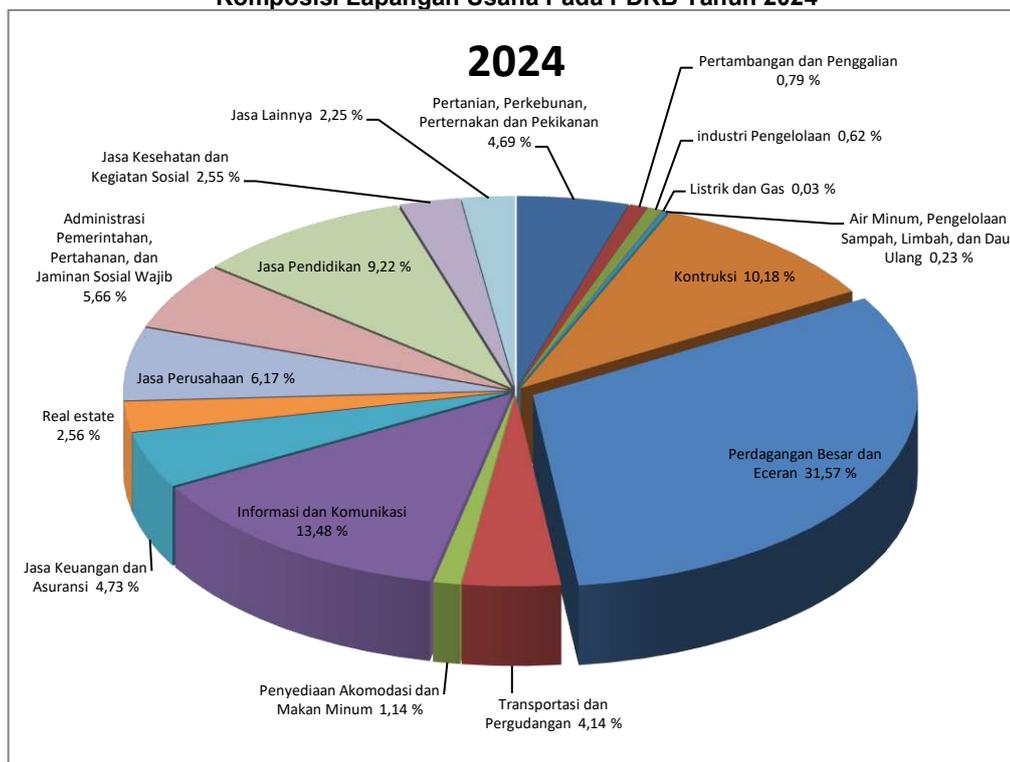
LAPANGAN USAHA	2024	2023	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	PERSENTASE KONTRIBUSI SEKTOR LAPANGAN USAHA PER TOTAL PDRB
1	2	3	4 = 2-3	5 = (4 : 2) * 100
Jasa Pendidikan	948,11	886,24	(846,73)	(2.143,21)
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	261,65	229,68	31,97	12,22
Jasa Lainnya	231,36	206,82	24,54	10,61
<b>TOTAL</b>	<b>10.280,80</b>	<b>9.477,38</b>	<b>803,41</b>	<b>7,81</b>

Sumber: BPS Kota Sungai Penuh Dalam Angka 2025

Ket: A = ∑ Tahun 2024

Komposisi masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB Kota Sungai Penuh Tahun 2024 disajikan pada grafik berikut:

**Grafik 2.2**  
**Komposisi Lapangan Usaha Pada PDRB Tahun 2024**



Sumber: BPS Kota Sungai Penuh Dalam Angka 2025

## 2) Pertumbuhan Ekonomi

PDRB Kota Sungai Penuh yang dihitung menurut harga berlaku (*current price*) menunjukkan kontribusi atau pangsa masing-masing sektor dalam struktur perekonomian daerah berdasarkan harga yang berlaku tahun yang bersangkutan. Mengingat PDRB atas dasar harga mengandung unsur inflasi makro, maka tinggi rendahnya pertumbuhan PDRB dipengaruhi oleh tingkat inflasi dalam periode yang bersangkutan. Dengan demikian, PDRB atas dasar harga berlaku belum dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi riil Kota Sungai Penuh. Untuk memperlihatkan pertumbuhan PDRB secara riil, dapat digunakan PDRB atas dasar harga konstan karena nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan menggunakan harga tahun dasar yang tetap, yaitu harga dasar tahun tertentu yang dipilih. PDRB Kota Sungai Penuh Tahun 2024 atas dasar harga konstan naik dari Tahun 2023 sebesar 5.224,21 miliar rupiah menjadi 5.490,46 miliar rupiah.

Peningkatan ini merupakan indikasi dari membaiknya perekonomian Kota Sungai Penuh. PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023-2024 (Harga Konstan) diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.2**  
**PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2023-2024**  
**(Harga Konstan)**

(dalam miliar rupiah)

LAPANGAN USAHA	2023		2024	
	PDRB	LAJU PERTUMBUHAN (%)	PDRB	LAJU PERTUMBUHAN (%)
Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	246,60	(0,50)	261,73	6,13
Pertambangan dan Penggalian	41,24	2,01	46,24	12,13
Industri Pengolahan	34,43	5,98	36,13	4,93
Listrik dan Gas	1,39	6,85	1,45	4,57
Air Minum, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	15,42	(7,35)	14,59	(5,44)
Konstruksi	663,65	4,42	680,48	2,54
Perdagangan Besar dan Eceran	1.363,67	6,69	1.417,47	3,95
Transportasi dan Pergudangan	229,95	11,92	262,83	14,30
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	62,46	7,49	68,37	9,46
Informasi dan Komunikasi	833,12	4,85	872,93	4,78
Jasa Keuangan dan Asuransi	273,31	0,67	269,82	(0,91)
Real Estate	130,84	2,32	133,80	2,27
Jasa Perusahaan	329,69	9,61	347,03	5,26
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	252,39	0,96	271,79	7,69
Jasa Pendidikan	474,25	3,41	502,62	5,98
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	147,42	3,76	166,47	12,92
Jasa Lainnya	125,37	4,68	136,71	9,05
<b>TOTAL</b>	<b>5.224,20</b>	<b>4,90</b>	<b>5.490,46</b>	<b>5,10</b>

Sumber: BPS Kota Sungai Penuh Dalam Angka 2025

3) Kependudukan Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh jumlah penduduk Kota Sungai Penuh naik dari 101.216 jiwa pada Tahun 2023 menjadi 102.224 jiwa pada Tahun 2024 atau naik sebesar 0,98%. Jumlah penduduk pada Tahun 2024 sebanyak 102.224 jiwa dengan komposisi berdasar jenis kelamin, laki-laki 51.371 jiwa dan perempuan 50.853 jiwa yang tersebar di delapan kecamatan. Dengan luas wilayah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Sungai Penuh adalah 39.150 Ha yang terdiri dari Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) 23.178 Ha (59,20%) dan lahan hunian/budidaya seluas 15.972 Ha (40,80%).

## 2. Lingkungan Eksternal dan Internal

Perekonomian Kota Sungai Penuh TA 2024 dipengaruhi oleh lingkungan eksternal yang disebabkan oleh semakin meningkatnya integrasi perekonomian dunia yang pada satu sisi akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi perekonomian daerah, tetapi di sisi lain juga menuntut daya saing perekonomian daerah yang lebih tinggi. Lingkungan internal yang membawa pengaruh positif bagi perekonomian daerah dalam Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Pertama**, ekspektasi masyarakat tetap kuat didorong oleh rencana dan pelaksanaan program pembangunan yang terarah dan konsisten sesuai dengan dokumen perencanaan dan melalui tahapan Musyawarah Rencana Pembangunan.

**Kedua**, pemerintahan yang kuat yang didukung oleh seluruh masyarakat, organisasi masyarakat (ormas) dan partai politik (parpol) yang dapat mengintegrasikan kebijakan pusat dan daerah, kebijakan lintas sektor serta kebijakan sektoral yang mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat dan kepastian hukum bagi peningkatan kegiatan ekonomi.

**Ketiga**, sejalan dengan dukungan politik yang kuat, kemampuan untuk menegakkan keamanan dan ketertiban serta pelaksanaan hukum termasuk pemberantasan tindak pidana korupsi juga meningkat.

**Keempat**, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh tingginya kepercayaan masyarakat kepada berbagai pelaksanaan program pembangunan.

### 3. Tantangan Pokok

Dengan kemajuan yang dicapai dan masalah yang dihadapi hingga Tahun 2024, tantangan pokok yang dihadapi pada Tahun 2024 adalah:

#### 1) Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Kualitas pertumbuhan ekonomi perlu ditingkatkan agar kegiatan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah penduduk miskin.

#### 2) Menjaga Stabilitas Ekonomi

Berkaitan dengan kemungkinan timbulnya gejolak ekonomi, stabilitas ekonomi seyogyanya dapat dipertahankan untuk mencegah dampak inflasi yang tidak terkendali dan mempengaruhi daya beli masyarakat.

### 4. Arah Kebijakan Ekonomi Makro

Dalam Tahun 2024 kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi agar mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang mendasar terutama pengangguran dan kemiskinan dengan tetap mempertahankan stabilitas ekonomi. Dengan kemampuan keuangan daerah yang relatif terbatas, maka ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga relatif terbatas. Oleh sebab itu, kebijakan ekonomi makro daerah diarahkan untuk mendorong peranan masyarakat dalam pembangunan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan dibandingkan dengan total angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sungai Penuh berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi Tahun 2023 berada di sekitar 3,54%. Tren Pengangguran di Kota Sungai Penuh (Beberapa Tahun Terakhir) TPT 2021 di 4,10%, TPT 2022 di 3,92%, dan TPT 2023 di 3,54%. Tren menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kota Sungai Penuh mengalami penurunan sejak tahun 2021. Adapun faktor yang mempengaruhi Pengangguran di Kota Sungai Penuh Tahun 2024 antara lain:

#### 1) Dominasi Sektor Pertanian & Perkebunan

Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan dan Kurangnya industri besar menyebabkan keterbatasan lapangan pekerjaan formal.

#### 2) Kurangnya Investasi di Sektor Industri

Kota Sungai Penuh belum menjadi pusat industri besar, sehingga lapangan kerja di sektor manufaktur terbatas.

#### 3) Pertumbuhan UMKM & Perdagangan

UMKM berkembang, tetapi masih belum cukup menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

4) Peluang Kerja di Luar Daerah

Banyak lulusan muda bekerja di luar kota atau merantau ke daerah lain seperti Jambi, Padang, atau Jakarta.

Mayoritas tenaga kerja di Kota Sungai Penuh bekerja di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Peluang kerja masih terbatas, terutama di sektor industri dan manufaktur.

Garis Kemiskinan di Kota Sungai Penuh Tahun 2024 sebesar Rp610.141,00 per kapita per bulan. Garis kemiskinan adalah batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan. Garis kemiskinan di Kota Sungai Penuh terus meningkat setiap tahun. Kenaikan ini mencerminkan inflasi dan kenaikan biaya hidup, terutama harga bahan pokok dan kebutuhan dasar lainnya. Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Sungai Penuh, 2016–2024 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.3**  
**Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Sungai Penuh, 2016–2024**

TAHUN	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
1	2	3	4 = 2-3
2016	317.556,00	2.75	3.13
2017	334.856.00	2.46	2.78
2018	351.391,00	2.48	2.76
2019	373.363,00	2.55	2.81
2020	401.966,00	2.78	3.03
2021	426.380,00	3.03	3.41
2022	450.708,00	2.64	2.97
2023	491.568,00	2.66	3.00
2024	610.141,00	2.60	2.92

Sumber: BPS Kota Sungai Penuh Dalam Angka 2025

Pemerintah Kota Sungai Penuh menganggarkan belanja yang telah diatur oleh undang-undang atau *Mandatory Spending* dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Rekapitulasi alokasi anggaran belanja fungsi pendidikan diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.4**  
**Rekapitulasi Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan**

(dalam rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD MURNI 2024	PERUBAHAN APBD 2024	REALISASI	PERSENTASE %
1	a. Urusan pada Bidang Pendidikan	153.719.844.643,00	152.224.783.123,00	145.323.211.171,21	95,47
	1) Belanja Pegawai	119.447.081.643,00	117.959.020.123,00	111.774.989.039,00	94,76
	2) Belanja Barang dan Jasa	17.723.461.175,00	17.694.461.173,00	17.387.240.271,21	98,26

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD MURNI 2024	PERUBAHAN APBD 2024	REALISASI	PERSENTASE %
	3) Belanja Hibah	4.311.100.000,00	4.311.100.000,00	4.137.363.000,00	95,97
	4) Belanja Modal	12.238.201.825,00	12.260.201.827,00	12.023.618.861,00	98,07
	<b>b. Urusan pada Bidang Kebudayaan</b>	<b>5.356.998.612,00</b>	<b>5.159.006.368,00</b>	<b>5.098.599.854,00</b>	<b>98,83</b>
	1) Belanja Pegawai	3.949.798.612,00	3.743.816.368,00	3.718.450.160,00	99,32
	2) Belanja Barang dan Jasa	1.147.290.040,00	1.152.190.000,00	1.132.591.769,00	98,30
	3) Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) Belanja Modal	259.909.960,00	263.000.000,00	247.557.925,00	94,13
	<b>c. Urusan Pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>8.424.944.630,00</b>	<b>6.785.878.629,00</b>	<b>6.479.939.484,00</b>	<b>95,49</b>
	<b>d. Urusan Pada Bidang Perpustakaan</b>	<b>4.681.021.960,00</b>	<b>4.661.214.171,00</b>	<b>4.490.540.135,00</b>	<b>96,34</b>
	<b>e. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi pendidikan, antara lain :</b>	<b>4.254.024.380,00</b>	<b>6.969.905.454,00</b>	<b>6.168.924.842,00</b>	<b>88,51</b>
	1) Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah	4.254.024.380,00	6.969.905.454,00	6.168.924.842,00	88,51
	a). Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual Bag. Kesra SETDA	4.254.024.380,00	4.783.784.380,00	4.009.857.496,00	83,82
	b). Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Bag. Kesra SETDA	0,00	1.067.640.900,00	1.047.599.904,00	98,12
	c). Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah BALITBANG	0,00	272.980.174,00	272.361.442,00	99,77
	d). Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal DPPKB	0,00	845.500.000,00	839.106.000,00	99,24
2	<b>Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan</b>	<b>176.436.834.225</b>	<b>175.800.787.745</b>	<b>167.561.215.486,21</b>	<b>95,31</b>
3	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>863.701.842.681</b>	<b>870.169.343.193</b>	<b>810.277.460.176,98</b>	<b>93,12</b>
4	<b>Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah (%)</b>	<b>20,43</b>	<b>20,20</b>	<b>20,68</b>	<b>102,36</b>

2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan). Rekapitulasi alokasi anggaran belanja fungsi kesehatan diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.5**  
**Rekapitulasi Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Kesehatan**

(dalam rupiah)

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD MURNI 2024	PERUBAHAN APBD 2024	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	<b>a. Belanja pada Dinas Kesehatan</b>				
	a) Belanja Pegawai	87.185.061.453,00	105.355.003.271	86.822.663.462,00	82,41
	b) Belanja Barang dan Jasa	64.838.648.655,00	77.593.165.767	49.226.643.275,87	63,44
	c) Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) Belanja Modal	41.276.272.670,00	31.846.116.490	21.753.764.561,09	68,31
2	<b>Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan</b>	<b>193.299.982.778,00</b>	<b>214.794.285.528,00</b>	<b>157.803.071.298,96</b>	<b>73,47</b>
3	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>863.701.842.681,00</b>	<b>872.237.778.196,00</b>	<b>810.277.460.176,98</b>	<b>92,90</b>

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	APBD MURNI 2024	PERUBAHAN APBD 2024	REALISASI	PERSENTASE (%)
4	Gaji ASN	217.895.998.715,00	249.210.620.734,00	227.624.119.193,00	91,34
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN	645.805.843.966,00	623.027.157.462,00	582.653.340.983,98	93,52
6	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Kesehatan Terhadap Belanja Daerah (%)	22,38	24,63	19,48	79,08

3) Alokasi dana bidang Infrastruktur Pelayanan Publik harus digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah yang diarahkan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa untuk percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah, diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.6**  
**Rekapitulasi Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik**

(dalam rupiah)

NO	KOMPONEN PENGHITUNG	APBD TA. 2024	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	Total Belanja Daerah	873.022.658.196,00	810.277.460.176,98	92,81
2	Belanja bagi hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa:			
	a. Belanja Bagi Hasil	1.107.933.815,00	1.089.710.826,00	98,36
	b. Belanja Bantuan Keuangan	106.511.019.701,00	103.039.995.205,00	96,74
	Jumlah (a + b)	107.618.953.516,00	104.129.706.031,00	96,76
3	Selisih 1 – 2	765.403.704.680,00	706.147.754.145,98	92,26
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	306.161.481.872,00	282.459.101.658,39	92,26

**Tabel 2.7**  
**Rekapitulasi Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Infrastruktur Daerah**

(dalam rupiah)

NO	KOMPONEN PENGHITUNG	APBD TA. 2024	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	a. Belanja Modal	140.675.429.934,00	129.528.810.236,46	92,08
	1) Tanah	461.229.500,00	364.792.231,20	79,09
	2) Peralatan dan Mesin	38.280.235.111,00	29.164.581.067,00	76,19
	3) Bangunan dan Gedung	35.891.327.249,00	34.969.287.253,47	97,43
	4) Jalan, Jaringan dan Irigasi	55.067.426.209,00	54.674.175.128,72	99,29
	5) Aset Tetap Lainnya	10.175.211.865,00	10.355.974.556,07	101,78
	6) Aset Lainnya	800.000.000,00	0,00	0,00
	b. Belanja Jasa Ketersediaan layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00
	c. Belanja Pemeliharaan	894.955.200,00	866.637.139,00	96,84
	Jumlah ( a+b+c )	141.570.385.134,00	130.395.447.375,46	92,11
2	a. Belanja Hibah	18.268.375.060,00	17.959.918.113,00	98,31
	b. Belanja Bantuan Sosial	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
	Jumlah ( a+b )	18.468.375.060,00	18.159.918.113,00	98,33
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	160.038.760.194,00	148.555.365.488,46	92,82
	Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Infrastruktur Terhadap Belanja Daerah (%)	20,91	21,54	

Dari tabel di atas Pemerintah Kota Sungai Penuh mengalokasikan anggaran Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar 20,91% dari total belanja APBD Kota Sungai Penuh sebesar Rp873.022.658.196,00. Penggunaan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik harus digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah yang diarahkan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa untuk percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, sebagaimana butir E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal persentase Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik belum mencapai 40% Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

- 4) Besaran dana Alokasi anggaran dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Internal pada Inspektorat Daerah Kota Kota Sungai Penuh diluar gaji dan tunjangan sebesar Rp2.489.064.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp2.488.738.198,00. Pemerintah Sungai Penuh menganggarkan sebesar 0,29% dari total belanja daerah Rp873.022.658.196,00. Pemerintah Kota Sungai Penuh harus mengalokasikan anggaran untuk penguatan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota Sungai Penuh sekurang-kurangnya 0,75% dari total belanja daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir D.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- 5) Alokasi anggaran dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Sungai Penuh sebesar Rp3.732.038.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp3.654.314.175,00. Pemerintah Kota Sungai Penuh sudah menganggarkan sebesar 0,43% dari total belanja daerah Rp873.022.658.196,00. Pemerintah Kota Sungai Penuh telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, paling sedikit 0,34% dari total belanja daerah. Alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi sebagaimana ditegaskan dalam butir e. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
- 6) Pemerintah Kota Sungai Penuh menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp50.819.461.700,00 dari Anggaran Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp535.124.328.000,00 atau 9,50%. Pemerintah Kota Sungai Penuh harus mengalokasikan anggaran untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (dana alokasi

umum dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2024 tidak termasuk dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana di tegaskan dalam butir b.9. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

## 2.2

### Ikhtisar Kinerja Keuangan

Ikhtisar capaian kinerja keuangan TA 2024 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.8**  
**Ikhtisar Capaian Kinerja Keuangan TA 2024**

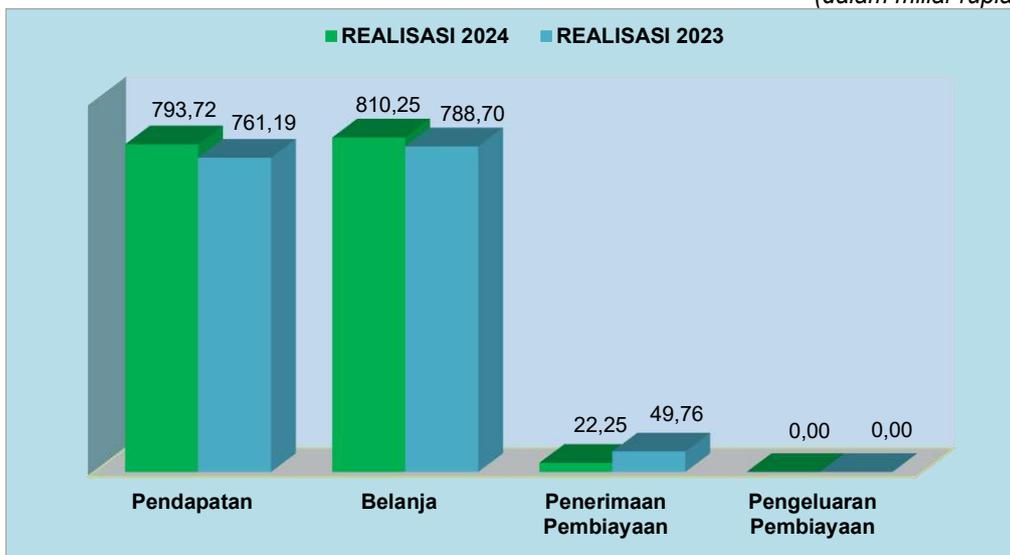
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	APBD TA 2024	REALISASI TA 2024	%	REALISASI TA 2023
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>850.763.684.127,00</b>	<b>793.723.306.683,28</b>	<b>93,30</b>	<b>761.196.247.749,35</b>
	Pendapatan Asli Daerah	103.181.802.795,00	66.371.990.476,28	64,33	69.634.628.107,77
	Pendapatan Transfer	742.785.016.858,00	722.625.758.110,00	97,29	686.910.422.605,00
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	4.796.864.474,00	4.725.558.097,00	98,51	4.651.197.036,58
<b>2</b>	<b>Belanja</b>	<b>873.022.658.196,00</b>	<b>810.277.392.176,98</b>	<b>92,81</b>	<b>788.700.596.914,53</b>
	Belanja Operasi	622.394.393.057,00	575.431.748.993,52	92,45	556.823.749.834,70
	Belanja Modal	140.675.429.934,00	129.528.810.236,46	92,08	129.618.222.875,83
	Belanja Tak Terduga	2.333.881.689,00	1.187.186.916,00	50,87	-
	Belanja Transfer	107.618.953.516,00	104.129.646.031,00	96,76	102.258.624.204,00
<b>I</b>	<b>Surplus/Defisit (1-2)</b>	<b>(22.258.974.069,00)</b>	<b>(16.554.085.493,70)</b>	<b>74,37</b>	<b>(27.504.349.165,18)</b>
3	Penerimaan Pembiayaan	22.258.974.069,00	22.258.974.069,79	100,00	49.763.323.234,97
4	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	-	-
<b>II</b>	<b>Pembiayaan Netto (3-4)</b>	<b>22.258.974.069,00</b>	<b>22.258.974.069,79</b>	<b>100,00</b>	<b>49.763.323.234,97</b>
<b>III</b>	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.704.888.576,09</b>	<b>-</b>	<b>22.258.974.069,79</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa defisit pendapatan dan belanja TA 2024 sebesar Rp16.554.085.493,70. Dengan jumlah pembiayaan netto sebesar Rp22.258.974.069,79 merupakan penerimaan pembiayaan Tahun 2023. ditambah dengan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya dikurangi dengan penyertaan modal kepada pihak ketiga, maka SiLPA TA 2024 sebesar Rp5.704.888.576,09. Dari sisi Pendapatan, realisasi mencapai 93,30% dari target yang ditetapkan, sedangkan realisasi Belanja dan Transfer mencapai 92,81% dari anggaran yang ditetapkan.

Uraian di atas menunjukkan kinerja keuangan yang positif yakni Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja berhasil diseimbangkan walaupun masih terjadi defisit anggaran, yang tercermin pada grafik berikut:

**Grafik 2.3**  
**Perkembangan Pendapatan dan Belanja TA 2024 dan 2023**  
 (dalam miliar rupiah)



Pendapatan Pemkot Sungai Penuh pada Tahun 2024 bersumber dari PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah dapat direalisasikan sebesar Rp793.723.306.683,28 naik sebesar Rp32.527.058.933,93 jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp761.196.247.749,35. Pendapatan Pemkot Sungai Penuh Tahun 2024 mengalami kenaikan disebabkan oleh naiknya Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat atas Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

Belanja Pemkot Sungai Penuh Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp810.277.392.176,98 naik sebesar Rp21.576.795.262,45 jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun 2023 sebesar Rp788.700.596.914,53. Belanja Pemkot Sungai Penuh Tahun 2024 mengalami kenaikan pada Belanja Pegawai karena adanya kenaikan gaji PNS sebesar 8% dan penambahan pegawai PPPK Tahun 2024 sebanyak 799 pegawai.

Pembiayaan Netto Pemkot Sungai Penuh Tahun 2024 sebesar Rp22.258.974.069,79 turun sebesar Rp27.504.349.165,18 jika dibandingkan dengan Pembiayaan Netto Tahun 2023 sebesar Rp49.763.323.234,00. Pembiayaan Pemkot Sungai Penuh Tahun 2024 mengalami penurunan disebabkan oleh turunnya SiLPA Tahun 2023 yang digunakan pada Tahun 2024.

**2.3**

**Kebijakan Keuangan**

Dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, daerah memiliki hak sekaligus kewajiban yang lebih besar untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya sejalan dengan prinsip *“money follow function”* dalam penyelenggaraan Pemda, juga diterapkan desentralisasi fiskal, yang antara lain dapat dilihat dari reformulasi kebijakan di bidang pendapatan, Pola pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) yang lebih transparan dan akuntabel, penyempurnaan formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilakukan secara konsisten dan mengarah kepada fungsi pemerataan kemampuan keuangan daerah, penyempurnaan terhadap penerapan kriteria penentuan Dana Alokasi Khusus (DAK), perubahan kategori belanja ke daerah dalam

bentuk pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, penguatan *taxing power* daerah dan peningkatan kepastian hukum di bidang perpajakan daerah.

Sisi belanja dapat dilihat dalam proses penyusunan APBD yang harus dilatarbelakangi penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat, anggaran berbasis kinerja, keterkaitan dan sinkronisasi kebijakan perencanaan dengan penganggaran oleh Pemda dengan berbagai kebijakan pemerintah, peran dan tanggung jawab pengelola keuangan, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, serta peraturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka penguatan pilar akuntabilitas dan transparansi.

Anggaran yang baik tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan namun lebih dari itu harus dapat memberikan informasi mengenai kondisi kinerja Pemda yang akan dicapai, sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja. Dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi Pemda.

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik UU, PP, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah, maupun Keputusan Kepala Daerah.

Untuk menentukan arah kebijakan keuangan daerah harus dilihat dari beberapa indikator pendukung yaitu proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan. Proyeksi dibuat dengan beberapa asumsi yang mendukung terhadap rencana atau target pencapaian. Hal ini perlu dilakukan dengan tujuan agar arah kebijakan keuangan daerah memiliki perencanaan yang jelas dan terukur. Arah kebijakan keuangan daerah sangat mendukung dalam pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Arah kebijakan keuangan daerah yaitu:

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah;
2. Arah Kebijakan Belanja Daerah; dan
3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Walaupun demikian harus diakui bahwa kendala anggaran (*budget constraint*) masih dihadapi Pemda dalam meneruskan kebijakan pengeluaran. Hal ini disebabkan tambahan kebutuhan belanja daerah (*marginal expenditure*) belum sepenuhnya dapat ditutup dengan tambahan pendapatan daerah (*marginal revenue*), mengingat kompleksnya peran pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan. Disisi lain, proses penyusunan APBD bukan merupakan suatu proses yang sederhana, karena terkait dengan mekanisme perencanaan serta *stakeholder* dan *shareholder* yang sangat beragam.

Dalam menjalankan roda perekonomian dan pemerintahan di Kota Sungai Penuh untuk mewujudkan visi “Kota Sungai Penuh Mandiri, Agamis, Jujur, Unggul dan Berkeadilan (KOTA SUNGAI PENUH MAJU DAN BERKEADILAN 2021 - 2024)” diperlukan kebijakan fiskal dan keuangan, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Sebagai daerah pemekaran yang baru terbentuk Tahun 2008 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, Kota Sungai Penuh dalam TA 2024 sudah mengeluarkan perangkat peraturan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 100.3.3.3/Kep.65/2024 tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 tanggal 25 Maret 2024. Pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Sungai Penuh sudah menganggarkan PAD sebesar Rp103.181.802.795,00 dengan realisasi sebesar Rp66.360.381.243,57. PAD terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Realisasi PAD Tahun 2024 sebesar 64,31% dari target yang dianggarkan. Dengan demikian, jika dibandingkan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp69.634.628.107,77, PAD Tahun 2024 turun sebesar Rp3.274.246.864,20.

Dari sisi pengeluaran, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024 telah menetapkan batas tertinggi pengeluaran untuk tiap-tiap kegiatan agar terjadi efisiensi dan efektivitas kegiatan.

## 2.4

### **Pencapaian Target Kinerja APBD**

APBD Kota Sungai Penuh TA 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan APBD ini dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara. Upaya untuk mencapai tujuan bernegara dimaksud secara operasional dilaksanakan oleh SKPD, yang sekaligus bertindak selaku pusat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

APBD yang disusun ini telah menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja, yakni mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang digunakan. Prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja ini secara operasional dituangkan dalam bentuk Anggaran Belanja Langsung, yakni belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program/kegiatan yang direncanakan.

Struktur APBD terdiri dari anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Khusus untuk belanja diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Pelaporan kinerja operasional yang berdimensi keuangan pada Pemkot Sungai Penuh telah disajikan tersendiri dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024, yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tersebut, akan dilaporkan aspek akuntabilitas kinerja, di mana esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi, dan tujuan/sasaran strategis yang telah dicapai selama Tahun 2024. Di dalamnya antara lain diuraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan/sasaran strategis, tingkat efisiensi suatu program melalui perbandingan *output* dengan *input*nya, serta tingkat efektivitas suatu program melalui perbandingan *outcome* dengan targetnya.

Capaian kinerja dihasilkan dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana

kegiatan, namun digunakan untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi hasil kerja yang dilaksanakan oleh satuan kerja guna meningkatkan kinerja organisasi.

Analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong keberhasilan dan penyebab ketidakberhasilan dalam pencapaian kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi.

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2024 untuk menelaah evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan yang menjadi acuan untuk tahun berikutnya, dapat dilihat dari:

1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.
4. Implikasi yang timbul terhadap tidak tercapainya, terpenuhi atau melebihi target kinerja program dan kegiatan.
5. Kebijakan dan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.



**BAB III**  
**IKTHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja**

APBD Kota Sungai Penuh TA 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor Tahun 7 Tahun 2023 dan dijabarkan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2023, dengan total pendapatan daerah sebesar Rp820.201.842.681,00 dan belanja daerah sebesar Rp863.701.842.681,00. Sehingga kekurangan pendapatan ditutupi dengan pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari SiLPA daerah sebesar Rp43.500.000.000,00. Pada TA 2024 Pemerintah Kota Sungai Penuh telah melakukan 6 (enam) kali perubahan anggaran, yaitu Perubahan Penjabaran APBD ke-1 s.d. ke-5 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sungai Penuh dan diberitahukan kepada DPRD. Dan ditetapkan Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Sungai Penuh TA 2024.

Ringkasan perbandingan antara APBD TA 2024 dengan perubahan terakhir diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Perbandingan antara APBD TA 2024 dengan perubahan terakhir**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	APBD 2024	PERUBAHAN APBD TA 2024	KENAIKAN/PENURUNAN	
				JUMLAH	%
<b>1.</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>820.201.842.681,00</b>	<b>850.763.684.127,00</b>	<b>30.561.841.446,00</b>	<b>3,73</b>
	Pendapatan Asli Daerah	103.125.197.750,00	103.181.802.795,00	56.605.045,00	0,05
	Pendapatan Transfer	713.076.644.931,00	742.785.016.858,00	29.708.371.927,00	4,17
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	4.000.000.000,00	4.796.864.474,00	796.864.474,00	19,92
<b>2.</b>	<b>Belanja</b>	<b>863.701.842.681,00</b>	<b>873.022.658.196,00</b>	<b>9.320.815.515,00</b>	<b>1,08</b>
	Belanja Operasi	605.489.494.204,00	622.394.393.057,00	16.904.898.853,00	2,79
	Belanja Modal	148.259.513.272,00	140.675.429.934,00	(7.584.083.338,00)	(5,12)
	Belanja Tak Terduga	2.333.881.689,00	2.333.881.689,00	-	-
	Belanja Transfer	107.618.953.516,00	107.618.953.516,00	-	-
<b>I</b>	<b>Surplus/Defisit (1-2)</b>	<b>(43.500.000.000,00)</b>	<b>(22.258.974.069,00)</b>	<b>21.241.025.931,00</b>	<b>(48,83)</b>
3.	Penerimaan Pembiayaan	43.500.000.000,00	22.258.974.069,00	21.241.025.931,00	(48,83)
4.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	-	-
<b>II</b>	<b>Pembiayaan Netto (3-4)</b>	<b>43.500.000.000,00</b>	<b>22.258.974.069,00</b>	<b>(21.241.025.931,00)</b>	<b>(48,83)</b>
<b>III</b>	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Target Pendapatan Daerah yang ditetapkan dalam APBD semula sebesar Rp820.201.842.681,00 setelah perubahan APBD naik sebesar Rp30.561.841.446,00 menjadi sebesar Rp850.763.684.127,00. Kenaikan target Pendapatan tersebut karena penambahan target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp56.605.045,00 menjadi Rp103.181.802.795,00, penambahan target Pendapatan Transfer sebesar



Rp29.708.371.927,00 menjadi Rp742.785.016.858,00 dan penambahan target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 796.864.474,00 menjadi Rp4.796.864.474,00.

Berdasarkan data APBD Kota Sungai Penuh, kenaikan target Pendapatan disebabkan oleh:

1. Kenaikan Target Pendapatan Asli Daerah atas Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami kenaikan target karena adanya perubahan jumlah dividen yang diterima oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 dengan kenaikan sebesar Rp56.605.045,00.
2. Kenaikan Target Pendapatan Transfer berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 19/KM.7/2024 tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Facility dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dalam Rangka Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mendanai Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 267 Tahun 2024 tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Facility dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Pendanaan Gaji Ketiga Belas di Daerah Tahun Anggaran 2024.
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami kenaikan target karena adanya kenaikan dana Kapitasi (JKN) TA 2024.

Jumlah Anggaran Belanja Daerah yang ditetapkan dalam APBD semula sebesar Rp863.701.842.681,00 naik sebesar Rp9.320.815.515,00 menjadi Rp873.022.658.196,00. Perubahan anggaran Belanja terutama pada Belanja Operasi dimana anggaran Belanja Operasi naik dari Rp605.489.494.204,00 menjadi sebesar Rp622.394.393.057,00 atau sebesar Rp 16.904.898.853,00. Penerimaan Pembiayaan semula ditetapkan dalam APBD sebesar Rp43.500.000.000,00 setelah perubahan APBD turun sebesar Rp21.241.025.931,00 menjadi sebesar Rp22.258.974.069,00. Penurunan target Penerimaan Pembiayaan tersebut dikarenakan penyesuaian SiLPA berdasarkan LKPD Kota Sungai Penuh TA 2023 Audited yang semula menggunakan nilai estimasi.

Adapun yang menjadi latar belakang yang mendasari perubahan APBD Kota Sungai Penuh TA 2024, sebagai berikut.

1. Pergeseran Penjabaran APBD ke-1 merupakan pergeseran yang dilakukan untuk penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya, dituangkan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh nomor 15 tahun 2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh TA 2024.
2. Pergeseran Penjabaran APBD ke-2 dilakukan untuk penyesuaian Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan, dituangkan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh nomor 17 tahun 2024 tanggal 1 April 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh TA 2024 .

3. Pergeseran Penjabaran APBD ke-3 dilakukan adanya penyesuaian terhadap Peraturan Presiden nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 98 Tahun 2020 tentang peraturan gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan Peraturan Presiden nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 angka 1 Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah bagian transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah otonomi, dituangkan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh nomor 22 tahun 2024 tanggal 22 Mei 2024 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh TA 2024.
4. Pergeseran Penjabaran APBD ke-4 dilakukan adanya penyesuaian Peraturan Menteri Keuangan nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya dan penyesuaian terhadap Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya, dituangkan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh nomor 24 tahun 2024 tanggal 10 Juni 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh TA 2024.
5. Perubahan Penjabaran APBD TA 2024 dilakukan untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2024, dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Sungai Penuh nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024.
6. Pergeseran Perubahan Penjabaran APBD TA 2024 dilakukan adanya penyesuaian Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 416 Tahun 2024 tentang Perubahan rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2024 dalam rangka dukungan pendanaan tunjangan hari raya dan gaji ke 13 bagi guru aparatur sipil negara di daerah dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 423 Tahun 2024 tentang Perubahan rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah dan Dana Pelayanan Kepariwisata Tahun Anggaran 2024. Yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 46 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024 tanggal 18 Desember 2024.

Rincian Anggaran Perubahan APBD Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024 disajikan pada **Lampiran 2**.

## 3.2

### **Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemda dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan pilihan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan.

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka proses penganggaran APBD harus berdasarkan target kinerja yang terukur, atau yang lebih dikenal dengan istilah Anggaran Berbasis Kinerja.

Anggaran Berbasis Kinerja merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja untuk mencapai sasaran dan tujuan serta dalam bentuk alokasi anggaran yang akan diukur capaian kinerjanya pada akhir tahun anggaran.

Pelaksanaan APBD Pemkot Sungai Penuh Tahun 2024 dalam pencapaian target kinerja keuangan dapat dilihat pada ikhtisar anggaran dan realisasi kinerja keuangan Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran (TA) 2024 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.2**  
**Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Kinerja**

*(dalam rupiah)*

NO	PENDAPATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIK/(TURUN)
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4-6
1.	Pendapatan	850.763.684.127,00	793.723.306.683,28	93,30	761.196.247.749,35	32.527.058.933,93
2.	Belanja	873.022.658.196,00	810.277.392.176,98	92,81	788.700.596.914,53	21.576.795.262,45
I	<b>Surplus/Defisit (1-2)</b>	<b>( 21.474.094.069,00 )</b>	<b>(16.554.085.493,70)</b>	<b>74,37</b>	<b>(27.504.349.165,18)</b>	<b>10.950.263.671,48</b>
3.	Penerimaan Pembiayaan	22.258.974.069,00	22.258.974.069,79	100,00	49.763.323.234,97	(27.504.349.165,18)
4.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	<b>Pembiayaan Netto (3-4)</b>	<b>22.258.974.069,00</b>	<b>22.258.974.069,79</b>	<b>100,00</b>	<b>49.763.323.234,97</b>	<b>(27.504.349.165,18)</b>
III	<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.704.888.576,09</b>		<b>22.258.974.069,79</b>	<b>(16.554.085.493,70)</b>

### 3.3

#### Realisasi Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Pemkot Sungai Penuh pada Tahun 2024 bersumber dari PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah ditetapkan sebesar Rp850.763.684.127,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp793.723.306.683,28 atau tercapai sebesar 93,30%, naik sebesar Rp32.527.058.933,93 atau sebesar 4,27% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun 2023 sebesar Rp761.196.247.749,35.

Tidak tercapainya target Pendapatan Daerah tersebut antara lain:

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh terhadap pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan PBB-P2.
- Tingginya target pajak yang ditetapkan atas Pajak Mineral Bukan Logam sementara objek pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak ada di Kota Sungai Penuh.
- Belum adanya aparat Perpajakan Daerah (petugas pemeriksa pajak daerah dan juru sita Pajak Daerah) di Kota Sungai Penuh yang mengakibatkan terbatasnya wewenang petugas dalam memeriksa dan menagih pajak.
- Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak mencapai target dikarenakan target yang ditetapkan terlalu tinggi, sedangkan objek retribusi pelayanan kesehatan sangat sedikit.
- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dalam perhitungan terget berdasarkan pada jumlah penduduk, sementara dalam realisasi dinas lingkungan hidup tidak memungut retribusi ke masyarakat di karenakan di desa sudah melakukan pemungutan retribusi. Sehingga dinas lingkungan hidup hanya retribusi pada toko, pelaku usaha, klinik, pedagang pasar.
- Tidak tercapainya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dikarenakan target yang dianggarkan terlalu tinggi atau tidak

sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 dan belum adanya SDM juru parkir, status juru parkir tidak mendapatkan insentif atau sebagai relawan parkir saja bukan dari tenaga outsourcing.

7. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tidak tercapai dikarenakan target anggaran terlalu tinggi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
8. Retribusi Rumah Potong Hewan tidak tercapai disebabkan oleh:
  - a. Rendahnya pemotongan ternak di rumah potong hewan dikarenakan ruang pemotongan yang sempit.
  - b. Banyaknya pedagang melakukan pemotongan diluar RPH.
  - c. Target yang ditetapkan tidak relevan terhadap jumlah ternak sapi yang di potong.
  - d. Pada tahun 2024 sedang dilakukan rehabilitasi gedung pemotongan sehingga terkendala teknis operasional.
9. Adanya Pemotongan Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya untuk penggajian PPPK dari Pemerintah Pusat.
10. Tidak tercapainya realisasi pendapatan transfer antar daerah disebabkan oleh adanya tunda salur transfer dari Pemerintah Provinsi Jambi.

### 3.4 Realisasi Belanja Daerah

Target Belanja sesuai dengan Perubahan Anggaran Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp873.022.658.196,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp810.277.392.176,98 atau tercapai sebesar 92,81%, naik sebesar Rp21.576.795.262,45 atau sebesar 2,74% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun 2023 sebesar Rp788.700.596.914,53.

Tidak tercapainya target Belanja Daerah tersebut antara lain:

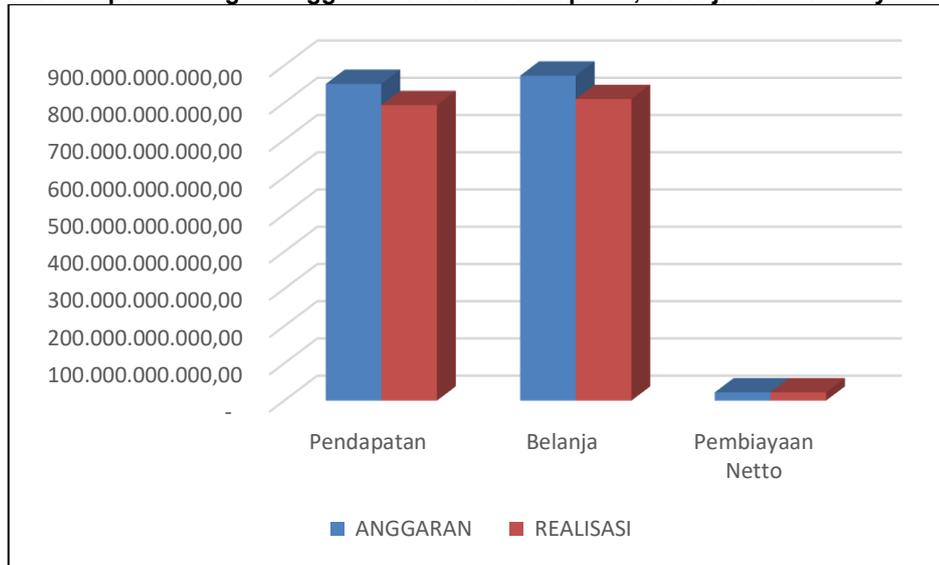
1. Tidak tercapai realisasi belanja tanah karena tidak ditemukan Tanah yang sesuai dengan nilai NJOP yang telah ditetapkan untuk penanganan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup, Anggaran pengurusan sertifikat tanah tidak direalisasikan dan biaya operasional untuk perolehan tanah disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Tidak tercapainya target Belanja Gedung dan Bangunan dikarenakan rendahnya realisasi pendapatan BLUD yang mengakibatkan rendahnya dana yang tersedia untuk belanja modal gedung dan bangunan BLUD pada RSUD Mayjen H.A.Thalib Kota Sungai Penuh.
3. Tidak tercapainya target Belanja Peralatan dan Mesin karena disebabkan rendahnya realisasi pendapatan BLUD yang mengakibatkan rendahnya dana belanja modal Peralatan dan Mesin pada RSUD Mayjen H.A.Thalib Kota Sungai Penuh.

### 3.5 Pembiayaan

Target Pembiayaan Netto Tahun 2024 sebesar Rp22.258.974.069,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp22.258.974.069,79 atau tercapai sebesar 100%, turun sebesar Rp27.504.349.165,18 atau sebesar 55.27% jika dibandingkan dengan Pembiayaan Netto Tahun 2023 sebesar Rp49.763.323.234,00.

Grafik berikut menunjukkan perbandingan anggaran realisasi Pendapatan, Belanja dan Transfer serta Pembiayaan.

**Grafik 3.1**  
**Grafik perbandingan Anggaran realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan**



Pada Tahun 2024 Pemerintah Kota Sungai Penuh memiliki Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp20.461.818.005,18. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban diharapkan atau diperkirakan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Rekapitulasi Kewajiban Jangka Pendek diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.3**  
**Rekapitulasi Kewajiban Jangka Pendek**

*(dalam rupiah)*

NO	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31 - DES - 2024
1	2	3
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	59.454.431,22
2	Utang Belanja	16.160.466.078,71
3	Pendapatan diterima dimuka	27.981.440,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.213.916.055,25
<b>JUMLAH</b>		<b>20.461.818.005,18</b>

Berdasarkan tabel diatas Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Sungai Penuh telah melakukan perencanaan penyelesaian kewajiban sebagai berikut:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp59.454.431,22 merupakan utang pajak Dana BOS yang belum disetor oleh bendahara Dana BOS ke Pemerintah Pusat
2. Utang Belanja sebesar Rp16.160.466.078,71 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Utang BPJS Sisa utang atas tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran peserta PBPU dan BP kelas III yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah jumlah hutang per 31 Desember 2024 sebesar telah dianggarkan pada TA 2025 sebesar Rp746.255.900.
  - b. Utang Kekurangan 4 % Iuran Wajib Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 sebesar Rp552.022.923,00
  - c. Utang belanja kepada pihak ketiga di RSUD Mayjen H.A Thalib yang diakui berdasarkan faktur yang belum dibayarkan sampai akhir Tahun 2024 sebesar

- Rp14.843.715.895,71 telah dilakukan pembayaran sampai bulan Mei 2025 sebesar Rp5.496.806.588,08
- d. Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp18.471.360,00 karena belum dibayar kepada pihak ketiga yang pelaksanaannya telah selesai berdasarkan BAST Nomor 400.7.5.6/263/BASTP-DAK/DINKES/2023.
3. Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp27.981.440,00 merupakan Pendapatan dari Pajak Reklame yang sudah diterima Pemkot Sungai Penuh sebesar Rp26.451.440,00 dan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas sewa rumah sebesar Rp1.530.000,00 telah dilakukan pemulihan pada TA 2025.
  4. Utang Jangka Pendek Lainnya Sebesar Rp4.213.916.055,25 yang terdiri dari:
    - a. Kelebihan setor sisa uang pada PPTK Tahun 2022 sebesar Rp8.605.111,00.
    - b. Utang Kurang Salur ADD, Kurang Salur bagi hasil pajak dan retribusi untuk Pemerintah Desa TA 2022 s.d. 2023 sebesar Rp4.205.310.944,25 yang telah dianggarkan pada APBD Kota Sungai Penuh TA 2025 sebesar Rp4.205.310.944,25 telah dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025



## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

### 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

**Entitas Pelaporan** adalah unit Pemerintah Daerah (Pemda) yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemda atau suatu organisasi di lingkungan Pemda atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh SKPKD.

**Entitas Akuntansi** adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Pemda Kota Sungai Penuh yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi.

Struktur dan pelaksanaan APBD Pemkot Sungai Penuh Tahun Anggaran (TA) 2024 telah mengacu kepada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan mengacu pada Permendagri tersebut, Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Wali Kota sebagai Kepala Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan.

Berdasarkan Permendagri tersebut di atas, pertanggungjawaban Wali Kota sebagai Kepala Daerah dalam pelaksanaan APBD adalah berupa laporan keuangan yang terdiri dari LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.

### 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Sungai Penuh yaitu:

1. Basis Akuntansi yang digunakan adalah Basis Kas untuk Pengeluaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam LRA dan Basis Akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas dalam Neraca.
2. Basis Kas untuk Realisasi Anggaran menunjukkan bahwa Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh Kasda serta Belanja Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kasda. Pemda tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.
3. Basis Akrual untuk Neraca berarti bahwa Aset, Kewajiban dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemda, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh Kasda.
4. Jika dihapuskan oleh ketentuan perundang-undangan, entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual tetap menyusun laporan keuangan yang berbasis kas.



Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat Kas atau Setara Kas diterima atau dikeluarkan, sedangkan Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa lainnya tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dikeluarkan.

### 4.3

#### **Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

##### 1. Pendapatan - LRA

Berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pernyataan Nomor 2 Paragraf 21 yang menyatakan bahwa Pendapatan diakui pada saat diterima rekening Kasda. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara (RKUN)/ Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- 1) PAD;
- 2) Pendapatan Transfer;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

- 1) diterima di RKUD; atau
- 2) diterima oleh SKPD; atau
- 3) diterima entitas lain diluar Pemda atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

- 1) Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemda. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan, sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
- 2) Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.
- 3) Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan dimuka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan.

Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.

- 4) Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima dimuka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima Pemda. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
- 5) Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemda.
- 6) Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

## 2. Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 2 Paragraf 31 menyatakan bahwa belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, Belanja diakui pada saat pertanggungjawaban disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

Koreksi atas pengeluaran Belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran Belanja dibukukan sebagai pengurangan belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada tahun berikutnya, koreksi atas pengeluaran Belanja dibukukan pada Pendapatan Lain-lain.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

## 3. Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara Pendapatan dan Belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara Pendapatan dan Belanja selama satu periode pelaporan.

## 4. Pembiayaan

Berpedoman pada SAP Pernyataan Nomor 2 Paragraf 52 menyatakan bahwa Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada RKUD. Sementara itu, Paragraf 56 menyatakan bahwa Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari RKUD.

5. Aset  
Aset diakui pada saat diterima kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lainnya, dan Dana Cadangan.
6. Kewajiban  
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya ekonomi Pemda.  
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.
7. Ekuitas  
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
8. Pendapatan-LO  
Pernyataan SAP Nomor 12 menyatakan bahwa Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.
9. Beban  
Berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 2 Paragraf 31, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD. Sementara itu, Pernyataan SAP Nomor 12 menyebutkan bahwa Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

#### 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam Penyusunan Laporan Keuangan ini pada dasarnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pokok-pokok Kebijakan Akuntansi yang secara umum diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

##### 1. Kas dan Setara Kas

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Berdasarkan definisi tersebut, wujud kas dapat dibedakan atas uang tunai dan saldo simpanan di bank. Kas berupa uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam dalam mata uang rupiah dan mata uang asing yang dikuasai oleh pemerintah. Kas berbentuk saldo simpanan di bank adalah uang pada seluruh rekening bank yang dikuasai pemerintah yang dapat digunakan setiap saat.

Uang yang berada dalam pengelolaan pemerintah tidak semua dapat diakui sebagai Kas dan disajikan pada laporan keuangan sebagai aset lancar. Uang dalam pengelolaan pemerintah disajikan sebagai aset non lancar apabila uang tersebut tidak memenuhi definisi aset lancar dan definisi kas.

Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara Kas ditujukan

untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek yang termasuk dalam setara kas harus segera dapat diubah menjadi kas tunai dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Sebagai contoh, suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo tiga bulan atau kurang terhitung sejak tanggal perolehan investasi, misalnya deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan, dan investasi yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa biaya signifikan.

#### 1) Kas di Kasda

Merupakan saldo Kas Pemkot Sungai Penuh yang berada dalam pengelolaan Pemegang Kasda, baik dalam bentuk tunai maupun pada bank;

Kas di Kasda berada dibawah penguasaan BUD yang disimpan pada RKUD. Pembukaan RKUD dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku BUD pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Wali Kota Sungai Penuh. RKUD ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan yaitu Bank Jambi. Saldo Kas di Kasda akan bertambah apabila terdapat aliran kas masuk ke RKUD yang antara lain berasal dari:

- (1)Penyetoran kas PAD dari Bendahara Penerimaan;
- (2)Penyetoran pengembalian sisa uang persediaan dari Bendahara Pengeluaran;
- (3)Penerimaan pendapatan daerah, antara lain PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- (4)Penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang;
- (5)Penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan pihak ketiga.

Saldo Kas di Kasda akan berkurang apabila terdapat aliran kas keluar dari RKUD yang antara lain berasal dari:

- (1)Transfer uang persediaan ke rekening bendahara pengeluaran;
- (2)Belanja daerah, antara lain belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, belanja hibah;
- (3)Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal Pemda, dan pemberian pinjaman;
- (4)Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.

#### 2) Kas di Bendahara Penerimaan

Mencakup seluruh Kas baik saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggungjawab Bendahara Penerimaan, yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kasda per tanggal Neraca.

Pada setiap awal tahun anggaran, Wali Kota Sungai Penuh mengangkat Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD di lingkungan Pemkot Sungai Penuh. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Wali Kota memberi izin kepada kepala SKPD di lingkungan Pemda untuk membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan Wali Kota Sungai Penuh. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan terdiri dari kas tunai dan kas di rekening penerimaan. Saldo Kas di

Bendahara Penerimaan akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan umumnya dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang keluar yang berasal dari transfer penerimaan pendapatan ke RKUD. Kas yang berasal dari seluruh PAD yang ditampung di rekening penerimaan setiap hari disetor seluruhnya ke RKUD oleh Bendahara Penerimaan. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang daerah pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Kasda pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.

### 3) Kas di Bendahara Pengeluaran

Merupakan kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja yang belum disetorkan ke Kasda per tanggal Neraca. Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, SKPD dapat diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Wali Kota memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank Umum untuk menampung uang persediaan kepada SKPD. Dalam hal pengelolaan Uang Persediaan tersebut, pada TA 2024 Wali Kota mengangkat Bendahara Pengeluaran pada SKPD berdasarkan Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 100.3.3.3/Kep.195/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 100.3.3.3/Kep.5/2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024 tanggal 31 Juli 2024 dan Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 100.3.3.3/Kep.303/2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 100.3.3.3/Kep.6/2024 tentang Penunjukan Bendahara Penerima Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024 tanggal 1 November 2024. Uang Persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh kepala SKPD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa. Rekening pengeluaran SKPD tersebut selain mengelola Uang Persediaan juga mengelola uang yang akan digunakan sebagai belanja SKPD dalam bentuk tambahan uang persediaan atau dana LS yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD. Rekening pengeluaran SKPD dibuka atas nama Bendahara Pengeluaran SKPD dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari kas tunai dan kas di rekening pengeluaran. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akan bertambah apabila terdapat aliran uang masuk yang antara lain berasal dari:

- (1) Transfer uang persediaan dan/atau dana LS yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dari RKUD;
- (2) Penerimaan uang pengembalian belanja;
- (3) Penerimaan jasa giro; dan
- (4) Penerimaan uang potongan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran akan berkurang apabila terdapat aliran uang keluar yang antara lain berasal dari: Belanja daerah; Penyetoran uang pengembalian belanja; dan Penyetoran uang potongan pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran ke RKUN. Sebagai bagian dari pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran wajib menyetorkan sisa uang persediaan

paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan terakhir tahun anggaran. Bukti setoran sisa uang persediaan harus dilampiri sebagai bukti pertanggungjawaban. Apabila masih terdapat uang persediaan yang belum disetorkan ke RKUD sampai dengan tanggal Neraca, maka harus dilaporkan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran. Dalam pelaksanaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran juga bertindak sebagai wajib pungut atas transaksi keuangan yang dikenakan pajak Pemerintah seperti PPh 21 dan PPN, dimana uang atas potongan pajak tersebut harus segera disetorkan ke RKUN. Apabila sampai dengan tanggal Neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang berasal dari potongan pajak, jumlah tersebut dilaporkan di neraca sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

4) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Dalam pelaksanaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran juga bertindak sebagai wajib pungut atas transaksi keuangan yang dikenakan pajak seperti PPh 21 dan PPN, dimana uang atas potongan pajak tersebut harus segera disetorkan ke RKUN. Apabila sampai dengan tanggal Neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang berasal dari potongan pajak, jumlah tersebut dilaporkan di neraca sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

5) Kas di BLUD

Kas di Bendahara BLUD mencakup seluruh Kas baik saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggungjawab bendahara BLUD merupakan penerimaan pengelolaan BLUD ke Rekening BLUD. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD sebagai Kas di BLUD.

6) Kas di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS mencakup seluruh Kas baik saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggungjawab bendahara Dana BOS merupakan penerimaan dana BOS oleh sekolah negeri milik Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagai hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD sebagai Kas di Bendahara Dana BOS.

7) Kas di Bendahara BOS BOP

Kas di Bendahara BOS BOP mencakup seluruh Kas baik saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggungjawab bendahara Dana BOS merupakan penerimaan dana BOS oleh sekolah negeri milik Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagai hibah dari Pemerintah Pusat. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD sebagai Kas di Bendahara Dana BOS BOP.

8) Kas di Bendahara BOK

Kas di Bendahara BOK mencakup seluruh Kas baik saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggungjawab bendahara BOK merupakan penerimaan dana BOK dari Pemerintah Pusat yang ditransfer ke Rekening BOK. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD sebagai Kas di Bendahara BOK.

9) Kas di Bendahara FKTP

Kas di Bendahara FKTP mencakup seluruh Kas baik saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggungjawab bendahara FKTP merupakan penerimaan dana Kapitasi dari BPJS yang ditransfer ke Rekening FKTP. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD sebagai Kas di Bendahara FKTP.

10) Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah penerimaan hibah langsung dari donor oleh kementerian negara/lembaga dengan tujuan seperti yang ditetapkan oleh donor, penerimaan dana BOS oleh sekolah negeri milik Pemerintah Kota Sungai Penuh sebagai hibah dari Pemerintah Pusat. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD sebagai Kas Lainnya.

2. Piutang Pendapatan

Timbulnya piutang di lingkungan Pemkot Sungai Penuh pada umumnya terjadi karena adanya tunggakan pungutan pendapatan dan pemberian pinjaman serta transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pendapatan Pemkot Sungai Penuh terdiri dari PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dimana dalam komponen PAD terdapat Pendapatan Pajak. Piutang Pendapatan terdiri dari:

1) Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam UU Perpajakan atau Peraturan Daerah tentang Perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.

Menurut UU mengenai perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan mempertimbangkan bahwa pemungutan pajak lebih didasarkan pada hak negara/daerah yang dijamin dengan UU dan tidak didasarkan pada penyerahan suatu prestasi kepada pembayar pajak, maka sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, piutang pajak terjadi pada saat hak negara/daerah untuk menagih timbul.

Jenis pajak yang dapat dipungut oleh Pemkot Sungai Penuh antara lain:

- (1) Pajak Hotel;
- (2) Pajak Restoran;
- (3) Pajak Hiburan;
- (4) Pajak Reklame;
- (5) Pajak Penerangan Jalan;
- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (7) Pajak Air Tanah;
- (8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan
- (9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Terdapat dua cara yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu:

- (1) Menggunakan *self assessment*, dimana wajib pajak menaksir serta menghitung pajaknya sendiri dan melalui penetapan oleh kantor pajak.

(2) Dalam hal pengenaan pajak yang dilakukan dengan proses penetapan oleh kantor pajak, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Restoran, dan Pajak Reklame, maka Piutang Pajak diakui berdasarkan Surat Ketetapan Pajak atau dokumen lain tentang penetapan pajak yang dikeluarkan dikurangi dengan jumlah yang telah diterima dari wajib pajak.

2) Piutang Retribusi Daerah

Piutang yang timbul dari pungutan pendapatan daerah selain pajak antara lain Piutang Retribusi yang merupakan imbalan yang dipungut oleh Pemda dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan antara lain Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu.

Piutang Retribusi timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Jika sampai tanggal laporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka akan diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Nilai yang dilaporkan dalam laporan keuangan adalah sebesar nilai yang tercantum dalam STRD.

3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang karena hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan merupakan bagian laba BUMD berupa dividen tunai yang timbul apabila pada suatu tahun buku telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dalam RUPS tersebut telah ditetapkan besarnya bagian laba berupa dividen tunai yang harus disetor ke kas Negara/daerah. Apabila persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi, namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui adanya Piutang atas Bagian Laba BUMN/D berupa dividen tunai tersebut.

4) Piutang Lain-lain PAD yang sah

Piutang karena potensi PAD yang sah seperti penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, Piutang Jasa Giro, Piutang bunga, denda, pemanfaatan kekayaan daerah, dana kapitasi, dan sebagainya.

5) Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Piutang yang timbul akibat Peristiwa Transfer dari Pemerintah Pusat yaitu:

(1) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)

Piutang DBH Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemda yang bersangkutan.

(2) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)

Piutang DAU diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemda yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

(3) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)

Piutang DAK diakui pada saat Pemda telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemda adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Pengakuan Piutang

Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

1. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
2. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
2. Jumlah piutang dapat diukur.

Piutang Pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul, yaitu sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, atau yang dipersamakan, namun Pemerintah Kota Sungai Penuh belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Dalam hal pajak daerah bersifat *self assessment*, Piutang Pajak Daerah diakui berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) dari wajib pajak yang belum dilunasi.

Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul, yaitu sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dan dapat dipertanggungjawabkan yang belum dilunasi atau kurang dibayar dari yang telah ditetapkan.

Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, yang diberikan baik oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maupun dari pemerintah provinsi ke Pemerintah Kota Sungai Penuh. Piutang DBH dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

1. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
2. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
  - 1) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima yang bersangkutan.
  - 2) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
  - 3) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai dan/atau majelis TP/TGR (diluar pengadilan). SK Pembebanan/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur Pengadilan Negeri, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.
  - 4) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat telah terbit Surat Keputusan tentang pembagian bagi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang diambil pada saat Rapat Umum Pemegang Saham. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah ini diakui dan dicatat di SKPKD.
  - 5) Bagian Lancar Pinjaman kepada Pihak Ketiga, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, dan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi diakui berdasarkan bagian pinjaman, tagihan penjualan angsuran dan TGR yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 1 tahun.

#### Pemberhentian Pengakuan

1. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
2. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

3. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.
4. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
5. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan
6. Kriteria penghapus bukuan piutang, adalah sebagai berikut:
  - 1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
    - (1) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
    - (2) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
    - (3) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
  - 2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
  - 3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*writeoff*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
  - 4) Penghapusbukuan dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
    - (1) Piutang melampaui batas umur (kedaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet; dan/atau
    - (2) Debitor tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/atau
    - (3) Debitor mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
    - (4) Debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
    - (5) Debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
    - (6) Debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
    - (7) Debitor tidak dapat ditemukan lagi karena:
      - (1)) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/ tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
      - (2)) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
      - (3)) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang



tidak dapat dihindari seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ pernyataan Gubernur/ Bupati/Wali Kota; dan/atau

- (4) Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
7. Penghapus tagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomi.
8. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada Kantor Penilaian Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan.
9. Penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 dilakukan oleh Kepala Daerah, sedangkan penghapusan piutang dengan nilai di atas Rp5.000.000.000,00 dilakukan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.
10. Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
  - 1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang/ debitur kepada daerah, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam, misalnya kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) yang tidak mampu membayar; dan/atau
  - 2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan; dan/atau
  - 3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih; dan/atau
  - 4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit; dan/atau
  - 5) Penghapustagihan setelah semua upaya tagih dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual, jaminan dilelang; dan/atau
  - 6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain; dan/atau
  - 7) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

Penghapusbuku ( *write down* maupun *write off* ) masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *hair cut* memungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

## Pengukuran Piutang

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

1. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;
2. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib WP yang mengajukan banding;
3. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke Kasda oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak Pemda sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan adalah sebagai berikut:

### 1. Pemberian Pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kasda dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

### 2. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

### 3. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

### 4. Pemberian Fasilitas/Jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

1. DBH disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2. DAU sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten/Kota;
3. DAK disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

#### Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1. Pajak Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*);
2. Pajak Ditetapkan oleh Pemda (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
  - (1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
  - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
  - (3) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
  - (4) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
  - (5) Wajib Pajak likuid; dan/atau
  - (6) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
  - (1) Umur piutang 1 sampai dengan kurang dari 2 tahun; dan/atau
  - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (3) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - (4) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
  - (5) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
  - (1) Umur piutang 2 sampai dengan kurang dari 5 tahun; dan/atau
  - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau

- (3) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
  - (4) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
  - (5) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- (1) Umur piutang 5 tahun ke atas; dan/atau
  - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (3) Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya/ditemukan; dan/atau
  - (4) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - (5) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Pemda (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- (1) Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
  - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau
  - (3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
  - (4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
  - (5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- (1) Umur piutang satu sampai dengan kurang dari dua tahun; dan/atau
  - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (3) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - (4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- (1) Umur piutang dua sampai dengan kurang dari lima tahun; dan/atau
  - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (3) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
  - (4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
- (1) Umur piutang lima tahun ke atas; dan/atau
  - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (3) Wajib Pajak diketahui keberadaannya; dan/atau
  - (4) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - (5) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
  - 1) Umur piutang nol sampai dengan satu bulan; dan/atau
  - 2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
  - 1) Umur piutang satu bulan sampai dengan tiga bulan; dan/atau
  - 2) Apabila wajib retribusi dalam melakukan pelunasan dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
  - 1) Umur piutang tiga bulan sampai dengan dua belas bulan; dan/atau
  - 2) Apabila wajib retribusi dalam melakukan pelunasan dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
  - 1) Umur piutang lebih dari 12 bulan; dan/atau
  - 2) Apabila wajib retribusi dalam melakukan pelunasan dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara.

Penggolongan Kualitas Piutang selain Pajak dan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;
4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara;

Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan dengan berdasarkan pengelompokan piutang, umur piutang (*aging schedule*) dan tingkat kolektibilitasnya.

Penentuan Besaran Penyisihan Piutang

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

1. Kualitas lancar, sebesar 0,5% dari piutang dengan kualitas lancar;
2. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
3. Kualitas diragukan, sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

4. Kualitas macet, sebesar 100% seratus persen dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
3. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi Daerah

Tuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan dikenakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tagihan Ganti Rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh Wali Kota Sungai Penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Walaupun yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
  - 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
4. Piutang Lainnya

Piutang karena potensi PAD lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa Pemda dan sebagainya.

Piutang DBH Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh Pemda yang bersangkutan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemda yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemda telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemda adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat Pemda telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

1. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
2. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi Pemda yang bersangkutan.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemda penerima yang bersangkutan.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan

piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
2. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding; atau
3. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke Kasda oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak Pemda sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

#### 1. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kasda dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

#### 2. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

##### 1) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

##### 2) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

1. DBH disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2. DAU sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten/Kota;
3. DAK disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Piutang lainnya disajikan sebesar nilai nominal atas transaksi yang berkaitan dengan piutang diluar bagian lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD, Bagian Lancar TGR dan Piutang Pajak.

#### Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau Penyisihan piutang tidak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
2. Pajak Ditetapkan Oleh Pemda (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
  - (1) Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
  - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
  - (3) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
  - (4) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
  - (5) Wajib Pajak likuid; dan/atau
  - (6) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
  - (1) Umur piutang satu sampai dengan kurang dari dua tahun; dan/atau
  - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (3) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - (4) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
  - (5) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
  - (1) Umur piutang dua sampai dengan kurang dari lima tahun; dan/atau
  - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (3) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
  - (4) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
  - (5) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
  - (1) Umur piutang lima tahun ke atas; dan/atau
  - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (3) Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya/ditemukan; dan/atau
  - (4) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - (5) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Pemda (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
  - (1) Umur piutang kurang dari satu tahun; dan/atau
  - (2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau
  - (3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
  - (4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
  - (5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
  - (1) Umur piutang satu sampai dengan kurang dari dua tahun; dan/atau
  - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (3) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - (4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
  - (1) Umur piutang dua sampai dengan kurang dari lima tahun; dan/atau
  - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (3) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
  - (4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
  - (1) Umur piutang lima tahun ke atas; dan/atau
  - (2) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
  - (3) Wajib Pajak diketahui keberadaannya; dan/atau

- (4) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- (5) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*)

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kualitas Lancar, dengan kriteria:
  - (1) Umur piutang nol sampai dengan satu bulan; dan/atau
  - (2) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
- 2) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
  - (1) Umur piutang satu bulan sampai dengan tiga bulan; dan/atau
  - (2) Apabila wajib retribusi dalam melakukan pelunasan dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
- 3) Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
  - (1) Umur piutang tiga bulan sampai dengan dua belas bulan; dan/atau
  - (2) Apabila wajib retribusi dalam melakukan pelunasan dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
  - (1) Umur piutang lebih dari dua belas bulan; dan/atau
  - (2) Apabila wajib retribusi dalam melakukan pelunasan dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani piutang negara.

Penggolongan Kualitas Piutang selain Pajak dan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas Lancar, apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- 2) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- 3) Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;
- 4) Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani piutang negara;

Penyisihan Piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai piutang yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dilakukan dengan berdasarkan pengelompokan piutang, umur piutang (*aging schedule*) dan tingkat kolektibilitasnya.

Penentuan Besaran Penyisihan Piutang

Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:

1. Kualitas lancar, sebesar 0,5% dari piutang dengan kualitas lancar;

2. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
  3. Kualitas diragukan, sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
  4. Kualitas macet, sebesar 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
5. **Beban Dibayar dimuka**  
Merupakan Pengeluaran satuan kerja/ Pemerintah yang telah dibayarkan dari kas umum negara dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/ fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/ dinikmati satuan kerja/ pemerintah.

6. **Persediaan**  
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemkot Sungai Penuh, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan juga mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Secara rinci, persediaan merupakan aset berwujud yang berupa:

- 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemkot Sungai Penuh;
- 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
- 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 4) Barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemda dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil Inventarisasi fisik (*stock opname*).

#### Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kedaluwarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan:

- 1) Metode Perpetual

Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*. Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama SKPD dan sifatnya *continues* serta membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan dan pupuk.

## 2) Metode Periodik

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/ harga pokok produksi terakhir/ nilai wajar. Digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK).

Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

Persediaan dicatat sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
- 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.  
Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal (yang seringkali disebut sebagai benda berharga) yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai sebesar biaya perolehan/pembuatan benda berharga, bukan sebesar nilai nominal karcis yang telah diporporasi. Jika jumlah persediaan benda berharga pada akhir periode pelaporan terdiri atas lebih dari satu kali proses pembuatan atau perolehan maka nilai benda berharga yang disajikan dalam neraca dicatat sebesar harga pembuatan/perolehan terakhir.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar, korporasi dan/atau entitas lain.

## 7. Investasi Jangka Panjang

- 1) Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan;
- 2) Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Permanen dan Non Permanen, Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan;

- 3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.
- 4) Investasi Nonpermanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- 5) Penyertaan Modal Pemda pada Perusahaan Negara/Daerah dan Lembaga Keuangan Negara atau Badan Hukum Lainnya, Investasi Permanen Lainnya, yaitu jenis Investasi Permanen yang tidak tercakup diatas: dan
- 6) Penyertaan Modal Pemda dibukukan berdasarkan harga perolehan atau nilai nominal yang disetor, termasuk biaya tambahan lainnya yang timbul untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- 7) Investasi diakui jika kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang akan datang atas suatu Investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah.
- 8) Nilai perolehan atau nilai wajar Investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen;
- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi non permanen dapat berupa:

- (1) Pembelian Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan;
- (2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- (3) Modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir;
- (4) Investasi non permanen lainnya.

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria:

- 1) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/ mengidentifikasi biaya perolehannya.

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan dicatat sebagai

pengeluaran pembiayaan.

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki nilai pasar yang aktif dapat menggunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

#### Metode Penilaian Investasi Jangka Panjang

1) Penilaian investasi jangka panjang Pemda dilakukan dengan 3 (tiga) metode sebagai berikut:

(1) Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

(2) Metode ekuitas;

Metode ekuitas merupakan investasi Pemda yang dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan Pemda setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemda, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemda.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemda, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

(3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi Pemda dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

2) Penggunaan metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

(1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

(2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

(3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

(4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

#### 8. Aset Tetap

1) Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;

2) Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap, suatu aset harus berwujud dan memiliki kriteria:

- (1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
  - (2) biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
  - (3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
  - (4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
  - (5) memenuhi nilai minimal untuk dapat dikapitalisasi.
- 3) Aset Tetap yang nilai per unitnya kecil dapat langsung dibebankan sebagai belanja pada saat perolehan. Pemkot Sungai Penuh telah menetapkan batas pengeluaran yang harus dikapitalisasi sebagai aset tetap dan pengeluaran harus dibebankan sebagai belanja. Batasan nilai minimum pengeluaran yang dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap adalah pengeluaran dengan nilai perolehan minimal diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.1**  
**Nilai Minimal Aset Tetap Yang Dapat Dikapitalisasi**  
*(dalam rupiah)*

NO.	ASET TETAP	NOMINAL HARGA PEROLEHAN
1	Tanah	1,00
2	Peralatan dan Mesin	1.000.000,00
3	Gedung dan Bangunan	10.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,00
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1,00
6	Aset Tetap Lainnya (selain buku)	1.000.000,00
7	Aset Tetap Lainnya (khusus buku)	100.000,00

- 4) Aset Tetap dinilai berdasarkan Biaya Perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan Biaya Perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan;
- 5) Barang berwujud yang memenuhi klasifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai Aset Tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan, apabila Aset Tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh;
- 6) Aset Tetap diungkapkan untuk masing-masing jenis Aset Tetap, eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap, jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi, dan jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap;
- 7) Jika penyelesaian suatu Aset Tetap melebihi dan atau melewati satu periode Tahun Anggaran, maka Aset Tetap yang belum selesai tersebut digolongkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan Aset Tetap tersebut selesai dan siap digunakan;
- 8) Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas, dihapuskan dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK;
- 9) Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi), dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan;
- 10) Aset Tetap terdiri atas kelompok:
  - (1) Tanah;
  - (2) Peralatan dan Mesin;
  - (3) Gedung dan Bangunan;

- (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;
- (5) Aset Tetap lainnya;
- (6) Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- (7) Akumulasi Penyusutan.

11) Penilaian Aset Tetap;

(1) Tanah;

Pencatatan nilai Tanah meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran, dan biaya penimbunan. Nilai Tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.

(2) Peralatan dan Mesin;

Pencatatan nilai Peralatan dan Mesin mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan peralatan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi, dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan peralatan dan mesin sehingga dapat digunakan.

(3) Gedung dan Bangunan;

Pencatatan nilai Gedung dan Bangunan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), notaris dan pajak.

(4) Jalan, Irigasi dan Jaringan;

Pencatatan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah sampai dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut siap untuk digunakan.

(5) Aset Tetap Lainnya;

Pencatatan Aset Tetap Lainnya mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain sampai dengan Aset Tetap Lainnya tersebut siap digunakan.

(6) Konstruksi Dalam Pengerjaan;

Pencatatan nilai konstruksi dalam pengerjaan mencakup harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola (jika ada).

12) Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemkot Sungai Penuh atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dengan batasan pengertian tersebut maka Pemkot Sungai Penuh

harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak ketiga.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya yang dapat dikapitalisasi secara langsung adalah:

(1) Biaya Konstruksi Fisik

Yaitu besarnya biaya yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan, yang dilaksanakan oleh penyedia jasa pelaksanaan secara kontraktual.

(2) Biaya Perencanaan Teknis Konstruksi

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai perencanaan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa perencanaan.

(3) Biaya Pengawasan Konstruksi

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pengawasan pembangunan, yang dilakukan oleh penyedia jasa pengawasan.

(4) Biaya Pengelolaan Kegiatan

Yaitu besarnya biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan pembangunan. Biaya Pengelolaan Kegiatan terdiri dari:

(1) Biaya operasional unsur Pengguna Anggaran

Biaya honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat-rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan, serta persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi/ dokumen pendaftaran aset, dan biaya lainnya.

(2) Biaya operasional unsur Pengelola Teknis

Biaya honorarium pengelola teknis, honorarium tenaga ahli/ narasumber (apabila diperlukan), perjalanan dinas, transport lokal, biaya rapat, biaya pembelian/penyewaan bahan dan alat yang berkaitan dengan kegiatan yang



bersangkutan dan biaya lainnya.

Akumulasi penyusutan merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap.

Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran hutang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Disamping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

Penyusutan aset tetap bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana diberlakukan di sektor komersial. Penyesuaian nilai ini lebih merupakan upaya untuk menunjukkan pengurangan nilai karena pengonsumsi potensi manfaat aset oleh karena pemakaian dan atau pengurangan nilai karena keusangan dan lain-lain.

Prasyarat yang perlu dipenuhi untuk menerapkan penyusutan, adalah:

- (1) Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun;
- (2) Nilai yang Dapat Disusutkan;
- (3) Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap;
- (4) Prosedur penyusutan:
  - (1) Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan;
  - (2) Pengelompokan Aset;
  - (3) Penetapan Nilai Wajar Aset Tetap;
  - (4) Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan;
  - (5) Penetapan Metode Penyusutan;
  - (6) Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan.

Selain tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah

Metode garis lurus (*straight line method*) dengan masa manfaat, diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.2**  
**Masa Manfaat Aset Tetap**

NO	JENIS ASET TETAP	UMUR EKONOMIS (TAHUN)
<b>I</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	
-	Alat-Alat Besar Darat	10
-	Alat-Alat Besar Apung	8
-	Alat-Alat Bantu	7
-	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
-	Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	2
-	Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor	10
-	Alat-Alat Angkutan Apung Tidak Bermotor	3
-	Alat-Alat Angkut Bermotor Udara	20
-	Alat Bengkel Bermesin	10
-	Alat Bengkel Tidak Bermesin	5
-	AlatUkur	5
<b>II</b>	<b>Alat Pertanian</b>	
-	Alat Pengolahan	4
	Alat Pemeliharaan Tanaman dan Alat Penyimpanan	4
<b>III</b>	<b>Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	
-	Alat Kantor	5
-	Alat Rumah Tangga termasuk meubelair	5
-	Komputer	5
-	Meja dan Kursi/rapat pejabat	5
<b>IV</b>	<b>Alat Studio dan Komunikasi</b>	
-	Alat Studio	5
-	Alat Komunikasi	5
-	Peralatan Pemancar	10
<b>V</b>	<b>Alat Kedokteran</b>	
-	Alat Kedokteran	5
-	Alat Kesehatan	5
<b>VI</b>	<b>Alat Laboratorium</b>	
-	Unit Laboratorium	8
-	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
-	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
-	Alat Laboratorium Hidrodinamika	15
<b>VII</b>	<b>Alat Persenjataan dan Keamanan</b>	
-	Senjata Api	10
-	Persenjataan non Senjata Api	3
-	Senjata Sinar	10
-	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
<b>VIII</b>	<b>Bangunan dan Gedung</b>	
-	Bangunan Gedung Tempat Kerja	40
-	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	40
-	Bangunan Menara	20
<b>IX</b>	<b>Monumen</b>	
-	Bangunan Bersejarah	30

NO	JENIS ASET TETAP	UMUR EKONOMIS (TAHUN)
	- Tugu Peringatan	20
	- Candi	30
	- Rambu-rambu	3
	- Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
<b>X</b>	<b>Jalan/jembatan, Jaringan, irigasi</b>	
	- Jalan	10
	- Jembatan	30
	- Bangunan Air dan Irigasi	20
	- Instalasi Air Minum	20
	- Instalasi Air Kotor/Limbah dan sejenisnya	20
	- Instalasi Listrik (pembangkit dan sejenisnya)	20
	- Instalasi Penangkal Petir	20
	- Jaringan Air minum dan sejenisnya	20
	- Jaringan Listrik dan Sejenisnya	20
	- Jaringan Telepon dan Sejenisnya	20
<b>XI</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	
	- Barang Perpustakaan	2
	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	3
	- Alat Olahraga Lainnya	3

Nilai sisa untuk masing-masing golongan barang ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### 9. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

#### 10. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset Pemda yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi Pemda karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan Pemda sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.
- 2) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemda secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah Pemda.
- 3) Tagihan tuntutan Kerugian Daerah adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemda diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan.

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

3) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*) Pemda oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemda setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak Pemda oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemda setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh Pemda kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Bangun Serah Guna - BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*) adalah pemanfaatan aset Pemda oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemda untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemda disertai dengan kewajiban Pemda untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh Pemda ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

#### 11. Aset Tak Berwujud (ATB)

ATB adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemda. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

- 1) *Goodwill*  
*Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh Pemda akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
- 2) Hak Paten atau Hak Cipta  
Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemda. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
- 3) Royalti  
Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
- 4) *Software*  
*Software* komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.
- 5) Lisensi  
Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- 6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang  
Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- 7) Aset Tak Berwujud Lainnya  
Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
- 8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan  
Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible aset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika:

- 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas Pemda atau dinikmati oleh entitas; dan
- 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

#### 12. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus, dengan masa manfaat 5 tahun.

#### 13. Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk :

- a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif; atau;
- b. Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi properti investasi adalah sebagai berikut:

- a. Properti Investasi Aset Tetap jenisnya adalah Properti investasi tanah, properti investasi peralatan dan mesin, properti investasi gedung dan bangunan, properti investasi jalan, jaringan dan irigasi
- b. Properti Investasi Aset Tidak Berwujud jenisnya adalah lisensi dan *Francise*, hak cipta, hak paten, dan *Software*.

#### Penyusutan Aset Properti

Pada akhir periode pelaporan, pemerintah daerah membuat bukti memorial penyusutan aset properti investasi. Penyusutan atas aset properti investasi didasarkan pada nilai properti investasi hasil revaluasi dengan menggunakan sisa masa manfaat aset properti investasi yang bersangkutan. Apabila terdapat perubahan umur ekonomis aset properti investasi setelah proses revaluasi, maka penentuan nilai penyusutan setelah proses revaluasi menggunakan sisa umur ekonomis yang baru (umur ekonomis hasil revaluasi dikurangi umur ekonomis yang telah berlalu).

#### 14. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban Pemda dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

#### Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer Pemda, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

(1) Kewajiban Jangka Pendek, diantaranya:

- (1)) Utang kepada Pihak Ketiga;
- (2)) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- (3)) Utang Bunga;
- (4)) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo.

(2) Kewajiban Lancar dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi;

2) Kewajiban Jangka Panjang

(1) Kewajiban Jangka Panjang merupakan Kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal Neraca.

(2) Kewajiban Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

## 15. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

## 16. Sistem Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

Sistem Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan adalah peristiwa baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan, yang terjadi diantara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan); dan
- b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan).

Ketentuan Umum untuk menentukan suatu peristiwa memenuhi defnisi bahwa setelah tanggal pelaporan, perlu dilakukan identifikasi tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit. Tanggal pelaporan adalah tanggal terakhir dari periode pelaporan keuangan tersebut. Tanggal pelaporan keuangan diotorisasi untuk terbit tanggal adalah tanggal saat audit laporan keuangan setelah selesai yang dinyatakan dalam LHP auditor atau tanggal saat pemerintah daerah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan, apabila laporan keuangan tersebut tidak diaudit.



## **BAB V**

### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Bab ini menguraikan pos-pos dalam Laporan Keuangan, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). LRA menyajikan realisasi Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit, dan Pembiayaan serta perbandingannya dengan Anggaran dalam APBD Tahun Anggaran (TA) 2024. LPSAL menyajikan Saldo Anggaran Lebih TA 2024 dengan Perbandingan Saldo Anggaran Lebih TA 2023. Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh yang terbagi atas Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca disajikan secara komparatif, dengan mengungkapkan nilai pada akhir periode laporan maupun nilai pada akhir periode sebelumnya yakni tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

LO menyajikan saldo Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit saldo APBD TA 2024 serta perbandingannya dengan saldo dalam APBD TA 2023. LAK menjelaskan sumber Kas, perubahan Kas dan setara Kas selama TA 2024, serta saldo Kas dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. LPE menyajikan Ekuitas Awal, Surplus/Defisit, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, Ekuitas Akhir serta perbandingan dengan Tahun 2023.

LKPD Pemkot Sungai Penuh TA 2024 disusun berdasarkan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Sungai Penuh yang berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.



**BAB V.I**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**5.1 Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

<b>5.1.1</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<u>TA 2024 (Rp)</u>	<u>TA 2023 (Rp)</u>
		<b>793.723.306.683,28</b>	<b>761.196.247.749,35</b>

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pemkot Sungai Penuh pada TA 2024 menganggarkan Pendapatan Daerah sebesar Rp850.763.684.127,00 dengan realisasi sebesar Rp793.723.306.683,28 atau sebesar 93,30%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp32.527.058.933,93 atau sebesar 4,27% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp761.196.247.749,35. Rincian realisasi Pendapatan Daerah TA 2024 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.1**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Berdasarkan Kelompok Pendapatan**

*(dalam rupiah)*

NO	PENDAPATAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIK/(TURUN)
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Pendapatan Asli Daerah – LRA	103.181.802.795,00	66.371.990.476,28	64,33	69.634.628.107,77	(3.262.637.631,49)
2.	Pendapatan Transfer – LRA	742.785.016.858,00	722.625.758.110,00	97,29	686.910.422.605,00	35.715.335.505,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA	4.796.864.474,00	4.725.558.097,00	98,51	4.651.197.036,58	74.361.060,42
<b>JUMLAH</b>		<b>850.763.684.127,00</b>	<b>793.723.306.683,28</b>	<b>93,30</b>	<b>761.196.247.749,35</b>	<b>32.527.058.933,93</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa kontribusi terbesar dari seluruh realisasi Pendapatan TA 2024 adalah Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer - LRA sebesar Rp722.625.758.110,00 diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah - LRA sebesar Rp66.371.990.476,28 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA sebesar Rp4.725.558.097,00.

Rincian Pendapatan Daerah per sub rincian objek TA 2024 disajikan pada **Lampiran 3**.

<b>5.1.1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<u>TA 2024 (Rp)</u>	<u>TA 2023 (Rp)</u>
		<b>66.371.990.476,28</b>	<b>69.634.628.107,77</b>

PAD TA 2024 dianggarkan sebesar Rp103.181.802.795,00 dengan realisasi sebesar Rp66.371.990.476,28 atau sebesar 64,33%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp3.262.637.631,49 atau sebesar 4,69% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp69.634.628.107,77, realisasi PAD berdasarkan jenis pendapatan diuraikan pada berikut.

**Tabel 5.1.2**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Jenis Pendapatan**

*(dalam rupiah)*

NO	PENDAPATAN ASLI DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIK/(TURUN)
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Pajak Daerah	13.577.304.750,00	9.073.056.124,00	66,83	9.125.516.323,00	(52.460.199,00)
2.	Retribusi Daerah	7.793.112.000,00	2.626.488.748,00	33,70	2.221.045.347,50	405.443.400,50

NO	PENDAPATAN ASLI DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIK/(TURUN)
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.056.605.045,00	12.056.605.045,86	100,00	11.966.693.301,67	89.911.744,19
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	69.754.781.000,00	42.615.840.558,42	61,09	46.321.373.135,60	(3.705.532.577,18)
<b>JUMLAH</b>		<b>103.181.802.795,00</b>	<b>66.371.990.476,28</b>	<b>64,33</b>	<b>69.634.628.107,77</b>	<b>(3.262.637.631,49)</b>

#### 5.1.1.1.1

#### Pajak Daerah

**TA 2024 (Rp)**

**9.073.056.124,00**

**TA 2023 (Rp)**

**9.125.516.323,00**

Pajak Daerah Kota Sungai Penuh ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan dasar pengenaan dan besaran tarif untuk masing-masing jenis pajak.

Pajak Daerah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp13.577.304.750,00 dengan realisasi sebesar Rp9.073.056.124,00 atau sebesar 66,83%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp52.460.199,00 atau sebesar 0,57% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp9.125.516.323,00 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.3**  
**Realisasi Pajak Daerah**

(dalam rupiah)

NO	PAJAK DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIK/(TURUN)
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Pajak Hotel	1.050.000.000,00	804.792.360,00	76,65	716.179.553,00	88.612.807,00
2.	Pajak Restoran	2.080.000.000,00	1.546.302.884,00	74,34	1.229.527.561,00	316.775.323,00
3.	Pajak Hiburan	93.600.000,00	23.586.000,00	25,20	30.502.800,00	(6.916.800,00)
4.	Pajak Reklame	555.600.000,00	291.129.480,00	52,40	323.121.920,00	(31.992.440,00)
5.	Pajak Penerangan Jalan	4.544.704.750,00	4.323.424.184,00	95,13	4.198.572.353,00	124.851.831,00
6.	Pajak Parkir	5.000.000,00	104.000,00	2,08	0,00	104.000,00
7.	Pajak Air Tanah	20.000.000,00	16.905.000,00	84,53	13.230.000,00	3.675.000,00
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.428.400.000,00	289.886.907,00	11,94	256.100.555,00	33.786.352,00
9.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.000.000.000,00	503.878.809,00	50,39	628.617.296,00	(124.738.487,00)
10.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.800.000.000,00	1.273.046.500,00	70,72	1.729.664.285,00	(456.617.785,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>13.577.304.750,00</b>	<b>9.073.056.124,00</b>	<b>66,83</b>	<b>9.125.516.323,00</b>	<b>(52.460.199,00)</b>

Rincian realisasi Pajak Daerah TA 2024 disajikan pada **Lampiran 4**.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Pajak Daerah TA 2024 tidak memenuhi target dengan realisasi sebesar 66,83%. Persentase penerimaan pajak tertinggi adalah Pendapatan Pajak Penerangan Jalan sebesar 95,13% dimana target sebesar Rp4.544.704.750,00 dengan realisasi sebesar Rp4.323.424.184,00. Secara keseluruhan, Pajak Daerah TA 2024 belum mencapai target, penyebab tidak tercapainya target Pajak Daerah tersebut antara lain:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh terhadap pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan PBB-P2.
2. Tingginya target pajak yang ditetapkan atas Pajak Mineral Bukan Logam sedangkan Kota Sungai Penuh tidak memiliki tambang galian C.
3. Belum adanya aparat Perpajakan Daerah (petugas pemeriksa pajak daerah dan juru sita Pajak Daerah) di Kota Sungai Penuh yang mengakibatkan terbatasnya wewenang petugas dalam memeriksa dan menagih pajak.

Pada TA 2025 Pemkot Sungai Penuh telah menerapkan Opsen Pajak. Penerapan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Opsen Pajak terdiri dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB.

#### 5.1.1.1.2

#### Retribusi Daerah

**TA 2024 (Rp)**

**2.626.488.748,00**

**TA 2023 (Rp)**

**2.221.045.347,50**

Retribusi Daerah Kota Sungai Penuh ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam peraturan tersebut telah ditetapkan dasar pengenaan dan besaran tarif untuk masing-masing jenis retribusi.

Retribusi Daerah pada TA 2024 dianggarkan sebesar Rp7.793.112.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.626.488.748,00 atau sebesar 33,70%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp405.443.400,50 atau sebesar 18,25% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp2.221.045.347,50 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.4**  
**Realisasi Retribusi Daerah**

(dalam rupiah)

NO	RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIK/(TURUN)
				$5 = 4 : 3 \times 100$		$7 = 4 - 6$
1.	Retribusi Jasa Umum	3.410.922.000,00	451.754.000,00	13,24	554.173.500,00	(102.419.500,00)
2.	Retribusi Jasa Usaha	3.977.359.000,00	2.159.534.768,00	54,30	1.613.945.785,00	545.588.983,00
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	404.831.000,00	15.199.980,00	3,75	52.926.062,50	(37.726.082,50)
<b>JUMLAH</b>		<b>7.793.112.000,00</b>	<b>2.626.488.748,00</b>	<b>33,70</b>	<b>2.221.045.347,50</b>	<b>405.443.400,50</b>

Rincian realisasi Retribusi Daerah TA 2024 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.5**  
**Rincian Realisasi Retribusi Daerah**

(dalam rupiah)

NO	RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE %	REALISASI 2023	NAIK (TURUN)
				$5 = (4 : 3) \times 100$		$7 = 4 - 6$
<b>1</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>3.410.922.000,00</b>	<b>451.754.000,00</b>	<b>13,24</b>	<b>554.173.500,00</b>	<b>(102.419.500,00)</b>
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	710.000.000,00	142.430.000,00	20,06	128.291.500,00	14.138.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.889.132.000,00	214.595.000,00	11,36	255.505.000,00	(40.910.000,00)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	811.790.000,00	94.729.000,00	11,67	103.635.000,00	(8.906.000,00)
4	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	0,00	0,00	334.000,00	(334.000,00)

NO	RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE %	REALISASI 2023	NAIK (TURUN)
1	2	3	4	5 = (4 : 3) x 100	6	7 = 4 - 6
5	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	66.408.000,00	(66.408.000,00)
<b>II</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>3.977.359.000,00</b>	<b>2.159.534.768,00</b>	<b>54,30</b>	<b>1.613.945.785,00</b>	<b>545.588.983,00</b>
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.456.400.000,00	1.301.852.768,00	89,39	706.542.285,00	595.310.483,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.780.606.000,00	504.054.000,00	28,31	564.782.500,00	(60.728.500,00)
3	Retribusi Terminal	0,00	0,00	-	121.646.000,00	(121.646.000,00)
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	400.700.000,00	100.538.000,00	25,09	29.700.000,00	70.838.000,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	88.804.000,00	8.925.000,00	10,05	13.375.000,00	(4.450.000,00)
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	250.849.000,00	244.165.000,00	97,34	177.900.000,00	66.265.000,00
<b>III</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>404.831.000,00</b>	<b>15.199.980,00</b>	<b>3,75</b>	<b>52.926.062,50</b>	<b>(37.726.082,50)</b>
1	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	52.926.062,50	(52.926.062,50)
2	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	404.831.000,00	15.199.980,00	3,75	0,00	15.199.980,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.793.112.000,00</b>	<b>2.626.488.748,00</b>	<b>33,70</b>	<b>2.221.045.347,50</b>	<b>405.443.400,50</b>

Rincian Realisasi Retribusi Daerah TA 2024 di sajikan pada **Lampiran 5**.

Secara keseluruhan Retribusi Daerah – LRA TA 2024 belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan tidak mencapai target sebesar Rp142.430.000,00 atau 20,06% hal ini disebabkan oleh target yang ditetapkan terlalu tinggi, sedangkan objek retribusi pelayanan kesehatan sangat sedikit.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup tidak mencapai target sebesar Rp214.595.000,00 atau 11,36% hal ini dikarenakan dalam perhitungan target anggaran berdasarkan pada jumlah penduduk. Namun dalam realisasinya, Dinas Lingkungan Hidup tidak memungut retribusi ke masyarakat hanya memungut retribusi pada toko, pelaku usaha, klinik, pedagang pasar. Hal ini dilakukan karena desa juga melakukan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan tidak mencapai target sebesar Rp94.729.000,00 atau 11,67% hal ini dikarenakan target yang dianggarkan terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 dan belum adanya SDM juru parkir, status juru parkir tidak mendapatkan insentif atau sebagai relawan parkir saja bukan dari tenaga outsourcing.
4. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian tidak mencapai target sebesar Rp504.054.000,00 atau 28,31%, hal ini disebabkan oleh:
  - a. Adanya peristiwa kebakaran yang terjadi pada Tahun 2018 mengakibatkan berpindahnya lokasi pedagang ke samping terminal sehingga berkurangnya pembeli dan penjual memilih untuk menutup lapak yang ada di Pasar.
  - b. Banyaknya kios yang tidak dihuni di Pasar Tanjung Bajure dan Pasar Beringin Jaya.

5. Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Dinas Perhubungan tidak mencapai target sebesar Rp100.538.000,00 atau 25,09% hal ini dikarenakan target yang dianggarkan terlalu tinggi dan belum adanya SDM juru parkir.
6. Retribusi Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan tidak mencapai target sebesar Rp8.925.000,00 atau 10,05% hal ini disebabkan oleh:
  - a. Rendahnya pemotongan ternak di rumah potong hewan dikarenakan ruang pemotongan yang sempit.
  - b. Banyaknya pedagang melakukan pemotongan diluar RPH.
  - c. Target yang ditetapkan tidak relevan terhadap jumlah ternak sapi yang dipotong.
  - d. Pada tahun 2024 sedang dilakukan rehabilitasi gedung pemotongan sehingga terkendala teknis operasional.
7. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum tidak tercapai target sebesar Rp15.199.980,00 atau 3,75% hal ini disebabkan oleh:
  - a. Pengurusan PBG sekarang melalui aplikasi SIM BG sehingga banyak syarat-syarat administrasi dan teknis yang sangat memberatkan dan tidak familiar oleh masyarakat.
  - b. Banyaknya pemohon yang mengajukan bangunan eksisting untuk PBG yang setelah di cek secara teknis dan tata ruang tidak memenuhi.

#### 5.1.1.1.3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
	12.056.605.045,86	11.966.693.301,67

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada TA 2024 dianggarkan pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp12.056.605.045,00 dengan realisasi sebesar Rp12.056.605.045,86 atau sebesar 100,00%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp89.911.744,19 atau sebesar 0,75% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp11.966.693.301,67.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA merupakan realisasi dividen yang diterima atas kepemilikan saham sebesar 7,50% dari Kepemilikan Saham Pemkot Sungai Penuh pada BPD Jambi pada Tahun 2023 sebesar 67.500 lembar saham sebesar Rp67.500.000.000,00 berdasarkan Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa BPD Jambi yang diterbitkan oleh Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dr. H. Firdaus Abu Bakar, SH, M,Kn tanggal 2 Februari 2024 yang disalurkan ke Kasda tanggal 22 Februari 2024.

#### 5.1.1.1.4

Lain-Lain PAD yang Sah	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
	42.615.840.558,42	46.321.373.135,60

Lain-lain PAD yang Sah pada TA 2024 dianggarkan sebesar Rp69.754.781.000,00 dengan realisasi sebesar Rp42.615.840.558,42 atau sebesar 61,09%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp3.705.532.577,18 atau sebesar 8,00% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp46.321.373.135,60.

Tidak tercapainya realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp 42.615.840.558,42 atau 61,09% disebabkan oleh tingginya anggaran Lain-lain PAD yang Sah yang telah ditetapkan. Rekapitulasi Lain-lain PAD yang Sah diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.6**  
**Rekapitulasi Lain-Lain PAD yang Sah**

*(dalam rupiah)*

NO	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIK/(TURUN)
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	-	218.378.500,00	(218.378.500,00)
2	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	354.000.000,00	3.885.000,00	1,10	3.250.000,00	635.000,00
3	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00	876.574.992,80	58,44	940.963.121,73	(64.388.128,93)
4	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	295.158,63	-	0,00	295.158,63
5	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	0,00	103.148,26	-	139.380,42	(36.232,16)
6	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	0,00	12.696.158,00	-	15.740.952,00	(3.044.794,00)
7	Penerimaan Bunga	2.500.000.000,00	1.708.115.750,84	68,32	1.782.559.640,00	(74.443.889,16)
8	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	0,00	-	7.000.000,00	(7.000.000,00)
9	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	-	6.112.000,00	(6.112.000,00)
10	Pendapatan Denda Pajak	0,00	68.394.328,00	-	53.462.326,00	14.932.002,00
11	Penerimaan Komisi Potongan/ Bentuk Lain	0,00	11.643.530,62	-	0,00	11.643.530,62
12	Pendapatan dari Pengembalian	5.400.781.000,00	2.851.521.474,84	52,80	4.180.326.432,65	(1.328.804.957,81)
13	Pendapatan BLUD	60.000.000.000,00	36.975.463.216,43	61,63	38.890.557.200,80	(1.915.093.984,37)
14	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	107.147.800,00	-	64.320.700,00	42.827.100,00
15	Remunerasi TDF	0,00	0,00	-	158.562.882,00	(158.562.882,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>69.754.781.000,00</b>	<b>42.615.840.558,42</b>	<b>61,09</b>	<b>46.321.373.135,60</b>	<b>(3.705.532.577,18)</b>

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 sebesar Rp42.615.840.558,42 dengan rincian sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp3.885.000,00 merupakan Penjualan bibit ikan pada UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar.
2. Penerimaan Jasa giro sebesar Rp889.669.457,69 terdiri dari penerimaan atas penempatan dana Kas Daerah pada Bank Jambi dengan nomor rekening 301500084 sebesar Rp876.574.992,80, penerimaan Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp295.158,63, Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP sebesar Rp103.148,26 dan Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas sebesar Rp12.696.158,00.
3. Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah sebesar Rp1.708.115.750,84 merupakan penerimaan Bunga Deposito atas pembukaan Deposito Berjangka Pemerintah Kota Sungai Penuh pada BPD Jambi Cabang Sungai Penuh. Penerimaan Bunga Deposito berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Bendahara Umum Daerah Kota Sungai Penuh dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Cabang Sungai Penuh tentang penempatan deposito nomor : 004C.01/SPN.OPS sebesar Rp1.347.671.232,84, dan penerimaan remunerasi TDF DBH sebesar Rp360.444.518,00.

4. Pendapatan Denda Pajak Sebesar Rp68.394.328,00 merupakan Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Penerimaan Komisi Potongan/ Bentuk Lain sebesar Rp11.643.530,62 merupakan lebih setor atas pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lainnya.
6. Penerimaan dari pengembalian sebesar Rp2.851.521.474,84 merupakan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan belanja atas pemeriksaan BPK, BPKP dan Inspektorat Kota Sungai Penuh TA 2024 yang disajikan pada **Lampiran 6**.
7. Pendapatan BLUD dianggarkan sebesar Rp60.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp36.975.463.216,43 atau sebesar 61,63% merupakan pendapatan dari BLUD RSUD H.A. Mayjen Thalib.
8. Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN sebesar Rp107.147.800,00 yang di transfer ke rekening Kas Daerah.

#### 5.1.1.2

#### Pendapatan Transfer

	<b>TA 2024 (Rp)</b>	<b>TA 2023 (Rp)</b>
	<b>722.625.758.110,00</b>	<b>686.910.422.605,00</b>

Pendapatan Transfer pada TA 2024 dianggarkan sebesar Rp742.785.016.858,00 dengan realisasi sebesar Rp722.625.758.110,00 atau sebesar 97,29%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp35.715.335.505,00 atau sebesar 5,20% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp686.910.422.605,00 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.7**  
**Realisasi Pendapatan Transfer**

*(dalam rupiah)*

NO	PENDAPATAN TRANSFER	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIK/(TURUN)
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	681.881.534.954,00	671.876.447.122,00	98,53	629.717.483.674,00	42.158.963.448,00
2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah	60.903.481.904,00	50.749.310.988,00	83,33	57.192.938.931,00	(6.443.627.943,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>742.785.016.858,00</b>	<b>722.625.758.110,00</b>	<b>97,29</b>	<b>686.910.422.605,00</b>	<b>35.715.335.505,00</b>

#### 5.1.1.2.1

#### Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

	<b>TA 2024 (Rp)</b>	<b>TA 2023 (Rp)</b>
	<b>671.876.447.122,00</b>	<b>629.717.483.674,00</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan pada TA 2024 sebesar Rp681.881.534.954,00 dengan realisasi sebesar Rp671.876.447.122,00 atau sebesar 98,53%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp42.158.963.448,00 atau sebesar 6,69% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp629.717.483.674,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Desa, dan Insentif Fiskal. Rincian Transfer Pemerintah Pusat diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.8**  
**Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

*(dalam rupiah)*

NO	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIK/TURUN
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1	Dana Perimbangan	626.404.715.954,00	614.376.404.122,00	98,08	569.922.166.886,00	44.454.237.236,00
2	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	10.400.931.000,00	(10.400.931.000,00)
3	Dana Desa	48.391.558.000,00	50.414.782.000,00	104,18	49.394.385.788,00	1.020.396.212,00
4	Insentif Fiskal	7.085.261.000,00	7.085.261.000,00	100,00	0,00	7.085.261.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>681.881.534.954,00</b>	<b>671.876.447.122,00</b>	<b>98,53</b>	<b>629.717.483.674,00</b>	<b>42.158.963.448,00</b>

5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan

TA 2024 (Rp)  
614.376.404.122,00

TA 2023 (Rp)  
569.922.166.886,00

Dana Perimbangan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp626.404.715.954,00 dengan realisasi sebesar Rp614.376.404.122,00 atau sebesar 98,08%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp44.454.237.236,00 atau sebesar 7,80% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp569.922.166.886,00 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.9**  
**Realisasi Dana Perimbangan**

(dalam rupiah)

NO	DANA PERIMBANGAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIK/(TURUN)
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	11.790.964.000,00	11.742.757.000,00	99,59	11.799.236.112,00	(56.479.112,00)
2	Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)	58.465.832.000,00	58.465.832.000,00	100,00	34.579.411.746,00	23.886.420.254,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	468.286.587.000,00	456.377.639.574,00	97,46	422.504.521.234,00	33.873.118.340,00
4	Dana Alokasi khusus (DAK) Fisik	30.011.433.000,00	29.632.981.639,00	98,74	41.081.776.282,00	(11.448.794.643,00)
5	Dana Alokasi khusus (DAK) Non Fisik	57.849.899.954,00	58.157.193.909,00	100,53	59.957.221.512,00	(1.800.027.603,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>626.404.715.954,00</b>	<b>614.376.404.122,00</b>	<b>98,08</b>	<b>569.922.166.886,00</b>	<b>44.454.237.236,00</b>

5.1.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak

TA 2024 (Rp)  
11.742.757.000,00

TA 2023 (Rp)  
11.799.236.112,00

DBH Pajak Tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp11.790.964.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.742.757.000,00 atau sebesar 99,59%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp56.479.112,00 atau sebesar 0,48% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp11.799.236.112,00 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.10**  
**Realisasi DBH Pajak**

(dalam rupiah)

NO	DBH PAJAK	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIK/(TURUN)
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.005.132.000,00	6.005.132.000,00	100,00	5.779.270.054,00	225.861.946,00
2.	DBH PPh Pasal 21	5.536.665.000,00	5.536.665.000,00	100,00	5.799.361.961,00	(262.696.961,00)
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WDOPDN	193.213.000,00	193.213.000,00	100,00	186.703.939,00	6.509.061,00
4.	Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	55.954.000,00	7.747.000,00	13,85	33.900.158,00	(26.153.158,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>11.790.964.000,00</b>	<b>11.742.757.000,00</b>	<b>99,59</b>	<b>11.799.236.112,00</b>	<b>(56.479.112,00)</b>

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp11.742.757.000,00 terdapat penyaluran dana TDF sebesar Rp1.866.822.000,00 yang di transfer ke Kas Daerah tanggal 25 Maret 2024.

5.1.1.2.1.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)

TA 2024 (Rp)  
58.465.832.000,00

TA 2023 (Rp)  
34.579.411.746,00

DBH Bukan Pajak/SDA pada TA 2024 dianggarkan sebesar Rp58.465.832.000,00 dan terealisasi sebesar Rp58.465.832.000,00 atau sebesar 100,00%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp23.886.420.254,00 atau sebesar 69,08% jika dibandingkan dengan realisasi

TA 2023 sebesar Rp34.579.411.746,00. Rincian realisasi DBH Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.11**  
**Realisasi DBH Bukan Pajak/SDA**

(dalam rupiah)

NO	DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK/ SDA	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIK/(TURUN)
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 – 6
1.	DBH SDA Kehutanan- PSDH	560.908.000,00	560.908.000,00	100,00	1.106.747.992,00	(545.839.992,00)
2.	DBH SDA Perkebunan-Sawit	0,00	3.363.101.000,00	0,00	3.807.250.000,00	(444.149.000,00)
3.	DBH Sumber Daya Alam Perikanan	4.530.287.000,00	1.167.186.000,00	25,76	1.525.309.211,00	(358.123.211,00)
4.	DBH SDA Minyak Bumi	10.887.330.000,00	10.581.361.000,00	97,19	10.558.791.368,00	22.569.632,00
5.	DBH SDA Gas Bumi	29.348.245.000,00	29.654.214.000,00	101,04	8.462.450.852,00	21.191.763.148,00
6.	DBH SDA Mineral dan Batu Bara- Royalti	13.139.062.000,00	13.139.062.000,00	100,00	9.118.862.323,00	4.020.199.677,00
<b>JUMLAH</b>		<b>58.465.832.000,00</b>	<b>58.465.832.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>34.579.411.746,00</b>	<b>23.886.420.254,00</b>

Berdasarkan tabel di atas realisasi DBH Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp58.465.832.000,00 atau 100,00% yang terdiri dari:

1. Anggaran DBH SDA Kehutanan- PSDH sebesar Rp560.908.000,00 dengan realisasi Rp560.908.000,00 atau 100,00%.
2. Anggaran DBH SDA Perkebunan-Sawit nihil dengan realisasi sebesar Rp3.363.101.000,00, tidak dianggarkan dianggarkan disebabkan oleh akun rekening DBH SDA Perkebunan-Sawit belum tersedia pada SIPD-RI.
3. Anggaran DBH Sumber Daya Alam Perikanan sebesar Rp4.530.287.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.167.186.000,00 atau 25,76%. Rendahnya realisasi DBH Sumber Daya Alam Perikanan disebabkan oleh Anggaran DBH SDA Perkebunan-Sawit dianggarkan pada DBH Sumber Daya Alam Perikanan.
4. Anggaran DBH SDA Minyak Bumi sebesar Rp10.887.330.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.581.361.000,00 atau sebesar 97,19%, rendahnya realisasi DBH SDA Minyak Bumi disebabkan adanya TDF DBH Non Tunai Gas Bumi TA 2023 yang dianggarkan pada Minyak Bumi Tahun 2023 DBH SDA Gas Bumi.
5. Anggaran DBH SDA Gas Bumi sebesar Rp29.348.245.000,00 dengan realisasi sebesar Rp29.654.214.000,00 atau 101,04%. Realisasi DBH SDA Gas Bumi melebihi target disebabkan oleh TDF DBH Non Tunai Gas Bumi TA 2023 yang dianggarkan pada Minyak Bumi Tahun 2023 DBH SDA Gas Bumi.
6. Anggaran DBH SDA Mineral dan Batu Bara- Royalti sebesar Rp13.139.062.000,00 dengan realisasi 13.139.062.000,00 atau 100,00%.

Dari DBH Bukan Pajak/SDA sebesar Rp58.465.832.000,00 terdapat penyaluran dana TDF sebesar Rp25.026.827.000,00 yang di transfer ke Kas Daerah tanggal 25 Maret 2024 dan 12 Juni 2024.

Pendapatan Dana Bagi Hasil disalurkan ke Kasda Kota Sungai Penuh berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 19/KM.7/2024 tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Facility dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang Tidak Ditentukan Penggunaannya dalam Rangka Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk Mendanai Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024
4. Keputusan Menteri Keuangan nomor 267 Tahun 2024 tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Facility dalam Rangka Mendukung Kebutuhan Pendanaan Gaji Ketiga Belas di Daerah Tahun Anggaran 2024.

**5.1.1.2.1.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)** TA 2024 (Rp)  
456.377.639.574,00 TA 2023 (Rp)  
422.504.521.234,00

DAU TA 2024 dianggarkan sebesar Rp468.286.587.000,00 dengan realisasi sebesar Rp456.377.639.574,00 atau sebesar 97,46%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp33.873.118.340,00 atau sebesar 8,02% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp422.504.521.234,00.

Pendapatan DAU TA 2024 sebesar Rp456.377.639.574,00 disalurkan ke Kasda Kota Sungai Penuh berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024 dengan rincian diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.12**  
**Rincian Penerimaan DAU Tahun 2024**

<i>(dalam rupiah)</i>						
NO	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIK/(TURUN)
1	Transfer Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	374.982.435.000,00	374.982.435.000,00	100,00	352.266.791.234,00	22.715.643.766,00
2	Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK	33.473.970.000,00	21.565.022.574,00	64,42	15.443.610.000,00	6.121.412.574,00
3	Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00	800.000.000,00	0,00
4	Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan	30.756.248.000,00	30.756.248.000,00	100,00	22.956.700.000,00	7.799.548.000,00
5	Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan	15.805.206.000,00	15.805.206.000,00	100,00	22.681.234.000,00	(6.876.028.000,00)
6	Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum	7.432.666.000,00	7.432.666.000,00	100,00	8.356.186.000,00	(923.520.000,00)
7	Dana Alokasi Umum THR dan Gaji ke 13 Guru ASN	5.036.062.000,00	5.036.062.000,00	100,00	0,00	5.036.062.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>468.286.587.000,00</b>	<b>456.377.639.574,00</b>	<b>97,46</b>	<b>422.504.521.234,00</b>	<b>33.873.118.340,00</b>

Realisasi Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK sebesar Rp21.565.022.574,00 atau sebesar 64,42%. tidak tercapainya target Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK disebabkan oleh penyaluran DAU PPPK berdasarkan pada jumlah pegawai PPPK yang diangkat.

**5.1.1.2.1.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik** TA 2024 (Rp)  
29.632.981.639,00 TA 2023 (Rp)  
41.081.776.282,00

DAK Fisik TA 2024 dianggarkan sebesar Rp30.011.433.000,00 dengan realisasi sebesar Rp29.632.981.639,00 atau sebesar 98,74%. Realisasi tersebut turun sebesar

Rp11.448.794.643,00 atau sebesar 27,87% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp41.081.776.282,00.

Realisasi Pendapatan DAK TA 2024 yang ditransfer ke Rekening Kasda berdasarkan PMK Nomor 198 tahun 2023 tentang Pengelolaan DAK Fisik Tahun 2024, DAK fisik terdiri dari DAK Fisik Regular dan DAK Fisik Penugasan. Realisasi DAK Fisik berdasarkan jenis sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.13**  
**Realisasi DAK Fisik Tahun 2024**

*(dalam rupiah)*

NO	DANA PERIMBANGAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIK/ (TURUN)
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	DAK Fisik Regular	30.011.433.000,00	29.632.981.639,00	98,74	30.614.714.916,00	(981.733.277,00)
2.	DAK Fisik Penugasan	0,00	0,00	0,00	10.467.061.366,00	(10.467.061.366,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>30.011.433.000,00</b>	<b>29.632.981.639,00</b>	<b>98,74</b>	<b>41.081.776.282,00</b>	<b>(11.448.794.643,00)</b>

Pendapatan DAK Fisik disalurkan ke Kasda Kota Sungai Penuh berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Rincian anggaran dan realisasi DAK Fisik TA 2024 disajikan pada **Lampiran 7**.

<b>5.1.1.2.1.1.5 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</b>	<b>TA 2024 (Rp)</b>	<b>T3A 202 (Rp)</b>
	<b>58.157.193.909,00</b>	<b>59.957.221.512,00</b>

Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2024 dianggarkan sebesar Rp57.849.899.954,00 terealisasi sebesar Rp58.157.193.909,00 atau sebesar 100,53% turun sebesar Rp1.800.027.603,00 atau sebesar 3,00% jika dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp59.957.221.512,00. Realisasi DAK Non Fisik diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.14**  
**Realisasi DAK Non FISIK Tahun 2024**

*(dalam rupiah)*

NO	DAK NON FISIK	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIK/ (TURUN)
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	DAK Non Fisik-BOS Regular	12.502.000.884,00	11.504.810.149,00	92,02	11.555.029.250,00	(50.219.101,00)
2.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	-	905.000.000,00	-	660.000.000,00	245.000.000,00
3.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	27.180.670.760,00	28.228.216.000,00	103,85	29.577.784.325,00	(1.349.568.325,00)
4.	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	568.728.000,00	711.978.000,00	125,19	501.750.000,00	210.228.000,00
5.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.321.400.000,00	2.227.263.000,00	95,94	2.362.080.000,00	(134.817.000,00)
6.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	511.543.044,00	501.400.000,00	98,02	528.400.000,00	(27.000.000,00)
7.	DAK Non Fisik-BOK Dinas Kesehatan	2.885.628.067,00	3.850.883.494,00	133,45	0,00	3.850.883.494,00
8.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	0,00	0,00	-	3.454.818.799,00	(3.454.818.799,00)
9.	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	372.331.000,00	0,00	-	0,00	0,00
10.	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	8.239.856.000,00	6.959.901.067,00	84,47	7.693.475.000,00	(733.573.933,00)
11.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.377.381.266,00	2.377.381.266,00	100,00	2.245.272.776,00	132.108.490,00
12.	DAK Non Fisik-PK2UKM	495.210.205,00	495.210.205,00	100,00	405.499.406,00	89.710.799,00

NO	DAK NON FISIK	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIK/ (TURUN)
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 – 6
13.	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	45.457.500,00	45.457.500,00	100,00	308.027.250,00	(262.569.750,00)
14.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	349.693.228,00	349.693.228,00	100,00	0,00	349.693.228,00
15.	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	0,00	-	438.800.000,00	(438.800.000,00)
16.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	0,00	-	226.284.706,00	(226.284.706,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>57.849.899.954,00</b>	<b>58.157.193.909,00</b>	<b>100,53</b>	<b>59.957.221.512,00</b>	<b>(1.800.027.603,00)</b>

DAK Non Fisik dianggarkan dan disalurkan ke Kasda Kota Sungai Penuh berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi No.462/P/2023 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan tahun Anggaran 2024.

Realisasi DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas sebesar Rp6.959.901.067,00 atau sebesar 84,47%. Tidak tercapainya target DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas disebabkan oleh pemotongan penyaluran DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas karena masih terdapat SiLPA DAK Non Fisik-BOKKB TA 2023 sebesar Rp1.279.954.933,00.

Dari realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2024 sebesar Rp58.157.193.909,00 terdapat Realisasi Pendapatan Dana BOS TA 2024 sebesar Rp12.409.810.149,00 sebagaimana disajikan pada **Lampiran 8**.

<b>5.1.1.2.1.2</b>	<b>Dana Insentif Daerah (DID)</b>	<b>TA 2024 (Rp)</b>	<b>TA 2023 (Rp)</b>
		<b>0,00</b>	<b>10.400.931.000,00</b>

DID TA 2024 tidak dianggarkan dan terealisasi sebesar nihil. Realisasi tersebut turun sebesar Rp10.400.931.000,00 atau sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp10.400.931.000,00.

DID TA 2024 tidak dianggarkan karena DID TA 2024 dianggarkan pada akun rekening Insentif Fiskal.

<b>5.1.1.2.1.3</b>	<b>Dana Desa</b>	<b>TA 2024 (Rp)</b>	<b>TA 2023 (Rp)</b>
		<b>50.414.782.000,00</b>	<b>49.394.385.788,00</b>

Dana Desa TA 2024 dianggarkan sebesar Rp48.391.558.000,00 dengan realisasi sebesar Rp50.414.782.000,00 atau sebesar 104,18%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp1.020.396.212,00 atau sebesar 2,07% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp49.394.385.788,00.

Dana Desa disalurkan ke Rekening Desa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024.

Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan untuk 65 Desa dalam lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh. Pada tahun 2024 Dana Desa disalurkan dari Pemerintah Pusat ke rekening masing masing desa.

5.1.1.2.1.4	Insentif Fiskal	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
		7.085.261.000,00	0,00

Insentif Fiskal TA 2024 dianggarkan sebesar Rp7.085.261.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.085.261.000,00 atau sebesar 100,00%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp7.085.261.000,0000 atau sebesar 100,0% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp0,00.

Insentif Fiskal TA 2023 tidak dianggarkan karena Insentif Fiskal dianggarkan pada Akun Rekening Dana Insentif Daerah (DID). Dana Insentif Daerah adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Insentif Fiskal merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN untuk memberikan penghargaan (reward) kepada provinsi, kabupaten, dan kota yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta dalam kesejahteraan masyarakat.

5.1.1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
		50.749.310.988,00	57.192.938.931,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp60.903.481.904,00 dengan realisasi sebesar Rp50.749.310.988,00 atau sebesar 83,33%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp6.443.627.943,00 atau sebesar 11,27% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp57.192.938.931,00. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.15**  
**Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah**

*(dalam rupiah)*

NO	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIK/(TURUN)
		3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1	Pendapatan Bagi Hasil	53.603.481.904,00	48.279.310.988,00	90,07	49.892.938.931,00	(1.613.627.943,00)
2	Bantuan Keuangan	7.300.000.000,00	2.470.000.000,00	33,84	7.300.000.000,00	(4.830.000.000,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>60.903.481.904,00</b>	<b>50.749.310.988,00</b>	<b>83,33</b>	<b>57.192.938.931,00</b>	<b>(6.443.627.943,00)</b>

Dari Pendapatan Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2024 diatas terdapat pembayaran Piutang Bagi Hasil Transfer Antar Daerah TA 2024 sebesar Rp19.042.710.768,00. Rincian Realisasi Pendapatan dari Piutang Bagi Hasil Transfer Antar Daerah diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.16**  
**Realisasi Pendapatan dari Piutang Bagi Hasil Transfer Antar Daerah**  
*(dalam rupiah)*

NO	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100
1.	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor	2.253.452.332,00	2.253.452.332,00	100,00
2.	DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.382.104.988,00	2.382.104.988,00	100,00
3.	DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.449.107.952,00	12.449.107.952,00	100,00
4.	DBH Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan Air Permukaan	18.164.608,00	18.164.608,00	100,00
5.	DBH Pajak Rokok	1.939.880.888,00	1.939.880.888,00	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>19.042.710.768,00</b>	<b>19.042.710.768,00</b>	<b>100,00</b>

Tidak tercapainya realisasi pendapatan transfer antar daerah disebabkan oleh adanya tunda salur transfer dari Pemerintah Provinsi Jambi yang diakui Piutang Transfer Antar Daerah sebesar Rp28.098.557.515,00 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.17**  
**Piutang Transfer Antar Daerah Per 31 Desember 2024**  
*(dalam rupiah)*

No	Piutang Transfer Antar Daerah	Saldo Piutang per 31 Desember 2024	Penambahan Piutang TA 2024	Pembayaran Piutang TA 2023	Saldo Piutang per 31 Desember 2023
1	2	3 = 6 - 5 + 4	4	5	6
1	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5.188.976.797,00	5.188.976.797,00	2.253.452.332,00	2.253.452.332,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	3.404.322.223,00	3.404.322.223,00	2.382.104.988,00	2.382.104.988,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	12.738.268.829,00	12.738.268.829,00	12.449.107.952,00	12.449.107.952,00
4	Pajak Air Permukaan	11.606.645,00	11.606.645,00	18.164.608,00	18.164.608,00
5	Pajak Rokok	1.925.392.021,00	1.925.392.021,00	1.939.880.888,00	1.939.880.888,00
6	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	4.830.000.000,00	4.830.000.000,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>28.098.566.515,00</b>	<b>28.098.566.515,00</b>	<b>19.042.710.768,00</b>	<b>19.042.710.768,00</b>

<b>5.1.1.2.2.1</b>	<b>Pendapatan Bagi Hasil</b>	<b>TA 2024 (Rp)</b>	<b>TA 2023 (Rp)</b>
		<b>48.279.310.988,00</b>	<b>49.892.938.931,00</b>

Pendapatan Bagi Hasil TA 2024 dianggarkan sebesar Rp53.603.481.904,00 dengan realisasi sebesar Rp48.279.310.988,00 atau sebesar 90,07%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp1.613.627.943,00 atau sebesar 3,23% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp49.892.938.931,00. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.18**  
**Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak**

*(dalam rupiah)*

NO	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIK/(TURUN)
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 – 6
1.	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor	9.248.750.918,00	6.445.800.414,00	69,69	9.447.793.772,00	(3.001.993.358,00)
2.	DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.128.159.821,00	5.243.490.864,00	85,56	6.281.446.914,00	(1.037.956.050,00)
3.	DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	25.570.092.755,00	24.573.229.128,00	96,10	22.517.568.915,00	2.055.660.213,00
4.	DBH Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan Air Permukaan	34.995.060,00	38.040.373,00	108,70	36.707.753,00	1.332.620,00
5.	DBH Pajak Rokok	12.621.483.350,00	11.978.750.209,00	94,91	11.609.421.577,00	369.328.632,00
<b>JUMLAH</b>		<b>53.603.481.904,00</b>	<b>48.279.310.988,00</b>	<b>90,07</b>	<b>49.892.938.931,00</b>	<b>(1.613.627.943,00)</b>

Dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dari Provinsi Jambi diatas terdapat pembayaran Piutang Bagi Hasil Transfer Antar Daerah TA 2024 sebesar Rp19.042.710.768,00. Rincian Realisasi Pendapatan dari Piutang Bagi Hasil Transfer Antar Daerah diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.19**  
**Realisasi Pendapatan dari Piutang Bagi Hasil Transfer Antar Daerah**

*(dalam rupiah)*

NO	PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100
1.	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor	2.253.452.332,00	2.253.452.332,00	100,00
2.	DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.382.104.988,00	2.382.104.988,00	100,00
3.	DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.449.107.952,00	12.449.107.952,00	100,00
4.	DBH Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan Air Permukaan	18.164.608,00	18.164.608,00	100,00
5.	DBH Pajak Rokok	1.939.880.888,00	1.939.880.888,00	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>19.042.710.768,00</b>	<b>19.042.710.768,00</b>	<b>100,00</b>

Rendahnya realisasi Pendapatan Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Jambi disebabkan oleh belum disalurkan :

1. Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan untuk Triwulan III TA 2024 berdasarkan keputusan Gubernur Jambi Nomor 898/Kep.Gub/BPKPD-2.1/2024 tentang Penetapan Pembagian Peruntukkan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Triwulan III Tahun Anggaran 2024 dan
2. Kep.Gub/BPKPD-2.1/2024 tentang Penetapan Pembagian Peruntukan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Triwulan IV Tahap I Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan:

- 1) Keputusan Gubernur Jambi Nomor 657/Kep.Gub/BPKD-2.1/2024 tentang Penetapan Pembagian Peruntukkan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor,

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Triwulan I Tahun Anggaran 2024.

- 2) Keputusan Gubernur Jambi Nomor 390/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024 Penetapan Pembagian Peruntukan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Triwulan I Tahun Anggaran 2024.
- 3) Keputusan Gubernur Jambi Nomor 627/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024 Penetapan Pembagian Kurang Salur Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Triwulan II Tahun Anggaran 2024.
- 4) Keputusan Gubernur Jambi Nomor 887/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024 tentang Penetapan Pembagian Peruntukkan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Triwulan II Tahun Anggaran 2024 .
- 5) Keputusan Gubernur Jambi Nomor 871/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024 tentang Penetapan Pembagian Peruntukkan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Triwulan III Tahun Anggaran 2024.
- 6) Keputusan Gubernur Jambi Nomor 279/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024 tentang Penetapan Pembagian Peruntukkan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Triwulan IV Tahun Anggaran 2023.
- 7) Keputusan Gubernur Jambi Nomor 180/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024 tentang Penetapan Pembagian Peruntukkan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Triwulan IV Tahap I Tahun Anggaran 2023.
- 8) Keputusan Gubernur Jambi Nomor 389/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2024 tentang Penetapan Pembagian Peruntukkan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Triwulan IV Tahap II Tahun Anggaran 2023.

**5.1.1.2.2.2**

**Bantuan Keuangan**

TA 2024 (Rp)  
**2.470.000.000,00**

TA 2023 (Rp)  
**7.300.000.000,00**

Bantuan Keuangan dari Provinsi TA 2024 dianggarkan sebesar Rp7.300.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.470.000.000,00 atau sebesar 33,84%, sedangkan Bantuan Keuangan TA 2023 sebesar Rp7.300.000.000,00 realisasi tersebut turun sebesar Rp4.830.000.000,00 atau 66,16%.

Bantuan Keuangan dari Provinsi Jambi TA 2024 sebesar Rp2.470.000.000,00 merupakan bantuan keuangan terhadap Desa/ Kelurahan per Desa untuk 65 Desa, 8 Kecamatan dan 4 Kelurahan terdiri dari Kelurahan Sungai Penuh, Kelurahan Pondok Tinggi, Kelurahan Dusun Baru dan Kelurahan Pasar Sungai Penuh. Dengan rincian pada tabel berikut:

**Tabel 5.1.20**  
**Rincian Dana Bantuan Keuangan**

*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	1.950.000.000,00	65 Desa

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
2.	Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Kecamatan	400.000.000,00	8 Kecamatan
3.	Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Kelurahan	120.000.000,00	4 Kelurahan
<b>Jumlah</b>		<b>2.470.000.000,00</b>	

Rendahnya realisasi Pendapatan Dana Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jambi disebabkan oleh tunda salur tahap II Dana Bantuan Keuangan bersifat khusus berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1031/Kep.Gub/BPKPD-4.2/2024 tentang Penetapan Alokasi Tunda Salur Tahap II Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Dan Kelurahan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.830.000.000,00 yang terdiri dari:

1. Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa sebesar Rp4.550.000.000,00.
2. Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Kelurahan sebesar Rp280.000.000,00.

Bantuan Keuangan dari Provinsi Jambi TA 2024 disalurkan berdasarkan:

1. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Ke Kabupaten/Kota Untuk Kelurahan dan Kecamatan.
2. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa Tahun Anggaran 2023.
3. Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 2/SE/DP3AP2-4/2024 Tentang Pelaksanaan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi No 16 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Bersifat Khusus Kepada Desa
4. Surat dari Gubernur Jambi tanggal 18 Desember 2024 nomor S-347/BPKPD-2.1/XII/2024 perihal Pemberitahuan Penundaan Penyaluran BKBK Tahap II Tahun 2024.

<b>5.1.1.3</b>	<b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>TA 2024 (Rp)</b>	<b>TA 2023 (Rp)</b>
		<b>4.725.558.097,00</b>	<b>4.651.197.036,58</b>

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp4.796.864.474,00, terealisasi sebesar Rp4.725.558.097,00 atau sebesar 98,51%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp74.361.060,42 atau sebesar 1,60% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp4.651.197.036,58.

<b>5.1.1.3.1</b>	<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>TA 2024 (Rp)</b>	<b>TA 2023 (Rp)</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pendapatan Hibah TA 2024 tidak dianggarkan sehingga realisasi sama dengan realisasi TA 2023.

Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang /barang atau jasa dari pemerintah/pemerintah daerah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

5.1.1.3.2

**Lain-lain Pendapatan  
Sesuai dengan Ketentuan  
Peraturan Perundang-  
Undangan**

**TA 2024 (Rp)**  
**4.725.558.097,00**

**TA 2023 (Rp)**  
**4.651.197.036,58**

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP dianggarkan sebesar Rp4.796.864.474,00, terealisasi sebesar Rp4.725.558.097,00 atau sebesar 98,51%, dengan Realisasi tersebut naik sebesar Rp74.361.060,42 atau sebesar 1,60% jika dibandingkan dengan TA 2023 sebesar Rp4.651.197.036,58 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.21**  
**Rekapitulasi Pendapatan atas Dana Kapitasi JKN pada FKTP/Puskesmas TA 2024**  
(dalam rupiah)

NO	PUSKESMAS	PENDAPATAN
1	Puskesmas Sungai Bungkal	224.463.770,00
2	Puskesmas Kumun Debai	595.164.153,00
3	Puskesmas Pondok Tinggi	442.945.928,00
4	Puskesmas Desa Gedang	393.398.079,00
5	Puskesmas Sungai Penuh	555.690.621,00
6	Puskesmas Koto Baru	455.125.828,00
7	Puskesmas Koto Lolo	336.683.817,00
8	Puskesmas Tanah Kampung	508.676.284,00
9	Puskesmas Hamparan Rawang	824.887.359,00
10	Puskesmas Sungai Liuk	209.940.947,00
11	Puskesmas Tanjung	178.581.311,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.725.558.097,00</b>

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi sebesar Rp4.725.558.097,00 merupakan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebesar Rp4.725.558.097,00. Pendapatan tersebut diakui atas klaim Jaminan Kapitasi dari BPJS yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BPJS.

5.1.2

**Belanja**

**TA 2024 (Rp)**  
**810.277.392.176,98**

**TA 2023 (Rp)**  
**788.700.596.914,53**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Belanja dianggarkan pada APBD TA 2024 sebesar Rp873.022.658.196,00 dengan realisasi sebesar Rp810.277.392.176,98 atau sebesar 92,81%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp21.576.795.262,45 atau sebesar 2,74% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp788.700.596.914,53. Realisasi Belanja berdasarkan kelompok belanja diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.22**  
**Rincian Realisasi Belanja**

(dalam rupiah)

NO	BELANJA	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIK/(TURUN)
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Belanja Operasi	622.394.393.057,00	575.431.748.993,52	92,45	556.823.749.834,70	18.607.999.158,82

NO	BELANJA	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIK/(TURUN)
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
2.	Belanja Modal	140.675.429.934,00	129.528.810.236,46	92,08	129.618.222.875,83	(89.412.639,37)
3.	Belanja Tak Terduga	2.333.881.689,00	1.187.186.916,00	50,87	0,00	1.187.186.916,00
4.	Belanja Transfer	107.618.953.516,00	104.129.646.031,00	96,76	102.258.624.204,00	1.871.021.827,00
<b>JUMLAH</b>		<b>873.022.658.196,00</b>	<b>810.277.392.176,98</b>	<b>92,81</b>	<b>788.700.596.914,53</b>	<b>21.576.795.262,45</b>

Rekapitulasi Belanja TA 2024 disajikan pada **Lampiran 9**.

<b>5.1.2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>TA 2024 (Rp)</b>	<b>TA 2023 (Rp)</b>
		<b>575.431.748.993,52</b>	<b>556.823.749.834,70</b>

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari - hari yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi TA 2024 dianggarkan sebesar Rp622.394.393.057,00 dengan realisasi sebesar Rp575.431.748.993,52 atau sebesar 92,45%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp18.607.999.158,82 atau sebesar 3,34% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp556.823.749.834,70. Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan TA 2023 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.23**  
**Realisasi Belanja Operasi**

(dalam rupiah)

NO	BELANJA OPERASI	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIK/(TURUN)
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Belanja Pegawai	373.842.812.743,00	348.426.234.322,10	93,20	309.353.484.368,40	39.072.749.953,70
2.	Belanja Barang dan Jasa	229.983.205.254,00	208.745.596.558,42	90,77	231.292.642.188,30	(22.547.045.629,88)
3.	Belanja Subsidi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	74.000.000,00	26.000.000,00
4.	Belanja Hibah	18.268.375.060,00	17.959.918.113,00	98,31	15.903.623.278,00	2.056.294.835,00
5.	Belanja Bantuan Sosial	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>622.394.393.057,00</b>	<b>575.431.748.993,52</b>	<b>92,45</b>	<b>556.823.749.834,70</b>	<b>18.607.999.158,82</b>

<b>5.1.2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>TA 2024 (Rp)</b>	<b>TA 2023 (Rp)</b>
		<b>348.426.234.322,10</b>	<b>309.353.484.368,40</b>

Belanja Pegawai TA 2024 dianggarkan sebesar Rp373.842.812.743,00 dengan realisasi sebesar Rp348.426.234.322,10 atau sebesar 93,20%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp39.072.749.953,70 atau sebesar 12,63% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp309.353.484.368,40.

Rincian realisasi Belanja Pegawai TA 2024 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.24**  
**Realisasi Belanja Pegawai**

(dalam rupiah)

NO	BELANJA PEGAWAI	ANGGARAN	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIK/(TURUN)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	249.210.620.734,00	227.448.330.364,00	91,27	191.081.583.766,00	36.366.746.598,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	72.042.207.452,00	71.195.332.146,00	98,82	64.980.310.531,00	6.215.021.615,00
3.	Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan	39.326.510.787,00	37.442.922.047,20	95,21	38.828.487.220,40	(1.385.565.173,20)

NO	BELANJA PEGAWAI	ANGGARAN	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIK/(TURUN)
	Perimbangan Objektif Lainnya ASN					
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.546.771.220,00	11.191.743.787,90	96,93	11.050.089.463,00	141.654.324,90
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	543.272.550,00	172.639.977,00	31,78	170.443.888,00	2.196.089,00
6.	Belanja Penerima Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	635.200.000,00	473.616.000,00	74,56	406.552.000,00	67.064.000,00
7.	Belanja Pegawai BOSP	10.800.000,00	57.220.000,00	529,81	1.672.132.500,00	(1.614.912.500,00)
8.	Belanja Pegawai BLUD	527.430.000,00	444.430.000,00	84,26	1.163.885.000,00	(719.455.000,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>373.842.812.743,00</b>	<b>348.426.234.322,10</b>	<b>93,20</b>	<b>309.353.484.368,40</b>	<b>39.072.749.953,70</b>

Pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rendahnya realisasi Belanja Pegawai sebesar 93,20% dikarenakan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN atas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dianggarkan berdasarkan alokasi DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sedangkan realisasi belanja berdasarkan realisasi pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan tingginya anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH ditetapkan.
2. Dari realisasi belanja pegawai terdapat realisasi Belanja Pegawai BOSP melebihi anggaran yang ditetapkan dengan realisasi sebesar 529,81% dikarenakan BOSP realisasi belanja BOSP berdasarkan arkas pada sekolah PAUD Negeri yang dilaporkan ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Rincian realisasi Belanja Pegawai TA 2024 per SKPD dan Belanja Pegawai per sub rincian objek TA 2024 diuraikan pada **Lampiran 10.a** dan **10.b**.

#### 5.1.2.1.2

#### Belanja Barang dan Jasa

**TA 2024 (Rp)**

**208.745.596.558,42**

**TA 2023 (Rp)**

**231.292.642.188,30**

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran Pemkot Sungai Penuh untuk pembelian barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan dinas.

Belanja Barang dan Jasa TA 2024 dianggarkan sebesar Rp229.983.205.254,00 dengan realisasi sebesar Rp208.745.596.558,42 atau sebesar 90,77%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp22.547.045.629,88 atau sebesar 9,75% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp231.292.642.188,30. Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2024 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.25**  
**Rekapitulasi Belanja Barang dan Jasa**

(dalam rupiah)

NO	BELANJA BARANG DAN JASA	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	Naik/(Turun)
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	4	4
1	Belanja Barang	41.315.722.042,64	38.573.958.629,00	93,36	36.934.583.708,26	1.639.374.920,74
1	Belanja Barang Pakai Habis	40.964.569.242,64	38.224.160.629,00	93,31	36.907.986.508,26	1.316.174.120,74
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	26.597.200,00	(26.597.200,00)

NO	BELANJA BARANG DAN JASA	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	Naik/(Turun)
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	4	4
3	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	351.152.800,00	349.798.000,00	99,61	0,00	349.798.000,00
<b>II</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>68.953.630.478,50</b>	<b>65.689.120.369,00</b>	<b>95,27</b>	<b>67.731.981.687,34</b>	<b>(2.042.861.318,34)</b>
1	Belanja Jasa Kantor	58.911.927.227,50	56.022.497.064,00	95,10	56.798.762.018,34	(776.264.954,34)
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.960.073.600,00	6.955.666.984,00	99,94	6.528.504.704,00	427.162.280,00
3	Belanja Sewa Tanah	61.200.000,00	61.200.000,00	100,00	10.000.000,00	51.200.000,00
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.210.001.651,00	1.047.729.416,00	86,59	1.723.809.778,00	(676.080.362,00)
5	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.599.728.000,00	1.393.129.905,00	87,09	1.214.624.837,00	178.505.068,00
6	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	37.000.000,00	(37.000.000,00)
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	(25.000.000,00)
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	60.000.000,00	58.397.000,00	97,33	809.215.200,00	(750.818.200,00)
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	80.000.000,00	79.800.000,00	99,75	79.881.150,00	(81.150,00)
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	51.950.000,00	51.950.000,00	100,00	505.184.000,00	(453.234.000,00)
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	18.750.000,00	18.750.000,00	100,00	0,00	18.750.000,00
<b>III</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>894.955.200,00</b>	<b>866.637.139,00</b>	<b>96,84</b>	<b>11.298.532.747,29</b>	<b>(10.431.895.608,29)</b>
1	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	512.297.500,00	496.347.505,00	96,89	807.464.757,00	(311.117.252,00)
2	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	362.657.700,00	350.339.634,00	96,60	311.362.789,00	38.976.845,00
3	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	20.000.000,00	19.950.000,00	99,75	10.179.705.201,29	(10.159.755.201,29)
<b>IV</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>56.725.017.382,86</b>	<b>55.479.271.185,34</b>	<b>97,80</b>	<b>62.314.564.110,00</b>	<b>(6.835.292.924,66)</b>
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	56.725.017.382,86	55.479.271.185,34	97,80	62.314.564.110,00	(6.835.292.924,66)
<b>V</b>	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat</b>	<b>2.242.287.000,00</b>	<b>1.769.057.936,00</b>	<b>78,90</b>	<b>2.535.933.816,00</b>	<b>(766.875.880,00)</b>
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.198.632.000,00	1.727.157.000,00	78,56	1.685.036.000,00	42.121.000,00
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	43.655.000,00	41.900.936,00	95,98	850.897.816,00	(808.996.880,00)
<b>VI</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BOS</b>	<b>9.471.323.150,00</b>	<b>9.401.800.732,21</b>	<b>99,27</b>	<b>7.684.751.161,39</b>	<b>1.717.049.570,82</b>
1	Belanja Barang dan Jasa BOS	9.471.323.150,00	9.401.800.732,21	99,27	7.684.751.161,39	1.717.049.570,82
<b>VII</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BOSP</b>	<b>219.700.000,00</b>	<b>184.572.000,00</b>	<b>84,01</b>	<b>0,00</b>	<b>184.572.000,00</b>
1	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	219.700.000,00	184.572.000,00	84,01	0,00	184.572.000,00
<b>VIII</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>	<b>50.160.570.000,00</b>	<b>36.781.178.567,87</b>	<b>73,33</b>	<b>42.792.294.958,02</b>	<b>(6.011.116.390,15)</b>
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	50.160.570.000,00	36.781.178.567,87	73,33	42.792.294.958,02	(6.011.116.390,15)
<b>JUMLAH</b>		<b>229.983.205.254,00</b>	<b>208.745.596.558,42</b>	<b>90,77</b>	<b>231.292.642.188,30</b>	<b>(22.547.045.629,88)</b>

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp229.983.205.254,00 dengan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp208.745.596.558,42. Dari realisasi tersebut terdapat Belanja Barang dan Jasa BLUD yang tidak mencapai target, hal tersebut disebabkan oleh rendahnya realisasi Pendapatan

BLUD sehingga mengakibatkan rendahnya Dana yang tersedia untuk Belanja Barang dan Jasa BLUD pada RSUD Mayjen HA Thalib Kota Sungai Penuh.

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 per SKPD dan Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa per sub rincian objek TA 2024 disajikan pada **Lampiran 11.a** dan **Lampiran 11.b**.

<b>5.1.2.1.3</b>	<b>Belanja Subsidi</b>	<b>TA 2024 (Rp)</b>	<b>TA 2023 (Rp)</b>
		<b>100.000.000,00</b>	<b>74.000.000,00</b>

Belanja Subsidi TA 2024 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp100.000.000,00 atau sebesar 100%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp26.000.000,00 atau sebesar 35,14%. jika dibandingkan Belanja Subsidi TA 2023 sebesar Rp74.000.000,00.

Kegiatan Belanja Subsidi dilakukan dengan bekerja sama antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Sungai Penuh dengan Perum Bulog Kantor Cabang Sungai Penuh berdasarkan Perjanjian Nomor Kontrak 510/01/SPK/DISDAGPRIN-2/III/2024 tanggal 25 April 2024 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Sungai Penuh TA 2024 tentang pengadaan barang kebutuhan pokok bersubsidi guna pelaksanaan kegiatan pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota menghadapi bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1445 H Tahun 2024.

<b>5.1.2.1.4</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>TA 2024 (Rp)</b>	<b>TA 2023 (Rp)</b>
		<b>Rp17.959.918.113,00</b>	<b>Rp15.903.623.278,00.</b>

Belanja Hibah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp18.268.375.060,00 dengan realisasi sebesar Rp17.959.918.113,00 atau sebesar 98,31%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp2.056.294.835,00 atau sebesar 12,93% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp15.903.623.278,00.

Belanja Hibah merupakan pengeluaran Pemkot Sungai Penuh dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Realisasi Belanja Hibah TA 2024 berdasarkan Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Pemberian hibah bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Rekapitulasi belanja hibah diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.26**  
**Belanja Hibah Tahun 2024**

*(dalam rupiah)*

NO	JENIS HIBAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE %	REALISASI 2023	NAIK/(TURUN)
1	2	3	4	5 = (4:3)x100	6	7 = (4-6)
1.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia	16.232.766.000,00	15.997.958.873,00	98,18	13.951.313.738,00	2.046.645.135,00
2.	Belanja Hibah Dana BOS	1.719.100.000,00	1.650.500.000,00	96,01	1.642.703.000,00	7.797.000,00
3.	Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	316.509.060,00	311.459.240,00	98,40	309.606.540,00	1.852.700,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>18.268.375.060,00</b>	<b>17.959.918.113,00</b>	<b>98,31</b>	<b>15.903.623.278,00</b>	<b>2.056.294.835,00</b>

Rincian Realisasi belanja hibah diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.27**  
**Rincian Realisasi Belanja Hibah Tahun 2024**

*(dalam rupiah)*

NO	NAMA/ JENIS BARANG	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE
1	2	3	4	5 = (4:3) x 100
<b>A.</b>	<b>Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>	<b>16.232.766.000,00</b>	<b>15.997.958.873,00</b>	<b>98,55</b>
I	Dinas Pendidikan	2.592.000.000,00	2.486.863.000,00	95,94
II	Bagian Kesejahteraan Rakyat	660.000.000,00	660.000.000,00	100,00
III	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.250.000.000,00	1.120.329.873,00	89,63
IV	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.730.766.000,00	11.730.766.000,00	100,00
<b>B.</b>	<b>Belanja Hibah Dana BOS</b>	<b>1.719.100.000,00</b>	<b>1.650.500.000,00</b>	<b>96,01</b>
I	Dinas Pendidikan	1.719.100.000,00	1.650.500.000,00	95,94
<b>C.</b>	<b>Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik</b>	<b>316.509.060,00</b>	<b>311.459.240,00</b>	<b>98,40</b>
I	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	316.509.060,00	311.459.240,00	98,40
	<b>JUMLAH</b>	<b>18.268.375.060,00</b>	<b>17.959.918.113,00</b>	<b>98,31</b>

Realisasi Belanja Hibah disalurkan berdasarkan:

1. Naskah perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor : 23/360/NPHD/Kesbangpol/XI/2023, Nomor : 3/KU.07-PKS/1572/2023 Tentang pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024.
2. Naskah perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Nomor : 23/359/NPD/Kesbangpol/XI/2023, dan Nomor 007/KU.00.03/JA-11/11/2023. Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sungai Penuh Tahun 2024.
3. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor : 100.3.3.3/Kep.125/2024 Tentang Penetapan Pemberian Bantuan Hibah Pemerintah Kota Sungai Penuh Kepada Rumah Ibadah dan Lembaga Keagamaan dalam Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024.
4. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 100.3.3.3/Kep.145/2024 Tentang Penetapan Pemberian Bantuan Hibah Pemerintah Kota Sungai Penuh kepada Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Sungai Penuh.

5. Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 100.3.3.3/Kep.144/2024 Tentang Penetapan Pemberian Bantuan Hibah Pemerintah Kota Sungai Penuh kepada Pengurus Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024.

5.1.2.1.5	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<u>TA 2024 (Rp)</u>	<u>TA 2023 (Rp)</u>
		<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>

Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp200.000.000,00 atau sebesar 100%.

Belanja Bantuan Sosial TA 2024 direalisasikan berdasarkan Keputusan Walikota Sungai Penuh nomor 100.3.3.3/Kep.129/2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Pemerintah Kota Sungai Penuh kepada Panti Asuhan Putera Aisyiyah Kota Sungai Penuh dan Panti Asuhan Yatim Puteri Muhammadiyah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024.

Rincian Belanja Bantuan Sosial diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.28**  
**Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024**

No	Instansi Penerima	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	Panti Asuhan Putera Aisyiyah Kota Sungai Penuh	100.000.000,00
2	Panti Asuhan Yatim Puteri Muhammadiyah Kota Sungai Penuh	100.000.000,00
Jumlah		200.000.000,00

5.1.2.2	<b>Belanja Modal</b>	<u>TA 2024 (Rp)</u>	<u>TA 2023 (Rp)</u>
		<b>129.528.810.236,46</b>	<b>129.618.222.875,83</b>

Belanja Modal TA 2024 dianggarkan sebesar Rp140.675.429.934,00 dan terealisasi sebesar Rp129.528.810.236,46 atau sebesar 92,08%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp89.412.639,37 atau sebesar 0,07% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp129.618.222.875,83. Rincian Realisasi Belanja Modal Kota Sungai Penuh TA 2024 menurut jenis belanja diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.29**  
**Realisasi Belanja Modal**

*(dalam rupiah)*

NO	BELANJA MODAL	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIKI/(TURUN)
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Belanja Modal Tanah	461.229.500,00	364.792.231,20	79,09	1.525.209.060,89	(1.160.416.829,69)
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.280.235.111,00	29.164.581.067,00	76,19	24.907.300.059,16	4.257.281.007,84
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.891.327.249,00	34.969.287.253,47	97,43	31.258.253.582,06	3.711.033.671,41
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	55.067.426.209,00	54.674.175.128,72	99,29	57.175.318.024,58	(2.501.142.895,86)
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.175.211.865,00	10.355.974.556,07	101,78	14.752.142.149,14	(4.396.167.593,07)
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	800.000.000,00	0,00	-		
<b>JUMLAH</b>		<b>140.675.429.934,00</b>	<b>129.528.810.236,46</b>	<b>92,08</b>	<b>129.618.222.875,83</b>	<b>(89.412.639,37)</b>

Realisasi Belanja Modal TA 2024 per SKPD dan Realisasi Belanja Modal TA 2024 per Rekening disajikan pada **Lampiran 12.a** dan **12.b**.

5.1.2.2.1	Belanja Modal Tanah	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
		364.792.231,20	1.525.209.060,89

Belanja Modal Tanah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp461.229.500,00 dengan realisasi sebesar Rp364.792.231,20 atau sebesar 79,09%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp1.160.416.829,69 atau sebesar 76.08% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 sebesar Rp1.525.209.060,89.

Tidak tercapainya realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 disebabkan tidak ditemukan tanah yang sesuai dengan nilai NJOP yang telah ditetapkan untuk penanganan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup, Anggaran pengurusan sertifikat tanah tidak direalisasikan dan biaya operasional untuk perolehan tanah disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Rincian realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dan peruntukannya disajikan pada **Lampiran 13**.

5.1.2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)
		29.164.581.067,00	24.907.300.059,16

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dianggarkan sebesar Rp38.280.235.111,00 dengan realisasi sebesar Rp29.164.581.067,00 atau sebesar 76,19%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp4.257.281.007,84 atau sebesar 17,09% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp24.907.300.059,16. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dan TA 2023 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.30**  
**Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

(dalam rupiah)

NO	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIK/(TURUN)
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Belanja Modal Alat Besar	5.838.998.200,00	5.776.665.463,00	98,93	237.375.000,00	5.539.290.463,00
2.	Belanja Modal Alat Angkutan	9.011.008.000,00	8.977.930.000,00	99,63	197.839.950,00	8.780.090.050,00
3.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.718.751.290,00	1.631.024.400,00	94,90	3.977.362.887,00	(2.346.338.487,00)
4.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.921.771.600,00	1.857.399.000,00	96,65	945.077.963,00	912.321.037,00
5.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.469.545.376,00	6.352.366.650,00	98,19	14.042.071.515,16	(7.689.704.865,16)
6.	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.042.469.675,00	1.032.127.700,00	99,01	244.902.000,00	787.225.700,00
7.	Belanja Modal Komputer	1.762.464.000,00	1.582.423.500,00	89,78	3.280.633.960,00	(1.698.210.460,00)
8.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	16.100.000,00	12.500.000,00	77,64	46.232.000,00	(33.732.000,00)
9.	Belanja Modal Rambu-Rambu	11.550.000,00	11.550.000,00	100,00	113.154.410,00	(101.604.410,00)
10.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	624.488.000,00	455.140.720,00	72,88	18.500.000,00	436.640.720,00
11.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.863.088.970,00	1.475.453.634,00	14,96	1.804.150.374,00	(328.696.740,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>38.280.235.111,00</b>	<b>29.164.581.067,00</b>	<b>76,19</b>	<b>24.907.300.059,16</b>	<b>4.257.281.007,84</b>

Tidak tercapainya target Belanja Modal Peralatan dan Mesin karena disebabkan rendahnya realisasi pendapatan BLUD yang mengakibatkan rendahnya dana belanja modal Peralatan dan Mesin pada RSUD Mayjen H.A. Thalib Kota Sungai Penuh.

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 per SKPD dan Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per sub rincian objek TA 2024 disajikan pada **Lampiran 14.a** dan **14.b**.

**5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan** **TA 2024 (Rp)**  
**34.969.287.253,47** **TA 2023 (Rp)**  
**31.258.253.582,06**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp35.891.327.249,00 dengan realisasi sebesar Rp34.969.287.253,47 atau sebesar 97,43%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp3.711.033.671,41 atau sebesar 11,87% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp31.258.253.582,06. Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.31**  
**Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

(dalam rupiah)

NO	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIK/(TURUN)
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	34.891.327.249,00	34.545.369.653,47	99,01	30.774.811.330,06	3.770.558.323,41
2.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	200.000.000,00	199.935.000,00	99,97	483.442.252,00	(283.507.252,00)
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	800.000.000,00	223.982.600,00	28,00	0,00	223.982.600,00
<b>JUMLAH</b>		<b>35.891.327.249,00</b>	<b>34.969.287.253,47</b>	<b>97,43</b>	<b>31.258.253.582,06</b>	<b>3.711.033.671,41</b>

Tidak tercapainya target Belanja Modal Gedung dan Bangunan dikarenakan rendahnya realisasi pendapatan BLUD yang mengakibatkan rendahnya dana yang tersedia untuk belanja modal gedung dan bangunan BLUD pada RSUD Mayjen H.A.Thalib Kota Sungai Penuh.

Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 per SKPD dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 per sub rincian objek sebagaimana disajikan pada **Lampiran 15.a** dan **15.b**.

**5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan** **TA 2024 (Rp)**  
**54.674.175.128,72** **TA 2023 (Rp)**  
**57.175.318.024,58**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp55.067.426.209,00 dengan realisasi sebesar Rp54.674.175.128,72 atau sebesar 99,29%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp2.501.142.895,86 atau sebesar 4,37% dibandingkan TA 2023 sebesar Rp57.175.318.024,58. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.32**  
**Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

(dalam rupiah)

NO	BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIK/(TURUN)
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	25.862.453.615,00	25.726.353.898,84	99,47	46.183.477.315,97	(20.457.123.417,13)
2.	Belanja Modal Bangunan Air	28.097.121.594,00	27.897.430.279,88	99,29	10.919.960.708,61	16.977.469.571,27
3.	Belanja Modal Instalasi	1.000.000.000,00	942.540.000,00	94,25	71.880.000,00	870.660.000,00
4.	Belanja Modal Jaringan Air Minum	107.851.000,00	107.850.950,00	99,99	0,00	107.850.950,00
<b>JUMLAH</b>		<b>55.067.426.209,00</b>	<b>54.674.175.128,72</b>	<b>99,29</b>	<b>57.175.318.024,58</b>	<b>(2.501.142.895,86)</b>



Rincian realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 per SKPD dan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 per sub rincian objek sebagaimana disajikan pada **Lampiran 16.a** dan **16.b**.

<b>5.1.2.2.5</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<u>TA 2024 (Rp)</u> <b>10.355.974.556,07</b>	<u>TA 2023 (Rp)</u> <b>14.752.142.149,14</b>
------------------	---	---	---

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dianggarkan sebesar Rp10.175.211.865,00 dengan realisasi sebesar Rp10.355.974.556,07 atau sebesar 94,36%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp4.396.167.593,07 atau sebesar 29,80% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp14.752.142.149,14. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan TA 2023 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.33**  
**Rincian Belanja Aset Tetap Lainnya**

(dalam rupiah)

NO	BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIK/(TURUN)
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	963.508.015,00	953.331.605,00	98,94	212.108.700,00	741.222.905,00
2.	Belanja Modal Tanaman	0,00	0,00	-	124.510.000,00	(124.510.000,00)
3.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	-	300.300.000,00	(300.300.000,00)
4.	Belanja Modal Aset Tetap Renovasi	8.512.415.000,00	8.499.248.351,07	99,85	12.684.965.049,14	(4.185.716.698,07)
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	699.288.850,00	903.394.600,00	129,19	1.430.258.400,00	(526.863.800,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>10.175.211.865,00</b>	<b>10.355.974.556,07</b>	<b>101,78</b>	<b>14.752.142.149,14</b>	<b>(4.396.167.593,07)</b>

Dari Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terdapat Realisasi Belanja Modal dari Dana BOS dengan realisasi sebesar Rp903.394.600,00 atau 129,19%. Realisasi tersebut lebih besar dari anggaran yang telah ditetapkan, hal tersebut disebabkan oleh Realisasi dana BOS dicatat berdasarkan laporan dana BOS yang telah dilaporkan ke Pemerintah Pusat melalui aplikasi RKAS.

Tidak tercapainya target Belanja Aset Tetap Lainnya dikarenakan rendahnya realisasi pendapatan BLUD yang mengakibatkan tidak tersedianya dana Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD pada RSUD Mayjen H.A.Thalib Kota Sungai Penuh.

Rincian realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 per SKPD dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 per sub rincian objek disajikan pada **Lampiran 17.a** dan **Lampiran 17.b**.

<b>5.1.2.2.6</b>	<b>Belanja Modal Aset Lainnya</b>	<u>TA 2024 (Rp)</u> <b>0,00</b>	<u>TA 2023 (Rp)</u> <b>0,00</b>
------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024 TA 2024 dianggarkan Rp800.000.000,00 dengan realisasi nihil sehingga realisasi sama dengan realisasi TA 2023.

<b>5.1.2.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<u>TA 2024 (Rp)</u> <b>1.187.186.916,00</b>	<u>TA 2023 (Rp)</u> <b>0,00</b>
----------------	------------------------------	--	------------------------------------

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Belanja Tidak Terduga TA 2024 dianggarkan sebesar Rp2.333.881.689,00 dengan realisasi sebesar Rp1.187.186.916,00 atau sebesar 50,87%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp1.187.186.916,00 atau sebesar 100% dari realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2023 sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Tidak Terduga 2024 berdasarkan SK Walikota Sungai Penuh Nomor 100.3.3.3/Kep.01/2024 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kota Sungai Penuh dan SK Walikota Sungai Penuh Nomor 100.3.3.3/Kep.12/2024 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kota Sungai Penuh Tahun 2024.

<b>5.1.2.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>TA 2024 (Rp)</b>	<b>TA 2023 (Rp)</b>
		<b>104.129.646.031,00</b>	<b>102.258.624.204,00</b>

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan.

Belanja Transfer TA 2024 dianggarkan sebesar Rp107.618.953.516,00 dengan realisasi sebesar Rp104.129.646.031,00 atau sebesar 96,76%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp1.871.021.827,00 atau sebesar 1,83% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp102.258.624.204,00. Rincian Belanja Transfer TA 2024 dan TA 2023 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.34**  
**Rincian Belanja Transfer**

*(dalam rupiah)*

NO	BELANJA TRANSFER	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIK/(TURUN)
	2	3	4	$5 = 4 : 3 \times 100$	6	$7 = 4 - 6$
1.	Belanja Bagi Hasil	1.107.933.815,00	1.089.710.826,00	98,36	0,00	1.089.710.826,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan	106.511.019.701,00	103.039.935.205,00	96,74	102.258.624.204,00	781.311.001,00
<b>JUMLAH</b>		<b>107.618.953.516,00</b>	<b>104.129.646.031,00</b>	<b>96,76</b>	<b>102.258.624.204,00</b>	<b>1.871.021.827,00</b>

<b>5.1.2.4.1</b>	<b>Belanja Bagi Hasil</b>	<b>TA 2024 (Rp)</b>	<b>TA 2023 (Rp)</b>
		<b>1.089.710.826,00</b>	<b>0,00</b>

Transfer Bagi Hasil Kota Sungai Penuh TA 2024 dianggarkan sebesar Rp1.107.933.815,00 dengan realisasi sebesar Rp1.089.710.826,00 atau sebesar 98,36%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp1.089.710.826,00 atau sebesar 100% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp0,00.

Transfer Bagi Hasil Kota Sungai Penuh TA 2024 merupakan transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kota Sungai Penuh ke 65 Desa.

Pada Tahun 2024 terdapat kurang salur bagi hasil pajak dan retribusi untuk Pemerintah Desa minimal sebesar Rp80.243.661,20 dan belum ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Sungai Penuh.

Rincian Transfer Bagi Hasil Kota Sungai Penuh TA 2024 disajikan pada **Lampiran 18**.

**5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan** **TA 2024 (Rp)**  
**103.039.935.205,00** **TA 2023 (Rp)**  
**102.258.624.204,00**

Transfer Bantuan Keuangan Kota Sungai Penuh TA 2024 dianggarkan sebesar Rp106.511.019.701,00 dengan realisasi sebesar Rp103.039.935.205,00 atau sebesar 96,74%. Realisasi tersebut naik sebesar Rp781.311.001,00 atau sebesar 0,76% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2023 sebesar Rp102.258.624.204,00. Rincian Transfer Bantuan Keuangan TA 2024 dan TA 2023 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.35**  
**Rincian Transfer Bantuan Keuangan**

*(dalam rupiah)*

NO	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIK/(TURUN)
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	800.000.000,00	476.318.748,00	59,54	728.724.321,00	(252.405.573,00)
2.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	105.711.019.701,00	102.563.616.457,00	97,02	101.529.899.883,00	1.033.716.574,00
<b>JUMLAH</b>		<b>106.511.019.701,00</b>	<b>103.039.935.205,00</b>	<b>96,74</b>	<b>102.258.624.204,00</b>	<b>781.311.001,00</b>

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Transfer Bantuan Keuangan terdiri dari realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2024 sebesar Rp476.318.748,00 dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2024 sebesar Rp102.563.676.457,00.

**5.1.2.4.2.1 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota** **TA 2024 (Rp)**  
**476.318.748,00** **TA 2023 (Rp)**  
**728.724.321,00**

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2024 dianggarkan sebesar Rp800.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp476.318.748,00 atau sebesar 59,54%. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota turun sebesar Rp252.405.573,00 atau sebesar 34,64% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2023 sebesar Rp728.724.321,00.

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2024 merupakan belanja dari Bantuan Keuangan Provinsi Jambi yang dianggarkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi ke Kabupaten/ Kota Untuk Kelurahan dan Kecamatan.

Rendahnya Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota disebabkan oleh Tunda Salur Bantuan Keuangan Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1031/Kep.Gub/BPKPD-4.2/2024 tentang Penetapan Alokasi Tunda Salur Tahap II Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa Dan Kelurahan Tahun Anggaran 2024.

Rincian realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2024 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.36**  
**Rincian realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota TA 2024**

*(dalam rupiah)*

NO	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100
1.	Kecamatan Sungai Penuh	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
2.	Kecamatan Pesisir Bukit	100.000.000,00	77.268.000,00	77,27
3.	Kecamatan Hamparan Rawang	0,00	0,00	-
4.	Kecamatan Kumun Debai	50.000.000,00	47.579.188,00	95,16
5.	Kecamatan Tanah Kampung	50.000.000,00	49.762.800,00	99,53
6.	Kecamatan Pondok Tinggi	50.000.000,00	49.979.010,00	99,96
7.	Kecamatan Sungai Bungkal	50.000.000,00	44.611.100,00	89,22
8.	Kecamatan Koto Baru	50.000.000,00	37.792.650,00	75,59
9.	Kelurahan Sungai Penuh	100.000.000,00	30.000.000,00	30,00
10.	Kelurahan Pondok Tinggi	100.000.000,00	30.000.000,00	30,00
11.	Kelurahan Dusun Baru	100.000.000,00	29.947.000,00	29,95
12.	Kelurahan Pasar Sungai Penuh	100.000.000,00	29.379.000,00	29,38
<b>JUMLAH</b>		<b>800.000.000,00</b>	<b>476.318.748,00</b>	<b>59,54</b>

**5.1.2.4.2.2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa**

	<u>TA 2024 (Rp)</u>	<u>TA 2023 (Rp)</u>
	<b>102.563.616.457,00</b>	<b>101.529.899.883,00</b>

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2024 dianggarkan sebesar Rp105.711.019.701,00 dengan realisasi sebesar Rp102.563.616.457,00. Realisasi tersebut naik sebesar Rp1.033.716.574,00 atau sebesar 1,02% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp101.529.899.883,00.

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2024 berdasarkan:

1. Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Penetapan, Penyaluran, Serta Pelaporan Dana Desa Lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024.
2. Peraturan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024.
3. Surat Edaran dari Gubernur Jambi tanggal 7 Februari 2024 nomor 2/SE/DP3AP2/2024 perihal Pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Desa.

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2024 sebesar Rp102.563.676.457,00 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.37**  
**Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2024**

*(dalam rupiah)*

NO	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100
1.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	48.391.558.000,00	50.414.782.000,00	104,18
2.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	50.819.461.701,00	50.198.834.457,00	98,78
3.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	6.500.000.000,00	1.950.000.000,00	30,00
<b>JUMLAH</b>		<b>105.711.019.701,00</b>	<b>102.563.616.457,00</b>	<b>97,02</b>

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2024 sebesar Rp50.414.782.000,00 atau 104,18%, realisasi tersebut melebihi anggaran yang ditetapkan karena Dana Desa langsung disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Desa. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa TA 2024 sebesar Rp50.198.834.457,00 atau 98,78%. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa sebesar Rp1.950.000.000,00, atau sebesar 30%, rendahnya realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa TA 2024 disebabkan tunda salur bantuan keuangan dari Provinsi Jambi atas Bantuan Keuangan ke Desa tahap ke II. Rincian Realisasi Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa, Realisasi Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Realisasi Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa diuraikan pada **Lampiran 19.a, 19.b dan 19.c**.

Pada Tahun 2024 terdapat kurang salur Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa minimal sebesar Rp2.122.703.600,40 dan belum ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Sungai Penuh.

### 5.1.3

#### Surplus/(Defisit)

<u>TA 2024 (Rp)</u>	<u>TA 2023 (Rp)</u>
<b>(16.554.085.493,70)</b>	<b>(27.504.349.165,18)</b>

Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Berdasarkan Realisasi Pendapatan, Belanja, dan Transfer maka Defisit TA 2024 sebesar Rp16.554.085.493,70 dari anggaran sebesar Rp22.258.974.069,00. Nilai tersebut naik sebesar Rp10.950.263.671,48 atau sebesar 39,81% jika dibandingkan dengan Defisit Tahun 2023 sebesar Rp27.504.349.165,18. Rincian Surplus/Defisit TA 2024 dan Tahun 2023 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.38**  
**Surplus/Defisit**

*(dalam rupiah)*

NO	SURPLUS/ (DEFISIT)	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIK/(TURUN)
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 – 6
1.	Pendapatan	850.763.684.127,00	793.723.306.683,28	93,30	761.196.247.748,62	32.527.058.933,93
2.	Belanja	873.022.658.196,00	810.277.392.176,98	92,81	788.700.596.914,53	21.576.795.262,45
<b>JUMLAH (1 – 2)</b>		<b>(22.258.974.069,00)</b>	<b>(16.554.085.493,70)</b>	<b>74,37</b>	<b>(27.504.349.165,18)</b>	<b>10.950.263.671,48</b>

5.1.4	Pembiayaan Daerah	<u>TA 2024 (Rp)</u>	<u>TA 2023 (Rp)</u>
		22.258.974.069,79	49.763.323.234,97

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan Daerah TA 2024 dianggarkan sebesar Rp22.258.974.069,00 dan terealisasi sebesar Rp22.258.974.069,79 atau sebesar 100,00%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp27.504.349.165,18 atau sebesar 55,27% jika dibandingkan dengan Pembiayaan Daerah TA 2023 sebesar Rp49.763.323.234,97. Rincian realisasi Pembiayaan Daerah diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.39**  
**Rincian Pembiayaan Daerah**

*(dalam rupiah)*

NO	PEMBIAYAAN DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIK/(TURUN)
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Penerimaan Pembiayaan	22.258.974.069,00	22.258.974.069,79	100,00	49.763.323.234,97	(27.504.349.165,18)
2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>JUMLAH (1 - 2)</b>		<b>22.258.974.069,00</b>	<b>22.258.974.069,79</b>	<b>100,00</b>	<b>49.763.323.234,97</b>	<b>(27.504.349.165,18)</b>

5.1.4.1	Penerimaan Pembiayaan	<u>TA 2024 (Rp)</u>	<u>TA 2023 (Rp)</u>
		22.258.974.069,79	49.763.323.234,97

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman atau hasil divestasi.

Penerimaan Pembiayaan TA 2024 dianggarkan sebesar Rp22.258.974.069,00 dan terealisasi sebesar Rp22.258.974.069,79 atau sebesar 100%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp27.504.349.165,18 atau sebesar 55,27% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp49.763.323.234,97.

5.1.4.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	<u>TA 2024 (Rp)</u>	<u>TA 2023 (Rp)</u>
		22.258.974.069,79	49.763.323.234,97

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya TA 2024 dianggarkan sebesar Rp22.258.974.069,00 dan terealisasi sebesar Rp22.258.974.069,79 atau sebesar 100%. Realisasi tersebut turun sebesar Rp27.504.349.165,18 atau sebesar 55,27% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp49.763.323.234,97.

5.1.4.1.2	Koreksi SiLPA	<u>TA 2024 (Rp)</u>	<u>TA 2023 (Rp)</u>
		0,00	0,00

Koreksi SiLPA TA 2024 tidak dianggarkan sehingga realisasi sama dengan realisasi TA 2023.

5.1.4.2	Pengeluaran Pembiayaan	<u>TA 2024 (Rp)</u>	<u>TA 2023 (Rp)</u>
		0,00	0,00

Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, atau penyertaan modal.

Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 tidak dianggarkan sehingga realisasi sama dengan realisasi TA 2023.

<b>5.1.4.2.1</b>	<b>Penyertaan Modal Pemerintah Daerah</b>	<u>TA 2024 (Rp)</u> <b>0,00</b>	<u>TA 2023 (Rp)</u> <b>0,00</b>
------------------	---	------------------------------------	------------------------------------

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah TA 2024 tidak dianggarkan sehingga realisasi sama dengan realisasi TA 2023.

<b>5.1.5</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)</b>	<u>TA 2024 (Rp)</u> <b>5.704.888.576,09</b>	<u>TA 2023 (Rp)</u> <b>22.258.114.615,83</b>
--------------	---	--	---

SiLPA TA 2024 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp5.704.888.576,09. Realisasi tersebut turun sebesar Rp16.554.085.493,70 atau sebesar 74,37% dibandingkan SiLPA TA 2023 sebesar Rp22.258.114.615,83. Rincian realisasi SiLPA TA 2023 dan TA 2022 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.40  
Realisasi SiLPA**

(dalam rupiah)

NO	SiLPA	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE (%)	REALISASI 2023	NAIK/(TURUN)
1	2	3	4	5 = 4 : 3 X 100	6	7 = 4 - 6
1.	Surplus / (Defisit)	(22.258.974.069,00)	(16.554.085.493,70)	74,37	(27.504.349.165,18)	10.950.263.671,48
2.	Pembiayaan Netto	22.258.974.069,00	22.258.974.069,79	100,00	49.762.463.781,01	(27.504.349.165,18)
<b>JUMLAH</b>		<b>0,00</b>	<b>5.704.888.576,09</b>	<b>-</b>	<b>22.258.114.615,83</b>	<b>(16.554.085.493,70)</b>

Silpa Pemkot Sungai Penuh TA 2024 sebesar Rp5.704.888.576,09. Berdasarkan SiLPA TA 2024 terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp15.161.144.671,10 sehingga terdapat selisih sebesar Rp9.456.256.095,01 yang digunakan untuk pembayaran kegiatan Tahun 2024. Rincian SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.1.41  
Rincian SiLPA TA 2024**

(dalam rupiah)

No	Rincian SiLPA	31 Desember 2024
<b>I</b>	<b>SiLPA dari TKD dari Pemerintah Pusat</b>	<b>14.905.042.011,35</b>
1	DAU BG	0,00
2	DAU SG (Ditentukan Penggunaan)	9.729.502.423,00
3	DBH BG	0,00
4	DBH SG (Ditentukan Penggunaan)	51.533.110,95
5	DAK Fisik	6.247.036,00
6	DAK Nonfisik	5.117.759.441,40
7	Insentif Fiskal	0,00
8	Dana Desa	0,00
9	Otonomi Khusus	0,00
<b>II</b>	<b>SiLPA dari dana lain</b>	<b>256.102.659,75</b>
1	JKN	54.595.274,86
2	BLUD	201.507.384,89
3	Transfer Antar Daerah	0,00
<b>Total SiLPA APBD (I + II)</b>		<b>15.161.144.671,10</b>

**BAB V.II**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

**5.2 Penjelasan atas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)**

LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. LPSAL Tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.2.1**  
**Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	2024	2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	22.258.114.615,83	49.763.323.234,97
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	22.258.974.069,79	49.763.323.234,97
I	<b>Sub Total (1 - 2)</b>	<b>(859.453,96)</b>	<b>0,00</b>
3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.704.888.576,09	22.258.974.069,79
II	<b>Sub Total (I + 3)</b>	<b>5.704.029.122,13</b>	<b>22.258.974.069,79</b>
4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	(859.453,96)
5	Lain-lain	859.453,96	0,00
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (II + 4 + 5)</b>		<b>5.704.888.576,09</b>	<b>22.258.114.615,83</b>

<b>5.2.1</b>	<b>Saldo Anggaran Lebih</b>	<u>TA 2024 (Rp)</u>	<u>TA 2023 (Rp)</u>
	<b>Awal</b>	<b>22.258.114.615,83</b>	<b>49.763.323.234,97</b>

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 sebesar Rp22.258.114.615,83 turun sebesar Rp27.505.208.619,14 atau sebesar 55,27% dari Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 sebesar Rp49.763.323.234,97. Saldo Anggaran Lebih Awal terdiri dari Kas di Kasda (tidak termasuk utang PFK).

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 sebesar Rp22.258.114.615,83 sedangkan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp22.258.974.069,79 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp859.453,96. Selisih tersebut merupakan Koreksi atas kekurangan pencatatan SAL.

<b>5.2.2</b>	<b>Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan</b>	<u>TA 2024 (Rp)</u>	<u>TA 2023 (Rp)</u>
		<b>22.258.974.069,79</b>	<b>49.763.323.234,97</b>

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan SiLPA Tahun 2023 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 sebesar Rp22.258.974.069,79 turun sebesar Rp27.504.349.165,18 atau sebesar 55,27% dan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp49.763.323.234,97.

<b>5.2.3</b>	<b>Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)</b>	<u>31 Des 2024 (Rp)</u>	<u>31 Des 2023 (Rp)</u>
		<b>5.704.888.576,09</b>	<b>22.258.974.069,79</b>

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan per 31 Desember 2024 terdiri dari Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan sebesar Rp5.704.888.576,09 turun sebesar Rp16.554.085.493,70 atau sebesar 74,37% jika

dibandingkan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.258.974.069,79 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.2.2**  
**Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)**  
*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	SALDO 2024	SALDO 2023
<b>I</b>	<b>Surplus / Defisit (1-2)</b>	(16.554.085.493,70)	(27.504.349.165,18)
1	Pendapatan	793.723.306.683,28	761.196.247.749,35
2	Belanja	810.277.392.176,98	788.700.596.914,53
<b>II</b>	<b>Pembiayaan Netto (3-4)</b>	22.258.974.069,79	49.763.323.234,97
3	Penerimaan Pembiayaan	22.258.974.069,79	49.763.323.234,97
4	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
<b>SILPA/SIKPA TAHUN BERJALAN (I+II)</b>		<b>5.704.888.576,09</b>	<b>22.258.974.069,79</b>

<b>5.2.4</b>	<b>Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya</b>	<u>TA 2024 (Rp)</u> <b>0,00</b>	<u>TA 2023 (Rp)</u> <b>(859.453,96)</b>
--------------	---	------------------------------------	--

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp(859.453,96).

<b>5.2.5</b>	<b>Lain-lain</b>	<u>TA 2024 (Rp)</u> <b>859.453,96</b>	<u>TA 2023 (Rp)</u> <b>0,00</b>
--------------	------------------	--	------------------------------------

Lain-lain merupakan koreksi SAL lain-lain karena Anggaran Lebih Akhir merupakan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran setelah dikurangi/ditambah Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Lain-lain.

Lain-lain pada Pemkot Sungai Penuh Tahun 2024 adalah sebesar Rp859.453,96 sedangkan Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00. Lain-lain pada Pemkot Sungai Penuh Tahun 2024 sebesar Rp859.453,96 tersebut telah di setor ke Kasda tanggal 24 Maret 2025.

<b>5.2.6</b>	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<u>TA 2024 (Rp)</u> <b>5.704.888.576,09</b>	<u>TA 2023 (Rp)</u> <b>22.258.114.615,83</b>
--------------	-----------------------------------	--	---

Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran setelah dikurangi/ditambah Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Lain-lain. Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Pemkot Sungai Penuh Tahun 2024 adalah sebesar Rp5.704.888.576,09 turun sebesar Rp16.553.226.039,74 atau sebesar 74,37% jika dibandingkan Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp22.258.114.615,83.

Rincian Saldo Anggaran Lebih dana mengikat Tahun 2024 dan SAL Akhir Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.



**Tabel 5.2.3**  
**Rincian Saldo Anggaran Lebih dana mengikat Tahun 2024 dan SAL Akhir Tahun 2024**

*(dalam rupiah)*

No	Rincian SiLPA	Dana Mengikat Seharusnya Tahun 2024	Jumlah SAL Akhir Tahun 2024	Dana mengikat yang digunakan Tahun 2024
I	<b>SILPA dari TKD dari Pemerintah Pusat</b>	<b>17.745.685.728,35</b>	<b>5.448.543.400,35</b>	<b>12.297.142.328,00</b>
2	DAU SG (Ditentukan Penggunaan)	12.576.393.176,00	1.360.193.733,95	11.216.199.442,05
4	DBH SG (Ditentukan Penggunaan)	51.533.110,95		51.533.110,95
6	DAK Nonfisik	5.117.759.441,40	4.088.349.666,40	1.029.409.775,00
II	<b>SILPA dari dana lain</b>	<b>256.345.175,74</b>	<b>256.345.175,74</b>	0,00
1	JKN	54.570.166,95	54.570.166,95	0,00
2	BLUD	201.507.384,89	201.507.384,89	0,00
3	Pendapatan Lainnya	267.623,90	267.623,90	0,00
<b>Total SiLPA APBD (I + II)</b>		<b>18.001.788.388,10</b>	<b>5.704.888.576,09</b>	<b>12.297.142.328,00</b>

Dari tabel diatas terdapat selisih sebesar Rp12.297.142.328,00 disebabkan penggunaan dana mengikat untuk pembayaran belanja daerah pada akhir tahun. Penggunaan dana mengikat sebesar Rp12.297.142.328,00 tersebut telah dipulihkan kembali sebesar Rp10.091.301.964 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tambahan - Tunjangan Hari Raya dan Gaji 13 sebesar Rp2.518.031.000 telah direalisasikan pada belanja Tunjangan Profesi guru (TPG) PNSD, SP2D Nomor 000007 Tanggal 13 Februari 2025 oleh Dinas Pendidikan.
2. DAU Tambahan - Tunjangan Hari Raya dan Gaji 13 sebesar Rp2.518.031.000 telah direalisasikan pada belanja Tunjangan Profesi guru (TPG) PNSD, SP2D Nomor 000008 Tanggal 13 Februari 2025 oleh Dinas Pendidikan.
3. DAU Bidang Pendidikan telah dianggarkan kembali senilai Rp1.640.104.044.
4. DAU Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp27.694.645,00 telah dianggarkan pada Dinas PUPR pada APBD TA 2025.
5. Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD telah direalisaikan pada belanja Tunjangan Profesi Guru PNSD Rp2.358.031.500,00 TA 2025.
6. DAK NF Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas, Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM), Dana Fasilitasi Penanaman Modal, Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) telah dilakukan penyesuaian pendapatan Dana Transfer DAK Non Fisik sebesar Rp1.029.409.775,00 pada berdasarkan Dana yang diterima oleh Pemkot Sungai Penuh pada Perubahan APBD TA 2025 yang pada saat ini telah masuk pada Perubahan RKPD Pemkot Sungai Penuh.



**BAB V.III**  
**NERACA**

**5.3 Penjelasan atas Neraca**

<b>5.3.1 Aset</b>	<u><b>31 Des 2024 (Rp)</b></u>	<u><b>31 Des 2023 (Rp)</b></u>
	<b>1.722.047.608.264,27</b>	<b>1.721.982.279.441,14</b>

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemkot Sungai Penuh sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh Pemkot Sungai Penuh maupun masyarakat.

Nilai Aset Pemkot Sungai Penuh per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.722.047.608.264,27 naik sebesar Rp65.328.823,13 jika dibandingkan dengan nilai Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.721.982.279.441,14.

Aset dapat diklasifikasikan ke dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset lainnya dan Properti Invenstasi sebagaimana diuraikan tabel berikut.

**Tabel 5.3.1**  
**Rincian Saldo Aset**

*(dalam rupiah)*

NO	ASET	31 - DES - 2024	31 - DES - 2023	NAIK/(TURUN)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Aset Lancar	90.032.499.972,62	68.316.996.819,29	21.715.503.153,33
2	Investasi Jangka Panjang	89.778.781.855,84	90.687.592.942,26	(908.811.086,42)
3	Aset Tetap	1.444.767.450.140,70	1.450.801.810.008,37	(6.034.359.867,67)
4	Aset lainnya	93.871.562.983,11	112.175.879.671,22	(18.304.316.688,11)
5	Properti Investasi	3.597.313.312,00	0,00	3.597.313.312,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.722.047.608.264,27</b>	<b>1.721.982.279.441,14</b>	<b>65.328.823,13</b>

<b>5.3.1.1 Aset Lancar</b>	<u><b>31 Des 2024 (Rp)</b></u>	<u><b>31 Des 2023 (Rp)</b></u>
	<b>90.032.499.972,62</b>	<b>68.316.996.819,29</b>

Aset Lancar terdiri dari Kas di Kasda, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara BLUD, Kas di Bendahara BOS, Kas di Bendahara FKTP, Kas Lainnya, Piutang Pendapatan, Piutang Lainnya, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar dimuka, dan Persediaan.

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 sebesar Rp90.032.499.972,62 naik sebesar Rp21.715.503.153,33 atau sebesar 31,79% jika dibandingkan dengan nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp68.316.996.819,29 sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

**Tabel 5.3.2**  
**Rincian Saldo Aset Lancar**

*(dalam rupiah)*

NO	ASET LANCAR	31 - DES - 2024	31 - DES - 2023	NAIK/ (TURUN)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Kas di Kas Daerah	4.172.759.599,16	18.771.975.415,64	(14.599.215.816,48)

NO	ASET LANCAR	31 - DES - 2024	31 - DES - 2023	NAIK/ (TURUN)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
4	Kas di BLUD	201.507.384,89	2.151.088.971,32	(1.949.581.586,43)
5	Kas Dana BOS	4.797,67	1.699.116,27	(1.694.318,60)
6	Kas Dana BOSP	168.104,60	56.956,34	111.148,26
7	Kas Dana BOK Puskesmas	1.274.349.557,00	1.279.954.933,00	(5.605.376,00)
8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	54.570.166,95	626.032,25	53.944.134,70
9	Kas Lainnya	60.123.943,07	230.283.036,92	(170.159.093,84)
10	Piutang Pajak Daerah	4.109.029.719,00	3.677.256.027,00	431.773.692,00
11	Piutang Retribusi Daerah	7.205.244.153,00	1.860.165.000,00	5.345.079.153,00
12	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.095.926.131,36	12.056.605.045,86	39.321.085,50
13	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	116.338.000,00	1.429.958.960,00	(1.313.620.960,00)
14	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	7.576.000,00	(7.576.000,00)
15	Piutang Pendapatan Lainnya	224.044.000,00	224.044.000,00	0,00
16	Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	23.714.875.000,00	0,00	23.714.875.000,00
17	Piutang Transfer Antar Daerah	28.098.566.515,00	19.042.710.768,00	9.055.855.747,00
18	Penyisihan Piutang	(2.847.206.109,66)	(3.127.289.850,49)	280.083.740,83
19	Beban Dibayar Dimuka	162.073.571,58	342.491.468,31	(180.417.896,73)
20	Persediaan	11.390.125.439,00	10.367.794.938,87	1.022.330.500,13
	<b>JUMLAH</b>	<b>90.032.499.972,62</b>	<b>68.316.996.819,29</b>	<b>21.715.503.153,33</b>

#### 5.3.1.1.1

#### Kas di Kasda

**31 Des 2024 (Rp)**

**31 Des 2023 (Rp)**

**4.172.759.599,16**

**18.771.975.415,64**

Kas di Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemkot Sungai Penuh. Kas di Kas Daerah terdiri dalam bentuk giro, deposito dan setaranya yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.172.759.599,16 turun sebesar Rp14.599.215.816,48 atau sebesar 77,77% jika dibandingkan dengan nilai Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.771.975.415,64.

Saldo Kasda pada Bank Jambi dengan Nomor Rekening 301500084 sebesar Rp4.172.759.599,16 sedangkan berdasarkan pembukuan BKU jumlah Kasda sebesar Rp4.172.759.599,16 sehingga terdapat selisih sebesar Rp40. Selisih tersebut merupakan lebih tarik pajak oleh BPD Jambi atas Transaksi pada Dinas Peternakan dan Perikanan dan telah ditransfer ke Kasda pada tanggal 9 Januari 2025.

5.3.1.1.2	<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<u>31 Des 2024 (Rp)</u>	<u>31 Des 2023 (Rp)</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas yang dikelola oleh Bendahara Penerima dan belum disetor ke kasda per 31 Desember 2024.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 sama dengan tahun sebelumnya jika dibandingkan dengan nilai Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.3	<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<u>31 Des 2024 (Rp)</u>	<u>31 Des 2023 (Rp)</u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah Uang Tunai yang masih ada di Bendahara Pengeluaran SKPD dan saldo simpanan bank yang setiap saat dapat digunakan untuk kegiatan pemerintahan.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 Nihil, sama dengan Saldo Kas tahun sebelumnya.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan pembukuan per 31 Desember 2024 Nihil. Sedangkan Saldo Kas pada Bendahara di Rekening Koran sebesar Rp4.286.326,00, selisih tersebut merupakan kegiatan yang telah dipertanggungjawabkan namun dibayar ke yang berhak pada tanggal 14 Januari Tahun 2025 pada Sekretariat DPRD sebesar Rp3.696.000,00 dan sisa kegiatan Tahun 2023 pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah sebesar Rp590.326,00 yang disetor ke Kasda pada Tanggal 17 April 2025

5.3.1.1.4	<b>Kas di BLUD</b>	<u>31 Des 2024 (Rp)</u>	<u>31 Des 2023 (Rp)</u>
		<b>201.507.384,89</b>	<b>2.151.088.971,32</b>

Kas di BLUD adalah uang tunai yang berada di Bendahara BLUD dan saldo di rekening giro bank yang setiap saat dapat digunakan untuk kegiatan BLUD.

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2024 sebesar Rp201.507.384,89 turun sebesar Rp1.949.581.586,43 atau sebesar 90,63% jika dibandingkan Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.151.088.971,32.

Saldo Kas pada rekening BLUD RSUD Mayjen H.A Thalib dengan Nomor Rekening 301011447 sebesar Rp43.685.072,86 sedangkan berdasarkan pencatatan Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp201.507.384,89 sehingga terdapat selisih sebesar Rp157.822.312,03. Selisih tersebut merupakan Sisa uang di PPTK per 31 Des 2024 yang disetor pada rekening BLUD lewat tahun anggaran dan Sisa Kas pada rekening BLUD yang merupakan bukan bagian dari Kas BLUD.

Saldo Kas di BLUD sebesar Rp201.507.384,89 sedangkan saldo kas di Rekening Koran BLUD sebesar Rp43.685.072,86, sehingga terdapat selisih sebesar Rp157.822.312,03 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengembalian Sisa Panjar oleh PPTK dari tanggal 2 Januari s.d. 18 Februari 2025 sebesar Rp183.519.795,13
2. Hutang PFK yang disetorkan pada tanggal 11 Januari 2025 sebesar Rp12.972.072,00

3. Honorarium pegawai yang belum dibayarkan sebesar Rp600.000,00 dan telah disetorkan kembali pada tanggal 13 Februari 2025
4. Belanja SPPD yang belum dibayarkan sebesar Rp8.218.139,00
5. Lebih setor PPTK Tahun 2024 ke kas BLUD sebesar Rp386.972,00
6. Lebih setor PPTK Tahun 2022 yang tercatat di Kas Lainnya sebesar RpRp3.520.300,10 dan telah disetorkan ke PPTK pada tanggal 14 Juni 2025

Rincian Selisih Kas di BLUD per 31 Desember 2024 diuraikan pada **Lampiran 20.**

<b>5.3.1.1.5</b>	<b>Kas Dana BOS</b>	<b>31 Des 2024 (Rp)</b>	<b>31 Des 2023 (Rp)</b>
		<b>4.797,67</b>	<b>1.699.116,27</b>

Kas Dana BOS adalah uang tunai atau saldo simpanan Bendahara BOS yang terdiri dari penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sampai 31 Desember 2024 yang disalurkan melalui transfer ke rekening masing-masing sekolah.

Saldo dana BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.797,67 turun sebesar Rp1.694.318,60 atau sebesar 99,72% jika dibandingkan saldo dana BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.699.116,27.

Kas Dana BOS per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.797,67 berdasarkan Kas Dana BOS tunai pada Bendahara dan Rekening Koran dana BOS sebesar Rp365.828,34 sehingga terdapat selisih sebesar Rp361.030,67 dengan rincian sebagai berikut:

1. Sisa Kas Pada rekening Dana BOS Sekolah SD NEGERI 007XI SUMUR ANYIR sebesar Rp316.500,00 kesalahan transfer pajak daerah dari sekolah tersebut.
2. Sisa kas pada rekening dana BOS dengan total Rp44.530,67 merupakan kurang tarik sisa belanja dari dana BOS yang telah dipertanggungjawabkan namun uang masih berada pada rekening Dana BOS.

Daftar Rekening Giro Dana BOS pada Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh dan rincian Kas Dana BOS dapat dilihat pada **Lampiran 21.a., 21.b.**

<b>5.3.1.1.6</b>	<b>Kas Dana BOSP</b>	<b>31 Des 2024 (Rp)</b>	<b>31 Des 2023 (Rp)</b>
		<b>168.104,60</b>	<b>56.956,34</b>

Kas Dana BOSP merupakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) adalah uang tunai atau saldo simpanan Bendahara BOS BOP yang merupakan penerimaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) sampai 31 Desember 2024.

Saldo Kas Dana BOSP per 31 Desember 2024 sebesar Rp168.104,60 naik sebesar Rp111.148,26 atau sebesar 195,15% jika dibandingkan saldo kas dana BOSP per 31 Desember 2023 sebesar Rp56.956,34.

Kas Dana BOSP per 31 Desember 2024 sebesar Rp168.104,60 berada di rekening koran masing-masing sekolah. Berdasarkan saldo kas dana BOSP tersebut terdapat kas dana BOSP sebesar Rp64.956,34 dan jasa giro yang belum disetor ke Kasda Pemkot Sungai Penuh sampai tahun anggaran berakhir sebesar Rp103.148,26. Berikut perbandingan rekening kas dana BOSP dan kas di Rekening Giro di uraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.3**  
**Perbandingan Kas Dana BOSP dengan Kas di Rekening Giro**  
*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	KAS DI REKENING GIRO	KAS DANA BOSP	JASA GIRO BOSP
1	2	4	3	
1	TK Negeri Pembina Sungai Penuh	44.141,43	24.325,14	19.816,29
2	TK Negeri Pembina Sungai Penuh Kota	54.964,04	9.817,12	45.146,92
3	TK Negeri Pembina Tanah Kampung	15.902,72	7.737,38	8.165,34
4	TK negeri pembina Hampan Rawang	11.864,36	4.445,92	7.418,44
5	TK Negeri Pembina Kumun Debai	6.230,16	2.866,33	3.363,83
6	TK Negeri Pembina Bungkal	10.639,31	5.197,10	5.442,21
7	TK Negeri Pembina KT Baru	21.333,52	10.567,35	10.766,17
8	TK Negeri Pembina Pondok Tinggi	3.029,06	-	3.029,06
<b>JUMLAH</b>		<b>168.104,60</b>	<b>64.956,34</b>	<b>103.148,26</b>

Daftar rekening BOP PAUD Kesetaraan dan rincian Kas Dana BOSP dapat dilihat pada **Lampiran 22a., 22.b.**

**5.3.1.1.7 Kas Dana BOK Puskesmas** 31 Des 2024 (Rp) 31 Des 2023 (Rp)  
**1.274.349.557,00** **1.279.954.933,00**

Kas Dana BOK Puskesmas adalah uang tunai atau saldo pada rekening giro BNI BOK-Puskesmas yang terdiri dari penerimaan dana Bantuan Operasional Kesehatan-Puskesmas (BOK-Puskesmas) sampai 31 Desember 2024.

Dana BOK-Puskesmas diberikan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024.

Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.274.349.557,00 turun sebesar Rp5.605.376,00 atau sebesar 0,44% jika dibandingkan saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.279.954.933,00.

Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp1.274.349.557,00 yang diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.4**  
**Saldo Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2024**

<b>Saldo Dana BOK Puskesmas</b>	
Saldo per 31 Desember 2023	<b>Rp1.279.954.933,00</b>
Pendapatan BOK TA. 2024	Rp6.959.901.067,00 +
	<hr/>
	Rp8.239.856.000,00
Belanja BOK TA. 2024	Rp6.965.506.443,00 -
	<hr/>
Saldo per 31 Desember 2024	<b>Rp1.274.349.557,00</b>

Kas Dana BOK Puskesmas sebesar Rp1.274.349.557,00 sedangkan Saldo Kas di rekening giro BNI di 11 puskesmas sebesar Rp1.274.589.557,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp240.000,00. Selisih tersebut merupakan kegiatan yang telah dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan namun dibayar kepada yang berhak pada tanggal 28 Februari 2025 di Puskesmas Desa Gedang.

Daftar rincian Kas Dana BOK Puskesmas dapat dilihat pada **Lampiran 23.**

## 5.3.1.1.8

**Kas Dana Kapitasi  
pada FKTP****31 Des 2024 (Rp)**  
**54.570.166,95****31 Des 2023 (Rp)**  
**626.032,25**

Kas Dana Kapitasi pada FKTP merupakan akun untuk penyaluran dan pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Pemkot Sungai Penuh. Penetapan rekening berdasarkan Keputusan WaliKota Nomor 100.3.3.3/Kep.30/2024 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024.

Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar Rp54.570.166,95 sedangkan Kas Rekening giro dan tunai yang ada di Bendahara FKTP sebesar Rp54.645.729,26 sehingga terdapat selisih sebesar Rp75.562,31 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.5**  
**Perbandingan Kas Dana Kapitasi pada FKTP dengan Kas di Rekening Giro**

*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	KAS DANA KAPITASI PADA FKTP	KAS DI REKENING GIRO DAN TUNAI	SELISIH
1	2	3	4	5
1	Puskesmas Sungai Penuh	2.890.943,37	2.890.943,37	0,00
2	Puskesmas Hamparan Rawang	1.118.372,72	1.118.372,72	0,00
3	Puskesmas Kumun Debai	7.088.879,22	7.136.843,62	47.964,40
4	Puskesmas Desa Gedang	11.395.218,92	11.395.218,92	0,00
5	Puskesmas Tanah Kampung	43.837,77	43.837,77	0,00
6	Puskesmas Koto Baru	3.055.070,95	3.055.070,95	0,00
7	Puskesmas Koto Lolo	4.497.291,14	4.497.291,14	0,00
8	Puskesmas Sungai Liuk	12.060,51	12.060,51	0,00
9	Puskesmas Sungai Bungkal	1.876.085,36	1.876.085,36	0,00
10	Puskesmas Pondok Tinggi	19.579.605,05	19.607.202,96	27.597,91
11	Puskesmas Tanjung	3.012.801,94	3.012.801,94	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>54.570.166,95</b>	<b>54.645.729,26</b>	<b>75.562,31</b>

Selisih sebesar Rp75.562,31 pada tabel diatas merupakan uang yang bersumber bukan dari Kas Dana FKTP pada Puskesmas Kumun Debai sebesar Rp47.964,40 dan Puskesmas Pondok Tinggi sebesar Rp27.597,91. Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.6**  
**Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP**

*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	DANA KAPITASI	JASA GIRO YANG BELUM DISETOR KE KASDA
1	2	3	4
1	Puskesmas Sungai Penuh	2.890.943,37	-
2	Puskesmas Hamparan Rawang	1.067.918,32	50.454,40
3	Puskesmas Kumun Debai	7.088.879,22	-
4	Puskesmas Desa Gedang	11.395.218,92	-
5	Puskesmas Tanah Kampung	13.159,87	30.677,90
6	Puskesmas Koto Baru	3.032.404,50	22.666,45
7	Puskesmas Koto Lolo	4.497.291,14	-
8	Puskesmas Sungai Liuk	0,75	12.059,76
9	Puskesmas Sungai Bungkal	1.862.937,57	13.147,79
10	Puskesmas Pondok Tinggi	19.579.605,05	-



## 5.3.1.1.10

**Piutang Pajak Daerah****31 Des 2024 (Rp)****4.109.029.719,00****31 Des 2023 (Rp)****3.677.256.027,00**

Piutang Pajak adalah hak Pemda atas Pendapatan Pajak yang telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan.

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.109.029.719,00 naik sebesar Rp431.773.692,00 atau sebesar 12,09% jika dibandingkan dengan Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.677.256.027,00. Rincian Piutang Pajak sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.8**  
**Rekapitulasi Piutang Pajak**

*(dalam rupiah)*

No	Jenis Pajak	Saldo Piutang per 31 Desember 2024	Penambahan Piutang Pajak TA 2024	Pembayaran Piutang Pajak TA 2023	Saldo Piutang per 31 Desember 2023	Naik/ (Turun)
1	2	3 = 6 - 5 + 4	4	5	6	7 = 3 - 6
1	Piutang Pajak Reklame	64.028.000,00	4.692.000,00	0	59.336.000,00	4.692.000,00
2	Piutang Pajak Penerangan Jalan	359.847.816,00	359.847.816,00	353.329.832,00	353.329.832,00	6.517.984,00
3	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	3.685.153.903,00	602.349.535,00	181.785.827,00	3.264.590.195,00	420.563.708,00
<b>JUMLAH</b>		<b>4.109.029.719,00</b>	<b>966.889.351,00</b>	<b>535.115.659,00</b>	<b>3.677.256.027,00</b>	<b>431.773.692,00</b>

Saldo Piutang Pajak Daerah berdasarkan umur piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.121.675.759,00 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.9**  
**Piutang Pajak Daerah Berdasarkan Umur Piutang Per 31 Desember 2024**

*(dalam rupiah)*

NO	PIUTANG PAJAK DAERAH	NILAI
1	Kurang dari 1 Tahun	966.889.351,00
2	1 Sampai dengan 2 Tahun	451.466.434,00
3	3 Sampai dengan 5 Tahun	1.281.664.802,00
4	Lebih dari 5 Tahun	1.409.009.132,00
<b>JUMLAH</b>		<b>4.109.029.719,00</b>

Saldo piutang pajak daerah termasuk piutang pajak yang telah kedaluwarsa karena termasuk kategori piutang macet sebesar Rp1.409.009.132,00. Piutang dalam kategori macet tersebut belum dihapus karena belum adanya pengajuan atas piutang dalam kategori macet. Rincian Piutang Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 25**.

## 5.3.1.1.11

**Piutang Retribusi Daerah****31 Des 2024 (Rp)****7.205.244.153,00****31 Des 2024 (Rp)****1.860.165.000,00**

Piutang Retribusi adalah piutang yang timbul atas pendapatan retribusi yang dipungut oleh Pemda karena pemberian izin atau jasa kepada pribadi atau badan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Piutang retribusi timbul karena belum dilunasi tagihan retribusi oleh wajib bayar retribusi sebagaimana yang tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sampai tanggal 31 Desember 2024.

Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.205.244.153,00 naik sebesar Rp5.345.079.153,00 atau sebesar 287,34% jika dibandingkan dengan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.860.165.000,00. Rincian Piutang Retribusi sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.10**  
**Piutang Retribusi Daerah Per 31 Desember 2024**

(dalam rupiah)

No	Jenis Retribusi	Saldo Piutang per 31 Desember 2024	Penambahan Piutang TA 2024	Pembayaran Piutang Retribusi TA 2023	Koreksi Kurang Saldo Piutang TA 2023	Saldo Piutang per 31 Desember 2023	Naik/ (Turun)
1	2	3 = 7 - 6 - 5 + 4	4	5	6	7	8 = 3 - 7
1	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	617.750.000,00	340.525.500,00	99.850.500,00	495.429.000,00	872.504.000,00	(254.754.000,00)
2	Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah	428.361.000,00	84.375.000,00	643.675.000,00	0,00	987.661.000,00	(559.300.000,00)
3	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	6.159.133.153,00	6.159.133.153,00	0,00	0,00	0,00	6.159.133.153,00
<b>JUMLAH</b>		<b>7.205.244.153,00</b>	<b>6.584.033.653,00</b>	<b>743.525.500,00</b>	<b>495.429.000,00</b>	<b>1.860.165.000,00</b>	<b>5.345.079.153,00</b>

Saldo Piutang Retribusi Daerah berdasarkan umur piutang per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.205.244.153,00 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.11**  
**Piutang Retribusi Daerah Berdasarkan Umur Piutang Per 31 Desember 2024**

(dalam rupiah)

NO	PIUTANG RETRIBUSI DAERAH	NILAI
1	Kurang dari 1 Tahun	6.396.029.653,00
2	1 Sampai dengan 2 Tahun	485.647.500,00
3	3 Sampai dengan 5 Tahun	292.932.500,00
4	Lebih dari 5 Tahun	30.634.500,00
<b>JUMLAH</b>		<b>7.205.244.153,00</b>

Piutang Retribusi per 31 Desember 2024 merupakan Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Sungai Penuh sebesar Rp617.750.000,00 yang belum disetorkan oleh pemilik kios sampai akhir TA 2024 diuraikan pada **Lampiran 26.a**, Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp428.361.000,00 merupakan piutang Piutang Pemakaian Kekayaan Daerah oleh pihak lain/ masyarakat sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 26.b** dan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp6.159.133.153,00 sebagaimana pada **Lampiran 26.c**.

#### 5.3.1.1.12

**Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

**31 Des 2024 (Rp)**  
**12.095.926.131,36**

**31 Des 2023 (Rp)**  
**12.056.605.045,86**

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Piutang Dividen/Piutang Bagian Laba dari Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 pada Bank Jambi.

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp12.095.926.131,36 turun sebesar Rp39.321.085,50 atau sebesar

0,33% jika dibandingkan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.056.605.045,86.

<b>5.3.1.1.13</b>	<b>Piutang Lain-lain PAD yang Sah</b>	<u><b>31 Des 2024 (Rp)</b></u>	<u><b>31 Des 2023 (Rp)</b></u>
		<b>116.338.000,00</b>	<b>1.429.958.960,00</b>

Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah piutang yang timbul atas potensi PAD lainnya dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa pemda dan sebagainya sampai tanggal 31 Desember 2024.

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp116.338.000,00 atau turun sebesar Rp1.313.620.960,00 atau 91,86% jika dibandingkan Piutang Lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.429.958.960,00.

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2024 sebesar Rp116.338.000,00 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.12**  
**Piutang Lain-lain PAD Yang Sah**  
**Per 31 Desember 2024**

(dalam rupiah)

No	Jenis Lain-lain PAD Yang Sah	Saldo Piutang per 31 Desember 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Piutang per 31 Desember 2023	Naik/ (Turun)
1	2	3 = 6 - 5 + 4	4	5	6	7
1.	Piutang Pendapatan Denda PBB-P2	0,00	0,00	1.253.520.268,00	1.253.520.268,00	(1.253.520.268,00)
2.	Piutang Pendapatan Hibah	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)
3.	Piutang BLUD	116.338.000,00	0,00	0,00	116.338.000,00	0,00
4.	Piutang Kelebihan Tarik Bank	0,00	0,00	54.100.692,00	54.100.692,00	(54.100.692,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>116.338.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.620.960,00</b>	<b>1.429.958.960,00</b>	<b>(1.313.620.960,00)</b>

Piutang Pendapatan Denda PBB-P2 per 31 Desember 2024 Nihil, Piutang tersebut turun sebesar Rp1.253.520.268,00 dikarenakan adanya koreksi atas Piutang Pendapatan Denda PBB-P2 TA 2023 yang belum ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atas wajib pajak.

Piutang Pendapatan Hibah per 31 Desember 2024 Nihil, Piutang tersebut turun sebesar Rp6.000.000,00 dikarenakan adanya pembayaran sisa dana Hibah Pemkot Sungai Penuh ke Koni Kota Sungai Penuh TA 2023.

Piutang Kelebihan Tarik Bank per 31 Desember 2024 Nihil, Piutang tersebut turun sebesar Rp54.100.692,00 dikarenakan telah disetor kembali atas kelebihan tarik Bank pada Dinas PUPR dan Puskesmas Sungai Liuk.

<b>5.3.1.1.14</b>	<b>Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi</b>	<u><b>31 Des 2024 (Rp)</b></u>	<u><b>31 Des 2023 (Rp)</b></u>
		<b>0,00</b>	<b>7.576.000,00</b>

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp7.576.000,00 atau sebesar 100,00% jika dibandingkan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.576.000,00.

Tuntutan Ganti Rugi merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk menuntut Penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal yang ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi TA 2024 nihil merupakan pembayaran atas Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi TA 2023 sebesar Rp7.576.000,00 pada Dinas Pendidikan yang terdiri dari:

1. Sdr. AGF, berdasarkan Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 100.3.3.3/Kep.511/2023 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian Terhadap Saudara AGF di Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh Tahun 2023 sebesar Rp3.657.500,00 yang telah di bayar ke RKUD Kota Sungai Penuh pada tanggal 16 Juli 2024.
2. Sdr. IST, berdasarkan Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 100.3.3.3/Kep.468/2023 tentang Penetapan Pembebanan Penggantian Kerugian Terhadap Saudara IST di Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh Tahun 2023 sebesar Rp3.918.500,00 yang telah di bayar ke RKUD Kota Sungai Penuh pada tanggal 19 Maret 2024.

<b>5.3.1.1.15</b>	<b>Piutang Pendapatan Lainnya</b>	<b>31 Des 2024 (Rp)</b>	<b>31 Des 2023 (Rp)</b>
		<b>224.044.000,00</b>	<b>224.044.000,00</b>

Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp224.044.000,00 sedangkan saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp224.044.000,00.

Piutang Lainnya per 31 Desember 2024 merupakan piutang yang diserahkan Kabupaten Kerinci atas retribusi rumah dinas sebesar Rp196.370.000,00 dan piutang sewa tanah yang dicatat sebesar Rp27.674.000,00.

Rincian Piutang Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2024 diuraikan pada **Lampiran 27**.

<b>5.3.1.1.16</b>	<b>Piutang Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>31 Des 2024 (Rp)</b>	<b>31 Des 2023 (Rp)</b>
		<b>23.714.875.000,00</b>	<b>0,00</b>

Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan pengakuan piutang dari Pemerintah Daerah yang belum dibayar. Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 merupakan piutang kurang bayar Pemerintah Pusat diakui berdasarkan PMK No 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024 dan KMK Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024.

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.714.875.000,00 naik sebesar Rp23.714.875.000,00 atau sebesar 100% jika dibandingkan dengan Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.714.875.000,00 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.13**  
**Piutang Transfer Pemerintah Pusat**  
**Per 31 Desember 2024**

*(dalam rupiah)*

No	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	Saldo Piutang per 31 Desember 2024	Penambahan Piutang TA 2024	Pembayaran Piutang TA 2023	Saldo Piutang per 31 Desember 2023	Naik/ (Turun)
1	2	3 = 6 - 5 + 4	4	5	6	7
1.	DBH Pajak	2.895.391.000,00	2.895.391.000,00	0,00	0,00	2.895.391.000,00
2.	Dana Bagi Hasil SDA	20.819.484.000,00	20.819.484.000,00	0,00	0,00	20.819.484.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>23.714.875.000,00</b>	<b>23.714.875.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.714.875.000,00</b>

Rincian Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.714.875.000,00 diuraikan pada **Lampiran 28**.

**5.3.1.1.17**

**Piutang Transfer Antar Daerah**

**31 Des 2024 (Rp)**  
**28.098.566.515,00**

**31 Des 2023 (Rp)**  
**19.042.710.768,00**

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan perhitungan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi Pemerintah Daerah penerima yang bersangkutan.

Piutang Transfer Antar Daerah diakui berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor 898/Kepgub/BPKPD-2.1/2024 tentang Penetapan Pembagian Peruntukan Alokasi Dana Bagi Hasil Kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan untuk kabupaten/ kota se Provinsi Jambi Pajak Provinsi Untuk Kabupaten/Kota Se Provinsi Jambi Triwulan III Tahun Anggaran 2024.

Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.098.566.515,00 naik sebesar Rp9.055.846.747,00 atau sebesar 47,56% jika dibandingkan dengan Saldo Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.042.710.768,00. Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.098.566.515,00 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.14**  
**Piutang Transfer Antar Daerah**  
**Per 31 Desember 2024**

*(dalam rupiah)*

No	Piutang Transfer Antar Daerah	Saldo Piutang per 31 Desember 2024	Penambahan Piutang TA 2024	Pembayaran Piutang TA 2023	Saldo Piutang per 31 Desember 2023	Naik/ (Turun)
1	2	3 = 6 - 5 + 4	4	5	6	7
1	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5.188.976.797,00	5.188.976.797,00	2.253.452.332,00	2.253.452.332,00	2.935.524.465,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)	3.404.322.223,00	3.404.322.223,00	2.382.104.988,00	2.382.104.988,00	1.022.217.235,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	12.738.268.829,00	12.738.268.829,00	12.449.107.952,00	12.449.107.952,00	289.160.877,00

No	Piutang Transfer Antar Daerah	Saldo Piutang per 31 Desember 2024	Penambahan Piutang TA 2024	Pembayaran Piutang TA 2023	Saldo Piutang per 31 Desember 2023	Naik/ (Turun)
1	2	3 = 6 - 5 + 4	4	5	6	7
4	Pajak Air Permukaan	11.606.645,00	11.606.645,00	18.164.608,00	18.164.608,00	(6.557.963,00)
5	Pajak Rokok	1.925.392.021,00	1.925.392.021,00	1.939.880.888,00	1.939.880.888,00	(14.488.867,00)
6	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	4.830.000.000,00	4.830.000.000,00	0,00	0,00	4.830.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>28.098.566.515,00</b>	<b>28.098.566.515,00</b>	<b>19.042.710.768,00</b>	<b>19.042.710.768,00</b>	<b>(9.055.855.747,00)</b>

**5.3.1.1.18 Penyisihan Piutang** 31 Des 2024 (Rp) 31 Des 2023 (Rp)  
**(2.847.206.109,66)** **(3.127.289.850,49)**

Penyisihan Piutang merupakan pendapatan atas piutang yang ditaksirkan tidak dapat ditagih atau dikembalikan. Penyisihan piutang Pemkot Sungai Penuh Tahun 2024 sebesar Rp(2.847.206.109,66) turun sebesar Rp280.083.740,83 atau sebesar 8,96% jika dibandingkan Penyisihan piutang Pemkot Sungai Penuh Tahun 2023 sebesar Rp(3.127.289.850,49) yang dapat diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.15**  
**Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan Tahun 2023**  
*(dalam rupiah)*

NO	PENYISIHAN PIUTANG	31 - 12 - 2024	31 - 12 - 2023	Naik / (Turun)
1	2	3 = 6 - 4 + 5	6	7 = 3 - 6
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(2.099.822.623,15)	(1.787.850.296,15)	(311.972.327,00)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(257.645.648,27)	(177.258.592,50)	(80.387.055,77)
3	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	(60.479.630,66)	(60.283.025,23)	(196.605,43)
4	Penyisihan Piutang lain-lain PAD yang sah	(58.169.000,00)	(894.624.502,77)	836.455.502,77
5	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	(112.022.000,00)	(112.022.000,00)	0,00
6	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	(37.880,00)	37.880,00
7	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	(118.574.375,00)	0,00	(118.574.375,00)
8	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	(140.492.832,58)	(95.213.553,84)	(45.279.278,74)
<b>JUMLAH</b>		<b>(2.847.206.109,66)</b>	<b>(3.127.289.850,49)</b>	<b>280.083.740,82</b>

Rincian penyisihan piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih dan rincian jenis, umur, kualitas piutang dan besaran penyisihan piutang per 31 Desember 2023 diuraikan pada Lampiran 29.a, 29.b, 29.c, 29.d, 29.e, 29.f, 29.g, dan 29.h.

**5.3.1.1.19 Beban Dibayar Dimuka** 31 Des 2024 (Rp) 31 Des 2023 (Rp)  
**162.073.571,58** **342.491.468,31**

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp162.073.571,58 turun sebesar Rp180.417.896,73 atau sebesar 52,68% jika dibandingkan nilai Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp342.491.468,31.

Saldo Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp162.073.571,58 terdiri dari :

1. Sewa Rumah Perlindungan Pelayanan Perempuan dan Anak dan Pos jaga petugas pemadam kebakaran sebesar Rp23.726.027,40.
2. Sisa Premi Asuransi pada Dinas Pemadam Kebakaran sebesar Rp8.739724,70.
3. Sisa beban dibayar dimuka atas pembayaran STNK sebesar Rp129.607.819,48.

Rincian Beban Dibayar Dimuka disajikan pada **Lampiran 30.a** dan **30.b**.

5.3.1.1.20	Persediaan	<b>31 Des 2024 (Rp)</b>	<b>31 Des 2023 (Rp)</b>
		<b>11.390.125.439,00</b>	<b>10.367.794.938,87</b>

Persediaan merupakan pengadaan barang habis pakai, obat-obatan dan belanja barang dan jasa lainnya yang masih tersisa sampai 31 Desember 2024 berupa Aset Lancar dalam bentuk barang dan perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintahan Kota Sungai Penuh dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp11.390.124.439,00 naik sebesar Rp1.022.330.500,13 atau sebesar 9,86% jika dibandingkan dengan nilai Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.367.794.938,87 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.16**  
**Rekapitulasi Persediaan**

(dalam rupiah)

NO	PERSEDIAAN	31 - DES - 2024	31-Des-23	NAIK/ (TURUN)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Bahan Bangunan Konstruksi	13.021.600,00	32.415.500,00	(19.393.900,00)
2	Bahan Kimia	30.891.284,63	0,00	30.891.284,63
3	Bahan Baku/Bahan Lainnya	80.400,00	21.423.000,00	(21.342.600,00)
4	Suku Cadang	0,00	47.003.000,00	(47.003.000,00)
5	Bibit Ternak/Ikan	15.118.506,00	34.523.030,00	(19.404.524,00)
6	Alat/bahan Untuk kegiatan kantor	283.716.892,00	444.502.405,00	(160.785.513,00)
7	Obat-obatan	10.887.369.191,09	9.664.281.937,07	1.223.087.254,01
8	Natuna dan Pakan Natura	159.927.565,28	123.646.066,80	36.281.498,49
	<b>JUMLAH</b>	<b>11.390.125.439,00</b>	<b>10.367.794.938,87</b>	<b>1.022.330.500,13</b>

Rincian Persediaan SKPD per 31 Desember 2024 diuraikan pada **Lampiran 31.a**.

Nilai Persediaan Obat-obatan tersebut sudah termasuk sisa obat yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Jambi, persediaan obat yang disajikan tidak termasuk obat yang telah *expired* sebesar Rp6.130.863.563,90 sebagaimana disajikan pada **Lampiran 31.b**.

5.3.1.2	Investasi Jangka Panjang	<b>31 Des 2024 (Rp)</b>	<b>31 Des 2023 (Rp)</b>
		<b>89.778.781.855,84</b>	<b>90.687.592.942,26</b>

Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp89.778.781.855,84 turun sebesar Rp908.811.086,42 atau sebesar 1,00% jika dibandingkan nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar

Rp90.687.592.942,26. Nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 berasal dari Investasi Permanen. Rincian Investasi Jangka Panjang sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.17**  
**Investasi Jangka Panjang**

(dalam rupiah)

NO	INVESTASI JANGKA PANJANG	31 - DES – 2024	31 - DES - 2023	NAIK/ (TURUN)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00
2	Investasi Permanen	89.778.781.855,84	90.687.592.942,26	(908.811.086,42)
<b>JUMLAH</b>		<b>89.778.781.855,84</b>	<b>90.687.592.942,26</b>	<b>(908.811.086,42)</b>

<b>5.3.1.2.1</b>	<b>Investasi Non Permanen</b>	<u><b>31 Des 2024 (Rp)</b></u>	<u><b>31 Des 2023 (Rp)</b></u>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi Non Permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 sama jika dibandingkan dengan Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

<b>5.3.1.2.2</b>	<b>Investasi Permanen</b>	<u><b>31 Des 2024 (Rp)</b></u>	<u><b>31 Des 2023 (Rp)</b></u>
		<b>89.778.781.855,84</b>	<b>90.687.592.942,26</b>

Nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2024 sebesar Rp89.778.781.855,84 turun sebesar Rp908.811.086,42 atau sebesar 1,00% jika dibandingkan dengan nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp90.687.592.942,26. Investasi Permanen tersebut merupakan Penyertaan Modal dari Pemerintah Kota Sungai Penuh.

<b>5.3.1.2.2.1</b>	<b>Penyertaan Modal Pemerintah Daerah</b>	<u><b>31 Des 2024 (Rp)</b></u>	<u><b>31 Des 2023 (Rp)</b></u>
		<b>89.778.781.855,84</b>	<b>90.687.592.942,26</b>

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 sebesar Rp89.778.781.855,84 turun sebesar Rp908.811.086,42 atau sebesar 1,00% jika dibandingkan dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp90.687.592.942,26. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tersebut terdiri dari Penyertaan modal pada PT Bank Jambi dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Khayangan. Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023 diuraikan sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.18**  
**Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	31 - DES – 2024	31 - DES - 2023	NAIK/ (TURUN)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	PT Bank Jambi	67.500.000.000,00	67.500.000.000,00	0,00
2	PDAM Tirta Khayangan	22.278.781.855,84	23.187.592.942,26	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>89.778.781.855,84</b>	<b>90.687.592.942,26</b>	<b>0,00</b>

Turunnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 karena adanya Laporan Rugi PDAM tirta Khayangan berdasarkan Laporan Keuangan PDAM Tirta Khayangan TA 2024 (Audited).

Penilaian Investasi Jangka Panjang dinilai dengan metode ekuitas. Turunnya Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 berdasarkan atas Laporan Laba Rugi PDAM Tirta Khayangan TA 2024 Audited yang diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Eko Prasetyo tanggal 29 April 2025.

Rincian Penyertaan Modal pada Bank Jambi dari Tahun 2010 sampai Tahun 2024 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.19**  
**Rincian Penyertaan Modal pada Bank Jambi**

*(dalam rupiah)*

NO	TAHUN	INVESTASI PERMANEN	JUMLAH	DIVIDEN
1	2	3	4	5
1	2010	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00
2	2011	7.500.000.000,00	15.000.000.000,00	10.712.398,16
3	2012	10.000.000.000,00	25.000.000.000,00	2.207.696.864,64
4	2013	12.500.000.000,00	37.500.000.000,00	5.863.221.786,06
5	2014	12.500.000.000,00	50.000.000.000,00	8.441.466.802,00
6	2015	7.500.000.000,00	57.500.000.000,00	8.314.202.410,18
7	2016	5.000.000.000,00	62.500.000.000,00	7.294.713.593,15
8	2017	5.000.000.000,00	67.500.000.000,00	9.282.767.163,99
9	2018	0,00	67.500.000.000,00	11.104.526.944,30
10	2019	0,00	67.500.000.000,00	11.199.424.467,44
11	2020	0,00	67.500.000.000,00	10.802.550.806,41
12	2021	0,00	67.500.000.000,00	10.843.619.433,19
13	2022	0,00	67.500.000.000,00	11.845.053.382,84
14	2023	0,00	67.500.000.000,00	11.966.693.301,67
15	2024	0,00	67.500.000.000,00	12.056.605.045,00
<b>JUMLAH</b>		<b>67.500.000.000,00</b>		

**5.3.1.3**

**Aset Tetap**

**31 Des 2024 (Rp)**

**1.444.767.450.140,70**

**31 Des 2023 (Rp)**

**1.450.801.810.008,37**

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.444.767.450.140,70 turun sebesar Rp6.034.359.867,67 atau sebesar 0,42% jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.450.801.810.008,37. Rekapitulasi saldo per jenis Aset Tetap diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.20**  
**Rekapitulasi Saldo Aset Tetap**

*(dalam rupiah)*

NO	ASET TETAP	31 - DES - 2024	31 - DES - 2023	NAIK/ (TURUN)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Tanah	206.513.299.134,93	208.078.148.153,93	(1.564.849.019,00)
2	Peralatan dan Mesin	547.510.905.994,13	515.560.906.027,13	31.949.999.967,00
3	Gedung dan Bangunan	630.688.251.014,00	605.283.831.060,69	25.404.419.953,31
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.308.030.174.536,07	1.267.805.480.492,20	40.224.694.043,87
5	Aset tetap Lainnya	47.802.667.588,85	39.629.836.168,36	8.172.831.420,49
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	28.529.990.139,50	26.918.829.950,65	1.611.160.188,85
7	Akumulasi Penyusutan	(1.324.307.838.266,78)	(1.212.475.221.844,59)	(111.832.616.422,19)
<b>JUMLAH</b>		<b>1.444.767.450.140,70</b>	<b>1.450.801.810.008,37</b>	<b>(6.034.359.867,67)</b>

Tabel di atas menunjukkan Pemkot Sungai Penuh memiliki Aset Tetap sebesar Rp2.769.075.288.407,48 tidak termasuk Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp(1.324.307.838.266,78) atau nilai tercatat seluruhnya sebesar Rp1.444.767.450.140,70.

### 5.3.1.3.1

Aset Tetap Tanah	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
	<b>206.513.299.134,93</b>	<b>208.078.148.153,93</b>

Nilai Tanah milik Pemkot Sungai Penuh per 31 Desember 2024 sebesar Rp206.513.299.134,93 turun sebesar Rp1.564.849.019,00 atau sebesar 0,75% jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp208.078.148.153,93 dengan rekapitulasi sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut.

**Tabel 5.3.21**  
**Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Tanah**

<b>Aset Tetap Tanah</b>			
1.	Saldo per 31 Desember 2023	<b>Rp</b>	<b>208.078.148.153,93</b>
2.	Mutasi Tambah:		
	a. Belanja Modal	<u>Rp 364.792.231,20</u>	
		Rp	364.792.231,20
3.	Mutasi Kurang:		
	a. Reklasifikasi	<u>Rp 1.929.641.250,20</u>	
		Rp	1.929.641.250,20
4.	Saldo per 31 Desember 2024	<b>Rp</b>	<b>206.513.299.134,93</b>

Mutasi tambah Aset Tetap Tanah sebesar Rp364.792.231,20 merupakan Belanja Modal sebesar Rp364.792.231,20 untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan di 2 SKPD.

Mutasi kurang Aset Tetap Tanah sebesar Rp1.929.641.250,20 terdiri dari :

1. Reklasifikasi kurang Aset Tetap Tanah sebesar Rp1.929.641.250,20, terdiri dari :
  - a. Reklasifikasi ke Aset Properti Investasi sebesar Rp368.960.000,00 pada Dinas Pendidikan
  - b. Reklasifikasi ke Aset Properti Investasi sebesar Rp1.330.809.000,00 pada Badan Keuangan Daerah.
  - c. Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa sebesar Rp179.934.306,20 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari :
    - 1) Reklasifikasi ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak sebesar Rp1.325.000,00.
    - 2) Reklasifikasi ke Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor sebesar Rp2.094.500,00.
    - 3) Reklasifikasi ke Beban Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp1.940.000,00.
    - 4) Reklasifikasi ke Beban Lembur sebesar Rp3.390.000,00.
    - 5) Reklasifikasi ke Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp6.500.000,00.
    - 6) Reklasifikasi ke Beban Perjalanan Dinas Biasa sebesar Rp109.094.000,00.
    - 7) Reklasifikasi ke Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota sebesar Rp5.980.000,00.
    - 8) Reklasifikasi ke Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Survei sebesar Rp49.610.806,20.
  - d. Reklasifikasi ke Beban Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp49.937.944,00 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Tanah per SKPD disajikan pada **Lampiran 32.**

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024, antara lain:

1. Tanah yang sudah bersertifikat sebanyak 510 ruas senilai Rp89.631.885.718,48. Rincian tanah yang sudah bersertifikat diuraikan dalam **Lampiran 33.a**.
2. Tanah yang belum bersertifikat sebanyak 273 ruas tanah senilai Rp105.572.638.960,45. dan rincian tanah yang belum bersertifikat pada **Lampiran 33.b**.
3. Aset Tanah Pemkot Sungai Penuh terdapat tanah yang masih dalam proses sertifikasi sebanyak 31 ruas dengan nilai perolehan sebesar Rp13.268.501.400,00. Rincian tanah yang masih dalam proses sertifikat diuraikan pada **Lampiran 33.c**.

### 5.3.1.3.2

#### Aset Tetap Peralatan dan Mesin

	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
	<b>547.510.905.994,13</b>	<b>515.560.906.027,13</b>

Aset Tetap Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik dan seluruh inventaris kantor serta peralatan lainnya yang memiliki masa manfaatnya lebih dari 12 bulan, memenuhi kapitalisasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin serta dalam kondisi siap pakai.

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp547.510.905.994,13 naik sebesar Rp31.949.999.967,00 atau sebesar 6,20% jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp515.560.906.027,13 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.22**  
**Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

(dalam rupiah)

<b>Aset Tetap Peralatan dan Mesin</b>			
1.	Saldo per 31 Desember 2023	<b>Rp</b>	<b>515.560.906.027,13</b>
2.	Mutasi Tambah:		
	a. Belanja Modal	Rp	29.164.581.067,00
	b. Hibah	Rp	942.516.000,00
	c. Hutang	Rp	1.864.672.359,00
	d. Kapitalisasi	Rp	554.070.000,00
	e. Reklasifikasi	Rp	1.050.571.004,00
		<b>Rp</b>	<b>33.576.410.430,00</b>
3.	Mutasi Kurang:		
	a. Reklasifikasi	Rp	920.518.563,00
	b. <i>Ekstrakomptabel</i>	Rp	705.891.900,00
		<b>Rp</b>	<b>1.626.410.463,00</b>
4.	Saldo per 31 Desember 2024	<b>Rp</b>	<b>547.510.905.994,13</b>

Mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp33.576.410.430,00 terdiri dari :

1. Belanja Modal sebesar Rp29.164.581.067,00 untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan pada 40 SKPD.
2. Hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari BNPB Pusat kepada BPBD Kota Sungai Penuh sebesar Rp942.516.000,00, berdasarkan BAST Penyaluran Bantuan Logistik dan Peralatan Nomor BAST-006/DSP-103/LOGPAL-SUNGAIPENUH/D-III/BNPB/01/2024.
3. Belanja Peralatan dan Mesin dari hutang sebesar Rp1.864.672.359,00 pada RSUD Mayjen H.A Thalib.
4. Kapitalisasi sebesar Rp554.070.000,00 yang terdiri dari :
  - a. Kapitalisasi dari Beban Barang sebesar Rp7.500.000,00 pada Dinas Pendidikan.

- b. Kapitalisasi dari Beban Barang sebesar Rp38.940.000,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
  - c. Kapitalisasi dari Beban Barang sebesar Rp96.860.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
  - d. Kapitalisasi dari Beban Barang sebesar Rp9.500.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.
  - e. Kapitalisasi dari Beban Barang sebesar Rp6.400.000,00 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
  - f. Kapitalisasi dari Beban Barang sebesar Rp348.770.000,00 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.
  - g. Kapitalisasi dari Beban Barang sebesar Rp9.600.000,00 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
  - h. Kapitalisasi dari Beban Transfer Keuangan Khusus sebesar Rp10.000.000,00 pada Kantor Camat Sungai Penuh.
  - i. Kapitalisasi dari Beban Transfer Keuangan Khusus sebesar Rp10.000.000,00 pada Kantor Camat Kumun Debai.
  - j. Kapitalisasi dari Beban Transfer Keuangan Khusus sebesar Rp10.000.000,00 pada Kantor Camat Tanah Kampung.
  - k. Kapitalisasi dari Beban Transfer Keuangan Khusus sebesar Rp6.500.000,00 pada Kantor Camat Pondok Tinggi.
5. Reklasifikasi masuk sebesar Rp1.050.571.004,00 yang terdiri dari :
- a. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp140.201.000,00 dan dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 605.864.000,00 pada Dinas Pendidikan.
  - b. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp139.506.004,00.
  - c. Reklasifikasi dari Aset Lainnya pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp165.000.000,00.
- Mutasi kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.626.410.463,00 terdiri dari :
- 1. Reklasifikasi keluar sebesar Rp920.518.563,00, yang terdiri dari:
    - a. Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp322.500.000,00 pada Badan Keuangan Daerah.
    - b. Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp36.500.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.
    - c. Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp13.786.100,00 pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.
    - d. Reklasifikasi ke Beban Bahan Kimia sebesar Rp54.221.000,00 pada RSUD Bakri.
    - e. Reklasifikasi ke Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp51.042.533,00, ke Beban Barang sebesar Rp398.128.930,00 dan ke Beban Jasa sebesar Rp41.790.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
    - f. Reklasifikasi ke Beban Barang sebesar Rp2.400.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
    - g. Reklasifikasi ke Beban Barang sebesar Rp150.000 pada Dinas Sosial.
  - 2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi sebesar Rp705.891.900,00 pada 19 SKPD yang diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.23**  
**Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak Memenuhi Nilai Kapitalisasi**  
*(dalam rupiah)*

NO	SKPD	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan	527.201.000,00
2	Dinas Kesehatan	31.520.000,00
3	Puskesmas Hamparan Rawang	8.550.000,00
4	Puskesmas Koto Lolo	1.400.000,00
5	Instalasi Farmasi	18.200.000,00
6	RSUD Bakri	14.960.000,00
7	RSUD Mayjen H. A. Thalib	1.762.500,00
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.700.000,00
9	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	12.015.000,00
10	Dinas Sosial	950.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.000.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	950.000,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.250.000,00
14	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	2.150.000,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	21.856.000,00
16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	740.000,00
17	Sekretariat DPRD	30.012.400,00
18	Kelurahan Dusun Baru	8.160.000,00
19	Inspektorat Daerah	4.515.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>705.891.900,00</b>

Rincian mutasi tambah dan kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin diuraikan pada **Lampiran 34**.

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dengan rincian Pinjam pakai Kendaraan bermotor roda empat yang dimanfaatkan oleh pihak lain sebanyak 15 unit berdasarkan berita acara pinjam pakai dengan rincian pada **Lampiran 35**.

Dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Kota Sungai Penuh menggunakan Aset Peralatan dan Mesin dari Pemerintah Pusat yang tidak tercatat dalam Neraca dengan status:

1. Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp449.251.000 dengan berita acara Nomor BA KSG.169/BNPB/I/2012 tanggal 25 Januari 2012 berupa kendaraan roda empat dan roda dua.
2. Pinjam pakai pada Dinas Sosial 3 unit kendaraan roda 4 dan 2 kendaraan roda dua.
3. Pinjam pakai pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM pertanian berupa 7 unit kendaraan roda dua.
4. Pinjam pakai HPRC 6 bands dan 3 unit peralatan mesin dengan Berita Acara Nomor /PP.06.02/06/2012.

Pada Tanggal 9 Mei 2025 Pemerintah Kota Sungai Penuh telah melakukan pendataan Barang Milik Daerah berdasarkan Hasil Monitoring Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah (Kendaraan Dinas) Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2025 Nomor 700.1.2.1/06/LHM/Inspektorat/2025 dengan hasil sebagai berikut:

1. Terdapat kendaraan dinas dengan nomor polisi yang sama pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan nomor polisi BH 2462 RZ dengan kendaraan roda dua pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2. Terdapat Kendaraan roda dua dengan kondisi rusak berat pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan dan belum menjalankan proses dengan ketentuan yang berlaku.
3. Terdapat 6 (enam) Unit Kendaraan dinas yang belum ditarik maupun dikembalikan oleh pihak lain.

Dengan saran perbaikan yaitu memproses kendaraan dengan nomor polisi yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyurati SKPD untuk mengajukan usulan penghapusan atas kendaraan yang rusak berat, dan memberitahukan kepada SKPD untuk membuat surat penarikan kendaraan dinas yang masih digunakan oleh pihak lain.

### 5.3.1.3.3

Aset Tetap Gedung dan Bangunan	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
	<b>630.688.251.014,00</b>	<b>605.283.831.060,69</b>

Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kota Sungai Penuh mencakup seluruh Gedung dan Bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Gedung dan Bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya.

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kota Sungai Penuh per 31 Desember 2024 sebesar Rp 630.688.251.014,00, naik sebesar Rp25.404.419.953,31 atau sebesar 4,20% jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp605.283.831.060,69 dengan rincian pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.24**  
**Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

Aset Tetap Gedung dan Bangunan			
1.	Saldo per 31 Desember 2023		Rp 605.283.831.060,69
2.	Mutasi Tambah:		
	a. Belanja Modal	Rp 34.969.287.253,47	
	b. Reklasifikasi	Rp 6.048.185.868,10	
	c. Koreksi	Rp 0,04	
			Rp 41.017.473.121,61
3.	Mutasi Kurang:		
	a. Reklasifikasi	Rp 15.366.565.168,30	
	b. Penghapusan	Rp 204.988.000,00	
	c. Ekstrakomtable	Rp 41.500.000,00	
			Rp 15.613.053.168,30
4.	Saldo per 31 Desember 2024		<b>Rp 630.688.251.014,00</b>

Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp41.017.473.121,61 terdiri dari :

1. Belanja Modal sebesar Rp34.969.287.253,47 untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan pada 6 SKPD.
2. Reklasifikasi masuk sebesar Rp6.048.185.868,10 yang terdiri dari:
  - a. Reklasifikasi dari Aset KDP sebesar Rp103.137.922,00 pada Dinas Pendidikan.
  - b. Reklasifikasi dari Aset KDP sebesar Rp5.908.547.946,10 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  - c. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp36.500.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.

3. Koreksi nilai Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas PUPR sebesar Rp0,04.

Mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp15.613.053.168,30 terdiri dari :

1. Reklasifikasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp15.366.565.168,30 yang terdiri dari :
  - a. Reklasifikasi ke Aset Tetap KDP sebesar Rp45.210.300,00 dan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp605.864.000,00 pada Dinas Pendidikan.
  - b. Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp139.506.004,00, ke aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp456.166.874,62, ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp569.759.753,13 dan ke Aset Tetap KDP sebesar Rp3.745.093.982,60 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  - c. Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp854.554.491,63 dan ke Aset Tetap KDP sebesar Rp144.910.499,97 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
  - d. Reklasifikasi ke Aset Tetap KDP sebesar Rp51.794.820,00 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
  - e. Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp1.057.282.906,22 pada Kantor Camat Pesisir Bukit.
  - f. Reklasifikasi ke Aset Properti Investasi sebesar Rp3.628.770.000,00 pada Badan Keuangan Daerah.
  - g. Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp2.113.035.455,5.
  - h. Reklasifikasi ke Beban Jasa sebesar Rp777.483.696,60.
  - i. Reklasifikasi ke Beban Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp1.177.132.384,03.
2. Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp204.988.000,00 yang terdiri dari :
  - a. Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp81.088.000,00 pada Dinas Pendidikan, berdasarkan Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 100.3.3.3/Kep.171/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2024.
  - b. Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp123.900.000,00 pada Puskesmas Kumun Debai, berdasarkan Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 100.3.2.3/Kep.208/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2024.
3. Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi sebesar Rp41.500.000,00 terdiri dari:
  - a. Ekstrakomptable Aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp5.000.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
  - b. Ekstrakomptable Aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp36.500.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.

Terdapat Aset Tetap Gedung dan Bangunan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Kota Sungai Penuh menggunakan Aset Tetap Gedung dan Bangunan milik Provinsi Jambi berupa Sekretariat PMI Kota Sungai Penuh dan Dharma Wanita Persatuan Kota Sungai Penuh.

Rincian mutasi tambah dan kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 36**.

**5.3.1.3.4**

<b>Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>31 Des 2024 (Rp)</b> <b>1.308.030.174.536,07</b>	<b>31 Des 2023 (Rp)</b> <b>1.267.805.480.492,20</b>
---	--	--

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup Jalan, Irigasi dan Jaringan yang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh serta dalam kondisi siap pakai. Jalan, Irigasi dan Jaringan selain digunakan untuk kegiatan Pemerintah Kota Sungai Penuh juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Jalan, Irigasi dan Jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang ada di atasnya.

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.308.030.174.536,07, naik sebesar Rp40.224.694.043,87 atau sebesar 3,17% jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.267.805.480.492,20 dengan rekapitulasi diuraikan dalam tabel berikut.

**Tabel 5.3.25**  
**Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan**

<b>Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan</b>				
1.	Saldo per 31 Desember 2023		<b>Rp</b>	<b>1.267.805.480.492,20</b>
2.	Mutasi Tambah:			
	a. Belanja Modal	Rp 54.674.175.128,72		
	b. Reklasifikasi	Rp 2.056.301.007,98		
	c. Koreksi	<u>Rp 0,07</u>		
			<b>Rp</b>	<b>56.730.476.136,77</b>
3.	Mutasi Kurang:			
	a. Reklasifikasi	<u>Rp 16.505.782.092,90</u>		
			<b>Rp</b>	<b>16.505.782.092,90</b>
4.	Saldo per 31 Desember 2024		<b>Rp</b>	<b>1.308.030.174.536,07</b>

Mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp56.730.476.136,77 terdiri dari :

1. Belanja modal sebesar Rp54.674.175.128,72 untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan pada 5 SKPD.
2. Reklasifikasi masuk sebesar Rp2.056.301.007,98 yang terdiri dari :
  - a. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp456.166.874,62, dan dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp745.579.641,73 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  - b. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp854.554.491,63 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
3. Koreksi nilai Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUPR sebesar Rp0,07.

Mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp16.505.782.092,90, merupakan Reklasifikasi keluar yang terdiri dari:

1. Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp309.663.553,09 dan ke Aset Tetap KDP sebesar Rp3.175.575.859,38 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan sebesar Rp10.901.655.937,04.

3. Reklasifikasi ke Beban Jasa sebesar Rp2.118.886.743,39.

Rincian mutasi tambah dan kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan diuraikan pada **Lampiran 37**.

### 5.3.1.3.5

Aset Tetap Lainnya	<u>31 Des 2024 (Rp)</u>	<u>31 Des 2023 (Rp)</u>
	<b>47.802.667.588,85</b>	<b>39.629.836.168,36</b>

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah Kota Sungai Penuh dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp47.802.667.588,85, naik sebesar Rp8.172.831.420,49 atau sebesar 20,62% jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp39.629.836.168,36 yang diuraikan dalam tabel berikut.

**Tabel 5.3.26**  
**Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Nilai
1	Bahan Perpustakaan	11.458.268.480,20
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	14.436.612.164,49
3	Tanaman	127.735.000,00
4	Barang Koleksi Non Budaya	0,00
5	Aset Tetap Dalam Renovasi	21.780.051.944,16
<b>Total</b>		<b>47.802.667.588,85</b>

Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Lainnya diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.27**  
**Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Lainnya**

<b>Aset Tetap Lainnya</b>		
1.	Saldo per 31 Desember 2023	<b>Rp 39.629.836.168,36</b>
2.	Mutasi Tambah:	
a.	Belanja Modal	Rp 10.355.974.556,07
b.	Reklasifikasi	<u>Rp 1.129.896.821,22</u>
		Rp 11.485.871.377,29
3.	Mutasi Kurang:	
a.	Reklasifikasi	Rp 2.549.846.356,73
b.	Koreksi	Rp 0,07
c.	<i>Ekstrakomptabel</i>	<u>Rp 763.193.600,00</u>
		Rp 3.313.039.956,80
4.	Saldo per 31 Desember 2024	<b>Rp 47.802.667.588,85</b>

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp11.485.871.377,29 terdiri dari :

1. Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 sebesar Rp10.355.974.556,07 untuk penyelenggaraan pemerintahan pada 2 SKPD.
2. Reklasifikasi masuk sebesar Rp1.129.896.821,22 terdiri dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp569.759.753,13, dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp309.663.553,09, dan dari Aset Tetap KDP sebesar Rp250.473.515,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.313.039.956,80 terdiri dari :

1. Reklasifikasi keluar sebesar Rp2.549.846.356,73 terdiri dari :
  - a. Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp140.201.000,00 pada Dinas Pendidikan.
  - b. Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp745.579.641,73, dan ke Aset Tetap KDP sebesar Rp710.734.110,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  - c. Koreksi ke Beban Jasa sebesar Rp953.331.605,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Koreksi sebesar Rp0,07 yang merupakan koreksi nilai Saldo Awal Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan.
3. Aset yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi sebesar Rp763.193.600,00 pada Dinas Pendidikan.

Rincian mutasi tambah dan kurang Aset Tetap Lainnya sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 38**.

#### 5.3.1.3.6

Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
	<b>28.529.990.139,50</b>	<b>26.918.829.950,65</b>

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. KDP mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Nilai KDP per 31 Desember 2024 sebesar Rp28.529.990.139,50 naik sebesar Rp1.611.160.188,85 atau sebesar 5,99% jika dibandingkan dengan nilai KDP per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.918.829.950,65. Rekapitulasi mutasi KDP diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.28**  
**Rekapitulasi Mutasi Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan			
1.	Saldo per 31 Desember 2023		<b>Rp 26.918.829.950,65</b>
2.	Mutasi Tambah:		
a.	Reklasifikasi	Rp 7.873.319.571,95	
			Rp 7.873.319.571,95
3.	Mutasi Kurang:		
a.	Reklasifikasi	Rp 6.262.159.383,10	
			Rp 6.262.159.383,10
4.	Saldo per 31 Desember 2024		<b>Rp 28.529.990.139,50</b>

Mutasi tambah Aset Tetap KDP per 31 Desember 2024 sebesar Rp7.873.319.571,95, merupakan reklasifikasi masuk yang terdiri dari :

1. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp45.210.300,00 pada Dinas Pendidikan.
2. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.745.093.982,60, dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp3.175.575.859,38, dan dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp710.734.110,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp144.910.499,97 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
4. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp51.794.820,00 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.



Mutasi kurang Aset Tetap KDP per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.262.159.383,10, merupakan reklasifikasi keluar yang terdiri dari:

1. Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp103.137.922,00 pada Dinas Pendidikan.
2. Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.908.547.946,10 dan ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp250.473.515,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dari nilai Aset Tetap KDP sebesar Rp28.529.990.139,50 terdapat pekerjaan pembangunan Kantor Camat Sungai Penuh TA 2024 sebesar Rp1.292.189.943,19, dimana mutu beton hasil pekerjaan struktur tidak memenuhi syarat yang direncanakan. Pada Tahun 2025 penyedia jasa berkomitmen akan melakukan perbaikan atas permasalahan pekerjaan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menanggung segala biaya perbaikannya.

Rincian Aset Tetap KDP berdasarkan jenis belanja modal dan Rincian Aset Tetap KDP berdasarkan jenis Belanja Modal dan Kemajuan Fisik dirincikan pada **Lampiran 39.a.b.**

5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	<u>31 Des 2024 (Rp)</u>	<u>31 Des 2023 (Rp)</u>
		(1.324.307.838.266,78)	(1.212.475.221.844,59)

Akumulasi Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap dan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 sebesar Rp(1.324.307.838.266,78) turun sebesar Rp111.832.616.422,19 atau sebesar 9,22% jika dibandingkan nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp(1.212.475.221.844,59). Nilai Akumulasi Penyusutan berasal dari Aset Tetap dan Aset yang Dihapuskan. Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.29**  
**Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan**

*(dalam rupiah)*

NO	NAMA ASET	31 - DES - 2024	31 - DES - 2023
<b>I</b>	<b>ASET TETAP</b>		
1	Peralatan dan Mesin	(453.521.601.827,09)	(423.938.781.629,48)
2	Gedung dan Bangunan	(184.409.482.145,55)	(171.448.756.916,36)
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(684.892.502.662,14)	(617.087.683.298,75)
4	Aset Tetap Lainnya	(1.484.251.632,00)	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>(1.324.307.838.266,78)</b>	<b>(1.212.475.221.844,59)</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per SKPD disajikan pada **Lampiran 40.**

5.3.1.4	Aset Lainnya	<u>31 Des 2024 (Rp)</u>	<u>31 Des 2023 (Rp)</u>
		93.871.562.983,11	112.175.879.671,22

Nilai Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp93.871.562.983,11 turun sebesar Rp18.304.316.688,11 atau sebesar 16,32% jika dibandingkan dengan nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp112.175.879.671,22. Rekapitulasi Aset Lainnya Tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.30**  
**Rekapitulasi Aset Lainnya**

*(dalam rupiah)*

NO	ASET LAINNYA	31 - DES - 2024	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	31 - DES - 2023
1	2	3 = 6-5+4	4	5	6
1	Tagihan Jangka Panjang	202.331.023,00	0,00	0,00	202.331.023,00
2	Aset Tak Berwujud	23.848.609.984,66	0,00	0,00	23.848.609.984,66
3	Amortisasi	(22.970.675.180,26)	0,00	616.810.411,49	(22.353.864.768,77)
4	Aset Lain – lain	88.899.427.155,71	10.165.840.961,22	4.851.568.237,84	83.585.154.432,33
5	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	3.891.870.000,00	3.891.870.000,00	26.893.649.000,00	26.893.649.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>93.871.562.983,11</b>	<b>14.057.710.961,22</b>	<b>32.362.027.649,33</b>	<b>112.175.879.671,22</b>

#### 5.3.1.4.1

#### Tagihan Jangka Panjang

**31 Des 2024 (Rp)**

**202.331.023,00**

**31 Des 2023 (Rp)**

**202.331.023,00**

Tagihan Jangka Panjang merupakan tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah. Nilai Tagihan jangka panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp202.331.023,00 sedangkan nilai Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp202.331.023,00. Tagihan Jangka Panjang TA 2024 merupakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pegawai bendahara dan bukan bendahara yang diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp202.331.023,00 berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Sungai Penuh Nomor 951/Kep.175/2011 tanggal 26 Mei 2011 merupakan tuntutan perbendaharaan kepada Sdr. ADP, mantan Bendahara Pengeluaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh Tahun 2010 karena penyelesaian kasus telah sampai ke aparat penegak hukum. Terkait kasus penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagaimana surat Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh kepada Wali Kota Sungai Penuh Nomor B-907/N.5.13/Dek.1/07/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang Penyelidikan Dugaan Penyimpangan dalam Pengelolaan Dana APBD pada Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh TA 2010 dan surat Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh kepada Kepala DPPKAD Kota Sungai Penuh Nomor B-915/N.5.13/Fd.1/07/2013 tanggal 16 Juli 2013 tentang Permintaan Data dalam rangka penyidikan berupa Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara. Berdasarkan Dokumen penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan menunjukkan bahwa Sdr. ADP telah menyerahkan sertifikat tanah Nomor 06.02.03.03.1.05870 beserta surat kuasa menjual tanah tersebut. Berdasarkan dokumen jual beli tanah tanggal 6 Agustus 2008 diketahui harga tanah tersebut sebesar Rp84.000.000,00 sehingga tidak mencukupi untuk penyelesaian tuntutan Perbendaharaan tersebut. Sdr. ADP telah menyerahkan sertifikat rumah namun tidak disertai surat kuasa menjual.

Sejak tahun 2012 Sdr. ADP menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Kejaksaan Negeri Sungai Penuh. Sdr. ADP dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil. Sdr. ADP telah diberhentikan status kepegawaiannya dari Pegawai Negeri Sipil Pemkot Sungai Penuh berdasarkan Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 800/05/BKD Tahun 2013 tanggal 25 Februari 2013.

Pada bulan Mei 2019, Badan Keuangan Daerah beserta Inspektorat Kota Sungai Penuh melaksanakan koordinasi ke BPN Muara Jambi dengan hasil sebagai berikut:

1. Sertifikat an. SR dinyatakan asli dikeluarkan oleh BPN Muaro Jambi.
2. BPN Muaro Jambi tidak dapat menentukan titik lokasi tanah tersebut disebabkan pembuatan sertifikat tanah tersebut belum terdata di data baru yang menggunakan GPRS dan BPN Kab. Muaro Jambi tidak dapat memberi informasi lengkap tentang tanah tersebut apabila tanpa pemilik tanah yang tercantum disertifikat tanah tersebut.
3. Dikarenakan tanah tersebut bukan piutang daerah melainkan temuan pemeriksaan dan tanah tersebut bukan hak milik melainkan jaminan tuntutan ganti rugi maka dalam proses lelangnya harus melampirkan surat pernyataan pernyataan pelepasan hak yang memiliki tanah.
4. Tanah tersebut bukan aset Pemda maka yang berhak menilai tanah tersebut adalah Kantor Jasa Penilaian Publik, Bukan KPKNL.
5. KPKNL Jambi menyarankan tanah tersebut untuk tidak dilelang dikarenakan memakan waktu yang cukup lama dalam melakukan proses lelang.

<b>5.3.1.4.2</b>	<b>Aset Tak Berwujud</b>	<u><b>31 Des 2024 (Rp)</b></u>	<u><b>31 Des 2023 (Rp)</b></u>
		<b>23.848.609.984,66</b>	<b>23.848.609.984,66</b>

Aset Tak Berwujud merupakan Aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp23.848.609.984,66 sama jika dibandingkan dengan nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp23.848.609.984,66.

Rincian Aset Tak Berwujud per SKPD diuraikan pada **Lampiran 41**.

<b>5.3.1.4.3</b>	<b>Amortisasi</b>	<u><b>31 Des 2024 (Rp)</b></u>	<u><b>31 Des 2023 (Rp)</b></u>
		<b>(22.970.675.180,26)</b>	<b>(22.353.864.768,77)</b>

Akun Amortisasi merupakan penyusutan terhadap aset tak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Nilai Amortisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp(22.970.675.180,26) turun sebesar sebesar Rp616.810.411,49 atau sebesar 2,76% jika dibandingkan dengan nilai Amortisasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp(22.353.864.768,77). Rincian Amortisasi per SKPD TA 2024 diuraikan pada **Lampiran 42**.

<b>5.3.1.4.4</b>	<b>Aset Lain-lain</b>	<u><b>31 Des 2024 (Rp)</b></u>	<u><b>31 Des 2023 (Rp)</b></u>
		<b>88.899.427.155,71</b>	<b>83.585.154.432,33</b>

Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp88.899.427.155,71 naik sebesar Rp5.314.272.723,38 atau sebesar 6,36% jika dibandingkan dengan nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp83.585.154.432,33.

Rekapitulasi Aset Lain-lain diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.31**  
**Rekapitulasi Aset lain-lain**

*(dalam rupiah)*

NO	ASET LAIN – LAIN	JUMLAH
1	Aset Tetap Pinjam Pakai Ke Pihak Lain	11.114.265.221,32
2	Aset Tetap Rusak Berat/Hilang/Tidak Diketahui Keberadaannya	57.948.522.999,37
3	Aset yang diserahkan secara Operasional ke PDAM Tirta Khayangan	34.145.029.529,27
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(14.308.390.594,25)
	<b>JUMLAH</b>	<b>88.899.427.155,71</b>



Rincian mutasi tambah dan kurang Aset Lain-Lain disajikan pada **Lampiran 43.a**, Rincian Aset Tetap pinjam Pakai per SKPD TA 2024 disajikan pada **Lampiran 43.b**, Rincian Aset Tetap Rusak Berat per SKPD disajikan pada **Lampiran 43.c** dan Aset yang diserahkan secara Operasional ke PDAM Tirta Khayangan disajikan pada **Lampiran 43.d**.

Nilai Penyusutan Akumulasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp(14.308.390.594,25) sedangkan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp(18.404.274.960,41) disajikan **Lampiran 44**.

Rekapitulasi mutasi tambah dan mutasi kurang Aset Lain-lain diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.32**  
**Rekapitulasi Mutasi Aset Lain-lain**

(dalam rupiah)

<b>Aset Lain-lain</b>		
1.	Saldo per 31 Desember 2023	<b>83.585.154.432,33</b>
2.	Mutasi Tambah:	
	a. Reklasifikasi	1.393.569.006,22
	b. Koreksi	8.786.058.055,00
		10.179.627.061,22
3.	Mutasi Kurang:	
	a. Reklasifikasi	165.000.000,00
	b. Koreksi	4.700.354.337,84
		4.865.354.337,84
4.	Saldo per 31 Desember 2024	<b>88.899.427.155,71</b>

Mutasi tambah Aset Lain-lain sebesar Rp10.179.627.061,22 merupakan reklasifikasi tambah yang terdiri dari:

1. Reklasifikasi Gedung dan Bangunan pada Kantor Camat Pesisir Bukit sebesar Rp1.057.282.906,22 karena Rusak Berat.
2. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Tanaman Pangan Holtikultura, dan Perkebunan sebesar Rp13.786.100,00 karena Rusak Berat.
3. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp322.500.000,00 karena pinjam pakai.
4. Koreksi Kurang Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp8.786.058.055,00 pada Dinas PUPR dan Bagian Umum Setda.

Mutasi kurang Aset Lain-lain sebesar Rp4.865.354.337,84 yang terdiri dari:

1. Mutasi kurang Aset Lain-lain sebesar Rp165.000.000,00 merupakan reklasifikasi kurang ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Badan Keuangan Daerah karena merupakan pinjam pakai.
2. Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Rp4.690.173.688,84 pada 22 SKPD.
3. Koreksi Sisa Piutang PDAM Tirta Khayangan sebesar Rp10.180.649,00 berdasarkan BASTO Nomor 000.2.3.2/881.a/12/2023/BAKEUDA-6/ / 346A/XII/PERUMDA-

TKH/2023 tentang Perubahan Ketiga atas Surat Perjanjian Penggunaan Barang Milik Daerah untuk Dioperasikan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khayangan nomor 900/01/BKD-V/2018.

5.3.1.4.5	<b>Dana Transfer <i>Treasury</i></b>	<b>31 Des 2024 (Rp)</b>	<b>31 Des 2023 (Rp)</b>
	<b><i>Deposit Facility</i> (TDF)</b>	<b>3.891.870.000,00</b>	<b>26.893.649.000,00</b>

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di Bendahara Umum Negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.

Dana Transfer TDF per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.891.870.000,00 turun sebesar Rp23.001.779.000,00 atau sebesar 85,53% jika dibandingkan dengan nilai Dana TDF per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.893.649.000,00.

5.3.1.5	<b>Properti investasi</b>	<b>31 Des 2024 (Rp)</b>	<b>31 Des 2023 (Rp)</b>
		<b>3.597.313.312,00</b>	<b>0,00</b>

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.597.313.312,00 atau naik sebesar Rp3.597.313.312,00 sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan Properti Investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

Pada LKPD TA 2024 Pemkot Sungai Penuh baru pertama kali mengklasifikasikan Aset Tetap ke dalam Properti Investasi. Nilai Properti Investasi dinilai sebesar nilai perolehan dari aset tetap, untuk tanah dan gedung yang disewakan telah menggunakan harga pasar yang dinilai oleh KPKNL. Rekapitulasi Properti Investasi diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.33**  
**Rekapitulasi Properti Investasi**  
*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	NILAI
1	2	3
I	<b>Properti Investasi (1+2)</b>	<b>5.328.539.000,00</b>
1	Properti Investasi Tanah	1.699.769.000,00
2	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	3.628.770.000,00
II	<b>Akumulasi Penyusutan Properti Investasi</b>	<b>(1.731.225.688,00)</b>
1	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(1.731.225.688,00)
<b>JUMLAH (I + II)</b>		<b>3.597.313.312,00</b>

Dari tabel di atas jumlah Properti Investasi sebelum akumulasi penyusutan sebesar Rp5.328.539.000,00 diuraikan pada **Lampiran 45**.

<b>5.3.1.5.1</b>	<b>Properti Investasi Tanah</b>	<u><b>31 Des 2024 (Rp)</b></u>	<u><b>31 Des 2023 (Rp)</b></u>
		<b>1.699.769.000,00</b>	<b>0,00</b>

Properti Investasi Tanah per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.699.769.000,00 atau naik sebesar Rp1.699.769.000,00 sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan Investasi Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

<b>5.3.1.5.2</b>	<b>Properti Investasi Gedung dan Bangunan</b>	<u><b>31 Des 2024 (Rp)</b></u>	<u><b>31 Des 2023 (Rp)</b></u>
		<b>3.628.770.000,00</b>	<b>0,00</b>

Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.628.770.000,00 atau naik sebesar Rp3.628.770.000,00 sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan Properti Investasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

<b>5.3.1.5.3</b>	<b>Akumulasi Penyusutan Properti Investasi</b>	<u><b>31 Des 2024 (Rp)</b></u>	<u><b>31 Des 2023 (Rp)</b></u>
		<b>(1.731.225.688,00)</b>	<b>0,00</b>

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp(1.731.225.688,00) atau naik sebesar Rp1.731.225.688,00 sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

<b>5.3.2</b>	<b>Kewajiban</b>	<u><b>31 Des 2024 (Rp)</b></u>	<u><b>31 Des 2023 (Rp)</b></u>
		<b>20.461.818.005,17</b>	<b>14.226.789.558,53</b>

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemkot Sungai Penuh. Kewajiban terbagi atas Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Kewajiban Jangka Pendek, diantaranya meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Utang Pajak, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang Jatuh Tempo, Pendapatan Diterima Dimuka dan Utang Jangka Pendek lainnya, sedangkan Kewajiban Jangka Panjang merupakan Kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca, yang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebagai nilai nominal.

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.461.818.005,17 naik sebesar Rp6.235.028.446,64 atau sebesar 48,83% jika dibandingkan dengan nilai Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.226.789.558,53. Kewajiban Pemerintah Kota Sungai Penuh dibagi menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.34**  
**Rekapitulasi Kewajiban**

(dalam rupiah)

NO	KEWAJIBAN	31 - DES - 2024	31 - DES - 2023	NAIK/(TURUN)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
1	Kewajiban Jangka Pendek	20.461.818.005,17	14.226.789.558,53	6.235.028.446,64
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>20.461.818.005,17</b>	<b>14.226.789.558,53</b>	<b>6.235.028.446,65</b>

## 5.3.2.1

**Kewajiban Jangka Pendek****31 Des 2024 (Rp)**  
**20.461.818.005,17****31 Des 2023 (Rp)**  
**14.226.789.558,53**

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok Kewajiban diharapkan atau diperkirakan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Nilai kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.461.818.005,17 naik sebesar Rp6.235.028.446,64 sebesar 43,83% jika dibandingkan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.226.789.558,53. Rincian nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.35**  
**Rekapitulasi Kewajiban Jangka Pendek**

*(dalam rupiah)*

NO	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	31 - DES - 2024	MUTASI TAMBAH	MUTASI KELUAR	31 - DES - 2023	NAIK/(TURUN)
1	2	3 = (6 - 5 + 4)	4	5	6	7 = 3 - 6
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	59.454.431,21	12.972.072,00	58.530.142,68	105.012.501,89	(45.558.070,68)
2	Utang Belanja	16.160.466.078,71	14.459.784.813,92	8.148.148.752,47	9.848.830.017,26	6.311.636.061,45
3	Pendapatan diterima dimuka	27.981.440,00	27.981.440,00	20.983.000,00	20.983.000,00	6.998.440,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	4.213.916.055,25	10.201.168,47	48.249.152,60	4.251.964.039,38	(38.047.984,13)
<b>JUMLAH</b>		<b>20.461.818.005,17</b>	<b>14.510.939.494,39</b>	<b>8.275.911.047,74</b>	<b>14.226.789.558,53</b>	<b>6.235.028.446,64</b>

## 5.3.2.1.1

**Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)****31 Des 2024 (Rp)**  
**59.454.431,21****31 Des 2023 (Rp)**  
**105.012.501,89**

Nilai Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 sebesar Rp59.454.431,21 turun sebesar Rp45.558.070,68 atau sebesar 43,38% jika dibandingkan dengan Utang Perhitungan Fihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp105.012.501,89. Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.36**  
**Rekapitulasi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**

*(dalam rupiah)*

NO	SKPD	31 - DES - 2024	MUTASI TAMBAH	MUTASI KELUAR	31 - DES - 2023
1	2	3 = 6 - 5 + 4	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	46.482.359,21	0,00	58.530.142,68	105.012.501,89
2	RSUD Mayjen H.A Thalib	12.972.072,00	12.972.072,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>59.454.431,21</b>	<b>12.972.072,00</b>	<b>58.530.142,68</b>	<b>105.012.501,89</b>

Rincian Utang Perhitungan Fihak Ketiga Dinas Pendidikan disajikan pada **Lampiran 46**.

## 5.3.2.1.2

**Utang Belanja****31 Des 2024 (Rp)**  
**16.160.466.078,71****31 Des 2023 (Rp)**  
**9.848.830.017,26**

Utang Belanja merupakan beban yang telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar. Utang Beban per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.160.466.078,71 naik sebesar Rp6.311.636.061,45 atau sebesar 64,09% sedangkan Utang Beban per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.848.830.017,26.

Utang Belanja per 31 Desember 2024 sebesar Rp16.160.466.078,71 terdiri dari:

1. Utang BPJS atas tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran peserta PBPU dan BP kelas III yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah jumlah utang per 31 Desember 2024 sebesar Rp746.255.900,00.
2. Utang Kekurangan 4 % Iuran Wajib Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2021 sebesar Rp552.022.923,00
3. Utang belanja kepada pihak ketiga di RSUD Mayjen H.A Thalib yang diakui berdasarkan faktur yang belum dibayarkan sampai akhir Tahun 2024 sebesar Rp14.843.715.895,71. Rincian Utang belanja kepada pihak ke tiga pada RSUD Mayjen H.A Thalib disajikan pada **Lampiran 47**.
4. Koreksi atas Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp18.471.360,00 karena belum dibayar kepada pihak ketiga yang pelaksanaannya telah selesai berdasarkan BAST Nomor 400.7.5.6/263/BASTP-DAK/DINKES/2023.

5.3.2.1.3	<b>Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<u><b>31 Des 2024 (Rp)</b></u>	<u><b>31 Des 2023 (Rp)</b></u>
		<b>27.981.440,00</b>	<b>20.983.000,00</b>

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp27.981.440,00 naik sebesar Rp6.998.440,00 atau sebesar 33,35% jika dibandingkan Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp20.983.000,00.

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp27.981.440,00 sebagaimana disajikan pada **Lampiran 48**.

5.3.2.1.4	<b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<u><b>31 Des 2024 (Rp)</b></u>	<u><b>31 Des 2023 (Rp)</b></u>
		<b>4.213.916.055,25</b>	<b>4.251.964.039,38</b>

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.213.916.055,25 turun sebesar Rp38.047.984,13 atau sebesar 0,89% jika dibandingkan dengan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.251.964.039,38.

Rekapitulasi Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp4.213.916.055,25 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.37**  
**Rekapitulasi Utang Jangka Pendek Lainnya**

(dalam rupiah)

NO	Utang Jangka Pendek Lainnya	31-Des-24	MUTASI TAMBAH	MUTASI KELUAR	31 - DES – 2023
1	2	3 = 6 - 5 + 4	4	5	6
1	Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh	0,00	0,00	18.924,93	18.924,93
2	RSUD Mayjen H. A. Thalib	8.605.111,00	8.605.111,00	5.613.400,20	5.613.400,20
3	Bagian Keuangan	0,00	0,00	590.326,00	590.326,00
4	Kecamatan Pesisir Bukit	0,00	3.000,00	32.876.944,00	32.873.944,00
5	Kecamatan Koto Baru	0,00	0,00	6.169.000,00	6.169.000,00
6	Badan Keuangan Daerah	4.205.310.944,25	0,00	1.387.500,00	4.206.698.444,25
<b>JUMLAH</b>		<b>4.213.916.055,25</b>	<b>8.608.111,00</b>	<b>43.135.795,03</b>	<b>4.251.964.039,38</b>

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp4.213.916.055,25 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.38**  
**Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya**

NO	UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	31 - DES - 2024	KETERANGAN
1	Utang PPTK BLUD Tahun 2022	8.605.111,00	Kelebihan setor sisa uang pada PPTK Tahun 2022
2	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Pemkot Sungai Penuh kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	1.976.592.906,10	Koreksi Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Kepada Pemerintah Desa atas kurang salur Bantuan Keuangan Khusus Pemkot Sungai Penuh Kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa tahun 2022 dan TA 2023 berdasarkan Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 100.3.3.3/Kep,127/2024 tentang Penetapan Kurang Salur Alokasi Dana Desa serta bagi hasil Pajak dan retribusi Daerah TA 2022 dan TA 2023 yang ditetapkan tanggal 17 Mei 2024
3	Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemkot Sungai Penuh kepada Pemerintahan Desa	2.228.718.038,15	Koreksi Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa atas kurang salur dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah tahun 2022 dan TA 2023 berdasarkan Keputusan Walikota Sungai Penuh Nomor 100.3.3.3/Kep,127/2024 tentang Penetapan Kurang Salur Alokasi Dana Desa serta bagi hasil Pajak dan retribusi Daerah TA 2022 dan TA 2023 yang ditetapkan tanggal 17 Mei 2024
<b>JUMLAH</b>		<b>4.213.916.055,25</b>	

Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Pemkot Sungai Penuh kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp1.976.592.906,10 dan Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemkot Sungai Penuh kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp2.228.718.038,15 TA 2022 s.d 2023 telah dianggarkan pada APBD Kota Sungai Penuh TA 2025 sebesar Rp4.205.310.944,25.

**5.3.3 Ekuitas**

	<u>31 Des 2024 (Rp)</u>	<u>31 Des 2023 (Rp)</u>
	<b>1.701.585.790.259,10</b>	<b>1.707.755.489.882,61</b>

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.701.585.790.259,10 turun sebesar Rp6.169.699.623,51 atau sebesar 0,36% jika dibandingkan dengan nilai Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.707.755.489.882,61.

**5.3.4 Kewajiban dan Ekuitas**

	<u>31 Des 2024 (Rp)</u>	<u>31 Des 2023 (Rp)</u>
	<b>1.722.047.608.264,27</b>	<b>1.721.982.279.441,14</b>

Nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.722.047.608.264,27 turun sebesar Rp65.328.823,13 jika dibandingkan dengan nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.721.982.279.441,14. Nilai Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2024 dan per 31 Desember 2023 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.3.39**  
**Kewajiban dan Ekuitas**

*(dalam rupiah)*

NO	KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	31 - DES - 2024	31 - DES - 2023	NAIK/(TURUN)
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	Kewajiban	20.461.818.005,17	14.226.789.558,53	6.235.028.446,64
2	Ekuitas	1.701.585.790.259,10	1.707.755.489.882,61	(6.169.699.623,51)
<b>JUMLAH</b>		<b>1.722.047.608.264,27</b>	<b>1.721.982.279.441,14</b>	<b>65.328.823,13</b>

**BAB V.IV**  
**LAPORAN OPERASIONAL**

**5.4 Penjelasan atas Laporan Operasional (LO)**

<b>5.4.1 Pendapatan – LO</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
	<b>766.963.694.267,30</b>	<b>830.339.614.712,27</b>

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan - LO Tahun 2024 sebesar Rp766.963.694.267,30 turun sebesar Rp63.375.920.444,97 atau sebesar 7,63% jika dibandingkan dengan Pendapatan - LO Tahun 2023 sebesar Rp830.339.614.712,27 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.1**  
**Rekapitulasi Pendapatan – LO**

*(dalam rupiah)*

NO	PENDAPATAN	REALISASI 2024	REALISASI 2023
1.	Pendapatan Asli Daerah – LO	72.420.914.274,78	82.637.460.745,69
2.	Pendapatan Transfer – LO	681.979.927.857,00	712.484.816.961,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	12.562.852.135,52	35.217.337.005,58
<b>JUMLAH</b>		<b>766.963.694.267,30</b>	<b>830.339.614.712,27</b>

Pendapatan - LO Tahun 2024 sebesar Rp766.963.694.267,30 sedangkan Pendapatan LRA TA 2024 sebesar Rp793.723.306.683,28 sehingga terdapat selisih sebesar Rp26.759.612.415,98. Pendapatan – LO Tahun 2024 diuraikan pada tabel.

**Tabel 5.4.2**  
**Pendapatan - LO Tahun 2024**

*(dalam rupiah)*

<b>Pendapatan LRA TA 2024</b>	<b>793.723.306.683,28</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>83.210.437.688,88</b>
Penambahan Piutang Pajak Daerah Tahun 2024	966.889.351,00
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023	20.983.000,00
Penambahan Piutang Retribusi Tahun 2024	6.584.033.653,00
Penambahan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD "	12.095.926.131,36
Penambahan Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024	23.714.875.000,00
Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF) Tahun 2024	3.891.870.000,00
Penambahan Piutang Pendapatan DBH Transfer Antar Daerah TA 2024	23.268.566.515,00
Penambahan Piutang Pendapatan Bantuan Keuangan Antar Daerah Tahun 2024	4.830.000.000,00
Pendapatan Hibah Aset Tetap Peralatan Mesin pada BPBD	942.516.000,00
Pendapatan Hibah Persediaan pada BPBD	444.375.000,00
Pendapatan Hibah Persediaan pada Dinas Kesehatan	5.816.450.882,52
Pendapatan Hibah Persediaan pada Instalasi farmasi	303.276.679,00
Pendapatan Hibah Persediaan pada DPPKB	330.675.477,00
<b>Mutasi Kurang :</b>	<b>109.970.050.104,86</b>
Pembayaran Piutang Pajak Daerah s.d TA 2023	535.115.659,00
Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame Tahun 2024	26.451.440,00
Pembayaran Piutang Retribusi Daerah s.d TA 2023	743.525.500,00

Pendapatan Diterima Dimuka atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2024	1.530.000,00
Pembayaran Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2023	12.056.605.045,86
Koreksi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2024	188.004.000,00
Penyetoran Koreksi Mutasi SKPD Tahun 2023	54.100.692,00
Pembayaran Bagian Lancar Tututan Ganti Rugi Tahun 2023	7.576.000,00
Penyetoran Silpa KONI TA 2023	6.000.000,00
Pembayaran TDF DBH Pajak Tahun 2023	1.866.822.000,00
Pembayaran TDF DBH bukan Pajak/SDA Tahun 2023	25.026.827.000,00
Pembayaran Piutang DBH Transfer Antar Daerah Tahun 2023	19.042.710.768,00
Dana Desa	50.414.782.000,00
<b>Jumlah Selisih</b>	<b>(26.759.612.415,98)</b>
<b>Pendapatan LO TA 2024</b>	<b>766.963.694.267,30</b>

<b>5.4.1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
		<b>72.420.914.274,78</b>	<b>82.637.460.745,69</b>

PAD - LO Tahun 2024 sebesar Rp72.420.914.274,78 turun sebesar Rp10.216.546.470,91 atau sebesar 12,36% jika dibandingkan dengan PAD - LO Tahun 2023 yang diakui sebesar Rp82.637.460.745,69. Rincian PAD - LO diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.3**  
**Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO**

(dalam rupiah)

NO	PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO	REALISASI 2024	REALISASI 2023
1.	Pajak Daerah - LO	9.499.361.376,00	9.539.244.811,00
2.	Retribusi Daerah - LO	44.909.827.780,00	2.988.606.847,50
3.	Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO	12.095.926.131,36	24.023.298.347,53
4.	Lain-Lain PAD Yang Sah - LO	5.915.798.987,42	46.086.310.739,66
<b>JUMLAH</b>		<b>72.420.914.274,78</b>	<b>82.637.460.745,69</b>

<b>5.4.1.1.1</b>	<b>Pajak Daerah – LO</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
		<b>9.499.361.376,00</b>	<b>9.539.244.811,00</b>

Pajak Daerah - LO diakui ketika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah meskipun belum diterima pembayarannya dari wajib pajak.

Pajak Daerah - LO Tahun 2024 sebesar Rp9.499.361.376,00 turun sebesar Rp39.883.435,00 atau sebesar 0,42% jika dibandingkan dengan Pajak Daerah - LO Tahun 2023 sebesar Rp9.539.244.811,00. Rekapitulasi Pajak Daerah - LO diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.4**  
**Rekapitulasi Pajak Daerah – LO**

(dalam rupiah)

NO	PAJAK DAERAH – LO	REALISASI 2024	REALISASI 2023
1.	Pajak Hotel	804.792.360,00	716.179.553,00
2.	Pajak Restoran	1.546.302.884,00	1.261.524.686,00
3.	Pajak Hiburan	23.586.000,00	30.502.800,00
4.	Pajak Reklame	290.353.040,00	359.357.320,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	4.329.942.168,00	4.191.762.997,00

NO	PAJAK DAERAH – LO	REALISASI 2024	REALISASI 2023
6.	Pajak Air Bawah Tanah	16.905.000,00	13.230.000,00
7.	Pajak Parkir	104.000,00	0,00
8.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	289.886.907,00	256.100.555,00
9.	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	924.442.517,00	980.922.615,00
10.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.273.046.500,00	1.729.664.285,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.499.361.376,00</b>	<b>9.539.244.811,00</b>

Pajak Daerah pada LO Tahun 2024 sebesar Rp9.499.361.376,00 sedangkan Pajak Daerah LRA TA 2024 sebesar Rp9.073.056.124,00 sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp426.305.252,00 diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.4.5**  
**Pajak Daerah – LO**

(dalam rupiah)

<b>Pajak Daerah - LRA TA 2024</b>	<b>9.073.056.124,00</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>987.872.351,00</b>
- Penambahan Piutang Pajak Penerangan Jalan TA 2024	359.847.816,00
- Penambahan Piutang Pajak Reklame TA 2024	4.692.000,00
- Penambahan Piutang PBB P2 TA 2024	602.349.535,00
- Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame TA 2023	20.983.000,00
<b>Mutasi Kurang :</b>	<b>561.567.099,00</b>
- Pelunasan Piutang Pajak Penerangan Jalan TA 2023	353.329.832,00
- Pembayaran Piutang PBB P2 TA 2023	181.785.827,00
- Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame Tahun 2024	26.451.440,00
<b>Jumlah Selisih</b>	<b>426.305.252,00</b>
<b>Pajak Dearah - LO TA 2024</b>	<b>9.499.361.376,00</b>

#### 5.4.1.1.2

#### Retribusi Daerah LO

**Tahun 2024 (Rp)**

**44.909.827.780,00**

**Tahun 2023 (Rp)**

**2.988.606.847,50**

Retribusi Daerah - LO diakui ketika diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan meskipun belum diterima pembayarannya dari Wajib Retribusi (WR). Pengakuan pendapatan retribusi yang tidak perlu ditetapkan terlebih dahulu maka pendapatan LO dan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemkot Sungai Penuh.

Retribusi Daerah - LO Tahun 2024 diakui sebesar Rp44.909.827.780,00, naik sebesar Rp41.921.220.932,50 atau sebesar 1.402,70% jika dibandingkan dengan Retribusi Daerah - LO Tahun 2023 sebesar Rp2.988.606.847,50. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LO diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.6**  
**Rekapitulasi Retribusi Daerah – LO**

(dalam rupiah)

NO	RETRIBUSI DAERAH – LO	REALISASI 2024	REALISASI 2023
<b>I</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>43.243.252.032,00</b>	<b>554.173.500,00</b>
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	42.933.928.032,00	128.291.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	214.595.000,00	255.505.000,00

NO	RETRIBUSI DAERAH – LO	REALISASI 2024	REALISASI 2023
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	94.729.000,00	103.635.000,00
4	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	334.000,00
5	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	0,00	66.408.000,00
<b>II</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>1.651.375.768,00</b>	<b>2.381.507.285,00</b>
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	741.022.768,00	1.658.015.785,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	556.725.000,00	380.870.500,00
3	Retribusi Terminal	0,00	121.646.000,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	100.538.000,00	29.700.000,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	8.925.000,00	13.375.000,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	244.165.000,00	177.900.000,00
<b>III</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>15.199.980,00</b>	<b>52.926.062,50</b>
1	Retribusi Izin Perizinan Tertentu	15.199.980,00	52.926.062,50
<b>JUMLAH</b>		<b>44.909.827.780,00</b>	<b>2.988.606.847,50</b>

Retribusi Daerah – LO Tahun 2024 diakui sebesar Rp44.909.827.780,00 sedangkan Retribusi Daerah – LRA TA 2024 sebesar Rp2.626.488.748,00 sehingga terdapat selisih minus sebesar Rp42.283.339.032,00 yang diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.7**  
**Retribusi Daerah – LO Tahun 2024**

<i>(dalam rupiah)</i>	
<b>Retribusi Daerah - LRA TA 2024</b>	<b>2.626.488.748,00</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>43.216.398.532,00</b>
Penambahan Piutang Retribusi Daerah Tahun 2024	424.900.500,00
Reklasifikasi dari Pendapatan dari BLUD	36.632.364.879,00
Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2024	6.159.133.153,00
<b>Mutasi Kurang :</b>	<b>933.059.500,00</b>
Pembayaran Piutang Retribusi Daerah s.d TA 2023	743.525.500,00
Koreksi Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2024	188.004.000,00
Pendapatan Diterima Dimuka atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2024	1.530.000,00
<b>Jumlah Selisih</b>	<b>42.283.339.032,00</b>
<b>Retribusi Daerah - LO TA 2024</b>	<b>44.909.827.780,00</b>

#### 5.4.1.1.3

<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
	<b>12.095.926.131,36</b>	<b>24.023.298.347,53</b>

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - LO yang Dipisahkan Tahun 2024 sebesar Rp12.095.926.131,36, turun sebesar Rp11.927.372.216,17 atau sebesar 49,65% jika dibandingkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - LO yang Dipisahkan Tahun 2023 sebesar Rp24.023.298.347,53. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO merupakan dividen atas kepemilikan saham Pemkot Sungai Penuh pada PT Bank Jambi sebesar 67.500 lembar saham sebesar Rp67.500.000.000,00 atau 6,40% berdasarkan Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa BPD Jambi

yang diterbitkan oleh Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Galenita Santiliana, SH., M.Kn. Nomor 14 tanggal 15 Maret 2025 yang disalurkan ke Kasda tanggal 24 Maret 2025 sebesar Rp12.095.926.131,36.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah – LO Tahun 2024 diakui sebesar Rp12.095.926.131,36 sedangkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah – LRA TA 2024 sebesar Rp12.056.605.045,86 sehingga terdapat selisih sebesar Rp39.321.085,50 yang diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.8**  
**Hasil Pengelolaan**  
**Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO Tahun 2024**

*(dalam rupiah)*

<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA TA 2024</b>	<b>12.056.605.045,86</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>12.095.926.131,36</b>
Penambahan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2024	12.095.926.131,36
<b>Mutasi Kurang :</b>	<b>12.056.605.045,86</b>
Pembayaran Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Tahun 2023	12.056.605.045,86
<b>Jumlah Selisih</b>	<b>39.321.085,50</b>
<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO TA 2024</b>	<b>12.095.926.131,36</b>

#### 5.4.1.1.4

#### Lain-Lain PAD Yang Sah – LO

**Tahun 2024 (Rp)**  
**5.915.798.987,42**

**Tahun 2023 (Rp)**  
**46.086.310.739,66**

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan yang diperoleh dari potensi PAD atas hasil pengelolaan kekayaan yang tidak dipisahkan, bunga jasa giro, pendapatan bunga deposito, dan sebagainya.

Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024 sebesar Rp5.915.798.987,42 turun sebesar Rp40.170.511.752,24 atau sebesar 87,16% jika dibandingkan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp46.086.310.739,66. Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.9**  
**Rekapitulasi Lain-Lain PAD Yang Sah – LO**

*(dalam rupiah)*

NO	LAIN-LAIN PAD YANG SAH – LO	REALISASI 2024	REALISASI 2023
1.	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	3.885.000,00	3.250.000,00
2.	Jasa Giro pada Kas Daerah	876.574.992,80	798.280.572,15
3.	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	295.158,63	0,00
4.	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	103.148,26	0,00
5.	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	12.696.158,00	0,00
6.	Pendapatan Bunga Deposito – LO	1.708.115.750,84	1.941.122.522,00
7.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-	7.576.000,00
8.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	6.112.000,00
9.	Pendapatan Denda Pajak Daerah – LO	68.394.328,00	82.941.347,00
10.	Penerimaan Komisi Potongan/ Bentuk Lain	11.644.340,62	0,00
11.	Pendapatan dari Pengembalian – LO	2.783.844.782,84	4.135.147.875,65

(dalam rupiah)

NO	LAIN-LAIN PAD YANG SAH – LO	REALISASI 2024	REALISASI 2023
12.	Pendapatan dari BLUD – LO	343.097.527,43	38.890.557.200,80
13.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	107.147.800,00	64.320.700,00
14.	Remunerasi TDF	-	157.002.522,06
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.915.798.987,42</b>	<b>46.086.310.739,66</b>

Lain-lain PAD yang Sah - LO Tahun 2024 sebesar Rp5.915.798.987,42, sedangkan Lain-lain PAD yang Sah - LRA Tahun 2024 sebesar Rp42.615.840.558,42, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp36.700.041.571,00 diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.4.10**  
**Lain-lain PAD yang Sah – LO**

(dalam rupiah)

<b>Lain-lain PAD yang Sah LRA TA 2024</b>	<b>42.615.840.558,42</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>0,00</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>	<b>36.700.041.571,00</b>
Reklasifikasi Pendapatan BLUD ke Pendapatan Retribusi	36.632.364.879,00
Penyetoran Koreksi Mutasi SKPD Tahun 2023	54.100.692,00
Pembayaran Bagian Lancar Tutuntan Ganti Rugi Tahun 2023	7.576.000,00
Penyetoran Silpa KONI TA 2023	6.000.000,00
<b>Jumlah Selisih</b>	<b>(36.700.041.571,00)</b>
<b>Lain-lain PAD yang Sah - LO TA 2024</b>	<b>5.915.798.987,42</b>

#### 5.4.1.2

#### Pendapatan Transfer – LO

**Tahun 2024 (Rp)**

**681.979.927.857,00**

**Tahun 2023 (Rp)**

**712.484.816.961,00**

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Kasda Pemkot Sungai Penuh.

Pendapatan Transfer – LO Tahun 2024 sebesar Rp681.979.927.857,00 turun sebesar Rp30.504.889.104,00 atau sebesar 4,28% jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer – LO Tahun 2023 sebesar Rp712.484.816.961,00. Rincian Pendapatan Transfer - LO diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.11**  
**Rekapitulasi Pendapatan Transfer - LO**

(dalam rupiah)

NO	PENDAPATAN TRANSFER	REALISASI 2024	REALISASI 2023
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	622.174.761.122,00	650.177.465.516,00
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	59.805.166.735,00	62.307.351.445,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>681.979.927.857,00</b>	<b>712.484.816.961,00</b>

#### 5.4.1.2.1

#### Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

**Tahun 2024 (Rp)**

**622.174.761.122,00**

**Tahun 2023 (Rp)**

**650.177.465.516,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO adalah pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan dikelola oleh Kasda Pemkot Sungai Penuh.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2024 sebesar Rp622.174.761.122,00 turun sebesar Rp28.002.704.394,00 atau sebesar 4,31% jika dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2023 sebesar Rp650.177.465.516,00 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.12**  
**Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO**

*(dalam rupiah)*

NO	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – LO	REALISASI 2024	REALISASI 2023
1	Dana Perimbangan - LO	615.089.500.122,00	590.382.148.728,00
2	Dana Insentif Daerah – LO	0,00	10.400.931.000,00
3	Dana Desa – LO	0,00	49.394.385.788,00
4	Insentif Fiskal – LO	7.085.261.000,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>622.174.761.122,00</b>	<b>650.177.465.516,00</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2024 sebesar Rp622.174.761.122,00 terdiri dari Dana Perimbangan, DID, Dana Desa dan Insentif Fiskal.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO Tahun 2024 sebesar Rp622.174.761.122,00, sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA Tahun 2024 sebesar Rp671.876.447.122,00 sehingga terdapat selisih sebesar minus Rp49.701.686.000,00 diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.4.13**  
**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO**

*(dalam rupiah)*

<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LRA TA 2024</b>	<b>671.876.447.122,00</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>27.606.745.000,00</b>
Penambahan Piutang Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2024	23.714.875.000,00
Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF) Tahun 2024	3.891.870.000,00
<b>Mutasi Kurang :</b>	<b>77.308.431.000,00</b>
Pembayaran TDF DBH Pajak Tahun 2023	1.866.822.000,00
Pembayaran TDF DBH bukan Pajak/SDA Tahun 2023	25.026.827.000,00
Dana Desa	50.414.782.000,00
<b>Jumlah Selisih</b>	<b>(49.701.686.000,00)</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO TA 2024</b>	<b>622.174.761.122,00</b>

**5.4.1.2.1.1**

**Dana Perimbangan – LO**

**Tahun 2024 (Rp)**  
**615.089.500.122,00**

**Tahun 2023 (Rp)**  
**590.382.148.728,00**

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan Kepada Daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan meliputi DBH Pajak, DBH Bukan Pajak/SDA, DAU, DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Dana Perimbangan – LO Tahun 2024 sebesar Rp615.089.500.122,00 naik sebesar Rp24.707.351.394,00 atau sebesar 4,18% jika dibandingkan dengan Dana Perimbangan – LO TA 2023 sebesar Rp590.382.148.728,00 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.14**  
**Rekapitulasi Dana Perimbangan - LO**

*(dalam rupiah)*

NO	DANA PERIMBANGAN	REALISASI 2024	REALISASI 2023
1	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	12.771.326.000,00	12.409.254.700,00
2	Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)	58.150.359.000,00	54.429.375.000,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	456.377.639.574,00	422.504.521.234,00
4	Dana Alokasi khusus (DAK) Fisik	29.632.981.639,00	41.081.776.282,00
5	Dana Alokasi khusus (DAK) Non Fisik	58.157.193.909,00	59.957.221.512,00
<b>JUMLAH</b>		<b>615.089.500.122,00</b>	<b>590.382.148.728,00</b>

Dana Perimbangan - LO Tahun 2024 sebesar Rp615.089.500.122,00 sedangkan Dana Perimbangan – LRA Tahun 2024 sebesar Rp Rp614.376.404.122,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp713.096.000,00 diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.4.15**  
**Dana Perimbangan – LO**

*(dalam rupiah)*

<b>Dana Perimbangan LRA TA 2024</b>	<b>614.376.404.122,00</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>27.606.745.000,00</b>
Penambahan Piutang Pendapatan DBH Pajak Transfer Pemerintah Pusat	2.895.391.000,00
Penambahan Piutang Pendapatan DBH SDA Transfer Pemerintah Pusat TA 2024	24.711.354.000,00
<b>Mutasi Kurang :</b>	<b>26.893.649.000,00</b>
Pembayaran TDF DBH Pajak Tahun 2023	1.866.822.000,00
Pembayaran TDF DBH bukan Pajak/SDA Tahun 2023	25.026.827.000,00
<b>Jumlah Selisih</b>	<b>713.096.000,00</b>
<b>Dana Perimbangan - LO TA 2024</b>	<b>615.089.500.122,00</b>

<b>5.4.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak – LO</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
	<b>12.771.326.000,00</b>	<b>12.409.254.700,00</b>

DBH Pajak – LO Tahun 2024 sebesar Rp12.771.326.000,00 turun sebesar Rp362.071.300,00 atau sebesar 2,92% jika dibandingkan dengan realisasi DBH Pajak – LO TA 2023 sebesar Rp12.409.254.700,00, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.16**  
**Realisasi DBH Pajak – LO**

*(dalam rupiah)*

NO	DBH PAJAK – LO	REALISASI 2024	REALISASI 2023
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	8.025.086.000,00	6.080.153.000,00
2.	DBH PPh Pasal 21	4.530.316.000,00	6.141.076.000,00
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WDOPDN	188.567.000,00	169.817.000,00
4.	Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	7.747.000,00	18.208.700,00
<b>JUMLAH</b>		<b>12.771.326.000,00</b>	<b>12.409.254.700,00</b>

Realisasi DBH Pajak - LO Tahun 2024 sebesar Rp12.771.326.000,00, sedangkan Realisasi DBH Pajak – LRA Tahun 2024 sebesar Rp11.742.757.000,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp1.028.569.000,00 diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.4.17**  
**DBH Pajak – LO**

*(dalam rupiah)*

<b>DBH Pajak LRA TA 2024</b>	<b>11.742.757.000,00</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>2.895.391.000,00</b>
Penambahan Piutang DBH PBB Tahun 2024	2.875.781.000,00
Penambahan Piutang PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 OPDN	19.610.000,00
<b>Mutasi Kurang :</b>	<b>1.866.822.000,00</b>
Pembayaran TDF DBH PBB Tahun 2023	855.827.000,00
Pembayaran TDF DBH PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 OP Tahun 2023	1.010.995.000,00
<b>Jumlah Selisih</b>	<b>1.028.569.000,00</b>
<b>DBH Pajak - LO TA 2024</b>	<b>12.771.326.000,00</b>

5.4.1.2.1.1.2	<b>Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) – LO</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
		<b>58.150.359.000,00</b>	<b>54.429.375.000,00</b>

DBH Bukan Pajak/SDA – LO Tahun 2024 diakui sebesar Rp58.150.359.000,00 nilai tersebut naik sebesar Rp3.720.984.000,00 atau sebesar 6,84% jika dibandingkan dengan DBH Bukan Pajak/SDA – LO TA 2023 sebesar Rp54.429.375.000,00. Rekapitulasi realisasi DBH Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA) diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.18**  
**Realisasi DBH Bukan Pajak/SDA - LO**

(dalam rupiah)

NO	DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK/ SDA – LO	REALISASI 2024	REALISASI 2023
1.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	9.638.279.000,00	876.110.000,00
2.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	26.382.876.000,00	1.313.556.000,00
3.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	16.882.333.000,00	32.067.233.368,00
4.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	716.584.000,00	11.373.748.000,00
5.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.167.186.000,00	4.991.477.632,00
6.	DBH SDA Dana Reboisasi	0,00	3.807.250.000,00
7.	DBH SDA Perkebunan-Sawit	3.363.101.000,00	
<b>JUMLAH</b>		<b>58.150.359.000,00</b>	<b>54.429.375.000,00</b>

DBH Bukan Pajak/SDA – LO Tahun 2024 diakui sebesar Rp58.150.359.000,00, sedangkan DBH Bukan Pajak/SDA – LRA TA 2024 sebesar Rp58.465.832.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp315.473.000,00 diuraikan pada tabel berikut

**Tabel 5.4.19**  
**DBH Bukan Pajak/SDA – LO**

(dalam rupiah)

<b>DBH Bukan Pajak/SDA LRA TA 2024</b>	<b>58.465.832.000,00</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>24.711.354.000,00</b>
DBH SDA Kehutanan- PSDH	155.676.000,00
DBH SDA Minyak Bumi	1.895.817.000,00
DBH SDA Gas Bumi	15.398.205.000,00
DBH SDA Mineral dan Batu Bara- Royalti	7.261.656.000,00
<b>Mutasi Kurang :</b>	<b>25.026.827.000,00</b>
DBH SDA Minyak Bumi	2.838.899.000,00
DBH SDA Gas Bumi	18.669.543.000,00
DBH SDA Mineral dan Batu Bara- Royalti	3.518.385.000,00
<b>Jumlah Selisih</b>	<b>(315.473.000,00)</b>
<b>DBH Bukan Pajak/SDA - LO TA 2024</b>	<b>58.150.359.000,00</b>

5.4.1.2.1.1.3	<b>Dana Alokasi Umum (DAU) – LO</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
		<b>456.377.639.574,00</b>	<b>422.504.521.234,00</b>

DAU – LO Tahun 2024 sebesar Rp456.377.639.574,00 naik sebesar Rp33.873.118.340,00 atau sebesar 8,02% jika dibandingkan dengan DAU – LO Tahun 2023 sebesar Rp422.504.521.234,00.

DAU – LO Tahun 2024 sebesar Rp456.377.639.574,00 dan DAU – LRA Tahun 2024 sebesar Rp456.377.639.574,00 sehingga tidak terdapat selisih sebesar antara Pendapatan DAU LO dan LRA TA 2024.

<b>5.4.1.2.1.1.4</b>	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
		<b>29.632.981.639,00</b>	<b>41.081.776.282,00</b>

DAK Fisik – LO Tahun 2024 sebesar Rp29.632.981.639,00 turun sebesar Rp11.448.794.643,00 atau sebesar 27,87% jika dibandingkan dengan DAK Fisik – LO Tahun 2023 sebesar Rp41.081.776.282,00.

DAK Fisik – LO Tahun 2024 sebesar Rp29.632.981.639,00 dan DAK Fisik – LRA TA 2024 sebesar Rp 29.632.981.639,00 sehingga tidak terdapat selisih antara pendapatan DAK Fisik - LO dan DAK Fisik - LRA pada TA 2024.

<b>5.4.1.2.1.1.5</b>	<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
		<b>58.157.193.909,00</b>	<b>59.957.221.512,00</b>

Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO Tahun 2024 sebesar Rp58.157.193.909,00 turun sebesar Rp1.800.027.603,00 atau sebesar 3,00% jika dibandingkan dengan Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO Tahun 2023 sebesar Rp59.957.221.512,00.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO Tahun 2024 sebesar Rp58.157.193.909,00 sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LRA Tahun 2024 sebesar Rp58.157.193.909,00 sehingga tidak terdapat selisih antara pendapatan DAK Non Fisik- LO dan DAK Non Fisik- LRA pada TA 2024.

<b>5.4.1.2.1.2</b>	<b>Dana Insentif Daerah (DID) – LO</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
		<b>0,00</b>	<b>10.400.931.000,00</b>

DID merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN untuk memberikan penghargaan (*reward*) kepada provinsi, kabupaten, dan kota yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta dalam kesejahteraan masyarakat.

DID - LO Tahun 2024 Nihil sedangkan DID - LO Tahun 2023 sebesar Rp10.400.931.000,00. Nihilnya DID TA 2024 karena realisasi DID TA 2024- LO diakui pada akun rekening Insentif Fiskal.

<b>5.4.1.2.1.3</b>	<b>Dana Desa- LO</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
		<b>0,00</b>	<b>49.394.385.788,00</b>

Dana Desa - LO TA 2024 sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp49.394.385.788,00 atau sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan Dana Desa - LO TA 2023 sebesar Rp49.394.385.788,00.

Dana Desa - LO TA 2024 sebesar Rp0,00 sedangkan Dana Desa-LRA TA 2024 sebesar Rp50.414.782.000,00 sehingga terdapat selisih Dana Desa-LO dan Dana Desa LRA TA 2024 sebesar Rp50.414.782.000,00.

Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan untuk 65 Desa lingkup Pemkot Sungai Penuh yang disalurkan dari Pemerintah Pusat langsung ke rekening desa.

5.4.1.2.1.4	Insentif Fiskal-LO	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
		<b>7.085.261.000,00</b>	<b>0,00</b>

Insentif Fiskal- LO merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN untuk memberikan penghargaan (reward) kepada provinsi, kabupaten, dan kota yang mempunyai kinerja baik dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta dalam kesejahteraan masyarakat.

Insentif Fiskal- LO Tahun 2024 sebesar Rp7.085.261.000,00 sedangkan Tahun 2023 nihil.

Insentif Fiskal- LO Tahun 2024 sebesar Rp7.085.261.000,00 Insentif Fiskal – LRA Tahun 2024 sebesar Rp7.085.261.000,00 sehingga tidak terdapat selisih antara Insentif Fiskal - LO dan LRA pada TA 2024.

5.4.1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
		<b>59.805.166.735,00</b>	<b>62.307.351.445,00</b>

Pendapatan Transfer antar Daerah - LO Tahun 2024 diakui sebesar Rp59.805.166.735,00 turun sebesar Rp2.502.184.710,00 atau sebesar 4,02% jika dibandingkan Pendapatan Transfer antar Daerah - LO Tahun 2023 sebesar Rp62.307.351.445,00 yang diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.20**  
**Pendapatan Transfer antar Daerah – LO**

*(dalam rupiah)*

NO	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH – LO	REALISASI 2024	REALISASI 2023
1.	Pendapatan Bagi Hasil – LO	52.505.166.735,00	55.007.351.445,00
2.	Bantuan Keuangan – LO	7.300.000.000,00	7.300.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>59.805.166.735,00</b>	<b>62.307.351.445,00</b>

Pendapatan Transfer antar Daerah - LO Tahun 2024 sebesar Rp59.805.166.735,00 sedangkan Pendapatan Transfer antar Daerah – LRA TA 2024 sebesar Rp50.749.310.988,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp9.055.855.747,00 yang merupakan sisa Pendapatan Transfer antar Daerah – LO Tahun 2024 yang sudah ditransfer Pemerintah Provinsi Jambi ke Kasda Pemkot Sungai Penuh pada Tahun 2024.

5.4.1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil – LO	<b>TA 2024 (Rp)</b>	<b>TA 2023 (Rp)</b>
		<b>52.505.166.735,00</b>	<b>55.007.351.445,00</b>

Pendapatan Bagi Hasil – LO Tahun 2024 diakui sebesar Rp52.505.166.735,00 turun sebesar Rp2.502.184.710,00 atau sebesar 4,55% jika dibandingkan dengan Pendapatan Bagi Hasil – LO Tahun 2023 sebesar Rp55.007.351.445,00. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.21**  
**Realisasi Pendapatan Bagi Hasil - LO**

*(dalam rupiah)*

NO	PENDAPATAN BAGI HASIL – LO	REALISASI 2024	REALISASI 2023
1	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Kendaraan Bermotor	9.381.324.879,00	8.939.027.786,00
2	DBH Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.265.708.099,00	6.806.995.530,00
3	DBH Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	24.862.390.005,00	27.775.644.055,00
4	DBH Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan Air Permukaan	31.482.410,00	47.273.588,00

NO	PENDAPATAN BAGI HASIL – LO	REALISASI 2024	REALISASI 2023
5	DBH Pajak Rokok	11.964.261.342,00	11.438.410.486,00
<b>JUMLAH</b>		<b>52.505.166.735,00</b>	<b>55.007.351.445,00</b>

Pendapatan Bagi Hasil - LO Tahun 2024 sebesar Rp52.505.166.735,00 sedangkan Pendapatan Bagi Hasil – LRA TA 2024 sebesar Rp48.279.310.988,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp4.225.855.747,00 yang diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.22**  
**Pendapatan Bagi Hasil - LO**

*(dalam rupiah)*

<b>Pendapatan Bagi Hasil LRA TA 2024</b>	<b>48.279.310.988,00</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>23.268.566.515,00</b>
Bagi Hasil PKB Tahun 2024	5.188.976.797,00
Bagi Hasil BBNKB Tahun 2024	3.404.322.223,00
Bagi Hasil PBBKB Tahun 2024	12.738.268.829,00
Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun 2024	11.606.645,00
Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2024	1.925.392.021,00
<b>Mutasi Kurang :</b>	<b>19.042.710.768,00</b>
Bagi Hasil PKB Tahun 2023	2.253.452.332,00
Bagi Hasil BBNKB Tahun 2023	2.382.104.988,00
Bagi Hasil PBBKB Tahun 2023	12.449.107.952,00
Bagi Hasil Pajak Air Permukaan Tahun 2023	18.164.608,00
Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2023	1.939.880.888,00
<b>Jumlah Selisih</b>	<b>4.225.855.747,00</b>
<b>Pendapatan Bagi Hasil - LO TA 2024</b>	<b>52.505.166.735,00</b>

#### 5.4.1.2.2.2

#### Bantuan Keuangan

TA 2024 (Rp)

**7.300.000.000,00**

TA 2023 (Rp)

**7.300.000.000,00**

Bantuan Keuangan Tahun 2024 diakui sebesar Rp7.300.000.000,00 sama jika dibandingkan dengan Bantuan Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp7.300.000.000,00.

Bantuan Keuangan Tahun 2024 sebesar Rp7.300.000.000,00 merupakan bantuan keuangan terhadap Desa/ Kelurahan sebesar Rp100.000.000,00 per Desa/ Kelurahan untuk 65 Desa, 8 Kecamatan dan 4 Kelurahan terdiri dari Kelurahan Sungai Penuh, Kelurahan Pondok Tinggi, Kelurahan Dusun Baru dan Kelurahan Pasar Sungai Penuh dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp7.300.000.000,00.

Bantuan Keuangan Tahun 2024 - LO Tahun 2024 sebesar Rp7.300.000.000,00 sedangkan Bantuan Keuangan Tahun 2024 – LRA TA 2024 sebesar Rp2.470.000.000,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp4.830.000.000,00 yang diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.23**  
**Bantuan Keuangan - LO**

*(dalam rupiah)*

<b>Bantuan Keuangan LRA TA 2024</b>	<b>2.470.000.000,00</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>4.830.000.000,00</b>
Tunda Salur Bantuan Keuangan antar Daerah	4.830.000.000,00
<b>Mutasi Kurang :</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Selisih</b>	<b>4.830.000.000,00</b>
<b>Bantuan Keuangan - LO TA 2024</b>	<b>7.300.000.000,00</b>

## 5.4.1.3

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	12.562.852.135,52	35.217.337.005,58

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO Tahun 2024 sebesar Rp12.562.852.135,52 merupakan Pendapatan Hibah yang diterima Pemkot Sungai Penuh.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah turun sebesar Rp22.654.484.870,06 atau sebesar 64,33% jika dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Tahun 2023 sebesar Rp35.217.337.005,58, diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.24**  
**Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO**

*(dalam rupiah)*

NO	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	REALISASI 2024	REALISASI 2023
1	Pendapatan Hibah	7.837.294.038,52	30.659.114.900,81
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	4.725.558.097,00	4.558.222.104,77
<b>JUMLAH</b>		<b>12.562.852.135,52</b>	<b>35.217.337.005,58</b>

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO sebesar Rp12.562.852.135,52 sedangkan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LRA TA 2024 sebesar Rp4.725.558.097,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp7.837.294.038,52 yang merupakan Pendapatan Hibah Pemkot Sungai Penuh Tahun 2024.

## 5.4.1.3.1

Pendapatan Hibah – LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	7.837.294.038,52	30.566.139.969,00

Pendapatan hibah– LO Tahun 2024 sebesar Rp7.837.294.038,52 turun sebesar Rp22.728.845.930,48 atau sebesar 74,36% jika dibandingkan dengan Pendapatan Hibah-LO Tahun 2023 sebesar Rp30.566.139.969,00. Rekapitulasi Pendapatan Hibah-LO diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.25**  
**Rekapitulasi Pendapatan Hibah - LO**

*(dalam rupiah)*

NO	HIBAH	JUMLAH
1	Hibah Pemerintah Pusat	1.386.891.000,00
2	Hibah Pemerintah Daerah Lainnya	6.450.403.038,52
<b>JUMLAH</b>		<b>7.837.294.038,52</b>

Pendapatan Hibah – LO Tahun 2024 sebesar Rp7.837.294.038,52 sedangkan Pendapatan Hibah – LRA Tahun 2024 nihil sehingga terdapat selisih Rp7.837.294.038,52 yang diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.26**  
**Pendapatan Hibah - LO**

*(dalam rupiah)*

<b>Pendapatan Hibah LRA TA 2024</b>	<b>0,00</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>7.837.294.038,52</b>
Pendapatan Hibah Aset Tetap Peralatan Mesin pada BPBD	942.516.000,00
Pendapatan Hibah Persediaan pada BPBD	444.375.000,00
Pendapatan Hibah Persediaan pada Dinas Kesehatan	5.816.450.882,52
Pendapatan Hibah Persediaan pada Instalasi farmasi	303.276.679,00
Pendapatan Hibah Persediaan pada DPPKB	330.675.477,00
<b>Mutasi Kurang :</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Selisih</b>	<b>7.837.294.038,52</b>
<b>Pendapatan Hibah - LO TA 2024</b>	<b>7.837.294.038,52</b>

Dari tabel diatas Pendapatan Hibah – LO diatas terdapat Pendapatan Hibah Persediaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp5.816.450.882,52 yang diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.27**  
**Pendapatan Hibah Persediaan**

(dalam rupiah)

No	Pendapatan Hibah Persediaan	Sumber Hibah	Nilai
1	Bantuan Obat Banjir	Kementrian Kesehatan	218.600.071,92
2	Obat Program	Provinsi Jambi	5.577.853.077,60
3	Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)	Kementrian Kesehatan	3.446.625,00
4	Program Makanan Tambahan	Kementrian Kesehatan	16.551.108,00
<b>Total</b>			<b>5.816.450.882,52</b>

#### 5.4.1.3.2

#### Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

**Tahun 2024 (Rp)**  
**4.725.558.097,00**

**Tahun 2023 (Rp)**  
**4.651.197.036,58**

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2024 sebesar Rp4.725.558.097,00 atau naik sebesar Rp74.361.060,42 atau sebesar 1,60% jika dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp4.651.197.036,58.

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi sebesar Rp4.725.558.097,00 merupakan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Pendapatan tersebut diakui atas klaim Jaminan Kapitasi dari BPJS yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala BPJS.

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan – LO Tahun 2024 sebesar Rp4.725.558.097,00 sedangkan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan – LRA Tahun 2024 sebesar Rp4.725.558.097,00 sehingga tidak terdapat selisih.

#### 5.4.2

#### Beban – LO

**Tahun 2024 (Rp)**  
**774.125.754.231,76**

**Tahun 2023 (Rp)**  
**775.357.917.493,00**

Beban - LO merupakan beban yang benar-benar sudah dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Beban terdiri dari Beban Operasi, Beban Transfer, Defisit Non Operasional, dan Beban Luar Biasa. Beban Pemkot Sungai Penuh Tahun 2024.

Beban – LO Tahun 2024 sebesar Rp774.125.754.231,76 turun sebesar Rp1.232.163.261,24 atau sebesar 0,16% jika dibandingkan Beban Tahun 2023 sebesar Rp775.357.917.493,00.

Rincian Beban – LO Tahun 2024 dan Tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.28**  
**Rekapitulasi Beban – LO Tahun 2024 dan Tahun 2023**

(dalam rupiah)

NO	BEBAN – LO	REALISASI 2024	REALISASI 2023
1	Beban Operasi	605.184.269.378,89	555.781.728.769,24
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	115.702.939.569,88	113.291.207.575,51
3	Beban Transfer	53.238.545.283,00	106.284.981.148,25
<b>JUMLAH</b>		<b>774.125.754.231,76</b>	<b>775.357.917.493,00</b>

#### 5.4.2.1 Beban Operasi - LO

**Tahun 2024 (Rp)**  
**605.184.269.378,89**

**Tahun 2023 (Rp)**  
**555.781.728.769,24**

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi Tahun 2024 sebesar Rp605.184.269.378,89 turun sebesar Rp49.402.540.609,65 atau sebesar 8,89% jika dibandingkan Beban Operasi Tahun 2023 sebesar Rp555.781.728.769,24 dengan rincian diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.29**  
**Rekapitulasi Beban Operasi – LO**

(dalam rupiah)

NO	BEBAN OPERASI – LO	REALISASI 2024	REALISASI 2023
1	Beban Pegawai	348.426.234.322,10	309.353.484.368,40
2	Beban Barang	45.123.303.709,21	38.423.512.249,05
3	Beban Jasa	69.764.607.904,92	68.574.591.174,59
4	Beban Pemeliharaan	13.881.328.531,54	11.912.959.197,29
5	Beban Perjalanan Dinas	55.927.816.678,34	62.314.564.110,00
6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/PihakLain/Masyarakat	2.946.190.320,03	2.535.933.816,00
7	Beban barang dan Jasa BOS	10.215.407.332,21	8.368.794.361,39
8	Beban barang dan Jasa BOSP	184.572.000,00	0,00
9	Beban barang dan Jasa BLUD	40.367.407.673,54	38.103.637.933,70
10	Beban Hibah	18.047.400.907,00	15.920.251.558,82
11	Beban Subsidi	100.000.000,00	74.000.000,00
12	Beban Bantuan Sosial	200.000.000,00	200.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>605.184.269.378,89</b>	<b>555.781.728.769,24</b>

#### 5.4.2.1.1 Beban Pegawai – LO

**Tahun 2024 (Rp)**  
**348.426.234.322,10**

**Tahun 2023 (Rp)**  
**309.353.484.368,40**

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai – LO Tahun 2024 sebesar Rp348.426.234.322,10 naik sebesar Rp39.072.749.953,70 atau sebesar 12,63% jika dibandingkan dengan Beban Pegawai – LO Tahun 2023 sebesar Rp309.353.484.368,40.

Beban Pegawai – LO Tahun 2024 sebesar Rp348.426.234.322,10 sedangkan Belanja Pegawai – LRA Tahun 2024 sebesar Rp348.426.234.322,10 sehingga tidak terdapat selisih Beban Pegawai – LO dengan Belanja Pegawai – LRA Tahun 2024.

#### 5.4.2.1.2 Beban Barang

**Tahun 2024 (Rp)**  
**45.123.303.709,21**

**Tahun 2023 (Rp)**  
**38.423.512.249,05**

Beban Barang – LO Tahun 2024 sebesar Rp45.123.303.709,21 naik sebesar Rp6.699.791.460,16 atau sebesar 17,44% jika dibandingkan dengan Beban Barang – LO Tahun 2023 sebesar Rp38.423.512.249,05 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.30**  
**Rekapitulasi Beban Barang**

*(dalam rupiah)*

NO	BEBAN BARANG	REALISASI 2024	REALISASI 2023
1	Beban Barang Pakai Habis	44.180.649.309,21	38.396.915.049,05
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	26.597.200,00
3	Beban Barang Bekas Dipakai	0,00	0,00
4	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	942.654.400,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>45.123.303.709,21</b>	<b>38.423.512.249,05</b>

Beban Barang Tahun 2024 sebesar Rp45.123.303.709,21, sedangkan Belanja Barang sebesar Rp38.573.958.629,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp6.549.345.080,21 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.31**  
**Beban Barang Tahun 2024**

*(dalam rupiah)*

<b>Belanja Barang TA 2024</b>	<b>38.573.958.629,00</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>15.420.881.658,88</b>
Saldo Awal Persediaan SKPD	6.921.121.857,02
Pendapatan Hibah Persediaan pada Dinas Kesehatan	5.816.450.882,52
Pendapatan Hibah Persediaan pada Instalasi farmasi	303.276.679,00
Pendapatan Hibah Persediaan pada BPBD	444.375.000,00
Pendapatan Hibah Persediaan pada DPPKB	330.675.477,00
Reklasifikasi dari Aset Peralatan Mesin pada RS BAKRI	54.221.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah pada Dinas PUPR	5.359.500,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan Mesin pada Dinas PUPR	398.128.930,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan Mesin pada BPBD	2.400.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan Mesin pada Dinas Sosial	150.000,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah pada DISBUDPAR	49.937.944,00
Reklasifikasi dari Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Beban Persediaan pada Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Kota Sungai Penuh	13.582.800,00
Reklasifikasi dari Beban Transfer Bantuan Keuangan pada Kelurahan Dusun Baru	1.280.000,00
Reklasifikasi dari Beban Luar Biasa pada BAKEUDA	287.450.000,00
Koreksi kurang catat Persediaan SKPD TA 2023	64.005.189,34
Reklasifikasi dari Beban PDH pada Dinas Perhubungan	33.250.000,00
Extrakompetable dari Aset Peralatan dan Mesin	653.716.400,00
Extrakompetable dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	41.500.000,00
<b>Mutasi Kurang :</b>	<b>8.871.536.578,67</b>
Reklasifikasi dari Beban Persediaan ke Aset Tetap	517.570.000,00
Reklasifikasi dari Beban Barang ke Beban PDH pada DISHUB	33.250.000,00
Mutasi Kurang ke Beban Hibah pada Dinas DPPKB	87.482.794,00
Koreksi Lebih Catat Persediaan pada SKPD	59.118.107,82
Saldo Akhir Persediaan pada SKPD	6.878.670.592,59
Mutasi Kurang ke beban barang dan jasa BLUD	557.548.001,98
Obat expired	737.897.082,28
<b>Jumlah Selisih</b>	<b>6.549.345.080,21</b>
<b>Beban Barang TA 2024</b>	<b>45.123.303.709,21</b>

Dari tabel di atas terdapat Rincian Beban Persediaan TA 2024 sebesar Rp31.219.708.684,62 diuraikan pada **Lampiran 49**.

#### 5.4.2.1.3

<b>Beban Jasa</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
	<b>69.764.607.904,92</b>	<b>68.574.591.174,59</b>

Beban Jasa – LO Tahun 2024 sebesar Rp69.764.607.904,92 naik sebesar Rp1.190.016.730,33 atau sebesar 1,74% jika dibandingkan dengan Beban Jasa – LO Tahun 2023 sebesar Rp68.574.591.174,59 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.32**  
**Rekapitulasi Beban Jasa**

(dalam rupiah)

NO	BEBAN JASA	REALISASI 2024	REALISASI 2023
1	Beban Jasa Kantor	56.301.477.915,45	57.385.889.742,84
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	6.757.502.547,00	6.728.816.548,22
3	Beban Sewa Tanah	61.200.000,00	10.000.000,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.047.729.416,00	1.723.809.778,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.391.061.187,28	1.454.165.755,53
6	Beban Sewa Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	37.000.000,00
7	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	25.000.000,00
8	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	3.255.227.221,31	624.844.200,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	782.282.629,88	79.881.150,00
10	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	149.376.988,00	505.184.000,00
11	Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	18.750.000,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>69.764.607.904,92</b>	<b>68.574.591.174,59</b>

Beban Jasa Tahun 2024 sebesar Rp69.764.607.904,92, sedangkan Belanja Jasa sebesar Rp65.689.120.369,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp4.075.487.535,92 diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.4.33**  
**Beban Jasa Tahun 2024**

(dalam rupiah)

<b>Belanja Jasa TA 2024</b>	<b>65.689.120.369,00</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>4.437.561.107,50</b>
Pemakaian Pajak Kendaraan Bermotor TA 2023	112.637.013,47
Pemakaian Premi Asuransi TA 2023	9.025.487,70
Pemakaian Sewa Gedung TA 2023	21.657.309,68
Pemakaian Jasa Jaringan/Kawat/Faksimili TA 2023	199.171.657,46
Reklasifikasi ke Beban Jasa dari Aset Tetap	3.950.992.851,19
Reklasifikasi ke Beban Jasa dari Transfer Bantuan Keuangan	142.526.988,00
Kurang Catat Utang BPJS	1.549.800,00
<b>Mutasi Kurang :</b>	<b>362.073.571,58</b>
Pembayaran Utang Premi Asuransi BPJS TA 2023	200.000.000,00
Beban dibayar dimuka atas STNK Kendaraan Bermotor TA 2024	129.607.819,48
Beban dibayar dimuka atas Premi Asuransi TA 2024	8.739.724,70
Beban dibayar dimuka atas Sewa Gedung TA 2024	23.726.027,40
<b>Jumlah Selisih</b>	<b>4.075.487.535,92</b>
<b>Beban Jasa TA 2024</b>	<b>69.764.607.904,92</b>

5.4.2.1.4	Beban Pemeliharaan	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>
		13.881.328.531,54	11.912.959.197,29

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 sebesar Rp13.881.328.531,54 naik sebesar Rp1.968.369.334,25 atau sebesar 16,52% jika dibandingkan dengan realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2023 sebesar Rp11.912.959.197,29.

Beban Pemeliharaan Tahun 2024 sebesar Rp13.881.328.531,54, sedangkan Belanja Jasa Pemeliharaan sebesar Rp11.298.532.747,29, sehingga terdapat selisih sebesar Rp13.014.691.392,54 diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.4.34**  
**Beban Pemeliharaan**

*(dalam rupiah)*

<b>Belanja Pemeliharaan TA 2024</b>	<b>866.637.139,00</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>13.014.691.392,54</b>
- Reklasifikasi Aset Gedung dan Bangunan ke Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.113.032.455,50
- Reklasifikasi Aset JIJ ke Beban Pemeliharaan JIJ	10.901.655.937,04
<b>Mutasi Kurang :</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Selisih</b>	<b>13.014.691.392,54</b>
<b>Beban Pemeliharaan TA 2024</b>	<b>13.881.328.531,54</b>

5.4.2.1.5	Beban Perjalanan Dinas	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>
		55.927.816.678,34	62.314.564.110,00

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 sebesar Rp55.927.816.678,34, turun sebesar Rp6.386.747.431,66 atau sebesar 10,25% jika dibandingkan dengan realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 sebesar Rp62.314.564.110,00.

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2024 sebesar Rp55.927.816.678,34, sedangkan Belanja Perjalanan Dinas Tahun 2024 sebesar Rp55.479.271.185,34, sehingga terdapat selisih sebesar Rp448.545.493,00 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.35**  
**Beban Perjalanan Dinas**

*(dalam rupiah)*

<b>Belanja Perjalanan Dinas TA 2024</b>	<b>55.479.271.185,34</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>448.545.493,00</b>
Reklasifikasi ke Beban Perjalanan Dinas dari Aset Tetap Tanah pada Dinas PUPR	115.074.000,00
Reklasifikasi ke Beban Perjalanan Dinas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas PUPR	51.042.533,00
Reklasifikasi ke Beban Perjalanan Dinas dari Beban Transfer Bantuan Keuangan dari Provinsi Jambi pada Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Kota Sungai Penuh	282.428.960,00
<b>Mutasi Kurang :</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Selisih</b>	<b>448.545.493,00</b>
<b>Beban Perjalanan Dinas TA 2024</b>	<b>55.927.816.678,34</b>

5.4.2.1.6	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/PihakLain/ Masyarakat	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		2.946.190.320,03	2.535.933.816,00

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/PihakLain/Masyarakat Tahun 2024 sebesar Rp2.946.190.320,03 naik sebesar Rp410.256.504,03 atau 16,18% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/PihakLain/Masyarakat Tahun 2023 sebesar Rp2.535.933.816,00.

Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/PihakLain/Masyarakat Tahun 2024 sebesar Rp2.946.190.320,03 sedangkan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2024 sebesar Rp1.769.057.936,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.177.132.384,03 yang diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.36**  
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/PihakLain/ Masyarakat - LO

*(dalam rupiah)*

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/PihakLain/ Masyarakat TA 2024	1.769.057.936,00
<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>1.177.132.384,03</b>
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas PUPR	1.177.132.384,03
<b>Mutasi Kurang :</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Selisih</b>	<b>1.177.132.384,03</b>
<b>Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/PihakLain/ Masyarakat TA 2024</b>	<b>2.946.190.320,03</b>

5.4.2.1.7	Beban Barang dan Jasa BOS	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		10.215.407.332,21	8.368.794.361,39

Beban Barang dan Jasa BOS Tahun 2024 sebesar Rp10.215.407.332,21 naik sebesar Rp1.846.612.970,82 atau sebesar 22,07% jika dibandingkan dengan realisasi Beban Barang dan Jasa BOS Tahun 2023 sebesar Rp8.368.794.361,39.

Beban Barang dan Jasa BOS Tahun 2024 sebesar Rp10.215.407.332,21 sedangkan Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2024 sebesar Rp9.401.800.732,21 sehingga terdapat selisih sebesar Rp813.606.600,00 yang merupakan reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya pada Dinas Pendidikan yang diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.37**  
Beban Barang dan Jasa BOS - LO

*(dalam rupiah)*

Belanja Barang dan Jasa BOS LRA TA 2024	9.401.800.732,21
<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>813.606.600,00</b>
Extrakompable Aset Tetap Lainnya dari Belanja BOS	763.193.600,00
Extrakompable Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja BOS	50.413.000,00
<b>Mutasi Kurang :</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Selisih</b>	<b>813.606.600,00</b>
<b>Beban Barang dan Jasa BOS - LO TA 2024</b>	<b>10.215.407.332,21</b>

5.4.2.1.8	<b>Beban Barang dan Jasa BOSP</b>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>
		<b>184.572.000,00</b>	<b>0,00</b>

Beban Barang dan Jasa BOSP Tahun 2024 sebesar Rp184.572.000,00 sedangkan Barang dan Jasa BOSP Tahun 2023 nihil.

Beban Barang dan Jasa BOS Tahun 2024 sebesar Rp184.572.000,00 sedangkan Belanja Barang dan Jasa BOS Tahun 2024 sebesar Rp184.572.000,00 sehingga tidak terdapat selisih antara beban Barang dan Jasa BOSP LRA dan LO.

5.4.2.1.9	<b>Beban Barang dan Jasa BLUD</b>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>
		<b>40.367.407.673,54</b>	<b>38.103.637.933,70</b>

Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2024 sebesar Rp40.367.407.673,54 naik sebesar Rp2.263.769.739,84 atau sebesar 5,94% jika dibandingkan dengan realisasi Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023 sebesar Rp38.103.637.933,70.

Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2024 sebesar Rp40.367.407.673,54 sedangkan Belanja Barang dan Jasa BLUD Tahun 2024 sebesar Rp36.781.178.567,87 sehingga terdapat selisih sebesar Rp3.586.229.105,67 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.38**  
**Beban Barang dan Jasa BLUD**

*(dalam rupiah)*

<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2024</b>	<b>36.781.178.567,87</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>16.079.321.136,75</b>
Mutasi Tambah dari Utang Barang dan Jasa BLUD	12.046.190.302,90
Koreksi Kurang Catat Persediaan BLUD TAHUN 2023	27.147.250,00
Mutasi Persediaan BLUD dari SKPD	557.548.002,00
Mutasi Tambah dari Saldo Awal Persediaan BLUD	3.446.673.081,85
Extrakompatible Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja BLUD	1.762.500,00
<b>Mutasi Kurang :</b>	<b>12.493.092.031,08</b>
Obat Expired	20.913.300,96
Mutasi Kurang dari Pembayaran Utang dan Barang dan Jasa BLUD	7.960.723.883,71
Mutasi Kurang Persediaan Akhir BLUD	4.511.454.846,41
<b>Jumlah Selisih</b>	<b>3.586.229.105,67</b>
<b>Beban Barang dan Jasa BLUD TA 2024</b>	<b>40.367.407.673,54</b>

5.4.2.1.10	<b>Beban Hibah</b>	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>
		<b>18.047.400.907,00</b>	<b>15.920.251.558,82</b>

Beban Hibah Pemkot Sungai Penuh Tahun 2024 sebesar Rp18.047.400.907,00 naik sebesar Rp2.127.149.348,18 atau sebesar 13,36% jika dibandingkan dengan Beban Hibah Tahun 2023 sebesar Rp15.920.251.558,82.

Beban Hibah Tahun 2024 sebesar Rp18.047.400.907,00 sedangkan Belanja Hibah Tahun 2024 sebesar Rp17.959.918.113,00 sehingga terdapat selisih Rp87.482.794,00 yang diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.39**  
**Beban Hibah Tahun 2024**

*(dalam rupiah)*

<b>Belanja Hibah TA 2024</b>	<b>17.959.918.113,00</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>87.482.794,00</b>
- Hibah Persediaan ALKON pada DPPKB kepada Faskes Swasta	87.482.794,00
<b>Mutasi Kurang :</b>	<b>0,00</b>
<b>Jumlah Selisih</b>	<b>87.482.794,00</b>
<b>Beban Hibah TA 2024</b>	<b>18.047.400.907,00</b>

**5.4.2.1.11**

**Beban Subsidi**

**Tahun 2024 (Rp)**

**Tahun 2023 (Rp)**

**100.000.000,00**

**74.000.000,00**

Beban Subsidi Tahun 2024 sebesar Rp100.000.000,00 naik sebesar Rp26.000.000,00 atau sebesar 35,14% jika dibandingkan dengan realisasi Beban Subsidi Tahun 2023 sebesar Rp74.000.000,00.

Beban Subsidi Tahun 2024 sebesar Rp100.000.000,00 sedangkan Belanja Subsidi Tahun 2024 sebesar Rp100.000.000,00 sehingga tidak terdapat selisih antara Beban Subsidi dan Belanja Subsidi Tahun 2024.

**5.4.2.1.12**

**Beban Bantuan Sosial**

**Tahun 2024 (Rp)**

**Tahun 2023 (Rp)**

**200.000.000,00**

**200.000.000,00**

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 disajikan berdasarkan SP2D yang diterbitkan dan berdasarkan SK Wali Kota sebesar Rp200.000.000,00 atau sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar Rp200.000.000,00.

Beban Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp200.000.000,00 sedangkan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024 sebesar Rp200.000.000,00 sehingga tidak terdapat selisih antara Beban Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2024.

**5.4.2.2**

**Beban Penyusutan dan Amortisasi**

**Tahun 2024 (Rp)**

**Tahun 2023 (Rp)**

**115.702.939.569,87**

**113.291.207.575,51**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp115.702.939.569,87 naik sebesar Rp2.411.731.994,36 atau sebesar 2,13% jika dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 sebesar Rp113.291.207.575,51.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan Tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.40**  
**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan Tahun 2023**

*(dalam rupiah)*

NO	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	REALISASI 2024	REALISASI 2023
1	Beban Penyusutan	114.196.370.597,59	110.455.709.879,92
2	Beban Amortisasi	616.810.411,49	895.641.723,24
3	Beban Penyisihan Piutang	889.758.560,79	1.531.424.829,15
4	Beban Lain-lain	0,00	408.431.143,20
<b>JUMLAH</b>		<b>115.702.939.563,87</b>	<b>113.291.207.575,51</b>



5.4.2.2.1	<b>Beban Penyusutan</b>	<u><b>Tahun 2024 (Rp)</b></u>	<u><b>Tahun 2023 (Rp)</b></u>
		<b>114.196.370.597,59</b>	<b>110.455.709.879,92</b>

Beban Penyusutan Tahun 2024 disajikan berdasarkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset selama Tahun 2024.

Beban Penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp114.196.370.597,59 naik sebesar Rp3.740.660.717,67 atau sebesar 3,39% jika dibandingkan dengan Beban Penyusutan Tahun 2023 sebesar Rp110.455.709.879,92.

Dari Beban Penyusutan Tahun 2024 sebesar Rp114.196.370.597,59 terdapat Beban Penyusutan Properti Investasi sebesar Rp90.719.250,00.

5.4.2.2.2	<b>Beban Amortisasi</b>	<u><b>Tahun 2024 (Rp)</b></u>	<u><b>Tahun 2023 (Rp)</b></u>
		<b>616.810.411,49</b>	<b>895.641.723,24</b>

Beban Amortisasi Tahun 2024 disajikan berdasarkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset selama Tahun 2024.

Beban Amortisasi Tahun 2024 sebesar Rp616.810.411,49 dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud turun sebesar Rp278.831.311,75 atau sebesar 31,13% jika dibandingkan dengan Amortisasi Tahun 2023 sebesar Rp895.641.723,24.

5.4.2.2.3	<b>Beban Penyisihan Piutang</b>	<u><b>Tahun 2024 (Rp)</b></u>	<u><b>Tahun 2023 (Rp)</b></u>
		<b>889.758.560,79</b>	<b>1.531.424.829,15</b>

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 sebesar Rp889.758.560,79, turun sebesar Rp641.666.268,34 atau sebesar 41,90% jika dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp1.531.424.829,15 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.41**  
**Rekapitulasi Beban Penyisihan Piutang**

*(dalam rupiah)*

NO	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG	REALISASI 2024	REALISASI 2023	NAIK/(TURUN)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	366.344.271,78	308.929.767,31	57.414.504,47
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	203.867.450,77	94.352.300,00	109.515.150,77
3	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	60.479.630,66	60.283.025,23	196.605,43
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	882.990.702,77	(882.990.702,77)
5	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	89.617.600,00	(89.617.600,00)
6	Beban Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	37.880,00	(37.880,00)
7	Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Pusat	118.574.375,00	0,00	118.574.375,00
8	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	140.492.832,58	95.213.553,84	45.279.278,74
<b>JUMLAH</b>		<b>889.758.560,79</b>	<b>1.531.424.829,15</b>	<b>(641.666.268,36)</b>

5.4.2.2.4	Beban Lain-lain	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>
		0,00	408.431.143,20

Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.

Beban Lain-lain Tahun 2024 sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp408.431.143,20 atau sebesar 100% jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp408.431.143,20.

5.4.2.3	Beban Transfer	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>
		53.238.545.283,00	106.284.981.148,25

Beban Transfer Tahun 2024 sebesar Rp53.238.545.283,00 turun sebesar Rp53.046.435.865,25 atau sebesar 49,91% jika dibandingkan dengan Bantuan Transfer Tahun 2023 sebesar Rp106.284.981.148,25.

Beban Transfer TA 2024 sebesar Rp53.238.545.283,00 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.42**  
**Rekapitulasi Beban Transfer**

*(dalam rupiah)*

NO	BEBAN TRANSFER	REALISASI 2024
1.	Beban Bagi Hasil	1.089.710.826,00
2.	Beban Bantuan Keuangan	52.148.834.457,00
<b>JUMLAH</b>		<b>53.238.545.283,00</b>

Beban Transfer – LO sebesar Rp53.238.545.283,00 sedangkan Belanja Transfer - LRA sebesar Rp104.129.646.031,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp50.891.100.748,00 yang diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.43**  
**Rekapitulasi Beban Transfer**

*(dalam rupiah)*

<b>Belanja Transfer LRA TA 2024</b>	<b>104.129.646.031,00</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>0,00</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>	<b>50.891.100.748,00</b>
- Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin pada 3 Kecamatan	36.500.000,00
- Reklasifikasi ke Beban Persediaan pada Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Kota Sungai Penuh	13.582.800,00
- Reklasifikasi ke Beban Barang pada Kelurahan dusun Baru	1.280.000,00
- Reklasifikasi ke Beban Jasa pada Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Kota Sungai Penuh	142.526.988,00
- Reklasifikasi ke Beban Perjalanan Dinas pada Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Kota Sungai Penuh	282.428.960,00
Transfer Dana Desa	50.414.782.000,00
<b>Jumlah Selisih</b>	<b>(50.891.100.748,00)</b>
<b>Beban Transfer LO TA 2024</b>	<b>53.238.545.283,00</b>

5.4.2.3.1	Beban Bagi Hasil	<u>Tahun 2024 (Rp)</u>	<u>Tahun 2023 (Rp)</u>
		1.089.710.826,00	105.735.210.827,25

Beban Bagi Hasil Tahun 2024 sebesar Rp1.089.710.826,00 turun sebesar Rp104.645.500.001,25 atau sebesar 98,97% jika dibandingkan dengan Beban Bagi Hasil Tahun 2023 sebesar Rp105.735.210.827,25

Beban Bagi Hasil – LO sebesar Rp1.089.710.826,00 sedangkan Belanja Bagi Hasil – LRA sebesar Rp1.089.710.826,00 sehingga tidak terdapat selisih.

5.4.2.3.2	<b>Beban Bantuan Keuangan</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
		<b>52.148.834.457,00</b>	<b>549.770.321,00</b>

Beban Bantuan Keuangan Tahun 2024 sebesar Rp52.148.834.457,00 turun sebesar Rp51.599.064.136,00, jika dibandingkan Beban Bantuan Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp549.770.321,00.

Beban Bantuan Keuangan Tahun 2024 – LO sebesar Rp52.148.834.457,00 sedangkan Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - LRA sebesar Rp103.039.995.205,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp50.891.160.748,00 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.44**  
**Beban Bantuan Keuangan – LO**

(dalam rupiah)

<b>Belanja Bantuan Keuangan - LRA TA 2024</b>	<b>103.039.995.205,00</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	<b>0,00</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>	<b>50.891.160.748,00</b>
- Reklasifikasi Ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	36.500.000,00
- Reklasifikasi ke Beban Persediaan pada Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Kota Sungai Penuh	63.551.100,00
- Reklasifikasi ke Beban Barang pada Kelurahan dusun Baru	1.280.000,00
- Reklasifikasi ke Beban Jasa pada Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Kota Sungai Penuh	142.526.988,00
- Reklasifikasi ke Beban Perjalanan Dinas pada Kecamatan dan Kelurahan Lingkup Kota Sungai Penuh	232.460.660,00
- Transfer Dana Desa	50.414.842.000,00
<b>Jumlah Selisih</b>	<b>(50.891.160.748,00)</b>
<b>Beban Bantuan Keuangan Tahun 2024</b>	<b>52.148.834.457,00</b>

5.4.3	<b>Surplus/Defisit Dari Operasi</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
		<b>(7.162.059.964,46)</b>	<b>54.981.697.219,27</b>

Surplus/Defisit dari Operasi TA 2024 sebesar Rp(7.162.059.964,46) turun sebesar Rp62.143.757.183,73 atau sebesar 113,03% jika dibandingkan dengan Surplus/Defisit dari Operasi TA 2023 sebesar Rp54.981.697.219,27.

5.4.4	<b>Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
		<b>(1.872.609.469,67)</b>	<b>(4.592.155.908,82)</b>

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional adalah kenaikan atau penurunan Ekuitas yang berasal dari kegiatan non operasional.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2024 defisit sebesar Rp(1.872.609.469,67) naik sebesar Rp2.719.546.439,15 atau sebesar 59,22% jika dibandingkan dengan Surplus/Defisit Pos Non Operasional - LO Tahun 2023 sebesar Rp(4.592.155.908,82).

5.4.4.1	<b>Surplus Penjualan Aset Non Lancar</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
		<b>0,00</b>	<b>218.381.000,00</b>

Surplus Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2024 sebesar Rp0,00 turun sebesar Rp218.381.000,00 atau sebesar 100% jika dibandingkan dengan Surplus Penjualan Aset Non Lancar Tahun 2023 sebesar Rp218.381.000,00.

5.4.4.2	<b>Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
		<b>1.872.609.469,67</b>	<b>4.810.536.908,82</b>

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp1.872.609.469,67 naik sebesar Rp2.937.927.439,15 atau sebesar 61,07% jika dibandingkan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp4.810.536.908,82.

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024 sebesar Rp1.872.609.469,67 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.45**  
**Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2024**

*(dalam rupiah)*

NO	JENIS	JUMLAH
1	Obat Kadaluwarsa	758.810.383,25
2	Penghapusan Aset	204.988.000,00
3	Penurunan Nilai Investasi Jangka Panjang	908.811.086,42
<b>TOTAL</b>		<b>1.872.609.469,67</b>

5.4.5	<b>Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
		<b>(9.034.669.434,13)</b>	<b>50.389.541.310,45</b>

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2024 sebesar Rp(9.034.669.434,13) turun sebesar Rp59.424.210.744,58 atau sebesar 117,93% jika dibandingkan dengan Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2023 sebesar Rp50.389.541.310,45.

5.4.6	<b>Pos Luar Biasa</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
		<b>899.736.916,00</b>	<b>0,00</b>

Pos Luar Biasa merupakan pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Pos Luar Biasa Tahun 2024 sebesar Rp899.736.916,00 naik sebesar Rp899.736.916,00 atau sebesar 100% jika dibandingkan dengan Pos Luar Biasa Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

5.4.6.1	<b>Beban Luar Biasa</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>
		<b>899.736.916,00</b>	<b>0,00</b>

Beban Luar Biasa merupakan beban yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang tidak biasa dan jarang terjadi.

Beban Luar Biasa Tahun 2024 sebesar Rp899.736.916,00 naik sebesar

Rp899.736.916,00 atau sebesar 100% jika dibandingkan dengan Beban Luar Biasa Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

Beban Luar Biasa Tahun 2024 sebesar Rp899.736.916,00 dan Belanja Tak Terduga TA 2024 sebesar Rp1.187.186.916,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 287.450.000,00. Selisih tersebut merupakan Reklasifikasi ke Persediaan.

<b>5.4.7</b>	<b>Surplus/ Defisit – LO</b>	<u><b>Tahun 2024 (Rp)</b></u> <b>(9.934.406.350,13)</b>	<u><b>Tahun 2023 (Rp)</b></u> <b>50.389.541.310,45</b>
--------------	------------------------------	--	---

Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan - LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus/Defisit pada LO Tahun 2024 sebesar Rp(9.934.406.350,13) turun sebesar Rp60.323.947.660,58 atau sebesar 119,72% jika dibandingkan dengan Surplus/Defisit pada LO Tahun 2023 sebesar Rp50.389.541.310,45. Surplus/Defisit pada LO Tahun 2024 dan Surplus/Defisit pada LO Tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.4.46**  
**Surplus/Defisit – LO**

*(dalam rupiah)*

NO	SURPLUS/DEFISIT – LO	2024	2023
1	Pendapatan – LO	766.963.694.267,30	830.339.614.712,27
2	Beban – LO	774.125.754.231,76	775.357.917.493,00
3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(1.872.609.469,67)	(4.592.155.908,82)
4	Pos Luar Biasa	(899.736.916,00)	0,00
<b>JUMLAH (1-2+3+4)</b>		<b>(9.934.406.350,13)</b>	<b>50.389.541.310,45</b>

**BAB V.V**  
**LAPORAN ARUS KAS**

**5.5 Penjelasan atas Laporan Arus Kas (LAK)**

LAK bertujuan memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan Kas dan Setara Kas selama suatu periode akuntansi, serta saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan.

Informasi Arus Kas berguna sebagai indikator jumlah Arus Kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran Arus Kas yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Sungai Penuh sebelumnya.

Laporan ini menggambarkan Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas selama periode tertentu, yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan, dan Aktivitas Transitoris, Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Aktivitas Pembiayaan dan Aktivitas Non Anggaran.

Arus Kas Bersih periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp5.781.037.394,43, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp112.970.839.742,76, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi minus sebesar Rp129.524.925.236,46, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar Rp0,00, dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris minus sebesar Rp100.561.573,61.

<b>5.5.1</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
		<b>112.970.839.742,76</b>	<b>101.895.495.210,65</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus kas dari aktivitas operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Kas untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi terdiri Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi, dengan rincian sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.5.1**  
**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**

<i>(dalam rupiah)</i>			
NO	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	2024	2023
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	793.719.421.683,28	760.977.869.249,35
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	680.748.581.940,52	659.082.374.038,70
<b>JUMLAH (1-2)</b>		<b>112.970.839.742,76</b>	<b>101.895.495.210,65</b>

<b>5.5.1.1</b>	<b>Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
		<b>793.719.421.683,28</b>	<b>760.977.869.249,35</b>

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi merupakan arus kas masuk yang berasal dari penerimaan kas Aktivitas Operasi Pemerintah Kota Sungai Penuh selama Tahun 2024 yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode akuntansi sebesar Rp793.719.421.683,28 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.



**Tabel 5.5.2**  
**Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi**

*(dalam rupiah)*

NO	ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	2024	2023
1	Pajak Daerah	9.073.056.124,00	9.125.516.323,00
2	Retribusi Daerah	2.626.488.748,00	2.221.045.347,50
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.056.605.045,86	11.966.693.301,67
4	Lain-lain PAD yang Sah	42.611.955.558,42	46.102.994.635,60
5	Dana Bagi Hasil Pajak	11.742.757.000,00	11.799.236.112,00
6	Bagi Hasil Bukan Pajak	58.465.832.000,00	34.579.411.746,00
7	Dana Alokasi Umum	456.377.639.574,00	422.504.521.234,00
8	Dana Alokasi Khusus Fisik	29.632.981.639,00	41.081.776.282,00
9	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	58.157.193.909,00	59.957.221.512,00
10	Dana Insentif Daerah	0,00	10.400.931.000,00
11	Dana Desa	50.414.782.000,00	49.394.385.788,00
12	Insentif Fiskal	7.085.261.000,00	
13	Pendapatan Transfer Antar Daerah	50.749.310.988,00	57.192.938.931,00
14	Pendapatan Hibah	0,00	0,00
15	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.725.558.097,00	4.651.197.036,58
<b>JUMLAH</b>		<b>793.719.421.683,28</b>	<b>760.977.869.249,35</b>

**5.5.1.2**

**Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi**

**Tahun 2024**

**680.748.581.940,52**

**Tahun 2023**

**659.082.374.038,70**

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi merupakan Arus Keluar Kas yang berasal dari Pengeluaran Kas Aktivitas Operasional Pemerintah Kota Sungai Penuh selama Tahun 2024 yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode akuntansi sebesar Rp680.748.581.940,52 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.5.3**  
**Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi**

*(dalam rupiah)*

NO	ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	2024	2023
1	Belanja Pegawai	348.426.234.322,10	309.353.484.368,40
2	Belanja Barang dan Jasa	208.745.596.558,42	231.292.642.188,30
3	Belanja Subsidi	100.000.000,00	74.000.000,00
4	Belanja Hibah	17.959.918.113,00	15.903.623.278,00
5	Bantuan Sosial	200.000.000,00	200.000.000,00
6	Bantuan Keuangan	0,00	0,00
7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0,00	0,00
8	Belanja Tidak Terduga	1.187.186.916,00	0,00
9	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	104.129.646.031,00	102.258.624.204,00
<b>JUMLAH</b>		<b>680.748.581.940,52</b>	<b>659.082.374.038,70</b>

<b>5.5.2</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<u><b>Tahun 2024</b></u> <b>(129.524.925.236,46)</b>	<u><b>Tahun 2023</b></u> <b>(129.399.844.375,83)</b>
--------------	---	---	---

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi terdiri atas Arus Masuk Kas dari penerimaan Aktivitas Investasi Pemerintah Kota Sungai Penuh selama Tahun 2024 yang ditujukan untuk memperoleh Aset Tetap dan Aset Non Keuangan Lainnya minus sebesar Rp129.524.925.236,46 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.5.4**  
**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**

*(dalam rupiah)*

NO	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI	2024	2023
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	3.885.000,00	218.378.500,00
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	129.528.810.236,46	129.618.222.875,83
<b>JUMLAH (1-2)</b>		<b>(129.524.925.236,46)</b>	<b>(129.399.844.375,83)</b>

<b>5.5.2.1</b>	<b>Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<u><b>Tahun 2024</b></u> <b>3.885.000,00</b>	<u><b>Tahun 2024</b></u> <b>218.378.500,00</b>
----------------	--	---	---

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi merupakan arus masuk kas yang berasal dari penjualan Aset Tetap Lain-lain berupa penjualan bibit ikan pada UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar sebesar Rp3.885.000,00 sedangkan arus kas TA 2023 sebesar Rp218.378.500,00.

<b>5.5.2.2</b>	<b>Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<u><b>Tahun 2024</b></u> <b>129.528.810.236,46</b>	<u><b>Tahun 2023</b></u> <b>129.618.222.875,83</b>
----------------	---	---	---

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi merupakan kas keluar yang berasal dari Aktivitas Investasi sebesar Rp129.528.810.236,46 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.5.5**  
**Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi**

*(dalam rupiah)*

NO	ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	2024	2023
1	Belanja Modal Tanah	364.792.231,20	1.525.209.060,89
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.164.581.067,00	24.907.300.059,16
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.969.287.253,47	31.258.253.582,06
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	54.674.175.128,72	57.175.318.024,58
5	Belanja Modal Aset tetap Lainnya	10.355.974.556,07	14.752.142.149,14
<b>JUMLAH</b>		<b>129.528.810.236,46</b>	<b>129.618.222.875,83</b>

<b>5.5.3</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<u><b>Tahun 2024</b></u> <b>0,00</b>	<u><b>Tahun 2023</b></u> <b>0,00</b>
--------------	---	---	---

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan merupakan Aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi Investasi Jangka Panjang, Piutang Jangka Panjang dan Utang Pemkot Sungai Penuh sehubungan dengan pendanaan Defisit

atau penggunaan Surplus anggaran. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan terdiri dari Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan.

<b>5.5.3.1</b>	<b>Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<u><b>Tahun 2024</b></u> <b>0,00</b>	<u><b>Tahun 2023</b></u> <b>0,00</b>
----------------	--	---	---

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan merupakan arus masuk kas yang berasal dari Aktivitas Pendanaan Pemkot Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024 adalah nihil.

<b>5.5.3.2</b>	<b>Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<u><b>Tahun 2024</b></u> <b>0,00</b>	<u><b>Tahun 2023</b></u> <b>0,00</b>
----------------	---	---	---

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan merupakan arus keluar kas yang berasal dari Aktivitas Pendanaan Pemkot Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024 adalah nihil.

<b>5.5.4</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<u><b>Tahun 2024</b></u> <b>(100.561.573,61)</b>	<u><b>Tahun 2023</b></u> <b>99.722.289,89</b>
--------------	---	---	--

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris merupakan Aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan Pemkot Sungai Penuh minus sebesar Rp100.561.573,61 dari Aktivitas Transitoris arus kas TA 2023 sebesar Rp99.722.289,89.

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris terdiri dari Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris dan Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.5.6**  
**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**

*(dalam rupiah)*

NO	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	2024	2023
1	Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris	55.412.997.433,54	47.857.519.317,89
2	Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris	55.513.559.007,15	47.757.797.028,00
<b>JUMLAH (1-2)</b>		<b>(100.561.573,61)</b>	<b>99.722.289,89</b>

<b>5.5.4.1</b>	<b>Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris</b>	<u><b>Tahun 2024</b></u> <b>55.412.997.433,54</b>	<u><b>Tahun 2023</b></u> <b>47.857.519.317,89</b>
----------------	--	--	--

Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris merupakan Arus Masuk Kas yang berasal dari aktivitas transitoris Pemkot Sungai Penuh selama Tahun 2024 yang tidak mempengaruhi anggaran Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Pemerintah sebesar Rp55.412.997.433,54 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.5.7**  
**Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris**

*(dalam rupiah)*

NO	ARUS MASUK KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	2024	2023
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	55.358.896.741,54	47.809.554.430,25
2	Kiriman Uang Masuk	54.100.692,00	0,00
3	Penerimaan Sisa UP Tahun Sebelumnya	0,00	47.964.887,64
<b>JUMLAH</b>		<b>55.412.997.433,54</b>	<b>47.857.519.317,89</b>

## 5.5.4.1.1

Penerimaan Perhitungan  
Fihak Ketiga (PFK)

Tahun 2024  
55.358.896.741,54

Tahun 2023  
47.809.554.430,25

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga selama Tahun 2024 merupakan potongan fihak ketiga yang berasal dari potongan SP2D Pemkot Sungai Penuh selama Tahun 2024 sebesar Rp55.358.896.741,54 yang diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.5.8**  
**Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2024	2023
1.	IWP (8%) luran Wajib Pegawai	11.378.831.911,00	10.615.054.920,00
2.	Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS	247.539.982,00	0,00
3.	Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK	692.874.114,00	0,00
4.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.111.288,00	0,00
5.	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	53.398.383,00	0,00
6.	Belanja luran Jaminan Kematian PNS	9.694.863,00	0,00
7.	Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	160.445.162,00	0,00
8.	luran Jaminan Kesehatan 4%	8.372.456.465,00	8.188.399.880,00
9.	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	290.566.477,00	295.220.483,00
10.	Jaminan Kematian (JKM)	876.501.561,00	885.663.291,00
11.	IWP( luran Wajib Pegawai)	41.806.315,10	0,00
12.	IWP(1%) luran Wajib Pegawai	2.357.056.860,00	2.047.729.805,00
13.	Taspen	399.314.561,00	0,00
14.	Askes	43.407.169,40	0,00
15.	Lainnya	19.353.400,00	0,00
16.	Jaminan Hari Tua	624.702,00	0,00
17.	Pajak Pertambahan Nilai	15.960.220.959,54	13.033.762.798,00
18.	Pajak Penghasilan Ps 22	756.899.388,39	457.509.555,00
19.	PPH 21	12.160.068.139,59	4.849.714.352,00
20.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	26.350.874,00	5.639.980.901,00
21.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	85.206,00	0,00
22.	Pajak Penghasilan Ps 23	96.552.801,52	27.584.520,00
23.	Pajak Penghasilan Ps 25	526.500,00	0,00
24.	PPH Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	0,00	17.800.000,00
25.	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	1.410.909.636,00	1.751.133.925,25
26.	Pajak Penghasilan Ps Ps 15	300.023,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>55.358.896.741,54</b>	<b>47.809.554.430,25</b>

## 5.5.4.1.2

## Kiriman Uang Masuk

Tahun 2024  
54.100.692,00

Tahun 2023  
0,00

Kiriman Uang Masuk selama Tahun 2024 yang sudah disetor per 31 Desember Tahun 2023 Pemkot Sungai Penuh selama Tahun 2024 adalah nihil. Kiriman uang keluar merupakan mutasi masuk kas antar rekening Kas Daerah.

Kiriman Uang Masuk selama Tahun 2024 merupakan kas disetor per 31 Desember 2024 sebesar Rp54.100.692 sedangkan Kiriman Uang Masuk selama Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

Kiriman Uang Masuk selama Tahun 2024 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.5.9**  
**Kiriman Uang Masuk**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Nilai
1	Pengembalian ke Kasda atas Kelebihan tarik bank SP2D LS 1584 Tahun 2023 dikoreksi mutasi oleh Bank tgl 3 januari 2024 Dinas PUPR	43.335.255,00
2	Pengembalian ke Kasda atas Kelebihan Tarik SP2D LS 1408 tahun 2023 pada Dinas Kesehatan dan dikoreksi mutasi oleh bank tanggal 10 Januari 2024	2.750.000,00
3	Pengembalian ke Kasda atas Kelebihan Tarik SP2D LS 1407 tahun 2023 pada Dinas Kesehatan dan dikoreksi mutasi oleh bank tanggal 10 Januari 2024	2.750.000,00
4	Pengembalian ke Kasda atas Kelebihan pembayaran BPJS PKM Sungai Liuk Tahun 2023 dan disetor kembali tanggal 25 Januari 2024	4.670.842,00
5	Pengembalian ke Kasda Kelebihan Tarik Bank Tahun 2023 dan dikoreksi kembali tanggal 25 Januari 2024	594.595,00
<b>Jumlah</b>		<b>54.100.692,00</b>

**5.5.4.1.3**

**Penerimaan Sisa UP  
Tahun Sebelumnya**

**Tahun 2024**

**0,00**

**Tahun 2023**

**47.964.887,64**

Penerimaan Sisa UP Tahun Sebelumnya selama Tahun 2024 yang sudah disetor per 31 Desember Tahun 2023 Pemkot Sungai Penuh selama Tahun 2024 adalah nihil.

**5.5.4.2**

**Arus Keluar Kas dari  
Aktivitas Transitoris**

**Tahun 2024**

**55.513.559.007,15**

**Tahun 2023**

**47.757.797.028,00**

Arus Keluar Kas Dari aktivitas Transitoris selama Tahun 2024 merupakan aktivitas pengeluaran Kas Pemkot Sungai Penuh selama Tahun 2024 yang tidak mempengaruhi anggaran Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan Pemerintah sebesar Rp55.513.559.007,15 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.5.10**  
**Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris**

*(dalam rupiah)*

NO	ARUS KELUAR KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	2024	2023
1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	55.404.454.812,22	47.757.797.028,00
2	Kiriman Uang Keluar	109.104.194,93	0,00
3	Penerimaan Sisa UP Tahun sebelumnya	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>55.513.559.007,15</b>	<b>47.757.797.028,00</b>

**5.5.4.2.1**

**Pengeluaran Perhitungan  
Fihak Ketiga (PFK)**

**Tahun 2024**

**55.404.454.812,22**

**Tahun 2023**

**47.757.797.028,00**

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga selama Tahun 2024 merupakan potongan fihak ketiga yang berasal dari potongan transaksi Pemerintah Kota Sungai Penuh selama Tahun 2024.

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga selama Tahun 2024 sebesar Rp 55.404.454.812,22 sedangkan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga selama Tahun 2023 Rp47.757.797.028,00. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga selama Tahun 2024 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.5.11**  
**Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga**

*(dalam rupiah)*

No.	Uraian	2024	2023
1.	IWP (8%) Iuran Wajib Pegawai	11.378.831.911,00	12.664.384.910,00
2.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	247.539.982,00	0,00
3.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	692.874.114,00	0,00
4.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.111.288,00	0,00
5.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	53.398.383,00	0,00
6.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	9.694.863,00	0,00
7.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	160.445.162,00	0,00
8.	Iuran Jaminan Kesehatan 4%	8.372.456.465,00	8.194.800.628,00
9.	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	290.566.477,00	295.220.483,00
10.	Jaminan Kematian (JKM)	876.501.561,00	885.663.291,00
11.	IWP( Iuran Wajib Pegawai)	41.806.315,10	0,00
12.	IWP(1%) Iuran Wajib Pegawai	2.357.056.860,00	0,00
13.	Taspen	399.314.561,00	0,00
14.	Askes	43.407.169,40	0,00
15.	Lainnya	19.353.400,00	0,00
16.	Jaminan Hari Tua	624.702,00	0,00
17.	Pajak Pertambahan Nilai	16.005.779.030,22	13.034.772.044,00
18.	Pajak Penghasilan Ps 22	756.899.388,39	446.711.034,00
19.	PPH 21	12.160.068.139,59	10.483.496.688,00
20.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	26.350.874,00	0,00
21.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	85.206,00	0,00
22.	Pajak Penghasilan Ps 23	96.552.801,52	27.584.520,00
23.	Pajak Penghasilan Ps 25	526.500,00	0,00
24.	PPH Pasal 4 (2) Sewa Tanah dan/atau Bangunan	0,00	0,00
25.	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	1.410.909.636,00	1.725.163.430,00
26.	Pajak Penghasilan Ps Ps 15	300.023,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>55.404.454.812,22</b>	<b>47.757.797.028,00</b>

**5.5.4.2.2**

**Kiriman Uang Keluar**

**Tahun 2024**

**Tahun 2023**

**109.104.194,93**

**0,00**

Kiriman Uang Keluar selama Tahun 2024 merupakan Kas Di Bendahara Pengeluaran SKPD yang belum disetor per 31 Desember 2024 Pemerintah Kota Sungai Penuh adalah nihil. Kiriman uang keluar merupakan mutasi keluar kas antar rekening Kas Daerah.

Kiriman Uang Keluar selama Tahun 2024 sebesar Rp109.104.194,93 sedangkan Kiriman Uang Keluar selama Tahun 2023 sebesar Rp0,00.

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga selama Tahun 2024 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.5.12**  
**Kiriman Uang Keluar**

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Nilai
1	Pengurangan Kas Lainnya atas Pembayaran Utang TPP TA 2023 yang telah dipertanggungjawabkan namun kas masih berada pada rekening SKPD dan TA 2023 pada Kecamatan Pesisir Bukit	(33.467.270,00)

No	Uraian	Nilai
2	Pengurangan Kas Lainnya atas Pembayaran Pajak Daerah Ke Kasda dari dana BOS yang telah dipungut namun belum disetor ke Kasda berdasarkan hasil monitoring Inspektorat sampai dengan Tahun 2023 dan disetor Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan	(69.449.000,00)
3	Pengurangan kas lainnya atas pembayaran utang perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan tahun 2023 namun kas masih berada pada rekening kelurahan dusun baru dan dibayar kepada yang berhak tahun 2024	(6.169.000,00)
4	Pengurangan Kas Lainnya Pembayaran utang atas kas yang masih tersisa atas dana BOS TA 2023	(18.924,93)
<b>Jumlah</b>		<b>(109.104.194,93)</b>

#### 5.5.4.2.3

<b>Penerimaan Sisa UP</b>	<u><b>Tahun 2024</b></u>	<u><b>Tahun 2023</b></u>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Penerimaan Sisa UP selama Tahun 2024 merupakan Kas Di Bendahara Pengeluaran SKPD yang belum disetor per 31 Desember 2024 Pemerintah Kota Sungai Penuh adalah nihil.

#### 5.5.5

<b>Saldo Akhir Kas</b>	<u><b>Tahun 2024</b></u>	<u><b>Tahun 2023</b></u>
	<b>5.781.037.394,43</b>	<b>22.435.684.461,74</b>

Saldo Akhir Kas mencerminkan kenaikan/penurunan Kas periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp5.781.037.394,43 dengan uraian pada tabel berikut.

**Tabel 5.5.13**  
**Saldo Akhir Kas**

(dalam rupiah)

NO	SALDO AKHIR KAS	2024	2023
1	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	112.970.839.742,76	101.895.495.210,65
2	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(129.524.925.236,46)	(129.399.844.375,83)
3	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
4	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	(100.561.573,60)	99.722.289,89
5	<b>Jumlah Kenaikan / Penurunan Kas Bersih (1+2+3+4)</b>	<b>(16.654.647.067,31)</b>	<b>(27.404.626.875,29)</b>
6	Saldo Awal Kas di BUD	22.435.684.461,74	49.792.683.631,84
7	<b>Saldo Akhir Kas (5+6)</b>	<b>5.781.037.394,43</b>	<b>22.435.684.461,74</b>
8	Saldo Akhir Kas di BUD	4.172.759.599,16	18.771.975.415,64
9	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
10	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
11	Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	54.570.166,95	626.032,25
12	Saldo Akhir Kas BLUD	201.507.384,89	2.151.088.971,32
13	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	4.797,67	1.699.116,27
14	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOSP	168.104,60	56.956,34
15	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOK Puskesmas	1.274.349.557,00	1.279.954.933,00
16	Saldo Akhir Kas Lainnya	60.123.943,07	230.283.036,92

Saldo akhir kas sebesar pada LAK sebesar Rp5.781.037.394,43 sedangkan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp5.704.888.576,09 sehingga terdapat selisih lebih kas LAK sebesar Rp76.148.818,34. Selisih tersebut merupakan Kas yang tidak tercatat dalam SiLPA dengan rincian yang diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.5.14**  
**Selisih Saldo Akhir Kas dengan LPSAL**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	NILAI
1	Utang PFK Dana BOS	46.482.359,21
2	Kelebihan pengembalian PPTK TA 2022	3.520.300,10
3	Utang PFK BLUD RSUD Mayjen H.A.Thalib	12.972.072,00
4	Koreksi Kas lainnya Pendapatan Pajak dari Dana BOS	12.646.040,00
5	Koreksi Utang Kewajiban Jangka Pendek Lainnya	1.387.500,00
6	Koreksi Utang Kas BLUD RSUD Mayjen H.A.Thalib	0,99
7	Kurang Catat Silpa	(859.453,96)
<b>TOTAL</b>		<b>76.148.818,34</b>

**BAB V.VI**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**5.6 Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.6.1**  
**Laporan Perubahan Ekuitas**

*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	2024	2023
1	EKUITAS AWAL	1.707.755.489.882,61	1.865.231.639.310,39
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	(9.934.406.350,13)	50.389.541.310,45
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR (3 = 4 + 5) :	3.764.706.726,62	(207.865.690.738,23)
4	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
5	Koreksi Ekuitas Lainnya	3.764.706.726,62	(207.865.690.738,23)
<b>EKUITAS AKHIR (1+2+3)</b>		<b>1.701.585.790.259,10</b>	<b>1.707.755.489.882,61</b>

<b>5.6.1</b>	<b>Ekuitas Awal</b>	<u><b>31 Des 2024</b></u>	<u><b>31 Des 2023</b></u>
		<b>1.707.755.489.882,61</b>	<b>1.865.231.639.310,39</b>

Jumlah Ekuitas Awal Tahun 2024 sebesar Rp1.707.755.489.882,61 merupakan jumlah Ekuitas Akhir Tahun 2023.

<b>5.6.2</b>	<b>Surplus/Defisit LO</b>	<u><b>31 Des 2024</b></u>	<u><b>31 Des 2023</b></u>
		<b>(9.934.406.350,13)</b>	<b>50.389.541.310,45</b>

Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit - LO pada akhir periode Tahun 2024. Surplus/Defisit - LO Pemkot Sungai Penuh Tahun 2024 mengalami Defisit sebesar Rp9.934.406.350,13, turun sebesar Rp60.323.947.660,58 atau sebesar 19,72% jika dibandingkan dengan Surplus/Defisit-LO Tahun 2023 mengalami Surplus sebesar Rp50.389.541.310,45.

<b>5.6.3</b>	<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar</b>	<u><b>31 Des 2024</b></u>	<u><b>31 Des 2023</b></u>
		<b>3.764.706.726,62</b>	<b>(207.865.690.738,23)</b>

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan koreksi atas pos-pos yang belum dibukukan sampai akhir Tahun 2024. Terdapat Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar di Laporan Perubahan Ekuitas Pemkot Sungai Penuh yaitu Koreksi Nilai Persediaan dan Koreksi Ekuitas Lainnya.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2024 atas koreksi sebagai berikut:

Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp3.764.706.726,62 terdiri dari:

- 1) Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin minus sebesar Rp165.000.000,00.
- 2) Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.364.179.760,81.



- 3) Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan minus sebesar Rp322.214.274,40.
- 4) Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya minus sebesar Rp603.930.561,00.
- 5) Koreksi Akumulasi Aset Lain-lain sebesar Rp4.095.884.366,16.
- 6) Koreksi akumulasi Penyusutan Properti Investasi minus sebesar Rp1.640.506.438,00.
- 7) Koreksi Penyisihan Piutang sebesar Rp1.169.842.301,62.
- 8) Koreksi lebih catat utang belanja sebesar Rp9.968,76.
- 9) Koreksi kurang catat utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp2.096.100,10.
- 10) Koreksi Denda piutang PBB-P2 minus sebesar Rp1.253.520.268,00.
- 11) Koreksi lebih bayar pajak pada Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp40,00.
- 12) Koreksi Utang IWP minus sebesar Rp552.022.923,00.
- 13) Koreksi Piutang Pendapatan Pajak dari Dana BOS minus sebesar Rp12.646.040,00.
- 14) Koreksi Piutang Pendapatan Retribusi Jasa Usaha minus sebesar Rp307.425.000,00.
- 15) Koreksi Aset Lain-lain yang dioperasikan pada PDAM Tirta Khayangan minus sebesar Rp10.180.649,00.
- 16) Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Tahun 2024 sebesar Rp0,04.
- 17) Koreksi Lainnya sebesar Rp140.342,53.

#### 5.6.4

<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>31 Des 2024</b>	<b>31 Des 2023</b>
	<b>1.701.585.790.259,10</b>	<b>1.707.755.489.882,61</b>

Laporan Perubahan Ekuitas Akhir terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit – LO dan Koreksi Ekuitas Lainnya. Laporan Perubahan Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.701.585.790.259,10 sedangkan Laporan Perubahan Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.707.755.489.882,61. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 5.6.2**  
**Ekuitas Akhir Tahun 2024 dan Tahun 2023**

*(dalam rupiah)*

NO	URAIAN	2024	2023
1	Ekuitas Awal	1.707.755.489.882,61	1.865.231.639.310,39
2	Surplus / (Defisit) – LO	(9.934.406.350,13)	50.389.541.310,45
3	Dampak Kumulatif Kesalahan Mendasar	3.764.706.726,62	(207.865.690.738,23)
<b>JUMLAH</b>		<b>1.701.585.790.259,10</b>	<b>1.707.755.489.882,61</b>

## BAB V.VII

### KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Kejadian Setelah Tanggal Neraca adalah peristiwa, baik yang menguntungkan (*favourable*) atau tidak menguntungkan (*unfavourable*) yang terjadi diantara tanggal neraca dan tanggal penyelesaian laporan keuangan. Adapun Kejadian Setelah Tanggal Neraca pada Pemerintah Kota Sungai adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD merupakan penyertaan modal Pemkot Sungai Penuh ke Bank Jambi Tahun 2024 berdasarkan berita Acara RUPS Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi No 14 Tanggal 15 Maret 2025. Jumlah Penyertaan Modal sebesar Rp67.500.000.000,00 dengan persentase sebesar 6,40% sebesar Rp12.095.926.131,39.
2. Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 355/Kep.Gub/ BPKPD- 2.1/2025 tentang Penetapan Pembagian Peruntukan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 tanggal 22 April 2025 sebesar Rp2.568.731.959,00.
3. Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 355/Kep.Gub/ BPKPD- 2.1/2025 tentang Penetapan Pembagian Peruntukan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 tanggal 22 April 2025 sebesar Rp1.880.560.844,00.
4. Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 355/Kep.Gub/ BPKPD- 2.1/2025 tentang Penetapan Pembagian Peruntukan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan Untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 Tanggal 22 April 2025 sebesar Rp6.302.556.214,00.
5. Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 355/Kep.Gub/ BPKPD- 2.1/2025 tentang Penetapan Pembagian Peruntukan Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Air Permukaan untuk Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 tanggal 22 April 2025 sebesar Rp5.910.396,00.
6. Pendapatan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah atas Klaim Pelayanan Tahun 2024 yang dibayarkan di Tahun 2025. Penetapan Piutang dihitung berdasarkan Nilai Klaim Hasil Verifikasi BPJS Kesehatan berdasarkan Surat Kepala Cabang BPJS Muara Bungo Nomor 464/II-08/0325 tanggal 6 Maret 2025 sebesar Rp6.159.133.153,00.

## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON-KEUANGAN

#### 6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas

Secara geografis, Kota Sungai Penuh terletak antara 02°01'40'' sampai 02°14'54'' Lintang Selatan dan antara 101°14'32'' sampai 101°27'31'' Bujur Timur dan merupakan dataran tinggi berbukit-bukit dan dikelilingi gunung-gunung dan hutan lebat dengan ketinggian 100 – 1.000 m dpl. Keadaan topografi tersebut menyebabkan Kota Sungai Penuh memiliki iklim sejuk dan nyaman, dengan batas-batas sebagai berikut.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kerinci;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kerinci;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan; dan
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kerinci.

Secara administrasi, Kota Sungai Penuh terdiri dari delapan Kecamatan.

1. Kecamatan Sungai Penuh;
2. Kecamatan Hamparan Rawang;
3. Kecamatan Pesisir Bukit;
4. Kecamatan Kumun Debai;
5. Kecamatan Tanah Kampung;
6. Kecamatan Sungai Bungkal;
7. Kecamatan Koto Baru; dan
8. Kecamatan Pondok Tinggi.

Kota Sungai Penuh adalah kota yang baru saja berdiri yang merupakan salah satu dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi dan memiliki luas wilayah keseluruhan 38.986 Ha, yang terdiri dari Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) 23.178 Ha (59,45%) dan lahan hunian/budidaya seluas 15.808 Ha (40,55%). Jumlah penduduk Kota Sungai Penuh pada Tahun 2024 sebanyak 102.224 jiwa. Berdasarkan data Badan Statistik Kota Sungai Penuh dalam buku Sungai Penuh dalam Angka 2025 bahwa Kepadatan Penduduk di Kota Sungai Penuh Tahun 2024 mencapai 280,13 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 25,29 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di 8 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Koto Baru dengan kepadatan sebesar 5.176,56 jiwa/km<sup>2</sup>.

Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Pemerintah Kota Sungai Penuh, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, disahkan oleh DPR-RI tanggal 21 Juli 2008. Kota Sungai Penuh diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri (a.n. Presiden Republik Indonesia) pada tanggal 8 November 2008. Jumlah dinas/badan/kantor di lingkungan Pemerintah Kota Sungai Penuh, baik sebagai Pengguna Anggaran maupun sebagai Kuasa Pengguna

Anggaran sebanyak 68 SKPD terdiri dari 24 Dinas, 5 Badan, 1 Inspektorat, 1 Sekretariat DPRD, 1 SKPKD, 2 Rumah Sakit, 8 Kecamatan, 9 Bagian Sekretariat Daerah, 11 Puskesmas, 1 Instalasi Farmasi, 1 Labkesda dan 4 Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.

Kelembagaan Pemerintah Daerah (Pemda) tersebut telah dibentuk sesuai dengan kewenangan yang ada pada Pemda dan diarahkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam membangun daerah demi terwujudnya pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat tercapainya kemandirian daerah.

### 6.2 Keadaan Pegawai Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2024

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) daerah pada Pemerintah Kota Sungai Penuh sampai dengan bulan Desember 2024 sebanyak 2.595 orang, dengan rincian per instansi dan per golongan sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 6.1**  
**Rincian Jumlah PNS pada Pemkot Sungai Penuh Tahun 2024**

GOLONGAN I				GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV				
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	E
0	1	1	0	0	1	25	69	191	369	480	839	315	215	89	0	0

Rincian golongan pegawai per satuan kerja pada lingkup Pemerintah Kota Sungai Penuh per 31 Desember 2024 disajikan pada **Lampiran 50**.

### 6.3 Manajemen Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2024

Kota Sungai Penuh pada periode Tahun 2024 dipimpin oleh Wali Kota Sungai Penuh Alfin, S.H. yang pengesahan pengangkatan sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 - 1719 Tahun 2025 tanggal 14 Februari 2025.

## BAB VII P E N U T U P

Berdasarkan penjelasan dan rincian tersebut di atas dapat diambil simpulan penting bahwa:

1. *Pada LRA*: dari target Pendapatan yang ditetapkan Tahun 2024 sebesar Rp850.763.684.127,00 telah dapat terealisasi sebesar Rp793.723.306.683,28 atau sebesar 93,30% dan pada sisi Belanja dianggarkan sebesar Rp873.022.658.196,00 dengan realisasi sebesar Rp810.277.392.176,98 atau sebesar 92,81%. Sedangkan Surplus/Defisit Tahun 2024 ditetapkan sebesar defisit Rp22.258.974.069,00 dengan realisasi sebesar defisit Rp16.554.085.493,70 atau sebesar 74,37%. Pembiayaan Netto dianggarkan sebesar Rp22.258.974.069,00 dengan realisasi sebesar Rp22.258.974.069,79 atau sebesar 100.00%.
2. *Pada LPSAL*: Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 sebesar Rp22.258.114.615,83. Sedangkan Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk Tahun 2024 sebesar Rp5.704.888.576,09.
3. *Dalam Neraca*: posisi Aset pada akhir Tahun 2024 sebesar Rp1.722.047.608.264,27. Jumlah Aset tersebut naik sebesar Rp65.328.823,13 jika dibandingkan dengan Aset Tahun 2023 sebesar Rp1.721.982.279.441,14. Sedangkan posisi Kewajiban/Utang, baik Utang Jangka Pendek maupun Utang Jangka Panjang pada akhir Tahun 2024 sebesar Rp20.461.818.005,17. Jumlah Kewajiban tersebut naik sebesar Rp6.235.028.446,64 bila dibandingkan dengan Tahun 2023 sebesar Rp14.226.789.558,53. Posisi Ekuitas pada akhir Tahun 2024 sebesar Rp1.701.585.790.259,10. Jumlah Ekuitas tersebut turun sebesar Rp6.169.699.623,51 jika dibandingkan Ekuitas Tahun 2023 sebesar Rp1.707.755.489.882,61. Posisi Kewajiban dan Ekuitas Tahun 2024 sebesar Rp1.722.047.608.264,27.
4. *Pada LO*: Pendapatan – LO pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp766.963.694.267,30 dan pada sisi Beban pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp774.125.754.231,76. Surplus/(Defisit) Non Operasional Tahun 2024 sebesar Rp(1.872.609.469,67) dan Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa Tahun 2024 sebesar Rp(899.736.916,00). Sedangkan Surplus/(Defisit) – LO pada Tahun 2024 terealisasi sebesar Rp(9.934.406.350,13).
5. *Pada LAK*: posisi Saldo Akhir Kas pada akhir Tahun 2024 sebesar Rp5.781.037.394,43. Jumlah Saldo Akhir Kas tersebut turun sebesar Rp16.654.647.067,31 jika dibandingkan Saldo Akhir Kas Tahun 2023 sebesar Rp22.435.684.461,74.
6. *Pada LPE*: Ekuitas Awal Tahun 2024 merupakan jumlah Ekuitas Akhir Tahun 2023 sebesar Rp1.707.755.489.882,61 dan Surplus/Defisit – LO sebesar Rp9.934.406.350,13 Sedangkan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar sebesar Rp3.764.706.726,62 sehingga nilai Ekuitas Akhir Tahun 2024 sebesar Rp1.701.585.790.259,10.

Sebagai bagian penutup dari CaLK (Pemkot) Sungai Penuh Tahun 2024, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah mengacu pada PP 71 Tahun 2010 tentang SAP. LKPD tersebut merupakan tekad kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dari informasi tersebut terlihat dengan jelas

kinerja keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh, sehingga dapat digunakan oleh para *stakeholders* dan terbuka untuk diketahui oleh para pengguna laporan ini.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Sungai Penuh Tahun 2024 merupakan salah satu pertanggungjawaban Pemkot Sungai Penuh atas pengelolaan APBD Tahun 2024. Sebagai sesuatu yang berkembang sesuai dengan peraturan-peraturan terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Laporan Keuangan ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan dan masukan-masukan positif serta pengembangan Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkup Pemkot Sungai Penuh sehingga implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan pengelolaannya pada masa mendatang diharapkan akan lebih baik.



# LAMPIRAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN 2024 (*Audited*)  
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023





**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**ENTITAS DALAM LINGKUP PEMKOT SUNGAI PENUH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NO</b>	<b>SKPD</b>
1	DINAS PENDIDIKAN
2	DINAS KESEHATAN
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
8	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9	DINAS SOSIAL
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
11	DINAS KETAHANAN PANGAN
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
16	DINAS PERHUBUNGAN
17	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
18	DINAS KOPERASI DAN UKM
19	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA
20	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

<b>NO</b>	<b>SKPD</b>
21	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
23	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
24	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
25	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
26	SEKRETARIAT DAERAH
27	SEKRETARIAT DPRD
28	KECAMATAN SUNGAI PENUH
29	KECAMATAN PESISIR BUKIT
30	KECAMATAN HAMPARAN RAWANG
31	KECAMATAN KUMUN DEBAI
32	KECAMATAN TANAH KAMPUNG
33	KECAMATAN PONDOK TINGGI
34	KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL
35	KECAMATAN KOTO BARU
36	INSPEKTORAT DAERAH
37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
38	BADAN KEUANGAN DAERAH
39	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
40	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



**RINCIAN ANGGARAN PERUBAHAN APBD KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE	URAIAN	APBD	APBD MURNI	APBD PENJABARAN I	APBD PENJABARAN II	APBD PENJABARAN III	APBD PENJABARAN IV	PERUBAHAN APBD	P-APBD PENJABARAN	P-APBD PENJABARAN I
		Perda nomor 08 Tahun 2023 29 Desember 2023	Perwako nomor 43 Tahun 2023 29 Desember 2023	Perwako nomor 15 Tahun 2024 18 Maret 2024	Perwako nomor 17 Tahun 2024 01 April 2024	Perwako nomor 22 Tahun 2024 22 Mei 2024	Perwako nomor 24 Tahun 2024 10 Juni 2024	Perda nomor 07 Tahun 2024 10 Oktober 2024	Perwako nomor 43 Tahun 2024 10 Oktober 2024	Perwako nomor 46 Tahun 2024 18 Desember 2024
1.	PENDAPATAN DAERAH	820.201.842.681,00	820.201.842.681,00	820.201.842.681,00	820.201.842.681,00	820.201.842.681,00	820.201.842.681,00	847.910.429.127,00	847.910.429.127,00	850.763.684.127,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	103.125.197.750,00	103.125.197.750,00	103.125.197.750,00	103.125.197.750,00	103.125.197.750,00	103.125.197.750,00	103.181.802.795,00	103.181.802.795,00	103.181.802.795,00
	PENDAPATAN TRANSFER	713.076.644.931,00	713.076.644.931,00	713.076.644.931,00	713.076.644.931,00	713.076.644.931,00	713.076.644.931,00	739.931.761.858,00	739.931.761.858,00	742.785.016.858,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.796.864.474,00	4.796.864.474,00	4.796.864.474,00
2.	BELANJA DAERAH									
	BELANJA OPERASI	605.489.494.204,00	605.489.494.204,00	605.323.337.204,00	605.323.337.202,00	604.086.437.052,00	604.086.437.052,00	609.104.227.027,00	609.104.227.027,00	622.394.393.057,00
	BELANJA MODAL	148.259.513.272,00	148.259.513.272,00	148.425.670.272,00	148.425.670.274,00	149.662.570.424,00	149.662.570.424,00	151.112.340.964,00	151.112.340.964,00	140.675.429.934,00
	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.333.881.689,00	2.333.881.689,00	2.333.881.689,00	2.333.881.689,00	2.333.881.689,00	2.333.881.689,00	2.333.881.689,00	2.333.881.689,00	2.333.881.689,00
	BELANJA TRANSFER	107.618.953.516,00	107.618.953.516,00	107.618.953.516,00	107.618.953.516,00	107.618.953.516,00	107.618.953.516,00	107.618.953.516,00	107.618.953.516,00	107.618.953.516,00
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	87.000.000.000,00	87.000.000.000,00	130.500.000.000,00	130.500.000.000,00	130.500.000.000,00	130.500.000.000,00	66.776.922.207,00	66.776.922.207,00	66.776.922.207,00
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	43.500.000.000,00	43.500.000.000,00	43.500.000.000,00	43.500.000.000,00	43.500.000.000,00	43.500.000.000,00	22.258.974.069,00	22.258.974.069,00	22.258.974.069,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	43.500.000.000,00	43.500.000.000,00	43.500.000.000,00	43.500.000.000,00	22.258.974.069,00	22.258.974.069,00	22.258.974.069,00
	PEMBIAYAAN NETTO	43.500.000.000,00	43.500.000.000,00	43.500.000.000,00	43.500.000.000,00	43.500.000.000,00	43.500.000.000,00	22.258.974.069,00	22.258.974.069,00	22.258.974.069,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
REALISASI PENDAPATAN DAERAH PER SUB RINCIAN OBJEK  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase %
1	2	3	4	5	6
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>					
<b>I</b>	<b>Pajak Daerah</b>		<b>13.577.304.750,00</b>	<b>9.073.056.124,00</b>	<b>66,83</b>
	4.1.01.06	Pajak Hotel	1.050.000.000,00	804.792.360,00	76,65
	4.1.01.06.01	Pajak Hotel	1.050.000.000,00	804.792.360,00	76,65
	4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	1.050.000.000,00	804.792.360,00	76,65
	4.1.01.07	Pajak Restoran	2.080.000.000,00	1.546.302.884,00	74,34
	4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.080.000.000,00	1.546.302.884,00	74,34
	4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.080.000.000,00	1.546.302.884,00	74,34
	4.1.01.08	Pajak Hiburan	93.600.000,00	23.586.000,00	25,20
	4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	53.600.000,00	2.520.000,00	4,70
	4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	53.600.000,00	2.520.000,00	4,70
	4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	10.000.000,00	2.755.000,00	27,55
	4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	10.000.000,00	2.755.000,00	27,55
	4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	25.000.000,00	18.311.000,00	73,24
	4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	25.000.000,00	18.311.000,00	73,24
	4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	5.000.000,00	-	-
	4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	5.000.000,00	-	-
	4.1.01.09	Pajak Reklame	555.600.000,00	291.129.480,00	52,40
	4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	425.600.000,00	204.471.680,00	48,04
	4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	425.600.000,00	204.471.680,00	48,04
	4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	115.000.000,00	81.265.800,00	70,67
	4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	115.000.000,00	81.265.800,00	70,67
	4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	10.000.000,00	5.392.000,00	53,92
	4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	10.000.000,00	5.392.000,00	53,92
	4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	5.000.000,00	-	-
	4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	5.000.000,00	0,00	-
	4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	4.544.704.750,00	4.323.424.184,00	-
	4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	4.544.704.750,00	4.323.424.184,00	-
	4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	4.544.704.750,00	4.323.424.184,00	95,13
	4.1.01.11	Pajak Parkir	5.000.000,00	104.000,00	-
	4.1.01.11.01	Pajak Parkir	5.000.000,00	104.000,00	-
	4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	5.000.000,00	104.000,00	2,08
	4.1.01.12	Pajak Air Tanah	20.000.000,00	16.905.000,00	84,53
	4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	20.000.000,00	16.905.000,00	84,53
	4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	20.000.000,00	16.905.000,00	84,53
	4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.428.400.000,00	289.886.907,00	11,94
	4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.428.400.000,00	289.886.907,00	11,94
	4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.428.400.000,00	289.886.907,00	11,94
	4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.000.000.000,00	503.878.809,00	50,39
	4.1.01.15.01	PBBP2	1.000.000.000,00	503.878.809,00	50,39
	4.1.01.15.01.0001	PBBP2	1.000.000.000,00	503.878.809,00	50,39
	4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.800.000.000,00	1.273.046.500,00	70,72
	4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	1.800.000.000,00	1.273.046.500,00	70,72
	4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	1.800.000.000,00	1.273.046.500,00	70,72
<b>II</b>	<b>Retribusi Daerah</b>		<b>7.793.112.000,00</b>	<b>2.626.488.748,00</b>	<b>33,70</b>
	4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	3.410.922.000,00	451.754.000,00	13,24
	4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	710.000.000,00	142.430.000,00	20,06
	4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	210.000.000,00	107.514.000,00	51,20
	4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	500.000.000,00	34.916.000,00	6,98
	4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.889.132.000,00	214.595.000,00	11,36
	4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.889.132.000,00	214.595.000,00	11,36
	4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	811.790.000,00	94.729.000,00	11,67
	4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	811.790.000,00	94.729.000,00	11,67

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase %
1	2	3	4	5	6
	4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	3.977.359.000,00	2.159.534.768,00	54,30
	4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.456.400.000,00	1.301.852.768,00	89,39
	4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	429.400.000,00	765.104.500,00	178,18
	4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	20.000.000,00	19.000.000,00	95,00
	4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	1.007.000.000,00	517.748.268,00	51,41
	4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.780.606.000,00	504.054.000,00	28,31
	4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.780.606.000,00	504.054.000,00	28,31
	4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	400.700.000,00	100.538.000,00	25,09
	4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	400.700.000,00	100.538.000,00	25,09
	4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	88.804.000,00	8.925.000,00	10,05
	4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	88.804.000,00	8.925.000,00	10,05
	4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	250.849.000,00	244.165.000,00	97,34
	4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	250.849.000,00	244.165.000,00	97,34
	4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	404.831.000,00	15.199.980,00	3,75
	4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	404.831.000,00	15.199.980,00	3,75
	4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	404.831.000,00	15.199.980,00	3,75
<b>III</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>		<b>12.056.605.045,00</b>	<b>12.056.605.045,86</b>	<b>100,00</b>
	4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	12.056.605.045,00	12.056.605.045,86	100,00
	4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.056.605.045,00	12.056.605.045,86	100,00
	4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	12.056.605.045,00	12.056.605.045,86	100,00
<b>IV</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>		<b>69.754.781.000,00</b>	<b>42.615.840.558,42</b>	<b>61,09</b>
	4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	354.000.000,00	3.885.000,00	1,10
	4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-lain	354.000.000,00	3.885.000,00	-
	4.1.04.01.06.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	354.000.000,00	3.885.000,00	1,10
	4.1.04.05	Jasa Giro	1.500.000.000,00	889.669.457,69	59,31
	4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00	876.574.992,80	-
	4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.500.000.000,00	876.574.992,80	58,44
	4.1.04.05.05	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	-	295.158,63	-
	4.1.04.05.05.0001	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	-	295.158,63	-
	4.1.04.05.06	Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	-	103.148,26	-
	4.1.04.05.06.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP	-	103.148,26	-
	4.1.04.05.07	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	-	12.696.158,00	-
	4.1.04.05.07.0001	Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas	-	12.696.158,00	-
	4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.500.000.000,00	1.708.115.750,84	68,32
	4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	1.708.115.750,84	68,32
	4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	1.708.115.750,84	68,32
	4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	11.644.340,62	-
	4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	11.644.340,62	-
	4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	11.644.340,62	-
	4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	68.394.328,00	-
	4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	-	68.394.328,00	-
	4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	5.400.781.000,00	2.851.521.474,84	52,80
	4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	257.157.191,56	-
	4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	257.157.191,56	-
	4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	5.350.000.000,00	1.056.733.350,10	19,75
	4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	200.000.000,00	1.056.733.350,10	528,37
	4.1.04.15.04.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Tetap	5.150.000.000,00	-	-
	4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	50.781.000,00	58.025.765,40	114,27

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase %
1	2	3	4	5	6
	4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	50.781.000,00	58.025.765,40	114,27
	4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	-	34.220.275,79	-
	4.1.04.15.15.0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	5.651.370,00	-
	4.1.04.15.15.0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis- Makanan dan Minuman Rapat	-	28.568.905,79	-
	4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	124.985.365,00	-
	4.1.04.15.16.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	124.985.365,00	-
	4.1.04.15.17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	10.446.279,00	-
	4.1.04.15.17.0079	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermot Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	-	10.446.279,00	-
	4.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	-	468.292.093,00	-
	4.1.04.15.34.0001	Pendapatan dari Pengembalian Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	-	468.292.093,00	-
	4.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	-	2.000.000,00	-
	4.1.04.15.61.0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	2.000.000,00	-
	4.1.04.15.65	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	-	798.279.106,43	-
	4.1.04.15.65.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kota	-	798.279.106,43	-
	4.1.04.15.84	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	-	41.382.048,56	-
	4.1.04.15.84.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	-	41.382.048,56	-
	4.1.04.16	Pendapatan BLUD	60.000.000.000,00	36.975.462.406,43	61,63
	4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD	60.000.000.000,00	36.975.462.406,43	61,63
	4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	60.000.000.000,00	36.975.462.406,43	61,63
	4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	107.147.800,00	-
	4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	107.147.800,00	-
	<b>TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>		<b>103.181.802.795,00</b>	<b>66.371.990.476,28</b>	<b>64,33</b>
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>					
<b>I</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>		<b>681.881.534.954,00</b>	<b>671.876.447.122,00</b>	<b>98,53</b>
	4.2.01.01	Dana Perimbangan	626.404.715.954,00	614.376.404.122,00	98,08
	4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	70.256.796.000,00	70.208.589.000,00	99,93
	4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.005.132.000,00	6.005.132.000,00	100,00
	4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	5.536.665.000,00	5.729.878.000,00	103,49
	4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	193.213.000,00	-	-
	4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	55.954.000,00	7.747.000,00	13,85
	4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	10.887.330.000,00	36.084.971.150,00	331,44
	4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	29.348.245.000,00	4.150.603.850,00	14,14
	4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	13.139.062.000,00	13.139.062.000,00	100,00

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase %
1	2	3	4	5	6
	4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	560.908.000,00	560.908.000,00	100,00
	4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	4.530.287.000,00	4.530.287.000,00	100,00
	4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	468.286.587.000,00	456.377.639.574,00	97,46
	4.2.01.01.02.0001	DAU	380.018.497.000,00	380.018.497.000,00	100,00
	4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	800.000.000,00	800.000.000,00	100,00
	4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	33.473.970.000,00	21.565.022.574,00	64,42
	4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	30.756.248.000,00	30.756.248.000,00	100,00
	4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	15.805.206.000,00	15.805.206.000,00	100,00
	4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	7.432.666.000,00	7.432.666.000,00	100,00
	4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	30.011.433.000,00	29.632.981.639,00	98,74
	4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	254.465.000,00	252.300.000,00	99,15
	4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	6.681.433.000,00	6.566.637.063,00	98,28
	4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.694.195.000,00	2.649.198.900,00	98,33
	4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	399.901.000,00	399.817.500,00	99,98
	4.2.01.01.03.0013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	-	1.029.172.907,00	
	4.2.01.01.03.0014	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	19.831.738.000,00	17.712.449.864,00	
	4.2.01.01.03.0057	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	149.701.000,00	136.750.000,00	91,35
	4.2.01.01.03.0058	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Percepatan Penurunan Stunting	-	886.655.405,00	
	4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	57.849.899.954,00	58.157.193.909,00	100,53
	4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	12.502.000.884,00	11.504.810.149,00	92,02
	4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	0,00	905.000.000,00	
	4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	27.180.670.760,00	28.228.216.000,00	103,85
	4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	568.728.000,00	711.978.000,00	125,19
	4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.321.400.000,00	2.227.263.000,00	95,94
	4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	511.543.044,00	501.400.000,00	98,02
	4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	2.885.628.067,00	3.850.883.494,00	133,45
	4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	372.331.000,00	-	-
	4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	8.239.856.000,00	6.959.901.067,00	84,47
	4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.377.381.266,00	2.377.381.266,00	100,00
	4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	495.210.205,00	495.210.205,00	100,00
	4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	45.457.500,00	45.457.500,00	100,00
	4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	0,00	-	-
	4.2.01.01.04.0022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	349.693.228,00	349.693.228,00	100,00
	4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-
	4.2.01.02.01	DID	-	-	-
	4.2.01.02.01.0001	DID	-	-	-
	4.2.01.05	Dana Desa	48.391.558.000,00	50.414.782.000,00	104,18
	4.2.01.05.01	Dana Desa	48.391.558.000,00	50.414.782.000,00	104,18
	4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	48.391.558.000,00	50.414.782.000,00	104,18
	4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.085.261.000,00	7.085.261.000,00	100,00
	4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	7.085.261.000,00	7.085.261.000,00	100,00
	4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	7.085.261.000,00	7.085.261.000,00	100,00
<b>II</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>		<b>60.903.481.904,00</b>	<b>50.749.310.988,00</b>	<b>83,33</b>
	4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	53.603.481.904,00	48.279.310.988,00	90,07
	4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	53.603.481.904,00	48.279.310.988,00	90,07
	4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	9.248.750.918,00	6.445.800.414,00	69,69
	4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.128.159.821,00	5.243.490.864,00	85,56
	4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	25.570.092.755,00	24.573.229.128,00	96,10
	4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	34.995.060,00	38.040.373,00	108,70
	4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	12.621.483.350,00	11.978.750.209,00	94,91

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase %
1	2	3	4	5	6
	4.2.02.02	Bantuan Keuangan	7.300.000.000,00	2.470.000.000,00	33,84
	4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	7.300.000.000,00	2.470.000.000,00	33,84
	4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.300.000.000,00	2.470.000.000,00	33,84
	<b>TOTAL PENDAPATAN TRANSFER</b>		<b>742.785.016.858,00</b>	<b>722.625.758.110,00</b>	<b>97,29</b>
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>					
	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>		<b>4.796.864.474,00</b>	<b>4.725.558.097,00</b>	<b>98,51</b>
	04.03.01	Pendapatan Hibah	-	-	-
	4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	-	-
	4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	-	-
	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan	4.796.864.474,00	4.725.558.097,00	98,51
	4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.796.864.474,00	4.725.558.097,00	98,51
	4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Rumah Sakit Non	4.796.864.474,00	4.725.558.097,00	98,51
	<b>TOTAL LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>		<b>4.796.864.474,00</b>	<b>4.725.558.097,00</b>	<b>98,51</b>
	<b>TOTAL PENDAPATAN DAERAH</b>		<b>850.763.684.127,00</b>	<b>793.723.306.683,28</b>	<b>93,30</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN REALISASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

*(dalam rupiah)*

No.	PAJAK DAERAH	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2022	NAIK (TURUN)
1	2	3	4	$5 = (4 : 3) \times 100$	6	7 = 4 - 6
<b>I</b>	<b>Pajak Hotel</b>	<b>1.050.000.000,00</b>	<b>804.792.360,00</b>	<b>76,65</b>	<b>716.179.553,00</b>	<b>88.612.807,00</b>
1	Hotel	1.050.000.000,00	804.792.360,00	68,21	716.179.553,00	88.612.807,00
<b>II</b>	<b>Pajak Restoran</b>	<b>2.080.000.000,00</b>	<b>1.546.302.884,00</b>	<b>74,34</b>	<b>1.229.527.561,00</b>	<b>316.775.323,00</b>
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.080.000.000,00	1.546.302.884,00	74,34	1.229.527.561,00	316.775.323,00
<b>III</b>	<b>Pajak Hiburan</b>	<b>93.600.000,00</b>	<b>23.586.000,00</b>	<b>25,20</b>	<b>30.502.800,00</b>	<b>(6.916.800,00)</b>
1	Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan Sejenisnya	53.600.000,00	2.520.000,00	4,70	3.745.000,00	(1.225.000,00)
2	Permainan Bilyar, Golf, Bowling	10.000.000,00	2.755.000,00	27,55	1.804.800,00	950.200,00
3	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan	25.000.000,00	18.311.000,00	73,24	24.953.000,00	(6.642.000,00)
4	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness)	5.000.000,00	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Pajak Reklame</b>	<b>555.600.000,00</b>	<b>291.129.480,00</b>	<b>52,40</b>	<b>323.121.920,00</b>	<b>(31.992.440,00)</b>
1	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	425.600.000,00	204.471.680,00	48,04	264.852.420,00	(60.380.740,00)
2	Reklame Kain	115.000.000,00	81.265.800,00	70,67	54.255.000,00	27.010.800,00
3	Reklame Melekat/Stiker	10.000.000,00	5.392.000,00	53,92	4.014.500,00	1.377.500,00
4	Reklame Berjalan	5.000.000,00	-	-	-	-
<b>V</b>	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	<b>4.544.704.750,00</b>	<b>4.323.424.184,00</b>	<b>95,13</b>	<b>4.198.572.353,00</b>	<b>124.851.831,00</b>
1	Pajak Penerangan Jalan Dihilangkan Sendiri	4.544.704.750,00	4.323.424.184,00	95,13	4.198.572.353,00	124.851.831,00
<b>VI</b>	<b>Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	0,00	0,00			
<b>VII</b>	<b>Pajak Parkir</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>2,08</b>		
	Pajak Parkir	5.000.000,00	104.000,00	2,08		
<b>VIII</b>	<b>Pajak Air Tanah</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>16.905.000,00</b>	<b>84,53</b>	<b>13.230.000,00</b>	<b>3.675.000,00</b>
1	Pajak Air Tanah	20.000.000,00	16.905.000,00	84,53	13.230.000,00	3.675.000,00
<b>IX</b>	<b>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	<b>2.428.400.000,00</b>	<b>289.886.907,00</b>	<b>11,94</b>	<b>256.100.555,00</b>	<b>33.786.352,00</b>
1	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	2.428.400.000,00	289.886.907,00	11,94	256.100.555,00	33.786.352,00
<b>X</b>	<b>Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>503.878.809,00</b>	<b>50,39</b>	<b>628.617.296,00</b>	<b>(124.738.487,00)</b>
1	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	1.000.000.000,00	503.878.809,00	50,39	628.617.296,00	(124.738.487,00)
<b>XI</b>	<b>Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)</b>	<b>1.800.000.000,00</b>	<b>1.273.046.500,00</b>	<b>70,72</b>	<b>1.729.664.285,00</b>	<b>(456.617.785,00)</b>
1	BPHTB - Pemindahan Hak	1.800.000.000,00	1.273.046.500,00	70,72	1.729.664.285,00	(456.617.785,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.577.304.750,00</b>	<b>9.073.056.124,00</b>	<b>66,83</b>	<b>9.125.516.323,00</b>	<b>(52.564.199,00)</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN REALISASI RETRIBUSI DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REKENING	RETRIBUSI DAERAH	ANGGARAN TA 2024	REALISASI TA 2024	PERSENTASE %	REALISASI TA 2023
1	2	3	4	5 = (4 : 3) x 100	6
<b>4.1.02.01</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>3.410.922.000,00</b>	<b>451.754.000,00</b>	<b>13,24</b>	<b>554.173.500,00</b>
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	710.000.000,00	142.430.000,00	20,06	128.291.500,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	210.000.000,00	107.514.000,00	51,20	128.291.500,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	500.000.000,00	34.916.000,00	6,98	-
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.889.132.000,00	214.595.000,00	11,36	255.505.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.889.132.000,00	214.595.000,00	11,36	255.505.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	811.790.000,00	94.729.000,00	11,67	103.635.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	811.790.000,00	94.729.000,00	11,67	103.635.000,00
4.1.02.01.08	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	-	-	-	334.000,00
4.1.02.01.08.0005	Retribusi Penyediaan Peta Teknis (Struktur)	-	-	-	334.000,00
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-	66.408.000,00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-	66.408.000,00
<b>4.1.02.02</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>3.977.359.000,00</b>	<b>2.159.534.768,00</b>	<b>54,30</b>	<b>1.613.945.785,00</b>
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.456.400.000,00	1.301.852.768,00	89,39	706.542.285,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	429.400.000,00	765.104.500,00	178,18	149.177.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	20.000.000,00	19.000.000,00	95,00	-
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	1.007.000.000,00	517.748.268,00	51,41	557.365.285,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.780.606.000,00	504.054.000,00	28,31	564.782.500,00
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.780.606.000,00	504.054.000,00	28,31	564.782.500,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	-	-	-	121.646.000,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	-	-	-	121.646.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	400.700.000,00	100.538.000,00	25,09	29.700.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	400.700.000,00	100.538.000,00	25,09	29.700.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	88.804.000,00	8.925.000,00	10,05	13.375.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	88.804.000,00	8.925.000,00	10,05	13.375.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	250.849.000,00	244.165.000,00	97,34	177.900.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	250.849.000,00	244.165.000,00	97,34	177.900.000,00

<b>4.1.02.03</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>404.831.000,00</b>	<b>15.199.980,00</b>	<b>3,75</b>	<b>52.926.062,50</b>
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-	-	52.926.062,50
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	-	-	-	52.926.062,50
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	404.831.000,00	15.199.980,00	3,75	-
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	404.831.000,00	15.199.980,00	3,75	-
<b>JUMLAH</b>		<b>7.793.112.000,00</b>	<b>2.626.488.748,00</b>	<b>33,70</b>	<b>2.221.045.347,50</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN REALISASI PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN PER SUB RINCIAN OBJEK**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5=4/3*100
<b>4.1.04.15</b>	<b>PENDAPATAN DARI PENGEMBALIAN</b>	<b>5.400.781.000,00</b>	<b>2.851.521.474,84</b>	<b>52,80</b>
<b>4.1.04.15.03</b>	<b>Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan</b>	<b>0,00</b>	<b>257.157.191,56</b>	<b>-</b>
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0,00	257.157.191,56	-
<b>4.1.04.15.04</b>	<b>Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas</b>	<b>5.350.000.000,00</b>	<b>1.056.733.350,10</b>	<b>19,75</b>
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	200.000.000,00	1.056.733.350,10	528,37
4.1.04.15.04.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Tetap	5.150.000.000,00	0,00	-
<b>4.1.04.15.08</b>	<b>Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>50.781.000,00</b>	<b>58.025.765,40</b>	<b>114,27</b>
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	50.781.000,00	58.025.765,40	114,27
<b>4.1.04.15.15</b>	<b>Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang</b>	<b>-</b>	<b>34.220.275,79</b>	<b>-</b>
4.1.04.15.15.0024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	5.651.370,00	-
4.1.04.15.15.0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis- Makanan dan Minuman Rapat	-	28.568.905,79	-
4.1.04.15.15.0075	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis- Pakaian Batik Tradisional	-	-	-
<b>4.1.04.15.16</b>	<b>Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa</b>	<b>-</b>	<b>124.985.365,00</b>	<b>-</b>
4.1.04.15.16.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor- Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-
4.1.04.15.16.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor- Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	124.985.365,00	-
4.1.04.15.16.0061	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	-	-
4.1.04.15.16.0680	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan-Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	-	-	-
<b>4.1.04.15.17</b>	<b>Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan</b>	<b>-</b>	<b>10.446.279,00</b>	<b>-</b>
4.1.04.15.17.0079	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	-	10.446.279,00	-
4.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	-	-	-
4.1.04.15.17.0545	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Gedung Kantor	-	-	-

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5=4/3*100
<b>4.1.04.15.34</b>	<b>Pendapatan dari Pengembalian Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan</b>	-	<b>468.292.093,00</b>	-
4.1.04.15.34.0001	Pendapatan dari Pengembalian Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	-	468.292.093,00	-
<b>4.1.04.15.61</b>	<b>Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung</b>	-	<b>2.000.000,00</b>	-
4.1.04.15.61.0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	2.000.000,00	-
<b>4.1.04.15.65</b>	<b>Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan</b>	-	<b>798.279.106,43</b>	-
4.1.04.15.65.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kota	-	798.279.106,43	-
4.1.04.15.65.0014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan- Jembatan pada Jalan Kota	-	-	-
<b>4.1.04.15.84</b>	<b>Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa</b>	-	<b>41.382.048,56</b>	-
4.1.04.15.84.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa	-	41.382.048,56	-



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
 RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI DAK FISIK  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	SKPD PENGELOLA	JENIS - BIDANG SUBBIDANG	PAGU	NILAI KONTRAK	PENYALURAN	REALISASI PENYERAPAN	PENYERAPAN DANA	TENAGA KERJA	SISA DANA DI RKUD	CAPAIAN OUTPUT
<b>I</b>		<b>DAK Fisik Penugasan</b>								
1	DINAS PENDIDIKAN	PAUD	254.465.000,00	253.597.000,00	252.300.000,00	252.300.000,00	100,00%	12	-	100%
		SD	6.681.433.000,00	6.566.646.844,00	6.566.637.063,00	6.565.243.378,00	99,98%	161	1.393.685,00	100%
		SMP	2.694.195.000,00	2.649.199.400,00	2.649.198.900,00	2.648.197.900,00	99,96%	34	1.001.000,00	100%
		SKB	399.901.000,00	399.817.500,00	399.817.500,00	399.816.000,00	100,00%	0	1.500,00	100%
		<b>SUBTOTAL PENDIDIKAN</b>	<b>10.029.994.000,00</b>	<b>9.869.260.744,00</b>	<b>9.867.953.463,00</b>	<b>9.865.557.278,00</b>		<b>207</b>	<b>2.396.185,00</b>	
2	DINAS KESEHATAN	Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi, dan Intervensi Stunting	149.701.000,00	136.750.000,00	136.750.000,00	136.750.000,00	100,00%	0	-	100%
		Penguatan Sistem Kesehatan	19.831.738.000,00	19.628.278.176,00	19.628.278.176,00	19.624.427.325,00	99,98%	0	3.850.851,00	100%
		<b>SUBTOTAL DINKES</b>	<b>19.981.439.000,00</b>	<b>19.765.028.176,00</b>	<b>19.765.028.176,00</b>	<b>19.761.177.325,00</b>		<b>0</b>	<b>3.850.851,00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>30.011.433.000,00</b>	<b>29.634.288.920,00</b>	<b>29.632.981.639,00</b>	<b>29.626.734.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207</b>	<b>6.247.036,00</b>	



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
REALISASI PENDAPATAN DANA BOS  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA SEKOLAH	ALOKASI			JUMLAH
		TAHAP I	TAHAP II	KINERJA	
1	2	3	4	6	7 = 3 : 6
<b>SMP Negeri dan SD Negeri</b>					
1	SMP NEGERI 01 SUNGAI PENUH	304.150.000,00	304.150.000,00	25.000.000,00	633.300.000,00
2	SMP NEGERI 02 SUNGAI PENUH	383.350.000,00	383.349.771,00	35.000.000,00	801.699.771,00
3	SMP NEGERI 03 SUNGAI PENUH	194.150.000,00	194.150.000,00	25.000.000,00	413.300.000,00
4	SMP NEGERI 04 SUNGAI PENUH	188.100.000,00	188.100.000,00	35.000.000,00	411.200.000,00
5	SMP NEGERI 05 SUNGAI PENUH	23.100.000,00	23.100.000,00	-	46.200.000,00
6	SMP NEGERI 06 SUNGAI PENUH	74.800.000,00	74.800.000,00	35.000.000,00	184.600.000,00
7	SMP NEGERI 07 SUNGAI PENUH	62.700.000,00	62.700.000,00	25.000.000,00	150.400.000,00
8	SMP NEGERI 08 SUNGAI PENUH	387.200.000,00	387.200.000,00	35.000.000,00	809.400.000,00
9	SMP NEGERI 09 SUNGAI PENUH	123.750.000,00	123.750.000,00	35.000.000,00	282.500.000,00
10	SMP NEGERI 10 SUNGAI PENUH	17.050.000,00	17.050.000,00	35.000.000,00	69.100.000,00
11	SMP NEGERI 11 SUNGAI PENUH	90.200.000,00	90.200.000,00	-	180.400.000,00
12	SMP NEGERI 12 SUNGAI PENUH	67.100.000,00	67.099.878,00	-	134.199.878,00
13	SMP NEGERI 13 SUNGAI PENUH	28.050.000,00	28.050.000,00	35.000.000,00	91.100.000,00
14	SD NEGERI 001XI SUNGAI PENUH	148.050.000,00	148.050.000,00	25.000.000,00	321.100.000,00
15	SD NEGERI 002XI PASAR SUNGAI PENUH	101.250.000,00	101.250.000,00	25.000.000,00	227.500.000,00
16	SD NEGERI 003XI AUR DURI	28.800.000,00	28.800.000,00	-	57.600.000,00
17	SD NEGERI 004XI PELAYANG RAYA	141.300.000,00	141.300.000,00	25.000.000,00	307.600.000,00
18	SD NEGERI 005XI KEL. SUNGAI PENUH	44.550.000,00	44.550.000,00	-	89.100.000,00
19	SD NEGERI 006XI AUR DURI	16.650.000,00	16.650.000,00	-	33.300.000,00
20	SD NEGERI 007XI SUMUR ANYIR	22.500.000,00	22.500.000,00	-	45.000.000,00
21	SD NEGERI 008XI KEL. PASAR SUNGAI PENUH	44.100.000,00	44.100.000,00	45.000.000,00	133.200.000,00
22	SD NEGERI 009XI KEL. PASAR SUNGAI PENUH	41.400.000,00	41.400.000,00	-	82.800.000,00
23	SD NEGERI 010XI PONDOK AGUNG	55.800.000,00	55.800.000,00	-	111.600.000,00
24	SD NEGERI 011XI DESA GEDANG	186.750.000,00	186.750.000,00	25.000.000,00	398.500.000,00
25	SD NEGERI 012XI KELL. DUSUN BARU	6.750.000,00	6.750.000,00	-	13.500.000,00
26	SD NEGERI 013XI SUMUR ANYIR	17.550.000,00	17.550.000,00	-	35.100.000,00
27	SD NEGERI 014XI PELAYANG RAYA	22.950.000,00	22.950.000,00	-	45.900.000,00
28	SD NEGERI 015XI LAWANG AGUNG	99.450.000,00	99.450.000,00	25.000.000,00	223.900.000,00
29	SD NEGERI 016XI TALANG LINDUNG	9.450.000,00	9.450.000,00	22.500.000,00	41.400.000,00
30	SD NEGERI 017XI SUNGAI NING	20.250.000,00	20.242.500,00	22.500.000,00	62.992.500,00
31	SD NEGERI 018XI KARYA BAKTI	24.750.000,00	24.750.000,00	-	49.500.000,00
32	SD NEGERI 019XI SUNGAI JERNIH	13.050.000,00	13.050.000,00	-	26.100.000,00
33	SD NEGERI 020XI KOTO LEBU	38.700.000,00	38.700.000,00	-	77.400.000,00

NO	NAMA SEKOLAH	ALOKASI			JUMLAH
		TAHAP I	TAHAP II	KINERJA	
1	2	3	4	6	7 = 3 : 6
34	SD NEGERI 021XI LAWANG AGUNG	118.800.000,00	118.800.000,00	-	237.600.000,00
35	SD NEGERI 022XI SUMUR ANYIR	22.050.000,00	22.050.000,00	45.000.000,00	89.100.000,00
36	SD NEGERI 023XI AUR DURI	21.600.000,00	21.600.000,00	-	43.200.000,00
37	SD NEGERI 024XI KEL. DUSUN BARU	9.450.000,00	9.450.000,00	22.500.000,00	41.400.000,00
38	SD NEGERI 025XI DESA GEDANG	109.350.000,00	109.350.000,00	-	218.700.000,00
39	SD NEGERI 026XI CEMPAKA	27.450.000,00	27.450.000,00	-	54.900.000,00
40	SD NEGERI 027XI KAMPUNG DIILIR	20.250.000,00	20.250.000,00	-	40.500.000,00
41	SD NEGERI 028XI TANJUNG	47.250.000,00	47.250.000,00	-	94.500.000,00
42	SD NEGERI 029XI CEMPAKA	53.100.000,00	53.100.000,00	-	106.200.000,00
43	SD NEGERI 030XI KOTO DIAN	36.450.000,00	36.450.000,00	-	72.900.000,00
44	SD NEGERI 031XI KAMPUNG DALAM	36.450.000,00	36.450.000,00	22.500.000,00	95.400.000,00
45	SD NEGERI 032XI SIMPANG TIGA RAWANG	45.900.000,00	45.900.000,00	-	91.800.000,00
46	SD NEGERI 033XI TANJUNG MUDA	33.300.000,00	33.300.000,00	22.500.000,00	89.100.000,00
47	SD NEGERI 034XI KOTO TELUK	24.750.000,00	24.750.000,00	-	49.500.000,00
48	SD NEGERI 035XI LARIK KEMAHAN	22.950.000,00	22.950.000,00	-	45.900.000,00
49	SD NEGERI 036XI PALING SERUMPUN	29.250.000,00	29.250.000,00	-	58.500.000,00
50	SD NEGERI 037XI KOTO KERAS	43.650.000,00	43.650.000,00	22.500.000,00	109.800.000,00
51	SD NEGERI 038XI KOTO LOLO	75.600.000,00	75.600.000,00	-	151.200.000,00
52	SD NEGERI 039XI SUNGAI LIUK	17.550.000,00	17.550.000,00	22.500.000,00	57.600.000,00
53	SD NEGERI 040XI KOTO LIMAU MANIS	71.550.000,00	71.268.000,00	-	142.818.000,00
54	SD NEGERI 041XI KAMPUNG TENGAH	36.450.000,00	36.450.000,00	-	72.900.000,00
55	SD NEGERI 042XI SEBERANG	51.750.000,00	51.750.000,00	-	103.500.000,00
56	SD NEGERI 043XI KOTO RENAH	128.250.000,00	128.250.000,00	-	256.500.000,00
57	SD NEGERI 044XI KOTO BENTO	12.150.000,00	12.150.000,00	-	24.300.000,00
58	SD NEGERI 045XI KOTO DUA	66.600.000,00	66.600.000,00	-	133.200.000,00
59	SD NEGERI 046XI KOTO TENGAH	39.150.000,00	39.150.000,00	-	78.300.000,00
60	SD NEGERI 047XI KOTO BARU	64.800.000,00	64.800.000,00	25.000.000,00	154.600.000,00
61	SD NEGERI 048XI KOTO LOLO	-	-	-	-
62	SD NEGERI 049XI DEBAI	10.350.000,00	10.350.000,00	-	20.700.000,00
63	SD NEGERI 050XI KUMUN HILIR	59.850.000,00	59.850.000,00	-	119.700.000,00
64	SD NEGERI 051XI KUMUN MUDIK	34.200.000,00	34.200.000,00	22.500.000,00	90.900.000,00
65	SD NEGERI 052XI ULU AIR	40.950.000,00	40.950.000,00	-	81.900.000,00
66	SD NEGERI 053XI AIR TELUH	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	67.500.000,00
67	SD NEGERI 054XI MUARA AIR	18.900.000,00	18.900.000,00	-	37.800.000,00
68	SD NEGERI 055XI PINGGIR AIR	26.100.000,00	26.100.000,00	-	52.200.000,00
69	SD NEGERI 056XI KUMUN MUDIK	5.400.000,00	5.400.000,00	-	10.800.000,00
70	SD NEGERI 057XI KUMUN MUDIK	31.950.000,00	31.950.000,00	-	63.900.000,00

NO	NAMA SEKOLAH	ALOKASI			JUMLAH
		TAHAP I	TAHAP II	KINERJA	
1	2	3	4	6	7 = 3 : 6
71	SD NEGERI 058XI KOTO DUMO	62.550.000,00	62.550.000,00	25.000.000,00	150.100.000,00
72	SD NEGERI 059XI KOTO PUDUNG	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	67.500.000,00
73	SD NEGERI 060XI PENDUNG HIANG	36.900.000,00	36.900.000,00	22.500.000,00	96.300.000,00
74	SD NEGERI 061XI KOTO PANAP	26.550.000,00	26.550.000,00	-	53.100.000,00
75	SD NEGERI 062XI KOTO BARU	18.450.000,00	18.450.000,00	-	36.900.000,00
76	SD NEGERI 063XI KOTO PADANG	51.300.000,00	51.300.000,00	-	102.600.000,00
77	SD NEGERI 064XI KOTO TUO	27.000.000,00	27.000.000,00	-	54.000.000,00
78	SD NEGERI 065XI DESA BARU DEBAI	9.450.000,00	9.450.000,00	-	18.900.000,00
79	SD NEGERI 066XI TANJUNG BUNGA	20.700.000,00	20.700.000,00	22.500.000,00	63.900.000,00
80	SD NEGERI 067XI KOTO TENGAH	13.500.000,00	13.500.000,00	-	27.000.000,00
81	SD NEGERI 068/XI RENAH KAYU EMBUN	9.900.000,00	9.900.000,00	-	19.800.000,00
80	SD NEGERI 069/XI KAMPUNG TENGAH	12.600.000,00	12.600.000,00	-	25.200.000,00
81	SD NEGERI 070/XI PERTIWI	84.600.000,00	84.600.000,00	25.000.000,00	194.200.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>4.939.800.000,00</b>	<b>4.939.510.149,00</b>	<b>880.000.000,00</b>	<b>10.759.310.149,00</b>
<b>SMP Swasta dan SD Swasta</b>					
1	SMP IT AMANAH SUNGAI PENUH	133.650.000,00	133.650.000,00	-	267.300.000,00
2	SMP AL MADANI	17.600.000,00	17.600.000,00	-	35.200.000,00
3	SD ISLAM TERPADU AMANAH SUNGAI PENUH	221.400.000,00	221.400.000,00	-	442.800.000,00
4	SD PLUS MUHAMMADIYAH	114.300.000,00	114.300.000,00	-	228.600.000,00
5	SD IT AL FIKRI SUNGAI PENUH	72.000.000,00	72.000.000,00	-	144.000.000,00
5	SD ISLAM MUTIARA AL MADANI	207.000.000,00	207.000.000,00	25.000.000,00	439.000.000,00
6	SD LUKMANUL HAKIM	93.600.000,00	-	-	93.600.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>859.550.000,00</b>	<b>765.950.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>1.650.500.000,00</b>
<b>JUMLAH TOTAL PENDAPATAN BOS</b>		<b>5.799.350.000,00</b>	<b>5.705.460.149,00</b>	<b>905.000.000,00</b>	<b>12.409.810.149,00</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**REKAPITULASI BELANJA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase %
<b>I</b>	<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>873.022.658.196,00</b>	<b>810.277.392.176,98</b>	<b>92,81</b>
<b>I.I</b>	<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>622.394.393.057,00</b>	<b>575.431.748.993,52</b>	<b>92,45</b>
I.I.1	5.1.01	Belanja Pegawai	373.842.812.743,00	348.426.234.322,10	93,20
I.I.2	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	229.983.205.254,00	208.745.596.558,42	90,77
I.I.2.1	5.1.02.01	Belanja Barang	41.315.722.042,64	38.573.958.629,00	93,36
I.I.2.2	5.1.02.02	Belanja Jasa	68.953.630.478,50	65.689.120.369,00	95,27
I.I.2.3	5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	894.955.200,00	866.637.139,00	96,84
I.I.2.4	5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	56.725.017.382,86	55.479.271.185,34	97,80
I.I.2.5	5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/PihakLain/Masyarakat	2.242.287.000,00	1.769.057.936,00	78,90
I.I.2.6	5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	9.471.323.150,00	9.401.800.732,21	99,27
I.I.2.7	5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	219.700.000,00	184.572.000,00	84,01
I.I.2.8	5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	50.160.570.000,00	36.781.178.567,87	73,33
I.I.3	5.1.04	Belanja Subsidi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
I.I.4	5.1.05	Belanja Hibah	18.268.375.060,00	17.959.918.113,00	98,31
I.I.5	5.1.06	Bantuan Sosial	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
<b>I.II</b>	<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>140.675.429.934,00</b>	<b>129.528.810.236,46</b>	<b>92,08</b>
I.II.1	5.2.01	Belanja Modal Tanah	461.229.500,00	364.792.231,20	79,09
I.II.2	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	38.280.235.111,00	29.164.581.067,00	76,19
I.II.3	5.2.03	Belanja Modal dan Bangunan	35.891.327.249,00	34.969.287.253,47	97,43
I.II.4	5.2.04	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	55.067.426.209,00	54.674.175.128,72	99,29
I.II.5	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.175.211.865,00	10.355.974.556,07	101,78
I.II.6	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	800.000.000,00	-	-
<b>I.III</b>	<b>5.3</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>2.333.881.689,00</b>	<b>1.187.186.916,00</b>	<b>50,87</b>
<b>i.IV</b>	<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>107.618.953.516,00</b>	<b>104.129.646.031,00</b>	<b>96,76</b>



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
RINCIAN REALISASI BELANJA PEGAWAI TA. 2024 PER SKPD

NO	UNIT ORGANISASI	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	NAIK / (TURUN)
1	2	3	4	5 = (4 : 3) x 100	6	7 = 4 - 6
1	DINAS PENDIDIKAN	117.959.020.123,00	111.774.989.039,00	94,76	103.070.280.839,00	8.704.708.200,00
2	DINAS KESEHATAN	94.538.819.326,00	86.289.833.462,00	91,27	6.501.091.993,00	79.788.741.469,00
3	PUSKESMAS SUNGAI PENUH	411.680.000,00	399.710.218,00	97,09	4.164.969.214,60	(3.765.258.996,60)
4	PUSKESMAS HAMPARAN RAWANG	595.860.000,00	580.615.969,00	97,44	3.902.770.578,00	(3.322.154.609,00)
5	PUSKESMAS KUMUN DEBAI	461.173.272,00	451.370.492,00	97,87	4.744.904.694,00	(4.293.534.202,00)
6	PUSKESMAS DESA GEDANG	326.337.778,00	321.758.847,40	98,60	3.528.007.673,40	(3.206.248.826,00)
7	PUSKESMAS TANAH KAMPUNG	395.856.063,00	384.174.342,00	97,05	3.444.769.619,00	(3.060.595.277,00)
8	PUSKESMAS KOTO BARU	356.250.000,00	349.277.236,40	98,04	3.275.594.017,40	(2.926.316.781,00)
9	PUSKESMAS SUNGAI BUNGKAL	182.072.095,00	181.982.095,00	99,95	186.013.671,00	(4.031.576,00)
10	PUSKESMAS SUNGAI LIUK	191.626.039,00	193.302.281,00	100,87	2.148.910.946,00	(1.955.608.665,00)
11	PUSKESMAS KOTO LOLO	267.215.000,00	262.030.290,20	98,06	2.257.567.367,00	(1.995.537.076,80)
12	PUSKESMAS PONDOK TINGGI	327.390.000,00	324.807.556,00	99,21	3.156.542.051,00	(2.831.734.495,00)
13	PUSKESMAS TANJUNG	158.631.540,00	157.058.420,20	99,01	158.195.535,00	(1.137.114,80)
14	INSTALASI FARMASI	54.960.000,00	54.960.000,00	100,00	730.254.368,00	(675.294.368,00)
15	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	42.840.000,00	42.840.000,00	100,00	46.560.000,00	(3.720.000,00)
16	RUMAH SAKIT H. BAKRI	95.810.000,00	88.400.000,00	92,27	7.407.816.109,00	(7.319.416.109,00)
17	RSUD MAYJEN H. A. THALIB	6.948.482.158,00	444.430.000,00	6,40	22.607.779.561,00	(22.163.349.561,00)
18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.882.370.645,00	6.851.148.900,00	99,55	5.838.452.149,00	1.012.696.751,00
19	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3.155.895.385,00	2.971.611.708,00	94,16	3.125.945.389,00	(154.333.681,00)
20	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.396.412.739,00	2.357.349.391,00	98,37	2.116.525.965,00	240.823.426,00
21	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	1.813.157.444,00	1.793.906.654,00	98,94	1.660.365.256,00	133.541.398,00
22	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.954.419.543,00	3.917.902.035,00	99,08	3.668.603.116,00	249.298.919,00
23	DINAS SOSIAL	2.416.104.865,00	2.402.338.190,00	99,43	2.476.771.267,00	(74.433.077,00)
24	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.638.927.036,00	2.606.724.417,00	98,78	2.349.954.805,00	256.769.612,00
25	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.833.787.472,00	2.809.044.824,00	99,13	2.842.335.827,00	(33.291.003,00)
26	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.751.784.288,00	3.733.322.993,00	99,51	3.523.190.044,00	210.132.949,00
27	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.913.973.879,00	2.876.591.846,00	98,72	2.705.006.128,00	171.585.718,00
28	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.350.569.473,00	2.327.424.050,00	99,02	2.264.569.535,00	62.854.515,00
29	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.094.568.926,00	2.065.912.243,00	98,63	2.131.838.330,00	(65.926.087,00)
30	DINAS PERHUBUNGAN	2.299.734.695,00	2.291.063.246,00	99,62	2.115.274.514,00	175.788.732,00
31	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	2.756.699.836,00	2.600.223.936,00	94,32	2.546.366.435,00	53.857.501,00
32	DINAS KOPERASI DAN UKM	2.987.598.635,00	2.946.278.012,00	98,62	2.778.783.571,00	167.494.441,00
33	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA	3.096.806.055,00	3.016.763.612,00	97,42	2.976.197.195,00	40.566.417,00
34	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.886.505.374,00	2.838.499.344,00	98,34	2.810.617.360,00	27.881.984,00
35	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	3.743.816.368,00	3.718.450.160,00	99,32	3.894.121.012,00	(175.670.852,00)
36	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.923.884.171,00	3.770.704.376,00	96,10	3.410.991.245,00	359.713.131,00
37	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	10.704.283.420,00	10.357.178.968,00	96,76	10.049.454.659,00	307.724.309,00
38	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	3.493.203.756,00	3.427.281.845,00	98,11	3.434.641.632,00	(7.359.787,00)
39	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	4.226.263.611,00	4.177.002.106,00	98,83	3.669.161.274,00	507.840.832,00
40	BAGIAN UMUM	-	-	0,00	-	0,00
41	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	2.400.000,00	0,00
42	BAGIAN HUKUM	-	-	0,00	-	0,00
43	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	0,00	-	0,00
44	BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	2.400.000,00	1.600.000,00
45	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	2.400.000,00	0,00
46	BAGIAN KEUANGAN	12.554.694.111,00	11.561.777.660,00	92,09	10.457.338.673,00	1.104.438.987,00
47	BAGIAN ORGANISASI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-	1.600.000,00
48	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	-	-	0,00	-	0,00
49	SEKRETARIAT DPRD	15.504.091.873,00	14.790.267.900,90	95,40	14.510.314.465,00	279.953.435,90
50	KECAMATAN SUNGAI PENUH	3.511.980.505,00	3.458.723.513,00	98,48	3.173.665.427,00	285.058.086,00
51	KECAMATAN PESISIR BUKIT	1.777.669.776,00	1.720.285.230,00	96,77	1.559.220.199,00	161.065.031,00
52	KECAMATAN HAMPARAN RAWANG	1.745.139.175,00	1.716.574.533,00	98,36	1.845.996.254,00	(129.421.721,00)
53	KECAMATAN KUMUN DEBAI	2.383.777.202,00	2.355.145.506,00	98,80	2.066.184.758,00	288.960.748,00
54	KECAMATAN TANAH KAMPUNG	2.284.047.445,00	2.125.062.626,00	93,04	2.064.776.050,00	60.286.576,00
55	KECAMATAN PONDOK TINGGI	2.548.521.252,00	2.500.442.894,00	98,11	2.321.815.568,00	178.627.326,00
56	KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL	3.040.636.671,00	2.843.810.945,00	93,53	2.895.721.085,00	(51.910.140,00)
57	KECAMATAN KOTO BARU	1.746.936.416,00	1.607.683.691,00	92,03	1.240.712.741,00	366.970.950,00
58	KELURAHAN SUNGAI PENUH	46.605.000,00	39.005.000,00	83,69	46.605.000,00	(7.600.000,00)
59	KELURAHAN PONDOK TINGGI	35.425.000,00	34.200.000,00	96,54	32.625.000,00	1.575.000,00
60	KELURAHAN DUSUN BARU	46.150.000,00	46.150.000,00	100,00	36.730.000,00	9.420.000,00
61	KELURAHAN PASAR SUNGAI PENUH	49.320.000,00	41.100.000,00	83,33	36.000.000,00	5.100.000,00
62	INSPEKTORAT DAERAH	6.798.708.759,00	6.662.695.031,00	98,00	5.999.574.227,00	663.120.804,00
63	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.580.076.966,00	4.525.507.000,00	98,81	4.246.142.697,00	279.364.303,00
64	BADAN KEUANGAN DAERAH	5.135.317.788,00	5.013.528.789,00	97,63	4.791.197.128,00	222.331.661,00
65	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPKD)	-	-	0,00	-	0,00

Lampiran 10.a  
 LK Pemerintah Kota Sungai Penuh  
 TA. 2024

NO	UNIT ORGANISASI	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	NAIK / (TURUN)
1	2	3	4	$5 = (4 : 3) \times 100$	6	$7 = 4 - 6$
66	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	5.061.481.100,00	4.966.495.952,00	98,12	4.252.949.393,00	713.546.559,00
67	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2.229.235.363,00	2.200.957.444,00	98,73	2.045.770.276,00	155.187.168,00
68	KANTOR KESBANGPOL	2.117.807.331,00	2.048.157.503,00	96,71	2.001.750.483,00	46.407.020,00
<b>JUMLAH</b>		<b>373.842.812.743,00</b>	<b>348.426.234.322,10</b>	<b>93,20</b>	<b>309.353.484.368,40</b>	<b>39.072.749.953,70</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**BELANJA PEGAWAI PER SUB RINCIAN OBJEK**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE %
	<b>5.1.01</b>	<b>BELANJA PEGAWAI</b>	<b>373.842.812.743,00</b>	<b>348.426.234.322,10</b>	<b>93,20</b>
<b>I</b>	<b>5.1.01.01</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>249.210.620.734,00</b>	<b>227.448.330.364,00</b>	<b>91,27</b>
1	5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	151.927.036.616,00	149.212.383.648,00	98,21
2	5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	35.549.207.027,00	24.271.281.136,00	68,28
3	5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	13.244.663.143,00	13.144.016.658,00	99,24
4	5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.894.918.480,00	1.909.531.414,00	65,96
5	5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.871.330.950,00	5.796.760.000,00	98,73
6	5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10.188.995.110,00	10.146.254.000,00	99,58
7	5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.525.248.852,00	1.459.670.000,00	95,70
8	5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	2.438.985.000,00	1.431.050.000,00	58,67
9	5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	7.481.206.121,00	7.387.339.755,00	98,75
10	5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	1.995.635.700,00	1.392.636.600,00	69,78
11	5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	462.572.886,00	388.428.283,00	83,97
12	5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5.849.695,00	1.956.729,00	33,45
13	5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	15.278.313,00	512.255,00	3,35
14	5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.672.307.982,00	8.377.813.028,00	78,50
15	5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.401.256.746,00	1.074.595.409,00	44,75
16	5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	342.682.862,00	314.559.390,00	91,79
17	5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	569.120.603,00	55.838.162,00	9,81
18	5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	949.372.638,00	916.193.453,00	96,51
19	5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	674.952.010,00	167.510.444,00	24,82
<b>II</b>	<b>5.1.01.02</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>72.042.207.452,00</b>	<b>71.195.332.146,00</b>	<b>98,82</b>
1	5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	69.767.207.452,00	69.275.269.130,00	99,29
2	5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.275.000.000,00	1.920.063.016,00	84,40
<b>III</b>	<b>5.1.01.03</b>	<b>Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>39.326.510.787,00</b>	<b>37.442.922.047,20</b>	<b>95,21</b>
1	5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	0,00	0,00	
2	5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan	0,00	0,00	
1	5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	28.940.194.000,00	27.317.719.300,00	94,39
2	5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.963.961.787,00	2.897.717.747,20	97,77
3	5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	6.703.710.000,00	6.533.635.000,00	97,46
4	5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	
5	5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBj)	126.345.000,00	103.000.000,00	81,52
6	5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	24.600.000,00	24.600.000,00	100,00
6	5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	567.700.000,00	566.250.000,00	99,74
<b>IV</b>	<b>5.1.01.04</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD</b>	<b>11.546.771.220,00</b>	<b>11.191.743.787,90</b>	<b>96,93</b>
1	5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00	560.070.000,00	99,74
2	5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	21.000.000,00	19.168.800,00	91,28
3	5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	25.347.000,00	20.567.280,00	81,14
4	5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	60.636.270,00	47.985.000,00	79,14
5	5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00	812.101.500,00	99,74
6	5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	105.509.250,00	75.363.733,00	71,43
6	5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	96.343.800,00	0,00	-
7	5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00	100,00
8	5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	472.500.000,00	315.000.000,00	66,67
9	5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	238.816.928,00	227.203.356,50	95,14
10	5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.640.790.784,00	3.607.799.118,40	99,09
11	5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.443.000.004,00	3.442.500.000,00	99,99
12	5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	177.054.184,00	173.985.000,00	98,27
<b>V</b>	<b>5.1.01.05</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH</b>	<b>543.272.550,00</b>	<b>172.639.977,00</b>	<b>31,78</b>
1	5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	410.611.430,00	55.723.000,00	13,57

NO	REKENING	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	PERSENTASE %
2	5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	14.296.600,00	5.483.840,00	38,36
3	5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.800.000,00	98.280.000,00	97,50
4	5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.483.280,00	6.517.800,00	87,10
5	5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.840.000,00	692.267,00	37,62
6	5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.400,00	655,00	46,79
7	5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	7.679.840,00	5.482.353,00	71,39
8	5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	140.000,00	115.016,00	82,15
9	5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	420.000,00	345.046,00	82,15
<b>VI</b>	<b>5.1.01.06</b>	<b>Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH</b>	<b>635.200.000,00</b>	<b>473.616.000,00</b>	<b>74,56</b>
1	5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	235.200.000,00	77.616.000,00	33,00
2	5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	396.000.000,00	99,00
<b>VII</b>	<b>5.1.01.88</b>	<b>Belanja Pegawai BOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1	5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	
<b>VIII</b>	<b>5.1.01.89</b>	<b>Belanja Pegawai BOSP</b>	<b>10.800.000,00</b>	<b>57.220.000,00</b>	<b>529,81</b>
	<b>5.1.01.89.02</b>	Belanja Pegawai BOSP-BOP PAUD	10.800.000,00	57.220.000,00	529,81
<b>IX</b>	<b>5.1.01.99</b>	<b>Belanja Pegawai BLUD</b>	<b>527.430.000,00</b>	<b>444.430.000,00</b>	<b>84,26</b>
1	5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	527.430.000,00	444.430.000,00	84,26



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN REALISASI BELANJA BARANG DAN JASA TA. 2024 PER SKPD**

NO	UNIT ORGANISASI	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	NAIK / (TURUN)
1	2	3	4	$5 = (4 : 3) \times 100$	6	$7 = 4 - 6$
1	DINAS PENDIDIKAN	17.649.186.173,00	17.387.232.271,21	98,52	12.620.004.659,39	4.767.227.611,82
2	DINAS KESEHATAN	12.514.170.883,00	11.720.436.628,00	93,66	11.546.998.885,34	173.437.742,66
3	PUSKESMAS SUNGAI PENUH	857.067.307,00	809.856.555,00	94,49	755.936.532,00	53.920.023,00
4	PUSKESMAS HAMPARAN RAWANG	1.496.753.181,00	1.368.038.871,00	91,40	1.466.115.779,00	(98.076.908,00)
5	PUSKESMAS KUMUN DEBAI	1.355.162.451,00	1.100.301.439,00	81,19	1.241.843.184,00	(141.541.745,00)
6	PUSKESMAS DESA GEDANG	968.871.745,00	947.049.717,00	97,75	934.352.330,00	12.697.387,00
7	PUSKESMAS TANAH KAMPUNG	1.434.102.673,00	1.186.796.664,10	82,76	1.327.334.236,00	(140.537.571,90)
8	PUSKESMAS KOTO BARU	1.175.187.808,00	1.006.072.334,00	85,61	1.106.428.572,00	(100.356.238,00)
9	PUSKESMAS SUNGAI BUNGKAL	932.956.600,00	747.280.918,00	80,10	790.661.668,00	(43.380.750,00)
10	PUSKESMAS SUNGAI LIUK	851.297.385,00	871.822.454,24	102,41	828.329.254,50	43.493.199,74
11	PUSKESMAS KOTO LOLO	930.409.077,00	887.461.151,00	95,38	805.299.483,00	82.161.668,00
12	PUSKESMAS PONDOK TINGGI	1.087.601.240,00	911.929.603,00	83,85	740.487.033,00	171.442.570,00
13	PUSKESMAS TANJUNG	681.331.900,00	558.581.737,00	81,98	539.027.198,76	19.554.538,24
14	INSTALASI FARMASI	2.085.810.637,00	2.062.730.097,00	98,89	1.691.867.613,00	370.862.484,00
15	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	257.160.000,00	221.286.493,00	86,05	172.744.342,00	48.542.151,00
16	RUMAH SAKIT H. BAKRI	804.712.880,00	725.028.080,00	90,10	676.727.168,00	48.300.912,00
17	RSUD MAYJEN H. A. THALIB	50.160.570.000,00	36.781.178.567,87	73,33	42.792.294.958,02	(6.011.116.390,15)
18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.534.339.029,00	6.376.431.886,00	97,58	18.086.754.851,29	(11.710.322.965,29)
19	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	8.064.005.106,00	8.040.217.403,00	99,71	8.157.955.058,50	(117.737.655,50)
20	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.822.375.800,00	2.768.106.214,00	98,08	2.985.874.653,00	(217.768.439,00)
21	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	3.935.532.000,00	3.801.073.425,00	96,58	3.717.539.507,00	83.533.918,00
22	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.715.106.000,00	2.639.628.015,00	97,22	2.663.436.500,00	(23.808.485,00)
23	DINAS SOSIAL	2.002.933.400,00	1.941.390.976,00	96,93	1.975.498.287,00	(34.107.311,00)
24	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.608.290.600,00	1.573.404.996,00	97,83	1.768.577.517,00	(195.172.521,00)
25	DINAS KETAHANAN PANGAN	873.349.000,00	861.620.366,00	98,66	869.717.601,00	(8.097.235,00)
26	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7.996.339.800,00	7.871.929.763,00	98,44	8.059.635.807,00	(187.706.044,00)
27	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	953.312.000,00	946.093.237,00	99,24	952.181.858,00	(6.088.621,00)
28	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.657.349.800,00	2.567.477.529,00	96,62	2.949.878.884,00	(382.401.355,00)
29	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.229.774.000,00	3.157.232.668,00	97,75	3.083.076.225,00	74.156.443,00
30	DINAS PERHUBUNGAN	2.069.642.000,00	1.976.971.766,00	95,52	2.026.470.403,00	(49.498.637,00)
31	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	3.351.175.600,00	3.307.080.170,00	98,68	3.239.836.891,00	67.243.279,00
32	DINAS KOPERASI DAN UKM	1.256.664.000,00	1.231.865.798,00	98,03	1.225.338.013,00	6.527.785,00
33	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA	1.471.806.000,00	1.359.568.573,00	92,37	1.615.383.702,00	(255.815.129,00)
34	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.071.953.322,00	1.996.664.267,00	96,37	3.317.867.673,00	(1.321.203.406,00)
35	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1.152.190.000,00	1.132.591.769,00	98,30	1.713.789.176,00	(581.197.407,00)
36	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	729.630.000,00	714.835.759,00	97,97	848.130.160,00	(133.294.401,00)
37	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNYAN	2.214.217.308,00	2.174.310.512,00	98,20	2.153.257.520,00	21.052.992,00
38	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	1.260.327.400,00	1.253.376.391,00	99,45	1.310.446.477,00	(57.070.086,00)
39	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	2.967.411.000,00	2.915.897.640,00	98,26	3.130.708.542,00	(214.810.902,00)
40	BAGIAN UMUM	10.256.852.914,00	10.038.551.337,00	97,87	10.507.284.132,00	(468.732.795,00)
41	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	773.164.480,00	700.533.180,00	90,61	849.809.524,00	(149.276.344,00)
42	BAGIAN HUKUM	1.201.753.520,00	1.184.127.200,00	98,53	1.357.227.788,00	(173.100.588,00)
43	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.101.885.280,00	4.306.464.400,00	84,41	5.232.247.898,00	(925.783.498,00)
44	BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	1.157.188.246,00	1.109.527.094,00	95,88	1.321.121.513,00	(211.594.419,00)
45	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER	1.120.670.960,00	1.118.923.055,00	99,84	1.353.566.838,00	(234.643.783,00)
46	BAGIAN KEUANGAN	644.968.160,00	629.168.516,00	97,55	750.209.958,00	(121.041.442,00)
47	BAGIAN ORGANISASI	619.066.320,00	606.744.006,00	98,01	623.182.684,00	(16.438.678,00)
48	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	714.599.120,00	710.784.246,00	99,47	763.057.685,00	(52.273.439,00)
49	SEKRETARIAT DPRD	24.797.306.990,00	23.543.912.782,00	94,95	27.353.138.652,50	(3.809.225.870,50)
50	KECAMATAN SUNGAI PENUH	468.270.000,00	507.881.710,00	108,46	587.731.813,00	(79.850.103,00)
51	KECAMATAN PESISIR BUKIT	446.320.000,00	420.116.117,00	94,13	461.861.709,00	(41.745.592,00)
52	KECAMATAN HAMPARAN RAWANG	644.780.000,00	440.129.561,00	68,26	487.216.169,00	(47.086.608,00)
53	KECAMATAN KUMUN DEBAI	466.595.000,00	413.106.596,00	88,54	491.873.003,00	(78.766.407,00)
54	KECAMATAN TANAH KAMPUNG	465.040.000,00	425.039.169,00	91,40	485.001.180,00	(59.962.011,00)
55	KECAMATAN PONDOK TINGGI	464.035.000,00	459.269.886,00	98,97	514.033.889,00	(54.764.003,00)
56	KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL	460.600.000,00	438.341.730,00	95,17	478.296.727,00	(39.954.997,00)
57	KECAMATAN KOTO BARU	458.024.600,00	396.120.796,00	86,48	480.646.644,00	(84.525.848,00)
58	KELURAHAN SUNGAI PENUH	453.395.000,00	381.820.869,00	84,21	249.842.764,00	131.978.105,00
59	KELURAHAN PONDOK TINGGI	464.575.000,00	392.123.891,00	84,40	258.795.139,00	133.328.752,00
60	KELURAHAN DUSUN BARU	435.190.000,00	406.766.122,00	93,47	246.999.295,00	159.766.827,00
61	KELURAHAN PASAR SUNGAI PENUH	422.680.000,00	392.425.250,00	92,84	261.677.050,00	130.748.200,00
62	INSPEKTORAT DAERAH	2.339.781.200,00	2.339.668.198,00	100,00	2.650.530.886,00	(310.862.688,00)
63	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	4.799.252.000,00	4.136.074.087,00	86,18	4.342.043.249,00	(205.969.162,00)
64	BADAN KEUANGAN DAERAH	7.323.734.701,00	7.227.437.259,00	98,69	7.747.472.994,00	(520.035.735,00)
65	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	3.562.323.000,00	3.485.249.175,00	97,84	3.558.762.616,00	(73.513.441,00)
67	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	802.991.000,00	799.637.377,00	99,58	917.555.373,00	(117.917.996,00)
68	BADAN KESBANGPOL	1.938.087.658,00	1.834.800.246,00	94,67	1.073.646.814,00	761.153.432,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>229.983.205.254,00</b>	<b>208.745.596.558,42</b>	<b>90,77</b>	<b>231.292.642.188,30</b>	<b>(22.547.045.629,88)</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
BELANJA BARANG DAN JASA PER SUB RINCIAN OBJEK  
TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
<b>5.1.02</b>	<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>	<b>229.983.205.254,00</b>	<b>208.745.596.558,42</b>	<b>90,77</b>
<b>5.1.02.01</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>41.315.722.042,64</b>	<b>38.573.958.629,00</b>	<b>93,36</b>
<b>5.1.02.01.01</b>	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>	<b>40.964.569.242,64</b>	<b>38.224.160.629,00</b>	<b>93,31</b>
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	706.146.000,00	618.973.977,00	87,66
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	106.286.430,00	104.204.305,00	98,04
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.487.262.381,64	6.091.312.647,00	93,90
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	322.056.000,00	321.981.000,00	99,98
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	33.468.600,00	32.638.800,00	97,52
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	37.572.000,00	37.572.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	695.963.360,00	675.069.480,00	97,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.963.804.600,00	1.929.749.004,00	98,27
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	12.000.000,00	11.917.029,00	99,31
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.800.167.517,00	1.750.357.484,00	97,23
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.685.475.412,00	1.658.759.854,00	98,41
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.641.107.851,00	4.358.270.812,00	93,91
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	258.378.780,00	251.150.000,00	97,20
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	948.328.300,00	924.499.570,00	97,49
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	592.020.900,00	580.832.200,00	98,11
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	113.621.100,00	113.299.100,00	99,72
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	460.632.600,00	436.557.600,00	94,77
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	328.714.000,00	300.634.000,00	91,46
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	611.169.412,00	602.081.776,00	98,51
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	2.409.533.249,00	2.326.271.221,00	96,54
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	827.405.000,00	707.395.400,00	85,50
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	244.200.000,00	244.130.000,00	99,97
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.774.614.900,00	1.697.276.508,00	95,64
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	17.790.000,00	17.790.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	12.200.000,00	12.200.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.914.567.000,00	1.689.888.680,00	88,26
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.663.762.900,00	5.354.830.982,00	94,55
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.188.249.000,00	440.130.500,00	37,04
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	33.707.000,00	25.328.000,00	75,14
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	103.880.000,00	102.000.000,00	98,19
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	239.500.000,00	239.500.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	162.483.000,00	160.426.000,00	98,73
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	2.738.078.650,00	2.731.827.000,00	99,77
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	300.389.700,00	289.466.600,00	96,36
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	204.185.600,00	203.997.100,00	99,91
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	31.575.000,00	31.575.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	50.880.000,00	50.880.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	24.750.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	739.633.000,00	622.254.000,00	84,13
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	475.510.000,00	473.633.000,00	99,61
<b>5.1.02.01.02</b>	<b>Belanja Barang Tak Habis Pakai</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	0,00	0,00	-
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	0,00	0,00	0,00
<b>5.1.02.01.04</b>	<b>Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi</b>	<b>351.152.800,00</b>	<b>349.798.000,00</b>	<b>99,61</b>
5.1.02.01.04.0025	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	124.418.000,00	124.298.000,00	99,90
5.1.02.01.04.0047	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	3.000.000,00	2.940.000,00	98,00

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	4.264.000,00	4.260.000,00	99,91
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya [(],Home Use],	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
5.1.02.01.04.0132	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
5.1.02.01.04.0133	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00
5.1.02.01.04.0134	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Gambar	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
5.1.02.01.04.0406	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	72.770.800,00	72.600.000,00	99,77
5.1.02.01.04.0411	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	6.400.000,00	6.400.000,00	100,00
5.1.02.01.04.0510	Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	61.200.000,00	60.200.000,00	98,37
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>	<b>68.953.630.478,50</b>	<b>65.689.120.369,00</b>	<b>95,27</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>58.911.927.227,50</b>	<b>56.022.497.064,00</b>	<b>95,10</b>
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.766.540.000,00	2.204.080.000,00	79,67
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.881.987.000,00	6.476.502.500,00	94,11
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	5.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	21.450.000,00	21.450.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	841.937.500,00	828.002.500,00	98,34
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	1.419.600.000,00	1.364.020.000,00	96,08
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	631.600.000,00	628.600.000,00	99,53
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	2.056.100.000,00	1.981.648.294,00	96,38
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.756.420.000,00	2.395.027.877,00	86,89
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	538.400.000,00	538.400.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	778.000.000,00	760.025.000,00	97,69
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	34.400.000,00	34.400.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	326.400.000,00	307.200.000,00	94,12
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	953.600.000,00	942.400.000,00	98,83
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	45.000.000,00	44.400.000,00	98,67
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	69.300.000,00	68.850.000,00	99,35
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	22.575.000,00	19.825.000,00	87,82
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	4.732.700.000,00	4.661.710.000,00	98,50
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.250.045.000,00	3.219.435.000,00	99,06
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	865.100.000,00	860.295.000,00	99,44
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	1.989.890.000,00	1.924.840.000,00	96,73
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	6.688.128.000,00	6.677.121.800,00	99,84
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.653.440.000,00	2.608.040.000,00	98,29
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	989.740.000,00	832.220.000,00	84,08
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	89.150.000,00	88.150.000,00	98,88
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	1.186.860.000,00	1.186.835.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	70.000.000,00	64.700.000,00	92,43
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	760.000,00	760.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.195.760.000,00	1.172.290.000,00	98,04
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.924.360.000,00	2.717.798.171,00	92,94
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	299.600.000,00	299.600.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	154.050.000,00	125.400.000,00	81,40
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	425.000.000,00	425.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	759.040.000,00	722.019.456,00	95,12
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	44.200.000,00	38.845.594,00	87,89
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	439.922.415,50	353.202.070,00	80,29
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.956.644.652,00	3.846.667.349,00	97,22
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.709.843.700,00	1.614.614.682,00	94,43
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	61.175.000,00	28.397.800,00	46,42
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	405.684.960,00	323.242.075,00	79,68

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	3.612.684.000,00	3.378.246.200,00	93,51
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	99.840.000,00	78.235.696,00	78,36
<b>5.1.02.02.02</b>	<b>Belanja luran Jaminan/Asuransi</b>	<b>6.960.073.600,00</b>	<b>6.955.666.984,00</b>	<b>99,94</b>
5.1.02.02.02.0003	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	6.781.282.400,00	6.781.282.400,00	100,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	94.080.000,00	94.080.000,00	100,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	72.356.900,00	67.966.181,00	93,93
5.1.02.02.02.0012	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	12.354.300,00	12.338.403,00	99,87
<b>5.1.02.02.03</b>	<b>Belanja Sewa Tanah</b>	<b>61.200.000,00</b>	<b>61.200.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.1.02.02.03.0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	61.200.000,00	61.200.000,00	100,00
<b>5.1.02.02.04</b>	<b>Belanja Sewa Peralatan dan Mesin</b>	<b>1.210.001.651,00</b>	<b>1.047.729.416,00</b>	<b>86,59</b>
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	196.400.000,00	130.800.000,00	66,60
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	8.100.000,00	8.100.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	2.713.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	445.740.500,00	394.582.300,00	88,52
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	86.092.200,00	76.641.200,00	89,02
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	237.600.000,00	233.250.000,00	98,17
5.1.02.02.04.0124	Belanja Sewa Alat Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	7.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	219.055.951,00	197.055.916,00	89,96
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	2.300.000,00	2.300.000,00	100,00
<b>5.1.02.02.05</b>	<b>Belanja Sewa Gedung dan Bangunan</b>	<b>1.599.728.000,00</b>	<b>1.393.129.905,00</b>	<b>87,09</b>
5.1.02.02.05.0007	Belanja Sewa Bangunan Oseanarium/Observatorium	90.000.000,00	66.255.405,00	73,62
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	567.903.000,00	473.380.000,00	
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	46.100.000,00	46.000.000,00	99,78
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	827.925.000,00	739.694.500,00	89,34
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00
<b>5.1.02.02.06</b>	<b>Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
5.1.02.02.06.0103	Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	0,00	0,00	-
<b>5.1.02.02.07</b>	<b>Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
5.1.02.02.07.0028	Belanja Sewa Alat Musik	0,00	0,00	-
<b>5.1.02.02.08</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>58.397.000,00</b>	<b>97,33</b>
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	0,00	0,00	-
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	0,00	0,00	-
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	60.000.000,00	58.397.000,00	97,33
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	0,00	0,00	-
<b>5.1.02.02.09</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>79.800.000,00</b>	<b>99,75</b>
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Kota	80.000.000,00	79.800.000,00	99,75
5.1.02.02.09.0015	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	0,00	0,00	-
<b>5.1.02.02.12</b>	<b>Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan</b>	<b>51.950.000,00</b>	<b>51.950.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	51.950.000,00	51.950.000,00	100,00
<b>5.1.02.02.13</b>	<b>Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas</b>	<b>18.750.000,00</b>	<b>18.750.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.1.02.02.13.0001	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	18.750.000,00	18.750.000,00	100,00
<b>5.1.02.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>894.955.200,00</b>	<b>866.637.139,00</b>	<b>96,84</b>
<b>5.1.02.03.02</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>512.297.500,00</b>	<b>496.347.505,00</b>	<b>96,89</b>
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	0,00	0,00	-
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	0,00	0,00	-
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	0,00	0,00	-
5.1.02.03.02.0032	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Peralatan SAR Mountenering	0,00	0,00	-

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	20.000.000,00	19.800.970,00	99,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	122.837.500,00	121.671.535,00	99,05
5.1.02.03.02.0108	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing	0,00	0,00	-
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	184.510.000,00	172.325.000,00	93,40
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam	129.000.000,00	129.000.000,00	100,00
5.1.02.03.02.0129	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	55.450.000,00	53.050.000,00	95,67
5.1.02.03.02.0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	0,00	0,00	-
5.1.02.03.02.0248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	0,00	0,00	-
5.1.02.03.02.0347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratirum	500.000,00	500.000,00	100,00
<b>5.1.02.03.03</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>	<b>362.657.700,00</b>	<b>350.339.634,00</b>	<b>96,60</b>
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	311.500.000,00	300.078.380,00	96,33
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	31.157.700,00	30.270.157,00	97,15
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	20.000.000,00	19.991.097,00	99,96
<b>5.1.02.03.04</b>	<b>Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>19.950.000,00</b>	<b>99,75</b>
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	0,00	0,00	-
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	0,00	0,00	-
5.1.02.03.04.0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan P	0,00	0,00	-
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0,00	0,00	-
5.1.02.03.04.0051	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	20.000.000,00	19.950.000,00	99,75
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>56.725.017.382,86</b>	<b>55.479.271.185,34</b>	<b>97,80</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>	<b>56.725.017.382,86</b>	<b>55.479.271.185,34</b>	<b>97,80</b>
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49.067.321.550,86	48.265.607.385,34	98,37
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.417.325.832,00	7.021.158.800,00	94,66
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	240.370.000,00	192.505.000,00	80,09
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0,00	0,00	-
<b>5.1.02.05</b>	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>2.242.287.000,00</b>	<b>1.769.057.936,00</b>	<b>78,90</b>
<b>5.1.02.05.01</b>	<b>Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>2.198.632.000,00</b>	<b>1.727.157.000,00</b>	<b>78,56</b>
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	311.482.000,00	262.807.000,00	84,37
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	764.300.000,00	341.500.000,00	44,68
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	1.122.850.000,00	1.122.850.000,00	100,00
<b>5.1.02.05.02</b>	<b>Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>43.655.000,00</b>	<b>41.900.936,00</b>	<b>95,98</b>
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	43.655.000,00	41.900.936,00	99,99
<b>5.1.02.88</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BOS</b>	<b>9.471.323.150,00</b>	<b>9.401.800.732,21</b>	<b>99,27</b>
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	9.471.323.150,00	9.401.800.732,21	99,27
<b>5.1.02.89</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BOSP</b>	<b>219.700.000,00</b>	<b>184.572.000,00</b>	<b>84,01</b>
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	219.700.000,00	184.572.000,00	84,01
<b>5.1.02.99</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>	<b>50.160.570.000,00</b>	<b>36.781.178.567,87</b>	<b>73,33</b>
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	50.160.570.000,00	36.781.178.567,87	73,33



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 2024 PER SKPD**

(dalam rupiah)

NO	UNIT ORGANISASI	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	NAIK / TURUN
1	2	3	4	5 = (4 : 3) x 100	6	7 = 4 - 6
1	DINAS PENDIDIKAN	12.305.476.827,00	12.023.618.861,00	97,71	10.148.633.910,00	1.874.984.951,00
2	DINAS KESEHATAN	9.610.426.200,00	9.508.340.000,00	98,94	6.533.330.248,00	2.975.009.752,00
3	PUSKESMAS SUNGAI PENUH	9.955.000,00	9.955.000,00	100,00	0,00	9.955.000,00
4	PUSKESMAS HAMPARAN RAWANG	9.500.000,00	8.550.000,00	90,00	7.386.200,00	1.163.800,00
5	PUSKESMAS KUMUN DEBAI	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	26.384.200,00	(5.384.200,00)
6	PUSKESMAS DESA GEDANG	8.622.600,00	8.615.000,00	99,91	7.350.000,00	1.265.000,00
7	PUSKESMAS TANAH KAMPUNG	15.000.000,00	12.500.000,00	83,33	0,00	12.500.000,00
8	PUSKESMAS KOTO BARU	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-
11	PUSKESMAS KOTO LOLO	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	700.000,00	700.000,00
12	PUSKESMAS PONDOK TINGGI	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	4.000.000,00	13.000.000,00
13	PUSKESMAS TANJUNG	565.600,00	0,00	-	0,00	-
14	INSTALASI FARMASI	0,00	0,00	-	0,00	-
15	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	0,00	0,00	-	0,00	-
16	RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA	99.477.120,00	97.631.000,00	98,14	16.200.000,00	81.431.000,00
17	RSUD MAYJEN H. A. THALIB	22.048.169.970,00	12.147.793.561,09	55,10	9.368.287.630,00	2.779.505.931,09
18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	84.610.243.331,00	84.057.550.616,85	99,35	92.662.175.449,72	(8.604.624.832,87)
19	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	5.801.093.894,00	5.788.550.752,52	99,78	2.819.405.979,95	2.969.144.772,57
20	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	59.183.200,00	58.950.000,00	99,61	0,00	58.950.000,00
21	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	0,00	0,00	-	102.312.000,00	(102.312.000,00)
22	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	45.023.000,00	44.700.000,00	99,28	144.534.410,00	(99.834.410,00)
23	DINAS SOSIAL	58.970.600,00	58.900.000,00	99,88	224.066.000,00	(165.166.000,00)
24	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	98.458.400,00	97.064.000,00	98,58	29.080.000,00	67.984.000,00
25	DINAS KETAHANAN PANGAN	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	5.000.000,00
26	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	405.636.200,00	321.828.500,00	79,34	495.632.450,00	(173.803.950,00)
27	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	0,00	-	0,00	-
28	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	38.406.200,00	38.335.000,00	99,81	93.242.000,00	(54.907.000,00)
29	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0,00	0,00	-	32.240.000,00	(32.240.000,00)
30	DINAS PERHUBUNGAN	30.100.000,00	26.550.000,00	88,21	95.300.000,00	(68.750.000,00)
31	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	89.970.400,00	65.250.000,00	72,52	35.990.000,00	29.260.000,00
32	DINAS KOPERASI DAN UKM	0,00	0,00	-	47.900.000,00	(47.900.000,00)
33	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA	123.148.000,00	123.148.000,00	100,00	36.000.000,00	87.148.000,00
34	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	552.353.500,00	524.446.000,00	94,95	728.640.211,16	(204.194.211,16)
35	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	263.000.000,00	247.557.925,00	94,13	0,00	247.557.925,00
36	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7.700.000,00	5.000.000,00	64,94	1.008.832.700,00	(1.003.832.700,00)
37	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	193.651.692,00	193.055.000,00	99,69	180.284.750,00	12.770.250,00
38	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	460.744.600,00	458.359.800,00	99,48	0,00	458.359.800,00

NO	UNIT ORGANISASI	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	NAIK / TURUN
1	2	3	4	5 = (4 : 3) x 100	6	7 = 4 - 6
39	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	70.750.000,00	57.534.820,00	81,32	168.188.900,00	(110.654.080,00)
40	BAGIAN UMUM	691.200.000,00	691.150.000,00	99,99	1.860.070.000,00	(1.168.920.000,00)
41	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	67.932.000,00	(35.932.000,00)
42	BAGIAN HUKUM	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	31.333.900,00	(12.333.900,00)
43	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	0,00	0,00	-	0,00	-
44	BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	0,00	0,00	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)
45	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER	0,00	0,00	-	49.983.300,00	(49.983.300,00)
46	BAGIAN KEUANGAN	41.000.000,00	41.000.000,00	100,00	63.012.050,00	(22.012.050,00)
47	BAGIAN ORGANISASI	50.000.000,00	49.920.000,00	99,84	85.665.900,00	(35.745.900,00)
48	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.500.000,00	6.450.000,00	99,23	54.500.000,00	(48.050.000,00)
49	SEKRETARIAT DPRD	1.639.947.400,00	1.580.602.400,00	96,38	1.615.274.187,00	(34.671.787,00)
50	KECAMATAN SUNGAI PENUH	0,00	0,00	-	29.946.800,00	(29.946.800,00)
51	KECAMATAN PESISIR BUKIT	15.000.000,00	0,00	-	0,00	-
52	KECAMATAN HAMPARAN RAWANG	10.500.000,00	0,00	-	8.710.000,00	(8.710.000,00)
53	KECAMATAN KUMUN DEBAI	0,00	0,00	-	22.650.000,00	(22.650.000,00)
54	KECAMATAN TANAH KAMPUNG	0,00	0,00	-	6.223.200,00	(6.223.200,00)
55	KECAMATAN PONDOK TINGGI	0,00	0,00	-	0,00	-
56	KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL	0,00	0,00	-	25.197.000,00	(25.197.000,00)
57	KECAMATAN KOTO BARU	7.375.400,00	0,00	-	0,00	-
58	KELURAHAN SUNGAI PENUH	0,00	0,00	-	0,00	-
59	KELURAHAN PONDOK TINGGI	0,00	0,00	-	0,00	-
60	KELURAHAN DUSUN BARU	18.660.000,00	18.660.000,00	100,00	0,00	18.660.000,00
61	KELURAHAN PASAR SUNGAI PENUH	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	0,00	28.000.000,00
62	INSPEKTORAT DAERAH	34.607.800,00	34.395.000,00	99,39	74.776.000,00	(40.381.000,00)
63	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	61.499.000,00	61.499.000,00	100,00	262.290.000,00	(200.791.000,00)
64	BADAN KEUANGAN DAERAH	918.700.000,00	916.350.000,00	99,74	272.513.500,00	643.836.500,00
65	BADAN KEUANGAN DAERAH (SKPKD)	0,00	0,00	-	0,00	-
66	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	16.600.000,00	16.600.000,00	100,00	16.168.000,00	432.000,00
67	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	12.000.000,00	0,00	-	0,00	-
68	KANTOR KESBANGPOL	7.814.000,00	5.000.000,00	63,99	45.880.000,00	(40.880.000,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>140.675.429.934,00</b>	<b>129.528.810.236,46</b>	<b>92,08</b>	<b>129.618.222.875,83</b>	<b>(89.412.639,37)</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**REALISASI BELANJA MODAL TAHUN ANGGARAN 2024 PER REKENING**

NO	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>I</b>	<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>140.675.429.934,00</b>	<b>129.528.810.236,46</b>	<b>92,08</b>
<b>I.I</b>	<b>5.2.01</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>	<b>461.229.500,00</b>	<b>364.792.231,20</b>	<b>79,09</b>
1	5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	80.000.000,00	0,00	0,00
2	5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	381.229.500,00	364.792.231,20	95,69
<b>I.III</b>	<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>38.280.235.111,00</b>	<b>29.164.581.067,00</b>	<b>76,19</b>
1	5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	4.571.791.500,00	4.510.000.000,00	98,65
2	5.2.02.01.01.0010	Belanja Modal Alat Pengangkat	200.000.000,00	199.500.000,00	99,75
4	5.2.02.01.02.0002	Belanja Modal Floating Excavator	450.000.000,00	449.961.463,00	99,99
6	5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	3.551.700,00	3.549.000,00	99,92
7	5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	3.655.000,00	3.655.000,00	100,00
8	5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	610.000.000,00	610.000.000,00	100,00
9	5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.526.708.000,00	1.508.100.000,00	98,78
10	5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	579.600.000,00	577.180.000,00	99,58
12	5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	6.900.000.000,00	6.888.000.000,00	99,83
13	5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	4.700.000,00	4.650.000,00	98,94
18	5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	384.311.490,00	377.882.400,00	98,33
19	5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	499.720.000,00	499.708.000,00	100,00
21	5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	207.613.000,00	194.320.000,00	93,60
23	5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	93.875.000,00	93.735.000,00	99,85
24	5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	3.148.000,00	1.400.000,00	44,47
25	5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	166.329.700,00	151.964.000,00	91,36
26	5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	30.000.000,00	29.900.000,00	99,67
27	5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	198.654.800,00	157.465.000,00	79,27
28	5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	4.724.300,00	4.515.000,00	95,57
29	5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
30	5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	100.375.000,00	90.135.000,00	89,80
31	5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	506.000.000,00	504.450.000,00	99,69
32	5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.160.978.500,00	1.130.120.200,00	97,34
34	5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	134.798.100,00	116.988.800,00	86,79
36	5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat studio lainnya	79.550.000,00	75.940.000,00	95,46
37	5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	40.445.000,00	29.900.000,00	73,93
40	5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	6.469.545.376,00	6.352.366.650,00	98,19
41	5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	406.486.200,00	396.537.700,00	97,55
42	5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	56.925.000,00	56.870.000,00	99,90
43	5.2.02.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	399.901.000,00	399.817.500,00	99,98
45	5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	79.157.475,00	78.930.000,00	99,71
46	5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	100.000.000,00	99.972.500,00	99,97
51	5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	266.186.800,00	264.650.000,00	99,42
52	5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.179.790.000,00	1.069.233.000,00	90,63
45	5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	112.456.300,00	87.550.000,00	77,85
46	5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	204.030.900,00	160.990.500,00	78,90
47	5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	16.100.000,00	12.500.000,00	77,64
48	5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	11.550.000,00	11.550.000,00	100,00
51	5.2.02.88.88.88888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	624.488.000,00	455.140.720,00	72,88
52	5.2.02.99.99.99999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.863.088.970,00	1.475.453.634,00	14,96
<b>I.III</b>	<b>5.2.03</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>35.891.327.249,00</b>	<b>34.969.287.253,47</b>	<b>97,43</b>
1	5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	23.600.904.578,00	23.318.204.310,80	98,80
3	5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	4.024.449.377,00	4.016.833.862,43	99,81
4	5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	200.000.000,00	199.905.661,65	99,95
5	5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	3.500.000.000,00	3.465.849.720,15	99,02
6	5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	65.000.000,00	51.794.820,00	79,68
7	5.2.03.01.01.0015	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan	210.764.200,00	208.502.000,00	98,93
8	5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	783.000.000,00	780.764.491,62	99,71
6	5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	2.507.209.094,00	2.503.514.786,82	99,85
7	5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	200.000.000,00	199.935.000,00	99,97
8	5.2.03.99.99.99999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	800.000.000,00	223.982.600,00	28,00
<b>I.IV</b>	<b>5.2.04</b>	<b>Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan</b>	<b>55.067.426.209,00</b>	<b>54.674.175.128,72</b>	<b>99,29</b>
1	5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	19.269.671.065,00	19.149.749.816,10	99,38
2	5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	1.649.945.500,00	1.647.785.024,11	99,87

NO	KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
3	5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	4.942.837.050,00	4.928.819.058,63	99,72
4	5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	2.214.651.372,00	2.211.297.416,71	99,85
5	5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	5.629.911.408,00	5.627.100.045,41	99,95
6	5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	13.688.398.617,00	13.522.851.386,78	98,79
7	5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	5.477.410.197,00	5.468.319.474,04	99,83
8	5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.086.750.000,00	1.067.861.956,94	98,26
8	5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1.000.000.000,00	942.540.000,00	94,25
9	5.2.04.04.01.0001	Belanja Modal Jaringan Pembawa	107.851.000,00	107.850.950,00	100,00
<b>I.V</b>	<b>5.2.05</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>10.975.211.865,00</b>	<b>10.355.974.556,07</b>	<b>94,36</b>
1	5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	2.700.000,00	0,00	0,00
2	5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	960.808.015,00	953.331.605,00	99,22
3	5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	8.512.415.000,00	8.499.248.351,07	99,85
1	5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	699.288.850,00	903.394.600,00	129,19
1	5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	800.000.000,00	0,00	0,00



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN REALISASI BELANJA MODAL TANAH TA. 2024 DAN PERUNTUKANNYA**

NO	PERUNTUKAN	SKPD	LOKASI	LUAS (M2)	ANGGARAN	JUMLAH (Rp)	KET
<b>Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja</b>					<b>80.000.000,00</b>	<b>-</b>	
1	Penanganan sampah	Dinas Lingkungan Hidup		-	<b>80.000.000,00</b>	-	-
<b>Belanja Modal Tanah Persil Lainnya</b>					<b>381.229.500,00</b>	<b>364.792.231,20</b>	
2	Pembangunan Embung Dan Penampung Air Lainnya Dinas	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			<b>181.229.500,00</b>	<b>130.323.500,00</b>	
3	Jasa Penilai Harga Tanah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kec. Koto Baru			<b>49.610.806,20</b>	
4	Pengadaan Tanah Objek Wisata Taman Bunga	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dusun Renah Jambu	<b>532 M2</b>		<b>106.400.000,00</b>	
5	Pemeliharaan Objek Wisata Taman Bunga	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata			<b>200.000.000,00</b>	<b>49.937.944,00</b>	
6	Pengadaan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				<b>28.519.981,00</b>	
<b>JUMLAH</b>				-	<b>461.229.500,00</b>	<b>364.792.231,20</b>	-



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN REALISASI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN**  
**TA. 2024 PER SKPD**

*(dalam rupiah)*

NO	UNIT ORGANISASI	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	NAIK / TURUN
1	2	3	4	$5 = \frac{(4 : 3) \times 100}{100}$	6	7 = 4 - 6
1	DINAS PENDIDIKAN	1.506.543.375,00	1.182.008.720,00	78,46	796.889.550,00	385.119.170,00
2	DINAS KESEHATAN	8.610.426.200,00	8.565.800.000,00	99,48	6.533.330.248,00	2.032.469.752,00
3	PUSKESMAS SUNGAI PENUH	9.955.000,00	9.955.000,00	100,00	-	9.955.000,00
4	PUSKESMAS HAMPARAN RAWANG	9.500.000,00	8.550.000,00	90,00	7.386.200,00	1.163.800,00
5	PUSKESMAS KUMUN DEBAI	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	26.384.200,00	(5.384.200,00)
6	PUSKESMAS DESA GEDANG	8.622.600,00	8.615.000,00	99,91	7.350.000,00	1.265.000,00
7	PUSKESMAS TANAH KAMPUNG	15.000.000,00	12.500.000,00	83,33	-	12.500.000,00
8	PUSKESMAS KOTO BARU	5.000.000,00	-	-	-	-
9	PUSKESMAS SUNGAI BUNGKAL	-	-	-	-	-
10	PUSKESMAS SUNGAI LIUK	-	-	-	-	-
11	PUSKESMAS KOTO LOLO	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	700.000,00	700.000,00
12	PUSKESMAS PONDOK TINGGI	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	4.000.000,00	13.000.000,00
13	PUSKESMAS TANJUNG	565.600,00	-	-	-	-
14	INSTALASI FARMASI	-	-	-	-	-
15	LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	-	-	-	-	-
16	RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA	99.477.120,00	97.631.000,00	98,14	16.200.000,00	81.431.000,00
17	RSUD MAYJEN H. A. THALIB	15.861.419.970,00	7.390.099.284,00	46,59	9.368.287.630,00	(1.978.188.346,00)
18	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	6.769.636.846,00	6.677.699.163,00	98,64	1.470.944.523,00	5.206.754.640,00
19	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	239.285.300,00	239.085.000,00	99,92	58.722.000,00	180.363.000,00
20	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	59.183.200,00	58.950.000,00	99,61	-	58.950.000,00
21	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	-	-	-	102.312.000,00	(102.312.000,00)
22	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	45.023.000,00	44.700.000,00	99,28	144.534.410,00	(99.834.410,00)
23	DINAS SOSIAL	58.970.600,00	58.900.000,00	99,88	224.066.000,00	(165.166.000,00)
24	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	98.458.400,00	97.064.000,00	98,58	29.080.000,00	67.984.000,00
25	DINAS KETAHANAN PANGAN	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	5.000.000,00
26	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	325.636.200,00	321.828.500,00	98,83	423.752.450,00	(101.923.950,00)
27	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-	-	-	-
28	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	38.406.200,00	38.335.000,00	99,81	93.242.000,00	(54.907.000,00)
29	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-	-	32.240.000,00	(32.240.000,00)
30	DINAS PERHUBUNGAN	30.100.000,00	26.550.000,00	88,21	95.300.000,00	(68.750.000,00)
31	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	89.970.400,00	65.250.000,00	72,52	35.990.000,00	29.260.000,00
32	DINAS KOPERASI DAN UKM	-	-	-	47.900.000,00	(47.900.000,00)
33	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA	123.148.000,00	123.148.000,00	100,00	36.000.000,00	87.148.000,00
34	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	552.353.500,00	524.446.000,00	94,95	2.604.011,16	521.841.988,84
35	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	63.000.000,00	62.700.000,00	99,52	0,00	62.700.000,00
36	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	796.724.000,00	(791.724.000,00)

NO	UNIT ORGANISASI	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	NAIK / TURUN
1	2	3	4	$5 = (4 : 3) \times 100$	6	7 = 4 - 6
37	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	-	-	-	-	-
38	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	-	-	-	-	-
39	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	5.750.000,00	5.740.000,00	99,83	106.225.000,00	(100.485.000,00)
40	BAGIAN UMUM	691.200.000,00	691.150.000,00	99,99	1.735.560.000,00	(1.044.410.000,00)
41	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	67.932.000,00	(35.932.000,00)
42	BAGIAN HUKUM	19.000.000,00	19.000.000,00	100,00	31.333.900,00	(12.333.900,00)
43	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	-	-	-	-
44	BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	-	-	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)
45	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER	-	-	-	49.983.300,00	(49.983.300,00)
46	BAGIAN KEUANGAN	41.000.000,00	41.000.000,00	100,00	63.012.050,00	(22.012.050,00)
47	BAGIAN ORGANISASI	50.000.000,00	49.920.000,00	99,84	85.665.900,00	(35.745.900,00)
48	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	6.500.000,00	6.450.000,00	99,23	54.500.000,00	(48.050.000,00)
49	SEKRETARIAT DPRD	1.639.947.400,00	1.580.602.400,00	96,38	1.615.274.187,00	(34.671.787,00)
50	KECAMATAN SUNGAI PENUH	0,00	-	-	29.946.800,00	(29.946.800,00)
51	KECAMATAN PESISIR BUKIT	15.000.000,00	-	-	0,00	-
52	KECAMATAN HAMPARAN RAWANG	10.500.000,00	-	-	8.710.000,00	(8.710.000,00)
53	KECAMATAN KUMUN DEBAI	-	-	-	22.650.000,00	(22.650.000,00)
54	KECAMATAN TANAH KAMPUNG	-	-	-	6.223.200,00	(6.223.200,00)
55	KECAMATAN PONDOK TINGGI	-	-	-	-	-
56	KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL	-	-	-	25.197.000,00	(25.197.000,00)
57	KECAMATAN KOTO BARU	7.375.400,00	-	-	-	-
58	KELURAHAN SUNGAI PENUH	-	-	-	-	-
59	KELURAHAN PONDOK TINGGI	-	-	-	-	-
60	KELURAHAN DUSUN BARU	18.660.000,00	18.660.000,00	100,00	-	18.660.000,00
61	KELURAHAN PASAR SUNGAI PENUH	28.000.000,00	28.000.000,00	100,00	-	28.000.000,00
62	INSPEKTORAT DAERAH	34.607.800,00	34.395.000,00	99,39	74.776.000,00	(40.381.000,00)
63	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	61.499.000,00	61.499.000,00	100,00	231.810.000,00	(170.311.000,00)
64	BADAN KEUANGAN DAERAH	918.700.000,00	916.350.000,00	99,74	272.513.500,00	643.836.500,00
65	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	16.600.000,00	16.600.000,00	100,00	16.168.000,00	432.000,00
66	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	12.000.000,00	-	-	-	-
67	KANTOR KESBANGPOL	2.814.000,00	-	-	45.880.000,00	(45.880.000,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>38.280.235.111,00</b>	<b>29.164.581.067,00</b>	<b>76,19</b>	<b>24.907.300.059,16</b>	<b>4.257.281.007,84</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN REALISASI BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN PER SUB RINCIAN OBJEK**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>5.2.02</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>38.280.235.111,00</b>	<b>29.164.581.067,00</b>	<b>76,19</b>
<b>5.2.02.01</b>	<b>Belanja Modal Alat Besar</b>	<b>5.838.998.200,00</b>	<b>5.776.665.463,00</b>	<b>98,93</b>
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	4.571.791.500,00	4.510.000.000,00	98,65
5.2.02.01.01.0010	Belanja Modal Alat Pengangkat	200.000.000,00	199.500.000,00	99,75
5.2.02.01.02.0002	Belanja Modal Floating Excavator	450.000.000,00	449.961.463,00	99,99
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	3.551.700,00	3.549.000,00	99,92
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	3.655.000,00	3.655.000,00	100,00
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	610.000.000,00	610.000.000,00	100,00
<b>5.2.02.02</b>	<b>Belanja Modal Alat Angkutan</b>	<b>9.011.008.000,00</b>	<b>8.977.930.000,00</b>	<b>99,63</b>
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.526.708.000,00	1.508.100.000,00	98,78
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	579.600.000,00	577.180.000,00	99,58
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	6.900.000.000,00	6.888.000.000,00	99,83
5.2.02.02.02.0004	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	4.700.000,00	4.650.000,00	98,94
<b>5.2.02.05</b>	<b>Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga</b>	<b>1.718.751.290,00</b>	<b>1.631.024.400,00</b>	<b>94,90</b>
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	384.311.490,00	377.882.400,00	98,33
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	499.720.000,00	499.708.000,00	100,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	207.613.000,00	194.320.000,00	93,60
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	93.875.000,00	93.735.000,00	99,85
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	3.148.000,00	1.400.000,00	44,47
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	166.329.700,00	151.964.000,00	91,36
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	30.000.000,00	29.900.000,00	99,67
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	198.654.800,00	157.465.000,00	79,27
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	4.724.300,00	4.515.000,00	0,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	100.375.000,00	90.135.000,00	89,80
<b>5.2.02.06</b>	<b>Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar</b>	<b>1.921.771.600,00</b>	<b>1.857.399.000,00</b>	<b>96,65</b>
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	506.000.000,00	504.450.000,00	99,69
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	1.160.978.500,00	1.130.120.200,00	97,34
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	134.798.100,00	116.988.800,00	86,79
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat studio lainnya	79.550.000,00	75.940.000,00	95,46
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	40.445.000,00	29.900.000,00	73,93
<b>5.2.02.07</b>	<b>Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan</b>	<b>6.469.545.376,00</b>	<b>6.352.366.650,00</b>	<b>98,19</b>
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	6.469.545.376,00	6.352.366.650,00	98,19
<b>5.2.02.08</b>	<b>Belanja Modal Alat Laboratorium</b>	<b>1.042.469.675,00</b>	<b>1.032.127.700,00</b>	<b>99,01</b>
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	406.486.200,00	396.537.700,00	97,55
5.2.02.08.03.0005	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:IPA Menengah	56.925.000,00	56.870.000,00	99,90
5.2.02.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	399.901.000,00	399.817.500,00	99,98
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	79.157.475,00	78.930.000,00	99,71
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	100.000.000,00	99.972.500,00	99,97
<b>5.2.02.10</b>	<b>Belanja Modal Komputer</b>	<b>1.762.464.000,00</b>	<b>1.582.423.500,00</b>	<b>89,78</b>
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	266.186.800,00	264.650.000,00	99,42
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.179.790.000,00	1.069.233.000,00	90,63
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	112.456.300,00	87.550.000,00	77,85
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	204.030.900,00	160.990.500,00	78,90

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>5.2.02.15</b>	<b>Belanja Modal Alat Keselamatan Bekerja</b>	<b>16.100.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>77,64</b>
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	16.100.000,00	12.500.000,00	77,64
<b>5.2.02.18</b>	<b>Belanja Modal Rambu-Rambu</b>	<b>11.550.000,00</b>	<b>11.550.000,00</b>	<b>100,00</b>
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	11.550.000,00	11.550.000,00	100,00
<b>5.2.05.88</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS</b>	<b>624.488.000,00</b>	<b>455.140.720,00</b>	<b>72,88</b>
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	624.488.000,00	455.140.720,00	72,88
<b>5.2.02.99</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD</b>	<b>9.863.088.970,00</b>	<b>1.475.453.634,00</b>	<b>14,96</b>
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	9.863.088.970,00	1.475.453.634,00	14,96



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
REALISASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN  
TA. 2024 PER SKPD**

*(dalam rupiah)*

NO	UNIT ORGANISASI	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	NAIK / TURUN
1	2	3	4	5 = (4 : 3) x 100	6	7 = 4 - 6
1	DINAS PENDIDIKAN	10.099.644.602,00	9.938.215.541,00	98,40	7.629.798.960,00	2.308.416.581,00
2	RSUD MAYJEN H. A. THALIB	4.300.000.000,00	3.689.832.320,15	85,81	0,00	3.689.832.320,15
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	17.286.925.953,00	17.162.154.993,91	99,28	21.156.086.970,04	(3.993.931.976,13)
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	3.674.012.094,00	3.663.929.778,41	99,73	2.379.923.752,02	1.284.006.026,39
5	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	460.744.600,00	458.359.800,00	99,48	0,00	458.359.800,00
6	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	65.000.000,00	51.794.820,00	79,68	61.963.900,00	(10.169.080,00)
7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0,00	0,00	-	30.480.000,00	(30.480.000,00)
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0,00	5.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>35.891.327.249,00</b>	<b>34.969.287.253,47</b>	<b>97,43</b>	<b>31.258.253.582,06</b>	<b>3.711.033.671,41</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**REALISASI BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN PER SUB RINCIAN OBJEK**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>5.2.03</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>35.891.327.249,00</b>	<b>34.969.287.253,47</b>	<b>97,43</b>
<b>5.2.03.01</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>	<b>34.891.327.249,00</b>	<b>34.545.369.653,47</b>	<b>99,01</b>
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	23.600.904.578,00	23.318.204.310,80	98,80
5.2.03.01.01.0004	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	4.024.449.377,00	4.016.833.862,43	99,81
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	200.000.000,00	199.905.661,65	99,95
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	3.500.000.000,00	3.465.849.720,15	99,02
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	65.000.000,00	51.794.820,00	79,68
5.2.03.01.01.0015	Belanja Modal Bangunan Gedung Pemotong Hewan	210.764.200,00	208.502.000,00	98,93
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	783.000.000,00	780.764.491,62	99,71
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	2.507.209.094,00	2.503.514.786,82	99,85
<b>5.2.03.04</b>	<b>Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>199.935.000,00</b>	<b>99,97</b>
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	200.000.000,00	199.935.000,00	99,97
<b>5.2.03.99</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>223.982.600,00</b>	<b>28,00</b>
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	800.000.000,00	223.982.600,00	28,00



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**REALISASI BELANJA MODAL JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN**  
**TA. 2024 PER SKPD**

(dalam rupiah)

NO	UNIT ORGANISASI	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	NAIK / TURUN
1	2	3	4	5 = (4 : 3) x 100	6	7 = 4 - 6
1	DINAS KESEHATAN	1.000.000.000,00	942.540.000,00	94,25	0,00	942.540.000,00
2	RSUD MAYJEN H. A. THALIB	1.086.750.000,00	1.067.861.956,94	98,26	0,00	1.067.861.956,94
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	50.899.228.017,00	50.585.182.197,67	99,38	56.542.393.046,65	(5.957.210.848,98)
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.887.796.500,00	1.885.535.974,11	99,88	380.760.227,93	1.504.775.746,18
5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	-	71.880.000,00	(71.880.000,00)
6	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	193.651.692,00	193.055.000,00	99,69	180.284.750,00	12.770.250,00
<b>JUMLAH</b>		<b>55.067.426.209,00</b>	<b>54.674.175.128,72</b>	<b>99,29</b>	<b>57.175.318.024,58</b>	<b>(2.501.142.895,86)</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**REALISASI BELANJA MODAL JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN**  
**TA. 2024 PER SUB RINCIAN OBJEK**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>5.2.04</b>	<b>Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan</b>	<b>55.067.426.209,00</b>	<b>54.674.175.128,72</b>	<b>99,29</b>
<b>5.2.04.01</b>	<b>Belanja Modal Jalan dan Jembatan</b>	<b>25.862.453.615,00</b>	<b>25.726.353.898,84</b>	<b>99,47</b>
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	19.269.671.065,00	19.149.749.816,10	99,38
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	1.649.945.500,00	1.647.785.024,11	99,87
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	4.942.837.050,00	4.928.819.058,63	99,72
<b>5.2.04.02</b>	<b>Belanja Modal Bangunan Air</b>	<b>28.097.121.594,00</b>	<b>27.897.430.279,88</b>	<b>99,29</b>
5.2.04.02.01.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Irigasi	2.214.651.372,00	2.211.297.416,71	99,85
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	5.629.911.408,00	5.627.100.045,41	99,95
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	13.688.398.617,00	13.522.851.386,78	98,79
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	5.477.410.197,00	5.468.319.474,04	99,83
5.2.04.02.06.0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.086.750.000,00	1.067.861.956,94	98,26
<b>5.2.04.03</b>	<b>Belanja Modal Instalasi</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>942.540.000,00</b>	<b>94,25</b>
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	1.000.000.000,00	942.540.000,00	94,25
<b>5.2.04.04</b>	<b>Belanja Modal Jaringan</b>	<b>107.851.000,00</b>	<b>107.850.950,00</b>	<b>100,00</b>
5.2.04.04.01.0001	Belanja Modal Jaringan Pembawa	107.851.000,00	107.850.950,00	100,00



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN REALISASI BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA**  
**TA. 2024 PER SKPD**

(dalam rupiah)

NO	UNIT ORGANISASI	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023	NAIK / TURUN
1	2	3	4	5 = (4 : 3) x 100	6	7 = 4 - 6
1	DINAS PENDIDIKAN	699.288.850,00	903.394.600,00	129,19	1.721.945.400,00	(818.550.800,00)
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	9.473.223.015,00	9.452.579.956,07	99,78	12.693.578.049,14	(3.240.998.093,07)
3	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.700.000,00	0,00	0,00	212.108.700,00	(212.108.700,00)
4	BAGIAN UMUM	0,00	0,00	-	124.510.000,00	(124.510.000,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>10.175.211.865,00</b>	<b>10.355.974.556,07</b>	<b>101,78</b>	<b>14.752.142.149,14</b>	<b>(4.396.167.593,07)</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**REALISASI BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA**  
**TA. 2024 PER SUB RINCIAN OBJEK**

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
<b>5.2.05</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>10.175.211.865,00</b>	<b>10.355.974.556,07</b>	<b>101,78</b>
<b>5.2.05.01</b>	<b>Belanja Modal Bahan Perpustakaan</b>	<b>963.508.015,00</b>	<b>953.331.605,00</b>	<b>98,94</b>
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	2.700.000,00	0,00	0,00
5.2.05.01.01.0008	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	960.808.015,00	953.331.605,00	99,22
<b>5.2.05.07</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi</b>	<b>8.512.415.000,00</b>	<b>8.499.248.351,07</b>	<b>99,85</b>
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	8.512.415.000,00	8.499.248.351,07	99,85
<b>5.2.05.88</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS</b>	<b>699.288.850,00</b>	<b>903.394.600,00</b>	<b>129,19</b>
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	699.288.850,00	903.394.600,00	129,19



PEMERINTAH DAERAH KOTA SUNGAI PENUH  
RINCIAN TRANSFER BAGI HASIL KOTA SUNGAI PENUH  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KECAMATAN	DESA	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI BHPDRD TAHAP I DAN TAHAP II	%
				BHPDRD TAHAP I	BHPDRD TAHAP II		
1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8
1	Sungai Penuh	Gedang	14.851.075,60	8.910.645,00	5.940.431,00	14.851.076,00	100,00
2		Pasar Baru	30.447.143,00	18.268.286,00	12.178.857,00	30.447.143,00	100,00
3		Amar Sakti	11.074.716,00	6.644.830,00	4.429.886,00	11.074.716,00	100,00
4	Hampan Rawang	Kampung Diilir	11.276.816,35	6.766.090,00	4.510.726,00	11.276.816,00	100,00
5		Koto Beringin	11.818.429,67	7.091.058,00	4.727.372,00	11.818.430,00	100,00
6		Maliki Air	11.836.769,40	7.102.062,00	4.734.707,00	11.836.769,00	100,00
7		Tanjung	12.836.375,74	7.701.825,00	5.134.550,00	12.836.375,00	100,00
8		Koto Teluk	12.949.222,63	7.769.534,00	5.179.689,00	12.949.223,00	100,00
9		Kampung Dalam	12.604.887,56	7.562.933,00	5.041.955,00	12.604.888,00	100,00
10		Simpang Tiga Rawang	14.507.603,88	8.704.562,00	-	8.704.562,00	60,00
11		Larik Kemahan	12.247.046,86	7.348.228,00	4.898.819,00	12.247.047,00	100,00
12		Dusun Diilir	11.719.112,65	7.031.468,00	4.687.645,00	11.719.113,00	100,00
13		Paling Serumpun	32.644.178,63	19.586.507,00	13.057.671,00	32.644.178,00	100,00
14		Koto Dian	13.937.990,61	8.362.794,00	5.575.197,00	13.937.991,00	100,00
15		Tanjung Muda	13.418.251,76	6.820.992,00	6.597.260,00	13.418.252,00	100,00
16		Cempaka	11.197.311,89	6.718.387,00	4.478.925,00	11.197.312,00	100,00
17	Pesisir Bukit	Koto Renah	12.359.942,22	7.415.965,00	4.943.977,00	12.359.942,00	100,00
18		Koto Keras	12.353.530,35	-	-	-	-
19		Koto Bento	11.913.933,51	7.148.360,00	4.765.574,00	11.913.934,00	100,00
20		Koto Lolo	12.633.884,18	7.580.331,00	5.053.553,00	12.633.884,00	100,00
21		Koto Tengah	31.377.562,70	18.826.538,00	12.551.025,00	31.377.563,00	100,00
22		Koto Dua	31.738.708,20	19.043.225,00	12.695.483,00	31.738.708,00	100,00
23		Sungai Liuk	11.748.165,72	7.048.899,00	4.699.267,00	11.748.166,00	100,00
24		Seberang	12.118.515,38	7.271.109,00	4.847.406,00	12.118.515,00	100,00
25		Sumur Gedang	30.942.198,76	18.565.319,00	12.376.880,00	30.942.199,00	100,00
26	Kumun Debai	Kumun Mudik	12.696.937,32	7.618.162,00	5.078.775,00	12.696.937,00	100,00
27		Kumun Hilir	12.622.057,11	7.573.234,00	5.048.823,00	12.622.057,00	100,00
28		Air Teluh	11.863.574,94	7.118.145,00	4.745.430,00	11.863.575,00	100,00
29		Sandaran Galeh	32.446.182,13	19.467.709,00	12.978.473,00	32.446.182,00	100,00
30		Debai	11.640.245,75	6.984.147,00	4.656.099,00	11.640.246,00	100,00
31		Pinggir Air	11.659.687,07	6.995.812,00	4.663.875,00	11.659.687,00	100,00
32		Ulu Air	31.332.256,06	18.799.354,00	12.532.902,00	31.332.256,00	100,00
33		Renah Kayu Embun	12.719.542,17	7.631.725,00	5.087.817,00	12.719.542,00	100,00
34		Muara Jaya	12.465.771,90	7.479.463,00	4.986.309,00	12.465.772,00	100,00
35	Tanah Kampung	Baru Debai	11.403.620,79	6.842.172,00	4.561.448,00	11.403.620,00	100,00
36		Pendung Hiang	12.242.398,38	7.345.439,00	4.896.959,00	12.242.398,00	100,00
37		Koto Puduk	11.583.834,42	6.950.301,00	4.633.533,00	11.583.834,00	100,00
38		Sembilan	11.770.782,69	7.062.470,00	4.641.895,00	11.704.365,00	99,44
39		Koto Tuo	11.746.136,02	7.047.682,00	4.698.454,00	11.746.136,00	100,00
40		Koto Panap	11.368.934,68	6.821.361,00	4.547.574,00	11.368.935,00	100,00
41		Koto Tengah	11.288.316,51	6.772.990,00	4.515.327,00	11.288.317,00	100,00
42		Tanjung Bunga	11.723.402,01	7.034.041,00	4.689.361,00	11.723.402,00	100,00
43		Koto Padang	12.289.976,79	7.373.986,00	4.915.991,00	12.289.977,00	100,00
44		Tanjung Karang	11.242.396,55	6.745.438,00	4.496.959,00	11.242.397,00	100,00
45		Kt Br Tanah Kampung	11.636.129,89	6.981.678,00	4.654.452,00	11.636.130,00	100,00
46		Koto Durmo	31.624.747,59	18.974.849,00	12.649.899,00	31.624.748,00	100,00
47		Mekar Jaya	11.604.736,47	6.962.842,00	4.641.894,00	11.604.736,00	100,00
48	Sungai Bungkal	Sumur Anyir	31.779.806,18	19.067.884,00	12.711.922,00	31.779.806,00	100,00
49		Sungai Ning	31.397.399,50	18.838.440,00	12.558.960,00	31.397.400,00	100,00
50		Koto Tinggi	30.873.476,23	18.524.086,00	12.349.390,00	30.873.476,00	100,00
51		Talang Lindung	12.564.673,35	7.538.804,00	5.025.869,00	12.564.673,00	100,00
52		Pelayang Raya	32.157.935,62	19.294.761,00	12.863.174,00	32.157.935,00	100,00
53	Pondok Tinggi	Sungai Jernih	12.779.411,71	7.667.647,00	5.111.765,00	12.779.412,00	100,00
54		Aur Duri	12.779.899,99	7.667.940,00	5.111.960,00	12.779.900,00	100,00
55		Pondok Agung	11.573.540,79	6.944.124,00	4.629.417,00	11.573.541,00	100,00
56		Pemanti	11.653.799,85	6.992.280,00	4.661.520,00	11.653.800,00	100,00

NO.	KECAMATAN	DESA	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI BHPDRD TAHAP I DAN TAHAP II	%
				BHPDRD TAHAP I	BHPDRD TAHAP II		
1	2	3	4	5	6	7=(5+6)	8
57		Lawang Agung	33.708.065,06	23.795.731,00	9.912.334,00	33.708.065,00	100,00
58		Karya Bakti	32.040.823,61	19.224.494,00	12.816.330,00	32.040.824,00	100,00
59		Koto Lebu	12.013.646,01	7.208.188,00	4.805.458,00	12.013.646,00	100,00
60	Koto Baru	Koto Baru	14.573.263,69	8.743.958,00	5.829.305,00	14.573.263,00	100,00
61		Koto Limau Manis	12.574.063,12	7.544.438,00	5.029.625,00	12.574.063,00	100,00
62		Kampung Tengah	12.245.598,25	7.347.359,00	4.898.239,00	12.245.598,00	100,00
63		Srimenanti	32.535.173,31	19.521.104,00	13.014.069,00	32.535.173,00	100,00
64		Permai Indah	11.802.559,47	7.081.536,00	4.721.023,00	11.802.559,00	100,00
65		Dujung Sakti	31.355.639,74	18.713.384,00	12.542.256,00	31.255.640,00	99,68
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>1.107.933.815,95</b>	<b>659.589.105,00</b>	<b>430.021.720,00</b>	<b>1.089.610.825,00</b>	<b>98,35</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN REALISASI DANA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA DESA	ANGGARAN	PENYALURAN DANA DESA	PENYALURAN BLT	REALOKASI	TOTAL PENYALURAN
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
1	AIR TELUH	664.665.000,00	417.142.000,00	247.523.000,00	-	664.665.000,00
2	AMAR SAKTI	678.031.000,00	346.501.000,00	331.530.000,00	-	678.031.000,00
3	AUR DURI	841.014.000,00	413.850.000,00	282.648.000,00	144.516.000,00	841.014.000,00
4	BARU DEBAI	687.431.000,00	295.524.000,00	391.907.000,00	-	687.431.000,00
5	CEMPAKA	658.947.000,00	338.376.000,00	320.571.000,00	-	658.947.000,00
6	DEBAI	632.013.000,00	341.725.000,00	290.288.000,00	-	632.013.000,00
7	DUJUNG SAKTI	1.048.981.000,00	649.261.000,00	399.720.000,00	-	1.048.981.000,00
8	DUSUN DIILIR	915.352.000,00	612.770.000,00	302.582.000,00	-	915.352.000,00
9	GEDANG	794.440.000,00	251.426.000,00	543.014.000,00	-	794.440.000,00
10	KAMPUNG DALAM	697.602.000,00	315.322.000,00	382.280.000,00	-	697.602.000,00
11	KAMPUNG DIILIR	667.761.000,00	398.994.000,00	268.767.000,00	-	667.761.000,00
12	KAMPUNG TENGAH	689.490.000,00	420.734.000,00	268.756.000,00	-	689.490.000,00
13	KARYA BAKTI	849.512.000,00	456.359.000,00	248.637.000,00	144.516.000,00	849.512.000,00
14	KOTO BARU	777.694.000,00	403.582.000,00	374.112.000,00	-	777.694.000,00
15	KOTO BENTO	1.057.212.000,00	573.744.000,00	338.952.000,00	144.516.000,00	1.057.212.000,00
16	KOTO BERINGIN	684.586.000,00	427.486.000,00	257.100.000,00	-	684.586.000,00
17	KOTO DIAN	775.022.000,00	534.256.000,00	240.766.000,00	-	775.022.000,00
18	KOTO DUMO	673.923.000,00	423.149.000,00	250.774.000,00	-	673.923.000,00
19	KOTO DUO	817.491.000,00	475.088.000,00	342.403.000,00	-	817.491.000,00
20	KOTO KERAS	730.368.000,00	435.626.000,00	294.742.000,00	-	730.368.000,00
21	KOTO LEBU	653.619.000,00	332.782.000,00	320.837.000,00	-	653.619.000,00
22	KOTO LIMA MANIS	762.465.000,00	491.171.000,00	271.294.000,00	-	762.465.000,00
23	KOTO LOLO	873.027.000,00	470.939.000,00	257.572.000,00	144.516.000,00	873.027.000,00
24	KOTO PADANG	690.593.000,00	370.144.000,00	320.449.000,00	-	690.593.000,00
25	KOTO PANAP	637.981.000,00	355.435.000,00	282.546.000,00	-	637.981.000,00
26	KOTO PUDUNG	658.913.000,00	432.313.000,00	226.600.000,00	-	658.913.000,00
27	KOTO RENAH	823.225.000,00	471.831.000,00	206.878.000,00	144.516.000,00	823.225.000,00
28	KOTO TELUK	811.245.000,00	443.611.000,00	223.118.000,00	144.516.000,00	811.245.000,00
29	KOTO TENGAH	667.038.000,00	441.068.000,00	225.970.000,00	-	667.038.000,00
30	KOTO TENGAH	838.305.000,00	494.535.000,00	199.254.000,00	144.516.000,00	838.305.000,00
31	KOTO TINGGI	1.007.058.000,00	524.165.000,00	338.377.000,00	144.516.000,00	1.007.058.000,00
32	KOTO TUO	646.296.000,00	441.837.000,00	204.459.000,00	-	646.296.000,00
33	KT. BARU TANAH KAMPUNG	659.076.000,00	434.036.000,00	225.040.000,00	-	659.076.000,00
34	KUMUN HILIR	648.149.000,00	315.548.000,00	332.601.000,00	-	648.149.000,00
35	KUMUN MUDIK	727.869.000,00	449.973.000,00	277.896.000,00	-	727.869.000,00
36	LARIK KEMAHAN	676.698.000,00	447.758.000,00	228.940.000,00	-	676.698.000,00
37	LAWANG AGUNG	1.106.044.000,00	623.239.000,00	482.805.000,00	-	1.106.044.000,00
38	MALIKI AIR	804.984.000,00	307.742.000,00	352.726.000,00	144.516.000,00	804.984.000,00
39	MEKAR JAYA	674.445.000,00	375.002.000,00	299.443.000,00	-	674.445.000,00
40	MUARA JAYA	752.611.000,00	318.977.000,00	433.634.000,00	-	752.611.000,00
41	PALING SERUMPUN	788.127.000,00	560.974.000,00	227.153.000,00	-	788.127.000,00
42	PASAR BARU	622.694.000,00	455.387.000,00	167.307.000,00	-	622.694.000,00
43	PELAYANG RAYA	977.911.000,00	587.574.000,00	390.337.000,00	-	977.911.000,00
44	PENDUNG HIANG	678.025.000,00	455.925.000,00	222.100.000,00	-	678.025.000,00
45	PERMAI INDAH	650.294.000,00	340.506.000,00	309.788.000,00	-	650.294.000,00
46	PERMANTI	807.853.000,00	402.957.000,00	260.380.000,00	144.516.000,00	807.853.000,00

NO.	NAMA DESA	ANGGARAN	PENYALURAN DANA DESA	PENYALURAN BLT	REALOKASI	TOTAL PENYALURAN
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 + 6
47	PINGGIR AIR	669.995.000,00	253.420.000,00	416.575.000,00	-	669.995.000,00
48	PONDOK AGUNG	919.590.000,00	493.506.000,00	426.084.000,00	-	919.590.000,00
49	RENAH KAYU EMBUN	1.010.042.000,00	335.469.000,00	674.573.000,00	-	1.010.042.000,00
50	SANDARAN GALEH	783.607.000,00	438.226.000,00	345.381.000,00	-	783.607.000,00
51	SEBERANG	1.103.750.000,00	486.278.000,00	472.956.000,00	144.516.000,00	1.103.750.000,00
52	SEMBILAN	681.704.000,00	411.859.000,00	269.845.000,00	-	681.704.000,00
53	SIMPANG TIGA RAWANG	800.562.000,00	383.969.000,00	416.593.000,00	-	800.562.000,00
54	SRIMENANTI	825.018.000,00	403.212.000,00	277.290.000,00	144.516.000,00	825.018.000,00
55	SUMUR ANYIR	710.819.000,00	385.939.000,00	324.880.000,00	-	710.819.000,00
56	SUMUR GEDANG	787.393.000,00	322.516.000,00	320.361.000,00	144.516.000,00	787.393.000,00
57	SUNGAI JERNIH	1.053.019.000,00	540.718.000,00	512.301.000,00	-	1.053.019.000,00
58	SUNGAI LIUK	958.000.000,00	278.212.000,00	679.788.000,00	-	958.000.000,00
59	SUNGAI NING	959.539.000,00	542.340.000,00	417.199.000,00	-	959.539.000,00
60	TALANG LINDUNG	728.524.000,00	376.641.000,00	351.883.000,00	-	728.524.000,00
61	TANJUNG	819.359.000,00	466.103.000,00	208.740.000,00	144.516.000,00	819.359.000,00
62	TANJUNG BUNGA	651.071.000,00	420.811.000,00	230.260.000,00	-	651.071.000,00
63	TANJUNG KARANG	612.502.000,00	357.316.000,00	255.186.000,00	-	612.502.000,00
64	TANJUNG MUDA	661.050.000,00	445.135.000,00	215.915.000,00	-	661.050.000,00
65	ULU AIR	693.158.000,00	360.896.000,00	332.262.000,00	-	693.158.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>50.414.782.000,00</b>	<b>27.578.910.000,00</b>	<b>20.812.648.000,00</b>	<b>2.023.224.000,00</b>	<b>50.414.782.000,00</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN REALISASI ALOKASI DANA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA	ALOKASI TPS3R	ALOKASI SILTAP	TOTAL PAGU ADD	REALISASI ALOKASI DANA DESA	REALISASI TPS3R	REALISASI SILTAP	JUMLAH TOTAL REALISASI	%	SISA
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8	9	10	11=(8+9+10)	12	13 = (7-11)
1	Sungai Penuh	Gedang	626.063.676	-	249.943.920	876.007.596	626.063.676	-	249.943.920	876.007.596	100,00	0,30
2		Pasar Baru	478.159.095	-	225.677.520	703.836.615	478.159.095	-	225.677.520	703.836.615	100,00	0,04
3		Amar Sakti	467.285.600	-	201.411.120	668.696.720	467.285.600	-	201.411.120	668.696.720	100,00	0,18
4	Hampan Rawang	Kampung Diilir	495.011.468	-	225.677.520	720.688.988	495.010.668	-	225.677.520	720.688.188	100,00	800,35
5		Koto Beringin	495.946.252	-	201.411.120	697.357.372	495.946.252	-	201.411.120	697.357.372	100,00	0,01
6		Maliki Air	515.981.153	-	225.677.520	741.658.673	515.981.153	-	225.677.520	741.658.673	100,00	0,34
7		Tanjung	595.491.986	-	274.210.320	869.702.306	595.491.984	-	274.210.320	869.702.304	100,00	1,68
8		Koto Teluk	576.882.718	-	249.943.920	826.826.638	576.882.718	-	249.943.920	826.826.638	100,00	0,13
9		Kampung Dalam	583.396.086	-	225.677.520	809.073.606	583.396.086	-	225.677.520	809.073.606	100,00	0,26
10		Simpang Tiga Rawang	627.438.596	-	249.943.920	877.382.516	627.438.596	-	249.943.920	877.382.516	100,00	0,03
11		Larik Kemahan	510.709.088	-	201.411.120	712.120.208	510.709.088	-	201.411.120	712.120.208	100,00	0,43
12		Dusun Diilir	490.146.725	-	201.411.120	691.557.845	490.146.725	-	201.411.120	691.557.845	100,00	0,14
13		Paling Serumpun	588.695.300	-	249.943.920	838.639.220	588.695.300	-	249.943.920	838.639.220	100,00	0,11
14		Koto Dian	592.333.177	-	225.677.520	818.010.697	592.333.177	-	225.677.520	818.010.697	100,00	0,44
15		Tanjung Muda	574.972.286	-	225.677.520	800.649.806	574.972.285	-	225.677.520	800.649.805	100,00	0,68
16		Cempaka	491.104.279	-	225.677.520	716.781.799	491.104.279	-	225.677.520	716.781.799	100,00	0,07
17	Pesisir Bukit	Koto Renah	517.805.432	-	225.677.520	743.482.952	517.805.432	-	225.677.520	743.482.952	100,00	0,37
18		Koto Keras	548.193.551	-	249.943.920	798.137.471	548.193.551	-	231.744.120	779.937.671	97,72	18.199.800,04
19		Koto Bento	495.801.490	-	201.411.120	697.212.610	495.801.490	-	201.411.120	697.212.610	100,00	0,26
20		Koto Lolo	536.555.065	-	225.677.520	762.232.585	536.555.065	-	225.677.520	762.232.585	100,00	0,06
21		Koto Tengah	519.109.913	-	225.677.520	744.787.433	519.109.913	-	225.677.520	744.787.433	100,00	0,40
22		Koto Dua	558.318.905	-	249.943.920	808.262.825	558.318.905	-	249.943.920	808.262.825	100,00	0,33
23		Sungai Liuk	512.665.096	-	225.677.520	738.342.616	512.665.096	-	225.677.520	738.342.616	100,00	0,37
24		Seberang	525.313.133	-	225.677.520	750.990.653	525.313.133	-	225.677.520	750.990.653	100,00	0,28
25		Sumur Gedang	503.858.339	-	225.677.520	729.535.859	503.858.339	-	225.677.520	729.535.859	100,00	0,10
26	Kumun Debai	Kumun Mudik	567.749.598	-	249.943.920	817.693.518	567.749.598	-	249.943.920	817.693.518	100,00	0,02
27		Kumun Hilir	563.637.354	-	249.943.920	813.581.274	563.637.354	-	247.517.280	811.154.634	99,70	2.426.640,32
28		Air Teluh	539.629.315	200.000.000	249.943.920	989.573.235	539.629.315	-	249.943.920	789.573.235	79,79	199.999.999,59
29		Sandaran Galeh	602.189.374	-	274.210.320	876.399.694	602.189.374	-	274.210.320	876.399.694	100,00	0,06
30		Debai	482.585.375	-	201.411.120	683.996.495	482.585.375	-	201.411.120	683.996.495	100,00	0,25
31		Pinggir Air	488.506.166	-	201.411.120	689.917.286	488.506.166	-	201.411.120	689.917.286	100,00	0,32

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA	ALOKASI TPS3R	ALOKASI SILTAP	TOTAL PAGU ADD	REALISASI ALOKASI DANA DESA	REALISASI TPS3R	REALISASI SILTAP	JUMLAH TOTAL REALISASI	%	SISA
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8	9	10	11=(8+9+10)	12	13 = (7-11)
32		Ulu Air	553.963.888	-	225.677.520	779.641.408	553.963.888	-	225.677.520	779.641.408	100,00	0,10
33		Renah Kayu Embun	756.747.487	-	201.411.120	958.158.607	756.747.487	-	201.411.120	958.158.607	100,00	0,17
34		Muara Jaya	565.763.259	200.000.000	249.943.920	1.015.707.179	565.763.259	-	249.943.920	815.707.179	80,31	200.000.000,30
35	Tanah Kampung	Baru Debai	479.950.383	-	201.411.120	681.361.503	479.950.383	-	201.411.120	681.361.503	100,00	0,05
36		Pendung Hiang	511.230.658	-	201.411.120	712.641.778	511.230.658	-	201.411.120	712.641.778	100,00	0,14
37		Koto Puduk	523.065.082	-	249.943.920	773.009.002	523.065.082	-	249.943.920	773.009.002	100,00	0,39
38		Sembilan	495.267.143	-	201.411.120	696.678.263	495.267.143	-	201.411.120	696.678.263	100,00	0,39
39		Koto Tuo	508.922.690	-	225.677.520	734.600.210	508.922.690	-	225.677.520	734.600.210	100,00	0,37
40		Koto Panap	474.148.385	-	201.411.120	675.559.505	474.148.385	-	201.411.120	675.559.505	100,00	0,02
41		Koto Tengah	475.932.383	-	201.411.120	677.343.503	475.932.383	-	201.411.120	677.343.503	100,00	0,30
42		Tanjung Bunga	488.887.855	-	201.411.120	690.298.975	488.887.855	-	201.411.120	690.298.975	100,00	0,40
43		Koto Padang	552.855.608	-	249.943.920	802.799.528	552.855.608	-	249.943.920	802.799.528	100,00	0,40
44		Tanjung Karang	476.801.109	-	201.411.120	678.212.229	476.801.109	-	201.411.120	678.212.229	100,00	0,43
45		Kt Br Tanah Kampung	507.537.284	-	225.677.520	733.214.804	507.537.284	-	225.677.520	733.214.804	100,00	0,38
46		Koto Dumo	551.824.214	-	249.943.920	801.768.134	551.824.214	-	249.943.920	801.768.134	100,00	0,12
47		Mekar Jaya	527.431.172	-	249.943.920	777.375.092	527.431.172	-	249.943.920	777.375.092	100,00	0,36
48	Sungai Bungkal	Sumur Anyir	543.939.981	-	249.943.920	793.883.901	543.939.981	-	249.943.920	793.883.901	100,00	0,21
49		Sungai Ning	517.113.038	-	225.677.520	742.790.558	517.113.038	-	225.677.520	742.790.558	100,00	0,21
50		Koto Tinggi	468.115.882	-	201.411.120	669.527.002	468.115.882	-	201.411.120	669.527.002	100,00	0,36
51		Talang Lindung	585.572.893	-	249.943.920	835.516.813	585.572.893	-	249.943.920	835.516.813	100,00	0,32
52		Pelayang Raya	562.328.608	-	249.943.920	812.272.528	562.328.608	-	249.943.920	812.272.528	100,00	0,28
53	Pondok Tinggi	Sungai Jernih	635.658.886	200.000.000	249.943.920	1.085.602.806	635.658.886	200.000.000	249.943.920	1.085.602.806	100,00	0,10
54		Aur Duri	574.647.402	-	274.210.320	848.857.722	574.647.402	-	274.210.320	848.857.722	100,00	0,50
55		Pondok Agung	502.990.669	-	225.677.520	728.668.189	502.990.669	-	225.677.520	728.668.189	100,00	0,35
56		Permanti	503.593.780	-	225.677.520	729.271.300	503.593.780	-	225.677.520	729.271.300	100,00	0,11
57		Lawang Agung	609.874.947	-	249.943.920	859.818.867	609.874.947	-	249.943.920	859.818.867	100,00	0,49
58		Karya Bakti	554.324.088	-	249.943.920	804.268.008	554.324.088	-	249.943.920	804.268.008	100,00	0,46
59		Koto Lebu	538.344.584	-	249.943.920	788.288.504	538.344.584	-	249.943.920	788.288.504	100,00	0,45
60	Koto Baru	Koto Baru	638.477.809	-	249.943.920	888.421.729	638.477.809	-	249.943.920	888.421.729	100,00	0,11
61		Koto Limau Manis	541.490.211	200.000.000	225.677.520	967.167.731	541.490.210	-	225.677.520	767.167.730	79,32	200.000.000,51
62		Kampung Tengah	527.017.196	-	225.677.520	752.694.716	527.017.196	-	225.677.520	752.694.716	100,00	0,21
63		Srimenanti	519.853.783	-	225.677.520	745.531.303	519.853.783	-	225.677.520	745.531.303	100,00	0,36
64		Permai Indah	508.099.821	-	225.677.520	733.777.341	508.099.821	-	225.677.520	733.777.341	100,00	0,42
65		Dujung Sakti	581.651.932	-	249.943.920	831.595.852	581.651.932	-	249.943.920	831.595.852	100,00	0,25
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>35.034.959.700</b>	<b>800.000.000</b>	<b>14.984.502.000</b>	<b>50.819.461.700</b>	<b>35.034.958.897</b>	<b>200.000.000</b>	<b>14.963.875.560</b>	<b>50.198.834.457</b>	<b>98,78</b>	<b>620.627.243,00</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	KECAMATAN / DESA	ANGGARAN	REALISASI TAHAP I	REALISASI TAHAP II	JUMLAH
1	2	3	4	5	7 = 4 + 5 + 6
<b>I.</b>	<b>SUNGAI PENUH</b>	<b>300.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>90.000.000,00</b>
1	- GEDANG	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
2	- PASAR BARU	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
3	- AMAR SAKTI	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
<b>II.</b>	<b>HAMPARAN RAWANG</b>	<b>1.300.000.000,00</b>	<b>390.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>390.000.000,00</b>
4	- KAMPUNG DIILIR	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
5	- KOTO BERINGIN	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
6	- MALIKI AIR	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
7	- TANJUNG	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
8	- KOTO TELUK	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
9	- KAMPUNG DALAM	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
10	- SIMPANG TIGA RAWANG	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
11	- LARIK KEMAHAN	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
12	- DUSUN DIILIR	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
13	- PALING SERUMPUN	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
14	- KOTO DIAN	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
15	- TANJUNG MUDA	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
16	- CEMPAKA	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
<b>III.</b>	<b>PESISIR BUKIT</b>	<b>900.000.000,00</b>	<b>270.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>270.000.000,00</b>
17	- KOTO RENA	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
18	- KOTO KERAS	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
19	- KOTO BENTO	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
20	- KOTO LOLO	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
21	- KOTO TENGAH	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
22	- KOTO DUO	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
23	- SUNGAI LIUK	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
24	- SEBERANG	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
25	- SUMUR GEDANG	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
<b>IV.</b>	<b>KUMUN DEBAI</b>	<b>900.000.000,00</b>	<b>270.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>270.000.000,00</b>
26	- KUMUN MUDIK	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
27	- KUMUN HILIR	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
28	- AIR TELUH	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
29	- SANDARAN GALEH	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
30	- DEBAI	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
31	- PINGGIR AIR	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
32	- ULU AIR	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
33	- RENA KAYU EMBUN	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00

NO	KECAMATAN / DESA	ANGGARAN	REALISASI TAHAP I	REALISASI TAHAP II	JUMLAH
1	2	3	4	5	7 = 4 + 5 + 6
34	- MUARA JAYA	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
<b>V.</b>	<b>TANAH KAMPUNG</b>	<b>1.300.000.000,00</b>	<b>390.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>390.000.000,00</b>
35	- BARU DEBAI	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
36	- PENDUNG HIANG	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
37	- KOTO PUDUNG	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
38	- SEMBILAN	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
39	- KOTO TUO	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
40	- KOTO PANAP	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
41	- KOTO TENGAH TK	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
42	- TANJUNG BUNGA	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
43	- KOTO PADANG	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
44	- TANJUNG KARANG	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
45	- KT BARU TANAH KAMPUNG	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
46	- KOTO DUMO	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
47	- MEKAR JAYA	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
<b>VI.</b>	<b>SUNGAI BUNGKAL</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>150.000.000,00</b>
48	- SUMUR ANYIR	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
49	- SUNGAI NING	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
50	- KOTO TINGGI	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
51	- TALANG LINDUNG	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
52	- PELAYANG RAYA	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
<b>VII.</b>	<b>PONDOK TINGGI</b>	<b>700.000.000,00</b>	<b>210.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>210.000.000,00</b>
53	- SUNGAI JERNIH	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
54	- AUR DURI	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
55	- PONDOK AGUNG	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
56	- PERMANTI	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
57	- LAWANG AGUNG	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
58	- KARYA BAKTI	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
59	- KOTO LEBU	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
<b>VIII.</b>	<b>KOTO BARU</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>180.000.000,00</b>
60	- KOTO BARU KB	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
61	- KOTO LIMA MANIS	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
62	- KAMPUNG TENGAH	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
63	- SRIMENANTI	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
64	- PERMAI INDAH	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
65	- DUJUNG SAKTI	100.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>6.500.000.000,00</b>	<b>1.950.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.950.000.000,00</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**SELISIH SALDO KAS DI BLUD PER 31 DESEMBER 2024**

(dalam rupiah)

A	Saldo per 31 Desember 2024		<b>Rp43.685.072,86</b>
Mutasi Tambah:			
	Tanggal Setor	Keterangan	
a.	02 Januari 2025	Pengembalian Sisa Panjar Belanja Pemeriksaan Air RO HD Tahun 2024	Rp100.000,00
b.	03 Januari 2025	Pengembalian Sisa Panjar Belanja Transportasi BPJS Tahun 2024	Rp88.324.695,00
c.	03 Januari 2025	Pengembalian Sisa panjar Belanja Iuran PPU Yang Didaftarkan BLUD Tahun 2024	Rp1.091.361,00
d.	03 Januari 2025	Pengembalian Sisa Panjar Belanja Iuran PPU Yang Didaftarkan BLUD Tahun 2024	Rp2.006,00
e.	09 Januari 2025	Pengembalian Sisa Panjar Belanja Transportasi BPJS Tahun 2024	Rp1.430.000,00
f.	09 Januari 2025	Pengembalian Sisa Panjar Belanja Obat Tahun 2024	Rp1,13
g.	10 Januari 2025	Pengembalian Sisa Panjar Belanja Transportasi BPJS Tahun 2024	Rp36.418.800,00
h.	13 Februari 2025	Pengembalian Sisa Panjar Belanja Belanja Alat/Bahan U/Kegiatan Hari Besar Nasional Tahun 2024	Rp5.000,00
i.	13 Februari 2025	Pengembalian Sisa Panjar Belanja Belanja U/Kegiatan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Operasional Tahun 2024	2.750.000,00
j.	13 Februari 2025	Pengembalian Sisa Panjar Belanja U/Kegiatan Transportasi BPJSI Tahun 2024	16.200,00
k.	13 Februari 2025	Pengembalian Sisa Panjar Belanja Belanja U/Kegiatan Makan Minum Hari Besar Nasional Tahun 2024	10.000,00
l.	13 Februari 2025	Pengembalian Sisa Panjar Belanja Belanja U/Kegiatan Makan Minum Rapat Tahun 2024	170.000,00
m.	14 Februari 2025	Pengembalian Sisa Panjar Belanja Belanja U/Kegiatan SPPD Luar Daerah Tahun 2024	18.692,00
n.	18 Februari 2025	Pengembalian Sisa Panjar Belanja Belanja U/Kegiatan Transportasi BPJS Tahun 2024	53.183.040,00
B	Total Mutasi Tambah		183.519.795,13
Mutasi Kurang:			
a.	11 Januari 2025	Hutang PFK berupa Pajak Pemerintah Pusat yang disetor Tahun 2025	12.972.072,00
b.	13 Februari 2025	Honorarium pegawai yang belum dibayarkan	600.000,00
c.		Lebih Setor PPTK atas SPPD TA 2024	8.218.139,00
d.		Lebih setor PPTK Tahun 2024	386.972,00
e.	14 Juni 2025	Lebih setor PPTK Tahun 2022	3.520.300,10
C	Total Mutasi Kurang		25.697.483,10
D	Selisih Kas BLUD = B-C		157.822.312,03
E	Saldo per 31 Desember 2024 = A+D		<b>201.507.384,89</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**DAFTAR REKENING GIRO DANA BOS PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SUNGAI PENUH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA SKPD	NAMA REKENING	NO.REKENING	BANK	TUJUAN PEMBUKUAN REKENING
	<b>JENJANG SEKOLAH DASAR</b>				
1	SD Negeri 001/XI Sungai penuh	DN BOS 2018 SDN 001 / XI SUNGAI PENUH	3001775447	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
2	SD Negeri 002/XI Pasar Sungai Penuh	DN BOS 2018 SDN 002 / XI PASAR SPN	3001775455	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
3	SD Negeri 003/XI Aur Duri	DN BOS 2018 SDN 003 / XI AUR DURI	3001775463	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
4	SD Negeri 004/XI Pelayang Raya	DN BOS 2018 SDN 004 / XI PELAYANG RAYA	3001775471	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
5	SD Negeri 005/XI Kel. Sungai Penuh	DN BOS 2018 SDN 005/XI KEL SEI PENUH	3001775487	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
6	SD Negeri 006/XI Duri	DN BOS 2018 SDN 006/XI AUR DURI	3001775498	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
7	SD Negeri 007/XI Sumur Anyir	DN BOS 2018 SDN 007/XI SUMUR ANYIR	3001775501	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
8	SD Negeri 008/XI Kel. Pasar Sungai Penuh	DN BOS 2018 SDN 008/XI KEL. PASAR SPN	3001775517	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
9	SD Negeri 009/XI Kel. Pasar Sungai Penuh	DN BOS 2018 SDN 009/XI KEL. PASAR SPN	3001775528	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
10	SD Negeri 010/XI Pondok Agung	DN BOS 2018 SDN 010/XI PONDOK ANGGUNG	3001775536	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
11	SD Negeri 011/XI Desa Gedang	DN BOS 2018 SDN 11/XI DESA GEDANG	3001775544	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
12	SD Negeri 012/XI Kel. Dusun baru	DN BOS 2018 SDN 012/XI KEL.DSN BARU	3001775552	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
13	SD Negeri 013/XI Sumur Anyir	DN BOS 2018 SDN 013/XI SUMUR ANYIR	3001775568	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
14	SD Negeri 014/XI Pelayang Raya	DN BOS 2018 SDN 014/XI PELAYANG RAYA	3001775579	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
15	SD Negeri 015/XI Lawang Agung	DN BOS 2018 SDN 015/XI LAWANG AGUNG	3001775587	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
16	SD Negeri 016/XI Talang Lindung	DN BOS 2018 SDN 016/XI TLG LINDUNG	3001775595	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
17	SD Negeri 017/XI Sungai Ning	DN BOS 2018 SDN 017/XI SUNGAI NING	3001775609	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
18	SD Negeri 018/XI Karya bakti	DN BOS 2018 SDN 018/XI KARYA BAKTI	3001775617	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
19	SD Negeri 019/XI Sungai Jernih	DN BOS 2018 SDN 019/XI SEI JERNIH	3001775625	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
20	SD Negeri 020/XI Koto Lebu	DN BOS 2018 SDN 020/XI KOTO LEBU	3001775633	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
21	SD Negeri 021/XI Lawang Agung	DN BOS 2018 SDN 021/XI LAWANG AGUNG	3001775641	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
22	SD Negeri 022/XI Sumur Anyir	DN BOS 2018 SDN 022/XI SUMUR ANYIR	3001775657	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
23	SD Negeri 023/XI Aur Duri	DN BOS 2018 SDN 023/XI AUR DURI	3001775668	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
24	SD Negeri 024/XI Kel. Dusun Baru	DN BOS 2018 SDN 024 XI KEL. DSN BARU	3001775676	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
25	SD Negeri 025/XI Desa Gedang	DN BOS 2018 SDN 025/XI DESA GEDANG	3001775684	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
26	SD Negeri 026/XI Cempaka	DN BOS 2018 SDN 026/XI CEMPAKA	3001775692	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
27	SD Negeri 027/XI Kampung Dilir	DN BOS 2018 SDN 027/XI KPG DILIR	3001775706	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
28	SD Negeri 028/XI Tanjung	DN BOS 2018 SDN 028/XI TANJUNG	3001775714	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
29	SD Negeri 029/XI Cempaka	DN BOS 2018 SDN 029/XI CEMPAKA	3001775722	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS

NO.	NAMA SKPD	NAMA REKENING	NO.REKENING	BANK	TUJUAN PEMBUKUAN REKENING
30	SD Negeri 030/XI Koto Dian	DN BOS 2018 SDN 030/XI KOTO DIAN	3001775738	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
31	SD Negeri 031/XI Kampung Dalam	DN BOS 2018 SDN 031/XI KAMPUNG DALAM	3001775749	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
32	SD Negeri 032/XI Simpang Tiga Rawang	DN BOS 2018 SDN 032/XI SIMP. TIGARWG	3001775757	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
33	SD Negeri 033/XI Tanjung Muda	DN BOS 2018 SDN 033/ XI TANJUNG MUDA	3001775765	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
34	SD Negeri 034/XI Koto Teluk	DN BOS 2018 SDN 034/XI KOTO TELUK	3001775773	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
35	SD Negeri 035/XI Larik Kemahan	DN BOS 2018 SDN 035/XI LARIK KEMAHAN	3001775781	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
36	SD Negeri 036/XI Paling Serumpun	DN BOS 2018 SDN 036/XI PLG SERUMPUN	3001775797	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
37	SD Negeri 037/XI Koto Keras	DN BOS 2018 SDN 037/XI KOTO KERAS	3001775803	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
38	SD Negeri 038/XI Koto Lolo	DN BOS 2018 SDN 038/XI KOTO LOLO	3001775827	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
39	SD Negeri 039/XI Sungai Liuk	DN BOS 2018 SDN 039/XI SUNGAI LIUK	3001775838	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
40	SD Negeri 040/XI Koto Limau Manis	DN BOS 2018 SDN 040/XI KTLIMAUMANIS	3001775846	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
41	SD Negeri 041/XI Kampung Tengah	DN BOS 2018 SDN 41/XI KAMPUNG TENGAH	3001775862	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
42	SD Negeri 042/XI Seberang	DN BOS 2018 SDN NO 042/XI SEBERANG	3001775889	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
43	SD Negeri 043/XI Koto Renah	DN BOS 2018 SDN 043/XI KOTO RENAH	3001775908	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
44	SD Negeri 044/XI Koto Bento	DN BOS 2018 SDN 44/XI KOTO BRNTO	3001775919	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
45	SD Negeri 045/XI Koto Dua	DN BOS 2018 SDN 045/XI KOTO DUA	3001775935	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
46	SD Negeri 046/XI Koto Tengah	DN BOS 2018 SDN 046/XI KOTOTENGAH	3001775951	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
47	SD Negeri 047/XI Koto Baru	DN BOS 2018 SDN 047/XI KOTO BARU	3001775978	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
48	SD Negeri 048/XI Koto Lolo	DN BOS 2018 SDN 048/XI KOTO LOLO	3001775994	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
49	SD Negeri 049/XI Debai	DN BOS 2018 SDN 049/XI DEBAI	3001776001	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
50	SD Negeri 050/XI Kumun Hilir	DN BOS 2018 SDN 050 XI KUMUN HILIR	3001776028	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
51	SD Negeri 051/XI Kumun Mudik	DN BOS 2018 SDN 051/XI KUMUN MUDIK	3001776036	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
52	SD Negeri 052/XI Ulu Air	DN BOS 2018 SDN 052/XI ULU AIR	3001776052	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
53	SD Negeri 053/XI Air Teluh	DN BOS 2018 SDN 053/XI AIR TELUH	3001776079	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
54	SD Negeri 054/XI Muara Air	DN BOS 2018 SDN 054/XI MUARA AIR	3001776095	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
55	SD Negeri 055/XI Pinggir Air	DN BOS 2018 SDN 055/XI PINGGIR AIR	3001776117	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
56	SD Negeri 056/XI Kumun Mudik	DN BOS 2018 SDN056/XI KUMUN MUDIK	3001776109	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
57	SD Negeri 057/XI Kumun Mudik	DN BOS 2018 SDN57/XI KUMUN MUDIK	3001776087	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
58	SD Negeri 058/XI Koto Dumo	DN BOS 2018 SDN058/XI KOTO DUMO	3001776068	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
59	SD Negeri 059/XI Koto Puduk	DN BOS 2018 SDN059/XI KOTO PUDUNG	3001776044	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
60	SD Negeri 060/XI Pendung Hiang	DN BOS 2018 SDN060/XI PENDUNG HIANG	3001776017	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
61	SD Negeri 061/XI Koto Panap	DN BOS 2018 SDN 061 XI KOTO PANAP	3001778861	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
62	SD Negeri 062/XI Koto Baru	DN BOS 2018 SDN062/XI KOTO BARU	3001775967	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
63	SD Negeri 063/XI Koto Padang	DN BOS 2018 SDN063/XI KOTO PADANG	3001775943	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
64	SD Negeri 064/XI Koto Tuo	DN BOS 2018 SD NO 064/XI KOTO TUO	3001775927	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
65	SD Negeri 065/XI Desa Baru Debai	DN BOS 2018 SDN 065/XI DS BARUDEBAI	3001778788	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS

NO.	NAMA SKPD	NAMA REKENING	NO.REKENING	BANK	TUJUAN PEMBUKUAN REKENING
66	SD Negeri 066/XI Tanjung Bunga	DN BOS 2018 SDN 066/XI TANJUNG BUNGA	3001778799	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
67	SD Negeri 067/XI Koto Tengah	DN BOS 2018 SDN067/XI KOTO TENGAH	3001775854	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
68	SD Negeri 069/XI Kampung Tengah	DN BOS 2018 SDN069/XI KAMPUNG TENGAH	3001775811	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
69	SD Pertiwi	DN BOS 2018 SD PERTIWI	3001778802	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
70	SD Islam Terpadu Amanah Sungai Penuh	DN BOS 2018 SD ISLAMTERPADU AMNHSPN	3001778837	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
71	SD Plus Muhammadiyah	DN BOS 2018 SD PLUS MUHAMMADIYAH	3001778818	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
72	SD IT Al Fikri Sungai Penuh	DN BOS 2018 SD IT AL FIKRI SPN	3001778845	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
73	SD Islam Mutiara Almadani	DN BOS 2018 SD ISLAMMUTIARA ALMADANI	3001778829	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
<b>JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA</b>					
1	SMP Negeri 1 Sungai Penuh	DANA BOS SMP NEGERI 1 SUNGAI PENUH	3002420968	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
2	SMP Negeri 2 Sungai Penuh	DANA BOS SMP NEGERI 2 SUNGAI PENUH	3002420987	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
3	SMP Negeri 3 Sungai Penuh	DANA BOS SMP NEGERI 3 SUNGAI PENUH	3002421018	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
4	SMP Negeri 4 Sungai Penuh	DANA BOS SMP NEGERI 4 SUNGAI PENUH	3002421029	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
5	SMP Negeri 5 Sungai Penuh	DANA BOS SMP NEGERI 5 SUNGAI PENUH	3002421037	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
6	SMP Negeri 6 Sungai Penuh	DANA BOS SMP NEGERI 6 SUNGAI PENUH	3002421045	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
7	SMP Negeri 7 Sungai Penuh	DANA BOS SMP NEGERI 7 SUNGAI PENUH	3002421053	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
8	SMP Negeri 8 Sungai Penuh	DANA BOS SMP NEGERI 8 SUNGAI PENUH	3002421061	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
9	SMP Negeri 9 Sungai Penuh	DANA BOS SMP NEGERI 9 SUNGAI PENUH	3002421077	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
10	SMP Negeri 10 Sungai Penuh	DANA BOS SMP NEGERI 10 SUNGAI PENUH	3002421088	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
11	SMP Negeri 11 Sungai Penuh	DANA BOS SMP NEGERI 11 SUNGAI PENUH	3002421096	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
12	SMP Negeri 12 Sungai Penuh	DANA BOS SMP NEGERI 12 SUNGAI PENUH	3002421134	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
13	SMP Negeri 13 Sungai Penuh	DANA BOS SMP NEGERI 13 SUNGAI PENUH	3002421207	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS
14	SMP IT Amanah Sungai Penuh	DANA BOS SMP IT AMANAH SUNGAI PENUH	3002421557	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	PENYALURAN DANA BOS



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**DAFTAR RINCIAN KAS DANA BOS**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam rupiah)

NO	NAMA SEKOLAH	SISA DANA BOS PER 31 DESEMBER 2023	PENDAPATAN BOS 2024	REALISASI BELANJA 2024	SISA DANA BOS		
					TUNAI	BANK	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7
<b>A.</b>	<b>JENJANG SD NEGERI</b>						
1	SD NEGERI 001XI SUNGAI PENUH	-	321.100.000,00	321.100.000,00	-	-	-
2	SD NEGERI 002XI PASAR SUNGAI PENUH	-	227.500.000,00	227.500.000,00	-	-	-
3	SD NEGERI 003XI AUR DURI	-	57.600.000,00	57.600.000,00	-	-	-
4	SD NEGERI 004XI PELAYANG RAYA	-	307.600.000,00	307.600.000,00	-	-	-
5	SD NEGERI 005XI KEL.SUNGAI PENUH	-	89.100.000,00	89.100.000,00	-	-	-
6	SD NEGERI 006XI AUR DURI	-	33.300.000,00	33.300.000,00	-	-	-
7	SD NEGERI 007XI SUMUR ANYIR	-	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	-
8	SD NEGERI 008XI KEL.PASAR SUNGAI PENUH	-	133.200.000,00	133.200.000,00	-	-	-
9	SD NEGERI 009XI KEL. PASAR SUNGAI PENUH	-	82.800.000,00	82.800.000,00	-	-	-
10	SD NEGERI 010XI PONDOK AGUNG	-	111.600.000,00	111.600.000,00	-	-	-
11	SD NEGERI 011XI DESA GEDANG	-	398.500.000,00	398.500.000,00	-	-	-
12	SD NEGERI 012XI KELL.DUSUN BARU	-	13.500.000,00	13.500.000,00	-	-	-
13	SD NEGERI 013XI SUMUR ANYIR	-	35.100.000,00	35.100.000,00	-	-	-
14	SD NEGERI 014XI PELAYANG RAYA	-	45.900.000,00	45.900.000,00	-	-	-
15	SD NEGERI 015XI LAWANG AGUNG	-	223.900.000,00	223.900.000,00	-	-	-
16	SD NEGERI 016XI TALANG LINDUNG	-	41.400.000,00	41.400.000,00	-	131,70	131,70
17	SD NEGERI 017XI SUNGAI NING	-	62.992.500,00	62.992.500,00	-	-	-
18	SD NEGERI 018XI KARYA BAKTI	-	49.500.000,00	49.500.000,00	-	-	-
19	SD NEGERI 019XI SUNGAI JERNIH	747.000,00	26.100.000,00	26.847.000,00	-	-	-
20	SD NEGERI 020XI KOTO LEBU	-	77.400.000,00	77.400.000,00	-	-	-
21	SD NEGERI 021XI LAWANG AGUNG	-	237.600.000,00	237.600.000,00	-	-	-
22	SD NEGERI 022XI SUMUR ANYIR	-	89.100.000,00	89.100.000,00	-	-	-
23	SD NEGERI 023XI AUR DURI	-	43.200.000,00	43.200.000,00	-	-	-
24	SD NEGERI 024XI KEL. DUSUN BARU	89,54	41.400.000,00	41.400.089,54	-	-	-
25	SD NEGERI 025XI DESA GEDANG	-	218.700.000,00	218.700.000,00	-	-	-
26	SD NEGERI 026XI CEMPAKA	-	54.900.000,00	54.900.000,00	-	-	-
27	SD NEGERI 027XI KAMPUNG DIILIR	0,51	40.500.000,00	40.500.000,51	-	0,51	0,51
28	SD NEGERI 028XI TANJUNG	-	94.500.000,00	94.500.000,00	-	-	-
29	SD NEGERI 029XI CEMPAKA	-	106.200.000,00	106.200.000,00	-	-	-
30	SD NEGERI 030XI KOTO DIAN	-	72.900.000,00	72.900.000,00	-	-	-
31	SD NEGERI 031XI KAMPUNG DALAM	-	95.400.000,00	95.400.000,00	-	-	-
32	SD NEGERI 032XI SIMPANG TIGA RAWANG	-	91.800.000,00	91.800.000,00	-	-	-
33	SD NEGERI 033XI TANJUNG MUDA	-	89.100.000,00	89.100.000,00	-	-	-
34	SD NEGERI 034XI KOTO TELUK	-	49.500.000,00	49.500.000,00	-	-	-
35	SD NEGERI 035XI LARIK KEMAHAN	-	45.900.000,00	45.900.000,00	-	-	-
36	SD NEGERI 036XI PALING SERUMPUN	-	58.500.000,00	58.500.000,00	-	-	-
37	SD NEGERI 037XI KOTO KERAS	-	109.800.000,00	109.800.000,00	-	-	-
38	SD NEGERI 038XI KOTO LOLO	-	151.200.000,00	151.200.000,00	-	-	-
39	SD NEGERI 039XI SUNGAI LIUK	0,67	57.600.000,00	57.600.000,67	-	-	-
40	SD NEGERI 040XI KOTO LIMAU MANIS	282.000,00	142.818.000,00	143.100.000,00	-	-	-
41	SD NEGERI 041XI KAMPUNG TENGAH	-	72.900.000,00	72.900.000,00	-	-	-
42	SD NEGERI 042XI SEBERANG	-	103.500.000,00	103.500.000,00	-	-	-
43	SD NEGERI 043XI KOTO RENAH	-	256.500.000,00	256.500.000,00	3.700,00	-	3.700,00
44	SD NEGERI 044XI KOTO BENTO	0,69	24.300.000,00	24.300.000,69	-	464,69	464,69
45	SD NEGERI 045XI KOTO DUA	-	133.200.000,00	133.200.000,00	-	-	-
46	SD NEGERI 046XI KOTO Tengah	-	78.300.000,00	78.300.000,00	-	500,62	500,62
47	SD NEGERI 047XI KOTO BARU	-	154.600.000,00	154.600.000,00	-	-	-
48	SD NEGERI 048/XI Koto Lolo	669.511,86	-	669.511,86	-	-	-
49	SD NEGERI 049XI DEBAI	-	20.700.000,00	20.700.000,00	-	0,15	0,15
50	SD NEGERI 050XI KUMUN HILIR	-	119.700.000,00	119.700.000,00	-	-	-
51	SD NEGERI 051XI KUMUN MUDIK	-	90.900.000,00	90.900.000,00	-	-	-
52	SD NEGERI 052XI ULU AIR	-	81.900.000,00	81.900.000,00	-	-	-
53	SD NEGERI 053XI AIR TELUH	-	67.500.000,00	67.500.000,00	-	-	-
54	SD NEGERI 054XI MUARA AIR	-	37.800.000,00	37.800.000,00	-	-	-
55	SD NEGERI 055XI PINGGIR AIR	-	52.200.000,00	52.200.000,00	-	-	-
56	SD NEGERI 056XI KUMUN MUDIK	-	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-	-
57	SD NEGERI 057XI KUMUN MUDIK	-	63.900.000,00	63.900.000,00	-	-	-
58	SD NEGERI 058XI KOTO DUMO	-	150.100.000,00	150.100.000,00	-	-	-
59	SD NEGERI 059XI KOTO PUDUNG	-	67.500.000,00	67.500.000,00	-	-	-
60	SD NEGERI 060XI PENDUNG HIANG	-	96.300.000,00	96.300.000,00	-	-	-
61	SD NEGERI 061XI KOTO PANAP	-	53.100.000,00	53.100.000,00	-	-	-
62	SD NEGERI 062XI KOTO BARU	-	36.900.000,00	36.900.000,00	-	-	-
63	SD NEGERI 063XI KOTO PADANG	-	102.600.000,00	102.600.000,00	-	-	-

NO	NAMA SEKOLAH	SISA DANA BOS PER 31 DESEMBER 2023	PENDAPATAN BOS 2024	REALISASI BELANJA 2024	SISA DANA BOS		
					TUNAI	BANK	JUMLAH
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = 6 + 7
64	SD NEGERI 064XI KOTO TUO	-	54.000.000,00	54.000.000,00	-	-	-
65	SD NEGERI 065XI DESA BARU DEBAI	-	18.900.000,00	18.900.000,00	-	-	-
66	SD NEGERI 066XI TANJUNG BUNGA	-	63.900.000,00	63.900.000,00	-	-	-
67	SD NEGERI 067XI KOTO TENGAH	-	27.000.000,00	27.000.000,00	-	-	-
68	SD NEGERI 068XI RENAH KAYU EMBUN	-	19.800.000,00	19.800.000,00	-	-	-
69	SD NEGERI 069XI KAMPUNG TENGAH	-	25.200.000,00	25.200.000,00	-	-	-
70	SD NEGERI 070/XI PERTIWI	-	194.200.000,00	194.200.000,00	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>1.698.603,27</b>	<b>6.551.910.500,00</b>	<b>6.553.609.103,27</b>	<b>3.700,00</b>	<b>1.097,67</b>	<b>4.797,67</b>
<b>A. JENJANG SMP NEGERI</b>							
1	SMP NEGERI 01 SUNGAI PENUH	-	633.300.000,00	633.300.000,00	-	-	-
2	SMP NEGERI 02 SUNGAI PENUH	229,00	801.699.771,00	801.700.000,00	-	-	-
3	SMP NEGERI 03 SUNGAI PENUH	-	413.300.000,00	413.300.000,00	-	-	-
4	SMP NEGERI 04 SUNGAI PENUH	-	411.200.000,00	411.200.000,00	-	-	-
5	SMP NEGERI 05 SUNGAI PENUH	162,00	46.200.000,00	46.200.162,00	-	-	-
6	SMP NEGERI 06 SUNGAI PENUH	-	184.600.000,00	184.600.000,00	-	-	-
7	SMP NEGERI 07 SUNGAI PENUH	-	150.400.000,00	150.400.000,00	-	-	-
8	SMP NEGERI 08 SUNGAI PENUH	-	809.400.000,00	809.400.000,00	-	-	-
9	SMP NEGERI 09 SUNGAI PENUH	-	282.500.000,00	282.500.000,00	-	-	-
10	SMP NEGERI 10 SUNGAI PENUH	-	69.100.000,00	69.100.000,00	-	-	-
11	SMP NEGERI 11 SUNGAI PENUH	-	180.400.000,00	180.400.000,00	-	-	-
12	SMP NEGERI 12 SUNGAI PENUH	122,00	134.199.878,00	134.200.000,00	-	-	-
13	SMP NEGERI 13 SUNGAI PENUH	-	91.100.000,00	91.100.000,00	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>513,00</b>	<b>4.207.399.649,00</b>	<b>4.207.400.162,00</b>	-	-	-
<b>TOTAL SISA KAS BOS</b>		<b>1.699.116,27</b>	<b>10.759.310.149,00</b>	<b>10.761.009.265,27</b>	<b>3.700,00</b>	<b>1.097,67</b>	<b>4.797,67</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**DAFTAR REKENING BOP PAUD DAN KESETARAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Nama Sekolah	NPSN	No Rekening	A.N Rekening
1	2	3	4	5
1	TK RIDHO MANDIRI	10505505	3003620734	10505505 TK RIDHO MANDIRI
2	TK PERTIWI RAWANG	10505509	3003621005	10505509 TK PERTIWI HAMPARAN RAWANG
3	TK PGRI SIMPANG TIGA RAWANG	10505511	3003719587	10505511 TK PGRI HAMPARAN RAWANG
4	TK PGRI KOTO DIAN	10505514	3001828419	10505514 TK PGRI KOTO DIAN
5	TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL	10505520	3001832928	10505520 TK AISIYAH SUNGAI PENUH
6	TK. PGRI SUNGAI PENUH	10505521	3004123677	10505521 TK PGRI SUNGAI PENUH
7	TK PERTIWI KUMUN HILIR	10505540	3001847235	10505540 TK PERTIWI KUMUN HILIR
8	KB JAYA BERSAMA	69875578	3001852956	69875578 KB JAYA BERSAMA
9	KB MUSLIMAT I	69875579	3001851038	69875579 KB MUSLIMAT I
10	KB. PERMATA BUNDA II	69875580	3001853618	69875580 PAUD PERMATA BUNDA II
11	KB ANUGRAH	69875581	3001834648	69875581 KB ANUGRAH
12	KB. NUSANTARA	69875583	304045523	69875583 PAUD NUSANTARA
13	KB TERAMPIL	69875584	3001834206	69875584 KB TERAMPIL
14	KB CERDAS	69875585	304045547	69875585 PAUD CERDAS
15	KB SINAR INSANI	69875586	3001836713	69875586 KB SINAR INSANI
16	KB TUNAS BANGSA	69875587	3003307308	69875587 KB TUNAS BANGSA
17	KB. AMANAH	69875588	3003305731	69875588 KB AMANAH
18	KB. PERMATA BUNDA I	69875589	3001834176	69875589 KB PERMATA BUNDA I
19	KB NADA ISLAM	69875590	3001833517	69875590 PAUD NADA ISLAM
20	KB MUSLIMAT III	69875593	3001846678	69875593 PAUD MUSLIMAT III
21	KB MUSLIMAT II	69875594	3001838724	69875594 KB MUSLIMAT II
22	KB HIKMAH	69875595	3001846662	69875595 KELOMPOK BERMAIN HIKMAH
23	KB. PAHLAWAN	69875596	3001855874	69875596 PAUD PAHLAWAN
24	KB ASUHAN BUNDA	69875599	3001848088	69875599 KB ASUHAN BUNDA
25	KB ASUHAN IBU	69875600	304045612	69875600 KB ASUHAN IBU
26	KB. MENTARI PAGI	69875602	3003933856	69875602 KB MENTARI PAGI
27	KB. PINANG SEBATANG	69875603	3001839321	69875603 KB PINANG SEBATANG
28	KB. HARAPAN BUNDA	69875604	304069023	69875604 KB HARAPAN BUNDA
29	KB. TUNAS HARAPAN	69875606	3003903997	69875606 KB TUNAS HARAPAN
30	KB. EMBUN PAGI	69875607	304069082	69875607 KB EMBUN PAGI
31	KB. MAHKOTA	69875608	3003621625	69875608 PAUD MAHKOTA
32	KB. KASIH BUNDA	69875610	304069066	69875610 KB KASIH BUNDA
33	KB. AL-GUFRON	69875611	3001849343	69875611 KB AL-GUFRON
34	KB HARAPAN BUNDA	69875615	3001850953	69875615 PAUD HARAPAN BUNDA
35	KB AL-MULTAZAM	69875616	3001816275	69875616 PAUD AL-MULTAZAM
36	KB BALITAKU	69875617	3001848258	69875617 KELOMPOK BERMAIN BALITAKU
37	KB RIFQAH	69875620	304045647	69875620 PAUD RIFQAH
38	SPS. ASOKA	69875622	3001837388	69875622 PAUD SPS ASOKA
39	SPS. MUSLIMAT V	69875623	3003306444	69875623 PAUD MUSLIMAT V
40	SPS AL-FAJRI	69875624	3001849033	69875624 SPS AL-FAJRI
41	SPS TUNAS BARU	69875625	3003935212	69875625 SPS TUNAS BARU
42	SPS SAYANG IBU	69875626	3004436767	69875626 PAUD SAYANG IBU
43	SPS CAHAYA	69875627	3001848894	69875627 SPS CAHAYA
44	SPS. HARAPAN IBU	69875630	3003900176	69875630 SPS HARAPAN IBU
45	SPS SETIA BHAKTI	69875632	3003974258	69875632 PAUD SETIA BHAKTI
46	SPS AN-NUR	69875633	3001817808	69875633 PAUD AN-NUR
47	SPS. PASIR PUTIH	69875634	3001843566	69875634 PAUD PASIR PUTIH
48	SPS. BUNGA BINTANG	69875635	3001862501	69875635 PAUD BUNGA BINTANG
49	TK ANNISA	69887321	3001845224	69887321 TK ANNISA
50	KB. ANNISA	69887322	3003974129	69887322 KELOMPOK BERMAIN ANNISA
51	KB AL-IKHLAS	69887324	3004413562	69887324 PAUD AL IKHLAS
52	KB HIDAYATUSSALAM	69887326	3001840699	69887326 PAUD HIDAYATUSSALAM
53	KB. PELITA BANGSA	69887328	3002493917	69887328 KB PELITA BANGSA
54	KB. KEMALA	69887329	3001841989	69887329 KB KEMALA
55	KB. TITIAN	69887331	3003285315	69887331 KB TITIAN
56	KB TUNAS BANGSA	69887332	3001839496	69887332 KB TUNAS BANGSA
57	KB AR-ROHIM	69887333	3001848697	69887333 KB AR-ROHIM
58	KB BILHAQQI	69887334	304070967	69887334 KB BILHAQQI
59	KB GEMILANG	69887335	304071133	69887335 KB GEMILANG
60	KB KASIH IBU	69887336	304045531	69887336 KB KASIH IBU
61	TPA. ANNISA	69887337	3003973847	69887337 TPA ANNISA
62	KB AULIA	69887338	304071125	69887338 KB AULIA

No	Nama Sekolah	NPSN	No Rekening	A.N Rekening
1	2	3	4	5
63	SPS SAYANG IBU	69887339	304045493	69887339 SPS SAYANG IBU
64	KB. SEHAT	69887340	304069724	69887340 PAUD SEHAT
65	SPS CERIA	69887341	304070978	69887341 SPS CERIA
66	SPS ANANDA	69887342	3004414631	69887342 PAUD ANANDA
67	SPS. AL-ISHLAH	69907448	3001862463	69907448 PAUD AL-ISHLAH
68	TPA. SAFIRA	69908610	3001821872	69908610 PAUD TPA SAFIRA
69	KB. MANIK-MANIK	69908619	3001862528	69908619 PAUD MANIK-MANIK
70	KB. MUTIARA BUNDA	69908632	3001854045	69908632 KB MUTIARA BUNDA
71	KB. MUARA KASIH	69908677	3001846287	69908677 PAUD MUARA KASIH
72	TK. MH. QASHWA	69909693	304071044	69909693 TK MH QASHWA
73	TK. DHARMA WANITA TANAH KAMPUNG	69914828	3001832963	69914828 TK DHARMA WANITA T KAMPUNG
74	TK. PERTIWI ULU AIR	69914831	3003974447	69914831 TK PERTIWI ULU AIR
75	TK. AL-AKBAR	69914832	3001811362	69914832 TK AL AKBAR
76	TK. KARTIKA II-24	69914835	3001842772	69914835 TK KARTIKA II 24
77	TK NEGERI PEMBINA SUNGAI PENUH	69914837	3003743488	69914837 TK NEGERI PEMBINA S PENUH
78	TK. SYATHARIYAH	69914841	3001841307	69914841 TK SYATHARIYAH
79	TK. NURUL HUDA LAWANG AGUNG	69914847	3001841385	69914847 TK NURUL HUDA LAWANG AGUNG
80	TK. NURUL IMAN	69914850	304071117	69914850 TK NURUL IMAN
81	SPS. KASIH IBU	69914853	3001848851	69914853 PAUD TERPADU KASIH IBU
82	TK. KEMALA BHAYANGKARI	69914855	3001841911	69914855 TK KEMALA BHAYANGKARI
83	TK. DWI MULYA BUGENVIL	69914859	3001807721	69914859 TK DWI MULYA BUGENVIL
84	TK. AN-NUR	69914863	302159351	69914863 TK AN-NUR
85	TK. AR-RAUDHAH	69914864	3001824607	69914864 TK AR-RAUDHAH
86	TK. NEGERI PEMBINA KOTA	69914866	3004090224	69914866 TK NEGERI PEMBINA KOTA
87	TK. DW DINAS PENDIDIKAN	69914868	3003620785	69914868 TK DW DINAS PENDIDIKAN
88	TK. DHARMA WANITA SUNGAI LIUK	69914869	3001847968	69914869 TK DHARMA WANITA SEI LIUK
89	TK. DHARMA WANITA KOTO BARU	69914870	3003620677	69914870 TK DHARMA WANITA KOTO BARU
90	TK. NURUL FALAH 1 KOTO BARU	69914871	3001826505	69914871 TK NURUL FALAH I KOTO BARU
91	TK. PGRI KAMPUNG TENGAH	69914872	3001848231	69914872 TK PGRI KAMPUNG TENGAH
92	TK. MUTIARA AL-MADANI	69914874	3004129384	69914874 TK MUTIARA AL MADANI
93	SPS. SALMA	69916887	3001864318	69916887 PAUD SALMA
94	KB. BUNDA	69916890	3001850058	69916890 PAUD KB BUNDA
95	KB. NURUL HIKMAH	69916894	3004394177	69916894 PAUD NURUL HIKMAH
96	TK. MADU AYUDHIA	69937761	3001856331	69937761 TK MADU AYUDHIA
97	KB. SEBINGKEH	69937762	3001840467	69937762 KB SEBINGKEH
98	KB. ANGGREK	69937763	3001837159	69937763 KB ANGGREK
99	TK. HIDAYATUSSALAM	69937765	3001834311	69937765 TK HIDAYATUSSALAM
100	SPS. AMANAH	69937766	3001836958	69937766 SPS AMANAH
101	SPS. HARMONIS	69937767	3002454563	69937767 SPS HARMONIS
102	SPS. HARAPAN BUNDA	69939981	3001829644	69939981 PAUD HARAPAN BUNDA
103	TK. MUTIARA BUNDA	69950701	3001844198	69950701 TK MUTIARA BUNDA
104	KB. CERIA	69954785	3001848142	69954785 KB CERIA
105	SPS. MUTIARA HAYATI	69972761	3002171162	69972761 PAUD MUTIARA HAYATI
106	TK NEGERI PEMBINA TANAH KAMPUNG	69980004	3004224336	69980004 TK PEMBINA TANAH KAMPUNG
107	TK NEGERI PEMBINA HAMPARAN RAWA	69980005	3003492124	69980005 TK NEGERI PEMBINA HAMPARAN
108	KB. KASIH BUNDA	69983787	3002102268	69983787 PAUD KASIH BUNDA
109	TK. AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA)	69983837	3002382098	69983837 TK ABA II
110	KB. KASIH BUNDA	69984130	3002082259	69984130 KB.KASIH BUNDA
111	KB. CERIA AGUNG	69987348	3003920096	69987348 PAUD CERIA AGUNG
112	TK. NEGERI PEMBINA KUMUN DEBAI	69989083	3003358738	69989083 TK NEGERI PEMBINA KUMUN
113	TK. NEGERI PEMBINA SUNGAI BUNGKAL	69989084	3003366072	69989084 TK NEGERI PEMBINA BUNGKAL
114	SPS MUSLIMAT VI	70001644	3003439018	70001644 PAUD MUSLIMAT VI
115	KB CENDIKIA	70002824	3004387189	70002824 KB PAUD CENDIKIA
117	TK NEGERI PEMBINA KT BARU	70015268	3004259668	70015268 TK NEGERI PEMBINA KT BARU
118	TK NEGERI PEMBINA PONDOK TINGGI	70038756	3005719169	70038756 TKN PEMBINA PONDOK TINGGI
119	PKBM. RAUDHATUL IKHSAN	P9934729	3004183133	P9934729 PKBM RAUDHATUL IKHSAN
120	PKBM. HARAPAN BERSAMA	P9934730	3004186647	P9934730 PKBM HARAPAN BERSAMA
121	PKBM. SALMA	P9948082	3004174158	P9948082 PKBM SALMA
122	PKBM. ATTOYIBAH	P9954393	3004189042	P9954393 PKBM ATTOYIBAH



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN BELANJA DANA BOSP**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA SEKOLAH	SALDO KAS PER 31 DESEMBER 2023	JENIS REALISASI DANA BOSP				SALDO KAS PER 31 DESEMBER 2024	
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA HIBAH	BELANJA MODAL		JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7 = 3 : 6	8
<b>BOP PAUD</b>								
1	TK NEGERI PEMBINA SUNGAI PENUH	24.325,14	18.000.000,00	41.400.000,00	0,00	0,00	59.400.000,00	44.141,43
2	TK. NEGERI PEMBINA	9.817,12	12.000.000,00	55.200.000,00	0,00	0,00	67.200.000,00	54.964,04
3	TK NEGERI PEMBINA TANAH KAMPUNG	7.737,38	3.520.000,00	18.080.000,00	0,00	4.000.000,00	25.600.000,00	15.902,72
4	TK NEGERI PEMBINA HAMPARAN RAWANG	4.445,92	9.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	11.864,36
5	TK. NEGERI PEMBINA KUMUN DEBAI	2.866,33	-	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	6.230,16
8	TK. NEGERI PEMBINA SUNGAI BUNGKAL	5.197,10	3.600.000,00	13.800.000,00	0,00	2.500.000,00	19.900.000,00	10.639,31
7	TK. NEGERI PEMBINA KOTO BARU	2.567,35	3.600.000,00	34.200.000,00	0,00	9.500.000,00	47.300.000,00	21.333,52
8	TK NEGERI PEMBINA PONDOK TINGGI	-	7.000.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	3.029,06
<b>JUMLAH</b>			<b>57.220.000,00</b>	<b>184.580.000,00</b>		<b>16.000.000,00</b>	<b>257.800.000,00</b>	<b>168.104,60</b>



**PEMINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
RINCIAN KAS DANA BOK PUSKESMAS  
TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam rupiah)

NO	UNIT ORGANISASI	SALDO AWAL KAS BOK	PENDAPATAN	BELANJA	BANK	RINCIAN KAS BOK		NO REK
						SALDO KAS PER 31 DESEMBER 2024	TUNAI	
1	2		3	4	5	4	5	6
1	Puskesmas Sungai Penuh	100.054.293,00	461.361.707,00	517.000.661,00	44.415.339,00	44.415.339,00		1590093437
2	Puskesmas Hamparan Rawang	64.082.073,00	853.902.927,00	815.406.734,00	102.578.266,00	102.578.266,00		1590093517
3	Puskesmas Kumun Debai	141.220.014,00	768.094.986,00	669.558.072,00	239.756.928,00	239.756.928,00		1590093506
4	Puskesmas Desa Gedang	110.952.844,00	468.812.156,00	563.184.202,00	16.580.798,00	16.340.798,00		1590093448
5	Puskesmas Tanah Kampung	159.011.390,00	835.988.610,00	776.081.947,00	218.918.053,00	218.918.053,00		1590093528
6	Puskesmas Koto Baru	76.354.714,00	694.545.286,00	604.731.333,00	166.168.667,00	166.168.667,00		1590093482
7	Puskesmas Koto Lolo	75.205.095,00	633.431.905,00	668.868.672,00	39.768.328,00	39.768.328,00		1590093459
8	Puskesmas Sungai Liuk	1.555.539,00	681.880.461,00	682.745.164,00	690.836,00	690.836,00		1590093460
9	Puskesmas Sungai Bungkal	99.833.642,00	640.829.358,00	561.047.318,00	179.615.682,00	179.615.682,00		1590093471
10	Puskesmas Pondok Tinggi	304.456.991,00	533.273.009,00	690.314.614,00	147.415.386,00	147.415.386,00		1590093493
11	Puskesmas Tanjung	147.228.338,00	365.456.662,00	394.003.726,00	118.681.274,00	118.681.274,00		1590093426
<b>Jumlah</b>		<b>1.279.954.933,00</b>	<b>6.937.577.067,00</b>	<b>6.942.942.443,00</b>	<b>1.274.589.557,00</b>	<b>1.274.349.557,00</b>	<b>-</b>	



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**DAFTAR REKENING GIRO FKTP PADA DINAS KESEHATAN KOTA SUNGAI PENUH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NO.</b>	<b>NAMA SKPD</b>	<b>NAMA REKENING</b>	<b>NO.REKENING</b>	<b>BANK</b>	<b>TUJUAN PEMBUKUAN REKENING</b>
1.	PUSKESMAS SUNGAI PENUH	JKN PUSKESMAS SUNGAI PENUH	3000060738	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	Penyaluran Dana JKN
2.	PUSKESMAS HAMPARAN RAWANG	JKN PUSKESMAS RAWANG	3000060673	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	Penyaluran Dana JKN
3.	PUSKESMAS KUMUN DEBAI	JKN PUSKESMAS KUMUN	3000060711	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	Penyaluran Dana JKN
4.	PUSKESMAS DESA GEDANG	JKN PUSKESMAS DESA GEDANG	3000060754	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	Penyaluran Dana JKN
5.	PUSKESMAS TANAH KAMPUNG	JKN PUSKESMAS TANAH KAMPUNG	3000061448	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	Penyaluran Dana JKN
6.	PUSKESMAS KOTO BARU	JKN PUSKESMAS KOTO BARU	3000061602	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	Penyaluran Dana JKN
7.	PUSKESMAS SUNGAI BUNGKAL	JKN PUSKESMAS SUNGAI BUNGKAL	3000595895	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	Penyaluran Dana JKN
8.	PUSKESMAS KOTO LOLO	JKN PUSKESMAS KOTO LOLO	3000284897	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	Penyaluran Dana JKN
9.	PUSKESMAS SUNGAI LIUK	JKN PUSKESMAS SUNGAI LIUK	3000587938	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	Penyaluran Dana JKN
10.	PUSKESMAS PONDOK TINGGI	JKN PUSKESMAS PONDOK TINGGI	3001814345	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	Penyaluran Dana JKN
11.	PUSKESMAS TANJUNG	JKN PUSKESMAS TANJUNG	3002881887	BPD Jambi Cab.Sungai Penuh	Penyaluran Dana JKN



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN PIUTANG PAJAK**

**PIUTANG PAJAK RESTORAN**

Tgl. SKPD	No. SKPD	NAMA	JENIS PAJAK	ALAMAT	JUMLAH Rp.
<b>NIHIL</b>					
Jumlah					-

**PIUTANG PAJAK REKLAME**

**TAHUN 2012**

Tgl. SKPD	No. SKPD	NAMA	JENIS PAJAK	ALAMAT	JUMLAH Rp.
11/12/2012	1200008071	PT. ASIA TEMBAKAU	Pajak Reklame	Muaro Bungo	816.000,00
Jumlah					816.000,00

**TAHUN 2013**

Tgl. SKPD	No. SKPD	NAMA	JENIS PAJAK	ALAMAT	JUMLAH Rp.
15/02/2013	13000576	STIT YPI	Pajak Reklame	Jln. Ade Irma Suryani	408.000,00
15/02/2013	13000577	STIT YPI	Pajak Reklame	Jln. Ade Irma Suryani	408.000,00
29/05/2013	13002553	PRIMAGAMA	Pajak Reklame	Jln. Pancasila Sungai Penuh	408.000,00
Jumlah					1.224.000,00

**TAHUN 2015**

Tgl. SKPD	No. SKPD	NAMA	JENIS PAJAK	ALAMAT	JUMLAH Rp.
06/04/2015	15001506	CV. MULTI MEDIATAMA ADV.	Pajak Reklame	Jln. Gajah Mada Padang	1.428.000,00
06/04/2015	15001507	CV. MULTI MEDIATAMA ADV.	Pajak Reklame	Jln. Gajah Mada Padang	1.428.000,00
Jumlah					2.856.000,00

**TAHUN 2017**

Tgl. SKPD	No. SKPD	NAMA	JENIS PAJAK	ALAMAT	JUMLAH Rp.
12/11/2017	17MS007969	PT. TELKOMSEL	Pajak Reklame	Jl. Jend. Sudirman Muara Bungo	408.000,00
Jumlah					408.000,00

**TAHUN 2018**

Tgl. SKPD	No. SKPD	NAMA	JENIS PAJAK	ALAMAT	JUMLAH Rp.
27/9/2018	18AG007628	EMIL PRINTING (SHARP)	Pajak Reklame	Padang - Sumatera Barat	4.080.000,00
09/04/2018	18AG006937	GERAI HALO TELKOMSEL	Pajak Reklame	Jl. Jend. Sudirman Sungai Penuh	1.632.000,00
09/04/2018	18AG006938	GERAI HALO TELKOMSEL	Pajak Reklame	Jl. Jend. Sudirman Sungai Penuh	1.632.000,00
Jumlah					7.344.000,00

**TAHUN 2019**

Tgl. SKPD	No. SKPD	NAMA	JENIS PAJAK	ALAMAT	JUMLAH Rp.
10/05/2019	19AG003378	ASUS INDONESIA	Pajak Reklame	Jakarta - Luar Daerah	1.632.000,00
10/05/2019	19AG003379	ASUS INDONESIA	Pajak Reklame	Jakarta - Luar Daerah	1.632.000,00
10/05/2019	19AG003380	ASUS INDONESIA	Pajak Reklame	Jakarta - Luar Daerah	1.632.000,00
10/05/2019	19AG003381	ASUS INDONESIA	Pajak Reklame	Jakarta - Luar Daerah	1.632.000,00
10/05/2019	19AG003387	ASUS INDONESIA	Pajak Reklame	Jakarta - Luar Daerah	816.000,00
10/05/2019	19AG003390	ASUS INDONESIA	Pajak Reklame	Jakarta - Luar Daerah	816.000,00
10/05/2019	19AG003391	ASUS INDONESIA	Pajak Reklame	Jakarta - Luar Daerah	816.000,00
Jumlah					8.976.000,00

**TAHUN 2020**

Tgl. SKPD	No. SKPD	NAMA	JENIS PAJAK	ALAMAT	JUMLAH Rp.
29/6/2020	20RA002717	CV. U13 MEDIA	Pajak Reklame	Jl. Kelapa Sawit No. 692 RT. 15 RW.05 Kel. Srijaya Kec. Alang-alang Lebar Palembang	225.000,00
Jumlah					225.000,00

**TAHUN 2021**

Tgl. SKPD	No. SKPD	NAMA	JENIS PAJAK	ALAMAT	JUMLAH Rp.
21/06/2021	21RA002264	ASUS INDONESIA	Pajak Reklame	Jakarta - Luar Daerah	1.632.000,00
29/06/2021	21AG002440	NUSANTARA CELL	Pajak Reklame	Jl. Depati Parbo Sungai Penuh	816.000,00
Jumlah					2.448.000,00

**TAHUN 2022**

Tgl. SKPD	No. SKPD	NAMA	JENIS PAJAK	ALAMAT	JUMLAH Rp.
24/02/2022	22AG000864	NUSANTARA CELL	Pajak Reklame	Jl. Depati Parbo Kec. Pondok Tinggi	816.000,00
01/07/2022	22HD003309	TRAVEL UMROH AJWA	Pajak Reklame	Sumur Anyir Kec. Sungai Bungkal	8.640.000,00
19/09/2022	22AG005301	MERSI	Pajak Reklame	Jln. Gajah Mada Kec. Pondok Tinggi	720.000,00
19/09/2022	22AG005303	MERSI	Pajak Reklame	Jln. Gajah Mada Kec. Pondok Tinggi	120.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>10.296.000,00</b>

**TAHUN 2023**

Tgl. SKPD	No. SKPD	NAMA	JENIS PAJAK	ALAMAT	JUMLAH Rp.
03/04/2023	22AG000921	NUSANTARA CELL	Pajak Reklame	Jl. Depati Parbo Kec. Pondok Tinggi	816.000,00
08/08/2023	23RA003847	BANK MANDIRI TASPEN	Pajak Reklame	Jl. RE. Martadinata Kec. Pondok Tinggi	595.000,00
08/08/2023	23RA003848	BANK MANDIRI TASPEN	Pajak Reklame	Jl. RE. Martadinata Kec. Pondok Tinggi	1.020.000,00
08/08/2023	23RA003849	BANK MANDIRI TASPEN	Pajak Reklame	Jl. RE. Martadinata Kec. Pondok Tinggi	340.000,00
08/08/2023	23RA003850	BANK MANDIRI TASPEN	Pajak Reklame	Jl. RE. Martadinata Kec. Pondok Tinggi	1.428.000,00
08/08/2023	23RA003851	BANK MANDIRI TASPEN	Pajak Reklame	Jl. RE. Martadinata Kec. Pondok Tinggi	2.448.000,00
08/08/2023	23RA003852	BANK MANDIRI TASPEN	Pajak Reklame	Jl. RE. Martadinata Kec. Pondok Tinggi	816.000,00
15/02/2023	22AG000351	BANK KERINCI	Pajak Reklame	Jl. Pancasila Ke. Pondok Tinggi	8.640.000,00
01/03/2023	22AG000500	TRAVEL UMROH AJWA	Pajak Reklame	Sumur Anyir Kec. Sungai Bungkal	8.640.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>24.743.000,00</b>

**TAHUN 2024**

Tgl. SKPD	No. SKPD	NAMA	JENIS PAJAK	ALAMAT	JUMLAH Rp.
19/11/2024	24RA013074	BANK MANDIRI TASPEN	Pajak Reklame	Jl. RE. Martadinata Kec. Pondok Tinggi	1.428.000,00
19/11/2024	24RA013075	BANK MANDIRI TASPEN	Pajak Reklame	Jl. RE. Martadinata Kec. Pondok Tinggi	2.448.000,00
19/11/2024	24RA013076	BANK MANDIRI TASPEN	Pajak Reklame	Jl. RE. Martadinata Kec. Pondok Tinggi	816.000,00
<b>Jumlah</b>					<b>4.692.000,00</b>
<b>Jumlah Piutang Pajak Reklame</b>					<b>64.028.000,00</b>

**LAPORAN PIUTANG PIUTANG PAJAK PENERANGAN JALAN  
PENERIMAAN 01 JANUARI 2024 S/D 31 DESEMBER 2024**

SKPD	PIUTANG 31/12/2023	PEMBAYARAN PIUTANG	SISA PIUTANG 31/12/2024	PENAMBAHAN PIUTANG TAHUN 2024	TOTAL PIUTANG 31/12/2024
BAKEUDA	353.329.832,00	353.329.832,00	-	359.847.816,00	359.847.816,00
<b>Jumlah</b>	<b>353.329.832,00</b>	<b>353.329.832,00</b>	<b>-</b>	<b>359.847.816,00</b>	<b>359.847.816,00</b>

**LAPORAN PIUTANG PBB-P2 2003 - 2024  
PENERIMAAN 01 JANUARI 2023 S/D 31 DESEMBER 2024**

TAHUN	TOTAL PIUTANG 31/12/2022	PEMBAYARAN PIUTANG	DENDA	TOTAL PEMBAYARAN	TOTAL PIUTANG 31/12/2022
2003	6.458.243,00	33.088,00	15.881,00	48.969,00	6.425.155,00
2004	5.716.063,00	31.744,00	15.236,00	46.980,00	5.684.319,00
2005	6.412.274,00	31.744,00	15.236,00	46.980,00	6.380.530,00
2006	16.521.218,00	37.130,00	17.822,00	54.952,00	16.484.088,00
2007	21.354.975,00	45.834,00	22.000,00	67.834,00	21.309.141,00
2008	28.849.405,00	97.336,00	46.719,00	144.055,00	28.752.069,00
2009	27.551.445,00	93.602,00	44.927,00	138.529,00	27.452.843,00
2010	17.196.969,00	56.932,00	27.326,00	84.258,00	17.140.037,00
2011	23.813.153,00	30.872,00	14.818,00	45.690,00	23.782.281,00
2012	146.763.417,00	4.994.570,00	2.397.386,00	7.391.956,00	141.768.847,00
2013	144.732.004,00	3.964.555,00	1.902.981,00	5.867.536,00	140.767.449,00
2014	111.017.898,00	1.291.907,00	620.112,00	1.912.019,00	109.725.991,00
2015	154.855.844,00	2.320.211,00	1.113.695,00	3.433.906,00	152.535.633,00
2016	138.426.566,00	2.383.661,00	1.144.154,00	3.527.815,00	136.042.905,00
2017	187.705.186,00	3.448.142,00	1.655.098,00	5.103.240,00	184.257.044,00
2018	145.874.135,00	4.562.621,00	2.190.047,00	6.752.668,00	141.311.514,00
2019	234.621.707,00	7.061.421,00	3.389.463,00	10.450.884,00	227.560.286,00
2020	381.928.971,00	16.103.338,00	7.729.591,00	23.832.929,00	365.825.633,00
2021	437.824.356,00	25.539.114,00	12.258.753,00	37.797.867,00	412.285.242,00
2022	535.649.349,00	45.064.422,00	19.151.756,00	64.216.178,00	490.584.927,00
2023	491.317.017,00	64.593.583,00	13.019.261,00	77.612.844,00	426.723.434,00
2024	653.666.265,00	51.316.730,00	1.602.066,00	52.918.796,00	602.349.535,00
<b>JUMLAH</b>	<b>653.666.265,00</b>	<b>51.316.730,00</b>	<b>1.602.066,00</b>	<b>52.918.796,00</b>	<b>3.685.153.903,00</b>
<b>JUMLAH PIUTANG PAJAK RESTORAN</b>					<b>-</b>
<b>JUMLAH PIUTANG PAJAK REKLAME</b>					<b>64.028.000,00</b>
<b>JUMLAH PIUTANG PAJAK PENARANGAN JALAN</b>					<b>359.847.816,00</b>
<b>JUMLAH PIUTANG PBB-P2</b>					<b>3.685.153.903,00</b>
<b>TOTAL PIUTANG PAJAK DAERAH</b>					<b>4.109.029.719,00</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN PIUTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN**  
**PER 31 DESEMBER 2024**

PASAR	TAHUN	TUNGGAKAN	KOREKSI	YANG SUDAH DIAYAR	SISA TUNGGAKAN
TANJUNG BAJURE	2019	Rp 16.728.000		Rp 216.000	Rp 16.512.000
	2020	Rp 32.280.000		Rp 1.440.000	Rp 30.840.000
	2021	Rp 61.104.000		Rp 2.688.000	Rp 58.416.000
	2022	Rp 74.232.000		Rp 2.016.000	Rp 72.216.000
	2023	Rp 80.664.000		Rp 3.120.000	Rp 77.544.000
	2024	Rp 81.504.000		Rp 360.000	Rp 81.144.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 346.512.000</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 9.840.000</b>	<b>Rp 336.672.000</b>
BERINGIN JAYA II	2019	Rp 14.617.500		Rp 495.000	Rp 14.122.500
	2020	Rp 23.363.000		Rp 3.142.500	Rp 20.220.500
	2021	Rp 50.092.500		Rp 3.247.500	Rp 46.845.000
	2022	Rp 65.565.000	(82.500,00)	Rp 6.570.000	Rp 58.995.000
	2023	Rp 70.875.000	82.500,00	Rp 1.357.500	Rp 69.517.500
	2024	Rp 71.460.000		Rp 82.500	Rp 71.377.500
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 295.973.000</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 14.895.000</b>	<b>Rp 281.078.000</b>
<b>TOTAL PIUTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU</b>		<b>Rp 642.485.000</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 24.735.000</b>	<b>Rp 617.750.000</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN PIUTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**  
**PER 31 DESEMBER 2024**

NO	NO KONTRAK	NAMA PIHAK KETIGA	LOKASI	NILAI KONTRAK	MASA		RETRIBUSI PER 31 DESEMBER 2022	PIUTANG TAHUN 2022	PEMBAYARAN RETRIBUSI	SISA PIUTANG TAHUN 2022	TANGGAL BAYAR
					MULAI SEWA	AKHIR SEWA					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
1	023/013/BAKEUDA-6/2022	YAYASAN SD IT AMANAH	Jl. Arga Selebar Daun, Desa Koto Tinggi	25.000.000	01 Januari 2022	31 Desember 2022	25.000.000,00	-	-	-	
2	030/03/BAKEUDA-6/2022	PASKAHLIS AMAOKI SEMBIRING	Desa Lawang Agung	3.600.000,00	31 Maret 2022	31 Maret 2023	2.700.000,00	-		-	
3	023/07/BAKEUDA-6/2022	MUHAMMAD MUNZIR	Perumahan RSUD MHAT	3.600.000,00	31 Maret 2022	31 Maret 2023	2.700.000,00	900.000,00	900.000,00	-	
4	023/012/BAKEUDA-6/2022	ISMAIL	RSUD MHAT	3.600.000,00	31 Maret 2022	31 Maret 2023	2.700.000,00	2.700.000,00	1.800.000,00	900.000,00	
5	023/08/BAKEUDA-6/2022	SYAHRONI	Desa Koto Tinggi Kec. Sungai Bungkal (Perumahan RSUD)	3.600.000,00	01 Januari 2022	31 Desember 2022	3.600.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	
6	023/11/BAKEUDA-6/2022	SIMON	Perumahan RSUD MHAT	3.600.000,00	31 Maret 2022	31 Maret 2023	2.700.000,00	2.700.000,00	1.800.000,00	900.000,00	
7	030/02/BAKEUDA-6/2022	SUTRIS HANDAYANI	Desa Air Teluh RT.003, Kec. Kumun Debai	3.600.000,00	01 Januari 2022	31 Desember 2022	3.600.000,00	1.800.000,00		1.800.000,00	
8	023/014/BAKEUDA-6/2022	BANK JAMBI	ATM Area RSUD MHAT, ATM Walikota, Kantor Fungsional	34.000.000	01 Juli 2022	31 Desember 2022	34.000.000,00	-		-	
9	023/014/BAKEUDA-6/2022	BANK JAMBI	ATM Area RSUD MHAT, ATM Walikota, Kantor Fungsional	25.500.000	01 Januari 2022	30 Juni 2022	25.500.000,00	-		-	
<b>PIUTANG PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TAHUN 2022</b>								<b>9.900.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>		
<b>SISA PIUTANG PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TAHUN 2022</b>										<b>5.400.000,00</b>	

NO	NO KONTRAK	NAMA PIHAK KETIGA	LOKASI	NILAI KONTRAK	MASA		RETRIBUSI PER 31 DESEMBER 2023	PIUTANG TAHUN 2023	PEMBAYARAN RETRIBUSI	SISA PIUTANG TAHUN 2023	TANGGAL BAYAR
					MULAI SEWA	AKHIR SEWA					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	030/03/BAKEUDA-6/2022	PASKAHLIS AMAOKI SEMBIRING	Desa Lawang Agung	3.600.000,00	31 Maret 2022	31 Maret 2023	900.000,00	-		-	
2	023/07/BAKEUDA-6/2022	MUHAMMAD MUNZIR	Perumahan RSUD MHAT	3.600.000,00	31 Maret 2022	31 Maret 2023	900.000,00	900.000,00	900.000,00	-	
3	023/012/BAKEUDA-6/2022	ISMAIL	RSUD MHAT	3.600.000,00	31 Maret 2022	31 Maret 2023	900.000,00	900.000,00		900.000,00	
4	023/11/BAKEUDA-6/2022	SIMON	Perumahan RSUD MHAT	3.600.000,00	31 Maret 2022	31 Maret 2023	900.000,00	900.000,00		900.000,00	
5	023/ /BAKEUDA-6/2022	AGUS KUSRIANTO	Desa Pelayang Raya, Kec. Sungai Bungkal	3.600.000,00	31 Januari 2022	31 Desember 2022	3.600.000,00	3.600.000,00		3.600.000,00	
6	023/ /BAKEUDA-6/2022	WINDA SUPITRIANI	Desa Koto Tinggi Kec. Sungai Bungkal (Perumahan Pondok Tinggi)	3.600.000,00	01 Januari 2022	31 Desember 2022	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-	
7	023/14/BAKEUDA-6/2022	BANK JAMBI (TANAH)	Desa Peranti, Kecamatan Pondok Tinggi	221.400.000,00	01 Januari 2022	31 Desember 2022	221.400.000,00	221.400.000,00	221.400.000,00	-	
8	030/18/BAKEUDA-6/2022	Dpt. H. LIVIA WARMAN, S.Sos	Jl. Jend. Ahmad Yani Desa Pasar Baru	94.668.000,00	01 Januari 2022	31 Desember 2022	85.218.000,00	85.218.000,00		85.218.000,00	
9	023/01/BAKEUDA-6/2023	BRI	ATM Area RSUD MHAT	20.800.000,00	01 Januari 2023	31 Desember 2023	20.800.000,00	20.800.000,00	20.800.000,00	-	

10	023/02/BAKEUDA-6/2023	BANK JAMBI (ATM)	ATM Area RSUD MHAT, ATM Wailikota, Kantor Fungsional	68.000.000,00	01 Januari 2023	30 Desember 2023	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	-
11	023/04/BAKEUDA-6/2023	YAYASAN SD IT AMANAH	Jl. Arga Selebar Daun, Desa Koto Tinggi	25.000.000,00	01 Januari 2023	31 Desember 2023	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-
12	023/05/BAKEUDA-6/2023	STIA- SAK	Jl. Sudirman, Kelurahan Pasar Sungai Penuh	125.400.000,00	01 Januari 2022	31 Desember 2023	62.700.000,00	62.700.000,00	62.700.000,00	62.700.000,00
13	023/05/BAKEUDA-6/2023	STIA- SAK	Jl. Sudirman, Kelurahan Pasar Sungai Penuh		01 Januari 2022	31 Desember 2023	62.700.000,00	62.700.000,00	62.700.000,00	62.700.000,00
14	023/11/BAKEUDA-6/2023	AGUS KUSRIANTO	Desa Pelayang Raya, Kec. Sungai Bungkal	3.600.000,00	31 Januari 2023	31 Desember 2023	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
15	023/13/BAKEUDA-6/2023	MUHAMMAD MUNZIR	Perumahan RSUD MHAT	3.600.000,00	01 Januari 2023	31 Desember 2023	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
16	023/14/BAKEUDA-6/2023	SUMARDI	Desa Koto Tinggi Kec. Sungai Bungkal (Perumahan	3.600.000,00	01 Januari 2023	31 Desember 2023	3.600.000,00	3.600.000,00	1.000.000,00	2.600.000,00
17	030/01/BAKEUDA-6/2023	JONIKA WIJAYA	Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi	3.600.000,00	01 Juni 2023	30 Juni 2024	2.100.000,00	2.100.000,00	1.500.000,00	600.000,00
18	030/02/BAKEUDA-6/2023	SUTRIS HANDAYANI	Desa Air Teluh RT.003, Kec. Kumun Debai	3.600.000,00	01 Januari 2023	31 Desember 2023	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-
19	030/03/BAKEUDA-6/2023	STIE-SAK	Jl. Sudirman, Kelurahan Pasar Sungai Penuh	87.300.000,00	01 April 2023	01 April 2024	65.475.000,00	65.475.000,00	65.475.000,00	-
20	030/03/BAKEUDA-6/2023	MARTATI LA	Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh	3.600.000,00	01 Januari 2023	31 Desember 2023	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	-
21	030/04/BAKEUDA-6/2023	RUDI DARMAWAN, S.H., M.H	Desa Air Teluh, Kec. Kumun Debai	3.600.000,00	01 Januari 2023	31 Desember 2023	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
22	030/05/BAKEUDA-6/2023	LENI SUSRAWATI SR	Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh	3.600.000,00	01 Januari 2023	31 Desember 2023	3.600.000,00	3.600.000,00	1.200.000,00	2.400.000,00
23	030/06/BAKEUDA-6/2023	Dpt. H. LIVIA WARMAN, S.Sos	Jl. Jend. Ahmad Yani Desa Pasar Baru	94.668.000,00	01 Januari 2023	31 Desember 2023	94.668.000,00	94.668.000,00	94.668.000,00	94.668.000,00
24	030/06/BAKEUDA-6/2023	SYUKUR KELLA BRAJO	Desa Lawang Agung, Kec. Pondok Tinggi	3.600.000,00	01 Januari 2023	31 Desember 2023	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
25	030/07/BAKEUDA-6/2023	SRI RAHAYU NINGSIH	Desa Air Teluh RT.003, Kec. Kumun Debai	3.600.000,00	01 Januari 2023	31 Desember 2023	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
26	030/14/BAKEUDA-6/2023	BANK JAMBI (TANAH)	Desa Permanti, Kecamatan Pondok Tinggi	221.400.000,00	01 Januari 2023	31 Desember 2023	221.400.000,00	221.400.000,00	221.400.000,00	-
27	030/08/BAKEUDA-6/2023	SYAHRONI	Desa Koto Tinggi Kec. Sungai Bungkal (Perumahan	3.600.000,00	01 Januari 2023	31 Desember 2023	3.600.000,00	3.600.000,00	500.000,00	3.100.000,00
28	030/09/BAKEUDA-6/2023	M. YAMIN	Desa Koto Tinggi Kec. Sungai Bungkal (Perumahan	3.600.000,00	01 Januari 2023	31 Desember 2023	3.600.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
<b>PIUTANG PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TAHUN 2023</b>								<b>977.761.000,00</b>	<b>639.175.000,00</b>	
<b>SISA PIUTANG PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TAHUN 2023</b>										<b>338.586.000,00</b>

NO	NO KONTRAK	NAMA PIHAK KETIGA	LOKASI	NILAI KONTRAK	MASA		RETRIBUSI PER 31 DESEMBER 2024	PIUTANG TAHUN 2023	PEMBAYARAN RETRIBUSI	SISA PIUTANG TAHUN 2024	TANGGAL BAYAR
					MULAI SEWA	AKHIR SEWA					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13
1	100.3.4.4/11/12/2024/Bakeuda-6	PASKAHLIS AMAOKI SEMBIRING	Desa Lawang Agung	2.040.000,00	1 Januari 2024	31 Januari 2024	2.040.000,00	-	1.500.000,00	540.000,00	
2	100.3.4.4/03/12/2024/Bakeuda-6	MUHAMMAD MUNZIR	Perumahan RSUD MHAT	2.040.000,00	1 Januari 2024	31 Desember 2024	2.040.000,00			2.040.000,00	
3	100.3.4.4/13/12/2024/Bakeuda-6	STIE-SAK	Jl. Sudirman, Kelurahan Pasar Sungai Penuh	87.300.000,00	01 April 2024	30 April 2025	65.475.000,00			65.475.000,00	

4	100.3.4.4/09/12/2024/Bakeuda-6	SYUKUR KELLA BRAJO	Desa Lawang Agung, Kec. Pondok Tinggi	2.040.000,00	1 Januari 2024	31 Desember 2024	2.040.000,00			2.040.000,00	
5	100.3.4.4/10/12/2024/Bakeuda-6	JONIKA WIJAYA	Desa Karya Bakti, Kec. Pondok Tinggi	2.040.000,00	1 Januari 2024	31 Desember 2024	2.040.000,00			2.040.000,00	
6	100.3.4.4/08/12/2024/Bakeuda-6	LENI SUSRAWATI SR	Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh	2.040.000,00	1 Januari 2024	31 Desember 2024	2.040.000,00			2.040.000,00	
7	100.3.4.4/05/12/2024/Bakeuda-6	MARTATI LA	Kelurahan Pasar Sungai Penuh, Kec. Sungai Penuh	2.040.000,00	1 Januari 2024	31 Desember 2024	2.040.000,00			2.040.000,00	
8	100.3.4.4/07/12/2024/Bakeuda-6	SRI RAHAYU NINGSIH	Desa Air Teluh RT.003, Kec. Kumun Debai	2.040.000,00	1 Januari 2024	31 Desember 2024	2.040.000,00			2.040.000,00	
9	100.3.4.4/06/12/2024/Bakeuda-6	SUTRIS HANDAYANI	Desa Air Teluh RT.003, Kec. Kumun Debai	2.040.000,00	1 Januari 2024	31 Desember 2024	2.040.000,00			2.040.000,00	
10	100.3.4.4/02/12/2024/Bakeuda-6	M. YAMIN	Desa Koto Tinggi Kec. Sungai Bungkal (Perumahan RSUD)	2.040.000,00	1 Januari 2024	31 Desember 2024	2.040.000,00			2.040.000,00	
11	100.3.4.4/04/12/2024/Bakeuda-6	SYAHRONI	Desa Koto Tinggi Kec. Sungai Bungkal (Perumahan RSUD)	2.040.000,00	1 Januari 2024	31 Desember 2024	2.040.000,00			2.040.000,00	
12	100.3.4.4/04/12/2024/Bakeuda-6	WINDA SUPITRIANI	Desa Koto Tinggi Kec. Sungai Bungkal (Perumahan RSUD)	3.600.000,00	1 Januari 2024	31 September 2025	2.070.000,00		2.070.000,00	-	
<b>PIUTANG PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TAHUN 2024</b>									<b>3.570.000,00</b>	<b>84.375.000,00</b>	
<b>TOTAL PIUTANG PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TA 2024</b>										<b>428.361.000,00</b>	



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**PIUTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RSUD**

SKPD	PIUTANG 31/12/2023	PEMBAYARAN PIUTANG	SISA PIUTANG 31/12/2023	PENAMBAHAN PIUTANG TAHUN 2024	TOTAL PIUTANG 31/12/2024
RS. MAYJEN HA THALIB	-	-	-	6.159.133.153,00	6.159.133.153,00
<b>Jumlah</b>	-	-	-	<b>6.159.133.153,00</b>	<b>6.159.133.153,00</b>
<b>TOTAL PIUTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN</b>					<b>617.750.000,00</b>
<b>TOTAL PIUTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TA 2024</b>					<b>428.361.000,00</b>
<b>TOTAL PIUTANG RETRIBUSI TA 2024</b>					<b>7.205.244.153,00</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN PIUTANG PENDAPATAN LAINNYA**  
**PER 31 DESEMBER 2024**

NO	NAMA	JUMLAH UNIT	SALDO AWAL PIUTANG 2023	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR PIUTANG 2023	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 - 6	8
1	WALIKOTA SUNGAI PENUH	1 UNIT	-			-	
2	WAKIL WALIKOTA SUNGAI PENUH	1 UNIT	-			-	
3	SEKDA KOTA SUNGAI PENUH	1 UNIT	-			-	
4	AFADAN RIHANALDI	1 UNIT	1.200.000,00			1.200.000,00	
5	AFRIZAL IDRIS	1 UNIT	3.840.000,00			3.840.000,00	
6	AZIS GAFAR	1 UNIT	2.910.000,00			2.910.000,00	
7	B. DUHA	1 UNIT	-			-	
8	BESUR HIYANTO	1 UNIT	7.050.000,00			7.050.000,00	
9	BUSTANUDIN	1 UNIT	3.240.000,00			3.240.000,00	
10	DARNO	1 UNIT	4.320.000,00			4.320.000,00	
11	DEVA YULIANTO	1 UNIT	3.960.000,00			3.960.000,00	
12	dr. ARMAN. SPM	1 UNIT	7.200.000,00			7.200.000,00	
13	dr. DESPRINA KUSUMA, SP. Paru	1 UNIT	1.200.000,00			1.200.000,00	
14	dr. IWAN SUWINDRA, SPB	1 UNIT	1.200.000,00			1.200.000,00	
15	dr. LISNUR SPPD	1 UNIT	6.000.000,00			6.000.000,00	
16	dr. RIZA FIRMANSYAH. SPS	1 UNIT	7.200.000,00			7.200.000,00	
17	dr. YANDI ZULKARNAIN SPOG	1 UNIT	7.200.000,00			7.200.000,00	
18	dr. YANIZAR	1 UNIT	5.400.000,00			5.400.000,00	
19	dr. YARNI ANDIKA ANGGRAINI, SPA	1 UNIT	1.200.000,00			1.200.000,00	
20	Drs. AFRIZAL MIRAT	1 UNIT	4.800.000,00			4.800.000,00	
21	Drs. DAMHAR DAHLAN	1 UNIT	5.000.000,00			5.000.000,00	
22	Drs. SYUKUR KELABRAJO	1 UNIT	1.800.000,00			1.800.000,00	
23	DWI JUMEIHARTO	1 UNIT	3.000.000,00			3.000.000,00	
24	EDI, SE	1 UNIT	1.800.000,00			1.800.000,00	
25	EFENDI SE	1 UNIT	7.680.000,00			7.680.000,00	
26	H. ABU HASAN	1 UNIT	3.800.000,00			3.800.000,00	
27	HALIL	1 UNIT	4.440.000,00			4.440.000,00	
28	HERI CIPTA	1 UNIT	3.150.000,00			3.150.000,00	
29	HERU ISTRIOSO	1 UNIT	5.400.000,00			5.400.000,00	
30	HUSNI HASAN	1 UNIT	5.400.000,00			5.400.000,00	
31	IR. AT. SUPRIATNA/FEBRILA/HARMIN	1 UNIT	4.320.000,00			4.320.000,00	
32	IR. F. AMIR SEMBIRING	1 UNIT	1.200.000,00			1.200.000,00	
33	ISMAIL	1 UNIT	600.000,00			600.000,00	
34	KHUSENDRI/KOSASI HUSEN	1 UNIT	2.400.000,00			2.400.000,00	
35	MAHMUD	1 UNIT	5.400.000,00			5.400.000,00	
36	MUNSIR, SKM	1 UNIT	1.200.000,00			1.200.000,00	
37	NAISUKA	1 UNIT	180.000,00			180.000,00	
38	NANANG WIJAYA/EVA	1 UNIT	4.500.000,00			4.500.000,00	
39	NOPERMAN	1 UNIT	6.600.000,00			6.600.000,00	
40	NOVEN AGUSTIN	1 UNIT	2.040.000,00			2.040.000,00	
41	NY. AMIR USIN	1 UNIT	5.820.000,00			5.820.000,00	
42	NY. BARKIS	1 UNIT	2.910.000,00			2.910.000,00	
43	NY. ROSUNA BY KAPAS	1 UNIT	1.800.000,00			1.800.000,00	
44	NY. TUKIMAN	1 UNIT	2.400.000,00			2.400.000,00	
45	PARDINAL BSC/ YARMALIS	1 UNIT	6.000.000,00			6.000.000,00	
46	PUSKESMAS KUMUN	2 UNIT	720.000,00			720.000,00	
47	PUSKESMAS RAWANG	1 UNIT	2.880.000,00			2.880.000,00	
48	PUSKESMAS SUNGAI PENUH	2 UNIT	2.160.000,00			2.160.000,00	
49	R. PARDEDE	1 UNIT	1.200.000,00			1.200.000,00	
50	R. SUDARNO	1 UNIT	2.520.000,00			2.520.000,00	
51	ROSUNA ST BRAJO	1 UNIT	3.600.000,00			3.600.000,00	
52	RUDI DARMAWAN	1 UNIT	3.680.000,00			3.680.000,00	
53	SAPIAN SARI	1 UNIT	3.240.000,00			3.240.000,00	
54	SAYUTI	1 UNIT	2.040.000,00			2.040.000,00	
55	SIMON TARIGAN	1 UNIT	1.920.000,00			1.920.000,00	
56	SITI KAWIDAH	1 UNIT	4.850.000,00			4.850.000,00	
57	SYAHRONI	1 UNIT	1.200.000,00			1.200.000,00	
58	SYAMSUL ARIFIN	1 UNIT	7.800.000,00			7.800.000,00	
59	YASINAMIS	1 UNIT	1.800.000,00			1.800.000,00	
<b>TOTAL SEWA RUMAH</b>			<b>196.370.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>196.370.000,00</b>	
1	BAKRI RASUL (KUMUN)	1 UNIT	7.069.000,00			7.069.000,00	

1	2	3	4	5	6	7 = 4 + 5 - 6	8
NO	NAMA	JUMLAH UNIT	SALDO AWAL PIUTANG 2023	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO AKHIR PIUTANG 2023	KETERANGAN
2	REVO ANHAR	1 UNIT	4.140.000,00			4.140.000,00	
3	BANK BNI (RSUD MAYJEN HA THALIB)	1 UNIT	11.040.000,00			11.040.000,00	
4	RSUD MAYJEN HA THALIB	1 UNIT	2.625.000,00			2.625.000,00	
5	TATANG HERPANUS	1 UNIT	2.800.000,00			2.800.000,00	
<b>TOTAL SEWA TANAH</b>			<b>27.674.000,00</b>	-	-	<b>27.674.000,00</b>	
<b>TOTAL = TOTAL SEWA RUMAH + TOTAL SEWA TANAH</b>			<b>224.044.000,00</b>	-	-	<b>224.044.000,00</b>	



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

URAIAN DANA BAGI HASIL	KURANG BAYAR S.D TAHUN 2023	PENYALURAN 2024	JUMLAH PIUTANG
<b>PAJAK</b>	<b>3.016.920.000,00</b>	<b>121.529.000,00</b>	<b>2.895.391.000,00</b>
PPh	(389.538.000,00)	(409.148.000,00)	19.610.000,00
PPh Pasal 25/29	(389.538.000,00)	(409.148.000,00)	19.610.000,00
<b>PBB</b>	<b>3.406.458.000,00</b>	<b>530.677.000,00</b>	<b>2.875.781.000,00</b>
<b>Bagian Daerah</b>	<b>3.417.408.000,00</b>	<b>541.627.000,00</b>	<b>2.875.781.000,00</b>
Bagian Daerah Migas	3.035.022.000,00	530.131.000,00	2.504.891.000,00
Bagian Daerah Non Migas	18.489.000,00	4.343.000,00	14.146.000,00
Bagian Daerah Panas Bumi	(3.392.000,00)	(9.337.000,00)	5.945.000,00
Bagian Daerah Perhutanan	142.217.000,00	33.407.000,00	108.810.000,00
Bagian Daerah Perkebunan	245.385.000,00	57.641.000,00	187.744.000,00
Bagian Daerah Sektor Lainnya	(20.313.000,00)	(74.558.000,00)	54.245.000,00
<b>Biaya Pemungutan</b>	<b>(10.950.000,00)</b>	<b>(10.950.000,00)</b>	<b>-</b>
Biaya Pemungutan Migas	(7.966.000,00)	(7.966.000,00)	-
Biaya Pemungutan Non Migas	-	-	-
Biaya Pemungutan Panas Bumi	(325.000,00)	(325.000,00)	-
Biaya Pemungutan Perhutanan	-	-	-
Biaya Pemungutan Perkebunan	-	-	-
Biaya Pemungutan Sektor Lainnya	(2.659.000,00)	(2.659.000,00)	-
<b>CHT</b>	<b>(8.994.000,00)</b>	<b>(8.994.000,00)</b>	<b>-</b>
<b>SDA</b>	<b>24.598.819.000,00</b>	<b>3.779.335.000,00</b>	<b>20.819.484.000,00</b>
<b>MIGAS</b>	<b>19.794.197.000,00</b>	<b>4.649.698.000,00</b>	<b>15.144.499.000,00</b>
Minyak Bumi	2.477.875.000,00	582.058.000,00	1.895.817.000,00
Gas Bumi	17.316.322.000,00	4.067.640.000,00	13.248.682.000,00
<b>MINERBA</b>	<b>7.261.656.000,00</b>	<b>1.705.778.000,00</b>	<b>5.555.878.000,00</b>
Royalti	7.261.656.000,00	1.705.778.000,00	5.555.878.000,00
<b>KEHUTANAN</b>	<b>(557.260.000,00)</b>	<b>(676.367.000,00)</b>	<b>119.107.000,00</b>
PSDH	(557.260.000,00)	(676.367.000,00)	119.107.000,00
<b>PERIKANAN</b>	<b>(989.873.000,00)</b>	<b>(989.873.000,00)</b>	<b>-</b>
<b>PERKEBUNAN SAWIT</b>	<b>(909.901.000,00)</b>	<b>(909.901.000,00)</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>	<b>27.606.745.000,00</b>	<b>3.891.870.000,00</b>	<b>23.714.875.000,00</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN PENYISIHAN PIUTANG PAJAK DAERAH YANG DIPERKIRAKAN TIDAK DAPAT DITAGIH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam rupiah)

No	Tahun	Jenis Piutang				Total	Kategori Piutang				Total	Penyisihan Piutang				Total
		PBB	Pajak Reklame	Pajak Restoran	PJU		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet		Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	
1	2	3	4	5	6	7 = 3 + 6	8	9	10	11	12 = 8 + 11	13	14	15	16	17 = 13 + 16
1	2024	602.349.535,00	4.692.000,00		359.847.816,00	966.889.351,00	966.889.351,00	-	-	-	966.889.351,00	4.834.446,75	-	-	-	4.834.446,75
2	2023	426.723.434,00	24.743.000,00			451.466.434,00	-	451.466.434,00	-	-	451.466.434,00	-	45.146.643,40	-	-	45.146.643,40
4	2020 s.d 2022	1.268.695.802,00	12.969.000,00			1.281.664.802,00	-	-	1.281.664.802,00	-	1.281.664.802,00	-	-	640.832.401,00	-	640.832.401,00
5	2003 s.d 2019	1.387.385.132,00	21.624.000,00			1.409.009.132,00	-	-	-	1.409.009.132,00	1.409.009.132,00	-	-	-	1.409.009.132,00	1.409.009.132,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.685.153.903,00</b>	<b>64.028.000,00</b>	<b>-</b>	<b>359.847.816,00</b>	<b>4.109.029.719,00</b>	<b>966.889.351,00</b>	<b>451.466.434,00</b>	<b>1.281.664.802,00</b>	<b>1.409.009.132,00</b>	<b>4.109.029.719,00</b>	<b>4.834.446,75</b>	<b>45.146.643,40</b>	<b>640.832.401,00</b>	<b>1.409.009.132,00</b>	<b>2.099.822.623,15</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH YANG DIPERKIRAKAN TIDAK DAPAT DITAGIH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

*(dalam rupiah)*

No	Tahun	Jenis Piutang				Kategori Piutang					Penyisihan Piutang				
		Retribusi Pelayanan Pasar	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD	Retribusi	Total	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total	Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)
1	2	3	4	4	5 = 3 + 4	6	7	8	9	10 = 6 : 9	11	12	13	14	15 = 11 : 14
1	2024	152.521.500,00	84.375.000,00	6.159.133.153,00	6.396.029.653,00	6.396.029.653,00	-	-	-	6.396.029.653,00	31.980.148,27	-	-	-	31.980.148,27
2	2023	147.061.500,00	338.586.000,00	-	485.647.500,00	-	485.647.500,00	-	-	485.647.500,00	-	48.564.750,00	-	-	48.564.750,00
3	2020 s.d 2022	287.532.500,00	5.400.000,00	-	292.932.500,00	-	-	292.932.500,00	-	292.932.500,00	-	-	146.466.250,00	-	146.466.250,00
4	s.d 2019	30.634.500,00	-	-	30.634.500,00	-	-	-	30.634.500,00	30.634.500,00	-	-	-	30.634.500,00	30.634.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>617.750.000,00</b>	<b>428.361.000,00</b>	<b>6.159.133.153,00</b>	<b>7.205.244.153,00</b>	<b>6.396.029.653,00</b>	<b>485.647.500,00</b>	<b>292.932.500,00</b>	<b>30.634.500,00</b>	<b>7.205.244.153,00</b>	<b>31.980.148,27</b>	<b>48.564.750,00</b>	<b>146.466.250,00</b>	<b>30.634.500,00</b>	<b>257.645.648,27</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN PENYISIHAN PIUTANG HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

*(dalam rupiah)*

No	Tahun	Jenis Piutang	Kategori Piutang				Penyisihan Piutang					
		Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total	Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Total
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4 : 7	9	10	11	12	13 = 9 : 12
1	2024	12.095.926.131,36	12.095.926.131,36	-	-	-	12.095.926.131,36	60.479.630,66	-	-	-	60.479.630,66
2	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2020 s.d 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	s.d 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>12.095.926.131,36</b>	<b>12.095.926.131,36</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.095.926.131,36</b>	<b>60.479.630,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60.479.630,66</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN PENYISIHAN PIUTANG LAIN - LAIN PAD YANG SAH YANG DIPERKIRAKAN TIDAK DAPAT DITAGIH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam rupiah)

No	Tahun	Jenis Piutang	Kategori Piutang					Penyisihan Piutang				
		BLUD	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total	Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Total
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4 : 7	9	10	11	12	13 = 9 : 12
1	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2020 s.d 2022	116.338.000,00	-	-	116.338.000,00	-	116.338.000,00	-	-	58.169.000,00	-	58.169.000,00
4	s.d 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>116.338.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>116.338.000,00</b>	<b>-</b>	<b>116.338.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>58.169.000,00</b>	<b>-</b>	<b>58.169.000,00</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN PENYISIHAN PIUTANG PENDAPATAN LAINNYA YANG DIPERKIRAKAN TIDAK DAPAT DITAGIH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

*(dalam rupiah)*

No	Tahun	Jenis Piutang	Kategori Piutang					Penyisihan Piutang				
		Sewa	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total	Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Total
1	2	3	4	5	6	7	8 = 4 : 7	9	10	11	12	13 = 9 : 12
1	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2020 s.d 2022	224.044.000,00	-	-	224.044.000,00	-	224.044.000,00	-	-	112.022.000,00	-	112.022.000,00
4	s.d 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>224.044.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>224.044.000,00</b>	<b>-</b>	<b>224.044.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112.022.000,00</b>	<b>-</b>	<b>112.022.000,00</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN PENYISIHAN PIUTANG LAINNYA YANG DIPERKIRAKAN TIDAK DAPAT DITAGIH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

*(dalam rupiah)*

No	Tahun	Jenis Piutang			Kualitas Piutang					Penyisihan Piutang				
		Bagian Lancar TPTGR	Lainnya	Total	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total	Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet	Total
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8	9	10 = 6 : 9	11	12	13	14	15 = 11 : 14
1	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
3	2020 s.d 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
4	s.d 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL LK SKPD</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN PENYISIHAN PIUTANG TRANSFER PEMERINTAH PUSAT YANG DIPERKIRAKAN TIDAK DAPAT DITAGIH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam rupiah)

No	Tahun	Jenis Piutang			Kategori Piutang					Penyisihan Piutang				
		DBH Pajak	DBH Bagi Hasil SDA	Total	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total	Lancar (0,5%)	Kurang Lancar (10%)	Diragukan (50%)	Macet (100%)	Total
1	2	3	4	7 = 3 ; 6	8	9	10	11	12 = 8 ; 11	13	14	15	16	17 = 13 ; 16
1	2024	2.895.391.000,00	20.819.484.000,00	23.714.875.000,00	23.714.875.000,00	-	-	-	23.714.875.000,00	118.574.375,00	-	-	-	118.574.375,00
2	2023			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2020 s.d 2022			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2003 s.d 2019			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>2.895.391.000,00</b>	<b>20.819.484.000,00</b>	<b>23.714.875.000,00</b>	<b>23.714.875.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23.714.875.000,00</b>	<b>118.574.375,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>118.574.375,00</b>



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
RINCIAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA  
TAHUN ANGGARAN 2024

KONTRAK SEWA TANAH/ RUMAH DINAS/ GEDUNG KANTOR

NO	SKPD	NO KONTRAK	NAMA PIHAK KETIGA	Lokasi	TANGGAL SEWA	NILAI KONTRAK	MASA				PEMAKAIAN		BEBAN DIBAYAR DIMUKA
							Mulai sewa	Akhir Sewa	Jumlah Hari	Berakhir TA 2024	Hari	NILAI	
1	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	027/01/SPS/PPK-DAU-DISDAMKARDP/2024	EPENDI	Hampanan Rawang	01 Januari 2024 - 31 Desember 2024	20.000.000	1-Jan-24	31-Dec-24	365	31-Dec-24	365	20.000.000,00	-
		027/02/SPS/PPK-DAU-DISDAMKARDP/2024	Hj. ZURAI DA	Kumun Debai	10 Januari 2024 - 31 Desember 2024	20.000.000	10-Jan-24	31-Dec-24	356	31-Dec-24	356	20.000.000,00	-
		027/01/SPS/PPK-DAU-DISDAMKARDP/2024	AFLIZAR M	Sungai Liuk	02 Oktober 2024 - 02 Oktober 2025	20.000.000	2-Oct-24	2-Oct-25	365	31-Dec-24	90	4.931.506,85	15.068.493,15
2	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	510.72/133.a/SEWA/PPK/DPPPA/2024	YELMAWATI	Jl. Pelita I Sungai Jernih	20 Maret 2024 - 20 Maret 2025	40.000.000	20-Mar-24	20-Mar-25	365	31-Dec-24	286	31.342.465,75	8.657.534,25
JUMLAH KONTRAK SEWA TANAH/ RUMAH DINAS/ GEDUNG KANTOR						100.000.000						76.273.972,60	23.726.027,40

PREMI ASURANSI

NO	SKPD	NO KONTRAK	NAMA PIHAK KETIGA	PREMI	TANGGAL KONTRAK	NILAI KONTRAK	MASA				PEMAKAIAN		BEBAN DIBAYAR DIMUKA
							Mulai	Akhir	Jumlah Hari	Berakhir TA 2024	Hari	NILAI	
1	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PER/86/072024 / 027/08/SPK/PL-DAU/PPK-DISDAMKARDP/SPN-024	BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sungai Penuh	Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Tenaga Kerja Kontrak	01 April 2024 - 31 Maret 2025	35.347.331,00	1-Apr-24	31-Mar-25	364	31-Dec-24	274	26.607.606,30	8.739.724,70
2	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PER/72/032024 / 100.3.7.1/104.A/III/2024	BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sungai Penuh	Belanja iuran jaminan kesehatan bagi Tenaga Kerja Kontrak	01 Januari 2024 - 31 Desember 2024	33.435.900,00	1-Jan-24	31-Dec-24	365	31-Dec-24	365	33.435.900,00	-
JUMLAH PREMI ASURANSI						68.783.231,00						60.043.506,30	8.739.724,70
TOTAL BEBAN SEWA DAN PREMI												136.317.478,90	32.465.752,10

SEWA JARINGAN

NO	SKPD	NO KONTRAK	NAMA PIHAK KETIGA	JARINGAN	TANGGAL KONTRAK	NILAI KONTRAK	MASA				PEMAKAIAN		BEBAN DIBAYAR DIMUKA
							Mulai sewa	Akhir Sewa	Jumlah Hari	Berakhir TA 2024	Hari	NILAI	
1	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK	027/ 14 /SPK/PPK/PL/KOMINFO/XII/2023	PT. INDONESIA COMNETS PLUS	Domestic FO 200 Mbps Internet Corporate Basic	01 April 2024 - 31 Desember 2024	552.420.000,00	1-Apr-24	31-Dec-24	274	31-Dec-24	274	552.420.000,00	-
				Domestic FO 20 Mbps Internet Corporate IIXVIP	01 November 2023 - 30 April 2024	30.219.200,00	1-May-24	31-Dec-24	244	31-Dec-24	244	30.219.200,00	-
JUMLAH SEWA JARINGAN						582.639.200,00						582.639.200,00	-
TOTAL BEBAN SEWA												795.230.651,51	32.465.752,10
TOTAL LAMPIRAN A + B													162.073.571,58



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
RINCIAN BEBAN DIBAYAR DIMUKA  
TAHUN ANGGARAN 2024

BEBAN PAJAK SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) KENDARAAN DINAS KOTA SUNGAI PENUH 2024

NO	NAMA SKPD	NOMOR POLISI	PKB		SWDKLLJ		BIAYA ADM. STNK	BIAYA ADM. TNKB	BIAYA POKOK PAJAK STNK PER 1 TAHUN	Tanggal Ditetapkan	MASA BERLAKU	Perhitungan Pertanggal 31 Desember 2022	SISA HARI	Biaya Per Hari	SISA BEBAN PAJAK
			Pokok	Sanksi Adm	Pokok	Sanksi Adm									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Dinas Pendidikan	BH 1136 RZ	Rp 1.085.200		Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	1.228.200,00	11/06/2024	28/07/2025	31/12/2024	209	3.364,93	703.270,68
		BH 1006 R	Rp 929.300	Rp 18.600	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp -	Rp -	1.072.300,00	05/07/2024	03/07/2025	31/12/2024	184	2.937,81	540.556,71
2	Dinas Kesehatan	BH 1256 R	Rp 755.000	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp 200.000	Rp 100.000	1.198.000,00	24/12/2024	30/12/2025	31/12/2024	364	3.282,19	1.194.717,81
		BH 1243 R	Rp 718.200	Rp -	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp 200.000	Rp 100.000	1.161.200,00	24/12/2024	28/11/2025	31/12/2024	332	3.181,37	1.056.214,79
		BH 1646 R	Rp 1.223.300	Rp 49.000	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp -	Rp -	1.366.300,00	10/10/2024	21/09/2025	31/12/2024	264	3.743,29	988.227,95
		BH 1153 RZ	Rp 634.800	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	777.800,00	24/12/2024	31/12/2025	31/12/2024	365	2.130,96	777.800,00
		BH 1302 R	Rp 569.700	Rp 11.400	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp -	Rp -	712.700,00	27/05/2024	22/05/2025	31/12/2024	142	1.952,60	277.269,59
3	Puskesmas Rawang	BH 1354 R	Rp 1.181.400	Rp -	Rp 286.000	Rp -	Rp 200.000	Rp 100.000	1.767.400,00	28/12/2024	30/12/2025	31/12/2024	364	4.842,19	1.762.557,81
4	Puskesmas Kumun	BH 1120 RZ	Rp 1.588.800	Rp -	Rp 286.000	Rp -	Rp -	Rp -	1.874.800,00	03/12/2024	31/12/2025	31/12/2024	365	5.136,44	1.874.800,00
		BH 9002 R	Rp 681.000	Rp -	Rp 3.000	Rp -	Rp -	Rp -	684.000,00	03/12/2024	17/01/2025	31/12/2024	17	1.873,97	31.857,53
5	Puskesmas Pondok Tinggi	BH 9019 R	Rp 1.375.500	Rp 3.000	Rp 3.000	Rp -	Rp -	Rp -	1.378.500,00	29/01/2024	28/11/2025	31/12/2024	332	3.776,71	1.253.868,49
		BH 6144 R	Rp 62.000	Rp -	Rp 35.000	Rp -	Rp -	Rp -	97.000,00	16/01/2024	25/01/2025	31/12/2024	25	265,75	6.643,84
6	Puskesmas Tanah kampung	BH 1082 R	Rp 590.700	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	733.700,00	21/11/2024	30/12/2025	31/12/2024	364	2.010,14	731.689,86
7	Puskesmas Pondok Tinggi	BH 9502 RZ	Rp 1.331.400	Rp -	Rp 6.000	Rp -	Rp -	Rp -	1.337.400,00	16/12/2024	31/12/2025	31/12/2024	365	3.664,11	1.337.400,00
8	Puskesmas Tanjung	BH 1244 R	Rp 1.588.800	Rp 206.600	Rp 286.000	Rp 100.000	Rp 200.000	Rp 100.000	2.174.800,00	30/12/2024	31/12/2025	31/12/2024	365	5.958,36	2.174.800,00
9	Instalasi Farmasi	BH 8204 R	Rp 443.300	Rp -	Rp 163.000	Rp 40.000	Rp -	Rp -	606.300,00	02/01/2024	03/01/2025	31/12/2024	3	1.661,10	4.983,29
10	Laboratorium Kesehatan Daerah	BH 1028 RZ	Rp 622.200	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	765.200,00	18/12/2024	27/12/2025	31/12/2024	361	2.096,44	756.814,25
11	Rumah Sakit Umum Pratama/ Bakri	BH 9005 R	Rp 756.000	Rp -	Rp 3.000	Rp -	Rp 200.000	Rp 100.000	1.059.000,00	04/09/2024	26/07/2025	31/12/2024	207	2.901,37	600.583,56
		BH 9016 R	Rp 2.034.400	Rp -	Rp 3.000	Rp -	Rp -	Rp -	2.037.400,00	04/09/2024	23/02/2025	31/12/2024	54	5.581,92	301.423,56
		BH 1808 RZ	Rp 1.371.300	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	1.514.300,00	04/09/2024	25/10/2025	31/12/2024	298	4.148,77	1.236.332,60
12	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	BH 8022 R	Rp 526.300	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	669.300,00	02/05/2024	20/05/2025	31/12/2024	140	1.833,70	256.717,81
		BH 8206 R	Rp 5.282.200	Rp 1.056.500	Rp 326.000	Rp 140.000	Rp 200.000	Rp 100.000	5.908.200,00	04/05/2024	05/02/2025	31/12/2024	36	16.186,85	582.726,58
		BH 8207 R	Rp 6.120.000	Rp 2.521.500	Rp 815.000	Rp 500.000	Rp 200.000	Rp 100.000	7.235.000,00	22/05/2024	05/12/2024	31/12/2024	-26	19.821,92	-
		BH 1524 R	Rp 592.800	Rp 47.500	Rp 143.000	Rp 70.000	Rp -	Rp -	735.800,00	25/04/2024	20/01/2025	31/12/2024	20	2.015,89	40.317,81
13	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	BH 1012 R	Rp 1.856.400	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	1.999.400,00	14/10/2024	31/10/2025	31/12/2024	304	5.477,81	1.665.253,70
		BH 1102 R	Rp 703.000	Rp 70.300	Rp 143.000	Rp 70.000	Rp -	Rp -	846.000,00	30/03/2024	01/04/2025	31/12/2024	91	2.137,81	210.920,55
		BH 1702 R	Rp 3.699.000	Rp 1.435.300	Rp 715.000	Rp 470.000	Rp 200.000	Rp 100.000	4.714.000,00	30/03/2024	01/04/2025	31/12/2024	91	12.915,07	1.175.271,23
		BH 1142 R	Rp 1.795.600	Rp 251.500	Rp 286.000	Rp 135.000	Rp -	Rp -	2.081.600,00	31/05/2024	26/05/2025	31/12/2024	146	5.703,01	832.640,00
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BH 1216 R	Rp 897.800	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	1.040.800,00	29/11/2024	12/12/2025	31/12/2024	346	2.851,51	986.621,37
		BH 8012 R	Rp 1.141.500	Rp -	Rp 163.000	Rp -	Rp -	Rp -	1.304.500,00	29/11/2024	28/12/2025	31/12/2024	362	3.573,97	1.293.778,08
		BH 1217 R	Rp 586.500	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	729.500,00	29/11/2024	12/12/2025	31/12/2024	346	1.988,63	691.526,03
15	Dinas Pemadam Kebakaran	BH 8209 R	Rp 5.522.400	Rp 2.356.300	Rp 15.000	Rp -	Rp 200.000	Rp 100.000	5.837.400,00	29/05/2024	30/10/2025	31/12/2024	303	15.992,88	4.845.841,64
		BH 8210 R	Rp 5.522.400	Rp 2.356.300	Rp 15.000	Rp -	Rp 200.000	Rp 100.000	5.837.400,00	29/05/2024	19/10/2025	31/12/2024	292	15.992,88	4.669.920,00
		BH 8211 R	Rp 5.495.400	Rp 2.235.000	Rp 15.000	Rp -	Rp 200.000	Rp 100.000	5.810.400,00	29/05/2024	14/01/2025	31/12/2024	14	15.918,90	222.864,66
		BH 8011 R	Rp 1.812.000	Rp 36.300	Rp 163.000	Rp 40.000	Rp 200.000	Rp 100.000	2.275.000,00	28/05/2024	15/05/2025	31/12/2024	135	6.232,88	841.438,36
		BH 9003 R	Rp 1.689.400	Rp -	Rp 163.000	Rp -	Rp 200.000	Rp 100.000	2.152.400,00	19/10/2024	23/10/2025	31/12/2024	296	5.896,99	1.745.507,95
16	Kantor Polisi Pamong Praja	BH 1344 R	Rp 586.500	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp -	Rp -	Rp -	621.500,00	18/12/2024	09/12/2025	31/12/2024	343	1.702,74	584.039,73
		BH 1435 R	Rp 755.000	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	898.000,00	11/11/2024	29/12/2025	31/12/2024	363	2.460,27	893.079,45
		BH 1533 R	Rp 897.800	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	1.040.800,00	28/12/2024	13/06/2025	31/12/2024	164	2.851,51	467.647,12
17	Dinas Sosial	BH 1158 R	Rp 577.000	Rp -	Rp 143.000	Rp 70.000	Rp -	Rp -	720.000,00	28/12/2024	06/08/2025	31/12/2024	218	1.972,60	430.027,40
		BH 1102 R	Rp 703.000	Rp 70.300	Rp 143.000	Rp 70.000	Rp -	Rp -	846.000,00	06/03/2024	01/04/2025	31/12/2024	91	2.317,81	210.920,55
		BH 1254 R	Rp 521.900	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp 200.000	Rp 100.000	964.900,00	02/12/2024	30/12/2025	31/12/2024	364	2.643,56	962.256,44
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BH 1219 R	Rp 755.000	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	898.000,00	21/11/2024	29/12/2025	31/12/2024	263	2.460,27	893.079,45
		BH 1290 R	Rp 665.700	Rp 13.400	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp -	Rp -	808.700,00	01/08/2024	21/07/2025	31/12/2024	302	2.215,62	447.554,52
		BH 1278 R	Rp 521.900	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp 200.000	Rp 100.000	964.900,00	04/12/2024	28/12/2025	31/12/2024	363	2.643,56	959.612,88
		BH 8270 R	Rp 1.750.400	Rp -	Rp 286.000	Rp -	Rp 200.000	Rp 100.000	2.336.400,00	01/09/2024	01/11/2025	31/12/2024	305	6.401,10	1.952.334,25
19	Dinas Ketahanan Pangan	BH 1701 R	Rp 1.173.000	Rp -	Rp 286.000	Rp -	Rp -	Rp -	1.459.000,00	27/09/2024	15/12/2025	31/12/2024	349	3.997,26	1.395.043,84
		BH 28 R	Rp 755.000	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	898.000,00	30/12/2024	29/12/2025	31/12/2024	363	2.460,27	893.079,45
20	Dinas Lingkungan Hidup	BH 8218 R	Rp 2.423.200	Rp -	Rp 326.000	Rp 40.000	Rp -	Rp -	2.749.200,00	28/12/2024	30/09/2025	31/12/2024	273	7.532,05	2.056.250,96
		BH 8403 R	Rp 2.659.400	Rp -	Rp 815.000	Rp 80.000	Rp 200.000	Rp 100.000	3.774.400,00	28/12/2024	19/09/2025	31/12/2024	262	10.340,82	2.709.295,34
		BH 1355 R	Rp 1.138.200	Rp -	Rp 572.000	Rp 35.000	Rp 200.000	Rp 100.000	2.010.200,00	28/12/2024	26/11/2025	31/12/2024	330	5.507,40	1.817.441,10
		BH 1206 R	Rp 521.900	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	664.900,00	30/12/2024	29/12/2025	31/12/2024	363	1.821,64	661.256,71
		BH 8221 R	Rp 2.423.200	Rp -	Rp 326.000	Rp 40.000	Rp -	Rp -	2.749.200,00	28/12/2024	05/10/2025	31/12/2024	278	7.532,05	2.093.911,23
		BH 8004 R	Rp 2.639.000	Rp -	Rp 326.000	Rp 40.000	Rp 200.000	Rp 100.000	3.265.000,00	28/12/2024	11/12/2025	31/12/2024	345	8.945,21	3.086.095,89
		BH 1047 RZ	Rp 582.800	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	725.800,00	30/12/2024	31/12/2025	31/12/2024	365	1.988,49	725.800,00
		BH 1742 R	Rp 623.200	Rp 25.000	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp -	Rp -	766.200,00	24/04/2024	30/03/2025	31/12/2024	89	2.099,18	186.826,85
		BH 1246 R	Rp 1.385.000	Rp 152.400	Rp 286.000	Rp 100.000	Rp 200.000	Rp 100.000	1.971.000,00	09/07/2024	18/09/2025	31/12/2024	261	5.400,00	1.409.400,00

NO	NAMA SKPD	NOMOR POLISI	PKB		SWDKLLJ		BIAYA ADM. STNK	BIAYA ADM. TNKB	BIAYA POKOK PAJAK STNK PER 1 TAHUN	Tanggal Ditetapkan	MASA BERLAKU	Perhitungan Pertanggal 31 Desember 2022	SISA HARI	Biaya Per Hari	SISA BEBAN PAJAK		
			Pokok	Sanksi Adm	Pokok	Sanksi Adm											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BH 1208 RZ	Rp 1.070.000	Rp 64.200	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp -	Rp -	1.213.000,00	29/07/2024	12/06/2025	31/12/2024	163	3.323,29	541.695,89		
		BH 1209 RZ	Rp 582.800	Rp 58.300	Rp 143.000	Rp 70.000	Rp -	Rp -	725.800,00	14/08/2024	30/03/2025	31/12/2024	89	1.988,49	176.975,89		
23	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	BH 30 R	Rp 1.201.800	Rp -	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp -	Rp -	1.344.800,00	13/12/2024	03/11/2025	31/12/2024	307	3.684,38	1.131.105,75		
		BH 7001 R	Rp 1.648.500	Rp 66.000	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp -	Rp -	1.791.500,00	31/12/2024	14/12/2025	31/12/2024	348	4.908,22	1.708.060,27		
		BH 9010 R	Rp 2.039.800	Rp -	Rp 306.000	Rp 100.000	Rp -	Rp -	2.345.800,00	29/11/2023	05/02/2025	31/12/2024	36	6.426,85	231.366,58		
		BH 8010 R	Rp 792.100	Rp 142.600	Rp 163.000	Rp 100.000	Rp 200.000	Rp 100.000	1.255.100,00	31/12/2024	10/05/2025	31/12/2024	130	3.438,63	447.021,92		
24	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	BH 1083 R	Rp 897.800	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	1.040.800,00	04/12/2024	31/12/2025	31/12/2024	365	2.851,51	1.040.800,00		
		BH 1203 R	Rp 937.700	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	1.080.700,00	26/06/2024	07/07/2025	31/12/2024	188	2.960,82	556.634,52		
		BH 1207 R	Rp 897.800	Rp -	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp -	Rp -	1.040.800,00	04/09/2024	03/09/2025	31/12/2024	246	2.851,51	701.470,68		
25	Dinas Koperasi dan UKM	BH 1801 R	Rp 627.400	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	770.400,00	28/12/2024	28/12/2025	31/12/2024	362	2.110,68	764.067,95		
		BH 1241 R	Rp 937.700	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp 200.000	Rp 100.000	1.380.700,00	28/12/2024	29/12/2025	31/12/2024	363	3.782,74	1.373.134,52		
26	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	BH 1029 RZ	Rp 1.750.400	Rp 455.200	Rp 286.000	Rp 200.000	Rp -	Rp -	2.036.400,00	17/07/2024	05/01/2025	31/12/2024	5	5.579,18	27.895,89		
27	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	BH 1260 R	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 200.000	Rp 100.000	300.000,00	24/12/2024	09/06/2025	31/12/2024	160	821,92	131.506,85		
		BH 1323 R	Rp 887.800	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	1.030.800,00	14/08/2024	24/08/2025	31/12/2024	236	2.824,11	666.489,86		
		BH 1249 R	Rp 1.043.800	Rp -	Rp 286.000	Rp -	Rp 200.000	Rp 100.000	1.629.800,00	13/11/2024	30/12/2025	31/12/2024	364	4.465,21	1.625.334,79		
28	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BH 1214 R	Rp -	Rp 90.600	Rp 143.000	Rp 70.000	Rp -	Rp -	898.000,00	16/05/2024	29/12/2025	31/12/2024	363	2.460,27	893.079,45		
29	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	BH 8365 R	Rp 1.126.300	Rp -	Rp 163.000	Rp -	Rp -	Rp -	1.289.300,00	23/12/2024	29/12/2025	31/12/2024	363	3.532,33	1.282.235,34		
		BH 1237 R	Rp 593.300	Rp -	Rp 143.000	Rp 70.000	Rp 200.000	Rp 100.000	1.036.300,00	11/12/2024	18/07/2025	31/12/2024	199	2.839,18	564.996,44		
30	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultural, dan Perkebunan	BH 8362 R	Rp 443.300	Rp -	Rp 163.000	Rp -	Rp -	Rp -	606.300,00	15/01/2024	15/01/2025	31/12/2024	15	1.661,10	24.916,44		
		BH 1223 R	Rp 896.700	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	1.039.700,00	15/01/2024	21/01/2025	31/12/2024	21	2.848,49	59.818,36		
		BH 1224 R	Rp 897.800	Rp -	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp -	Rp -	1.040.800,00	15/01/2024	09/01/2025	31/12/2024	9	2.851,51	25.663,56		
		BH 1420 R	Rp 586.500	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	729.500,00	11/12/2024	19/12/2025	31/12/2024	353	1.998,63	705.516,44		
31	Dinas Peternakan dan Perikanan	BH 1247 R	Rp 755.000	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp 200.000	Rp 100.000	1.198.000,00	09/12/2024	29/12/2025	31/12/2024	363	3.282,19	1.191.435,62		
		BH 8372 R	Rp 443.300	Rp -	Rp 163.000	Rp -	Rp -	Rp -	606.300,00	09/12/2024	25/01/2025	31/12/2024	25	1.661,10	41.527,40		
		BH 1131 RZ	Rp 747.800	Rp 15.000	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp -	Rp -	890.800,00	26/04/2024	15/04/2025	31/12/2024	105	2.440,55	256.257,53		
		BH 1371 R	Rp 586.500	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	729.500,00	12/12/2024	15/12/2025	31/12/2024	349	1.998,63	697.521,92		
32	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	BH 8203 R	Rp 443.300	Rp -	Rp 163.000	Rp -	Rp -	Rp -	606.300,00	07/12/2024	31/12/2025	31/12/2024	365	1.661,10	606.300,00		
		BH 1238 R	Rp 656.800	Rp -	Rp 143.000	Rp 70.000	Rp 200.000	Rp 100.000	1.099.800,00	07/12/2024	18/07/2025	31/12/2024	199	3.013,15	599.616,99		
		BH 1037 R	Rp 897.800	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp 200.000	Rp 100.000	1.340.800,00	09/12/2024	31/12/2025	31/12/2024	365	3.673,42	1.340.800,00		
		BH 1015 R	Rp 934.500	Rp -	Rp 143.000	Rp 70.000	Rp -	Rp -	1.077.500,00	04/09/2024	31/03/2025	31/12/2024	90	2.952,05	265.684,93		
33	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)	BH 12 R	Rp 1.412.800	Rp 84.000	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp -	Rp -	1.555.800,00	21/07/2024	11/05/2025	31/12/2024	131	4.262,47	558.383,01		
		BH 1 R	Rp 4.509.800	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp 200.000	Rp 100.000	4.952.800,00	24/07/2024	13/08/2025	31/12/2024	225	13.569,32	3.053.095,89		
		BH 9 R	Rp 3.927.000	Rp 628.400	Rp 286.000	Rp 135.000	Rp -	Rp -	4.213.000,00	24/07/2024	23/06/2025	31/12/2024	174	11.542,47	2.008.389,04		
		BH 1032 R	Rp 3.717.000	Rp 371.700	Rp 286.000	Rp 100.000	Rp -	Rp -	4.003.000,00	24/07/2024	20/10/2025	31/12/2024	293	10.967,12	3.213.367,12		
		BH 1146 R	Rp 444.200	Rp -	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp -	Rp -	587.200,00	27/08/2024	15/06/2025	31/12/2024	166	1.608,77	267.055,34		
		BH 1148 R	Rp 1.575.000	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	1.718.000,00	24/07/2024	29/07/2025	31/12/2024	210	4.706,85	988.438,36		
		BH 1139 RZ	Rp 1.663.800	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	1.806.800,00	21/03/2024	24/08/2025	31/12/2024	236	4.950,14	1.168.232,33		
		BH 14 R	Rp 1.412.800	Rp -	Rp 143.000	Rp 70.000	Rp -	Rp -	1.555.800,00	27/08/2024	11/05/2025	31/12/2024	131	4.262,47	558.383,01		
		BH 4 R	Rp 1.727.300	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	1.870.300,00	28/02/2024	28/12/2025	31/12/2024	362	5.124,11	1.854.927,67		
		BH 17 R	Rp 2.825.600	Rp 791.300	Rp 286.000	Rp 200.000	Rp -	Rp -	3.111.600,00	24/07/2024	14/12/2025	31/12/2024	348	8.524,93	2.966.676,16		
		BH 1084 R	Rp 2.813.100	Rp 412.600	Rp 429.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 100.000	3.542.100,00	23/04/2024	22/07/2025	31/12/2024	203	9.704,38	1.969.989,86		
		BH 1026 R	Rp 7.518.000	Rp 1.052.600	Rp 143.000	Rp 100.000	Rp -	Rp -	7.661.000,00	24/07/2024	10/01/2025	31/12/2024	10	20.989,04	209.890,41		
		BH 1004 R	Rp 1.727.300	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	1.870.300,00	28/02/2024	28/12/2025	31/12/2024	362	5.124,11	1.854.927,67		
		BH 1149 R	Rp 703.000	Rp 70.300	Rp 143.000	Rp 700.000	Rp -	Rp -	846.000,00	24/07/2024	01/04/2025	31/12/2024	91	2.317,81	210.920,55		
		34	Sekretariat DPRD	BH 6 R	Rp 2.094.800	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp 200.000	Rp 100.000	2.537.800,00	07/12/2024	18/12/2025	31/12/2024	352	6.952,88	2.447.412,60
				BH 26 R	Rp 1.617.600	Rp -	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp -	Rp -	1.760.600,00	30/11/2024	07/11/2025	31/12/2024	311	4.823,56	1.500.127,67
BH 7 R	Rp 2.094.800			Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp 200.000	Rp 100.000	2.537.800,00	07/12/2024	18/12/2025	31/12/2024	352	6.952,88	2.447.412,60		
BH 1352 R	Rp 631.600			Rp 12.700	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp -	Rp -	774.600,00	14/05/2024	12/05/2025	31/12/2024	132	2.122,19	280.129,32		
BH 1351 R	Rp 631.600			Rp 12.700	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp -	Rp -	774.600,00	14/05/2024	12/05/2025	31/12/2024	132	2.122,19	280.129,32		
BH 1353 R	Rp 631.600			Rp 12.700	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp -	Rp -	774.600,00	14/05/2024	12/05/2025	31/12/2024	132	2.122,19	280.129,32		
BH 3 R	Rp 2.751.000			Rp 275.100	Rp 143.000	Rp 70.000	Rp -	Rp -	2.894.000,00	02/05/2024	16/01/2025	31/12/2024	16	7.928,77	126.860,27		
BH 1020 R	Rp 945.000			Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	1.088.000,00	03/07/2024	10/07/2025	31/12/2024	191	2.980,82	569.336,99		
BH 1023 R	Rp 945.000			Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	1.088.000,00	08/07/2024	17/07/2025	31/12/2024	198	2.980,82	590.202,74		
BH 1021 R	Rp 945.000			Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	1.088.000,00	08/07/2024	10/07/2025	31/12/2024	191	2.980,82	569.336,99		
35	Kecamatan Sungai Penuh	BH 1688 R	Rp 586.500	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	729.500,00	08/05/2024	09/05/2025	31/12/2024	129	1.998,63	257.823,29		
		BH 1681 R	Rp 354.400	Rp -	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp -	Rp -	497.400,00	08/05/2024	09/05/2025	31/12/2024	129	1.362,74	175.793,42		
36	Kecamatan Pesisir Bukit	BH 2126 R	Rp 49.800	Rp -	Rp 35.000	Rp -	Rp 32.900	Rp -	117.700,00	21/01/2025	01/02/2026	31/12/2024	397	322,47	-		
37	Kecamatan Kumun Debai	BH 1805 R	Rp 586.500	Rp -	Rp 143.000	Rp 70.000	Rp -	Rp -	729.500,00	23/12/2024	27/07/2025	31/12/2024	208	1.998,63	415.715,07		
38	Kecamatan Hamparan Rawang	BH 1169 R	Rp 586.500	Rp 23.500	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp -	Rp -	729.500,00	19/06/2024	07/05/2025	31/12/2024	127				

NO	NAMA SKPD	NOMOR POLISI	PKB		SWDKLLJ		BIAYA ADM. STNK	BIAYA ADM. TNKB	BIAYA POKOK PAJAK STNK PER 1 TAHUN	Tanggal Ditetapkan	MASA BERLAKU	Perhitungan Pertanggal 31 Desember 2022	SISA HARI	Biaya Per Hari	SISA BEBAN PAJAK
			Pokok	Sanksi Adm	Pokok	Sanksi Adm									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
42	Kecamatan Koto Baru	BH 1174 R	Rp 625.300	Rp 125.100	Rp 143.000	Rp 100.000	Rp -	Rp -	768.300,00	12/10/2024	21/01/2025	31/12/2024	21	2.104,93	44.203,56
		BH 1248 R	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 200.000	Rp 100.000	Rp -	100.000,00	12/10/2024	18/07/2025	31/12/2024	199	273,97	54.520,55
		BH 25 R	Rp 962.400	Rp 19.300	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp -	Rp -	1.105.400,00	27/04/2024	17/02/2025	31/12/2024	48	3.028,49	145.367,67
43	Inspektoraat Daerah	BH 1409 R	Rp 597.000	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	740.000,00	09/12/2024	31/12/2025	31/12/2024	365	2.027,40	740.000,00
		BH 1408 R	Rp 597.000	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	740.000,00	09/12/2024	31/12/2025	31/12/2024	365	2.027,40	740.000,00
		BH 1410 R	Rp 597.000	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	740.000,00	09/12/2024	31/12/2025	31/12/2024	365	2.027,40	740.000,00
		BH 1407 R	Rp 586.500	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	729.500,00	05/07/2024	22/07/2025	31/12/2024	203	1.998,63	405.721,92
44	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	BH 27 R	Rp 1.500.000	Rp 60.000	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp -	Rp -	1.643.000,00	02/05/2024	14/04/2025	31/12/2024	104	4.501,37	468.142,47
		BH 1204 R	Rp 703.000	Rp 14.100	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp -	Rp -	846.000,00	02/05/2024	24/04/2025	31/12/2024	114	2.317,81	264.230,14
		BH 1201 R	Rp 738.700	Rp 14.800	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp -	Rp -	881.700,00	02/05/2024	24/04/2025	31/12/2024	114	2.415,62	275.380,27
		BH 1202 R	Rp 738.700	Rp 14.800	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp -	Rp -	881.700,00	02/05/2024	25/04/2025	31/12/2024	115	2.415,62	277.795,89
		BH 1130 RZ	Rp 788.600	Rp 31.600	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp -	Rp -	931.600,00	02/05/2024	14/04/2025	31/12/2024	104	2.552,33	265.442,19
		BH 1631 R	Rp 967.600	Rp -	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp -	Rp -	1.110.600,00	06/03/2024	26/01/2025	31/12/2024	26	3.042,74	79.111,23
		BH 1632 R	Rp 967.600	Rp -	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp -	Rp -	1.110.600,00	06/03/2024	26/01/2025	31/12/2024	26	3.042,74	79.111,23
45	Badan Keuangan Daerah	BH 1085 R	Rp 675.700	Rp -	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp -	Rp -	818.700,00	28/08/2024	08/08/2025	31/12/2024	218	2.243,01	488.976,99
		BH 1338 R	Rp 1.284.700	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	1.427.700,00	07/05/2024	30/06/2025	31/12/2024	181	3.911,51	707.982,74	
		BH 1205 R	Rp 703.000	Rp 14.100	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp -	Rp -	846.000,00	07/05/2024	29/04/2025	31/12/2024	119	2.317,81	275.819,18
		BH 1086 R	Rp 443.300	Rp 35.500	Rp 163.000	Rp 40.000	Rp -	Rp -	606.300,00	26/04/2024	10/02/2025	31/12/2024	41	1.661,10	68.104,93
		BH 1301 R	Rp 703.000	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	846.000,00	26/04/2024	29/04/2025	31/12/2024	119	2.317,81	275.819,18	
		BH 1009 R	Rp 1.627.500	Rp -	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp 200.000	Rp 100.000	2.070.500,00	12/11/2024	30/10/2025	31/12/2024	303	5.672,60	1.718.798,63
		BH 1401 R	Rp 597.000	Rp 83.600	Rp 143.000	Rp 70.000	Rp -	Rp -	740.000,00	28/06/2024	09/01/2025	31/12/2024	9	2.027,40	18.246,68
46	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	BH 1402 R	Rp 579.000	Rp 23.900	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp -	Rp -	722.000,00	07/08/2024	22/07/2025	31/12/2024	203	1.978,08	401.550,68
		BH 1404 R	Rp 731.900	Rp 73.200	Rp 143.000	Rp 70.000	Rp -	Rp -	874.900,00	07/08/2024	14/04/2025	31/12/2024	104	2.396,99	249.286,58
		BH 1403 R	Rp 731.900	Rp 73.200	Rp 143.000	Rp 70.000	Rp -	Rp -	874.900,00	07/08/2024	14/04/2025	31/12/2024	104	2.396,99	249.286,58
		BH 1431 R	Rp 577.000	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	Rp -	720.000,00	08/08/2024	24/08/2025	31/12/2024	236	1.972,60	465.534,25
47	Badan Penelitian dan Pengembangan	BH 1421 R	Rp 623.200	Rp -	Rp 143.000	Rp 70.000	Rp -	Rp -	766.200,00	03/09/2024	30/03/2025	31/12/2024	89	2.099,18	186.826,85
		BH 8225 R	Rp 1.371.500	Rp -	Rp 163.000	Rp -	Rp -	1.534.500,00	06/11/2024	29/12/2025	31/12/2024	363	4.204,11	1.526.091,78	
		BH 1074 RZ	Rp 786.500	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	929.500,00	01/03/2024	06/03/2025	31/12/2024	65	2.546,58	165.527,40	
		BH 1134 R	Rp 897.800	Rp -	Rp 143.000	Rp -	Rp -	1.040.800,00	09/12/2024	09/01/2025	31/12/2024	9	2.851,51	25.663,56	
48	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BH 1259 R	Rp 687.800	Rp -	Rp 143.000	Rp 35.000	Rp 200.000	Rp 100.000	1.130.800,00	07/11/2024	05/11/2025	31/12/2024	309	3.098,08	957.307,40
		BH 1239 R	Rp 739.800	Rp -	Rp 143.000	Rp 70.000	Rp 200.000	Rp 100.000	1.182.800,00	20/12/2024	14/09/2025	31/12/2024	257	3.240,55	832.820,82
<b>Total Sisa Beban Dibayar Dimuka Pajak Kendaraan Dinas</b>															<b>129.607.819,48</b>

PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
RINCIAN PERSEDIAAN SKPD PER 31 DESEMBER 2024



(dalam rupiah)

NO.	SKPD	Bahan Bangunan Konstruksi	Bahan Kimia	Bahan Lainnya	Bibit Ternak/ Bibit Ikan	ATK	Kertas dan Cover	Bahan Cetak	Benda Pos	Bahan Komputer	Alat Listrik	Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	Obat-Obatan/ Obat Lainnya	Natura dan Pakan Natura	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Dinas Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Puskesmas Sungai Penuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.364.650,35	238.664,00	-	107.603.314,35
4	Puskesmas Hampan Rawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.313.922,35	-	-	26.313.922,35
5	Puskesmas Kumun Debai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140.428.630,45	-	-	140.428.630,45
6	Puskesmas Desa Gedang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.236.515,54	-	-	29.236.515,54
7	Puskesmas Tanah Kampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.675.928,01	-	-	123.675.928,01
8	Puskesmas Koto Baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103.648.994,81	-	-	103.648.994,81
9	Puskesmas Sungai Bungkal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.345.766,70	423.658,00	-	84.769.424,70
10	Puskesmas Sungai Liuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.157.900,06	-	-	41.157.900,06
11	Puskesmas Koto Lolo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112.742.485,25	-	-	112.742.485,25
12	Puskesmas Pondok Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.062.246,46	-	-	84.062.246,46
13	Puskesmas Tanjung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.298.766,64	-	-	107.298.766,64
14	Instalasi Farmasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.334.402.768,70	-	-	5.334.402.768,70
15	Laboratorium Kesehatan Daerah	-	30.891.284,63	-	-	-	-	-	-	-	-	5.462.024,98	-	-	36.353.309,61
16	Rumah Sakit Kelas D Pratama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.662.603,38	-	-	27.662.603,38
17	Rumah Sakit Umum Daerah MHAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.191.135,00	4.507.263.711,41	-	-	4.511.454.846,41
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	-	-	584.432,00	1.035.000,00	-	-	745.000,00	-	-	-	-	2.364.432,00
19	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Pemadam Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.021.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.021.600,00
23	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Dinas Kelahanan Pangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159.265.243,28	-	159.265.243,28
26	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	172.082.450,00	-	81.979.975,00	-	-	-	-	-	-	254.062.425,00
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.419.262,00	-	-	33.419.262,00
30	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	80.400,00	-	-	-	-	-	-	-	170.200,00	-	-	-	250.600,00
32	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO.	S K P D	Bahan Bangunan Konstruksi	Bahan Kimia	Bahan Lainnya	Bibit Ternak/ Bibit Ikan	ATK	Kertas dan Cover	Bahan Cetak	Benda Pos	Bahan Komputer	Alat Listrik	Alat/Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	Obat-Obatan/ Obat Lainnya	Natura dan Pakan Natura	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Dinas Peternakan dan Perikanan	-	-	-	15.118.506,00	-	-	-	-	-	-	-	18.883.014,00	-	34.001.520,00
39	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Bagian Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Bagian Tata Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Bagian Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Bagian Ekonomi dan Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Bagian Humas dan Protokoler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Bagian Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Bagian Organisasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Kecamatan Sungai Penuh	-	-	-	-	127.500,00	885.000,00	-	-	220.000,00	-	110.000,00	-	-	1.342.500,00
51	Kecamatan Pesisir Bukit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Kecamatan Hampanan Rawang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	Kecamatan Kumun Debai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Kecamatan Tanah Kampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Kecamatan Pondok Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Kecamatan Sungai Bungkal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Kecamatan Koto Baru	-	-	-	-	20.000,00	200.000,00	-	100.000,00	170.000,00	-	-	-	-	490.000,00
58	Kelurahan Sungai Penuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Kelurahan Pondok Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Kelurahan Dusun Baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	Kelurahan Pasar Sungai Penuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	136.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	136.700,00
63	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Badan Keuangan Daerah	-	-	-	-	-	-	20.959.500,00	-	-	-	-	-	-	20.959.500,00
65	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Kantor Kesbangpol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>13.021.600,00</b>	<b>30.891.284,63</b>	<b>80.400,00</b>	<b>15.118.506,00</b>	<b>172.951.082,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>102.939.475,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.135.000,00</b>	<b>4.191.135,00</b>	<b>280.200,00</b>	<b>10.887.369.191,09</b>	<b>159.927.565,28</b>	<b>11.390.125.439,00</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN OBAT EXPIRED PER SKPD**

NO	SKPD	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TOTAL
1	2	3	4	5	6	6 = 3 + 6
1	Puskesmas Sungai Penuh	73.794.001,00	57.777.366,00	11.919.849,36	20.251.285,02	163.742.501,38
2	Puskesmas Hamparan Rawang	143.390.327,53	1.689.316,00	19.560.581,85	4.556.287,56	169.196.512,94
3	Puskesmas Kumun Debai	53.783.464,67	388.326.474,00	39.441.721,42	32.998.035,74	514.549.695,83
4	Puskesmas Desa Gedang	74.116.048,29	19.063.948,00	9.612.423,67	19.540.422,00	122.332.841,96
5	Puskesmas Tanah Kampung	58.226.495,44	33.439.695,00	20.182.227,87	13.657.374,26	125.505.792,57
6	Puskesmas Koto Baru	137.308.252,50	3.801.111,70	54.266.340,42	32.225.895,19	227.601.599,81
7	Puskesmas Sungai Bungkal	58.982.415,41	9.300.754,90	24.808.007,42	19.039.718,67	112.130.896,40
8	Puskesmas Sungai Liuk	58.840.904,75	24.640.618,60	9.477.582,00	15.590,45	92.974.695,80
9	Puskesmas Koto Lolo	52.756.051,67	37.660.319,81	58.798.964,51	34.035.652,35	183.250.988,34
10	Puskesmas Pondok Tinggi	15.608.922,00	11.334.362,00	8.872.253,73	13.419.908,23	49.235.445,96
11	Puskesmas Tanjung	36.928.451,19	79.813.952,00	25.976.720,94	27.800.126,74	170.519.250,87
12	Instalasi Farmasi	1.729.847.228,47	290.373.352,92	429.718.886,90	452.744.198,37	2.902.683.666,66
13	Laboratorium Kesehatan Daerah	436.974.919,47	59.971.296,58	4.136.842,06	15.425.205,85	516.508.263,96
14	Rumah Saki Bakrie	85.292.050,00	23.686.227,00	92.164.943,81	15.814.342,85	216.957.563,66
15	Dinas PPKB	-	-	2.927.460,00	1.713.515,00	4.640.975,00
16	Rumah Sakit Umum Mayjen H.A Thalib	19.068.865,00	372.043.199,50	112.347.983,30	20.913.300,96	524.373.348,76
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				15.255.000,00	15.255.000,00
18	Dinas Peternakan dan Perikanan				19.404.524,00	19.404.524,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.034.918.397,39</b>	<b>1.412.921.994,01</b>	<b>924.212.789,26</b>	<b>758.810.383,25</b>	<b>6.130.863.563,90</b>



Pemerintah Kota Sungai Penuh  
Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Tanah per SKPD  
Tahun Anggaran 2024

No	SKPD	Saldo Awal	Belanja Modal	Mutasi Tambah			Mutasi Kurang				Saldo Per 31 Des 2024
				Mutasi dari SKPKD/SKPD	Reklasifikasi	Jumlah	Mutasi dari SKPKD/SKPD	Reklasifikasi	Koreksi	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 = (5 : 6)	8	9	10	11 = (8 : 10)	12 = 3 + 4 + 7 - 11
1	Dinas Pendidikan	12.776.271.654,58	-	368.960.000,00	-	368.960.000,00	-	368.960.000,00	-	368.960.000,00	12.776.271.654,58
2	Dinas Kesehatan	1.289.701.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.289.701.150,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	86.592.743.340,93	179.934.306,20	-	-	-	-	179.934.306,20	-	179.934.306,20	86.592.743.340,93
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	7.734.946.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.734.946.100,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	347.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	347.500.000,00
6	Dinas Perhubungan	755.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	755.800.000,00
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.843.133.290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.843.133.290,00
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	11.406.318.094,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.406.318.094,00
9	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	500.000.000,00	184.857.925,00	-	-	-	-	49.937.944,00	-	49.937.944,00	634.919.981,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.930.531.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4.930.531.000,00
11	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	500.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000.000,00
12	Dinas Peternakan dan Perikanan	3.450.575.854,90	-	-	-	-	-	-	-	-	3.450.575.854,90
13	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.401.710.026,52	-	-	-	-	-	-	-	-	2.401.710.026,52
14	Bagian Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Bagian Tata Pemerintahan	2.127.874.110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.127.874.110,00
16	Kecamatan Sungai Penuh	480.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	480.000,00
17	Kecamatan Pesisir Bukit	122.825.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	122.825.000,00
18	Kecamatan Hampan Rawang	245.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	245.500.000,00
19	Kecamatan Kumun Debai	283.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	283.900.000,00

No	SKPD	Saldo Awal	Belanja Modal	Mutasi Tambah			Mutasi Kurang				Saldo Per 31 Des 2024
				Mutasi dari SKPKD/SKPD	Reklasifikasi	Jumlah	Mutasi dari SKPKD/SKPD	Reklasifikasi	Koreksi	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 = ( 5 : 6 )	8	9	10	11 = ( 8 : 10 )	12 = 3 + 4 + 7 - 11
20	Kecamatan Koto Baru	15.730.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.730.000,00
21	Inspektorat Daerah	2.044.945.470,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2.044.945.470,00
22	Badan Keuangan Daerah	67.707.663.063,00	-	-	-	-	368.960.000,00	1.330.809.000,00	-	1.699.769.000,00	66.007.894.063,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>208.078.148.153,93</b>	<b>364.792.231,20</b>	<b>368.960.000,00</b>	<b>-</b>	<b>368.960.000,00</b>	<b>368.960.000,00</b>	<b>1.929.641.250,20</b>	<b>-</b>	<b>2.298.601.250,20</b>	<b>206.513.299.134,93</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN TANAH BERSERTIFIKAT**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam Rupiah)

No	Nama Barang	Tahun Pengadaan	Alamat	Asal Usul Tanah	Nilai Perolehan	Keterangan / Kode Barang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Makam Umum/Kuburan Umum	2016	Hibah dari Pemkab. Kerinci 2016	Hak Pakai	85.580.000,00	01.01.01.03.008	HP 9
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	1983	Rumah Dinas Bupati Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021	Hak Pakai	803.875.800,00	01.01.11.01.001	HP 35
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	2001	Bagian Umum dan Keuangan R. Tilo Rivano Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021 luasnya 2643	Hak Pakai	32.000.000,00	01.01.11.01.002	HP 34
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	2001	Bagian Umum dan Keuangan R. Sabaini Aziz, BA Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021 smp 2	Hak Pakai	28.000.000,00	01.01.11.01.002	HP 8
5	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	2004	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021	Hak Pakai	249.862.250,00	01.01.11.01.002	HP 15 dan HP 16
6	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	2001	Bagian Umum dan Keuangan Lokasi Perumahan Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021	Hak Pakai	362.000.000,00	01.01.11.01.003	HP 2
7	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	2001	Bagian Umum dan Keuangan Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021	Hak Pakai	68.600.000,00	01.01.11.01.003	HP 7
8	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	2001	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah (Rumah Dinas Camat) Sungai Penuh Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021 smp 2	Hak Pakai	74.000.000,00	01.01.11.01.003	HP 12
9	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	2001	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021	Hak Pakai	31.360.000,00	01.01.11.01.003	HP 4
10	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	2003	Bagian Umum dan Keuangan Rumah Dinas PNS Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021	Hak Pakai	107.616.000,00	01.01.11.01.003	HP 1
11	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	2006	Bagian Umum dan Keuangan Perumahan Perumnas Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021	Hak Pakai	683.900.000,00	01.01.11.01.003	HP 2
16	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	2016	Hibah dari Pemkab. Kerinci 2016		25.600.000,00	01.01.11.01.003	Jalan Renah Jambu Tupai (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 2.538.530.400 (BPK 2023)
24	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1973	Mess/ Gedung Nasional Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021	Hak Pakai	1.076.400.000,00	01.01.11.01.005	Jl. Taman Bunga (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 2.080.517.250 (BPK 2023)
27	Tanah Bangunan Rumah Fasilitas Tempat Tinggal Lain	2017	Tanah Untuk RUSUNAWA Desa Sungai Jernih / Dibangun Stadion Mini Pondok Tinggi	Hak Pakai	1.520.571.434,24	01.01.11.01.010	Jl. Karang Taruna (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 339.981.750 (BPK 2023)
28	Tanah Bangunan Pasar	2016	Hibah dari Pemkab. Kerinci 2016 Luasnya 1.793	Hak Pakai	366.400.000,00	01.01.11.02.001	Jl. Dusun Jembatan II (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 2.790.416.250 (BPK 2023)
42	Tanah Bangunan Pasar	2016	Hibah dari Pemkab. Kerinci 2016 Luasnya 1.852	Hak Pakai	354.900.000,00	01.01.11.02.001	Jl. Jl. Langsat/ Jl. Lubuk Arai (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 837.500.000 (BPK 2023)
43	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko	2004	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tempat Penampungan Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021	Hak Pakai	34.100.000,00	01.01.11.02.002	Jl. Tugu Manggis (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 3.350.000.000 (BPK 2023)
45	Tanah Bangunan Gedung	2001	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021	Hak Pakai	47.000.000,00	01.01.11.02.003	Jl. Lingkar Sentiong (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 996.625.000 (BPK 2023)
50	Tanah Bangunan Gedung	2003	Bagian Umum dan Keuangan Ex. PTA Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021	Hak Pakai	132.841.710,00	01.01.11.02.003	Jl. Koto Labu (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 314.900.000 (BPK 2023)
51	Tanah Bangunan Terminal Darat	2013	HP 1	Hak Pakai	755.800.000,00	01.01.11.02.007	Jl. Mesjid Nurul Hikmah (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 262.975.000 (BPK 2023)
53	Tanah Bangunan Industri Lainnya	2017	Pengadaan Tahun 2017 Luasnya 4.440	Hak Pakai	1.043.329.356,00	01.01.11.03.023	Jl. Karya Bakti II (Koreksi) Koreksi nilai dan nama jalan sebelum Jl. Karya Bakti dan nilai Rp. 360.125.000 (BPK 2023)

1	2	3	4	5	6	7	8
54	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1980	Kantor Bupati Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021	Hak Pakai	1.641.191.000,00	01.01.11.04.001	Jl. Rawa Inun (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp.343.710.000 dan tercatat 2 reg 767083500  (BPK 2023)
55	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1981	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNEKAN Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021	Hak Pakai	350.000,00	01.01.11.04.001	Jl. Karya Bakti I (ruas sebelumnya Jl. Perjuangan (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 17.875.995.000 (BPK 2023)
56	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1983	KANTOR SEKRETARIAT DPRD Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021	Hak Pengelolaan	477.672.000,00	01.01.11.04.001	Jl. Gajah Mada (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 6.300.060.000 (BPK 2023)
57	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1999	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021	Hak Pakai	164.112.000,00	01.01.11.04.001	Jl. Kolonel M. Koekoeh (Koreksi)Koreksi nilai sebelum Rp. 1.921.932.000 (BPK 2023)
58	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2001	Bagian Perpustakaan dan Arsip Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021	Hak Pakai	117.000.000,00	01.01.11.04.001	Jl. Aur Duri (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 232.854.000 (BPK 2023)
59	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2001	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021	Hak Pakai	304.345.000,00	01.01.11.04.001	Jl. Kemenyang Jaya (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 261.616.000 (BPK 2023)
60	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2001	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021	Hak Pakai	27.720.000,00	01.01.11.04.001	Jl. Sultan Hasanuddin (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 685.356.980 (BPK 2023)
61	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2001	Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021	Hak Pakai	210.020.000,00	01.01.11.04.001	Jl. Depati Payung (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 923.142.000 (BPK 2023)
62	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2001	Bagian Umum dan Keuangan Kantor Samsat Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021	Hak Pakai	210.530.000,00	01.01.11.04.001	Jl. Prof.DR.Yakub Isman (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 676.892.000 (BPK 2023)
225	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2001	Dinas Lingkungan Hidup Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021	Hak Pakai	140.000.000,00	01.01.11.04.001	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Embung, Lokasi Kota Sungai Penuh (2 SERTIFIKAT)
234	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2001	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021	Hak Pakai	119.992.000,00	01.01.11.04.001	Pek.Pengadaan Tanah TPS 3R, Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta 2022
235	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2001	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021	Hak Pakai	36.000.000,00	01.01.11.04.001	Hibah dari Pembak. Kerinci 2016
236	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2001	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021	Hak Pakai	25.440.000,00	01.01.11.04.001	Tanah Untuk RUSUNAWA Desa Sungai Jernih / Dibangun Stadion Mini Pondok Tinggi
237	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2006	DINAS PEKERJAAN UMUM Tanah Workshop	Hak Pakai	476.000.000,00	01.01.11.04.001	Tanah Untuk Pembangunan TK Pembina Kec. Sungai Bungkal
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2009	HP 3 (17.904 M2) dan HP 4 (12.656 M2); 2 Sertifikat 2 Bidang Tanah		1.049.890.000,00	01.01.11.04.001	
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2010	HP 6 (17.294 M2) dan HP 5 (8.781 M2); 2 sertifikat 2 bidang tanah		1.194.349.575,00	01.01.11.04.001	
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2011	HP 2		445.480.000,00	01.01.11.04.001	
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2011	HP 4		229.680.000,00	01.01.11.04.001	
238	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2012	HP 1	Hak Pakai	2.534.350.000,00	01.01.11.04.001	PENGADAAN TANAH / GANTI RUGI SEBIDANG TANAH Untuk TK Pembina Desa Koto Tuo
239	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2012	HP 26	Hak Pakai	120.975.000,00	01.01.11.04.001	Tanah Untuk Pembibitan Bunga Desa Sungai Jernih Kec. Pondok Tinggi
240	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2012	HP 1	Hak Pakai	186.276.000,00	01.01.11.04.001	PENGADAAN TANAH Kantor KPU
241	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2012	HP 6	Hak Pakai	25.020.000,00	01.01.11.04.001	PENGADAAN TANAH / GANTI RUGI SEBIDANG TANAH Untuk Pembibitan Ternak Sapi Unggul. Desa Talang Lindung Kec. Sungai Bungkal
242	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2012	HP 3	Hak Pakai	209.568.000,00	01.01.11.04.001	Tanah Untuk TPS 3R Dinas Lingkungan Hidup
243	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2013	HP 3	Hak Pakai	2.834.588.790,00	01.01.11.04.001	Tanah Untuk IPAL Kec. Tanah Kampung
244	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2013	HP 7	Hak Pakai	2.044.945.470,00	01.01.11.04.001	Tanah Untuk IPAL Kec. Kumun Debai
245	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2013	HP 12	Hak Pakai	245.500.000,00	01.01.11.04.001	Tanah Untuk IPAL Kec. Tanah Kampung
246	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2013	HP 1	Hak Pakai	122.825.000,00	01.01.11.04.001	HP 1

1	2	3	4	5	6	7	8
247	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2013	HP 7	Hak Pakai	480.000,00	01.01.11.04.001	HP 11
248	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2013	HP 4	Hak Pakai	283.900.000,00	01.01.11.04.001	HP 7
249	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2013	HP 8	Hak Pakai	4.095.400.000,00	01.01.11.04.001	HP 9
250	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2013	HP 10	Hak Pakai	1.062.000.000,00	01.01.11.04.001	HP 8
251	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2014	HP 8 kantor pustaka dari tapem	Hak Pakai	4.930.531.000,00	01.01.11.04.001	HP 1
252	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2016	1680/SP2D/LS/2016 Luasnya 4490	Hak Pakai	1.906.204.174,90	01.01.11.04.001	HP 1
253	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2001	Bagian Umum dan Keuangan STIE Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021	Hak Pakai	681.000.000,00	01.01.11.04.002	HP 11
254	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2011	HP 1	Hak Pakai	324.615.000,00	01.01.11.04.002	HP 2
256	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2011	HP 6	Hak Pakai	66.975.000,00	01.01.11.04.002	HP 1
257	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2012	HP 2, 3 dan 4 3 sertifikat 3 bidang tanah	Hak Pakai	1.280.500.000,00	01.01.11.04.002	HP 5 MUTASI DARI TAPEM
258	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2012	HP 3	Hak Pakai	65.446.000,00	01.01.11.04.002	HP 1
259	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 1 (Aset Bekas Milik Asing / Cina SMP Negeri 9 Sungai Penuh (Dh SKKP dan SMK Negeri Kerinci.)	Hak Pakai	126.000.000,00	01.01.11.04.002	HP 1
260	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 5	Hak Pakai	184.640.000,00	01.01.11.04.002	HP 4
261	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 13	Hak Pakai	113.596.000,00	01.01.11.04.002	hibah dari kabupaten kerinci
262	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 6	Hak Pakai	51.712.000,00	01.01.11.04.002	HP 9
263	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 10	Hak Pakai	800.000.000,00	01.01.11.04.002	HP 2
264	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 10	Hak Pakai	331.600.000,00	01.01.11.04.002	HP 1
266	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 6	Hak Pakai	631.680.000,00	01.01.11.04.002	HP 2
267	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 4	Hak Pakai	143.000.000,00	01.01.11.04.002	HP 3
268	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 1	Hak Pakai	792.960.000,00	01.01.11.04.002	HP 10
270	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 14	Hak Pakai	288.727.400,00	01.01.11.04.002	HP 9
271	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 32 (27.252 M2) dan HP 33 (5.937 M2)	Hak Pakai	269.598.000,00	01.01.11.04.002	HP 5
272	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 1	Hak Pakai	32.000.000,00	01.01.11.04.002	HP 10
273	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 4	Hak Pakai	18.000.000,00	01.01.11.04.002	HP 9
274	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	hibah dari kabupaten kerinci	Hak Pakai	14.000.000,00	01.01.11.04.002	HP 2
275	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 9	Hak Pakai	24.000.000,00	01.01.11.04.002	HP 1
276	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 2	Hak Pakai	14.560.000,00	01.01.11.04.002	HP 3
277	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	KMK No. 129/KM.6/2012	Hak Pakai	3.731.916.000,00	01.01.11.04.002	HP 1
278	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 1	Hak Pakai	24.000.000,00	01.01.11.04.002	HP 1
279	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 2	Hak Pakai	24.500.000,00	01.01.11.04.002	HP 2
280	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 3	Hak Pakai	210.000.000,00	01.01.11.04.002	HP 10
281	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 10	Hak Pakai	202.400.000,00	01.01.11.04.002	HP 9
282	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 9	Hak Pakai	114.400.000,00	01.01.11.04.002	HP 1
283	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 5	Hak Pakai	368.960.000,00	01.01.11.04.002	HP 14
284	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 10	Hak Pakai	35.840.000,00	01.01.11.04.002	HP 3
285	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 9	Hak Pakai	130.560.000,00	01.01.11.04.002	HP 2
286	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 2	Hak Pakai	28.400.000,00	01.01.11.04.002	HP 10
287	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 1	Hak Pakai	1.550.000,00	01.01.11.04.002	hibah dari kabupaten kerinci
288	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 3	Hak Pakai	14.000.000,00	01.01.11.04.002	HP 9
289	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 1	Hak Pakai	10.584.000,00	01.01.11.04.002	HP 5

1	2	3	4	5	6	7	8
290	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 1	Hak Pakai	19.866.000,00	01.01.11.04.002	HP 4
291	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 2	Hak Pakai	19.866.000,00	01.01.11.04.002	HP 36
292	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 10	Hak Pakai	40.000.000,00	01.01.11.04.002	HP 10
293	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 9	Hak Pakai	40.000.000,00	01.01.11.04.002	HP 9
294	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 1	Hak Pakai	100.800.000,00	01.01.11.04.002	HP 1
295	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 14	Hak Pakai	62.352.000,00	01.01.11.04.002	HP 1
296	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 3	Hak Pakai	661.504.000,00	01.01.11.04.002	HP 2
297	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 2	Hak Pakai	318.720.000,00	01.01.11.04.002	HP 3
298	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 10	Hak Pakai	161.280.000,00	01.01.11.04.002	HP 2
299	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	hibah dari kabupaten kerinci	Hak Pakai	69.560.000,00	01.01.11.04.002	HP 1
300	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 9	Hak Pakai	76.800.000,00	01.01.11.04.002	HP 1
301	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 5	Hak Pakai	76.160.000,00	01.01.11.04.002	HP 1
302	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 4	Hak Pakai	6.144.000,00	01.01.11.04.002	HP 1
303	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 36	Hak Pakai	21.168.000,00	01.01.11.04.002	HP 2
304	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 10	Hak Pakai	21.168.000,00	01.01.11.04.002	HP 1
306	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 9	Hak Pakai	33.380.000,00	01.01.11.04.002	HP 4
307	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 1	Hak Pakai	40.000.000,00	01.01.11.04.002	HP 2
308	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 1	Hak Pakai	30.000.000,00	01.01.11.04.002	HP 1
309	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 2	Hak Pakai	8.680.000,00	01.01.11.04.002	HP 1
310	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 3	Hak Pakai	529.125.000,00	01.01.11.04.002	HP 2
311	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 2	Hak Pakai	17.000.000,00	01.01.11.04.002	HP 4
312	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 1	Hak Pakai	17.500.000,00	01.01.11.04.002	HP 2
313	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 1	Hak Pakai	9.000.000,00	01.01.11.04.002	HP 1
314	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 1	Hak Pakai	19.305.000,00	01.01.11.04.002	HP 3
315	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 1	Hak Pakai	8.923.200,00	01.01.11.04.002	HP 1
316	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 2	Hak Pakai	229.300.000,00	01.01.11.04.002	HP 9
317	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 1	Hak Pakai	30.000.000,00	01.01.11.04.002	HP 2
318	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 4	Hak Pakai	3.710.000,00	01.01.11.04.002	HP 2
319	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 2	Hak Pakai	5.355.000,00	01.01.11.04.002	HP 3
320	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 1	Hak Pakai	6.539.500,00	01.01.11.04.002	HP 2 (Penilaian TA. 2015 dg No. S-847/WKN.04/KNL.01/2015 tgl 23 Juni 2015
321	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 1	Hak Pakai	8.400.000,00	01.01.11.04.002	HP 1 (Hibah dari Pemkab. Kerinci 2016)
322	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 2	Hak Pakai	630.120.000,00	01.01.11.04.002	Hibah dari Pemkab. Kerinci 2016
323	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 4	Hak Pakai	511.100.000,00	01.01.11.04.002	Hibah dari Pemkab. Kerinci 2016
324	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 2	Hak Pakai	50.000.000,00	01.01.11.04.002	Hibah dari Pemkab. Kerinci 2016
325	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 1	Hak Pakai	50.000.000,00	01.01.11.04.002	Hibah dari Pemkab. Kerinci 2016
326	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 3	Hak Pakai	3.178.000,00	01.01.11.04.002	Hibah dari Pemkab. Kerinci 2016
327	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 1	Hak Pakai	630.130.120,00	01.01.11.04.002	1678/SP2D/LS/2016 Dari Tapem
329	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 9	Hak Pakai	35.000.000,00	01.01.11.04.002	HP 13
330	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 2	Hak Pakai	29.420.000,00	01.01.11.04.002	HP 6
331	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 2	Hak Pakai	30.100.000,00	01.01.11.04.002	HP 4
332	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 3	Hak Pakai	16.740.000,00	01.01.11.04.002	HP 10

1	2	3	4	5	6	7	8
333	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 2 (Penilaian TA. 2015 dg No. S-847/WKN.04/KNL.01/2015 tgl 23 Juni 2015	Hak Pakai	1.230.095.000,00	01.01.11.04.002	HP 5
334	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2016	Hibah dari Pemkab. Kerinci 2016	Hak Pakai	12.748.000,00	01.01.11.04.002	HP 1 (Aset Bekas Milik Asing / Cina SMP Negeri 9 Sungai Penuh (Dh SKKP dan SMK Negeri Kerinci.)
335	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2016	Hibah dari Pemkab. Kerinci 2016	Hak Pakai	86.400.000,00	01.01.11.04.002	Hibah dari Pemkab. Kerinci 2016
336	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2016	HP 1 (Hibah dari Pemkab. Kerinci 2016)	Hak Pakai	37.016.000,00	01.01.11.04.002	HP 32 (27.252 M2) dan HP 33 (5.937 M2)
337	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2016	Hibah dari Pemkab. Kerinci 2016	Hak Pakai	428.340.000,00	01.01.11.04.002	Hibah dari Pemkab. Kerinci 2016
339	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2016	Hibah dari Pemkab. Kerinci 2016	Hak Pakai	28.000.000,00	01.01.11.04.002	HP 14
340	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2016	Hibah dari Pemkab. Kerinci 2016	Hak Pakai	35.000.000,00	01.01.11.04.002	HP 6
341	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2016	Hibah dari Pemkab. Kerinci 2016	Hak Pakai	18.000.000,00	01.01.11.04.002	HP 10
342	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2016	Hibah dari Pemkab. Kerinci 2016	Hak Pakai	693.840.000,00	01.01.11.04.002	HIBAH DARI KAB. KERINCI AAL 866904 1250/2019, AAA961467 268/2019, AAA 961468 1249/2019, AAA 961496 300/2019, AAA 961497 299/2019, BT 062964 2178/2018, BT 062963 2169/2018, BT 02900 2174/2018, BT 028991 2175/2018, BT 028994 2176/2018, BT 028988 2179/2018
344	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2016	1678/SP2D/LS/2016 Dari Tapem	Hak Pakai	173.488.434,58	01.01.11.04.002	Desa Air Teluh Kec. Kumun Debai
345	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2017	Tanah Untuk Pembangunan TK Pembina Kec. Sungai Bungkal	Hak Pakai	1.743.171.122,01	01.01.11.04.002	Desa Baru Kec. Tanah Kampung
346	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2017	PENGADAAN TANAH / GANTI RUGI SEBIDANG TANAH Untuk TK Pembina Desa Koto Tuo	Hak Pakai	167.694.770,93	01.01.11.04.002	Stadion Mini Luas 15.130
349	Tanah Bangunan Rumah Sakit	2012	HP 2 dan 3: 2 sertifikat 2 bidang tanah	Hak Pakai	6.870.160.000,00	01.01.11.04.003	HP 8 kantor pustaka dari tapem
351	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	2016	HIBAH DARI KAB. KERINCI Luasnya 4515	Hak Pakai	300.000.000,00	01.01.11.04.009	1680/SP2D/LS/2016 Luasnya 4490
352	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	2013	HP 11	Hak Pakai	1.400.000,00	01.01.11.04.012	HP 7
353	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	2013	HP 7	Hak Pakai	14.400.000,00	01.01.11.04.012	Hibah dari Pemda Kerinci
355	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	2013	HP 9	Hak Pakai	980.000,00	01.01.11.04.012	Hibah dari Pemkab. Kerinci 2016 Luasnya 1.793
356	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	2013	HP 8	Hak Pakai	8.810.000,00	01.01.11.04.012	Hibah dari Pemkab. Kerinci 2016 Luasnya 1.852
357	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	2013	HP 1	Hak Pakai	17.630.000,00	01.01.11.04.012	Pengadaan Tahun 2017 Luasnya 4.440
360	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	2013	HP 1	Hak Pakai	525.000,00	01.01.11.04.012	HP 3 (17.904 M2) dan HP 4 (12.656 M2) 2 Sertifikat 2 Bidang Tanah
361	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	2013	HP 11	Hak Pakai	11.070.000,00	01.01.11.04.012	HP 6 (17.294 M2) dan HP 5 (8.781 M2) 2 sertifikat 2 bidang tanah
363	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	2013	HP 2	Hak Pakai	3.000.000,00	01.01.11.04.012	HP 2
364	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	2013	HP 1	Hak Pakai	2.000.000,00	01.01.11.04.012	HP 4
365	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	2013	HP 5 MUTASI DARI TAPEM		1.226.886.150,00	01.01.11.04.012	HP 1
366	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	2014	HP 9		126.882.000,00	01.01.11.04.012	HP 26
367	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	2015	HP 35		1.112.496.733,20	01.01.11.04.012	HP 1
368	Tanah Bangunan Laboratorium	2007	Dinas Lingkungan Hidup Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021	Hak Pakai	103.040.000,00	01.01.11.04.014	HP 6
369	Tanah Bangunan Pembibitan	2013	HP 7	Hak Pakai	1.319.871.680,00	01.01.11.04.019	HP 3
370	Tanah Bangunan Pembibitan	2017	Tanah Untuk Pembibitan Bunga Desa Sungai Jerneh Kec. Pondok Tinggi	Hak Pakai	901.716.602,76	01.01.11.04.019	HP 8
371	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	1973	DINAS PERHUBUNGAN Pos Kota Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021	Hak Pakai	138.600.000,00	01.01.11.04.024	HP 10
372	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	2015	HP 34	Hak Pakai	98.654.493,76	01.01.11.04.025	HP 1

1	2	3	4	5	6	7	8
373	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	2019	PENGADAAN TANAH Kantor KPU	Hak Pakai	933.530.000,00	01.01.11.04.025	HP 6
374	Tanah Kosong Lainnya	2006	DINAS PEKERJAAN UMUM Tanah Rumah Karyawan Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021	Hak Pakai	28.741.000,00	01.01.11.05.007	HP 2, 3 dan 4 3 sertifikat 3 bidang tanah
375	Tanah Peternakan Lainnya	2013	Hibah dari Pemda Kerinci	Hak Pakai	224.500.000,00	01.01.11.06.002	HP 3
377	Tanah Peternakan Lainnya	2017	PENGADAAN TANAH / GANTI RUGI SEBIDANG TANAH Untuk Pembibitan Ternak Sapi Unggul Desa Talang Lindung Kec. Sungai Bungkal	Hak Pakai	1.032.230.742,84	01.01.11.06.002	KMK No. 129/KM.6/2012
378	Tanah Jalan	2012	HP 6	Hak Pakai	20.680.000,00	01.01.11.08.001	HP 2 dan 3 2 sertifikat 2 bidang tanah
379	Tanah Jalan	2014	HP 2	Hak Pakai	15.730.000,00	01.01.11.08.001	HP 6
380	Tanah Jalan	2022	Jalan Renah Jambu Tupai (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 2.538.530.400 (BPK 2023)	Hak Pakai	213.696.000,00	01.01.11.08.001	HP 3
381	Tanah Jalan	2022	Jl. Taman Bunga (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 2.080.517.250 (BPK 2023)	Hak Pakai	200.160.000,00	01.01.11.08.001	DINAS PEKERJAAN UMUM Tanah Workshop
382	Tanah Jalan	2022	Jl. Karang Taruna (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 339.981.750 (BPK 2023)	Hak Pakai	68.552.000,00	01.01.11.08.001	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNEKAN Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
383	Tanah Jalan	2022	Jl. Dusun Jembatan II (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 2.790.416.250 (BPK 2023)	Hak Pakai	261.000.000,00	01.01.11.08.001	DINAS PERIKAMAN DAN KETAHANAN PANGAN Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
384	Tanah Jalan	2022	Jl. Jl. Langsat/ Jl. Lubuk Arai (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 837.500.000 (BPK 2023)	Hak Pakai	288.400.000,00	01.01.11.08.001	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
385	Tanah Jalan	2022	Jl. Tugu Manggis (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 3.350.000.000 (BPK 2023)	Hak Pakai	360.000.000,00	01.01.11.08.001	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
386	Tanah Jalan	2022	Jl. Lingkar Sentiong (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 996.625.000 (BPK 2023)	Hak Pakai	350.200.000,00	01.01.11.08.001	Bagian Umum dan Keuangan STIE Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
387	Tanah Jalan	2022	Jl. Koto Lebu (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 314.900.000 (BPK 2023)	Hak Pakai	68.060.160,00	01.01.11.08.001	Dinas Lingkungan Hidup Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
388	Tanah Jalan	2022	Jl. Mesjid Nurul Hikmah (Koreksi)Koreksi nilai sebelum Rp.262.975.000 (BPK 2023)	Hak Pakai	62.361.600,00	01.01.11.08.001	DINAS PEKERJAAN UMUM Tanah Rumah Karyawan Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
389	Tanah Jalan	2022	Jl. Karya Bakti II (Koreksi)Koreksi nilai dan nama jalan sebelum Jl. Karya Bakti dan nilai Rp. 360.125.000 (BPK 2023)	Hak Pakai	91.840.000,00	01.01.11.08.001	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
405	Tanah Jalan	2022	Jl. Rawa Inun (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp.343.710.000 dan tercatat 2 reg 767083500 (BPK 2023)	Hak Pakai	109.224.000,00	01.01.11.08.001	Bagian Umum dan Keuangan Penyerahan Aset dari Kabupaten
406	Tanah Jalan	2022	Jl. Karya Bakti I (ruas sebelumnya Jl. Perjuangan (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 17.875.995.000 (BPK 2023)	Hak Pakai	111.520.000,00	01.01.11.08.001	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
407	Tanah Jalan	2022	Jl. Gajah Mada (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 6.300.060.000 (BPK 2023)	Hak Pakai	1.990.650.000,00	01.01.11.08.001	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNEKAN Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
416	Tanah Jalan	2022	Jl. Kolonel M. Koekoeh (Koreksi)Koreksi nilai sebelum Rp. 1.921.932.000 (BPK 2023)	Hak Pakai	531.417.250,00	01.01.11.08.001	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Tempat Penampungan Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
421	Tanah Jalan	2022	Jl. Aur Duri (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 232.854.000 (BPK 2023)	Hak Pakai	31.877.300,00	01.01.11.08.001	HP 7
422	Tanah Jalan	2022	Jl. Kemenyan Jaya (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 261.616.000 (BPK 2023)	Hak Pakai	267.102.000,00	01.01.11.08.001	Hibah dari Pemkab. Kerinci 2016
423	Tanah Jalan	2022	Jl. Sultan Hasanuddin (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 685.356.980 (BPK 2023)	Hak Pakai	421.740.000,00	01.01.11.08.001	HIBAH DARI KAB. KERINCI
424	Tanah Jalan	2022	Jl. Depati Payung (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 923.142.000 (BPK 2023)	Hak Pakai	520.459.500,00	01.01.11.08.001	HP 3
431	Tanah Jalan	2022	Jl. Prof.DR.Yakub Isman (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 676.892.000 (BPK 2023)	Hak Pakai	120.388.500,00	01.01.11.08.001	Hibah dari Pemkab. Kerinci 2016

1	2	3	4	5	6	7	8
433	Tanah Jembatan	2014	HP 8	Hak Pakai	126.480.000,00	01.01.11.08.002	Tanah Untuk TPS 3R Dinas Lingkungan Hidup
435	Tanah Lapangan Sepak Bola	2016	HIBAH DARI KAB. KERINCI 86	Hak Pakai	1.532.137.495,00	01.01.13.01.005	Hibah dari Pemkab. Kerinci 2016
437	Tanah Lapangan Sepak Bola	2018	Desa Air Teluh Kec. Kumun Debai	Hak Pakai	361.274.155,00	01.01.13.01.005	Jalan Renah Jambu Tupai (Koreksi)
447	Tanah Lapangan Sepak Bola	2018	Desa Baru Kec. Tanah Kampung	Hak Pakai	1.120.764.714,00	01.01.13.01.005	Jl. Dusun Jembatan II (Koreksi)
450	Tanah Lapangan Sepak Bola	2018	Stadion Mini Luas 15.130	Hak Pakai	3.052.785.895,00	01.01.13.01.005	Jl. Koto Lebu (Koreksi)
452	Tanah Lapangan Penimbun Pembuangan Sampah	2017	Tanah Untuk TPS 3R Dinas Lingkungan Hidup	Hak Pakai	471.230.214,94	01.01.13.03.003	Jl. Mesjid Nurul Hikmah (Koreksi)
453	Tanah Lapangan Pemancar TV/Radio/Radar	2016	Hibah dari Pemkab. Kerinci 2016 Luasnya 863	Hak Pakai	8.544.500,00	01.01.13.04.001	Jl. Karya Bakti (Koreksi)
456	Tanah Utik Bangunan Jalan Lain-lain	2011	HP 3	Hak Pakai	212.351.198,00	01.01.13.07.010	Jl. Rawa Inun (Koreksi)
457	Tanah Untuk Bangunan Air Irigasi	2019	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Embung, Lokasi Kota Sungai Penuh (2 SERTIFIKAT)	Hak Pakai	1.079.680.631,00	01.01.13.08.001	Jl. Karya Bakti I / Jl. Perjuangan (Koreksi)
462	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Air Kotor/Air Limba	2017	Tanah Untuk IPAL Kec. Tanah Kampung	Hak Pakai	169.552.936,14	01.01.13.09.002	Jl. Gajah Mada (Koreksi)
464	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Air Kotor/Air Limba	2017	Tanah Untuk IPAL Kec. Kumun Debai	Hak Pakai	454.000.296,12	01.01.13.09.002	Jl. Kolonel M. Koekoeh (Koreksi)
467	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Air Kotor/Air Limba	2017	Tanah Untuk IPAL Kec. Tanah Kampung	Hak Pakai	255.667.980,02	01.01.13.09.002	Jl. Aur Duri, II (Koreksi)
471	Tanah Untuk Bangunan Instalasi Pengolahan Sampah	2022	Pek Pengadaan Tanah TPS 3R, Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta 2022	Hak Pakai	396.264.000,00	01.01.13.09.003	Jl. Kemenyan Jaya (Koreksi)
476	Tanah Untuk Tugu Batas Wilayah	2009	Kel. Pondok Tinggi	Hak Pakai	25.050.000,00	01.01.13.11.003	Jl. Sultan Hasanuddin (Koreksi)
477	Tanah Untuk Tugu Batas Wilayah	2009	Desa Permanti, Pondok Agung	Hak Pakai	17.700.000,00	01.01.13.11.003	Jl. Depati Payung (Koreksi)
478	Tanah Untuk Tugu Batas Wilayah	2011	Desa Pondok Agung, Aur Duri	Hak Pakai	19.866.000,00	01.01.13.11.003	Jl. Prof.DR.Yakub Isman (Koreksi)
482	Tanah Untuk Tugu Batas Wilayah	2011	Desa Talang Lindung	Hak Pakai	16.470.000,00	01.01.13.11.003	Jl. Taman Bunga (Koreksi)
486	Tanah Untuk Tugu Batas Wilayah	2013	Desa Karya Bakti	Hak Pakai	6.490.510,00	01.01.13.11.003	Jl. Karang Taruna (Koreksi)
495	Tanah Bangunan Sarana Olah Raga Terbuka	2011	Desa Pelayang Raya	Hak Pakai	1.159.400.000,00	01.01.13.12.002	Jl. Langsat / Lubuk Arai, (Koreksi)
498	Tanah Bangunan Sarana Olah Raga Terbuka	2011	Desa Talang Lindung	Hak Pakai	1.272.330.000,00	01.01.13.12.002	Jl. Tugu Manggis (Koreksi)
505	Tanah Bangunan Sarana Olah Raga Terbuka	2011	Desa Koto Renah, Pelayang Raya	Hak Pakai	323.064.000,00	01.01.13.12.002	Jl. Lingkar Sentiong (Koreksi)
507	Tanah Bangunan Sarana Olah Raga Terbuka	2012	Desa Sungai Ning Kec. Sungai Bungkal		238.150.000,00	01.01.13.12.002	
508	Tanah Bangunan Sarana Olah Raga Lainnya	2001	desa Talang Lindung Kec. Sungai Bungkal	Hak Pakai	234.600.000,00	01.01.13.12.003	1680/SP2D/LS/2016
510	Tanah Utik Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain	2015	Desa Air Teluh Kec. Kumun Debai	Hak Pakai	656.870.373,04	01.01.13.13.007	PENGADAAN TANAH Kantor KPU
<b>JUMLAH</b>					<b>89.631.885.718,48</b>		



PEREMINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
RINCIAN TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT  
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam Rupiah)

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Alamat	Asal Usul Tanah	Nilai Perolehan	Keterangan / Kode Barang	Keterangan
1	Tanah Hutan Lain-lain	2016	Hibah dari Pemkab. Kerinci 2016	Hibah	500.000.000,00	01.01.05.01.011	Hibah dari Pemkab. Kerinci 2016
2	Penggalan	2016		Pembelian	321.900.000,00	01.01.10.02.007	
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	2001	RUMAH WAKIL BUPATI PENYERAHAN ASET	Hibah	129.168.000,00	01.01.11.01.001	RUMAH WAKIL BUPATI PENYERAHAN ASET DARI KABUPATEN TAHUN 2021
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	1973	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SEKDA PEN	Hibah	295.600.000,00	01.01.11.01.002	BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SEKDA PENYERAHAN ASET DARI KABUPATEN TAHUN 2021
5	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	1985	Bagian Umum dan Keuangan Rumah Dinas E	Hibah	562.556.090,00	01.01.11.01.002	Bagian Umum dan Keuangan Rumah Dinas Ex. Penerangan Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021 Luasnya 0
6	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	1987	Bagian Umum dan Keuangan Pengguna Dinas	Hibah	56.000.000,00	01.01.11.01.002	Bagian Umum dan Keuangan Pengguna Dinas Dolog Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
7	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	2001	Bagian Umum dan Keuangan Syukur Kella Braj	Hibah	39.525.000,00	01.01.11.01.002	Bagian Umum dan Keuangan Syukur Kella Braj Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021 Luasnya 0
8	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	2001	Bagian Umum dan Keuangan F. Amir Sembir	Hibah	20.400.000,00	01.01.11.01.002	Bagian Umum dan Keuangan F. Amir Sembir Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021 Luasnya 0
9	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	2001	Bagian Umum dan Keuangan R. Rosna ST Ma	Hibah	40.400.000,00	01.01.11.01.002	Bagian Umum dan Keuangan R. Rosna ST Maradj Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021 Luasnya 0
10	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	2001	Bagian Umum dan Keuangan R. Amir Husin P	Hibah	33.400.000,00	01.01.11.01.002	Bagian Umum dan Keuangan R. Amir Husin Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021 Luasnya 0
11	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	2001	Bagian Umum dan Keuangan R. Kosong Peny	Hibah	40.200.000,00	01.01.11.01.002	Bagian Umum dan Keuangan R. Kosong Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
12	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	2001	Bagian Umum dan Keuangan R. A. Gafer Pen	Hibah	81.000.000,00	01.01.11.01.002	Bagian Umum dan Keuangan R. A. Gafer Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021 Luasnya 0
13	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	2001	Bagian Umum dan Keuangan Rumah Syayuti	Hibah	29.000.000,00	01.01.11.01.002	Bagian Umum dan Keuangan Rumah Syayuti Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021 Luasnya 0
14	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	2001	Bagian Umum dan Keuangan R. Mat Kasim P	Hibah	94.000.000,00	01.01.11.01.002	Bagian Umum dan Keuangan R. Mat Kasim Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
15	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	2001	Bagian Umum dan Keuangan R. Kosasih Hus	Hibah	21.600.000,00	01.01.11.01.002	Bagian Umum dan Keuangan R. Kosasih Husin BH Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021 Luasnya 0
16	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	2001	Bagian Umum dan Keuangan Adnan Rihalnad	Hibah	44.000.000,00	01.01.11.01.002	Bagian Umum dan Keuangan Adnan Rihalnad Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021 Luasnya 0
17	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	2001	Bagian Umum dan Keuangan R. Tukiman Per	Hibah	43.000.000,00	01.01.11.01.002	Bagian Umum dan Keuangan R. Tukiman Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021 Luasnya 0
18	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	1985	DINAS KESEHATAN Penyerahan Aset dan Kal	Hibah	52.224.000,00	01.01.11.01.003	DINAS KESEHATAN Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021 Luasnya 0
19	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	2001	Bagian Umum dan Keuangan R.B. Duha B. Ca	Hibah	54.400.000,00	01.01.11.01.003	Bagian Umum dan Keuangan R.B. Duha B. Can Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021 Luasnya 0
20	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	2001	DINAS PEKERJAAN UMUM Penyerahan Aset	Hibah	53.376.000,00	01.01.11.01.003	DINAS PEKERJAAN UMUM Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
21	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	2001	Bagian Umum dan Keuangan R. By. Kapsa Pe	Hibah	40.400.000,00	01.01.11.01.003	Bagian Umum dan Keuangan R. By. Kapsa Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
22	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	2001	Bagian Umum dan Keuangan R. Walid Adena	Hibah	58.000.000,00	01.01.11.01.003	Bagian Umum dan Keuangan R. Walid Adenan Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021 Luasnya 0
23	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	2001	Bagian Umum dan Keuangan R. Efendi Peny	Hibah	23.600.000,00	01.01.11.01.003	Bagian Umum dan Keuangan R. Efendi Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021 Luasnya 0
24	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	2001	Bagian Umum dan Keuangan R. Harun Sarif F	Hibah	72.000.000,00	01.01.11.01.003	Bagian Umum dan Keuangan R. Harun Sarif Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
25	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	2001	Bagian Umum dan Keuangan R. Idris Rajo Int	Hibah	33.000.000,00	01.01.11.01.003	Bagian Umum dan Keuangan R. Idris Rajo Intan Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
26	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	2001	Bagian Umum dan Keuangan R. Mariam Peny	Hibah	46.000.000,00	01.01.11.01.003	Bagian Umum dan Keuangan R. Mariam Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021 Luasnya 0
27	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	2001	Bagian Umum dan Keuangan R. Mursalin Pe	Hibah	29.200.000,00	01.01.11.01.003	Bagian Umum dan Keuangan R. Mursalin Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021 Luasnya 0
28	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	2001	Bagian Umum dan Keuangan R. Agus EX. Pe	Hibah	40.800.000,00	01.01.11.01.003	Bagian Umum dan Keuangan R. Agus EX. Penarikan P Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
29	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	2001	Bagian Umum dan Keuangan Agustin Mukhta	Hibah	46.000.000,00	01.01.11.01.003	Bagian Umum dan Keuangan Agustin Mukhtar Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021 Luasnya 0
30	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	2001	Bagian Umum dan Keuangan Barkis Penyerah	Hibah	41.000.000,00	01.01.11.01.003	Bagian Umum dan Keuangan Barkis Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021 Luasnya 0
31	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	2001	Bagian Umum dan Keuangan Ruslan Perum F	Hibah	12.672.000,00	01.01.11.01.003	Bagian Umum dan Keuangan Ruslan Perum PNS Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
32	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	2001	DINAS PEKERJAAN UMUM Penyerahan Aset	Hibah	54.600.000,00	01.01.11.01.003	DINAS PEKERJAAN UMUM Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021 Luasnya 0
33	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	2001	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLT/KULTU	Hibah	20.000.000,00	01.01.11.01.003	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLT/KULTURA Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
34	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	2001	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNEKANPe	Hibah	68.600.000,00	01.01.11.01.003	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNEKAN Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
35	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	2001	RSUD H.A THALIB Penyerahan Aset dari Kabu	Hibah	1.862.000,00	01.01.11.01.003	RSUD H.A THALIB Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
36	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	2013	KMK No. 144/KM/8/2012	Hibah	7.995.394.900,00	01.01.11.01.011	KMK No. 144/KM/8/2012
37	Tanah Bangunan Pasar	2007	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Penyer	Hibah	699.556.150,00	01.01.11.02.001	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
38	Tanah Bangunan Pasar	2016	Hibah dari Pemkab. Kerinci 2016(Nomor : 030/481/DPKAD/2016) Nomor : 028/178/DPKAD/2016	Hibah	179.776.000,00	01.01.11.02.001	Hibah dari Pemkab. Kerinci 2016(Nomor : 030/481/DPKAD/2016) Nomor : 028/178/DPKAD/2016
39	Tanah Bangunan Gedung	2001	Bagian Umum dan Keuangan Gedung Rumah	Hibah	78.082.000,00	01.01.11.02.003	Bagian Umum dan Keuangan Gedung Rumah 4 Jenis Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
40	Tanah Bangunan Gedung	2001	DINAS PERHUBUNGAN	Hibah	2.800.000,00	01.01.11.02.003	DINAS PERHUBUNGAN
41	Tanah Bangunan Gedung	2001	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Penyer	Hibah	81.216.000,00	01.01.11.02.003	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
42	Tanah Bangunan Gedung	2005	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Penyer	Hibah	271.510.950,00	01.01.11.02.003	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
43	Tanah Bangunan Gedung	2006	Bagian Umum dan Keuangan	Hibah	10.500.000,00	01.01.11.02.003	Bagian Umum dan Keuangan
44	Tanah Bangunan Gedung	2006	Bagian Umum dan Keuangan Tanah Kosong P	Hibah	62.000.000,00	01.01.11.02.003	Bagian Umum dan Keuangan Tanah Kosong Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
45	Tanah Bangunan Gedung	2006	Bagian Umum dan Keuangan TPA Penyerah	Hibah	80.000.000,00	01.01.11.02.003	Bagian Umum dan Keuangan TPA Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
46	Tanah Bangunan Gedung	2006	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Penyer	Hibah	212.104.600,00	01.01.11.02.003	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021 (Luar Warman)
47	Tanah Bangunan Gedung	2007	DINAS PEKERJAAN UMUM Lokasi Alat Pende	Hibah	20.000.000,00	01.01.11.02.003	DINAS PEKERJAAN UMUM Lokasi Alat Pendeteksi Gempa
48	Tanah Bangunan Gedung	2008	DINAS PEKERJAAN UMUM Lokasi Pembanga	Hibah	195.508.400,00	01.01.11.02.003	DINAS PEKERJAAN UMUM Lokasi Pembangunan Gedung VOR
49	Tanah Bangunan Gedung	2018	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Islam	Pembelian	7.974.610.590,18	01.01.11.02.003	Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Islamic Center Kota Sungai Penuh
50	Tanah Bangunan Terminal Darat	2001	DINAS PERHUBUNGAN Terminal truk Penyerah	Hibah	403.809.000,00	01.01.11.02.007	DINAS PERHUBUNGAN Terminal truk Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
51	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1973	Kantor Pengadilan Agama Penyerahan Aset da	Hibah	275.932.310,00	01.01.11.04.001	Kantor Pengadilan Agama Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
52	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1984	DINAS KESEHATAN Gudang Farmasi Penyer	Hibah	350.530.000,00	01.01.11.04.001	DINAS KESEHATAN Gudang Farmasi Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
53	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1985	RSUD H.A THALIB Penyerahan Aset dari Kabu	Hibah	376.831.000,00	01.01.11.04.001	RSUD H.A THALIB Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
54	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1988	Inspektoral Daerah Penyerahan Aset dari Kabu	Hibah	57.744.000,00	01.01.11.04.001	Inspektoral Daerah Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
55	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1988	DINAS PENDIDIKAN Kantor Penyerahan Aset	Hibah	158.256.000,00	01.01.11.04.001	DINAS PENDIDIKAN Kantor Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
56	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1989	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBA	Hibah	74.832.000,00	01.01.11.04.001	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBAHAN SUMBER DAYA MANUSIA Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
57	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1997	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNEKAN Pe	Hibah	59.600.000,00	01.01.11.04.001	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNEKAN Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
58	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2001	KANTOR BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN	Hibah	28.800.000,00	01.01.11.04.001	KANTOR BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PENYERAHAN ASET DARI KABUPATEN TAHUN 2021
59	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2001	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANA	Hibah	139.200.000,00	01.01.11.04.001	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
60	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2001	Bagian Umum dan Keuangan PDAM TIRTA Sa	Hibah	16.100.000,00	01.01.11.04.001	Bagian Umum dan Keuangan PDAM TIRTA SAKTI Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
61	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2001	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Penyerah	Hibah	300.000.000,00	01.01.11.04.001	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
62	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2001	Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Per	Hibah	210.020.000,00	01.01.11.04.001	Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
63	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2001	Bagian Umum dan Keuangan Sosial Penyerat	Hibah	74.832.000,00	01.01.11.04.001	Bagian Umum dan Keuangan Sosial Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
64	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2001	Bagian Umum dan Keuangan BPD Jambi Per	Hibah	246.000.000,00	01.01.11.04.001	Bagian Umum dan Keuangan BPD Jambi Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
65	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2001	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Pendapat	Hibah	558.000.000,00	01.01.11.04.001	Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
66	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2001	Dinas Pemuda Dan Olah Raga Penyerahan As	Hibah	262.679.130,00	01.01.11.04.001	Dinas Pemuda Dan Olah Raga Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
67	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2001	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNEKANPe	Hibah	287.136.000,00	01.01.11.04.001	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNEKAN Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
68	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2001	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP	Hibah	72.000.000,00	01.01.11.04.001	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PP DAN PERLINDUNGAN ANAK Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
69	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2001	DINAS KESEHATAN Lab. Kesehatan Daerah F	Hibah	112.000.000,00	01.01.11.04.001	DINAS KESEHATAN Lab. Kesehatan Daerah Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Alamat	Asal Usul Tanah	Nilai Perolehan	Keterangan / Kode Barang	Keterangan
70	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2001	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA LK	Hibah	245.280.000,00	01.01.11.04.001	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA LK Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
71	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2001	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA UPTD	Hibah	12.860.000,00	01.01.11.04.001	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA UPTD
72	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2006	Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama	Hibah	376.400.000,00	01.01.11.04.001	Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021.
73	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2006	Bagian Umum dan Keuangan KUA Penyerahan	Hibah	132.336.000,00	01.01.11.04.001	Bagian Umum dan Keuangan KUA Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
74	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2006	Bagian Umum dan Keuangan Pustu Penyerahan	Hibah	10.500.000,00	01.01.11.04.001	Bagian Umum dan Keuangan Pustu Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
75	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2011		Pembelian	376.290.000,00	01.01.11.04.001	
76	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2016	1679/SP2D/LS/2016 Luasnya 0	Pembelian	457.304.570,53	01.01.11.04.001	
77	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2012		Pembelian	163.370.000,00	01.01.11.04.002	1679/SP2D/LS/2016 Luasnya 0
78	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	hibah dari kabupaten kerinci	Hibah	91.048.000,00	01.01.11.04.002	hibah dari kabupaten kerinci
79	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	hibah dari kabupaten kerinci / tanah vavasan n	Hibah	20.000.000,00	01.01.11.04.002	hibah dari kabupaten kerinci / tanah vavasan masjid baiturrahman
80	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2013	HP 1	Hibah	7.625.000,00	01.01.11.04.002	HP 1
81	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2021	Belanja Modal Tanah SMP Negeri 12 Sungai	Pembelian	220.000.000,00	01.01.11.04.002	Belanja Modal Tanah SMP Negeri 12 Sungai Penuh
82	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	2021	Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Instansi	Pembelian	384.970.000,00	01.01.11.04.002	Belanja Modal Tanah Untuk Bangunan Instansi Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Bidang Pembinaan Paud dan PNF Dinas Pendidikan Kota Sungai
83	Tanah Bangunan Rumah Sakit	1984	RSUD H.A THALIB Rumah Sakit Umum Kab. Kerinci	Hibah	3.078.054.000,00	01.01.11.04.003	RSUD H.A THALIB Rumah Sakit Umum Kab. Kerinci Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021.
84	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	2001	Bagian Umum dan Keuangan Telkom Penyerahan	Hibah	71.702.400,00	01.01.11.04.009	Bagian Umum dan Keuangan Telkom Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
85	Tanah Bangunan Taman/Wisata/Rekreasi	2016	HIBAH DARI KAB. KERINCI Luasnya 0	Hibah	200.000.000,00	01.01.11.04.009	HIBAH DARI KAB. KERINCI Luasnya 0
86	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	2001	DINAS KESEHATAN	Hibah	1.746.800.000,00	01.01.11.04.012	DINAS KESEHATAN
87	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	2001	DINAS KESEHATAN Puskesmas Pembantu Per	Hibah	28.950.000,00	01.01.11.04.012	DINAS KESEHATAN Puskesmas Pembantu Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021.
88	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	2001	DINAS KESEHATAN Puskesmas Penyerahan	Hibah	30.000.000,00	01.01.11.04.012	DINAS KESEHATAN Puskesmas Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
89	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	2001	DINAS KESEHATAN Penyerahan Aset dari Ka	Hibah	9.716.000,00	01.01.11.04.012	DINAS KESEHATAN Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021 Luasnya 0
90	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	2001	DINAS KESEHATAN Puskesmas Penyerahan	Hibah	465.000.000,00	01.01.11.04.012	DINAS KESEHATAN Puskesmas Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
91	Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu	2013	Hibah Kab. Kerinci (dalam Proses Sertifikasi)	Hibah	3.000.000,00	01.01.11.04.012	Hibah Kab. Kerinci (dalam Proses Sertifikasi)
92	Tanah Bangunan Bangsal Pengolahan Pondok Kerja	2001	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Penyerahan	Hibah	16.272.000,00	01.01.11.04.017	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
93	Tanah Bangunan Kandang Hewan	2001	DINAS PERKUBUNAN DAN PETERNEKANAN	Hibah	242.550.000,00	01.01.11.04.018	DINAS PERKUBUNAN DAN PETERNEKANAN
94	Tanah Bangunan Pos Jajaja/Menara Jajaja	2001	PERHUBUNGAN Pos TPR Penyerahan Aset d	Hibah	5.730.000,00	01.01.11.04.024	PERHUBUNGAN Pos TPR Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
95	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	2001	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Penyer	Hibah	32.000.000,00	01.01.11.04.025	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
96	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	2001	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLT.KULTI	Hibah	40.000.000,00	01.01.11.04.025	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLT.KULTURA Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
97	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	2004	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLT.KULTI	Hibah	74.967.500,00	01.01.11.04.025	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLT.KULTURA Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
98	Tanah Kosong Lainnya	2001	DINAS PEKERJAAN UMUM Tanah Rumah Ka	Hibah	8.280.000.000,00	01.01.11.05.007	DINAS PEKERJAAN UMUM Tanah Rumah Kawayan
99	Tanah Kosong Lainnya	2006	DINAS PEKERJAAN UMUM Tanah Rumah Dir	Hibah	24.752.000,00	01.01.11.05.007	DINAS PEKERJAAN UMUM Tanah Rumah Dinas Penyerahan Aset dari Kabupaten Tahun 2021
100	Tanah Jalan	2023	Jl. Mawani A. Thaib (Koreksi Nilai Sebelum Rp	Pembelian	790.020.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Mawani A. Thaib (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 1.165.445.800)
101	Tanah Jalan	2023	Jl. Tuju Macan (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 322	Pembelian	164.788.400,00	01.01.11.08.001	Jl. Tuju Macan (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 322.854.526)
102	Tanah Jalan	2023	Jl. Tanah Mendapo (Koreksi Nilai Sebelum Rp.	Pembelian	487.350.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Tanah Mendapo (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 731.281.500)
103	Tanah Jalan	2023	Jl. Rengah Kayu Embun (Koreksi Nilai Sebelum	Pembelian	1.122.660.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Rengah Kayu Embun (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 2.126.817.000)
104	Tanah Jalan	2023	Jl. Pematang Gedang (Koreksi Nilai Sebelum	Pembelian	103.917.600,00	01.01.11.08.001	Jl. Pematang Gedang (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 196.866.120)
105	Tanah Jalan	2023	Jl. Pattimura (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 927.1	Pembelian	617.908.500,00	01.01.11.08.001	Jl. Pattimura (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 927.187.965)
106	Tanah Jalan	2023	Jl. Lembah Berseri II (Koreksi Nilai Sebelum Rp	Pembelian	143.618.400,00	01.01.11.08.001	Jl. Lembah Berseri II (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 272.077.080)
107	Tanah Jalan	2023	Jl. Sisingamangaraja (Koreksi Nilai Sebelum R	Pembelian	375.744.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Sisingamangaraja (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 563.813.760)
108	Tanah Jalan	2023	Jl. H. Agus Salim (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 97	Pembelian	652.365.000,00	01.01.11.08.001	Jl. H. Agus Salim (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 978.890.850)
109	Tanah Jalan	2023	Jl. Ulu Air (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 125.594.	Pembelian	69.888.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Ulu Air (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 125.594.560)
110	Tanah Jalan	2023	Jl. Hos Cokro Amnoko (Koreksi Nilai Sebelum	Pembelian	412.865.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Hos Cokro Amnoko (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 619.684.850)
111	Tanah Jalan	2023	Jl. Cahaya Depati (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 1	Pembelian	83.712.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Cahaya Depati (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 144.036.560)
112	Tanah Jalan	2023	Jl. Depati Nyoto Negro II (Koreksi Nilai Sebela	Pembelian	246.940.800,00	01.01.11.08.001	Jl. Depati Nyoto Negro II (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 443.773.196)
113	Tanah Jalan	2023	Jl. Depati Nyoto Negro I (Koreksi Nilai Sebela	Pembelian	53.121.600,00	01.01.11.08.001	Jl. Depati Nyoto Negro I (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 95.453.942)
114	Tanah Jalan	2023	Jl. Wira Sakti (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 126.5	Pembelian	73.536.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Wira Sakti (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 126.527.880)
115	Tanah Jalan	2023	Jl. Puli Balu (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 111.23	Pembelian	64.646.400,00	01.01.11.08.001	Jl. Puli Balu (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 111.232.212)
116	Tanah Jalan	2023	Jl. Koto Tengah (Jl. Tanah Kumia) (Koreksi Ni	Pembelian	188.827.200,00	01.01.11.08.001	Jl. Koto Tengah (Jl. Tanah Kumia) (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 324.900.801)
117	Tanah Jalan	2023	Jl. Koto Beringin (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 1	Pembelian	62.179.200,00	01.01.11.08.001	Jl. Koto Beringin (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 111.741.204)
118	Tanah Jalan	2023	Jl. Batu Gong (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 120.	Pembelian	66.864.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Batu Gong (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 120.160.180)
119	Tanah Jalan	2023	Jl. Koto Pulus (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 75.1	Pembelian	42.163.200,00	01.01.11.08.001	Jl. Koto Pulus (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 75.199.824)
120	Tanah Jalan	2023	Jl. Teuku Umar (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 1.1	Pembelian	746.628.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Teuku Umar (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 1.129.785.120)
121	Tanah Jalan	2023	Jl. Proklamasi (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 46	Pembelian	297.511.500,00	01.01.11.08.001	Jl. Proklamasi (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 446.423.850)
122	Tanah Jalan	2023	Jl. Semangko Bumi Putih (Koreksi Nilai Sebela	Pembelian	57.052.800,00	01.01.11.08.001	Jl. Semangko Bumi Putih (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 101.756.046)
123	Tanah Jalan	2023	Jl. Dr. Wahidin, S.H (Koreksi Nilai Sebelum Rp.	Pembelian	244.188.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Dr. Wahidin, S.H (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 366.410.520)
124	Tanah Jalan	2023	Jl. K.H. Wahid Hasyim (Koreksi Nilai Sebelum	Pembelian	605.311.500,00	01.01.11.08.001	Jl. K.H. Wahid Hasyim (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 908.285.835)
125	Tanah Jalan	2023	Jl. Lank Kayo Aro (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 7	Pembelian	41.769.600,00	01.01.11.08.001	Jl. Lank Kayo Aro (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 74.497.822)
126	Tanah Jalan	2023	Jl. Prof. M. Yamin, SH (Koreksi Nilai Sebelum	Pembelian	1.673.825.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Prof. M. Yamin, SH (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 2.740.027.950)
127	Tanah Jalan	2023	Jl. Anif Rahman Hakim (Koreksi Nilai Sebelum	Pembelian	1.722.825.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Anif Rahman Hakim (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 2.585.144.250)
128	Tanah Jalan	2023	Jl. Galang Negeri (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 28	Pembelian	160.579.200,00	01.01.11.08.001	Jl. Galang Negeri (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 286.399.694)
129	Tanah Jalan	2023	Jl. Lima Lurah (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 903.	Pembelian	535.458.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Lima Lurah (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 803.468.820)
130	Tanah Jalan	2023	Jl. Penengapan Bumi (Koreksi Nilai Sebelum Rp	Pembelian	71.590.800,00	01.01.11.08.001	Jl. Penengapan Bumi (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 127.524.656)
131	Tanah Jalan	2023	Jl. Pemangko Ropo (Koreksi Nilai Sebelum Rp.	Pembelian	200.825.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Pemangko Ropo (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 307.469.250)
132	Tanah Jalan	2023	Jl. Muara Air (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 106.2	Pembelian	59.568.400,00	01.01.11.08.001	Jl. Muara Air (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 106.224.880)
133	Tanah Jalan	2023	Jl. Lank Baru (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 246.6	Pembelian	164.388.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Lank Baru (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 246.668.520)
134	Tanah Jalan	2023	Jl. Lank Rio Jayo (Koreksi Nilai dan Nama Seb	Pembelian	96.358.500,00	01.01.11.08.001	Jl. Lank Rio Jayo (Koreksi Nilai dan Nama Sebelum Rp. 144.588.465 dan Nama Jl. Lank Rio Jayo (Lingkungan))
135	Tanah Jalan	2023	Jl. Raja Timur (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 546.	Pembelian	306.259.200,00	01.01.11.08.001	Jl. Raja Timur (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 546.226.044)
136	Tanah Jalan	2023	Jl. Lank Rio Mendhio I (Koreksi Nilai dan Nam	Pembelian	106.875.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Lank Rio Mendhio I (Koreksi Nilai dan Nama Sebelum Rp. 160.368.750 Jl. Lank Rio Mendhio I (Lingkungan))
137	Tanah Jalan	2023	Jl. Raja Barat (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 165.	Pembelian	103.795.200,00	01.01.11.08.001	Jl. Raja Barat (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 185.123.064)
138	Tanah Jalan	2023	Jl. Lank Rio Mendhio II (Koreksi Nilai Sebela	Pembelian	143.184.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Lank Rio Mendhio II (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 214.851.360)
139	Tanah Jalan	2023	Jl. Yos Sudarso (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 18	Pembelian	5.800.416.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Yos Sudarso (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 18.714.062.400)
140	Tanah Jalan	2023	Jl. Carokin (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 17.273	Pembelian	5.346.300.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Carokin (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 17.273.820.000)
141	Tanah Jalan	2023	Jl. Losba (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 858.	Pembelian	265.611.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Losba (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 858.185.400)
142	Tanah Jalan	2023	Jl. Puskesmas Desa Gedang (Koreksi Nilai Se	Pembelian	152.969.500,00	01.01.11.08.001	Jl. Puskesmas Desa Gedang (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 494.242.300)
143	Tanah Jalan	2023	Jl. SMK (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 98.316.5	Pembelian	50.233.600,00	01.01.11.08.001	Jl. SMK (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 98.316.574)
144	Tanah Jalan	2023	Jl. Prof. Amir Hakim Oesman / Sumur Pnang	Pembelian	187.245.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Prof. Amir Hakim Oesman / Sumur Pnang (Koreksi Nilai dan Nama Sebelum Rp. 280.539.000) Jl. Prof. Amir Hakim Oesman / Sumur Pnang)
145	Tanah Jalan	2023	Jl. H. Hasmi (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 8.	Pembelian	5.935.410.000,00	01.01.11.08.001	Jl. H. Hasmi (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 8.892.702.000)
146	Tanah Jalan	2023	Jl. Koto Pinang I (Koreksi Nilai dan Nama Sebe	Pembelian	76.883.200,00	01.01.11.08.001	Jl. Koto Pinang I (Koreksi Nilai dan Nama Sebelum Rp. 72.826.164 Jl. Koto Pinang I)
147	Tanah Jalan	2023	Jl. Puro Negro (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 18	Pembelian	104.889.600,00	01.01.11.08.001	Jl. Puro Negro (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 187.074.972)
148	Tanah Jalan	2023	Jl. Srwaiya (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 11.	Pembelian	724.783.500,00	01.01.11.08.001	Jl. Srwaiya (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 1.087.556.715)
149	Tanah Jalan	2023	Jl. Permani Nan Tigo (Koreksi Nilai Sebelum	Pembelian	468.600.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Permani Nan Tigo (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 706.926.000)
150	Tanah Jalan	2023	Jl. Simpang Panik (Koreksi Nilai Sebelum Rp.	Pembelian	286.025.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Simpang Panik (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 404.340.250)
151	Tanah Jalan	2023	Jl. Air Teluh (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 158.4	Pembelian	80.960.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Air Teluh (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 158.453.900)
152	Tanah Jalan	2023	Jl. Sungai Breamas (Koreksi Nilai Sebelum Rp.	Pembelian	479.682.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Sungai Breamas (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 909.530.370)
153	Tanah Jalan	2023	Jl. Lingkar Air Teluh (Koreksi Nilai Sebelum R	Pembelian	59.718.400,00	01.01.11.08.001	Jl. Lingkar Air Teluh (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 116.880.106)
154	Tanah Jalan	2023	Jl. Simpang Aro (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 95	Pembelian	48.182.400,00	01.01.11.08.001	Jl. Simpang Aro (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 85.657.600)
155	Tanah Jalan	2023	Jl. Masjid Nurul Istikomah (Koreksi Nilai Seb	Pembelian	31.031.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Masjid Nurul Istikomah (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 197.197.000)
156	Tanah Jalan	2023	Jl. Lesung Air (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 2	Pembelian	69.994.400,00	01.01.11.08.001	Jl. Lesung Air (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 290.512.800)
157	Tanah Jalan	2023	Jl. Pangdi Besi (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 18	Pembelian	123.955.200,00	01.01.11.08.001	Jl. Pangdi Besi (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 199.490.400)
158	Tanah Jalan	2023	Jl. Protokol (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 3.7	Pembelian	1.282.785.200,00	01.01.11.08.001	Jl. Protokol (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 3.734.402.600)
159	Tanah Jalan	2023	Jl. Pendung Koto Padang (Koreksi Nilai Sebela	Pembelian	289.280.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Pendung Koto Padang (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 455.560.000)
160	Tanah Jalan	2023	Jl. Koto Padang (Koreksi Nilai				

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Alamat	Asal Usul Tanah	Nilai Perolehan	Keterangan / Kode Barang	Keterangan
174	Tanah Jalan	2023	Jl. Pelawang Raya (Koreksi Nilai Sebelumnya R	Pembelian	39.895.800,00	01.01.11.08.001	Jl. Pelawang Raya (Koreksi Nilai Sebelumnya R. 135.720.000)
175	Tanah Jalan	2023	Jl. Puri Semang (Koreksi Nilai Sebelumnya Rp. 3	Pembelian	155.819.400,00	01.01.11.08.001	Jl. Puri Semang (Koreksi Nilai Sebelumnya Rp. 302.650.000)
176	Tanah Jalan	2023	Jl. Mekar Jaya IV (Koreksi Nilai Sebelumnya Rp. 3	Pembelian	17.955.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Mekar Jaya IV (Koreksi Nilai Sebelumnya Rp. 31.920.000)
177	Tanah Jalan	2023	Jl. Bukit Khayangan (Koreksi Nilai Sebelumnya	Pembelian	1.099.224.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Bukit Khayangan (Koreksi Nilai Sebelumnya Rp. 2.084.250.840)
178	Tanah Jalan	2023	Jl. Sungai Jeruang (Koreksi Nilai Sebelumnya	Pembelian	183.585.600,00	01.01.11.08.001	Jl. Sungai Jeruang (Koreksi Nilai Sebelumnya Rp. 348.088.696)
179	Tanah Jalan	2023	Jl. Mekar Jaya III (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 18	Pembelian	10.413.900,00	01.01.11.08.001	Jl. Mekar Jaya III (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 18.513.600)
180	Tanah Jalan	2023	Jl. Ngabi Soelot (Koreksi Nilai Sebelumnya R	Pembelian	62.762.400,00	01.01.11.08.001	Jl. Ngabi Soelot (Koreksi Nilai Sebelumnya Rp. 119.004.484)
181	Tanah Jalan	2023	Jl. Mekar Jaya II (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 29	Pembelian	16.726.500,00	01.01.11.09.001	Jl. Mekar Jaya II (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 29.736.000)
182	Tanah Jalan	2023	Jl. Sungai Ampuh (Koreksi Nilai Sebelumnya R	Pembelian	139.608.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Sungai Ampuh (Koreksi Nilai Sebelumnya Rp. 264.712.280)
183	Tanah Jalan	2023	Jl. Batu Gajah (Koreksi Nilai Sebelumnya Rp. 2	Pembelian	124.200.000,00	01.01.11.09.001	Jl. Batu Gajah (Koreksi Nilai Sebelumnya Rp. 235.497.000)
184	Tanah Jalan	2023	Jl. Mekar Jaya I (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 18	Pembelian	10.125.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Mekar Jaya I (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 18.000.000)
185	Tanah Jalan	2023	Jl. Jambu Tugar (Koreksi Nilai Sebelumnya Rp.	Pembelian	438.912.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Jambu Tugar (Koreksi Nilai Sebelumnya Rp. 832.226.920)
186	Tanah Jalan	2023	Jl. Telang Harasan (Koreksi Nilai Sebelumnya	Pembelian	116.013.800,00	01.01.11.08.001	Jl. Telang Harasan (Koreksi Nilai Sebelumnya Rp. 219.974.676)
187	Tanah Jalan	2023	Jl. Koto Baru II (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 49	Pembelian	21.081.600,00	01.01.11.08.001	Jl. Koto Baru II (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 49.971.200)
188	Tanah Jalan	2023	Jl. K.H. Dhanan Thab Baiki (Koreksi Nilai Sebel	Pembelian	345.600.000,00	01.01.11.08.001	Jl. K.H. Dhanan Thab Baiki (Koreksi Nilai Sebelumnya Rp. 1.920.000.000)
189	Tanah Jalan	2023	Jl. Koto Baru I (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 84	Pembelian	35.510.400,00	01.01.11.08.001	Jl. Koto Baru I (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 84.172.800)
190	Tanah Jalan	2023	Jl. Lingkar Tebat Gedang (Koreksi Nilai Sebelu	Pembelian	124.704.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Lingkar Tebat Gedang (Koreksi Nilai Sebelumnya Rp. 682.800.000)
191	Tanah Jalan	2023	Jl. Jambu Alo (Koreksi Nilai Sebelumnya Rp. 6	Pembelian	124.992.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Jambu Alo (Koreksi Nilai Sebelumnya Rp. 694.400.000)
192	Tanah Jalan	2023	Jl. Workshop (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 96	Pembelian	50.246.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Workshop (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 96.903.000)
193	Tanah Jalan	2023	Jl. Mohd. Noeh (Koreksi Nilai Sebelumnya Rp.	Pembelian	38.884.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Mohd. Noeh (Koreksi Nilai Sebelumnya Rp. 174.163.260)
194	Tanah Jalan	2023	Jl. Koto Padang (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 30	Pembelian	17.339.400,00	01.01.11.08.001	Jl. Koto Padang (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 30.825.600)
195	Tanah Jalan	2023	Jl. Rumah Sakit H. Bakri (Koreksi Nilai Sebelu	Pembelian	49.140.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Rumah Sakit H. Bakri (Koreksi Nilai Sebelumnya Rp. 96.287.100)
196	Tanah Jalan	2023	Jl. KONI (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 65.577	Pembelian	34.003.200,00	01.01.11.08.001	Jl. KONI (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 65.577.000)
197	Tanah Jalan	2023	Jl. Timbangan (Koreksi Nilai Sebelumnya Rp. 6	Pembelian	153.468.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Timbangan (Koreksi Nilai Sebelumnya Rp. 300.712.000)
198	Tanah Jalan	2023	Jl. Mudik Air (Koreksi Nilai Sebelumnya Rp. 1	Pembelian	548.640.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Mudik Air (Koreksi Nilai Sebelumnya Rp. 1.075.029.600)
199	Tanah Jalan	2023	Jl. Jalan Poros Tengah (Koreksi Nilai Sebelum	Pembelian	6.517.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Jalan Poros Tengah (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 12.568.500)
200	Tanah Jalan	2023	Jl. Km. 6 (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 416.186	Pembelian	212.400.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Km. 6 (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 416.186.000)
201	Tanah Jalan	2023	Jl. Sungai Akar (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 1	Pembelian	673.620.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Sungai Akar (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 1.308.000.000)
202	Tanah Jalan	2023	Jl. Hasim Depati (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 19	Pembelian	112.266.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Hasim Depati (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 199.584.000)
203	Tanah Jalan	2023	Jl. TPR (Koreksi Nilai Sebelumnya Rp. 93	Pembelian	47.520.000,00	01.01.11.09.001	Jl. TPR (Koreksi Nilai Sebelumnya Rp. 93.112.800)
204	Tanah Jalan	2023	Jl. Lank Bantar (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 38	Pembelian	20.946.600,00	01.01.11.08.001	Jl. Lank Bantar (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 38.661.300)
205	Tanah Jalan	2023	Jl. Pringor Air (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 46	Pembelian	275.716.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Pringor Air (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 467.614.380)
206	Tanah Jalan	2023	Jl. Penumahan Sungai Ninq (Koreksi Nilai Sebel	Pembelian	25.200.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Penumahan Sungai Ninq (Koreksi Nilai Sebelumnya Rp. 49.378.000)
207	Tanah Jalan	2023	Jl. Simp. Jembatan Koto Panap (Koreksi Nilai	Pembelian	5.090.400,00	01.01.11.08.001	Jl. Simp. Jembatan Koto Panap (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 9.817.200)
208	Tanah Jalan	2023	Jl. Depati Beruhut (Koreksi Nilai Sebelumnya	Pembelian	128.853.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Depati Beruhut (Koreksi Nilai Sebelumnya Rp. 250.200.000)
209	Tanah Jalan	2023	Jl. Bendung Sungai Batang Sangkar (Koreksi N	Pembelian	84.105.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Bendung Sungai Batang Sangkar (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 149.520.000)
210	Tanah Jalan	2023	Jl. Kuburan panaman (Koreksi Nilai Sebelumnya	Pembelian	260.982.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Kuburan panaman (Koreksi Nilai Sebelumnya Rp. 659.436.000)
211	Tanah Jalan	2023	Jl. Makam Syeh H. Mhd. Sekin (Koreksi Nilai S	Pembelian	69.927.300,00	01.01.11.08.001	Jl. Makam Syeh H. Mhd. Sekin (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 124.315.200)
212	Tanah Jalan	2023	Jl. H. Rusdi Sawati (Koreksi Nilai Sebelumnya	Pembelian	616.146.000,00	01.01.11.08.001	Jl. H. Rusdi Sawati (Koreksi Nilai Sebelumnya Rp. 1.196.400.000)
213	Tanah Jalan	2023	Jl. Sveth H. Mhd. Sekin (Koreksi Nilai Sebelum	Pembelian	204.897.600,00	01.01.11.08.001	Jl. Sveth H. Mhd. Sekin (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 384.262.400)
214	Tanah Jalan	2023	Jl. Kamarudin (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 350	Pembelian	336.555.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Kamarudin (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 650.390.000)
215	Tanah Jalan	2023	Jl. Mesjar Sabah (Koreksi Nama Sebelum Rp.	Pembelian	50.422.500,00	01.01.11.08.001	Jl. Mesjar Sabah (Koreksi Nama Sebelum Rp. 99.440.000)
216	Tanah Jalan	2023	Jl. Usman Khalid (Koreksi Nilai Sebelumnya R	Pembelian	285.525.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Usman Khalid (Koreksi Nilai Sebelumnya Rp. 721.453.000)
217	Tanah Jalan	2023	Jl. Muara Sangkor (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 6	Pembelian	36.855.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Muara Sangkor (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 65.520.000)
218	Tanah Jalan	2023	Jl. RA Kartini (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 743	Pembelian	294.151.500,00	01.01.11.08.001	Jl. RA Kartini (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 743.247.000)
219	Tanah Jalan	2023	Jl. Lingkar Kuburan Koto Tengah (Koreksi Nilai	Pembelian	64.395.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Lingkar Kuburan Koto Tengah (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 114.480.000)
220	Tanah Jalan	2023	Jl. Koto Tinggi (Koreksi Nilai dan Nama Sebelu	Pembelian	209.952.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Koto Tinggi (Koreksi Nilai dan Nama Sebelum Rp. 530.496.000 Jl. Koto Tinggi (Jl. Iskandar Zakaria )
221	Tanah Jalan	2023	Jl. H. Hasmi Muchtar (Koreksi Nilai Sebelum R	Pembelian	428.640.000,00	01.01.11.08.001	Jl. H. Hasmi Muchtar (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 923.456.000)
222	Tanah Jalan	2023	Jl. Lark Imbaha (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 21	Pembelian	141.474.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Lark Imbaha (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 212.286.400)
223	Tanah Jalan	2023	Jl. Veteran (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 312	Pembelian	423.538.600,00	01.01.11.08.001	Jl. Veteran (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 922.465.400)
224	Tanah Jalan	2023	Jl. Koto Tuo (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 80	Pembelian	45.441.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Koto Tuo (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 80.784.000)
225	Tanah Jalan	2023	Jl. Ade Irma Suryanti (Koreksi Nilai Sebelum R	Pembelian	135.037.600,00	01.01.11.08.001	Jl. Ade Irma Suryanti (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 469.338.000)
226	Tanah Jalan	2023	Jl. Rio Depati (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 177	Pembelian	92.120.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Rio Depati (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 177.660.000)
227	Tanah Jalan	2023	Jl. Dusun Emboh (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 15	Pembelian	43.624.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Dusun Emboh (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 151.620.000)
228	Tanah Jalan	2023	Jl. Tanjung Bunga (Koreksi Nilai Sebelum Rp.	Pembelian	211.207.500,00	01.01.11.08.001	Jl. Tanjung Bunga (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 412.011.075)
229	Tanah Jalan	2023	Jl. M.H. Thamin (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 1	Pembelian	383.104.000,00	01.01.11.08.001	Jl. M.H. Thamin (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 1.331.520.000)
230	Tanah Jalan	2023	Jl. Tanjung (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 857	Pembelian	439.530.300,00	01.01.11.08.001	Jl. Tanjung (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 857.409.663)
231	Tanah Jalan	2023	Jl. Hamparan (Koreksi Nilai dan Nama Sebelum	Pembelian	351.360.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Hamparan (Koreksi Nilai dan Nama Sebelum Rp. 1.186.718.400 Jl. Hamparan (Jl. Mifah Yunus)
232	Tanah Jalan	2023	Jl. Pemancar (Koreksi Nilai dan Nama Sebelu	Pembelian	108.072.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Pemancar (Koreksi Nilai dan Nama Sebelum Rp. 2.101.189.860 Jl. Pemancar (Jl. Suseh Abdurrahman)
233	Tanah Jalan	2023	Jl. Air Sesat (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 337	Pembelian	172.692.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Air Sesat (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 337.037.220)
234	Tanah Jalan	2023	Jl. Koto Teluk (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 37	Pembelian	19.200.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Koto Teluk (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 37.488.000)
235	Tanah Jalan	2023	Jl. H. Bakri (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 3.131	Pembelian	1.453.814.000,00	01.01.11.08.001	Jl. H. Bakri (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 3.131.645.600)
236	Tanah Jalan	2023	Jl. Tanah Sebhengkah (Koreksi Nilai Sebelum R	Pembelian	84.520.800,00	01.01.11.08.001	Jl. Tanah Sebhengkah (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 163.829.484)
237	Tanah Jalan	2023	Jl. Jendral Basuki Rachmat (Koreksi Nilai Sebel	Pembelian	337.598.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Jendral Basuki Rachmat (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 650.128.440)
238	Tanah Jalan	2023	Jl. K.H. Ahmad Dahlan (Koreksi Nilai Sebelum	Pembelian	493.885.000,00	01.01.11.08.001	Jl. K.H. Ahmad Dahlan (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 850.345.300)
239	Tanah Jalan	2023	Jl. Sulian Thaha (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 1	Pembelian	1.038.858.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Sulian Thaha (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 1.788.651.240)
240	Tanah Jalan	2023	Jl. Pasar Pagi Koto Dian (Koreksi Nilai Sebelu	Pembelian	87.556.800,00	01.01.11.08.001	Jl. Pasar Pagi Koto Dian (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 150.488.250)
241	Tanah Jalan	2023	Jl. SD Koto Tengah (Koreksi Nilai Sebelum Rp.	Pembelian	23.825.000,00	01.01.11.08.001	Jl. SD Koto Tengah (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 45.727.500)
242	Tanah Jalan	2023	Jl. Koto Tengah (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 54	Pembelian	28.107.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Koto Tengah (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 54.402.680)
243	Tanah Jalan	2023	Jl. Idris Damil (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 53	Pembelian	31.392.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Idris Damil (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 53.955.000)
244	Tanah Jalan	2023	Jl. Pakih Saleh (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 10	Pembelian	53.913.600,00	01.01.11.08.001	Jl. Pakih Saleh (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 104.502.528)
245	Tanah Jalan	2023	Jl. KUA Pesisir Bukit (Koreksi Nama Sebelum R	Pembelian	7.047.000,00	01.01.11.08.001	Jl. KUA Pesisir Bukit (Koreksi Nama Sebelum Rp. 13.639.860)
246	Tanah Jalan	2023	Jl. Produksi (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 194	Pembelian	99.063.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Produksi (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 194.750.520)
247	Tanah Jalan	2023	Jl. Koto Limau Manis (Koreksi Nilai Sebelum R	Pembelian	10.296.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Koto Limau Manis (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 20.334.600)
248	Tanah Jalan	2023	Jl. Mesia (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 71	Pembelian	36.088.200,00	01.01.11.08.001	Jl. Mesia (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 71.320.976)
249	Tanah Jalan	2023	Jl. Osaman Rami (Koreksi Nilai Sebelum Rp.)	Pembelian	56.780.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Osaman Rami (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 111.525.020)
250	Tanah Jalan	2023	Jl. Depati Dua Nenek (Koreksi Nilai Sebelum R	Pembelian	341.528.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Depati Dua Nenek (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 675.751.040)
251	Tanah Jalan	2023	Jl. Pendidikan (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 80	Pembelian	40.960.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Pendidikan (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 80.814.080)
252	Tanah Jalan	2023	Jl. SMK 2 (STM) (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 3	Pembelian	20.000.000,00	01.01.11.08.001	Jl. SMK 2 (STM) (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 38.460.000)
253	Tanah Jalan	2023	Jl. Puskesmas Koto Lolo (Koreksi Nilai Sebelu	Pembelian	34.452.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Puskesmas Koto Lolo (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 66.827.310)
254	Tanah Jalan	2023	Jl. Dusun Tuo Sungai Liuk (Koreksi Nilai Sebel	Pembelian	18.000.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Dusun Tuo Sungai Liuk (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 34.983.000)
255	Tanah Jalan	2023	Jl. Koto Lolo (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 78	Pembelian	40.716.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Koto Lolo (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 78.977.930)
256	Tanah Jalan	2023	Jl. Koto Bento (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 102	Pembelian	52.353.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Koto Bento (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 102.388.500)
257	Tanah Jalan	2023	Jl. KM 10 (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 660	Pembelian	334.800.000,00	01.01.11.08.001	Jl. KM 10 (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 660.560.400)
258	Tanah Jalan	2023	Jl. Telapo Udang I (Jl. Telapo Udang) (Koreksi	Pembelian	170.100.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Telapo Udang I (Jl. Telapo Udang) (Koreksi Nilai Sebelum Rp. 333.159.750)
259	Tanah Jalan	2023	Jl. Telapo Udang II (Koreksi BPK 2023)	Pembelian	60.948.000,00	01.01.11.08.001	Jl. Telapo Udang II (Koreksi BPK 2023)
260	Tanah Jalan						



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
RINCIAN TANAH SEDANG DALAM PROSES  
TAHUN ANGGARAN 2024

(dalam Rupiah)

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Alamat	Asal Usul Tanah	Nilai Perolehan	Keterangan / Kode Barang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tanah Jalan	2022	Jalan Puncak Sentiong (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 4.505.416.000 (BPK 2023)	Pembelian	783.144.000,00	01.01.11.08.001	SEDANG PROSES
2	Tanah Jalan	2022	Jalan Depati Empat (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 5.683.468.500(BPK 2023)	Pembelian	1.385.424.000,00	01.01.11.08.001	SEDANG PROSES
3	Tanah Jalan	2022	Jalan Muhammad Rusli/ Jl. Lembang Jaya (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 6.635.342.340 (BPK 2023)	Pembelian	276.840.000,00	01.01.11.08.001	SEDANG PROSES
4	Tanah Jalan	2022	Jalan Tanah Menang (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 1.845.737.400(BPK 2023)	Pembelian	121.572.000,00	01.01.11.08.001	SEDANG PROSES
5	Tanah Jalan	2022	Jalan Sungai Terung (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 4.447.560.000 (BPK 2023)	Pembelian	349.628.000,00	01.01.11.08.001	SEDANG PROSES
6	Tanah Jalan	2022	Jalan Sungai Ning (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 8.553.000.000 (BPK 2023)	Pembelian	633.600.000,00	01.01.11.08.001	SEDANG PROSES
7	Tanah Jalan	2022	Jl. Renah Padang Tinggi (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 13.432.486.500 (BPK 2023)	Pembelian	1.247.076.000,00	01.01.11.08.001	SEDANG PROSES
8	Tanah Jalan	2022	Jl. Siak Alim (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 21.164.580.000(BPK 2023)	Pembelian	689.400.000,00	01.01.11.08.001	SEDANG PROSES
9	Tanah Jalan	2022	Jl. Bukit Simancik (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 18.638.750.000(BPK 2023)	Pembelian	585.000.000,00	01.01.11.08.001	SEDANG PROSES
10	Tanah Jalan	2022	Jl. Pematang / Jl. Syech Abdulahman (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 4.473.300.000 (BPK 2023)	Pembelian	140.400.000,00	01.01.11.08.001	SEDANG PROSES
11	Tanah Jalan	2022	Jl. Pematang Gando (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 12.290.661.000 (BPK 2023)	Pembelian	1.034.640.000,00	01.01.11.08.001	SEDANG PROSES
12	Tanah Jalan	2022	Jl. Simpang Masjid Hijau/ Jl. Masjid Hijau (Koreksi)Koreksi nilai sebelum Rp. 1.287.226.500 (BPK 2023)	Pembelian	253.544.000,00	01.01.11.08.001	SEDANG PROSES
13	Tanah Jalan	2022	Jl. Dusun Pimpah (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 4.832.445.000 (BPK 2023)	Pembelian	305.100.000,00	01.01.11.08.001	SEDANG PROSES
14	Tanah Jalan	2022	Jl. Sungai Sirah (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 21.334.200.000 (BPK 2023)	Pembelian	609.120.000,00	01.01.11.08.001	SEDANG PROSES
15	Tanah Jalan	2022	Jl. Muara Jaya (Koreksi nilai sebelum dari Rp. 22.848.240.000) BPK 2023	Pembelian	833.923.200,00	01.01.11.08.001	SEDANG PROSES
16	Tanah Jalan	2022	Jl. Renah Pisang (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 33.240.060.000 (BPK 2023)	Pembelian	782.460.000,00	01.01.11.08.001	SEDANG PROSES
17	Tanah Jalan	2022	Jl. Lembah Berseri I (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 2.078.379.000 (BPK 2023)	Pembelian	174.960.000,00	01.01.11.08.001	SEDANG PROSES
18	Tanah Jalan	2022	Jl. Zulfan Rahman berubah nama jadi Jl. Air Patah (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 5.131.800.000 (BPK 2023)	Pembelian	359.429.400,00	01.01.11.08.001	SEDANG PROSES
19	Tanah Jalan	2022	Jl. Air Sempit / J.I.K.H. Abdul Karim Jamak (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 924.763.200 (BPK 2023)	Pembelian	491.068.800,00	01.01.11.08.001	SEDANG PROSES
20	Tanah Jalan	2022	Jl. DR . Soetomo (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 15.369.800.000 (BPK 2023)	Pembelian	421.600.000,00	01.01.11.08.001	SEDANG PROSES
21	Tanah Jalan	2022	Jl. Rawa Arah Seratus (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 2.040.445.500 (BPK 2023)	Pembelian	243.840.000,00	01.01.11.08.001	SEDANG PROSES
22	Tanah Jalan	2022	Jl. Dusun Baru Air Jernih (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 3.081.355.200 (BPK 2023)	Pembelian	181.440.000,00	01.01.11.08.001	SEDANG PROSES
23	Tanah Jalan	2022	Jl. Hulu Pengasah (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 2.356.420.000(BPK 2023)	Pembelian	88.000.000,00	01.01.11.08.001	SEDANG PROSES
24	Tanah Jalan	2022	Jl. Hulu Sungai Ampuh (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 3.989.847.500 (BPK 2023)	Pembelian	268.200.000,00	01.01.11.08.001	SEDANG PROSES
25	Tanah Jalan	2022	Jl. Pematang Putus (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 3.350.000.000 (BPK 2023)	Pembelian	360.000.000,00	01.01.11.08.001	SEDANG PROSES
26	Tanah Jalan	2022	Jl. Pematang Gando 2 (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 623.100.000 (BPK 2023)	Pembelian	66.960.000,00	01.01.11.08.001	SEDANG PROSES
27	Tanah Jalan	2022	Jl. Batang Sipinang (Koreksi Nilai Sebelumnya Rp. 2.094.300.000)	Pembelian	105.300.000,00	01.01.11.08.001	SEDANG PROSES
28	Tanah Jalan	2022	Jl. Air Baru (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 1.720.500.000 (BPK 2023)	Pembelian	40.500.000,00	01.01.11.08.001	SEDANG PROSES

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Alamat	Asal Usul Tanah	Nilai Perolehan	Keterangan / Kode Barang	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
29	Tanah Jalan	2022	Jl. Bukit Padon (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 3.467.200.000 (BPK 2023)	Pembelian	282.096.000,00	01.01.11.08.001	SEDANG PROSES
30	Tanah Jalan	2022	Jl. Koto Bento-Koto Baru (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 95.368.000(BPK 2023)	Pembelian	56.268.000,00	01.01.11.08.001	SEDANG PROSES
31	Tanah Jalan	2022	Jl. Desa (Koreksi) Koreksi nilai sebelum Rp. 3596635000 (BPK 2023)	Pembelian	97.968.000,00	01.01.11.08.001	SEDANG PROSES
<b>JUMLAH</b>					<b>13.268.501.400,00</b>		



**Pemerintah Kota Sungai Penuh**  
**Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin**  
**Tahun Anggaran 2024**

No	SKPD	Saldo Awal	Belanja Modal	Mutasi Tambah						Mutasi Kurang					Saldo Per 31 Des 2024
				Mutasi dari SKPKD/SKPD	Hibah	Hutang	Kapitalisasi	Reklasifikasi	Jumlah	Mutasi dari SKPKD/SKPD	Reklasifikasi	Koreksi	Ekstrakomptable	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5 : 9)	11	12	13	14	15 = (11 : 14)	16 = 3 + 4 + 10 - 15
1	Dinas Pendidikan	57.276.721.415,16	1.182.008.720,00	-	-	-	7.500.000,00	746.065.000,00	753.565.000,00	-	-	-	527.201.000,00	527.201.000,00	58.685.094.135,16
2	Dinas Kesehatan	75.791.869.316,67	8.565.800.000,00	-	-	-	-	-	-	8.370.280.000,00	-	-	31.520.000,00	8.401.800.000,00	75.955.869.316,67
3	Puskesmas Sungai Penuh	2.208.121.768,50	9.955.000,00	518.810.000,00	-	-	-	-	518.810.000,00	-	-	-	-	-	2.736.886.768,50
4	Puskesmas Hamparan Rawang	1.821.298.471,53	8.550.000,00	649.000.000,00	-	-	-	-	649.000.000,00	-	-	-	8.550.000,00	8.550.000,00	2.470.298.471,53
5	Puskesmas Kumun Debal	1.993.628.416,21	21.000.000,00	1.072.460.000,00	-	-	-	-	1.072.460.000,00	-	-	-	-	-	3.087.088.416,21
6	Puskesmas Desa Gedang	2.126.315.228,20	8.615.000,00	74.460.000,00	-	-	-	-	74.460.000,00	-	-	-	-	-	2.209.390.228,20
7	Puskesmas Tanah Kampung	1.798.685.201,53	12.500.000,00	653.600.000,00	-	-	-	-	653.600.000,00	-	-	-	-	-	2.464.785.201,53
8	Puskesmas Koto Baru	1.761.897.657,53	-	653.600.000,00	-	-	-	-	653.600.000,00	-	-	-	-	-	2.415.497.657,53
9	Puskesmas Sungai Bungkal	1.447.766.652,00	-	723.460.000,00	-	-	-	-	723.460.000,00	-	-	-	-	-	2.171.226.652,00
10	Puskesmas Sungai Liuk	1.319.653.864,50	-	723.460.000,00	-	-	-	-	723.460.000,00	-	-	-	-	-	2.043.113.864,50
11	Puskesmas Koto Lolo	1.331.695.125,50	1.400.000,00	718.860.000,00	-	-	-	-	718.860.000,00	-	-	-	1.400.000,00	1.400.000,00	2.050.555.125,50
12	Puskesmas Pondok Tinggi	1.418.332.646,50	17.000.000,00	723.460.000,00	-	-	-	-	723.460.000,00	-	-	-	-	-	2.158.792.646,50
13	Puskesmas Tanjung	898.793.022,00	-	1.612.600.000,00	-	-	-	-	1.612.600.000,00	-	-	-	-	-	2.511.393.022,00
14	Instalasi Farmasi	46.175.000,00	-	211.580.000,00	-	-	-	-	211.580.000,00	-	-	-	18.200.000,00	18.200.000,00	239.555.000,00
15	Laboratorium Kesehatan Daerah	5.469.756.862,00	-	34.930.000,00	-	-	-	-	34.930.000,00	-	-	-	-	-	5.504.686.862,00
16	Rumah Sakit Kelas D Pratama	6.216.479.017,00	97.631.000,00	-	-	-	-	-	-	-	54.221.000,00	-	14.960.000,00	69.181.000,00	6.244.929.017,00
17	RSUD Mayjen H. A. Thalib	134.208.783.273,00	7.390.099.284,00	-	-	1.864.672.359,00	-	-	1.864.672.359,00	-	-	-	1.762.500,00	1.762.500,00	143.461.792.416,00
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49.984.784.325,61	6.677.699.163,00	-	-	-	-	139.506.004,00	139.506.004,00	466.500.000,00	490.961.463,00	-	11.700.000,00	969.161.463,00	55.832.828.029,61
19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.811.720.181,92	239.085.000,00	466.500.000,00	-	-	38.940.000,00	-	505.440.000,00	223.300.000,00	-	-	12.015.000,00	235.315.000,00	4.320.930.181,92
20	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	2.079.949.367,07	58.950.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.138.899.367,07
21	Dinas Pemadam Kebakaran	9.522.890.730,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.522.890.730,26
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.968.290.790,00	44.700.000,00	-	942.516.000,00	-	96.860.000,00	-	1.039.376.000,00	-	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00	4.049.966.790,00
23	Dinas Sosial	1.917.288.051,20	58.900.000,00	223.300.000,00	-	-	-	-	223.300.000,00	-	150.000,00	-	950.000,00	1.100.000,00	2.198.388.051,20
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	936.691.220,91	97.064.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00	8.000.000,00	1.025.755.220,91
25	Dinas Ketahanan Pangan	1.364.083.413,38	5.000.000,00	212.998.500,00	-	-	-	-	212.998.500,00	-	-	-	-	-	1.582.081.913,38
26	Dinas Lingkungan Hidup	16.403.101.698,74	321.828.500,00	307.800.000,00	-	-	9.500.000,00	-	317.300.000,00	-	36.500.000,00	-	-	36.500.000,00	17.005.730.198,74
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.950.702.603,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.950.702.603,98
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.866.976.901,00	38.335.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950.000,00	950.000,00	2.904.361.901,00
29	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.089.996.785,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.089.996.785,36
30	Dinas Perhubungan	3.364.936.752,07	26.550.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.391.486.752,07
31	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	6.338.327.311,97	65.250.000,00	-	-	-	6.400.000,00	-	6.400.000,00	-	-	-	1.250.000,00	1.250.000,00	6.408.727.311,97
32	Dinas Koperasi dan UKM	997.981.218,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	997.981.218,00
33	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	1.857.446.726,73	123.148.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.150.000,00	2.150.000,00	1.978.444.726,73
34	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.724.754.822,00	524.446.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.856.000,00	21.856.000,00	2.227.344.822,00

No	SKPD	Saldo Awal	Belanja Modal	Mutasi Tambah						Mutasi Kurang					Saldo Per 31 Des 2024
				Mutasi dari SKPKD/SKPD	Hibah	Hutang	Kapitalisasi	Reklasifikasi	Jumlah	Mutasi dari SKPKD/SKPD	Reklasifikasi	Koreksi	Ekstrakomptable	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = ( 5 : 9 )	11	12	13	14	15 = ( 11 : 14 )	16 = 3 + 4 + 10 - 15
35	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.466.557.620,68	62.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.529.257.620,68
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.423.969.392,46	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	212.998.500,00	-	-	-	212.998.500,00	2.215.970.892,46
37	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	5.074.804.147,12	-	-	-	-	-	-	-	-	13.786.100,00	-	-	13.786.100,00	5.061.018.047,12
38	Dinas Peternakan dan Perikanan	2.671.202.538,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.671.202.538,30
39	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	6.267.421.111,60	5.740.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.000,00	740.000,00	6.272.421.111,60
40	Bagian Umum	28.901.174.866,61	691.150.000,00	-	-	-	348.770.000,00	-	348.770.000,00	-	-	-	-	-	29.941.094.866,61
41	Bagian Tata Pemerintahan	520.049.448,93	32.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	552.049.448,93
42	Bagian Hukum	648.498.965,83	19.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	667.498.965,83
43	Bagian Kesejahteraan Rakyat	512.912.346,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512.912.346,34
44	Bagian Ekonomi dan Pembangunan	586.630.490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586.630.490,00
45	Bagian Humas dan Protokol	1.054.371.697,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.054.371.697,41
46	Bagian Keuangan	650.769.949,29	41.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	691.769.949,29
47	Bagian Organisasi	505.480.457,41	49.920.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	555.400.457,41
48	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	967.247.169,73	6.450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	973.697.169,73
49	Sekretariat DPRD	13.974.742.973,00	1.580.602.400,00	-	-	-	-	-	-	355.798.500,00	-	-	30.012.400,00	385.810.900,00	15.169.534.473,00
50	Kecamatan Sungai Penuh	712.000.627,00	-	-	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	722.000.627,00
51	Kecamatan Pesisir Bukit	666.857.738,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	666.857.738,71
52	Kecamatan Hampan Rawang	561.205.389,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	561.205.389,00
53	Kecamatan Kumub Debai	752.131.220,00	-	-	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	762.131.220,00
54	Kecamatan Tanah Kampung	742.840.080,00	-	-	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	752.840.080,00
55	Kecamatan Pondok Tinggi	872.377.655,76	-	-	-	-	6.500.000,00	-	6.500.000,00	-	-	-	-	-	878.877.655,76
56	Kecamatan Sungai Bungkal	979.194.939,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	979.194.939,00
57	Kecamatan Koto Baru	1.117.891.530,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.117.891.530,30
58	Kelurahan Sungai Penuh	383.300.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383.300.200,00
59	Kelurahan Pondok Tinggi	464.529.052,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464.529.052,00
60	Kelurahan Dusun Baru	457.082.750,30	18.660.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.160.000,00	8.160.000,00	467.582.750,30
61	Kelurahan Pasar Sungai Penuh	444.570.800,00	28.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	472.570.800,00
62	Inspektoraat Daerah	2.564.199.268,90	34.395.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.515.000,00	4.515.000,00	2.594.079.268,90
63	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.368.254.434,70	61.499.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.429.753.434,70
64	Badan Keuangan Daerah	13.557.659.307,77	916.350.000,00	-	-	-	-	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	322.500.000,00	-	-	487.500.000,00	14.151.509.307,77
66	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	3.879.560.850,00	16.600.000,00	-	-	-	9.600.000,00	-	9.600.000,00	-	-	-	-	-	3.905.760.850,00
67	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.325.365.432,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.325.365.432,53
68	Kantor Kesbangpol	1.170.155.738,42	-	212.998.500,00	-	-	-	-	212.998.500,00	-	-	-	-	-	1.383.154.238,42
		<b>515.560.906.027,13</b>	<b>29.164.581.067,00</b>	<b>9.793.877.000,00</b>	<b>942.516.000,00</b>	<b>1.864.672.359,00</b>	<b>554.070.000,00</b>	<b>1.050.571.004,00</b>	<b>14.205.706.363,00</b>	<b>9.793.877.000,00</b>	<b>920.518.563,00</b>	<b>-</b>	<b>705.891.900,00</b>	<b>11.420.287.463,00</b>	<b>547.510.905.994,13</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**DAFTAR RINCIAN PINJAM PAKAI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT YANG DIMANFAATKAN OLEH PIHAK LAIN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	DINAS / INSTANSI	Jenis Kendaraan	Merk	Type	Silinder	Warna	Nomor		Tahun Pembuatan	No Polisi Baru	BPKB Nomor	Ket	Kontrak Pinjam Pakai	Masa Pinjam Pakai
							Mesin	Rangka						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Pinjam Pakai Instansi Vertikal</b>														
1	Badan Pertanahan Kota Sungai Penuh	R4	Isuzu	TBR 54F Turbo Adventure	2499 cc	Hitam	E310440	MHCTBR54FBK310440	2011	BH 1016 RZ	I 05379358 F		028/42/Setda-Umum-3/2019	5 Tahun
2	KPU	R4	Toyota	New Avanza	1298 cc	Kuning Metalik	K3 DJ89677	MHKM1BA3JBK007032	2011	BH 1031 RZ	I 05388498 F		028/03.1/Setda-Umum-3/2019	5 Tahun
<b>Pinjam Pakai Unsur Muspida</b>														
3	Polres	R4	Toyota	Kijang Innova G	1998 cc	Hitam Metalik	1TR-7315313	MHFXX42GIC222474	2012	BH 1066 RZ	J-01230655		028/03.4/Setda-Umum-3/2019	5 Tahun
4	Kejari	R4	Toyota	Innova	1998 cc	Hitam Metalik	1TR-7314372	MHFXX42GIC222593	2012	BH 4 RZ	I-11005490F		028/03.6/Setda-Umum-3/2019	5 Tahun
5	Rutan	R4	Toyota	Kijang Innova G	1998 cc	Silver Metalik	1TR-7737870	MHFXX42GXE2281660	2014	BH 1103 RZ	K 06090635 F		028/47.1/Setda-Umum-3/2019	5 Tahun
6	Pengadilan Negeri	R4	Toyota	Innova G M/T	1998 cc	Silver Metalik	1TR-7738724	MHFXX42G2E2281748	2014	BH 1102 RZ	K 06090634 F		028/03.2/Setda-Umum-3/2019	5 Tahun
7	Polisi Militer	R4	Toyota	Double Kabin E M/T Diesel Patwal VIN 2015	2494 cc	Putih	2KD-U790324	MRODS8CD6F0260552	2015	BH 9228 RZ	L 01855954 F		028/02.A/Setda-Umum-3/2019	5 Tahun
8	Kodim	R6	Isuzu	NKR 71 HD E2-2	4570 cc	Hijau Tentara	B037996	MHCNK1LYCJ037996	2012	BH 8017 RZ	P 06450501		028/03.5/BakeudaVI/2023	5 Tahun
9	Kodim	R4	Isuzu	TBR 54F Turbo LM	2499 cc	Hitam	E312171	MHCTBR54FBK312171	2011	BH 90 RZ	I 0777528F		028/028.a/BakeudaVI/2023	5 Tahun
10	Dandim 047	R4	Mitsubishi	Pajero sport	2442 cc	Hitam	4N15UCA2195	MK2KRWPNUHJ005713	2017	BH 1004 R	M 11773188		028/11.C/BakeudaVI/2023	5 Tahun
11	PDAM	R4	Toyota	Kijang Innova G	1998 cc	Putih	1 TR-737526	MHFXX42G7C229808	2012	BH 1064 RZ	I 11005493		028/330.a/BKD/2018	2 Tahun
12	PDAM	R4	Toyota	Hilux Pick Up		Hitam	1 TR-770776645	MROAW12GOE0043488	2014	BH 461 RZ	U02088707F		028/330.b/BKD/2018	2 Tahun
13	Kementerian Agama	R4	Honda	CRV RE 1	1997 cc	Hitam Mutiara	R20A15814272	MHRRE1740BJ101714	2011	BH 1807 RZ	H 04609765F			
14	SAMSAT	R4	Mitsubishi	Triton Exceed		Hitam	4D56UCCZ8160	MMBJNKB40CD011778	2012	BH 387 RZ	I 05389382 F		028/947/DPPKAD/2011	
15	Kejari	R4	Toyota	Rush A/T New GR Sport	1500 cc	Hitam	2NR4C05895	MHKE8FB3JRK094162	2024	BH 1046 R			000.2.3.2/85/Bakeuda.6/2024	5 Tahun



Pemerintah Kota Sungai Penuh  
Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan  
Tahun Anggaran 2024

2.715.866.494,65 3.128.638.748,10 412.772.253,45

No	SKPD	Saldo Awal	Belanja Modal	Mutasi Tambah				Mutasi Kurang					Saldo per 31 Des 2024	
				Mutasi dari SKPKD/SKPD	Reklasifikasi	Koreksi	Jumlah	Mutasi dari SKPKD/SKPD	Penghapusan	Reklasifikasi	Koreksi	Ekstrakomptable		Jumlah
1	2	3	4	5	6	8	7 = ( 5 : 6 )	8	9	10	11	12	13 = ( 8 : 12 )	14 = 3 + 4 + 7 - 13
1	Dinas Pendidikan	148.198.121.861,92	9.938.215.541,00	-	103.137.922,00	-	103.137.922,00	-	81.088.000,00	651.074.300,00	-	-	732.162.300,00	157.507.313.024,92
2	Dinas Kesehatan	4.235.423.425,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.235.423.425,49
3	Puskesmas Sungai Penuh	1.370.262.935,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.370.262.935,50
4	Puskesmas Hamparan Rawang	4.985.589.246,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.985.589.246,00
5	Puskesmas Kumun Debai	7.039.583.471,65	-	-	-	-	-	-	123.900.000,00	-	-	-	123.900.000,00	6.915.683.471,65
6	Puskesmas Desa Gedang	4.055.754.306,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.055.754.306,37
7	Puskesmas Tanah Kampung	6.763.499.843,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.763.499.843,39
8	Puskesmas Koto Baru	3.136.568.426,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.136.568.426,32
9	Puskesmas Sungai Bungkal	4.012.413.952,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.012.413.952,08
10	Puskesmas Sungai Liuk	2.634.737.464,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.634.737.464,19
11	Puskesmas Koto Lolo	1.745.323.067,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.745.323.067,47
12	Puskesmas Pondok Tinggi	1.957.521.889,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.957.521.889,74
13	Puskesmas Tanjung	269.533.308,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	269.533.308,79
14	Instalasi Farmasi	1.068.033.759,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.068.033.759,55
15	Laboratorium Kesehatan Daerah	6.435.511.247,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.435.511.247,68
16	Rumah Sakit Kelas D Pratama	61.768.006.861,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.768.006.861,89
17	RSUD Mayjen H. A. Thalib	18.179.374.421,00	3.689.832.320,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.869.206.741,15
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.751.119.525,15	17.162.154.993,91	-	5.908.547.946,10	0,04	5.908.547.946,14	6.176.062.006,79	-	8.978.178.150,48	-	-	15.154.240.157,27	44.667.582.307,93
19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	16.735.275.596,70	3.663.929.778,41	-	-	-	-	-	-	999.464.991,60	-	-	999.464.991,60	19.399.740.383,51
20	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	241.001.484,72	-	-	241.001.484,72	-	-	-	-	-	-	241.001.484,72
21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	37.850.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.850.000,00
22	Dinas Ketahanan Pangan	217.789.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.789.000,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	2.596.677.213,66	-	-	36.500.000,00	-	36.500.000,00	-	-	-	-	36.500.000,00	36.500.000,00	2.596.677.213,66
24	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.918.259.905,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.918.259.905,35
25	Dinas Perhubungan	6.676.550.108,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.676.550.108,89
26	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	121.625.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121.625.000,00
27	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	26.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.000.000,00
28	Dinas Pemuda dan Olah Raga	29.503.033.112,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.503.033.112,81
29	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	15.951.433.772,03	-	199.873.095,00	-	-	199.873.095,00	-	-	-	-	-	-	16.151.306.867,03

No	SKPD	Saldo Awal	Belanja Modal	Mutasi Tambah				Mutasi Kurang					Saldo per 31 Des 2024	
				Mutasi dari SKPKD/SKPD	Reklasifikasi	Koreksi	Jumlah	Mutasi dari SKPKD/SKPD	Penghapusan	Reklasifikasi	Koreksi	Ekstrakomtable		Jumlah
1	2	3	4	5	6	8	7 = (5 : 6)	8	9	10	11	12	13 = (8 : 12)	14 = 3 + 4 + 7 - 13
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.101.603.011,63	-	319.333.955,90	-	-	319.333.955,90	-	-	-	-	-	-	10.420.936.967,53
31	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	3.770.239.097,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.770.239.097,24
32	Dinas Peternakan dan Perikanan	3.189.514.587,41	458.359.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.647.874.387,41
33	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	17.592.128.288,78	51.794.820,00	412.772.253,45	-	-	412.772.253,45	-	-	51.794.820,00	-	-	51.794.820,00	18.004.900.542,23
34	Bagian Umum	26.518.449.897,45	-	995.136.543,18	-	-	995.136.543,18	-	-	-	-	-	-	27.513.586.440,63
35	Bagian Tata Pemerintahan	12.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000.000,00
36	Sekretariat DPRD	7.015.493.563,30	-	186.928.670,46	-	-	186.928.670,46	-	-	-	-	-	-	7.202.422.233,76
37	Kecamatan Sungai Penuh	617.102.144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	617.102.144,00
38	Kecamatan Pesisir Bukit	1.057.282.906,22	-	2.429.774.995,90	-	-	2.429.774.995,90	-	-	1.057.282.906,22	-	-	1.057.282.906,22	2.429.774.995,90
39	Kecamatan Hampan Rawang	4.831.730.514,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.831.730.514,78
40	Kecamatan Kumun Debai	1.985.317.452,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.985.317.452,33
41	Kecamatan Tanah Kampung	7.114.572.265,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.114.572.265,13
42	Kecamatan Pondok Tinggi	2.558.780.240,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.558.780.240,30
43	Kecamatan Sungai Bungkal	3.281.424.772,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.281.424.772,20
44	Kecamatan Koto Baru	4.674.105.068,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.674.105.068,62
45	Kelurahan Sungai Penuh	1.314.070.091,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.314.070.091,17
46	Inspektorat Daerah	7.719.250.773,39	-	241.030.963,30	-	-	241.030.963,30	-	-	-	-	-	-	7.960.281.736,69
47	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.508.915.806,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.508.915.806,92
48	Badan Keuangan Daerah	101.173.587.992,80	-	1.150.210.044,88	-	-	1.150.210.044,88	-	-	3.628.770.000,00	-	-	3.628.770.000,00	98.695.028.037,68
49	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	5.857.389.863,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.857.389.863,40
50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00	5.000.000,00	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>605.283.831.060,69</b>	<b>34.969.287.253,47</b>	<b>6.176.062.006,79</b>	<b>6.048.185.868,10</b>	<b>0,04</b>	<b>12.224.247.874,93</b>	<b>6.176.062.006,79</b>	<b>204.988.000,00</b>	<b>15.366.565.168,30</b>	<b>-</b>	<b>41.500.000,00</b>	<b>21.789.115.175,09</b>	<b>630.688.251.014,00</b>



Pemerintah Kota Sungai Penuh  
Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Tahun Anggaran 2024

No	SKPD	Saldo Awal	Belanja Modal	Mutasi Tambah				Mutasi Kurang				Saldo per 31 Des 2024
				Mutasi dari SKPKD/SKPD	Reklasifikasi	Koreksi	Jumlah	Mutasi dari SKPKD/SKPD	Koreksi	Reklasifikasi	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	9	7 = ( 5 : 6 )	8	9	10	11 = ( 8 : 10 )	12 = 3 + 4 + 7 - 11
1	Dinas Pendidikan	43.440.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.440.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.501.548.433,00	942.540.000,00	-	-	-	-	942.540.000,00	-	-	942.540.000,00	1.501.548.433,00
3	Puskesmas Sungai Penuh	399.956.978,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399.956.978,00
4	Puskesmas Hamparan Rawang	431.690.642,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	431.690.642,00
5	Puskesmas Kumun Debai	441.540.282,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	441.540.282,00
6	Puskesmas Desa Gedang	449.897.682,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449.897.682,00
7	Puskesmas Koto Baru	449.897.682,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449.897.682,00
8	Puskesmas Sungai Bungkal	399.956.978,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399.956.978,00
9	Puskesmas Sungai Liuk	399.956.978,00	-	942.540.000,00	-	-	942.540.000,00	-	-	-	-	1.342.496.978,00
10	Puskesmas Pondok Tinggi	399.956.980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399.956.980,00
11	Instalasi Farmasi	793.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	793.000,00
12	Rumah Sakit Kelas D Pratama	4.690.072.673,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.690.072.673,61
13	RSUD Mayjen H. A. Thalib	226.379.400,00	1.067.861.956,94	-	-	-	-	-	-	-	-	1.294.241.356,94
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.125.014.138.856,46	50.585.182.197,67	-	1.201.746.516,35	0,07	1.201.746.516,42	683.924.477,87	-	16.505.782.092,90	#####	1.159.611.360.999,78
15	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	57.227.070.412,09	1.885.535.974,11	-	854.554.491,63	-	854.554.491,63	-	-	-	-	59.967.160.877,83
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39.022.631.019,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.022.631.019,14
17	Dinas Sosial	967.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	967.800,00
18	Dinas Lingkungan Hidup	2.482.589.585,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.482.589.585,78
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	42.749.980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.749.980,00
20	Dinas Perhubungan	69.140.118,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.140.118,20
21	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	33.165.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.165.000,00
22	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	4.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.100.000,00
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2.437.337.737,00	-	683.924.477,87	-	-	683.924.477,87	-	-	-	-	3.121.262.214,87
24	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	21.312.594.278,76	193.055.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	21.505.649.278,76
25	Dinas Peternakan dan Perikanan	3.266.173.698,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.266.173.698,55
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	19.627.330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.627.330,00
27	Bagian Umum	1.634.034.495,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.634.034.495,18
28	Sekretariat DPRD	85.388.650,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.388.650,00
29	Kecamatan Hamparan Rawang	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00
30	Kecamatan Koto Baru	201.033.157,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201.033.157,43
31	Kelurahan Pondok Tinggi	580.034.530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	580.034.530,00

No	SKPD	Saldo Awal	Belanja Modal	Mutasi Tambah				Mutasi Kurang				Saldo per 31 Des 2024
				Mutasi dari SKPKD/SKPD	Reklasifikasi	Koreksi	Jumlah	Mutasi dari SKPKD/SKPD	Koreksi	Reklasifikasi	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	9	7 = ( 5 : 6 )	8	9	10	11 = ( 8 : 10 )	12 = 3 + 4 + 7 - 11
32	Kelurahan Dusun Baru	612.155.855,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612.155.855,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00
34	Badan Keuangan Daerah	3.907.460.280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.907.460.280,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.267.805.480.492,20</b>	<b>#####</b>	<b>1.626.464.477,87</b>	<b>2.056.301.007,98</b>	<b>0,07</b>	<b>3.682.765.485,92</b>	<b>1.626.464.477,87</b>	<b>-</b>	<b>16.505.782.092,90</b>	<b>#####</b>	<b>1.308.030.174.536,07</b>



Pemerintah Kota Sungai Penuh  
Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Tetap Lainnya  
Tahun Anggaran 2024

No	SKPD	Saldo Awal	Belanja Modal	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang				Saldo per 31 Des 2024
				Reklasifikasi	Jumlah	Ekstrakomptabel	Reklasifikasi	Koreksi	Jumlah	
1	2	3	4	7	8 = ( 5 : 7 )	10	12	19	13 = ( 9 : 12 )	14 = 3 + 4 +8 -14
1	Dinas Pendidikan	18.663.006.523,77	903.394.600,00	-	-	763.193.600,00	140.201.000,00	0,07	903.394.600,07	18.663.006.523,70
2	Laboratorium Kesehatan Daerah	1.427.500,00	-	-	-	-	-	-	-	1.427.500,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	16.228.467.004,10	9.452.579.956,07	1.129.896.821,22	1.129.896.821,22	-	2.409.645.356,73	-	2.409.645.356,73	24.401.298.424,66
4	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.138.383.532,21	-	-	-	-	-	-	-	1.138.383.532,21
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	105.725.000,00	-	-	-	-	-	-	-	105.725.000,00
6	Dinas Ketahanan Pangan	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	444.189.800,00	-	-	-	-	-	-	-	444.189.800,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	378.000,00	-	-	-	-	-	-	-	378.000,00
9	Dinas Perhubungan	713.029.900,00	-	-	-	-	-	-	-	713.029.900,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	69.427.740,00	-	-	-	-	-	-	-	69.427.740,00
11	Dinas Koperasi dan UKM	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000,00
12	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	33.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	33.600.000,00
13	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000,00
14	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	242.561.201,00	-	-	-	-	-	-	-	242.561.201,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	610.430.152,00	-	-	-	-	-	-	-	610.430.152,00
16	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	425.566.750,00	-	-	-	-	-	-	-	425.566.750,00
17	Dinas Peternakan dan Perikanan	52.405.000,00	-	-	-	-	-	-	-	52.405.000,00
18	Bagian Umum	250.338.807,80	-	-	-	-	-	-	-	250.338.807,80
19	Bagian Hukum	48.645.001,00	-	-	-	-	-	-	-	48.645.001,00
20	Bagian Organisasi	90.516.901,40	-	-	-	-	-	-	-	90.516.901,40
21	Sekretariat DPRD	129.254.799,74	-	-	-	-	-	-	-	129.254.799,74
22	Kelurahan Sungai Penuh	50.728.500,00	-	-	-	-	-	-	-	50.728.500,00
23	Inspektorat Daerah	15.860.000,00	-	-	-	-	-	-	-	15.860.000,00

No	SKPD	Saldo Awal	Belanja Modal	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang			Saldo per 31 Des 2024	
				Reklasifikasi	Jumlah	Ekstrakomptabel	Reklasifikasi	Koreksi		Jumlah
1	2	3	4	7	8 = ( 5 : 7 )	10	12	19	13 = ( 9 : 12 )	14 = 3 + 4 +8 -14
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	234.100.921,16	-	-	-	-	-	-	-	234.100.921,16
25	Badan Keuangan Daerah	40.445.500,00	-	-	-	-	-	-	-	40.445.500,00
26	Kantor Kesbangpol	7.847.634,18	-	-	-	-	-	-	-	7.847.634,18
	<b>Jumlah</b>	<b>39.629.836.168,36</b>	<b>10.355.974.556,07</b>	<b>1.129.896.821,22</b>	<b>1.129.896.821,22</b>	<b>763.193.600,00</b>	<b>2.549.846.356,73</b>	<b>0,07</b>	<b>3.313.039.956,80</b>	<b>47.802.667.588,85</b>



**Pemerintah Kota Sungai Penuh**  
**Rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan**  
**Tahun Anggaran 2024**

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi Tambah			Mutasi Kurang				Saldo / 31 des 2024
			Reklasifikasi	Koreksi	Jumlah	Ekstrakomptabel	Reklasifikasi	Koreksi	Jumlah	
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5	7	8	9	10 = ( 7 : 9 )	11 = 3 + 6 - 10
1	Dinas Pendidikan	103.137.922,00	45.210.300,00	-	45.210.300,00	-	103.137.922,00	-	103.137.922,00	45.210.300,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.359.135.969,65	7.631.403.951,98	-	7.631.403.951,98	-	6.159.021.461,10	-	6.159.021.461,10	25.831.518.460,53
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	1.471.542.380,00	144.910.499,97	-	144.910.499,97	-	-	-	-	1.616.452.879,97
4	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	101.579.000,00	-	-	-	-	-	-	-	101.579.000,00
5	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	883.434.679,00	51.794.820,00	-	51.794.820,00	-	-	-	-	935.229.499,00
	<b>Jumlah</b>	<b>26.918.829.950,65</b>	<b>7.873.319.571,95</b>	<b>-</b>	<b>7.873.319.571,95</b>	<b>-</b>	<b>6.262.159.383,10</b>	<b>-</b>	<b>6.262.159.383,10</b>	<b>28.529.990.139,50</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN ASET TETAP KONTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)**  
**BERDASARKAN JENIS BELANJA MODAL DAN KEMAJUAN FISIK**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	NO. KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	KONTRAKTOR	JUMLAH
<b>I</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM (PU)</b>				
1	Perencanaan Instalasi Escalator Kincai Plaza, Lokasi Kec. Sungai Bungkal	640/32-KONTRAK-PL/DPUPR-4/XI/2021	29 Desember 2021	CV. REKACIPTA TEKNIK KONSULTAN	97.790.000,00
2	Perencanaan Pembangunan Mushalla Kantor Camat Sungai Bungkal	640/08/SPK-PPK/KONSUL/DPU-Kota/2014	05 Desember 2014	CV. SYANDANANIRWASITA INDOTECH	34.963.000,00
3	DED Pembangunan Gedung Sungai Penuh TV, Lokasi Kec. Kumun Debai	640/005/KONTRAK/DPUPR-4/III/2017	30 Maret 2017	CV. INTI SARI TEKNIK PRATAMA	296.010.000,00
4	DED Penambahan Gedung Kantor Walikota, Lokasi Kota Sungai Penuh	640/011/KONTRAK/DPUPR-4/XI/2017		CV. DINAMIKA TEKNIK	148.390.000,00
5	Perencanaan Rehabilitasi Kantor Dinas LHKP, Lokasi Kota Sungai Penuh	640/07/KONTRAK-PL/DPUPR-4/VII/2019	Rabu, 17 Juli 2019	CV. ALEXANDER ENGINEERING CONSULTANTS	99.797.500,00
6	Perencanaan Rehabilitasi Kantor DPRD Kota Sungai Penuh, Lokasi Kecamatan Sungai Bungkal - Kota Sungai Penuh	640/02-KONTRAK/DPUPR-4/V/2020	Senin, 18 Mei 2020	CV. TEKNISI PLAN	500.362.929,37
7	Perencanaan Rehabilitasi Kantor Walikota Sungai Penuh, Lokasi Kecamatan Pondok Tinggi - Kota Sungai Penuh	640/03-KONTRAK/DPUPR-4/V/2020	Senin, 18 Mei 2020	CV. DINAMIKA TEKNIK	499.578.905,14
8	Perencanaan Rehabilitasi UPTD Pembibitan Ternak Unggul dan Peningkatan Pembuatan Turap UPTD Puskesmas, Lokasi Kota Sungai Penuh	640/26-KONTRAK-PL-APBD/DPUPR-4/XI/2020	Senin, 09 November 2020	CV. SARUGA ENGINEERING CONSULTANT	60.189.961,94
9	Perencanaan Rehabilitasi UPTD RPH Dinas Peternakan dan Perikanan, Lokasi Kota Sungai Penuh	640/27-KONTRAK-PL-APBD/DPUPR-4/XI/2020	Senin, 09 November 2020	CV. YAGANA CONSULINDO	75.115.295,68
10	Perencanaan Rehabilitasi UPTD Perikanan Budidaya Air Tawar Dinas Peternakan dan Perikanan, Lokasi Kota Sungai Penuh	640/29-KONTRAK-PL-APBD/DPUPR-4/XI/2020	Senin, 09 November 2020	PT. WANDRA CIPTA ENGINEERING CONSULTANT	100.673.819,18
11	Perencanaan Areal MTQ, Lokasi Kec. Tanah Kampung	640/10/KONTRAK-KONSUL/DPUPR-4/IX/2018	Jumat, 14 September 2018	CV. GUNUNG KENCANA KONSULTAN	301.638.336,45
12	Perencanaan Pembangunan Gudang Arsip, Gudang Alat dan Rumah Jaga Kantor Walikota Sungai Penuh, Lokasi Kota Sungai Penuh	640/09/SPK-PPK/KONSUL.09/DPUPR-4/2017	Jumat, 20 Oktober 2017	CV. SENDI TEKNIK KONSULTAN	49.957.000,00
13	Perencanaan Pengembangan Workshop, Lokasi Kota Sungai Penuh	640/14-KONTRAK-PL/DPUPR-4/III/2019	Senin, 22 Juli 2019	CV. ALTAAF RAYA ENGINEERING	74.943.000,00
14	Perencanaan ME Gedung Rawat Inap Rumah Sakit H. Bakri, Lokasi Kota Sungai Penuh	640/16-KONTRAK/DPUPR-4/VI/2021	Rabu, 09 Juni 2021	PT. JASAPLAN REKANAN UTAMA	300.245.000,00
15	Pembangunan Islamic Centre (TAHAP II), Lokasi Kec. Kumun Debai	640/01-KONTRAK/DPUPR-4/VI/2019	Selasa, 25 Juni 2019	CV. TEKNISI PLAN	3.100.272.684,72
16	DED Stadion Mini Kec. Hamparan Rawang	640/06/SPK-PPK/KONSUL/DPU-KOTA/2014	Senin, 25 Agustus 2014	CV. RESIDENT ARCHINDO CONSULTANT	49.940.000,00
17	Perencanaan Pembangunan Gudang Arsip, Gudang Umum, Rumah Jaga dan Tempat Parkir dan Kantor ULP Kantor Walikota Sungai Penuh Kota Sungai Penuh	640/003/SP-PPK-CK/DPU-KOTA/2014	Jumat, 19 Desember 2014	CV. WASCO ENGINEERING	97.130.000,00
18	Perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Unit Perbenihan, Lokasi Kota Sungai Penuh	640/03-KONTRAK-PL/DPUPR-4/III/2021	Selasa, 18 Mei 2021	PT. PRAKARSA ADHICIPTA KONSULTAN	97.515.000,00
19	Perencanaan Pemb. Rumah Dinas Walikota Sungai Penuh	640/010/KONTRAK/2012	Minggu, 01 Januari 1900	CV. SIDLACOM ENGINEER CONSULTANT	297.118.036,40
20	Perencanaan Pembangunan Jl. Batu Gajah, Lokasi Kec. Pondok Tinggi	620/05/KONTRAK/01.01/DPUPR-3/III/2021	Kamis, 25 Maret 2021	CV. MARCHINDO CONSULTANT	49.874.000,00
21	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Losiba, Lokasi Kec. Sungai Penuh	620/01/KONTRAK/01.01/DPUPR-3/XI/2021	Selasa, 30 November 2021	CV. MEGA CIPTA KONSULTAN,	49.929.000,00
22	Perencanaan Rehabilitasi Jl. M. Yamin,SH, Lokasi Kec. Sungai Penuh	620/04/KONTRAK/01.01/DPUPR-3/XI/2021	Selasa, 30 November 2021	CV. MEGA CIPTA KONSULTAN, Jambi	49.999.400,00
23	Perencanaan Peningkatan Jl. Puncak Sentong, Lokasi Kec. Pesisir Bukit	620/07/KONTRAK/01.01/DPUPR-3/XI/2021	Kamis, 30 Desember 2021	CV. VIRAL TEKNIK KONSULTAN	49.940.000,00
24	Perencanaan Peningkatan Jl. Koto Tengah, Lokasi Kec. Pesisir Bukit	620/09/KONTRAK/01.01/DPUPR-3/XI/2021	Selasa, 30 November 2021	CV. MEGA CIPTA KONSULTAN,	49.940.000,00
25	Perencanaan Rehabilitasi Jalan H. Hasmi Muchtar & Jalan Laksamana H. Sofyan Huri, Lokasi Kec. Sungai Bungkal	620/05/KONTRAK/01.01/DPUPR-3/XII/2021	Rabu, 01 Desember 2021	CV. ALEXANDER ENGINEERING CONSULTANTS,	49.995.000,00
26	Perencanaan Peningkatan Jl. Lingkar Bukit Sentong, Lokasi Kec. Sungai Bungkal	620/08/KONTRAK/01.01/DPUPR-3/XII/2021	Rabu, 01 Desember 2021	CV. VIRAL TEKNIK KONSULTAN,	49.912.500,00
27	Perencanaan Pembangunan Tombok Penahan Jl. Puncak Sentong, Lokasi Kec. Sungai Bungkal	620/11/KONTRAK/01.01/DPUPR-3/XII/2021	Kamis, 02 Desember 2021	CV. MEGA CIPTA KONSULTAN,	49.929.000,00
28	Perencanaan Jalan Sungai Liuk - KM 11, Lokasi Kec. Pesisir Bukit	620/12/KONTRAK/01.01/DPUPR-3/XII/2021	Kamis, 02 Desember 2021	CV. ELSANA CIPTA PRIMA,	99.935.000,00
29	Perencanaan Rehabilitasi Jl. Hos Cokroaminoto, Lokasi Kota Sungai Penuh	620/12/KONTRAK/01.01/DPUPR-3/XII/2021	Jumat, 03 Desember 2021	CV. SYANDANANIRWASITA INDOTECH,	49.995.000,00
30	Perencanaan Rehabilitasi Jl. Wahid Hasyim, Lokasi Kec. Pesisir Bukit	620/13/KONTRAK/01.01/DPUPR-3/XI/2021	Rabu, 08 Desember 2021	CV. SYANDANANIRWASITA INDOTECH,	49.989.500,00
31	Perencanaan Rehabilitasi Jl. Ade Irma Suryani dan Dusun Emph, Lokasi Kec. Sungai Bungkal	620/06/KONTRAK/01.01/DPUPR-3/XII/2021	Kamis, 09 Desember 2021	CV. SHIFA CIPTA ASRI CONSULTANT,	49.918.000,00
32	Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkar Kantor PU, Lokasi Kota Sungai Penuh	620/13-KONTRAK/15.01/DPUPR-3/IV/2020	Jumat, 24 April 2020	CV. SYANDANANIRWASITA INDOTECH	53.015.322,78
33	Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Sungai Jeruang, Lokasi Kota Sungai Penuh	620/02-PRN/SPK/DPUPR-3/IV/2018	Senin, 02 April 2018	CV. ALEXANDER ENGINEERING CONSULTANTS	97.982.360,62
34	Perencanaan Pembangunan Jembatan RKE 2	620/01-PRNJBT/SPK/DPUPR-3/VII/2019	Kamis, 18 Juli 2019	CV. WASCO ENGINEERING	122.319.468,55
35	Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Dusun Tuo - Berek Pesisir Bukit, Lokasi Kec. Pesisir Bukit	620/03-PRNJBT/KONTRAK/DPUPR-3/VII/2019	Rabu, 31 Juli 2019	CV. AGUNG KARYA SEMPURNA	83.427.892,14
36	Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Muara Sangkir, Lokasi Kota Sungai Penuh	620/20/KONTRAK/18.02/DPUPR-3/IV/2020	Selasa, 28 April 2020	CV. AGUNG KARYA SEMPURNA	113.710.600,00
37	Perencanaan Penggantian Jembatan Ulu Air - Bukit Khayangan, Lokasi Kota Sungai Penuh	620/01/KONTRAK/01.01/DPUPR-3/III/2021	Senin, 22 Februari 2021	CV. AGUNG KARYA SEMPURNA	99.946.000,00
38	Perencanaan Sumur Bor Kecamatan Pondok Tinggi, Lokasi Kecamatan Pondok Tinggi	640/39-KONTRAK-PL-APBD/DPUPR-4/XI/2020	Jumat, 06 November 2020	CV. DWI ENGINEERING CONSULTANTS	102.626.690,88
39	DED Bendung Sungai Ampuh, Lokasi Kec. Pondok Tinggi	610/32/KONTRAK-KONSUL/DPUPR-2/2017	Minggu, 01 Januari 1900	PT. TATA BUMI KONSULTAN	111.202.250,50
40	DED Bendung Sungai Jernih, Lokasi Kec. Pondok Tinggi	610/33/KONTRAK-KONSUL/DPUPR-2/2017	Selasa, 07 November 2017	PT. TATA BUMI KONSULTAN	110.372.706,30
41	SID Check Dam Sungai Nua, Lokasi Kota Sungai Penuh	610/06/SPK-KONSUL/SDA/DPUPR-2/2018	Senin, 02 April 2018	CV. MARCHINDO CONSULTANT	56.492.749,97
42	Perencanaan Pintu Air Kecamatan Tanah Kampung	610/07/SPK-KONSUL/SDA/DPUPR-2/2018	Senin, 02 April 2018	CV. PASIFIC NUSA CONSULTINDO	56.390.961,23
43	Perencanaan pintu air desa tanjung muda	610/08/SPK-KONSUL/SDA/DPUPR-2/2018	Senin, 02 April 2018	CV. PASIFIC NUSA CONSULTINDO	56.301.613,34
44	SID Check Dam Sungai Ampuh	610/04/kontrak-KONSUL/DPUPR-2/2018	Rabu, 02 Mei 2018	CV. GUNUNG KENCANA	225.744.802,68
45	DED Pembangunan embung Ulu Air	610/09/KONTRAK-KONSUL/DPUPR-2/2018	Kamis, 17 Mei 2018	PT. CITRAWEEES SALAWASNA	338.786.851,91
46	SID Di Kec. Tanah Kampung, Lokasi Kec. Tanah Kampung	610/010/SPK-IV/DPUPR-2/VIII/2019	Senin, 26 Agustus 2019	PT. ALOCITA MANDIRI	225.418.023,43
47	SID Di Simpang III, Lokasi Kec. Hamparan Rawang - Sungai Penuh	610/003/SPK-IV/DPUPR-2/VI/2020	Selasa, 12 Mei 2020	PT. ALOCITA MANDIRI	205.852.990,56
48	DED Di Ulu Air, Lokasi Kec. Kumun Debai - Sungai Penuh	610/002/SPK-III/DPUPR-2/VI/2021	Senin, 12 April 2021	PT. ANDRA CIPTA CONSULT	123.475.000,00
49	DED Di Dusun Baru, Lokasi Kec. Sungai Bungkal - Sungai Penuh	610/001/SPK-III/DPUPR-2/VI/2021	Senin, 12 April 2021	PT. ALOCITA MANDIRI	133.760.000,00
50	SID Di Koto Baru, Lokasi Kec. Koto Baru - Sungai Penuh	610/003/SPK-III/DPUPR-2/VI/2021	Senin, 12 April 2021	PT. JASAPLAN REKANAN UTAMA	174.350.000,00
51	SID Di Sungai Pengasah, Lokasi Kec. Koto Baru - Sungai Penuh	610/005/SPK-III/DPUPR-2/VI/2021	Senin, 12 April 2021	PT. JASAPLAN REKANAN UTAMA	174.350.000,00
52	SID Di Pemancar TVRI - Arah Seratus, Lokasi Kec. Hamparan Rawang	610/004/SPK-III/DPUPR-2/VI/2021	Senin, 12 April 2021	PT. JASAPLAN REKANAN UTAMA	192.885.000,00
53	Perencanaan Penahan Tebing dan Saluran Jalan Aur Duri - Karya Bakti Lokasi Kota Sungai Penuh	620/07-PRNRHBJLN/KONTRAK/DPUPR-3/VII/2019	Senin, 29 Juli 2019	CV. AMARYAN JAYA	110.693.931,07
54	SID Drainase Simpang V Koto Renah, Lokasi Kec. Pesisir Bukit	650/34/KONTRAK-KONSUL/DPU-2/2016	Selasa, 20 September 2016	CV. GUNUNG KENCANA	124.650.000,00

NO	URAIAN	NO. KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	KONTRAKTOR	JUMLAH
55	DED Rehabilitasi Saluran Drainase/ Trotoar Desa Sumur Gedang, Lokasi Kota Sungai Penuh	650/01/SPK/DPUPR-5/VI/2018	Jumat, 20 Juli 2018	CV. WASCO ENGINEERING	112.281.054,15
56	DED Pembangunan Embung, Lokasi Kota Sungai Penuh (Koreksi BPK 2018)		Minggu, 01 Januari 1900	PT. CITRAWEEES SALAWASNA	333.899.962,12
57	Perencanaan Rehabilitasi Bak Penampung Air Pemadam Kebakaran Kelurahan Dusun Baru, Desa Sumur Anyir, Samping Kantor Dinas PTSP Kab Kerinci, Lokasi Kota Sungai Penuh	640/28-KONTRAK-PL-APBDP/DPUPR-4/XI/2020	Senin, 09 November 2020	CV. YAGANA CONSULINDO	51.952.816,31
58	Perencanaan Pembangunan BAK Penampung Air Pemadam Kebakaran Dusun Jembatan Satu Desa Pelayang Raya Samping Kantor Dinas Perhubungan Kab. Kerinci Desa Koto Dua Sungai Liuk Lokasi Kota Sungai Penuh	640/38-KONTRAK-PL-APBDP/DPUPR-4/XI/2020	Selasa, 17 November 2020	CV. SARUGA ENGINEERING CONSULTANT	46.754.669,11
59	Perencanaan Rehabilitasi Drainase / Trotoar Bukit Siliang - Jl. Muradi (Depan Bioskop Purnama), Lokasi Kec. Sungai Bunkal - Sungai Penuh	650/09/KONTRAK-KONSL-PL/DPUPR-5/VIII/2019	Jumat, 02 Agustus 2019	CV. TEKNISIA PLAN	89.421.492,69
60	DED Saluran Induk (SI) Drainase Tanah Kampung - Kumun Debai - Merao, Lokasi Kota Sungai Penuh	650/13/KONTRAK-KONSL-PL/DPUPR-5/VIII/2019	Senin, 19 Agustus 2019	PT. ARCHIPTA CONSULTINDO	140.404.335,14
61	Perencanaan Rehabilitasi Drainase / Trotoar Simpang III Rawang Desa Cempaka - Air Sesat, Lokasi Kota Sungai Penuh	650/14/KONTRAK-KONSL-PL/DPUPR-5/VIII/2019	Senin, 19 Agustus 2019	PT. ARCHIPTA CONSULTINDO	139.087.221,30
62	DED Upgrading IPA Tanah Kampung, Lokasi Kecamatan Tanah Kampung	640/05-KONTRAK-PL/DPUPR-4/N/2020	Senin, 18 Mei 2020	CV. CENDEKIA CONSULTANT	102.853.214,88
63	DED Upgrading IPA Rawang 20 Menjadi 50 Liter / Detik, Lokasi Kecamatan Hamparan Rawang	640/08-KONTRAK-PL/DPUPR-4/N/2020	Rabu, 27 Mei 2020	CV. LINGKAR NUSA CONSULTANT	102.898.519,66
64	Perencanaan Tangki Septic Dusun Air Sesat Desa Simpang Tiga Rawang Kecamatan Hamparan Rawang, Lokasi Kec. Hamparan Rawang	640/012/KONTRAK/DPUPR-4/XI/2017	Senin, 13 November 2017	CV. GRAHA ADHICPTA KONSULTAN	99.880.000,00
65	Perencanaan Pembangunan Jaringan Distribusi Air Bersih/ Air Minum, Lokasi Dalam Kota Sungai Penuh	640/007/KONTRAK/DPUPR-4/VI/2017	Selasa, 11 April 2017	PT. TATABUMI KONSULTAN	591.784.672,00
66	Perencanaan Pembangunan Pengembangan Jaringan Distribusi Air Minum / Air Bersih Kec. Tanah Kampung, Lokasi Kecamatan Tanah Kampung	640/10-KONTRAK-PL/DPUPR-4/N/2020	Rabu, 27 Mei 2020	CV. HEXA MITRAINDO	102.909.845,86
67	Perencanaan Pembangunan Pengembangan Jaringan Distribusi Air Minum / Air Bersih Kecamatan Hamparan Rawang, Lokasi Kecamatan Hamparan Rawang	640/11-KONTRAK-PL/DPUPR-4/N/2020	Rabu, 27 Mei 2020	CV. HEXA MITRAINDO	102.909.845,86
68	Perencanaan DED Perluasan SPAM dan Jaringan Perpipaan Dalam Kecamatan Hamparan Rawang	640/39-KONTRAK-PL/DPUPR-4/XI/2021	Selasa, 30 November 2021	CV. REKACIPTA TEKNIK KONSULTAN	97.790.000,00
69	Belanja Perencanaan DED Penggantian Pipa Dalam Pelayanan Wilayah Kota Sungai Penuh, Lokasi Kota Sungai Penuh	640/37-KONTRAK-PL/DPUPR-4/XI/2021	Selasa, 30 November 2021	CV. MEDIA TEKNIK KONSULTAN	99.440.000,00
70	Perencanaan Pembangunan Pengembangan Jaringan Distribusi Air Minum / Air Bersih Kec. Sungai Penuh, Lokasi Kec. Sungai Penuh	640/19-KONTRAK-PL/DPUPR-4/VI/2021	Selasa, 13 Juli 2021	CV. HAFILIA	97.537.000,00
71	Perencanaan Pembangunan Pengembangan Jaringan Distribusi Air Bersih/ Air Minum Kec. Pesisir Bukit Lokasi Kec. Pesisir Bukit	640/08/KONTRAK-KONSL/DPUPR-4/VI/2018	Rebu, 11 Juli 2018	PT. MATRASARAKAN SINERGITA	173.219.688,02
72	DED Upgrading IPA Kecamatan Kumun Debai, Lokasi Kecamatan Kumun Debai	640/23-KONTRAK-PL-APBDP/DPUPR-4/XI/2020	Jumat, 06 November 2020	CV.HAFILIA	102.955.150,66
73	Pek. Perencanaan Pembangunan Pengembangan Jaringan Distribusi Air Minum / Air Bersih Kec. Kumun Debai	640/05-KONTRAK/DPUPR-4/III/2021	Senin, 22 Maret 2021	CV. HAFILIA	97.702.000,00
74	Perencanaan DED Perluasan SPAM dan Jaringan Perpipaan Desa Muara Jaya, Desa Ulu Air, Desa Pinggir Air, Desa Debai dan Desa Gedang, Lokasi Kota Sungai Penuh	640/29-KONTRAK-PL/DPUPR-4/XI/2021	Selasa, 30 November 2021	CV. PRATAMA KONSULTAN	97.757.000,00
75	Perencanaan GOR Kemenangan Kota Sungai Penuh, Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta 2022	640/37-KONTRAK-PL-KONSUL/DPUPR-4/XI/2022	Senin, 28 November 2022	CV PASIFIC NUSA CONSULTINDO	97.757.700,00
76	Perencanaan Gedung Pertemuan Rumah Dinas Wako, Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta 2022	640/38-KONTRAK-PL-KONSUL/DPUPR-4/XI/2022	Jumat, 25 November 2022	CV CAKRA TRIHANDA KONSULTAN	97.746.600,00
77	Perencanaan Rumah Dinas Sekretaris Daerah, Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta 2022	640/04-KONTRAK-KONSUL/DPUPR-4/VI/2022	Senin, 08 Agustus 2022	CV ALTAAF RAYA ENGINEERING	123.765.000,00
78	Perencanaan Rumah Dinas Pemkot Koto Keras, Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta 2022	640/36-KONTRAK-PL-KONSUL/DPUPR-4/XI/2022	Jumat, 25 November 2022	CV PAKARIN KONSULTAN	97.724.400,00
79	Perencanaan Halaman Upacara Kantor Walikota, Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta 2022	640/39-KONTRAK-KONSUL/DPUPR-4/XI/2022	Jumat, 25 November 2022	CV NURIZKAY KONSULTAN	97.725.066,00
80	Pek Perencanaan Sayap Bendung Sungai Bungkal, Lokasi Kec Sungai Bungkal, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta 2022	610/016a/SPK-IV/DPUPR-2/XII/2022	Jumat, 25 November 2022	PT RANGGE CONSULTANT ENGINEERING	99.289.500,00
81	Perencanaan Pasar Kuliner Kota Sungai Penuh, Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta 2022	640/01-KONTRAK-KONSUL/DPUPR-4/VI/2022	Selasa, 29 November 2022	CV NURIZKAY KONSULTAN	144.744.000,00
82	DED Penggantian Pipa Tersier Dalam Wilayah Pelayanan Kota Sungai Penuh, Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta 2022	640/06-KONTRAK-PL-KONSUL/DPUPR-4/IX/2022	Selasa, 29 November 2022	CV DINAMIKA TEKNIK	250.249.500,00
83	Pek DED Di Muara Jaya III Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta 2022	610/001/SPPBJ-III/DPUPR-2/VI/2022	Selasa, 08 November 2022	CV CITRA NUGRAHA KONSULTAN	133.743.900,00
84	Pembayaran (100%), Pek Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Batang Merao XV Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta 2022	620/18/SPK-Pr/0101/DPUPR-3/XI/2022	Senin, 28 November 2022	CV WIDYADHANA KONSULTAN	97.133.432,97
85	Perencanaan Mall Pelayanan Publik, Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta 2022	640/07-KONTRAK-KONSUL/DPUPR-4/X/2022	Jumat, 07 Oktober 2022	CV FAJAR BAHARI	300.366.000,00
86	Perencanaan Kantor Camat Sungai Penuh, Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta 2022	640/40-KONTRAK-PL-KONSUL/DPUPR-4/XI/2022	Jumat, 25 November 2022	CV DINAMIKA TEKNIK	97.690.434,00
87	Pek Perencanaan Drainase Ji RE Martadinata, Lokasi Kec Pesisir Bukit, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta 2022	650/18/KONTRAK-KONSL/DPUPR-5/VIII/2022	Kamis, 11 Agustus 2022	CV ACTIVA ENGINEERING CONSULTANT	195.394.076,21
88	Pek Perencanaan Pembangunan Jalan Bukit Batu, Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta 2022	620/20/SPK-Pr/0101/DPUPR-3/XI/2022	Senin, 28 November 2022	CV WIDYADHANA KONSULTAN	121.421.508,91
89	Pek Perencanaan Rehabilitasi Jalan Jenderal Sudirman Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta 2022	620/15/SPK-Pr/0101/DPUPR-3/VIII/2022	Jumat, 05 Agustus 2022	CV FAJAR BAHARI	60.716.820,07
90	Renovasi Kantor Camat Sungai Penuh (Tahap I), Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta 2023	640/09-KONTRAK/DPUPR-4/X/2023	Kamis, 12 Oktober 2023	CV. BAROKAH PUTRAJAYA MANDIRI	921.597.791,79
91	Perencanaan Penyusunan RISPAM Kota Sungai Penuh, Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta 2023	640/05-KONTRAK-KONSUL/DPUPR-4/X/2023	Selasa, 03 Oktober 2023	PT. GALUNI MALAYA SAKTI	289.973.634,00
92	Perencanaan Review RISPAL Kota Sungai Penuh, Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta 2023	640/06-KONTRAK-KONSUL/DPUPR-4/X/2023	Rabu, 04 Oktober 2023	CV. LINGKAR NUSA PRIMACONS	182.068.470,00
93	Perencanaan DED Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kec. Pesisir Bukit dan Kec. Koto Baru, Lokasi Kec. Koto Baru, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta 2023	640/09-KONTRAK-PL-KONSUL/DPUPR-4/XII/2023	Senin, 04 Desember 2023	PT. GALUNI MALAYA SAKTI	106.142.902,00

NO	URAIAN	NO. KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	KONTRAKTOR	JUMLAH
94	Perencanaan DED IPAL Kec. Koto Baru, Lokasi Kec. Koto Baru, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta. 2023	640/10 -KONTRAK-PL-KONSULDPUPR-4/XII/2023	Senin, 04 Desember 2023	PT. GALUNI MALAYA SAKTI	56.291.579,00
95	Perencanaan Rehabilitasi Kantor Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta. 2023	640/13-KONTRAK-KONSULDPUPR-4/XII/2023	Jumat, 08 Desember 2023	CV. ALTAAF RAYA ENGINEERING	97.791.000,00
96	Perencanaan Rehabilitasi Kantor Polres Kerinci, Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta. 2023	640/14-KONTRAK-PL-KONSULDPUPR-4/XII/2023	Kamis, 07 Desember 2023	CV. ALTAAF RAYA ENGINEERING	97.791.000,00
97	Perencanaan Rehabilitasi Kantor Kodim, Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta. 2023	640/15-KONTRAK-KONSULDPUPR-4/XII/2023	Jumat, 08 Desember 2023	CV. ALTAAF RAYA ENGINEERING	59.978.850,00
98	Perencanaan Penahan Tebing Air Sempit, Ta. 2024 Lokasi Kec. Hamparan Rawang, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta. 2023	000.3.2/019/SPK-IUDPUPR-2/XII/2023	Kamis, 14 Desember 2023	CV. ACTIVA ENGINEERING CONSULTANT	41.446.299,00
99	Perencanaan Drainase Jalan H. Hasyimi, Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta. 2023	650/32/KONTRAK-KONSUL-PL/DPUPR-5/XII/2023	Jumat, 01 Desember 2023	PT. PRAKARSA ADHICIPTA KONSULTAN	56.677.309,00
100	Perencanaan BOX Culvert Jl. Pendidikan, Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta. 2023	650/05/KONTRAK-KONSUL-PL/DPUPR-5/V/2023	Rabu, 27 Desember 2023	PT. ANIRINDO MITRA KONSULTAN	57.314.928,00
101	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Yos Sudarso Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta. 2023	600/1.9.3/19-PRN-SPK/DPUPR-3/XII/2023	Kamis, 07 Desember 2023	CV. GEOTEKNIK PRIMA RAYA KONSULTANTS	74.998.260,00
102	Perencanaan Trotoar Jl. Pendidikan, Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta. 2023	650/03/KONTRAK-KONSUL-PL/DPUPR-5/V/2023	Senin, 22 Mei 2023	PT. ANIRINDO MITRA KONSULTAN	95.642.958,00
103	Perencanaan Drainase/ Trotoar Jl. Basuki Rahmat Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta. 2023	650/06/KONTRAK-KONSUL-PL/DPUPR-5/V/2023	Selasa, 06 Juni 2023	PT. RANGGE CONSULTANT ENGINEERING	95.713.805,00
104	Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Pengasah, Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta. 2023	600/1.7.1/04/SPK/PRN/DPUPR-3/V/2023	Rabu, 17 Mei 2023	CV. WIDYADHANA KONSULTAN	101.707.714,00
105	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Buaya Ismail Yunus Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta. 2023	600/1.7.1/07/KONTRAKDPUPR-3/V/2023	Kamis, 06 Juli 2023	PT. RANGGE CONSULTANT ENGINEERING	105.446.448,00
106	Perencanaan Revitalisasi Trotoar Jl. A.Thalib, Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta. 2023	650/07/KONTRAK-KONSUL-PL/DPUPR-5/V/2023	Selasa, 06 Juni 2023	PT. ANIRINDO MITRA KONSULTAN	127.417.675,00
107	Perencanaan Revitalisasi Trotoar Jl. Yos Sudarso, Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta. 2023	650/08/KONTRAK-KONSUL-PL/DPUPR-5/V/2023	Kamis, 29 Juni 2023	PT. YASA KREASINDO CEMERLANG	127.488.521,00
108	Perencanaan Revitalisasi Trotoar Jl. Pancasila, Lokasi Kec. Pondok Tinggi, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta. 2023	650/04/KONTRAK-KONSUL-PL/DPUPR-5/V/2023	Rabu, 24 Mei 2023	CV. LATHISA TEKNIK	127.523.945,00
109	Perencanaan Drainase Jl. KH Ahmad Dahlan, Lokasi Kec. Pesisir Bukit, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta. 2023	650/04/KONTRAK-KONSUL-PL/DPUPR-5/V/2023	Rabu, 24 Mei 2023	CV. LATHISA TEKNIK	127.382.251,00
110	Perencanaan Revitalisasi Trotoar Jl. Depati Parbo, Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta. 2023	650/09/KONTRAK-KONSUL-PL/DPUPR-5/V/2023	Jumat, 09 Juni 2023	CV. ACTIVA ENGINEERING CONSULTANT	126.709.208,00
111	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Koto Dua, Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta. 2023	600/1.9.3/09/PRN/SPK/DPUPR-3/XII/2023	Jumat, 01 Desember 2023	CV. ELNIWSA KONSULTAN	49.846.770,00
112	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Ulu Sungai Ampuh, Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta. 2023	600/1.9.3/09/PRN/SPK/DPUPR-3/XII/2023	Jumat, 01 Desember 2023	CV. ELNIWSA KONSULTAN	49.846.770,00
113	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Rawa Arah Seratus Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta. 2023	600/1.9.1/11-PRN-SPK/DPUPR-3/XI/2023	Jumat, 01 Desember 2023	CV. CITRA NUGRAHA KONSULTAN	49.944.450,00
114	Perencanaan Jl. H. Agus Salim Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta. 2023	600/1.9.3/18-PRN-SPK/DPUPR-3/XII/2023	Kamis, 07 Desember 2023	CV. SYANDANANIRWASITA INDOTECH	49.997.730,00
115	Perencanaan Jl. Teuku Umar Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta. 2023	600/1.9.3/09/PRN/SPK/DPUPR-3/XII/2023	Jumat, 01 Desember 2023	PT. PRAKARSA ADHICIPTA KONSULTAN	49.997.730,00
116	Perencanaan Rekonstruksi Jalan Batang Sipinang, Lokasi Kota Sungai Penuh, Dinas PUPR Kota Sungai Penuh Ta. 2023	600/1.9.3/09/PRN/SPK/DPUPR-3/XII/2023	Jumat, 01 Desember 2023	PT. PRAKARSA ADHICIPTA KONSULTAN	49.728.000,00
117	Perencanaan Pembangunan Tembok Banjir Sungai Batang Sangkir	000.3.2/002/SPK-II/VII/2024/DPUPR-2	Selasa, 30 Juli 2024	CV. INDO FAYYAD ENGINEERING	112.554.898,27
118	Perencanaan Pembangunan Bronjong Pelayang Raya	000.3.2/001/SPK-Perorangan/III/2024/DPUPR-2	Selasa, 05 Maret 2024		49.686.631,68
119	Perencanaan Pembangunan Tembok Penahan Sungai Ampuh	000.3.2/002/SPK-Perorangan/III/2024/DPUPR-2	Selasa, 05 Maret 2024		49.686.631,68
120	Perencanaan Pembangunan Tembok Penahan Sungai Terung	000.3.2/005/SPK-Perorangan/IV/2024/DPUPR-2	Kamis, 18 April 2024		49.686.631,68
121	Perencanaan Pembangunan Tembok Penahan Desa Aur Duri	000.3.2/006/SPK-Perorangan/IV/2024/DPUPR-2	Kamis, 18 April 2024		49.686.631,68
122	Perencanaan Pembangunan Tembok Penahan Sungai Pengasah	000.3.2/007/SPK-Perorangan/IV/2024/DPUPR-2	Kamis, 18 April 2024		49.686.631,68
123	Perencanaan Pembangunan Tembok Penahan Sungai Ning	000.3.2/008/SPK-Perorangan/IV/2024/DPUPR-2	Kamis, 18 April 2024		49.686.631,68
124	Perencanaan Pembangunan Tembok Penahan Sungai Air Sesat	000.3.2/009/SPK-Perorangan/IV/2024/DPUPR-2	Kamis, 18 April 2024		49.686.631,68
125	Perencanaan Pembangunan Tembok Penahan Sungai Batang Bungkal	000.3.2/005/SPK-II/VII/2024/DPUPR-2	Selasa, 30 Juli 2024	CV. ACTIVA ENGINEERING CONSULTANT	112.485.772,95
126	Perencanaan Pembangunan Tembok Penahan Sungai Ulu Air	000.3.2/004/SPK-II/VII/2024/DPUPR-2	Senin, 29 Juli 2024	CV. DINAMIKA TEKNIK	112.573.750,65
127	Perencanaan Pembangunan Tembok Penahan Tebing Sungai Balang Merao	000.3.2/003/SPK-II/VII/2024/DPUPR-2	Selasa, 30 Juli 2024	CV. INDO FAYYAD ENGINEERING	112.554.898,28
128	DED Retensi Koto Baru	000.3.3/002/SPK-II/VIII/2024/DPUPR-2	Rabu, 07 Agustus 2024	PT. ALOCITA MANDIRI	199.372.683,48
129	Review DED Embung Ulu Air	000.3.3/004/SPK-II/VIII/2024/DPUPR-2	Rabu, 07 Agustus 2024	PT. PRAKARSA ADHICIPTA KONSULTAN	299.505.548,59
130	DED-Checkdam Ulu Air-Muara Java	000.3.2/005/SPK-II/VIII/2024/DPUPR-2	Selasa, 20 Agustus 2024	CV. INDOFAYYAD ENGINEERING	348.055.921,65
131	Perencanaan IPAL Komunal	640/07-PL-KONSUL-KONTRAKDPUPR-4/IX/2024	Kamis, 26 September 2024	CV. BOSCO CONSULTANT	90.879.474,60
132	Perencanaan Pembangunan BOX Culvert Desa Karya Bakti	000.3.2/15/IX/2024/DPUPR-5	Senin, 02 September 2024	ANGGA HENDRA KUSUMAH, ST	52.134.278,69
133	Perencanaan Pembangunan BOX Culvert Dusun Bukit Padon Desa Karya Bakti	000.3.2/16/IX/2024/DPUPR-5	Senin, 02 September 2024	MOHAMMAD YUDA, ST	57.805.642,80
134	Perencanaan Pembangunan Drainase Jl. Gajah Mada (Desa Karya Bakti)	000.3.2/22/KONTRAK-KONSUL-PL/VIII/2024/DPUPR-5	Kamis, 22 Agustus 2024	CV. ALTAAF RAYA ENGINEERING	116.394.432,04
135	Perencanaan Pembangunan Drainase Jl. KH Ahmad Dahlan	000.3.2/18/KONTRAK-KONSUL-PL/VIII/2024/DPUPR-5	Selasa, 20 Agustus 2024	CV. JASA GRAHA KONSULTINDO	109.342.339,87
136	Perencanaan Pembangunan Drainase Jl. Pancasila (AMIK - Jembatan Kerinduan)	000.3.2/17/KONTRAK-KONSULDPUPR-5/III/2024	Selasa, 20 Agustus 2024	CV. ALTAAF RAYA ENGINEERING	182.586.346,59
137	Perencanaan Pembangunan Trotoar Jl. Depati Dua Nenek (Desa Koto Limau Manis - Desa Sri Menanti)	000.3.2/20/KONTRAK-KONSUL-PL/VIII/2024/DPUPR-5	Rabu, 21 Agustus 2024	CV. CITRA NUGRAHA KONSULTAN	94.458.934,27
138	Perencanaan Pembangunan Trotoar Jl. MH Thamrin (Desa Simpang Tiga Rawang)	000.3.2/21/KONTRAK-KONSUL-PL/VIII/2024/DPUPR-5	Kamis, 22 Agustus 2024	CV. BAKTI PARAMUDA	109.328.375,33
139	Perencanaan Rehabilitasi Trotoar Jl. Proklamasi	000.3.2/24/KONTRAK-KONSUL-PL/IX/2024/DPUPR-5	Selasa, 10 September 2024	CV. ACTIVA ENGINEERING CONSULTANT	91.537.552,73
140	Perencanaan Trotoar Jl Hos Cokroaminoto (Section R)	000.3.2/26/XI/2024/DPUPR-5	Selasa, 19 November 2024	JULIANTO, ST	28.306.497,84
141	Perencanaan Trotoar Jl. Patimura (Section R)	000.3.2/27/XI/2024/DPUPR-5	Selasa, 19 November 2024	JULIANTO, ST	28.306.497,84
142	PERENCANAAN TROTOAR JL. GAJAH MADA	000.3.2/25/XI/2024/DPUPR-5	Selasa, 19 November 2024	JULIANTO, ST	28.306.497,84
143	Rehabilitasi Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hutanikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kota Sungai Penuh (Tahap I)	640/04-KONTRAK/ADD1/DPUPR-4/XI/2024	Selasa, 29 Oktober 2024	CV. MULYA AKBAR	473.205.320,58
144	Rehabilitasi Gedung Nasional (Tahap II)	640/03-KONTRAK/ADD1/DPUPR-4/X/2024	Jumat, 18 Oktober 2024	CV. RAFKA BERKAH	326.722.715,89
145	Pembangunan Kantor Camat Sungai Penuh (Tahap II)	640/05-KONTRAK/ADD2/DPUPR-4/XII/2024	Jumat, 20 Desember 2024	CV. MONICA	1.513.905.915,76

NO	URAIAN	NO. KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	KONTRAKTOR	JUMLAH
146	Rehabilitasi Kantor DPRD Kota Sungai Penuh (Tahap II)	640/06-KONTRAK/ADD1/DPUPR-4/XI/2024	Senin, 25 November 2024	CV. RIZKI	1.082.288.030,19
147	Rehabilitasi Kantor Lurah Dusun Baru (Tahap I)	640/22-PL-KONTRAK/DPUPR-4/ADD1/XI/2024	Minggu, 22 Desember 2024	CV. AQIF	258.092.325,58
148	Perencanaan Pelebaran Jalan Cut Nyak Dien	600.1.7.1/11/KONTRAK/DPUPR-3/VI/2024	Jumat, 14 Juni 2024	CV. GRAHA CIPTA CONSULTANT	56.761.189,96
149	Perencanaan Pelebaran Jalan DR. Soetomo	600.1.7.1/12/KONTRAK/DPUPR-3/VI/2024	Jumat, 14 Juni 2024	CV. NURIZKAY KONSULTAN	56.777.583,39
150	Perencanaan Pelebaran Jalan M. Noeh	600.1.7.1/10/KONTRAK/DPUPR-3/VI/2024	Jumat, 14 Juni 2024	CV. ALEXANDER ENGINEERING CONSULTANTS	56.748.578,56
151	Perencanaan Pelebaran Jalan Puskesmas koto lolo	600.1.7.1/17/KONTRAK/DPUPR-3/VIII/2024	Rabu, 14 Agustus 2024	CV. ALEXANDER ENGINEERING CONSULTANTS	56.748.578,56
152	Perencanaan Jalan Puncak Sentiong	600.1.7.1/18/KONTRAK/DPUPR-3/IX/2024	Selasa, 10 September 2024	CV. SYANDANANIRWASITA INDOTECH	56.802.804,98
153	Perencanaan Pembangunan Jalan Kawasan Batu Sorban	600.1.7.1/01/PRN/KONTRAK/DPUPR-3/VIII/2024	Selasa, 20 Agustus 2024	PT. RANGGE CONSULTAN	227.057.368,22
154	Perencanaan Pembangunan Jalan Kuburan Pariaman	600.1.7.1/15/KONTRAK/DPUPR-3/VIII/2024	Rabu, 14 Agustus 2024	CV. WIDYADHANA KONSULTAN	113.598.043,48
155	Perencanaan Pembangunan Jalan Produksi desa Koto Bertu	600.1.7.1/08/KONTRAK/DPUPR-3/VI/2024	Jumat, 14 Juni 2024	CV. INDO FAYYAD ENGINEERING	113.560.211,10
156	Perencanaan Rehabilitasi Jalan Koto Padang	600.1.7.1/13/KONTRAK/DPUPR-3/VI/2024	Jumat, 14 Juni 2024	CV. REKANS TRI PERKASA	56.710.746,18
157	Perencanaan Rehabilitasi jalan Timbangan	600.1.7.1/09/KONTRAK/DPUPR-3/VI/2024	Jumat, 14 Juni 2024	CV. WIDYADHANA KONSULTAN	113.596.782,41
158	Perencanaan Rekonstruksi Jalan lingk Pesisir Bukit	600.1.7.1/04/KONTRAK/DPUPR-3/VI/2024	Jumat, 14 Juni 2024	CV. INDO FAYYAD ENGINEERING	113.537.511,67
159	Perencanaan Penggantian Jembatan Sungai Ning III dan IV	600.1.7.1/16/KONTRAK/DPUPR-3/VIII/2024	Rabu, 14 Agustus 2024	CV. ALEXANDER ENGINEERING CONSULTANTS	106.941.120,82
160	Perencanaan Penggantian Jembatan Ulu Air II, III dan IV	600.1.7.1/05/KONTRAK/DPUPR-3/VI/2024	Jumat, 14 Juni 2024	CV. WIDYADHANA KONSULTAN	107.032.614,88
161	Perencanaan Rehabilitasi Jembatan Pemuda	600.1.7.1/14/KONTRAK/DPUPR-3/VI/2024	Jumat, 14 Juni 2024	CV. DINAMIKA TEKNIK	107.019.544,30
<b>JUMLAH</b>					<b>25.831.518.460,53</b>

NO	URAIAN	NO. KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	KONTRAKTOR	JUMLAH
<b>II DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN</b>					
1	Perencanaan Jalan dan Drainase Kleurahan Pasar Sungai Penuh	640/SPK/02/PPK/PL/2018	02 Maret 2018	CV. WIDYADHANA KONSULTAN	50.487.904,00
2	Perencanaan Jalan dan Drainase Desa Gedang 1	640/SPK/03/PPK/PL/2018	02 Maret 2018	CV.DJASA MERLANG CONSULTANTS	48.559.723,00
3	Perencanaan Jalan dan Drainase Desa pasar baru 1	640/SPK/04/PPK/PL/2018	02 Maret 2018	CV.DJASA MERLANG CONSULTANTS	47.341.924,00
4	Perencanaan jalan dan drainase desa gedang 2	640/SPK/05/PPK/PL/2018	02 Maret 2018	CV.WIDYADHANA KONSULTAN	50.335.679,00
5	Perencanaan jalan dan drainase desa pasar baru 2	640/SPK/06/PPK/PL/2018	07 Maret 2018	CV.DJASA MERLANG CONSULTANTS	50.487.904,00
6	Pekerjaan Perencanaan Taman Vertikal Jl. Gajah Mada (Kantor Walkota) sesuai dengan Kontrak No. 027/02/KONTRAK-PPK/PERKIM-SPN/2018 tanggal 6 Juli 2018 dari belanja 5.2.2	027/02/KONTRAK-PPK/PERKIM-SPN/2018	07 Maret 2018	CV. GUNUNG KENCANA	149.650.000,00
7	Perencanaan Median Jalan Muradi	20/SPK/PPK/2018	07 Maret 2018	CV. ARCHIDEA MITRA KONSULTANT	49.800.000,00
8	Perencanaan Penyusunan DED,Data Jalan dan Drainase Kec. Pesisir Bukit.	027/04/KONTRAK-CONSULT/DPKPP-SPN 2019	31 Juli 2019	CV. DINAMIKA TEKNIK	219.161.581,00
9	Perencanaan Penyusunan DED,Data Jalan dan Drainase Kec. Tanah Kampang	027/05/KONTRAK-CONSULT/DPKPP-SPN 2019	31 Juli 2019	CV. ART CIPTA CONSULTANT	299.266.245,00
10	Perencanaan Penyusunan DED,Data Jalan dan Drainase Kec. Hamparan Rawang	027/02/KONTRAK-CONSULT/DPKPP-SPN 2019	31 Juli 2019	CV. DJASA MERLANG CONSULTANT	351.322.655,00
11	Penyusunan DED, Data Jalan dan Drainase Kecamatan Koto Baru.	027/03/KONTRAK-CONSULT/DPKPP-SPN/2019	01 Agustus 2019	CV. SYANDANANIRWASITA	155.128.765,00
12	Perencanaan Taman, lokasi lapangan Pemda ex. Kantor Bupati	B.000.1.8.1/53/SPK-PRN/XII/2024/Disperkimhan	16 Desember 2024		44.955.000,00
13	Perencanaan Pembangunan Taman Lapangan eks. MTQ lapangan Pemda ex. Kantor Bupati	B.000.1.8.1/54/SPK-PRN/XII/2024/Disperkimhan	30 Desember 2024		99.955.499,97
<b>JUMLAH</b>					<b>1.616.452.879,97</b>
<b>III DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KOTA SUNGAI PENUH</b>					
1	Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Usaha Tani	027/49/SPK/PPK/PPP-SPN/2016	14 November 2016	-	49.720.000,00
2	Jasa Konsultan Jalan Usaha Tani	-	-	-	25.000.000,00
3	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Jalan Pertanian	027/05/PERJANJIAN-PL-KONSULTAN/PPK/DTPHP/2019	27 November 2019	CV. SYANDANANIRWA SITA INDOTECH	26.859.000,00
<b>JUMLAH</b>					<b>101.579.000,00</b>
<b>IV DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA SUNGAI PENUH</b>					
1	Pematangan Lahan dan Tembok Penahan Untuk Pembangunan Gedung Sentral Industri	810/09/PPBJ/SPK/DAGPRIN/2018	05 September 2018	-	374.799.000,00
2	Pekerjaan Pematangan Lahan Sentra Industri / Sanqar Promosi / Lanjutan 2018	002/SPK-PL-KONST/PPK-DAGPRIN/2019	27 Desember 2019	CV. SINAR PEMBANGUNAN KERINCI	463.671.779,00
3	Perencanaan Gedung Sarana Distribusi	027/03/SPK-PL/PPK-DAGPRIN/2023	27 November 2023		24.963.900,00
4	Perencanaan Saung MKS	027/01/SPK-PL/PPK-DAGPRIN/2023	27 November 2023		20.000.000,00
5	Perencanaan UKL - UPL	51.a/SPK/DAGPRIN/2024	16 Desember 2024	MULTIKARYA INTERPLAN KONSULTAN	51.794.820,00
<b>JUMLAH</b>					<b>935.229.499,00</b>
<b>V DINAS PENDIDIKAN KOTA SUNGAI PENUH</b>					
1	Konsultan Perencanaan Pembangunan Lanjutan UKS TK Kartika		10 Desember 2024		15.070.100,00
2	Konsultan Perencanaan Rehab TK Kemala Bhavanokari		10 Desember 2024		15.070.100,00
3	Konsultansi Perencanaan Perencanaan TK Pembina Kec. Pesisir Bukit		10 Desember 2024		15.070.100,00
<b>JUMLAH</b>					<b>45.210.300,00</b>
<b>JUMLAH I+II+III+IV+V+Vh+V</b>					<b>28.529.990.139,50</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP PER SKPD**  
**PER 31 DESEMBER 2024**

NO	Unit Organisasi	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	Akumulasi Penyusutan Tetap Lainnya	Jumlah Akumulasi Penyusutan
1	2	3	4	5	5	6=3+4+5
1	Dinas Pendidikan	48.717.602.409,00	48.579.356.860,13	18.038.500,00	-	97.314.997.769,13
2	Dinas Kesehatan	74.826.025.246,48	666.762.197,00	404.554.004,00	-	75.897.341.447,48
3	Puskesmas Sungai Penuh	1.497.968.513,00	714.494.892,00	83.324.369,00	-	2.295.787.774,00
4	Puskesmas Hamparan Rawang	1.015.069.002,00	1.108.657.422,00	113.318.793,00	-	2.237.045.217,00
5	Puskesmas Kumun Debai	1.121.479.894,00	2.009.344.868,00	119.583.826,00	-	3.250.408.588,00
6	Puskesmas Desa Gedang	1.034.400.272,00	602.566.711,00	114.348.994,00	-	1.751.315.977,00
7	Puskesmas Tanah Kampung	924.349.619,00	1.444.559.132,00	-	-	2.368.908.751,00
8	Puskesmas Koto Baru	832.044.914,00	521.773.974,00	121.847.288,00	-	1.475.666.176,00
9	Puskesmas Sungai Bungkal	696.606.067,00	821.894.043,00	83.324.369,00	-	1.601.824.479,00
10	Puskesmas Sungai Liuk	672.807.980,00	525.930.503,00	87.251.619,00	-	1.285.990.102,00
11	Puskesmas Koto Lolo	671.319.746,00	454.236.263,00	-	-	1.125.556.009,00
12	Puskesmas Pondok Tinggi	674.290.552,00	422.712.618,00	83.324.371,00	-	1.180.327.541,00
13	Puskesmas Tanjung	346.214.365,00	23.022.635,00	-	-	369.237.000,00
14	Instalasi Farmasi	48.371.352,00	373.466.966,00	403.108,00	-	422.241.426,00
15	Laboratorium Kesehatan Daerah	3.020.713.322,00	564.030.734,00	-	-	3.584.744.056,00
16	Rumah Sakit Kelas D Pratama	5.475.285.208,00	8.118.392.125,00	1.679.074.797,00	-	15.272.752.130,00
17	Rumah Sakit Umum Daerah MHAT	120.618.191.071,00	9.840.026.854,00	42.427.182,00	-	130.500.645.107,00
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	42.141.347.198,90	7.571.890.199,45	613.090.666.897,30	1.273.604.999,00	664.077.509.294,65
19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.976.342.837,92	3.080.831.777,66	29.966.471.350,00	-	37.023.645.965,58
20	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	2.058.093.852,07	502.086,00	-	-	2.058.595.938,07
21	Dinas Pemadam Kebakaran	8.861.052.742,94	-	-	-	8.861.052.742,94
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.205.948.003,00	11.433.854,00	16.773.871.638,00	-	18.991.253.495,00
23	Dinas Sosial	1.845.290.038,20	-	475.835,00	-	1.845.765.873,20
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	865.640.418,91	-	-	-	865.640.418,91
25	Dinas Ketahanan Pangan	1.552.905.122,38	63.521.791,00	-	-	1.616.426.913,38
26	Dinas Lingkungan Hidup	14.911.631.198,74	743.141.443,00	845.393.344,00	-	16.500.165.985,74
27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.351.331.290,94	-	27.349.987,00	-	3.378.681.277,94
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.598.118.308,00	-	-	-	2.598.118.308,00
29	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.433.678.312,36	489.732.163,00	-	-	6.923.410.475,36
30	Dinas Perhubungan	3.239.529.744,07	4.780.101.060,64	42.924.506,00	-	8.062.555.310,71
31	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	6.034.320.613,04	36.994.271,00	18.793.500,00	39.927.740,00	6.130.036.124,04
32	Dinas Koperasi dan UKM	939.102.892,00	-	-	-	939.102.892,00
33	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	1.663.625.890,73	26.000.000,00	2.682.084,00	-	1.692.307.974,73
34	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.713.826.525,00	5.092.117.807,00	-	-	6.805.944.332,00
35	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.372.666.809,68	2.709.083.583,00	1.162.399.116,00	23.037.887,00	5.267.187.395,68
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.511.953.646,69	1.284.410.665,00	-	-	2.796.364.311,69
37	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	5.019.453.916,12	1.341.550.705,00	16.082.865.498,00	131.576.975,00	22.575.447.094,12
38	Dinas Peternakan dan Perikanan	2.520.487.533,30	494.179.374,00	1.129.284.343,00	16.104.031,00	4.160.055.281,30
39	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	5.678.957.945,60	8.044.766.090,00	12.086.208,00	-	13.735.810.243,60
40	Bagian Umum	22.317.535.017,00	7.712.456.691,00	1.411.058.334,84	-	31.441.050.042,84
41	Bagian Tata Pemerintahan	452.698.177,93	12.000.000,00	-	-	464.698.177,93
42	Bagian Hukum	590.008.638,83	-	-	-	590.008.638,83
43	Bagian Ekonomi dan Pembangunan	434.727.098,00	-	-	-	434.727.098,00
44	Bagian Kesejahteraan Rakyat	423.697.063,34	-	-	-	423.697.063,34
45	Bagian Humas dan Protokol	879.345.393,41	-	-	-	879.345.393,41
46	Bagian Keuangan	606.927.578,29	-	-	-	606.927.578,29
47	Bagian Organisasi	414.192.680,41	-	-	-	414.192.680,41
48	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	723.814.796,73	-	-	-	723.814.796,73
49	Sekretariat DPRD	10.798.869.587,20	1.469.910.038,00	13.469.403,00	-	12.282.249.028,20
50	Kecamatan Sungai Penuh	678.835.791,35	280.905.641,00	-	-	959.741.432,35
51	Kecamatan Pesisir Bukit	654.039.738,71	5.062.031,00	-	-	659.101.769,71
52	Kecamatan Hamparan Rawang	557.012.389,00	629.554.994,00	1.462.500,00	-	1.188.029.883,00
53	Kecamatan Kumun Debai	701.797.550,00	533.278.613,00	-	-	1.235.076.163,00
54	Kecamatan Tanah Kampung	702.247.323,00	754.066.057,00	-	-	1.456.313.380,00
55	Kecamatan Pondok Tinggi	852.232.578,76	631.434.437,00	-	-	1.483.667.015,76
56	Kecamatan Sungai Bungkal	942.408.106,00	768.526.823,00	-	-	1.710.934.929,00
57	Kecamatan Koto Baru	1.085.644.793,30	815.047.484,00	82.088.540,00	-	1.982.780.817,30
58	Kelurahan Sungai Penuh	310.277.033,00	41.064.690,00	-	-	351.341.723,00
59	Kelurahan Pondok Tinggi	377.605.884,00	-	231.791.699,00	-	609.397.583,00
60	Kelurahan Dusun Baru	382.441.975,30	-	248.874.936,00	-	631.316.911,30
61	Kelurahan Pasar Sungai Penuh	374.571.232,00	-	-	-	374.571.232,00
62	Inspektoraat Daerah	2.449.957.817,90	1.399.725.960,00	-	-	3.849.683.777,90
63	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.002.949.368,70	1.586.661.331,00	8.375.000,00	-	5.597.985.699,70
64	Badan Keuangan Daerah	12.981.098.867,15	53.694.675.181,67	789.296.723,00	-	67.465.070.771,82
65	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	3.506.804.961,00	1.513.626.507,00	-	-	5.020.431.468,00
66	Badan Penelitian dan Pengembangan	1.322.121.436,29	-	-	-	1.322.121.436,29
67	Kantor Kesbangpol	1.309.694.577,42	-	-	-	1.309.694.577,42
	<b>TOTAL</b>	<b>453.521.601.827,09</b>	<b>184.409.482.145,55</b>	<b>684.892.502.662,14</b>	<b>1.484.251.632,00</b>	<b>1.324.307.838.266,78</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
RINCIAN ASET TAK BERWUJUD PER SKPD  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SKPD	Saldo Awal TA 2024	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo Akhir TA 2024
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	Dinas Pendidikan	1.853.349.989,00	0,00	0,00	1.853.349.989,00
2	Dinas Kesehatan	394.470.000,00	0,00	0,00	394.470.000,00
3	RSUD Mayjen H. A. Thalib	127.150.261,00	0,00	0,00	127.150.261,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.556.235.904,18	0,00	0,00	13.556.235.904,18
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.853.604.671,45	0,00	0,00	2.853.604.671,45
6	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	24.800.000,00	0,00	0,00	24.800.000,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran	24.992.000,00	0,00	0,00	24.992.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	59.850.000,00	0,00	0,00	59.850.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	21.700.000,00	0,00	0,00	21.700.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	986.146.014,00	0,00	0,00	986.146.014,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	24.300.000,00	0,00	0,00	24.300.000,00
13	Dinas Perhubungan	450.734.000,00	0,00	0,00	450.734.000,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	215.048.900,00	0,00	0,00	215.048.900,00
15	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	78.750.000,00	0,00	0,00	78.750.000,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	49.200.000,00	0,00	0,00	49.200.000,00
19	Dinas Peternakan dan Perikanan	24.900.000,00	0,00	0,00	24.900.000,00
20	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	397.501.000,00	0,00	0,00	397.501.000,00
21	Bagian Umum	136.000.000,00	0,00	0,00	136.000.000,00
22	Bagian Hukum	30.620.000,00	0,00	0,00	30.620.000,00
23	Bagian Kesejahteraan Rakyat	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
24	Sekretariat DPRD	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
25	Kelurahan Pasar Sungai Penuh	24.800.000,00	0,00	0,00	24.800.000,00
26	Inspektorat Daerah	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.371.914.745,03	0,00	0,00	1.371.914.745,03
28	Badan Keuangan Daerah	671.090.000,00	0,00	0,00	671.090.000,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	22.192.500,00	0,00	0,00	22.192.500,00
30	Badan Penelitian dan Pengembangan	249.260.000,00	0,00	0,00	249.260.000,00
31	Kantor Kesbangpol	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>23.848.609.984,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.848.609.984,66</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN AMORTISASI PER SKPD**  
**PER 31 DESEMBER 2024**

NO	SKPD	HARGA PEROLEHAN	AMORTISASI PER TAHUN					SALDO AWAL TAHUN 2024	BEBAN AMORTISASI TAHUN 2024	AKUMULASI AMORTISASI TA 2024	NILAI BUKU
			s. d 2019	2020	2021	2022	2023				
1	Dinas Pendidikan	1.853.349.989,00	459.872.242,20	165.586.327,80	94.982.327,80	215.512.977,80	275.572.977,80	1.211.526.853,40	219.581.835,60	1.431.108.689,00	422.241.300,00
2	Dinas Kesehatan	394.470.000,00	316.634.000,00	38.918.000,00	38.918.000,00	0,00	0,00	394.470.000,00	0,00	394.470.000,00	0,00
3	Rumah Sakit Mayjen H.A Thalib	127.150.261,00	0,00	0,00	0,00	19.652.252,20	25.430.052,20	45.082.304,40	25.430.052,20	70.512.356,60	56.637.904,40
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.556.235.904,18	8.832.675.728,44	1.663.246.380,84	1.100.530.580,82	859.620.977,14	481.804.913,24	12.937.878.580,48	329.924.323,69	13.267.802.904,18	288.433.000,00
5	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	2.853.604.671,45	1.587.608.802,87	570.720.934,29	570.720.934,29	124.554.000,00	0,00	2.853.604.671,45	0,00	2.853.604.671,45	0,00
6	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	25.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	24.800.000,00	14.880.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00			24.800.000,00	0,00	24.800.000,00	0,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran	24.992.000,00	9.996.800,00	4.998.400,00	4.998.400,00	4.998.400,00		24.992.000,00	0,00	24.992.000,00	0,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	59.850.000,00	30.930.000,00	11.970.000,00	11.970.000,00	4.980.000,00		59.850.000,00	0,00	59.850.000,00	0,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	21.700.000,00	8.680.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00	4.340.000,00		21.700.000,00	0,00	21.700.000,00	0,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	986.146.014,00	773.065.008,40	14.355.002,80	14.355.002,80	0,00	36.874.200,00	838.649.214,00	36.874.200,00	875.523.414,00	110.622.600,00
13	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	24.300.000,00	9.720.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00		24.300.000,00	0,00	24.300.000,00	0,00
14	Dinas Perhubungan	450.734.000,00	165.123.800,00	90.146.800,00	90.146.800,00	90.146.800,00	15.169.800,00	450.734.000,00	0,00	450.734.000,00	0,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	215.048.900,00	91.969.780,00	36.009.780,00	36.009.780,00	23.029.780,00	23.029.780,00	215.048.900,00	5.000.000,00	215.048.900,00	0,00
16	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	78.750.000,00	63.750.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		78.750.000,00	0,00	78.750.000,00	0,00
17	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	25.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	25.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
19	Dinas Perpustakaan dan Arsip	49.200.000,00	9.840.000,00	9.840.000,00	9.840.000,00	9.840.000,00	9.840.000,00	49.200.000,00	0,00	49.200.000,00	0,00
20	Dinas Peternakan dan Perikanan	24.900.000,00	9.960.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00	4.980.000,00		24.900.000,00	0,00	24.900.000,00	0,00
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	397.501.000,00	167.000.400,00	79.500.200,00	79.500.200,00	71.500.200,00		397.501.000,00	0,00	397.501.000,00	0,00
22	Bagian Umum	136.000.000,00	136.000.000,00	0,00	0,00	0,00		136.000.000,00	0,00	136.000.000,00	0,00
23	Bagian Hukum	30.620.000,00	26.646.000,00	3.974.000,00	0,00	0,00		30.620.000,00	0,00	30.620.000,00	0,00
24	Bagian Kesejahteraan Rakyat	60.000.000,00	24.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00		60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
25	Sekretariat DPRD	15.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
26	Kelurahan Pasar Sungai Penuh	24.800.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00	4.960.000,00	24.800.000,00	0,00	24.800.000,00	0,00
27	Inspektorat Kota Sungai Penuh	25.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00
28	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	1.371.914.745,03	1.178.508.047,02	74.703.349,01	74.703.349,01	44.000.000,00		1.371.914.745,03	0,00	1.371.914.745,03	0,00
29	Badan Keuangan Daerah	671.090.000,00	573.450.000,00	28.360.000,00	28.360.000,00	25.960.000,00	14.960.000,00	671.090.000,00	0,00	671.090.000,00	0,00
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	22.192.500,00	22.192.500,00					22.192.500,00	0,00	22.192.500,00	0,00
31	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	249.260.000,00	99.704.000,00	49.852.000,00	49.852.000,00	49.852.000,00		249.260.000,00	0,00	249.260.000,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>23.848.609.984,66</b>	<b>14.665.167.108,93</b>	<b>2.911.281.174,74</b>	<b>2.273.987.374,72</b>	<b>1.607.787.387,14</b>	<b>895.641.723,24</b>	<b>22.353.864.768,77</b>	<b>616.810.411,49</b>	<b>22.970.675.180,26</b>	<b>877.934.804,40</b>



**Pemerintah Kota Sungai Penuh**  
**Rincian Mutasi Tambah dan Kurang Aset Lain-Lain**  
**Tahun Anggaran 2024**

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi Tambah				Mutasi Kurang				Aset Lain-lain per 31 Desember 2024
			Mutasi dari SKPKD/SKPD	Reklasifikasi	Koreksi	Jumlah	Mutasi dari SKPKD/SKPD	Reklasifikasi	Koreksi	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 : 6)	8	9	10	11 = ( 8 : 10 )	12 = 3 + 7 - 11
1	Dinas Pendidikan	2.863.680.299,12		-	-	-	368.960.000,00	-	294.001.048,00	662.961.048,00	2.200.719.251,12
2	Dinas Kesehatan	-		-	-	-		-	-	-	-
3	Puskesmas Sungai Penuh	7.000.000,00		-	-	-		-	-	-	7.000.000,00
4	Puskesmas Kumun Debai	16.737.142,00		-	-	-		-	-	-	16.737.142,00
5	Puskesmas Desa Gedang	567.069.401,74		-	-	-		-	150.719.176,00	150.719.176,00	416.350.225,74
6	Puskesmas Tanah Kampung	19.900.000,00		-	-	-		-	-	-	19.900.000,00
7	Puskesmas Koto Baru	7.805.000,00		-	-	-		-	-	-	7.805.000,00
8	RSUD Mayjen H. A. Thalib	30.318.605.307,00		-	-	-		-	382.160.000,00	382.160.000,00	29.936.445.307,00
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.810.684.884,66		-	2.334.864.300,00	2.334.864.300,00		-	-	-	22.145.549.184,66
10	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	5.001.180,34		-	-	-		-	1.964.750,00	1.964.750,00	3.036.430,34
11	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	33.171.500,00		-	-	-		-	-	-	33.171.500,00
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.416.645,00		-	-	-		-	-	-	4.416.645,00
13	Dinas Sosial	175.364.415,00		-	-	-		-	-	-	175.364.415,00
14	Dinas Ketahanan Pangan	9.158.069,00		-	-	-		-	-	-	9.158.069,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	599.753.124,19		-	-	-		-	36.151.458,00	36.151.458,00	563.601.666,19
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	769.998,00		-	-	-		-	-	-	769.998,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	176.447.234,00		-	-	-		-	2.140.784,00	2.140.784,00	174.306.450,00
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-		-	-	-		-	-	-	-
19	Dinas Perhubungan	2.287.613.594,56		-	-	-		-	2.000.177.545,56	2.000.177.545,56	287.436.049,00
20	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	62.100.013,54		-	-	-		-	43.814.051,00	43.814.051,00	18.285.962,54
21	Dinas Koperasi dan UKM	36.929.249,00		-	-	-		-	-	-	36.929.249,00

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi Tambah				Mutasi Kurang				Aset Lain-lain per 31 Desember 2024
			Mutasi dari SKPKD/SKPD	Reklasifikasi	Koreksi	Jumlah	Mutasi dari SKPKD/SKPD	Reklasifikasi	Koreksi	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 : 6)	8	9	10	11 = ( 8 : 10 )	12 = 3 + 7 - 11
22	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	296.297.292,54		-	-	-		-	287.284.301,00	287.284.301,00	9.012.991,54
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7.972.500,00		-	-	-		-	-	-	7.972.500,00
24	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	61.448.309,00		13.786.100,00	-	13.786.100,00		-	23.934.909,00	23.934.909,00	51.299.500,00
25	Dinas Peternakan dan Perikanan	238.053.500,00		-	-	-		-	54.903.500,00	54.903.500,00	183.150.000,00
26	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	109.106.500,00		-	-	-		-	-	-	109.106.500,00
27	Bagian Umum	(2.735.226.127,81)		-	6.451.193.755,00	6.451.193.755,00		-	-	-	3.715.967.627,19
28	Bagian Tata Pemerintahan	8.441.167,00		-	-	-		-	1.442.833,00	1.442.833,00	6.998.334,00
29	Bagian Hukum	21.000.000,00		-	-	-		-	21.000.000,00	21.000.000,00	-
30	Bagian Kesejahteraan Rakyat	663.190.500,00		-	-	-		-	-	-	663.190.500,00
31	Bagian Keuangan	-		-	-	-		-	-	-	-
32	Bagian Organisasi	26.000.000,00		-	-	-		-	26.000.000,00	26.000.000,00	-
33	Sekretariat DPRD	36.115.383,66		-	-	-		-	-	-	36.115.383,66
34	Kecamatan Sungai Penuh	21.441.350,00		-	-	-		-	-	-	21.441.350,00
35	Kecamatan Pesisir Bukit	28.800.000,00		1.057.282.906,22	-	1.057.282.906,22		-	372.527.893,00	372.527.893,00	713.555.013,22
36	Kecamatan Hamparan Rawang	134.650.000,00		-	-	-		-	99.283.333,00	99.283.333,00	35.366.667,00
37	Kecamatan Kumun Debai	44.450.000,00		-	-	-		-	-	-	44.450.000,00
38	Kecamatan Tanah Kampung	533.760.937,95		-	-	-		-	154.173.126,00	154.173.126,00	379.587.811,95
39	Kecamatan Sungai Bungkal	2.398.000,00		-	-	-		-	-	-	2.398.000,00
40	Kelurahan Sungai Penuh	-		-	-	-		-	-	-	-
41	Kelurahan Pasar Sungai Penuh	1.450.000,00		-	-	-		-	-	-	1.450.000,00
42	Inspektorat Daerah	6.704.538,10		-	-	-		-	2.130.431,00	2.130.431,00	4.574.107,10
43	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23.612.972,00		-	-	-		-	-	-	23.612.972,00
44	Badan Keuangan Daerah	26.590.401.598,26	368.960.000,00	322.500.000,00	-	691.460.000,00		165.000.000,00	500.127.968,00	665.127.968,00	26.616.733.630,26
45	Badan Penelitian dan Pengembangan	116.156.768,20		-	-	-		-	70.995.847,00	70.995.847,00	45.160.921,20

No	SKPD	Saldo Awal	Mutasi Tambah				Mutasi Kurang				Aset Lain-lain per 31 Desember 2024
			Mutasi dari SKPKD/SKPD	Reklasifikasi	Koreksi	Jumlah	Mutasi dari SKPKD/SKPD	Reklasifikasi	Koreksi	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7 = (4 : 6)	8	9	10	11 = ( 8 : 10 )	12 = 3 + 7 - 11
46	Kantor Kesbangpol	181.722.186,28		-	-	-		-	175.421.384,28	175.421.384,28	6.300.802,00
47	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	165.000.000,00		-		-		-	-	-	165.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>83.585.154.432,33</b>	<b>368.960.000,00</b>	<b>1.393.569.006,22</b>	<b>8.786.058.055,00</b>	<b>10.548.587.061,22</b>	<b>368.960.000,00</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>4.700.354.337,84</b>	<b>5.234.314.337,84</b>	<b>88.899.427.155,71</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN ASET TETAP PINJAM PAKAI PER SKPD**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA SATKER</b>	<b>Pinjam Pakai</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh	1.698.495.400,00
2	Bagian Umum	1.721.715.736,90
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	663.190.500,00
4	Dinas Pendidikan	659.240.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
6	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	165.000.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	160.970.250,00
8	Dinas Sosial	160.970.250,00
9	Pengelola Barang Milik Daerah (PBMD)	5.884.674.084,42
	<b>Jumlah</b>	<b>11.114.256.221,32</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN ASET RUSAK BERAT PER SKPD**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA SATKER</b>	<b>Aset Rusak Berat</b>
1	2	3
1	Sekretariat DPRD Kota Sungai Penuh	179.730.555,86
2	Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh	1.416.020.000,00
3	Bagian Umum	4.204.475.455,38
4	Bagian Tata Pemerintahan	33.710.000,00
5	Bagian Hukum	21.000.000,00
6	Bagian Kesejahteraan Rakyat	8.000.000,00
7	Bagian Keuangan	24.500.000,00
8	Bagian Organisasi	26.000.000,00
9	Kecamatan Sungai Penuh	35.441.350,00
10	Kelurahan Pasar Sungai Penuh	1.450.000,00
11	Kelurahan Sungai Penuh	21.400.000,00
12	Kecamatan Hamparan Rawang	134.650.000,00
13	Kecamatan Kumun Debai	44.450.000,00
14	Kecamatan Pesisir Bukit	1.086.082.906,22
15	Kecamatan Tanah Kampung	533.760.937,95
16	Kecamatan Sungai Bungkal	2.398.000,00
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.231.193.471,39
18	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	10.716.812,34
19	Dinas Perhubungan	2.287.613.594,56
20	Puskesmas Sungai Penuh	7.000.000,00
21	Puskesmas Desa Gedang	567.069.401,74
22	Puskesmas Kumun Debai	28.680.000,00
23	Puskesmas Tanah Kampung	19.900.000,00
24	Puskesmas Koto Baru	7.805.000,00
25	Rumah Sakit Umum Mayjen H.A Thalib	30.318.605.307,00
26	Dinas Pendidikan	2.781.536.408,12
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	88.508.615,00
28	Dinas Sosial	116.627.000,00
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	280.605.510,00
30	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	65.740.000,00
31	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
32	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	65.085.600,00
33	Dinas Ketahanan Pangan	51.535.700,00
34	Dinas Peternakan dan Perikanan	238.053.500,00
35	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	109.106.500,00

<b>NO</b>	<b>NAMA SATKER</b>	<b>Aset Rusak Berat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
36	Dinas Koperasi dan UMKM	563.420.000,00
37	Badan Keuangan Daerah	1.052.257.479,84
38	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	296.297.292,54
39	Inspektorat Kota Sungai Penuh	106.756.483,10
40	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	261.378.340,00
41	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	146.626.588,20
42	Dinas Lingkungan Hidup	1.914.776.552,81
43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	7.972.500,00
44	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	181.722.186,28
45	Satuan Polisi Pamong Praja	306.763.937,50
46	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	62.100.013,54
	<b>Jumlah</b>	<b>57.948.522.999,37</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**ASET YANG DISERAHKAN SECARA OPERASIONAL KE PDAM TIRTA KHAYANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA SATKER</b>	<b>Pinjam Pakai</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.960.993.513,27
2	Pengelola Barang Milik Daerah (PBMD) / Badan Keuangan Daerah	20.184.036.016,00
	<b>Jumlah</b>	<b>34.145.029.529,27</b>



**Pemerintah Kota Sungai Penuh**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain**  
**Tahun Anggaran 2024**

*(dalam rupiah)*

NO	SKPD	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	DINAS PENDIDIKAN	3.440.776.408,12	1.240.057.157,00	2.200.719.251,12
2	PUSKESMAS SUNGAI PENUH	7.000.000,00	-	7.000.000,00
3	PUSKESMAS KUMUN DEBAI	28.680.000,00	11.942.858,00	16.737.142,00
4	PUSKESMAS DESA GEDANG	567.069.401,74	150.719.176,00	416.350.225,74
5	PUSKESMAS TANAH KAMPUNG	19.900.000,00	-	19.900.000,00
6	PUSKESMAS KOTO BARU	7.805.000,00	-	7.805.000,00
7	RSUD MAYJEN H. A. THALIB	30.318.605.307,00	382.160.000,00	29.936.445.307,00
8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	22.192.186.984,66	46.637.800,00	22.145.549.184,66
9	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	10.716.812,34	7.680.382,00	3.036.430,34
10	KANTOR KESBANGPOL	181.722.186,28	175.421.384,28	6.300.802,00
11	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	306.763.937,50	273.592.437,50	33.171.500,00
12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	280.605.510,00	276.188.865,00	4.416.645,00
13	DINAS SOSIAL	277.597.250,00	102.232.835,00	175.364.415,00
14	DINAS KETAHANAN PANGAN	51.535.700,00	42.377.631,00	9.158.069,00
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1.914.776.552,81	1.351.174.886,62	563.601.666,19
16	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	65.740.000,00	64.970.002,00	769.998,00
17	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	249.478.865,00	75.172.415,00	174.306.450,00
18	DINAS PERHUBUNGAN	2.287.613.594,56	2.000.177.545,56	287.436.049,00
19	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	62.100.013,54	43.814.051,00	18.285.962,54
20	DINAS KOPERASI DAN UKM	563.420.000,00	526.490.751,00	36.929.249,00
21	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA	296.297.292,54	287.284.301,00	9.012.991,54
22	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	165.000.000,00	-	165.000.000,00
23	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	7.972.500,00	-	7.972.500,00
24	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	65.085.600,00	13.786.100,00	51.299.500,00
25	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	238.053.500,00	54.903.500,00	183.150.000,00
26	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	109.106.500,00	-	109.106.500,00
27	BAGIAN UMUM	9.040.706.592,28	5.324.738.965,09	3.715.967.627,19
28	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	33.710.000,00	26.711.666,00	6.998.334,00
29	BAGIAN HUKUM	21.000.000,00	21.000.000,00	-
30	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	671.190.500,00	8.000.000,00	663.190.500,00
31	BAGIAN ORGANISASI	26.000.000,00	26.000.000,00	-
32	BAGIAN KEUANGAN	24.500.000,00	24.500.000,00	-
33	SEKRETARIAT DPRD	179.730.555,86	143.615.172,20	36.115.383,66
34	KECAMATAN SUNGAI PENUH	35.441.350,00	14.000.000,00	21.441.350,00
35	KECAMATAN PESISIR BUKIT	1.086.082.906,22	372.527.893,00	713.555.013,22
36	KECAMATAN HAMPARAN RAWANG	134.650.000,00	99.283.333,00	35.366.667,00
37	KECAMATAN KUMUN DEBAI	44.450.000,00	-	44.450.000,00
38	KECAMATAN TANAH KAMPUNG	533.760.937,95	154.173.126,00	379.587.811,95
39	KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL	2.398.000,00	-	2.398.000,00
40	KELURAHAN SUNGAI PENUH	21.400.000,00	21.400.000,00	-
41	KELURAHAN PASAR SUNGAI PENUH	1.450.000,00	-	1.450.000,00
42	INSPEKTORAT DAERAH	106.756.483,10	102.182.376,00	4.574.107,10
43	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	261.378.340,00	237.765.368,00	23.612.972,00
44	BADAN KEUANGAN DAERAH	27.120.976.580,26	504.242.950,00	26.616.733.630,26
45	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	146.626.588,20	101.465.667,00	45.160.921,20
<b>JUMLAH</b>		<b>103.207.817.749,96</b>	<b>14.308.390.594,25</b>	<b>88.899.427.155,71</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
REALISASI PROPERTI INVESTASI  
TAHUN ANGGARAN 2024**

No	No. Kode Barang	Nama Jenis Barang	Jenis Pemanfaatan	Dokumen Barang	Alamat Barang	Asal Usul Barang	Tahun	Konstruksi (P, SP, D)	Kondisi (B, RR, RB)	Luas M2	Nilai Barang	Tanggal Kontrak	Nomor Kontrak
<b>Tanah</b>													
1	1.3.3.01.001.004.001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Sewa Guna Usaha		Sungai Penuh	Hibah	31/12/1987			1.230	246.000.000		
2	1.3.3.01.001.004.002	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	Sewa Guna Usaha		Kel. Pasar Sungai Penuh	Hibah	07/03/2023			643	681.000.000		100.3.4.4/02/12/2024/Bakeuda-6
3	1.3.1.01.001.002.007	Tanah Bangunan Terminal Darat	Sewa Guna Usaha		Kumun Hilir/Kumun	Hibah				7.409	403.809.000		
4	01.01.11.02.001	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan	Sewa Guna Usaha		Koto Tinggi	Hibah	16/04/2015			958	368.960.000		
<b>Total Tanah</b>										<b>10.240</b>	<b>1.699.769.000</b>		
<b>Gedung dan Bangunan</b>													
1	03.11.02.02.01	Rumah Negara Golongan II Type A Permanen	Sewa Guna Usaha		Sungai Penuh (An. Adrian)	Hibah	31/12/2010	Beton	Baik		3.628.770.000	#####	030/10/Bakeuda-6/2023
<b>Total Gedung dan Bangunan</b>										<b>0</b>	<b>3.628.770.000</b>		
<b>Total Tanah, Gedung dan Bangunan</b>										<b>10.240</b>	<b>5.328.539.000</b>		



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN UTANG PERHITUNGAN PIHAK KETIGA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

DINAS PENDIDIKAN							
NO	NAMA SEKOLAH	NEGARA				Pembayaran	SISA UTANG PFK
		2023	2021	2020	TOTAL		
1	2	3	4	5=3+4			
1	SD NEGERI 001XI SUNGAI PENUH	246.558,56	-	1.800,00	248.358,56	246.558,56	1.800,00
2	SD NEGERI 002XI PASAR SUNGAI PENUH	3.354.042,00	-	-	3.354.042,00	3.354.042,00	-
3	SD NEGERI 003XI AUR DURI	9.600,00	208.182,00	14.180,00	231.962,00	9.600,00	222.362,00
4	SD NEGERI 004XI PELAYANG RAYA	-	-	-	-	-	-
5	SD NEGERI 005XI KEL.SUNGAI PENUH	60.000,00	-	-	60.000,00	60.000,00	-
6	SD NEGERI 006XI AUR DURI	-	-	560.500,00	560.500,00	-	560.500,00
7	SD NEGERI 007XI SUMUR ANYIR	295.467,00	-	-	295.467,00	295.467,00	-
8	SD NEGERI 008XI KEL.PASAR S. PENUH	1.241.528,72	-	-	1.241.528,72	-	1.241.528,72
9	SD NEGERI 009XI KEL. PASAR S. PENUH	65.080,00	-	8.000,00	73.080,00	65.080,00	8.000,00
10	SD NEGERI 010XI PONDOK AGUNG	286.567,56	-	3.166.752,00	3.453.319,56	267.567,57	3.185.751,99
11	SD NEGERI 011XI DESA GEDANG	1.144.813,30	339.850,00	-	1.484.663,30	1.144.813,30	339.850,00
12	SD NEGERI 012XI KELL.DUSUN BARU	24.480,00	-	-	24.480,00	24.480,00	-
13	SD NEGERI 013XI SUMUR ANYIR	-	57.800,00	86.000,00	143.800,00	-	143.800,00
14	SD NEGERI 014XI PELAYANG RAYA	12.000,00	566.600,00	31.364,00	609.964,00	76.100,00	533.864,00
15	SD NEGERI 015XI LAWANG AGUNG	-	-	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00
16	SD NEGERI 016XI TALANG LINDUNG	-	-	-	-	-	-
17	SD NEGERI 017XI SUNGAI NING	213.503,00	482.000,00	141.364,00	836.867,00	213.503,00	623.364,00
18	SD NEGERI 018XI KARYA BAKTI	44.100,00	-	-	44.100,00	44.100,00	-
19	SD NEGERI 019XI SUNGAI JERNIH	20.000,00	-	344.637,00	364.637,00	20.000,00	344.637,00
20	SD NEGERI 020XI KOTO LEBU	334.750,00	-	-	334.750,00	36.000,00	298.750,00
21	SD NEGERI 021XI LAWANG AGUNG	18.000,00	250.000,00	-	268.000,00	18.000,00	250.000,00
22	SD NEGERI 022XI SUMUR ANYIR	-	-	-	-	-	-
23	SD NEGERI 023XI AUR DURI	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	-
24	SD NEGERI 024XI KEL. DUSUN BARU	185.630,00	-	35.360,00	220.990,00	185.630,00	35.360,00
25	SD NEGERI 025XI DESA GEDANG	1.604.969,00	240.909,09	-	1.845.878,09	1.845.878,09	0,00
26	SD NEGERI 026XI CEMPAKA	613.894,05	1.377.272,36	-	1.991.166,42	613.894,06	1.377.272,36
27	SD NEGERI 027XI KAMPUNG DIILIR	89.520,00	284.025,45	450.000,00	823.545,45	89.520,00	734.025,45
28	SD NEGERI 028XI TANJUNG	30.000,00	1.568.487,00	-	1.598.487,00	30.000,00	1.568.487,00
29	SD NEGERI 029XI CEMPAKA	2.197.810,81	400.000,00	1.900.682,00	4.498.492,81	2.197.810,81	2.300.682,00
30	SD NEGERI 030XI KOTO DIAN	-	-	450.000,00	450.000,00	-	450.000,00
31	SD NEGERI 031XI KAMPUNG DALAM	33.560,00	6.000,00	-	39.560,00	33.560,00	6.000,00
32	SD NEGERI 032XI SIMPANG 3 RAWANG	1.682.228,00	1.358.181,82	-	3.040.409,82	1.682.228,00	1.358.181,82
33	SD NEGERI 033XI TANJUNG MUDA	241.980,00	579.727,27	-	821.707,27	241.980,00	579.727,27
34	SD NEGERI 034XI KOTO TELUK	-	947.091,00	735.500,00	1.682.591,00	-	1.682.591,00
35	SD NEGERI 035XI LARIK KEMAHAN	109.300,00	-	216.000,00	325.300,00	325.300,00	-
36	SD NEGERI 036XI PALING SERUMPUN	57.000,00	-	-	57.000,00	-	57.000,00
37	SD NEGERI 037XI KOTO KERAS	-	-	590.364,00	590.364,00	146.880,00	443.484,00
38	SD NEGERI 038XI KOTO LOLO	742.180,00	786.818,00	-	1.528.998,00	742.180,00	786.818,00
39	SD NEGERI 039XI SUNGAI LIUK	40.200,00	1.682.772,00	-	1.722.972,00	40.200,00	1.682.772,00
40	SD NEGERI 040XI KOTO LIMA MANIS	1.094.534,50	1.034.818,18	1.191.864,00	3.321.216,69	651.212,43	2.670.004,26
41	SD NEGERI 041XI KAMPUNG TENGAH	-	-	-	-	-	-
42	SD NEGERI 042XI SEBERANG	2.123.357,30	-	-	2.123.357,30	2.123.357,30	(0,00)
43	SD NEGERI 043XI KOTO RENAH	2.717.154,00	-	-	2.717.154,00	2.717.154,00	-
44	SD NEGERI 044XI KOTO BENTO	184.560,00	-	-	184.560,00	184.560,00	-
45	SD NEGERI 045XI KOTO DUA	471.000,00	-	-	471.000,00	468.000,00	3.000,00
46	SD NEGERI 046XI KOTO Tengah	1.063.315,00	2.132.545,45	229.091,00	3.424.951,45	1.374.735,00	2.050.216,45
47	SD NEGERI 047XI KOTO BARU	792.792,00	-	-	792.792,00	792.792,00	-
48	SD NEGERI 048XI KOTO LOLO	-	1.660.109,00	-	1.660.109,00	-	1.660.109,00
49	SD NEGERI 049XI DEBAI	1.034.099,10	1.110.000,00	-	2.144.099,10	1.034.099,10	1.110.000,00
50	SD NEGERI 050XI KUMUN HILIR	1.757.238,00	-	3.042.664,00	4.799.902,00	1.757.238,00	3.042.664,00
51	SD NEGERI 051XI KUMUN MUDIK	146.200,00	-	399.772,00	545.972,00	545.972,00	-
52	SD NEGERI 052XI ULU AIR	1.093.580,00	-	-	1.093.580,00	1.093.580,00	-
53	SD NEGERI 053XI AIR TELUH	94.680,00	-	1.054.863,00	1.149.543,00	94.680,00	1.054.863,00
54	SD NEGERI 054XI MUARA AIR	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	-
55	SD NEGERI 055XI PINGGIR AIR	348.210,00	-	-	348.210,00	348.210,00	-
56	SD NEGERI 056XI KUMUN MUDIK	6.000,00	142.500,00	-	148.500,00	6.000,00	142.500,00
57	SD NEGERI 057XI KUMUN MUDIK	853.202,70	-	-	853.202,70	853.202,70	0,00
58	SD NEGERI 058XI KOTO DUMO	491.898,20	629.000,00	-	1.120.898,20	491.898,20	629.000,00
59	SD NEGERI 059XI KOTO PUDUNG	850.278,92	1.373.091,00	1.600,00	2.224.969,92	850.278,92	1.374.691,00
60	SD NEGERI 060XI PENDUNG HIANG	1.148.510,63	-	-	1.148.510,63	1.009.310,63	139.200,00
61	SD NEGERI 061XI KOTO PANAP	271.160,00	600.000,00	-	871.160,00	271.160,00	600.000,00
62	SD NEGERI 062XI KOTO BARU	118.500,00	-	921.638,00	1.040.138,00	66.000,00	974.138,00
63	SD NEGERI 063XI KOTO PADANG	1.565.282,16	-	-	1.565.282,16	1.565.282,16	0,00
64	SD NEGERI 064XI KOTO TUO	359.850,00	-	-	359.850,00	359.850,00	-
65	SD NEGERI 065XI DESA BARU DEBAI	-	-	-	-	-	-
66	SD NEGERI 066XI TANJUNG BUNGA	440.780,00	-	-	440.780,00	440.780,00	-
67	SD NEGERI 067XI KOTO TENGAH	247.747,75	-	-	247.747,75	247.747,75	(0,00)
68	SD NEGERI 068XI/RENAH KAYU EMBUN	-	4.000,00	-	4.000,00	-	4.000,00
69	SD NEGERI 069XI KAMPUNG TENGAH	481.217,00	-	-	481.217,00	481.217,00	-
70	SD NEGERI 70 PERTIWI	3.991.206,00	-	-	3.991.206,00	3.991.206,00	-
71	SMP NEGERI 01 SUNGAI PENUH	10.022.123,00	-	-	10.022.123,00	10.022.123,00	-
72	SMP NEGERI 02 SUNGAI PENUH	647.387,00	-	-	647.387,00	647.387,00	-
73	SMP NEGERI 03 SUNGAI PENUH	237.692,79	-	-	237.692,79	237.692,79	0,00
74	SMP NEGERI 04 SUNGAI PENUH	8.314.708,00	-	4.385.283,00	12.699.991,00	8.314.708,00	4.385.283,00
75	SMP NEGERI 05 SUNGAI PENUH	105.880,00	-	-	105.880,00	37.500,00	68.380,00

NO	NAMA SEKOLAH	NEGARA				Pembayaran	SISA UTANG PFK
		2023	2021	2020	TOTAL		
76	SMP NEGERI 06 SUNGAI PENUH	-	-	1.030.640,00	1.030.640,00	-	1.030.640,00
77	SMP NEGERI 07 SUNGAI PENUH	908.089,10	-	-	908.089,10	908.089,10	(0,00)
78	SMP NEGERI 08 SUNGAI PENUH	-	-	-	-	-	-
79	SMP NEGERI 09 SUNGAI PENUH	1.366.079,00	-	-	1.366.079,00	-	1.366.079,00
80	SMP NEGERI 10 SUNGAI PENUH	383.747,21	-	-	383.747,21	383.747,21	(0,00)
81	SMP NEGERI 11 SUNGAI PENUH	2.470.882,88	-	-	2.470.882,88	84.000,00	2.386.882,88
82	SMP NEGERI 12 SUNGAI PENUH	-	-	864.100,00	864.100,00	-	864.100,00
83	SMP NEGERI 13 SUNGAI PENUH	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>63.226.704,25</b>	<b>19.821.779,64</b>	<b>21.964.018,00</b>	<b>105.012.501,89</b>	<b>58.530.142,68</b>	<b>46.482.359,21</b>



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN UTANG BELANJA BLUD MAYJEND H.A THALIB**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

No	SKPD	Saldo Awal Utang BLUD	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	Saldo Per 31 Des 2024	KETERANGAN
			Penambahan Utang TA 2024	Pembayaran Utang		
1	Belanja Obat - obatan	5.008.034.117,06	10.176.410.694,09	7.795.312.293,44	7.389.132.517,71	Utang pengadaan Obat Kepada Distributor Obat
2	Belanja Bahan Dan Alat Habis Pakai ( BMHP ) Tahun 2024	3.866.408.794,00	5.469.963.233,65	5.512.725.619,00	3.823.646.408,65	Utang pengadaan BHP Kepada Distributor BHP
3	Belanja Bahan Kertas, Plastik dan Kantong Pembungkus Obat-obatan	11.209.646,00	18.333.759,00	19.972.430,00	9.570.975,00	Utang Pengadaan Plastik Kapada Distributor Plastik
4	Utang Belanja Gas Medis ( Oksigen ) dan N2O	0,00	904.650.000,00	669.600.000,00	235.050.000,00	Utang Pengadaan Oksigen yang belum dibayarkan sd TA 2024
5	Belanja Film Rontgen CR ( Computed Radiografi )	0,00	397.202.067,00	292.707.000,00	104.495.067,00	Utang Pengadaan Rontgen yang belum dibayarkan sd TA 2024
6	Utang Belanja Bahan dan Alat Kesehatan Sederhana	0,00	136.607.649,00	111.274.919,00	25.332.730,00	Utang Pengadaan Belaja bahan dan alat kesehatan sederhana yang belum dibayarkan sd TA 2024
7	Belanja Jasa Restribusi Pengelolaan Limbah B3 RS	0,00	479.205.649,34	261.148.561,00	218.057.088,34	
8	Utang Belanja Modal	0,00	3.093.631.061,00	1.225.391.134,00	1.868.239.927,00	Pengadaan Aset PM yang telah diterima namun belum dibayar kan sd TA 2024
9	Utang Belanja Jasa Pelayanan	0,00	960.166.182,00	0,00	960.166.182,00	Beban Pegawai berupa Jaspel bulan Agustus Pendapatan Jasa Agustus telah di terima namun jasa pelajaran yang belum dibayarkan ke pegawai
10	Utang Makan Minum	0,00	210.025.000,00	0,00	210.025.000,00	Pengadaan Makan Minum Pasien Bulan Januari s.d Maret 2024
	<b>TOTAL</b>	<b>8.885.652.557,06</b>	<b>21.846.195.295,08</b>	<b>15.888.131.956,44</b>	<b>14.843.715.895,71</b>	



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**  
**RINCIAN PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PER 31 DESEMBER**  
**TAHUN 2024**

**REKLAME**

No.	NPWP / Nama	Alamat	Masa Pajak			Tanggal SKPD	Nomor SKPD	Jml SKPD	Jml SSP	Nilai Sewa Perbulan	Bulan	Pendapatan bayar di muka
1	PT.KODOK IJO COMMUNICATION	JLN. KAPTEN PATTIMURA KM.	01/04/2024	s/d	31/03/2025	04/29/2024	24HD002394	4.896.000,00	4.896.000,00	408.000,00	3	1.224.000,00
2	CV.DEVIS JAYA Advertising	Jl, Arjuna Utara 1K 1L Duri Kepa	06/04/2024	s/d	04/05/2025	08/09/2024	24RA010141	4.896.000,00	4.896.000,00	408.000,00	3	1.224.000,00
3	CV.DEVIS JAYA Advertising	Jl, Arjuna Utara 1K 1L Duri Kepa	17/07/2024	s/d	16/07/2025	12/08/2024	24RA0101845	4.896.000,00	4.896.000,00	408.000,00	7	2.856.000,00
4	CV.DEVIS JAYA Advertising	Jl, Arjuna Utara 1K 1L Duri Kepa	06/06/2024	s/d	05/06/2025	12/08/2024	24RA 010846	4.896.000,00	4.896.000,00	408.000,00	5	2.040.000,00
5	PT.RUANG RAYA INDONESIA	DESA GEDANG	01/07/2024	s/d	30/06/2025	08/28/2024	24hd011242	2.448.000,00	2.448.000,00	204.000,00	6	1.224.000,00
6	CV TERFEST NIAGA	KARYA BAKTI	28/11/2024	s/d	27/11/2025	11/28/2024	24RA013290	1.517.760,00	1.517.760,00	126.480,00	11	1.391.280,00
7	CV TERFEST NIAGA	KARYA BAKTI	28/11/2024	s/d	11/28/2025	11/28/2024	24RA013291	326.400,00	326.400,00	27.200,00	11	299.200,00
8	CV.ARTA MANDIRI SOLUTION	KOTO MAJIDIN	28/11/2024	s/d	27/11/2025	11/28/2024	24RA013292	1.517.760,00	1.517.760,00	126.480,00	11	1.391.280,00
9	CV.ARTA MANDIRI SOLUTION	KOTO MAJIDIN	28/11/2024	s/d	27/11/2025	11/28/2024	24RA013293	326.400,00	326.400,00	27.200,00	11	299.200,00
10	CV.ARTA MANDIRI SOLUTION	KOTO MAJIDIN	28/11/2024	s/d	27/11/2025	11/28/2024	24RA013294	1.517.760,00	1.517.760,00	126.480,00	11	1.391.280,00
11	CV.ARTA MANDIRI SOLUTION	KOTO MAJIDIN	28/11/2024	s/d	27/11/2025	11/28/2024	24RA013295	326.400,00	326.400,00	27.200,00	11	299.200,00
12	PROJEKA ADVERTISING	BUKIT TINGGI	16/04/2024	s/d	15/04/2025	04/18/2024	24HD002098	816.000,00	816.000,00	68.000,00	3	204.000,00
13	PROJEKA ADVERTISING	BUKIT TINGGI	27/04/2024	s/d	26/04/2025	05/14/2024	24RA009139	816.000,00	816.000,00	68.000,00	4	272.000,00
14	PROJEKA ADVERTISING	BUKIT TINGGI	27/04/2024	s/d	26/04/2025	05/14/2024	24RA009140	816.000,00	816.000,00	68.000,00	4	272.000,00
15	RAN BROTHER ADV	JL.M THAMRIN SIM 3	01/09/2024	s/d	31/08/2025	07/23/2024	24RA010427	612.000,00	612.000,00	51.000,00	8	408.000,00
16	RAN BROTHER ADV	JL.M THAMRIN SIM 3	01/09/2024	s/d	31/08/2025	07/23/2024	24RA010428	612.000,00	612.000,00	51.000,00	8	408.000,00
17	RAN BROTHER ADV	JL.M THAMRIN SIM 3	01/09/2024	s/d	31/08/2025	07/23/2024	24RA010429	612.000,00	612.000,00	51.000,00	8	408.000,00
18	RAN BROTHER ADV	JL.M THAMRIN SIM 3	01/09/2024	s/d	31/08/2025	07/23/2024	24RA010430	612.000,00	612.000,00	51.000,00	8	408.000,00
19	RAN BROTHER ADV	JL.M THAMRIN SIM 3	01/09/2024	s/d	31/08/2025	07/23/2024	24RA010431	612.000,00	612.000,00	51.000,00	8	408.000,00
20	RAN BROTHER ADV	JL.M THAMRIN SIM 3	01/09/2024	s/d	31/08/2025	07/23/2024	24RA010432	612.000,00	612.000,00	51.000,00	8	408.000,00
21	RAN BROTHER ADV	JL.M THAMRIN SIM 3	01/09/2024	s/d	31/08/2025	07/23/2024	24RA010433	612.000,00	612.000,00	51.000,00	8	408.000,00
22	RAN BROTHER ADV	JL.M THAMRIN SIM 3	01/09/2024	s/d	31/08/2025	07/23/2024	24RA010434	612.000,00	612.000,00	51.000,00	8	408.000,00
23	RAN BROTHER ADV	JL.M THAMRIN SIM 3	01/09/2024	s/d	31/08/2025	07/23/2024	24RA010435	612.000,00	612.000,00	51.000,00	8	408.000,00
24	RAN BROTHER ADV	JL.M THAMRIN SIM 3	01/09/2024	s/d	31/08/2025	07/23/2024	24RA010436	612.000,00	612.000,00	51.000,00	8	408.000,00
25	RAN BROTHER ADV	JL.M THAMRIN SIM 3	01/09/2024	s/d	31/08/2025	07/23/2024	24RA010437	612.000,00	612.000,00	51.000,00	8	408.000,00
26	RAN BROTHER ADV	JL.M THAMRIN SIM 3	01/09/2024	s/d	31/08/2025	07/23/2024	24RA010438	612.000,00	612.000,00	51.000,00	8	408.000,00
27	RAN BROTHER ADV	JL.M THAMRIN SIM 3	01/09/2024	s/d	31/08/2025	07/23/2024	24RA010439	612.000,00	612.000,00	51.000,00	8	408.000,00
28	RAN BROTHER ADV	JL.M THAMRIN SIM 3	01/09/2024	s/d	31/08/2025	07/23/2024	24RA010440	612.000,00	612.000,00	51.000,00	8	408.000,00
29	RAN BROTHER ADV	JL.M THAMRIN SIM 3	01/09/2024	s/d	31/08/2025	07/23/2024	24RA010441	408.000,00	408.000,00	34.000,00	8	272.000,00
30	RAN BROTHER ADV	JL.M THAMRIN SIM 3	01/09/2024	s/d	31/08/2025	07/23/2024	24RA010442	408.000,00	408.000,00	34.000,00	8	272.000,00
31	RAN BROTHER ADV	JL.M THAMRIN SIM 3	01/09/2024	s/d	31/08/2025	07/23/2024	24RA010443	408.000,00	408.000,00	34.000,00	8	272.000,00
32	RAN BROTHER ADV	JL.M THAMRIN SIM 3	01/09/2024	s/d	31/08/2025	07/23/2024	24RA010444	408.000,00	408.000,00	34.000,00	8	272.000,00
33	PT.RUANG RAYA INDONESIA	DESA GEDANG	01/07/2024	s/d	30/06/2025	08/28/2024	24HD011241	777.600,00	777.600,00	64.800,00	6	388.800,00
34	PT.ALUMADA KARYA PRATAMA	KEBAYORAN LAMA	15/09/2024	s/d	14/09/2025	09/30/2024	24RA011913	4.320.000,00	4.320.000,00	360.000,00	8	2.880.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN DIMUKA REKLAME</b>												<b>21.051.440,00</b>
<b>SPANDUK KAIN</b>												
No.	NPWP / Nama	Alamat	Masa Pajak			Tanggal SKPD	Nomor SKPD	Jml SKPD	Jml SSP	Nilai Sewa Perbulan	Bulan	Pendapatan bayar di muka
33	PT.RUANG RAYA INDONESIA	DESA GEDANG	01/07/2024	s/d	30/06/2025	08/28/2024	24HD011241	777.600,00	777.600,00	64.800,00	6	388.800,00
34	PT.ALUMADA KARYA PRATAMA	KEBAYORAN LAMA	15/09/2024	s/d	14/09/2025	09/30/2024	24RA011913	4.320.000,00	4.320.000,00	360.000,00	8	2.880.000,00

No.	NPWP / Nama	Alamat	Masa Pajak			Tanggal SKPD	Nomor SKPD	Jml SKPD	Jml SSP	Nilai Sewa Perbulan	Bulan	Pendapatan bayar di muka
				s/d								
35	PT.KODOK IJO COMMUNICATION	JLN. KAPTEN PATTIMURA KM.	01/11/2024	s/d	31/10/2025	11/19/2024	24RA013114	720.000,00	720.000,00	60.000,00	10	600.000,00
36	PT.KODOK IJO COMMUNICATION	JLN. KAPTEN PATTIMURA KM.	01/11/2024	s/d	31/10/2025	11/19/2024	24RA013115	720.000,00	720.000,00	60.000,00	10	600.000,00
37	PT.KODOK IJO COMMUNICATION	JLN. KAPTEN PATTIMURA KM.	01/11/2024	s/d	31/10/2025	11/19/2024	24RA013116	720.000,00	720.000,00	60.000,00	10	600.000,00
38	PT.KODOK IJO COMMUNICATION	JLN. KAPTEN PATTIMURA KM.	01/11/2024	s/d	31/10/2025	11/19/2024	24RA013117	720.000,00	720.000,00	60.000,00	10	600.000,00
39	PT.KODOK IJO COMMUNICATION	JLN. KAPTEN PATTIMURA KM.	01/11/2024	s/d	31/10/2025	11/19/2024	24RA013118	720.000,00	720.000,00	60.000,00	10	600.000,00
40	PT.KODOK IJO COMMUNICATION	JLN. KAPTEN PATTIMURA KM.	01/11/2024	s/d	31/10/2024	11/19/2024	24RA013119	720.000,00	720.000,00	60.000,00	10	600.000,00
41	PT.KODOK IJO COMMUNICATION	JLN. KAPTEN PATTIMURA KM.	01/11/2024	s/d	31/10/2024	11/19/2024	24RA013120	720.000,00	720.000,00	60.000,00	10	600.000,00
42	PT.KODOK IJO COMMUNICATION	JLN. KAPTEN PATTIMURA KM.	01/11/2024	s/d	31/10/2024	11/19/2024	24RA013121	720.000,00	720.000,00	60.000,00	10	600.000,00
43	PT.KODOK IJO COMMUNICATION	JLN. KAPTEN PATTIMURA KM.	01/11/2024	s/d	31/10/2024	11/19/2024	24RA013122	720.000,00	720.000,00	60.000,00	10	600.000,00
44	PT.KODOK IJO COMMUNICATION	JLN. KAPTEN PATTIMURA KM.	01/11/2024	s/d	31/10/2024	11/19/2024	24RA013123	720.000,00	720.000,00	60.000,00	10	600.000,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN DIMUKA REKLAME</b>											<b>5.400.000,00</b>	
<b>SEWA TANAH DAN BANGUNAN</b>												
No	NPWP / Nama	Alamat	Masa Sewa			Nomor Kontrak	Nilai Kontrak	Jumlah Bulan	Sisa Bulan	Nilai Sewa Perbulan	Pendapatan bayar di muka	
1	Rumah Negara Golongan III Lain-Lain (Winda Supitriani)	Desa Koto Tinggi	01/01/2024	s/d	31/09/2025	100.3.4.4/01/12/2024/Bakeuda-6	3.400.000,00	20	9	170.000,00	1.530.000,00	
<b>JUMLAH PENDAPATAN DIMUKA SEWA</b>											<b>1.530.000,00</b>	
<b>JUMLAH TOTAL PENDAPATAN DIMUKA PAJAK REKLAME + SPANDUK KAIN + RETRIBUSI SEWA TANAH DAN BANGUNAN</b>											<b>27.981.440,00</b>	



Pemerintah Kota Sungai Penuh  
Rincian Mutasi Tambah/Kurang Pesediaan  
Tahun Anggaran 2024

No	SKPD	Saldo Awal	Belanja	Mutasi Tambah						Mutasi Kurang						BEBAN PERSEDIAAN	
				Mutasi dari SKPKD/SKPD	Hibah	Kurang Catat	Reklasifikasi	Koreksi	Jumlah	Mutasi antar SKPKD/SKPD	Hibah	Expired	Reklasifikasi	Koreksi	Saldo Per 31 Des 2023		Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12 = ( 5 : 11 )	13	14	15	17	18	19	20 = ( 13 : 19 )	21 = 3 + 4 + 12 - 20
1	Dinas Pendidikan	-	861.526.357,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000,00	-	-	-	854.026.357,00
2	Dinas Kesehatan	-	815.164.923,00	52.020.237,97	5.816.450.882,52	-	-	-	5.868.471.120,49	5.982.149.257,52	-	-	-	-	-	5.982.149.257,52	701.486.785,97
3	Puskesmas Sungai Penuh	98.389.757,88	96.830.450,00	491.588.209,84	-	-	-	0,02	491.588.209,86	-	-	20.251.285,02	-	398.000,01	107.603.314,35	128.252.599,38	558.555.818,36
4	Puskesmas Hamparan Rawang	31.527.272,85	141.133.082,00	762.531.523,62	-	-	-	9.275.544,79	771.807.068,41	-	-	4.566.287,56	-	9.275.544,80	26.313.922,35	40.145.754,71	904.321.668,55
5	Puskesmas Kumun Debai	67.520.020,57	66.702.078,00	908.167.140,11	-	-	-	-	908.167.140,11	-	-	32.998.035,74	-	-	140.428.630,45	173.426.666,19	868.962.572,49
6	Puskesmas Desa Gedang	37.356.130,79	61.055.450,00	940.721.907,77	-	-	-	85.013,28	940.806.921,05	-	-	19.540.422,00	-	-	29.236.515,54	48.776.937,54	990.441.564,30
7	Puskesmas Tanah Kampung	102.061.407,26	99.456.800,00	1.000.765.062,88	-	-	-	448.762,38	1.001.213.825,26	-	-	13.657.374,26	-	-	123.675.928,01	137.333.302,27	1.065.398.730,25
8	Puskesmas Koto Baru	68.629.035,32	88.032.342,00	622.394.723,18	-	-	-	-	622.394.723,18	-	-	32.225.895,19	-	56.000,00	103.648.994,81	135.930.890,00	643.125.210,50
9	Puskesmas Sungai Bungkal	57.710.753,66	33.273.600,00	473.994.259,36	-	-	-	3.084.444,84	477.078.704,20	-	-	19.039.718,67	-	3.472.306,07	84.769.424,70	107.281.449,44	460.781.608,42
10	Puskesmas Sungai Liuk	40.552.842,78	47.126.164,00	611.340.775,06	-	4.000,00	-	9.700.000,00	621.044.775,06	-	-	15.590,45	-	1.099.527,92	41.157.900,06	42.273.018,43	666.450.763,41
11	Puskesmas Koto Lolo	53.816.662,49	68.216.750,00	670.488.011,77	-	-	-	14.990.500,11	685.478.511,88	-	-	34.035.652,35	-	15.156.074,08	112.742.485,25	161.934.211,68	645.577.712,69
12	Puskesmas Pondok Tinggi	31.164.141,77	41.238.250,00	690.167.865,76	-	-	-	93.335,77	690.261.201,53	-	-	13.419.908,23	-	4.528.896,00	84.062.246,46	102.011.050,69	660.652.542,61
13	Puskesmas Tanjung	125.435.807,75	52.987.400,00	325.520.588,19	-	-	-	-	325.520.588,19	-	-	27.800.126,74	-	327.574,83	107.298.766,64	135.426.468,21	368.517.327,73
14	Instalasi Farmasi	5.324.619.899,06	1.936.775.637,00	5.965.598.149,52	303.276.679,00	-	-	-	6.268.874.828,52	7.705.498.157,50	-	452.744.198,37	-	-	5.334.402.768,70	13.492.645.124,58	37.625.240,00
15	Laboratorium Kesehatan Daerah	37.191.098,98	56.243.393,00	3.082.565,01	-	-	26.469.953,00	26.022.587,93	55.575.105,94	-	-	15.425.205,85	26.469.953,00	24.804.184,11	36.353.309,61	103.052.652,57	45.956.945,35
16	Rumah Sakit Bakri	56.068.858,85	133.655.480,00	-	-	-	54.221.000,00	0,22	54.221.000,22	-	-	15.814.342,85	-	-	27.662.603,38	43.476.946,23	200.468.392,84
17	RSUD Mayjen H. A. Thalib	3.446.673.081,85	-	557.548.001,98	-	-	-	-	557.548.001,98	-	-	-	-	-	4.511.454.846,41	4.511.454.846,41	(507.233.762,58)
18	Puskesmas Sungai Penuh (JKN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Puskesmas Hamparan Rawang (JKN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Puskesmas Kumun Debai (JKN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Puskesmas Desa Gedang (JKN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Puskesmas Tanah Kampung (JKN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Puskesmas Koto Baru (JKN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Puskesmas Sungai Bungkal (JKN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Puskesmas Sungai Liuk (JKN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Puskesmas Koto Lolo (JKN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Puskesmas Pondok Tinggi (JKN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Puskesmas Tanjung (JKN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68.426.000,00	1.063.828.003,00	-	-	-	400.048.430,00	-	400.048.430,00	-	-	-	-	-	2.364.432,00	2.364.432,00	1.529.938.001,00
30	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	1.245.722.986,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.940.000,00	-	-	38.940.000,00	1.206.782.986,00

No	SKPD	Saldo Awal	Belanja	Mutasi Tambah						Mutasi Kurang						BEBAN PERSEDIAN	
				Mutasi dari SKPKD/SKPD	Hibah	Kurang Catat	Reklasifikasi	Koreksi	Jumlah	Mutasi antar SKPKD/SKPD	Hibah	Expired	Reklasifikasi	Koreksi	Saldo Per 31 Des 2023		Jumlah
31	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	-	126.293.577,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126.293.577,00
32	Dinas Pemadam Kebakaran	-	351.573.787,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351.573.787,00
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.425.000,00	500.782.952,00	-	444.375.000,00	-	2.400.000,00	-	446.775.000,00	-	-	15.255.000,00	20.000.000,00	-	13.021.600,00	48.276.600,00	916.706.352,00
34	Dinas Sosial	-	355.171.014,00	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	355.321.014,00
35	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	211.287.441,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211.287.441,00
36	Dinas Kelahanan Pangan	80.092.017,00	218.172.916,00	287.450.000,00	-	-	-	-	287.450.000,00	-	-	-	-	-	159.265.243,28	159.265.243,28	426.449.889,72
37	Dinas Lingkungan Hidup	-	1.707.996.309,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.707.996.309,00
38	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	414.712.925,00	152.192.681,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254.062.425,00	254.062.425,00	312.843.181,00
39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	305.719.886,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305.719.886,00
40	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	125.226.701,00	268.275.339,00	-	330.675.477,00	-	-	-	330.675.477,00	388.281.607,00	87.482.794,00	1.713.515,00	-	-	33.419.262,00	510.897.178,00	213.280.339,00
41	Dinas Perhubungan	-	215.871.127,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.250.000,00	-	-	33.250.000,00	182.621.127,00
42	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	226.457.782,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.600,00	250.600,00	226.207.182,00
43	Dinas Koperasi dan UKM	-	246.113.172,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	246.113.172,00
44	Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	-	182.131.653,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182.131.653,00
45	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	-	391.025.922,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391.025.922,00
46	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	-	158.480.980,00	-	-	-	49.937.944,00	-	49.937.944,00	-	-	-	-	-	-	-	208.418.924,00
47	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	129.568.366,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.568.366,00
48	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	-	917.614.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	917.614.450,00
49	Dinas Peternakan dan Perikanan	53.406.044,00	307.900.026,00	-	-	-	-	-	-	-	-	19.404.524,00	-	-	34.001.520,00	53.406.044,00	307.900.026,00
50	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-	378.764.908,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	378.764.908,00
51	Bagian Umum	-	3.297.090.880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348.770.000,00	-	-	348.770.000,00	2.948.320.880,00
52	Bagian Tata Pemerintahan	-	76.678.634,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.678.634,00
53	Bagian Hukum	-	143.825.014,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.825.014,00
54	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	172.667.603,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172.667.603,00
55	Bagian Ekonomi dan Pembangunan	-	124.618.142,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124.618.142,00
56	Bagian Humas dan Protokol	-	255.298.255,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255.298.255,00
57	Bagian Keuangan	-	99.580.896,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99.580.896,00
58	Bagian Organisasi	-	119.003.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.003.000,00
59	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	48.288.372,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.288.372,00
60	Sekretariat DPRD	-	3.476.618.673,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.476.618.673,00
61	Kecamatan Sungai Penuh	420.000,00	93.056.620,00	-	-	-	800.000,00	-	800.000,00	-	-	-	-	-	1.342.500,00	1.342.500,00	92.934.120,00
62	Kecamatan Pesisir Bukit	-	49.587.407,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.587.407,00
63	Kecamatan Hamparan Rawang	-	69.276.499,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.276.499,00

No	SKPD	Saldo Awal	Belanja	Mutasi Tambah						Mutasi Kurang						BEBAN PERSEDIAAN	
				Mutasi dari SKPKD/SKPD	Hibah	Kurang Catat	Reklasifikasi	Koreksi	Jumlah	Mutasi antar SKPKD/SKPD	Hibah	Expired	Reklasifikasi	Koreksi	Saldo Per 31 Des 2023		Jumlah
64	Kecamatan Kumun Debai	-	76.086.131,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76.086.131,00
65	Kecamatan Tanah Kampung	-	43.783.400,00	-	-	-	2.180.000,00	-	2.180.000,00	-	-	-	-	-	-	-	45.963.400,00
66	Kecamatan Pondok Tinggi	-	65.297.733,00	-	-	-	5.100.000,00	-	5.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	70.397.733,00
67	Kecamatan Sungai Bungkal	-	77.969.950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77.969.950,00
68	Kecamatan Koto Baru	-	74.860.900,00	-	-	-	851.800,00	305.000,00	1.156.800,00	-	-	-	-	-	490.000,00	490.000,00	75.527.700,00
69	Kelurahan Sungai Penuh	-	116.502.500,00	-	-	-	788.000,00	-	788.000,00	-	-	-	-	-	-	-	117.290.500,00
70	Kelurahan Pondok Tinggi	-	109.281.800,00	-	-	-	3.218.000,00	-	3.218.000,00	-	-	-	-	-	-	-	112.499.800,00
71	Kelurahan Dusun Baru	-	63.222.700,00	-	-	-	645.000,00	-	645.000,00	-	-	-	-	-	-	-	63.867.700,00
72	Kelurahan Pasar Sungai Penuh	-	43.810.250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.810.250,00
73	Inspektorat Daerah	148.500,00	271.810.936,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136.700,00	136.700,00	271.822.736,00
74	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	586.379.304,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586.379.304,00
75	Badan Keuangan Daerah	29.220.980,00	1.115.315.028,00	-	-	-	287.450.000,00	-	287.450.000,00	287.450.000,00	-	-	-	-	20.959.500,00	308.409.500,00	1.123.576.508,00
76	Badan Keuangan Daerah (SKPKD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	-	449.885.914,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449.885.914,00
78	Badan Penelitian dan Pengembangan	-	144.862.996,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.862.996,00
79	Kantor Kesbangpol	-	283.396.797,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283.396.797,00
		10.367.794.938,87	25.808.419.767,00	14.363.379.022,02	#####	4.000,00	834.260.127,00	64.005.189,34	22.156.426.376,88	14.363.379.022,02	#####	737.897.082,28	#####	#####	11.390.125.439,00	27.112.932.398,13	31.219.708.684,62



**RINCIAN GOLONGAN PEGAWAI PER SATUAN KERJA LINGKUP  
PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH  
PER 31 DESEMBER 2024**

SATUAN KERJA	GOLONGAN				TOTAL
	I	II	III	IV	
<b>1 Sekretariat</b>					
SEKRETARIAT DAERAH	1	0	62	17	80
SEKRETARIAT DPRD	0	1	23	8	32
<b>Sub Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>85</b>	<b>25</b>	<b>112</b>
<b>2 Dinas</b>					
INSPEKTORAT			22	24	46
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA		1	23	8	32
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	0	0	19	4	23
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	0	18	5	23
DINAS KESEHATAN	1	50	526	90	667
DINAS KETAHANAN PANGAN	0	0	14	7	21
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	0	0	12	8	20
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	0	0	19	4	23
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	1	23	6	30
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	0	1	57	5	63
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	0	1	10	1	12
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0	0	18	3	21
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	0	13	7	20
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	0	0	22	7	29
DINAS PENDIDIKAN	0	16	540	273	829
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	0	8	7	15
DINAS PERDAGANGAN DAN BERINDUSTRIAN	0	2	25	7	34
DINAS PERHUBUNGAN	0	1	14	3	18
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	0	18	12	30
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	0	0	18	6	24
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	0	1	19	11	31
DINAS SOSIAL	0	1	11	6	18
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	0	1	62	22	85
<b>Sub Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>76</b>	<b>1511</b>	<b>526</b>	<b>2114</b>
<b>3 Badan</b>					
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	2	32	7	41
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	3	12	2	17
BADAN KEUANGAN DAERAH	0	2	32	6	40
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	0	23	10	33
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	0	15	3	18
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	0	0	27	9	36
<b>Sub Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>141</b>	<b>37</b>	<b>185</b>
<b>4 Kantor</b>					
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	4	10	4	18
<b>Sub Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>18</b>

SATUAN KERJA		GOLONGAN				
<b>5 Kecamatan</b>						
	KECAMATAN HAMPARAN RAWANG	0	0	14	2	<b>16</b>
	KECAMATAN KOTO BARU	0	1	6	5	<b>12</b>
	KECAMATAN KUMUN DEBAI	0	0	23	1	<b>24</b>
	KECAMATAN PESISIR BUKIT	0	0	13	4	<b>17</b>
	KECAMATAN PONDOK TINGGI	0	2	19	4	<b>25</b>
	KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL	0	4	18	3	<b>25</b>
	KECAMATAN SUNGAI PENUH	0	0	29	2	<b>31</b>
	KECAMATAN TANAH KAMPUNG	0	0	10	6	<b>16</b>
	<b>Sub Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>132</b>	<b>27</b>	<b>166</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>	<b>95</b>	<b>1879</b>	<b>619</b>	<b>2595</b>

**LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS DESA	PAGU	PAGU_TAMBAHAN	JUMLAH PAGU DAN PAGU TAMBAHAN	REALISASI_1_NON EARMARK	REALISASI_2_NON EAR MARK	REALISASI_1_EARMARK	REALISASI_2_EARMARK	REALISASI_TAMBAHAN	TOTAL PENYALURAN	%
1	2	3	4	5	6	6=(5+6)	7	8	9	10	11	12=(7+8+9+10+11)	13
1	Air Teluh	Kumun Debai	MANDIRI	664.665.000		664.665.000	250.285.200	166.856.800	148.513.800	99.009.200	-	664.665.000	100
2	Amar Sakti	Sungai Penuh	MANDIRI	678.031.000		678.031.000	207.900.600	138.600.400	198.918.000	132.612.000	-	678.031.000	100
3	Aur Duri	Pondok Tinggi	MANDIRI	696.498.000	144.516.000	841.014.000	248.310.000	165.540.000	169.588.800	113.059.200	144.516.000	841.014.000	100
4	Baru Debai	Tanah Kampung	MANDIRI	687.431.000		687.431.000	177.314.400	118.209.600	235.144.200	156.762.800	-	687.431.000	100
5	Cempaka	Hamparan Rawang	MANDIRI	658.947.000		658.947.000	203.025.600	135.350.400	192.342.600	128.228.400	-	658.947.000	100
6	Debai	Kumun Debai	MANDIRI	632.013.000		632.013.000	205.035.000	136.690.000	174.172.800	116.115.200	-	632.013.000	100
7	Dujung Sakti	Koto Baru	MANDIRI	1.048.981.000		1.048.981.000	389.556.600	259.704.400	239.832.000	159.888.000	-	1.048.981.000	100
8	Dusun Diilir	Hamparan Rawang	MANDIRI	915.352.000		915.352.000	367.662.000	245.108.000	181.549.200	121.032.800	-	915.352.000	100
9	Gedang	Sungai Penuh	MANDIRI	794.440.000		794.440.000	150.855.600	100.570.400	325.808.400	217.205.600	-	794.440.000	100
10	Kampung Dalam	Hamparan Rawang	MANDIRI	697.602.000		697.602.000	189.193.200	126.128.800	229.368.000	152.912.000	-	697.602.000	100
11	Kampung Diilir	Hamparan Rawang	MANDIRI	667.761.000		667.761.000	239.396.400	159.597.600	161.260.200	107.506.800	-	667.761.000	100
12	Kampung Tengah	Koto Baru	MANDIRI	689.490.000		689.490.000	252.440.400	168.293.600	161.253.600	107.502.400	-	689.490.000	100
13	Karya Bakti	Pondok Tinggi	MANDIRI	704.996.000	144.516.000	849.512.000	273.815.400	182.543.600	149.182.200	99.454.800	144.516.000	849.512.000	100
14	Koto Baru	Koto Baru	MANDIRI	777.694.000		777.694.000	242.149.200	161.432.800	224.467.200	149.644.800	-	777.694.000	100
15	Koto Bento	Pesisir Bukit	MANDIRI	912.696.000	144.516.000	1.057.212.000	344.246.400	229.497.600	203.371.200	135.580.800	144.516.000	1.057.212.000	100
16	Koto Beringin	Hamparan Rawang	MANDIRI	684.586.000		684.586.000	256.491.600	170.994.400	154.260.000	102.840.000	-	684.586.000	100
17	Koto Dian	Hamparan Rawang	MANDIRI	775.022.000		775.022.000	320.553.600	213.702.400	144.459.600	96.306.400	-	775.022.000	100
18	Koto Dumo	Tanah Kampung	MANDIRI	673.923.000		673.923.000	253.889.400	169.259.600	150.464.400	100.309.600	-	673.923.000	100
19	Koto Duo	Pesisir Bukit	MANDIRI	817.491.000		817.491.000	285.052.800	190.035.200	205.441.800	136.961.200	-	817.491.000	100
20	Koto Keras	Pesisir Bukit	MANDIRI	730.368.000		730.368.000	261.375.600	174.250.400	176.845.200	117.896.800	-	730.368.000	100
21	Koto Lebu	Pondok Tinggi	MANDIRI	653.619.000		653.619.000	199.669.200	133.112.800	192.502.200	128.334.800	-	653.619.000	100
22	Koto Limau Manis	Koto Baru	MANDIRI	762.465.000		762.465.000	294.702.600	196.468.400	162.776.400	108.517.600	-	762.465.000	100
23	Koto Lolo	Pesisir Bukit	MANDIRI	728.511.000	144.516.000	873.027.000	282.563.400	188.375.600	154.543.200	103.028.800	144.516.000	873.027.000	100
24	Koto Padang	Tanah Kampung	MANDIRI	690.593.000		690.593.000	222.086.400	148.057.600	192.269.400	128.179.600	-	690.593.000	100
25	Koto Panap	Tanah Kampung	MANDIRI	637.981.000		637.981.000	213.261.000	142.174.000	169.527.600	113.018.400	-	637.981.000	100
26	Koto Pudung	Tanah Kampung	MANDIRI	658.913.000		658.913.000	259.387.800	172.925.200	135.960.000	90.640.000	-	658.913.000	100
27	Koto Renah	Pesisir Bukit	MANDIRI	678.709.000	144.516.000	823.225.000	283.098.600	188.732.400	124.126.800	82.751.200	144.516.000	823.225.000	100
28	Koto Teluk	Hamparan Rawang	MANDIRI	666.729.000	144.516.000	811.245.000	266.166.600	177.444.400	133.870.800	89.247.200	144.516.000	811.245.000	100
29	Koto Tengah	Tanah Kampung	MANDIRI	667.038.000		667.038.000	264.640.800	176.427.200	135.582.000	90.388.000	-	667.038.000	100
30	Koto Tengah	Pesisir Bukit	MANDIRI	693.789.000	144.516.000	838.305.000	296.721.000	197.814.000	119.552.400	79.701.600	144.516.000	838.305.000	100
31	Koto Tinggi	Sungai Bungkal	MANDIRI	862.542.000	144.516.000	1.007.058.000	314.499.000	209.666.000	203.026.200	135.350.800	144.516.000	1.007.058.000	100
32	Koto Tuo	Tanah Kampung	MANDIRI	646.296.000		646.296.000	265.102.200	176.734.800	122.675.400	81.783.600	-	646.296.000	100
33	Kt. Baru Tanah Kampung	Tanah Kampung	MANDIRI	659.076.000		659.076.000	260.421.600	173.614.400	135.024.000	90.016.000	-	659.076.000	100
34	Kumun Hilir	Kumun Debai	MANDIRI	648.149.000		648.149.000	189.328.800	126.219.200	199.560.600	133.040.400	-	648.149.000	100
35	Kumun Mudik	Kumun Debai	MANDIRI	727.869.000		727.869.000	269.983.800	179.989.200	166.737.600	111.158.400	-	727.869.000	100
36	Larik Kemahan	Hamparan Rawang	MANDIRI	676.698.000		676.698.000	268.654.800	179.103.200	137.364.000	91.576.000	-	676.698.000	100
37	Lawang Agung	Pondok Tinggi	MANDIRI	1.106.044.000		1.106.044.000	373.943.400	249.295.600	289.683.000	193.122.000	-	1.106.044.000	100
38	Maliki Air	Hamparan Rawang	MANDIRI	660.468.000	144.516.000	804.984.000	184.645.200	123.096.800	211.635.600	141.090.400	144.516.000	804.984.000	100
39	Mekar Jaya	Tanah Kampung	MANDIRI	674.445.000		674.445.000	225.001.200	150.000.800	179.665.800	119.777.200	-	674.445.000	100
40	Muara Jaya	Kumun Debai	MANDIRI	752.611.000		752.611.000	191.386.200	127.590.800	260.180.400	173.453.600	-	752.611.000	100
41	Paling Serumpun	Hamparan Rawang	MANDIRI	788.127.000		788.127.000	336.584.400	224.389.600	136.291.800	90.861.200	-	788.127.000	100
42	Pasar Baru	Sungai Penuh	MANDIRI	622.694.000		622.694.000	273.232.200	182.154.800	100.384.200	66.922.800	-	622.694.000	100
43	Pelayang Raya	Sungai Bungkal	MANDIRI	977.911.000		977.911.000	352.544.400	235.029.600	234.202.200	156.134.800	-	977.911.000	100
44	Pendung Hiang	Tanah Kampung	MANDIRI	678.025.000		678.025.000	273.555.000	182.370.000	133.260.000	88.840.000	-	678.025.000	100
45	Permai Indah	Koto Baru	MANDIRI	650.294.000		650.294.000	204.303.600	136.202.400	185.872.800	123.915.200	-	650.294.000	100

NO.	NAMA DESA	KECAMATAN	STATUS DESA	PAGU	PAGU_TAMBAHAN	JUMLAH PAGU DAN PAGU TAMBAHAN	REALISASI_1_NON EARMARK	REALISASI_2_NON EAR MARK	REALISASI_1_EARMARK	REALISASI_2_EARMARK	REALISASI_TAMBAHAN	TOTAL PENYALURAN	%
1	2	3	4	5	6	6=(5+6)	7	8	9	10	11	12=(7+8+9+10+11)	13
46	Permantl	Pondok Tinggi	MANDIRI	663.337.000	144.516.000	807.853.000	241.774.200	161.182.800	156.228.000	104.152.000	144.516.000	807.853.000	100
47	Pinggir Air	Kumun Debai	MANDIRI	669.995.000		669.995.000	152.052.000	101.368.000	249.945.000	166.630.000	-	669.995.000	100
48	Pondok Agung	Pondok Tinggi	MANDIRI	919.590.000		919.590.000	296.103.600	197.402.400	255.650.400	170.433.600	-	919.590.000	100
49	Renah Kayu Embun	Kumun Debai	MAJU	1.010.042.000		1.010.042.000	134.187.600	201.281.400	404.743.800	269.829.200	-	1.010.042.000	100
50	Sandaran Galeh	Kumun Debai	MANDIRI	783.607.000		783.607.000	262.935.600	175.290.400	207.228.600	138.152.400	-	783.607.000	100
51	Seberang	Pesisir Bukit	MANDIRI	959.234.000	144.516.000	1.103.750.000	291.766.800	194.511.200	283.773.600	189.182.400	144.516.000	1.103.750.000	100
52	Sembilan	Tanah Kampung	MANDIRI	681.704.000		681.704.000	247.115.400	164.743.600	161.907.000	107.938.000	-	681.704.000	100
53	Simpang Tiga Rawang	Hampanan Rawang	MANDIRI	800.562.000		800.562.000	230.381.400	153.587.600	249.955.800	166.637.200	-	800.562.000	100
54	Srimenanti	Koto Baru	MANDIRI	680.502.000	144.516.000	825.018.000	241.927.200	161.284.800	166.374.000	110.916.000	144.516.000	825.018.000	100
55	Sumur Anyir	Sungai Bungkal	MANDIRI	710.819.000		710.819.000	231.563.400	154.375.600	194.928.000	129.952.000	-	710.819.000	100
56	Sumur Gedang	Pesisir Bukit	MANDIRI	642.877.000	144.516.000	787.393.000	193.509.600	129.006.400	192.216.600	128.144.400	144.516.000	787.393.000	100
57	Sungai Jernih	Pondok Tinggi	MANDIRI	1.053.019.000		1.053.019.000	324.430.800	216.287.200	307.380.600	204.920.400	-	1.053.019.000	100
58	Sungai Liuk	Pesisir Bukit	MANDIRI	958.000.000		958.000.000	166.927.200	111.284.800	407.872.800	271.915.200	-	958.000.000	100
59	Sungai Ning	Sungai Bungkal	MANDIRI	959.539.000		959.539.000	325.404.000	216.936.000	250.319.400	166.879.600	-	959.539.000	100
60	Talang Lindung	Sungai Bungkal	MANDIRI	728.524.000		728.524.000	225.984.600	150.656.400	211.129.800	140.753.200	-	728.524.000	100
61	Tanjung	Hampanan Rawang	MANDIRI	674.843.000	144.516.000	819.359.000	279.661.800	186.441.200	125.244.000	83.496.000	144.516.000	819.359.000	100
62	Tanjung Bunga	Tanah Kampung	MANDIRI	651.071.000		651.071.000	252.486.600	168.324.400	138.156.000	92.104.000	-	651.071.000	100
63	Tanjung Karang	Tanah Kampung	MANDIRI	612.502.000		612.502.000	214.389.600	142.926.400	153.111.600	102.074.400	-	612.502.000	100
64	Tanjung Muda	Hampanan Rawang	MANDIRI	661.050.000		661.050.000	267.081.000	178.054.000	129.549.000	86.366.000	-	661.050.000	100
65	Ulu Air	Kumun Debai	MANDIRI	693.158.000		693.158.000	216.537.600	144.358.400	199.357.200	132.904.800	-	693.158.000	100
<b>JUMLAH</b>				<b>48.391.558.000</b>	<b>2.023.224.000</b>	<b>50.414.782.000</b>	<b>16.480.252.200</b>	<b>11.098.657.800</b>	<b>12.487.588.800</b>	<b>8.325.059.200</b>	<b>2.023.224.000</b>	<b>50.414.782.000</b>	<b>100</b>





# KANTOR AKUNTAN PUBLIK EKO PRASETYO

Izin Usaha KMK RI No. 401/KM.1/2023

## Laporan Auditor Independen

Nomor : 00056/2.1426/AU.5/11/1947-1/1/VI/2025

Kepada Yth.  
**Direktur**  
**RSUD Mayjen H.A. Thalib**  
Di-Tempat

### Opini

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan RSUD Mayjen H.A. Thalib terlampir, yang terdiri dari laporan realisasi anggaran tanggal 31 Desember 2024, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

### Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap RSUD berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/PMK.05/2015 Tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 13 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk



Alamat: Jalan Raja Yamin No.1 - K Lantai 1 RT.25, Kel Selamat, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi 36129



081174-8218



kap.ekoprasetyo@gmail.com



kapekojambi@gmail.com



# KANTOR AKUNTAN PUBLIK EKO PRASETYO

Izin Usaha KMK RI No. 401/KM.1/2023

memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan RSUD dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi RSUD atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan RSUD.

## **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit, kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal RSUD.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

📍 Alamat: Jalan Raja Yamin No.1 - K Lantai 1 RT.25, Kel Selamat, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi 36129

☎ 081174-8218

✉ kap.ekoprasetyo@gmail.com

✉ kapekojambi@gmail.com



# KANTOR AKUNTAN PUBLIK EKO PRASETYO

Izin Usaha KMK RI No. 401/KM.1/2023

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan RSUD untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan RSUD tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

## Hal Lain

Laporan keuangan RSUD Mayjen H.A. Thalib tanggal 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independen lain dengan nomor laporan 00076/2.1322/AU.5/11/1715.1/1/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang menyatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Kantor Akuntan Publik Eko Prasetyo



**Eko Prasetyo, M.Sc, Ak, CA, CPA**  
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1947

04 Juni 2025

📍 Alamat: Jalan Raja Yamin No.1 - K Lantai 1 RT.25, Kel Selamat, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi 36129

☎ 081174-8218

✉ kap.ekoprasetyo@gmail.com

✉ kapekojambi@gmail.com

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MAYJEN H.A. THALIB**  
**KOTA SUNGAI PENUH**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Anggaran 2024	Realisasi 2024 (Audited)	%	Realisasi 2023 (Audited)
<b>PENDAPATAN</b>					
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	3.1.1-a	59.830.000.000,00	36.585.024.798,00	61,15	37.716.137.889,00
Pendapatan BLUD yang Sah	3.1.1-b	170.000.000,00	390.438.418,43	229,67	1.174.419.311,80
Pendapatan APBD	3.1.1-c	10.585.081.000,00	10.448.357.327,09	98,71	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>70.585.081.000,00</b>	<b>47.423.820.543,52</b>	<b>67,19</b>	<b>38.890.557.200,80</b>
<b>BELANJA</b>					
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	3.1.2-a	527.430.000,00	444.430.000,00	84,26	1.163.885.000,00
Belanja Barang dan Jasa	3.1.2-b	50.160.570.000,00	36.781.178.567,87	73,33	42.792.294.958,02
Jumlah Belanja Operasi		<b>50.688.000.000,00</b>	<b>37.225.608.567,87</b>	<b>157,59</b>	<b>43.956.179.958,02</b>
Belanja Modal					
Belanja Tanah	3.1.2	-	-		-
Belanja Peralatan dan Mesin	3.1.2-c	15.861.419.970,00	7.390.099.284,00	46,59	1.804.150.374,00
Belanja Gedung dan Bangunan	3.1.2-d	4.300.000.000,00	3.689.832.320,15	85,81	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.1.2-e	1.086.750.000,00	1.067.861.956,94	98,26	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.1.2-f	800.000.000,00	-		-
Jumlah Belanja Modal		<b>22.048.169.970,00</b>	<b>12.147.793.561,09</b>	<b>230,66</b>	<b>1.804.150.374,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>72.736.169.970,00</b>	<b>49.373.402.128,96</b>	<b>388,25</b>	<b>45.760.330.332,02</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT)</b>		<b>(2.151.088.970,00)</b>	<b>(1.949.581.585,44)</b>	<b>-</b>	<b>(6.869.773.131,22)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI</b>					
Penerimaan Pinjaman		-	-		-
Penerimaan dari Divestasi		-	-		-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain		-	-		-
Penggunaan SILPA		2.151.088.970,33	2.151.088.970,33		9.020.862.101,55
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI</b>		<b>2.151.088.970,33</b>	<b>2.151.088.970,33</b>		<b>9.020.862.101,55</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI</b>					
Pembayaran Pokok Pinjaman		-	-		-
Pengeluaran Penyertaan Modal		-	-		-
Pemberian Pinjaman kepada Pihak Lain		-	-		-
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
<b>PEMBIAYAAN NETO</b>		<b>2.151.088.970,33</b>	<b>2.151.088.970,33</b>		<b>9.020.862.101,55</b>
<b>SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)</b>		<b>-</b>	<b>201.507.384,89</b>	<b>-</b>	<b>2.151.088.970,33</b>

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MAYJEN H.A. THALIB  
KOTA SUNGAI PENUH  
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

Per 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2024 (Audited)	2023 (Audited)
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL	3.2.1	2.151.088.970,33	9.020.862.101,55
PENGGUNAAN SAL	3.2.1	(2.151.088.970,33)	(9.020.862.101,55)
<b>SUB JUMLAH</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	3.2.2	201.507.384,89	2.151.088.970,33
<b>SUB JUMLAH</b>		<b>201.507.384,89</b>	<b>2.151.088.970,33</b>
KOREKSI KESALAHAN PEMBUKUAN TAHUN SEBELUMNYA	3.2.2	-	-
LAIN-LAIN	3.2.2	-	-
<b>SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR</b>		<b>201.507.384,89</b>	<b>2.151.088.970,33</b>

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan  
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MAYJEN H.A. THALIB**

**KOTA SUNGAI PENUH**

**NERACA**

Per 31 Desember 2024 dan 2023

*(Dinyatakan dalam Rupiah)*

<b>ASET</b>	<i>Catatan</i>	2024 (Audited)	2023 (Audited)
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas pada BLUD		201.507.384,89	2.151.088.970,33
Kas Lainnya	3.3.1	16.492.372,10	3.520.300,10
Piutang Dari Kegiatan Operasional BLUD		6.275.471.153,00	116.338.000,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	3.3.2	(60.890.276,50)	(58.169.000,00)
Persediaan	3.3.3	4.511.454.846,41	3.446.673.081,85
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>10.944.035.479,90</b>	<b>5.659.451.352,28</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Aset Tetap			
<i>(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023)</i>	3.3.4	36.128.794.299,09	29.052.917.602,00
Aset Lainnya			
<i>(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023)</i>	3.3.5	30.400.673.263,60	30.400.673.263,60
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>		<b>66.529.467.562,69</b>	<b>59.453.590.865,60</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>77.473.503.042,59</b>	<b>65.113.042.217,88</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang Pihak Ketiga		12.972.072,00	-
Utang Beban		14.843.715.899,58	8.885.652.556,06
Utang Belanja Pegawai	3.3.6	-	-
Utang Belanja Barang dan Jasa		-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya		3.520.300,10	5.610.400,20
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>14.860.208.271,68</b>	<b>8.891.262.956,26</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>14.860.208.271,68</b>	<b>8.891.262.956,26</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	3.3.7	62.613.294.770,91	56.221.779.261,62
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>62.613.294.770,91</b>	<b>56.221.779.261,62</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>77.473.503.042,59</b>	<b>65.113.042.217,88</b>

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MAYJEN H.A. THALIB**

**KOTA SUNGAI PENUH**

**LAPORAN OPERASIONAL**

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

*(Dinyatakan dalam Rupiah)*

Uraian	Catatan	2024 (Audited)	2023 (Audited)
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN OPERASIONAL</b>			
Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat	3.4.1-a	42.744.157.951,00	37.716.137.889,00
Pendapatan BLUD yang sah	3.4.1-b	390.448.425,65	1.174.419.311,80
Pendapatan APBN/APBD	3.4.1-c	10.448.357.327,09	30.171.916.817,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>53.582.963.703,74</b>	<b>69.062.474.017,80</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Pegawai	3.4.2-a	444.430.000,00	23.771.664.561,00
Beban Barang	3.4.2-b	5.452.695.858,06	1.637.772.625,00
Beban Jasa	3.4.2-c	17.447.274.217,34	15.538.002.625,23
Beban Persediaan	3.4.2-d	14.246.787.148,13	16.456.938.374,10
Beban Langganan Daya dan Jasa	3.4.2-e	1.095.428.516,00	-
Beban Pemeliharaan	3.4.2-f	1.000.743.646,00	809.192.196,00
Beban Perjalanan Dinas	3.4.2-g	473.160.185,00	472.617.940,00
Beban Uang dan / Atau Jasa Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.4.2-h	653.922.561,00	893.343.980,00
Beban Penyisihan Piutang	3.4.2-i	2.721.276,51	58.169.000,00
Beban Penyusutan	3.4.2-j	6.938.394.291,00	6.065.086.054,00
Beban Amortisasi	3.4.2-k	-	25.430.052,20
Beban Lain-lain	3.4.2-l	1.762.500,00	2.250.000,00
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>		<b>47.757.320.199,04</b>	<b>65.730.467.407,53</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>5.825.643.504,70</b>	<b>3.332.006.610,27</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus/Defisit Aset Nonlancar (Kerugian) Penurunan Nilai Aset		(20.913.300,96)	(112.347.983,30)
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Penyetoran Ke Kas Daerah		-	-
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>(20.913.300,96)</b>	<b>(112.347.983,30)</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>5.804.730.203,74</b>	<b>3.219.658.626,98</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL</b>		<b>5.804.730.203,74</b>	<b>3.219.658.626,98</b>

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MAYJEN H.A. THALIB**  
**KOTA SUNGAI PENUH**  
**LAPORAN ARUS KAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023  
(Dinyatakan dalam Rupiah)

Uraian	2024 (Audited)	2023 (Audited)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	36.585.024.798,00	37.716.137.889,00
Pendapatan BLUD yang Sah	390.438.418,43	1.174.419.311,80
Pendapatan APBD	10.448.357.327,09	-
Jumlah Arus Kas Masuk	<u>47.423.820.543,52</u>	<u>38.890.557.200,80</u>
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	444.430.000,00	1.163.885.000,00
Belanja Barang dan Jasa	35.212.589.866,87	41.341.098.742,02
Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	1.095.428.516,00	978.578.276,00
Pembayaran Perjalanan Dinas	473.160.185,00	472.617.940,00
Jumlah Arus Kas Keluar	<u>37.225.608.567,87</u>	<u>43.956.179.958,02</u>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b><u>10.198.211.975,65</u></b>	<b><u>(5.065.622.757,22)</u></b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
Arus Kas Masuk		
Penjualan atas Aset Tetap	-	-
Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	-	-
Penjualan atas Aset Lainnya	-	-
Penerimaan dari Divestasi	-	-
Penerimaan Penjualan Investasi dalam Bentuk Sekuritas	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	<u>-</u>	<u>-</u>
Arus Kas Keluar		
Perolehan Peralatan dan Mesin	7.390.099.284,00	1.804.150.374,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	3.689.832.320,15	-
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.067.861.956,94	-
Perolehan Aset Tetap Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	<u>12.147.793.561,09</u>	<u>1.804.150.374,00</u>
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>	<b><u>(12.147.793.561,09)</u></b>	<b><u>(1.804.150.374,00)</u></b>

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan  
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MAYJEN H.A. THALIB**

**KOTA SUNGAI PENUH**

**LAPORAN ARUS KAS - *Lanjutan***

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

*(Dinyatakan dalam Rupiah)*

Uraian	2024	2023
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>(Audited)</b>	<b>(Audited)</b>
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pinjaman	-	-
R/K Penerimaan	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
Arus Kas Keluar		
Pengembalian Dana	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	-	-
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pihak Ketiga		
R/K Penerimaan		
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Pihak Ketiga		-
R/K Pengeluaran		-
Jumlah Arus Kas Keluar	-	-
<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(1.949.581.585,44)</b>	<b>(6.869.773.131,22)</b>
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	2.151.088.970,33	9.020.862.101,55
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>201.507.384,89</b>	<b>2.151.088.970,33</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN TERDIRI DARI :</b>		
Kas	201.507.384,89	2.151.088.970,33
Bank	-	-
Investasi Jangka Pendek	-	-
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>201.507.384,89</b>	<b>2.151.088.970,33</b>

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) MAYJEN H.A. THALIB**  
**KOTA SUNGAI PENUH**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023

(Dinyatakan dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Saldo Awal (Audited)	Saldo Akhir (Audited)
<b>Tahun 2024</b>			
<b>Ekuitas Awal</b>			
Ekuitas Awal		54.902.832.976,43	56.221.779.261,62
RK PPKD		-	-
Mutasi Kendaraan Roda Empat dari BAKEUDA ke RSUD MHAT	3.3.7	288.825.000,00	-
Mutasi Persediaan dari Instalasi Farmasi dan KB		477.888.462,30	584.695.251,98
Koreksi Ekuitas lainnya		(235.306,84)	2.090.053,57
Mutasi Kendaraan Roda Empat dari RSUD MHAT		(497.900.000,00)	-
Koreksi Akumulasi Penyusutan		(6.286.607,00)	-
Koreksi Penyisihan Piutang		(11.914.919,92)	-
<b>Jumlah Ekuitas Awal</b>		<b>55.153.209.604,97</b>	<b>56.808.564.567,17</b>
<b>Ekuitas Tahun Berjalan</b>			
Ekuitas Hibah		-	-
<b>Jumlah Ekuitas Tahun Berjalan</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Surplus (Defisit) LO Tahun Berjalan</b>	3.3.7	<b>3.219.658.626,98</b>	<b>5.804.730.203,74</b>
<b>Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan</b>		<b>(2.151.088.970,33)</b>	<b>-</b>
<b>Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2024</b>		<b>56.221.779.261,62</b>	<b>62.613.294.770,91</b>

*Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan  
dari laporan keuangan secara keseluruhan*



# KANTOR AKUNTAN PUBLIK EKO PRASETYO

Izin Usaha KMK RI No. 401/KM.1/2023

## Laporan Auditor Independen

Nomor : 00045/2.1426/AU.2/11/1947-1/1/IV/2025

Kepada Yth:

Dewan Pengawas dan Direksi

**Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh**

### Opini

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh terlampir, yang terdiri dari Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan, dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

### Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.



# KANTOR AKUNTAN PUBLIK EKO PRASETYO

Izin Usaha KMK RI No. 401/KM.1/2023

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

## **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit, kami juga :

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau



# KANTOR AKUNTAN PUBLIK EKO PRASETYO

Izin Usaha KMK RI No. 401/KM.1/2023

kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

## Hal Lain

Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Air Minum Tirta Khayangan Kota Sungai Penuh untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar atas laporan keuangan tersebut dengan nomor : 00271/2.1308/AU.2/11/1253-2/1/III/2024 tanggal 5 Maret 2024.

Kantor Akuntan Publik Eko Prasetyo



**Eko Prasetyo, M.Sc, Ak, CA, CPA**

Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1947



29 April 2025

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)**  
**AIR MINUM TIRTA KHAYANGAN KOTA SUNGAI PENUH**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**  
(Dalam Rupiah)

ASET	Catatan	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
		<i>Audited</i>	<i>Audited</i>
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas Kecil	03	10.000.000,00	10.000.000,00
Kas Bank	03	1.236.406.966,00	980.256.289,00
Deposito	03	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
Piutang Usaha	04	3.514.381.548,00	3.086.922.050,00
Piutang Lain-Lain	05	10.000.000,00	61.615.000,00
Persediaan	06	317.414.957,00	341.354.013,00
Beban Dibayar Dimuka	07	-	-
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>6.588.203.471,00</b>	<b>5.980.147.352,00</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Aset Tetap (Nilai Buku)	08	52.909.396.120,91	55.850.003.193,00
Aset Lain-Lain (Nilai Buku)	09	199.029.177,00	301.663.341,00
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>		<b>53.108.425.297,91</b>	<b>56.151.666.534,00</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>59.696.628.768,91</b>	<b>62.131.813.886,00</b>
<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Hutang Usaha	10	215.365.728,00	394.847.972,00
Pembayaran Dimuka	11	-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		<b>215.365.728,00</b>	<b>394.847.972,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>215.365.728,00</b>	<b>394.847.972,00</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal Penyertaan Pemerintah Kota Sungai Penuh	12	28.001.109.033,00	28.001.109.033,00
Modal Pemerintah yang belum ditetapkan Statusnya	12	47.027.345.778,00	47.027.345.778,00
Saldo laba		(15.547.191.770,09)	(13.291.488.897,00)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>59.481.263.040,91</b>	<b>61.736.965.914,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>59.696.628.768,91</b>	<b>62.131.813.886,00</b>

*catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)**  
**AIR MINUM TIRTA KHAYANGAN KOTA SUNGAI PENUH**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**  
(Dalam Rupiah)

	Catatan	Per 31 Des 2024	Per 31 Des 2023
		<i>Audited</i>	<i>Audited</i>
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Air	14	16.302.779.800,00	15.714.383.400,00
Pendapatan Non Air	14	1.158.599.155,00	1.086.037.658,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>17.461.378.955,00</b>	<b>16.800.421.058,00</b>
<b>BEBAN USAHA</b>			
Beban Pegawai	15	10.044.040.099,00	9.189.363.580,00
Beban Pemeliharaan	15	905.292.535,00	1.183.328.744,00
Beban Pemakaian Bahan Kimia	15	1.430.842.040,00	1.396.849.356,00
Beban Listrik	15	1.332.673.493,00	1.388.808.298,00
Beban Bahan Bakar	15	92.710.750,00	106.212.468,00
Beban Penyusutan	15	4.102.311.277,44	3.993.599.561,00
Beban Operasi Lainnya	15	1.523.352.537,00	1.263.721.274,00
<b>JUMLAH BEBAN USAHA</b>		<b>19.431.222.731,44</b>	<b>18.521.883.281,00</b>
<b>LABA USAHA</b>		<b>(1.969.843.776,44)</b>	<b>(1.721.462.223,00)</b>
<b>PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>			
Pendapatan Lain-Lain	16	36.339.188,50	37.938.613,00
Beban Lain-Lain	16	322.198.285,15	279.655.429,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN</b>		<b>(285.859.096,65)</b>	<b>(241.716.816,00)</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		<b>(2.255.702.873,09)</b>	<b>(1.963.179.039,00)</b>
Pajak Penghasilan		-	-
<b>LABA BERSIH</b>		<b>(2.255.702.873,09)</b>	<b>(1.963.179.039,00)</b>

*catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)**  
**AIR MINUM TIRTA KHAYANGAN KOTA SUNGAI PENUH**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**Untuk Periode Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2024**  
**Dengan Angka Perbandingan Tahun 2023**

Keterangan	Modal Pemerintah Kota	Modal Pemerintah YBDS	Saldo Laba	Jumlah
Saldo Per 01 Januari 2023	28.001.109.033,00	47.027.345.778,00	(12.106.607.883,00)	62.921.846.928,00
Penambahan (pengurangan)	-	-	-	-
Koreksi Laba Ditahan	-	-	778.298.024,00	778.298.024,00
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	-	-	(1.963.179.039,00)	(1.963.179.039,00)
<b>Saldo Per 31 Desember 2023</b>	<b>28.001.109.033,00</b>	<b>47.027.345.778,00</b>	<b>(13.291.488.897,00)</b>	<b>61.736.965.914,00</b>
Penambahan (pengurangan)	-	-	-	-
Setoran dividen ke Pemkot	-	-	-	-
Tantiem	-	-	-	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	-	-	(2.255.702.873,09)	(2.255.702.873,09)
<b>Saldo 31 Desember 2024</b>	<b>28.001.109.033,00</b>	<b>47.027.345.778,00</b>	<b>(15.547.191.770,09)</b>	<b>59.481.263.040,91</b>

*catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH (PERUMDA)**  
**AIR MINUM TIRTA KHAYANGAN KOTA SUNGAI PENUH**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023**  
**(Dalam Rupiah)**

	<b>Per 31 Des 2024</b>	<b>Per 31 Des 2023</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL</b>	<b><i>Audited</i></b>	<b><i>Audited</i></b>
Laba (Rugi) tahun berjalan	(2.255.702.873,09)	(1.963.179.039,00)
Koreksi Laba	-	778.298.024,00
Penyesuaian untuk transaksi yang tidak mempengaruhi arus kas:		
Penyusutan Aset Tetap	3.964.677.113,36	3.198.962.437,00
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	137.634.164,00	181.200.000,00
Beban penyisihan piutang	318.264.977,00	-
(Kenaikan) Penurunan Perubahan Modal Kerja		
Piutang Usaha	(745.724.475,00)	(548.825.900,00)
Persediaan	23.939.056,00	126.564.995,00
Piutang Lainnya	51.615.000,00	(61.615.000,00)
Beban Dibayar di Muka	-	-
Kenaikan (Penurunan) Hutang Operasional		
Hutang Usaha	(179.482.244,00)	78.265.223,00
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasional</b>	<b>1.315.220.718,27</b>	<b>1.789.670.740</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>		
(Kenaikan) Penurunan dari Aktivitas Investasi		
Aset Tetap	(1.024.070.041,27)	(188.463.896,00)
Aset Lain-Lain	(35.000.000,00)	-
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(1.059.070.041,27)</b>	<b>(188.463.896,00)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>		
Kenaikan (Penurunan) dari Kegiatan Pendanaan		
Penyertaan Modal	-	(1.172.267.179,00)
<b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>-</b>	<b>(1.172.267.179,00)</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih</b>	<b>256.150.677,00</b>	<b>428.939.665,00</b>
<b>Kas dan Setara Kas Awal Tahun</b>	<b>2.490.256.289,00</b>	<b>2.061.316.624,00</b>
<b>Kas dan Setara Kas Akhir Tahun</b>	<b>2.746.406.966,00</b>	<b>2.490.256.289,00</b>

*catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari laporan keuangan secara keseluruhan*